



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2021 - 2026**

**Badan Penelitian Pengembangan dan
Perencanaan Daerah (BAPPEDA)**





BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Angka 19 penambahan dasar hukum Angka 20 penambahan dasar hukum Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, TNI, POLRI, kejaksaan akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan

melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
12. Rencana Kerja pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
17. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa

yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
23. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
24. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
25. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
26. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/Program/Sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

27. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu kegiatan, Program atau Sasaran dan Tujuan dalam bentuk keluaran, hasil dan dampak.
28. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
29. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu Program.
30. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa Program.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2021-2026 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
 - a. Visi dan Misi Bupati terpilih; dan
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan pembangunan dan Program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing Daerah.

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Memuat gambaran umum tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menguraikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan keselarasan RPJMD dengan RPJPD, RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJMN.

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

Memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat Daerah.

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan beserta target capaiannya (indikator makro, indikator kinerja utama, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing Daerah).

BAB IX : PENUTUP

Memuat hal-hal yang perlu dijadikan perhatian yaitu pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

- (2) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENDANAAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Pendanaan pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pagu indikatif pada masing-masing Perangkat Daerah, yang disesuaikan dengan pagu indikatif dalam RPJMD untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kemampuan anggaran tahun berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang RKPD.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) RPJMD tahun 2021-2026 dapat dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan RPJMD Tahun 2026-2031 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya.
- (2) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 10 Desember 2021

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021
NOMOR 88

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 5,43/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I UMUM

Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk kabupaten muda namun dengan segala posisi strategis yang tidak hanya penting dalam kerangka pembangunan daerah namun juga dalam kerangka pembangunan nasional. Sebagai salah satu kabupaten terluar dan menyandang status kabupaten perbatasan dengan sumberdaya kelautan yang begitu besar. Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan wilayah sumatera yang mencakup kegiatan prioritas pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan strategis, pengembangan kawasan perkotaan, pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi, serta penataan kelembagaan dan keuangan daerah dalam RPJMN 2020-2024.

Berkaitan dengan peran dan fungsinya Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas dituntut terus berbenah diri melalui pembangunan daerah untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan dasar, seperti infrastruktur dasar, penataan wilayah, masalah transportasi, penyediaan fasilitas publik dan faktor-faktor lainnya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Kurun waktu RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas memuat visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJMD menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah menggambarkan arah pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yaitu Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah yang disingkat ANAMBAS BERMADAH 2. Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan misi pembangunan jangka menengah yaitu: (1) Membangun sumber daya manusia yang kompetitif, sehat dan tangguh, berbudaya serta berakhlakul karimah, (2) Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata, (3) Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi, (4) Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah. Misi ini dijabarkan kedalam tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2021 NOMOR 89

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Dasar Penyusunan RPJMD	I - 5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I - 11
1.3.1 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025	I - 13
1.3.2 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RPJMN 2020-2024	I - 14
1.3.3 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RPJPD Kepulauan Riau Tahun 2005-2025	I - 14
1.3.4 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJMD Daerah Sekitar	I - 14
1.3.5 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Dokumen Perencanaan Sektoral	I - 15
1.4 Maksud dan Tujuan	I - 16
1.5 Sistematika Penulisan	I - 16
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II - 1
2.1.1 Karakteristik Lokasi Dan Wilayah	II - 3
2.1.2 Wilayah Rawan Bencana	II - 21
2.1.3 Demografi	II- 22
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 25
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II - 25
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II - 34
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II - 48
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II - 49
2.3.1 Fokus layanan Urusan Pemerintah Wajib	II - 49

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II - 83
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	II - 116
2.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan	II - 139
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II - 148
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II - 149
2.4.2 Tipologi Klassen di Kabupaten Kepulauan Anambas	II - 160
2.4.3 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II - 167
2.4.4 Fokus Iklim Berinvestasi	II - 170
2.4.5 Fokus Sumber Daya Manusia	II - 171
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	III - 1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III - 1
3.1.1 Pendapatan Daerah	III - 4
3.1.2 Belanja Daerah	III - 13
3.1.3 Neraca Daerah	III - 22
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III - 28
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III - 29
3.2.2 Analisis Pembiayaan	III - 30
3.3 Kerangka Pendanaan	III - 34
3.3.1 Pendapatan	III - 35
3.3.2 Belanja	III - 36
3.3.3 Surplus (Defisit)	III - 37
3.3.4 Pembiayaan	III - 37
3.3.5 Perhitungan Kerangka Pendanaan	III - 41
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV - 1
4.1 Permasalahan Pembangunan	IV - 1
4.1.1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV - 2
4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	IV - 36
4.2 Isu Strategis	IV - 49
4.2.1 Isu Internasional	IV - 50
4.2.2 Isu Nasional	IV - 55

4.2.3. Isu Daerah Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Kepulauan Riau	IV - 76
4.2.4. Isu strategis Daerah	IV - 78
4.2.5. Isu strategis Kabupaten Kepulauan Anambas	IV - 80

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V- 1
--	-------------

5.1. Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026	V - 1
5.2. Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026	V - 3
5.3. Tujuan dan Sasaran	V - 5
5.4. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas, RPJPD Provinsi Kepulauan Riau, dan RPJMN	V - 10
5.4.1. Keselarasan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025	V-10
5.4.2 Keselarasan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025	V - 11
5.4.3 Keselarasan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	V - 13
5.4.4 Keselarasan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024	V - 15

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI - 1
--	---------------

6.1 Strategi	VI - 1
6.2. Arah Kebijakan Tahunan	VI - 13
6.3. Arah Pengembangan Wilayah	VI - 28
6.3.1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang	VI - 28
6.3.2. Rencana Struktur Ruang	VI - 33
6.3.3. Rencana Pola Ruang	VI - 35
6.4. Program Pembangunan Daerah	VI - 36
6.4.1. Keterkaitan Fokus Pembangunan Kepala Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020	VI - 36

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN	
---	--

DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII - 1
7.1. Kerangka Pendanaan	VII - 1
7.2. Program Perangkat Daerah	VII - 5

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII - 1
8.1 Penetapan Indikator Makro dan Indikator Kinerja Utama	VIII - 1
8.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	VIII - 13
8.3. Aspek Pelayanan Umum	VIII - 17
8.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar	VIII - 17
8.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar	VIII - 24
8.3.3 Layanan Urusan Pilihan	VIII - 28
8.3.4 Layanan Penunjang Urusan	VIII - 31
8.4. Aspek Daya Saing Daerah	VIII - 33
BAB IX PENUTUP	IX - 1
9.1. Pedoman Transisi	IX - 1
9.2. Kaidah Pelaksanaan	IX - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Batas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, 2019	II - 2
Tabel 2. 2 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020	II - 5
Tabel 2. 3 Jarak wilayah Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi.....	II - 9
Tabel 2. 4 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2020	II - 9
Tabel 2. 5 Jumlah Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2020	II - 10
Tabel 2. 6 Jumlah Curah Hujan dan Penyinaran Matahari per Bulan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2020	II - 14
Tabel 2. 7 Suhu per Bulan Kabupaten Kepulauan Anambas 2020	II - 16
Tabel 2. 8 Kelembaban per Bulan Kabupaten Kepulauan Anambas 2020	II - 17
Tabel 2. 9 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020	II - 24
Tabel 2. 10 Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Kabupaten Kepulauan Anambas (Dalam Miliar Rupiah)	II - 28
Tabel 2. 11 Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Anambas (Dalam Persen).....	II - 30
Tabel 2. 12 Produk Domestik Bruto Berdasarkan Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Persen).....	II - 31
Tabel 2. 13 Indeks Gini Kabupaten atau Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	II - 34
Tabel 2. 14 Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Tahun 2016-2020	II - 40
Tabel 2. 15 Rata-Rata Upah Bersih Sebulan Pekerja Informal Dan Formal Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2016-2020.....	II - 41
Tabel 2. 16 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten atau Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	II - 43
Tabel 2. 17 Angka Melek Huruf Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020 (dalam persen).....	II - 44
Tabel 2. 18 Jumlah Sarana Prasarana Olahraga 2016-2020	II - 49
Tabel 2. 19 Rasio Murid-Guru Kabupaten Kepulauan Anambas	II - 55
Tabel 2. 20 Kondisi Fasilitas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020	II - 55
Tabel 2. 21 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020	II - 57

Tabel 2. 22 Capaian Kinerja SPM Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020	II - 57
Tabel 2. 23 Persentase Tenaga Kesehatan Penolong Persalinan (Dalam Persen)	II - 58
Tabel 2. 24 Data layanan dan perawatan ibu hamil di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Jiwa).....	II - 58
Tabel 2. 25 Data layanan dan perawatan bayi di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Jiwa)	II - 59
Tabel 2. 26 Data Angka Kehamilan, Kelahiran Bayi, Kematian Ibu dan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Jiwa)	II - 60
Tabel 2. 27 Perkembangan Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020 (Dalam Unit).....	II - 60
Tabel 2. 28 Data Kesehatan Masyarakat Jumlah Penderita Penyakit Menular di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Jiwa)	II - 61
Tabel 2. 29 Data Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (jiwa)	II - 61
Tabel 2. 30 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020	II - 62
Tabel 2. 31 Capaian Kinerja Penanganan Balita Gizi Buruk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020.....	II - 64
Tabel 2. 32 Capaian Kinerja Penanganan Balita Gizi Kurang di KKA tahun 2016-2020	II - 64
Tabel 2. 33 Capaian Kinerja Posyandu di KKA tahun 2016-2020.....	II - 65
Tabel 2. 34 Capaian Indikator SPM Urusan Kesehatan di KKA 2016-2020.....	II - 66
Tabel 2. 35 Panjang Jalan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintah tahun 2016-2020 (Dalam KM)	II - 67
Tabel 2. 36 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan tahun 2016-2020 (Dalam KM).....	II - 68
Tabel 2. 37 Jumlah Jembatan dan Kondisi tahun 2016-2020 (Dalam Unit)	II - 68
Tabel 2. 38 Jaringan Irigasi/Pengairan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2020.....	II - 69
Tabel 2. 39 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020(unit)	II - 69
Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di KKA 2016-2020	II - 70
Tabel 2. 41 Indikator Perumahan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017-2020	II - 72
Tabel 2. 42 Persentase Rumah tinggal bersanitasi dan Akses Air Minum Layak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015-2019	II - 73
Tabel 2. 43 Rumah Tangga Memiliki Air Bersih tahun 2016-2020	II - 73

Tabel 2. 44 Sistem Drainase di KKA Tahun 2016-2020.....	II - 74
Tabel 2. 45 Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020	II - 75
Tabel 2. 46 Sistem Pengolahan Air Limbah di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020	II - 75
Tabel 2. 47 Jumlah dan Luas Tempat Pemakaman Umum Tahun 2018	II- 76
Tabel 2. 48 Jumlah dan Luas Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018	II - 76
Tabel 2. 49 Capaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2016-2020.....	II - 77
Tabel 2. 50 Capaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2016-2020.....	II - 77
Tabel 2. 51 Daftar Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015-2020	II - 78
Tabel 2. 52 Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2020	II - 79
Tabel 2. 53 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 ..	II - 79
Tabel 2. 54 Capaian Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020	II - 80
Tabel 2. 55 Capaian SPM Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Serta Penanggulangan Bencana Kebakaran KKA Tahun 2016-2020	II - 80
Tabel 2. 56 Jumlah dan Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2018	II - 81
Tabel 2. 57 Banyaknya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menurut Jenisnya di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018.....	II - 82
Tabel 2. 58 Capaian Indikator SPM Sosial KKA 2016-2020.....	II - 82
Tabel 2. 59 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan Kerja Tahun 2016- 2020.....	II - 84
Tabel 2. 60 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Tahun 2020	II - 84
Tabel 2. 61 Rata-Rata Upah Bersih Sebulan Pekerja Informal Dan Formal Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2018-2020.....	II - 85
Tabel 2. 62 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja di KKA 2016-2020.....	II - 85
Tabel 2. 63 Distribusi Pegawai ASN menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 - 2020	II - 86
Tabel 2. 64 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di KKA 2016-2020.....	II - 87
Tabel 2. 65 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020 (dalam persen)	II - 88
Tabel 2. 66 Cadangan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020 (dalam persen).....	II - 88
Tabel 2. 67 Kecukupan Konsumsi Kalori per kapita per hari nilai AKG 2.000 kkl/kap/hr Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020.....	II - 89

Tabel 2. 68 Produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan Protein di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020	II - 90
Tabel 2. 69 Populasi Ternak dan Unggas Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018-2020 (ekor)	II - 91
Tabel 2. 70 Produksi Daging Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak (kg) di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018-2020	II - 92
Tabel 2. 71 Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Menurut Kecamatan (kg) di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018-2020	II - 93
Tabel 2. 72 Capaian Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020	II - 93
Tabel 2. 73 Luas Bidang Status Kepemilikan Tanah Dirinci Menurut Hak Milik dan Kecamatan (M ²) tahun 2019.....	II - 93
Tabel 2. 74 Jumlah Bidang Status Kepemilikan Tanah Dirinci Menurut Hak Milik dan Kecamatan tahun 2019	II - 94
Tabel 2. 75 Perizinan Bangunan Kabupaten Kepulauan Anambas	II - 95
Tabel 2. 76 Capaian Penanganan sampah Kabupaten Kepulauan Anambas 2015 - 2019	II - 96
Tabel 2. 77 Jumlah Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan tahun 2018.....	II - 96
Tabel 2. 78 Jumlah Kegiatan Adipura Desa dan Adiwiyata tahun 2018	II - 97
Tabel 2. 79 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil Selama Periode 2016-2020	II - 99
Tabel 2. 80 Status Perkembangan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017.....	II- 102
Tabel 2. 81 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020	II - 103
Tabel 2. 82 Data Akseptor KB di KKA Tahun 2016-2019	II - 103
Tabel 2. 83 Jumlah Fasilitas Keluarga Berencana Tahun 2016-2020.....	II - 104
Tabel 2. 84 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020	II - 104
Tabel 2. 85 Jumlah dan Status Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Kecamatan tahun 2018	II - 105
Tabel 2. 86 Jumlah lalu lintas penumpang yang melewati Pelabuhan Tarempa Tahun 2016 - 2019	II - 105
Tabel 2. 87 Data Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2018.....	II - 106
Tabel 2. 88 Persentase Persebaran Titik Internet di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2018.....	II - 107
Tabel 2. 89 Data Desa Yang Belum Terakses Sinyal Telekomunikasi	II - 107

Tabel 2. 90 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020	II - 108
Tabel 2. 91 Jumlah koperasi dengan kepemilikan mandiri Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2020.....	II - 109
Tabel 2. 92 Jumlah UMKM Berdasarkan Bidang Usahanya Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2020.....	II - 110
Tabel 2. 93 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal di KKA 2016-2020	II - 112
Tabel 2. 94 Realisasi Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2019	II - 112
Tabel 2. 95 Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga di KKA Tahun 2016-2020	II - 113
Tabel 2. 96 Capaian Kinerja Urusan Statistik di KKA Tahun 2016-2020.....	II - 113
Tabel 2. 97 Capaian Kinerja Urusan Persandian di KKA Tahun 2016-2020	II - 114
Tabel 2. 98 Jumlah Sanggar Kesenian Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020	II - 115
Tabel 2. 99 Capaian Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 - 2020	II - 117
Tabel 2. 100 Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Komoditi Tahun 2020 (Dalam Ribu Rupiah).....	II - 117
Tabel 2. 101 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Komoditi (Ton), 2020	II - 119
Tabel 2. 102 Capaian Kinerja Urusan Perikanan di KKA Tahun 2016-2020	II - 120
Tabel 2. 103 Jumlah Kunjungan Wisata di KKA Tahun 2016-2020.....	II - 122
Tabel 2. 104 Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Kepulauan Anambas 2016 – 2020.....	II - 122
Tabel 2. 105 Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2020	II - 124
Tabel 2. 106 Jumlah Penginapan/Losmen Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2015-2020	II - 125
Tabel 2. 107 Jumlah Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kabupaten Kepulauan Anambas	II - 125
Tabel 2. 108 Capaian Sektor Pertanian Kabupaten Kepulauan Anambas 2015 - 2020	II- 126
Tabel 2. 109 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Golongan Luas Lahan yang dikuasai	II - 126
Tabel 2. 110 Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020	II - 127
Tabel 2. 111 Nilai Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2020.....	II - 128

Tabel 2. 112 Luas Lahan Hortikultura di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2018	II - 128
Tabel 2. 113 Luas Panen Buah dan Sayur Semusim di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2017-2020	II - 129
Tabel 2. 114 Luas Panen Tanaman Biofarma di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016 – 2020	II - 129
Tabel 2. 115 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2020	II - 130
Tabel 2. 116 Produksi Padi 1 dan Beras Menurut Kecamatan (ha) Kab. Kepulauan Anambas, 2016-2020.....	II - 130
Tabel 2. 117 Produksi Tanaman Cabai dan Petai menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kuintal) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018-2019.....	II - 131
Tabel 2. 118 Produksi Buah dan Sayur Semusim di KKA Tahun 2016-2020.....	II - 131
Tabel 2. 119 Produksi Tanaman Biofarma di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016 – 2020	II - 132
Tabel 2. 120 Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018-2020.....	II - 132
Tabel 2. 121 Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman (kuintal) di KKA Tahun 2017-2020.....	II - 133
Tabel 2. 122 Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020	II - 134
Tabel 2. 123 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ton) di KKA Tahun 2016-2020	II - 135
Tabel 2. 124 Capaian Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020	II - 135
Tabel 2. 125 Capaian Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Kepulauan Anambas 2015-2019	II - 136
Tabel 2. 126 Nilai Ekspor Menurut Komoditas Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020 (US\$).....	II - 136
Tabel 2. 127 Nilai Impor Menurut Komoditas Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020 (US\$).....	II - 137
Tabel 2. 128 Jumlah UMKM Per-Bidang Usaha per 31 Desember Tahun 2016-2020.....	II - 138
Tabel 2. 129 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi di KKA 2016-2020.....	II - 139
Tabel 2. 130 Evaluasi terhadap 19 Perangkat Daerah tahun 2018.....	II - 140
Tabel 2. 131 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020	II - 141
Tabel 2. 132 Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas 2018-2019.....	II - 141

Tabel 2. 133 Capaian Kinerja Urusan Keuangan di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020	II - 142
Tabel 2. 134 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan Tahun 2016-2020	II - 142
Tabel 2. 135 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020.....	II - 143
Tabel 2. 136 Capaian Kinerja Kepegawaian di Kabupaten Kepulauan Anambas 2017-2020	II - 143
Tabel 2. 137 Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017-2020.....	II - 144
Tabel 2. 138 Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014-2020	II - 145
Tabel 2. 139 Capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020.....	II - 145
Tabel 2. 140 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020.....	II - 146
Tabel 2. 141 Capaian Kinerja Urusan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020.....	II - 146
Tabel 2. 142 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020	II - 148
Tabel 2. 143 LQ Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011, 2015 dan 2020.....	II - 154
Tabel 2. 144 LQ Kabupaten Kepulauan Anambas tanpa Pertambangan dan Penggalian Tahun 2011, 2015 dan 2020	II - 155
Tabel 2. 145 <i>Shift Share</i> Kabupaten Kepulauan Anambas 2011, 2015 dan 2020 (juta Rp).....	II - 159
Tabel 2. 146 Indikator Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II - 160
Tabel 2. 147 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2017-2020	II - 168
Tabel 2. 148 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020	II - 169
Tabel 2. 149 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan (km) di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020	II - 170
Tabel 2. 150 Daftar Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Anambas 2015-2020	II - 171
Tabel 2. 151 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020	II - 172
Tabel 3. 1 Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020	III - 2
Tabel 3. 2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Rupiah)	III - 4

Tabel 3. 3 Rasio Realisasi Terhadap Anggaran Pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016–2020	III - 4
Tabel 3. 4 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016–2020 (Rupiah).....	III - 7
Tabel 3. 5 Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2016–2020 (Persen)	III - 12
Tabel 3. 6 Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016–2020 (Rupiah).....	III - 15
Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016–2020 (Rupiah).....	III - 19
Tabel 3. 8 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016–2020 (Rupiah)	III - 20
Tabel 3. 9 Proporsi Belanja Daerah Terhadap Total Belanja (%) Tahun 2016–2020	III - 23
Tabel 3. 10 Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2016–2020 (Rupiah).....	III - 27
Tabel 3. 11 Rasio Likuiditas Keuangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016–2020.....	III - 28
Tabel 3. 12 Rasio Solvabilitas Keuangan Kabupaten Kepulauan Anambas 2016–2020	III - 23
Tabel 3. 13 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Kabupaten Kepulauan Anambas	III - 29
Tabel 3. 14 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas.....	III - 31
Tabel 3. 15 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Anamabas	III - 32
Tabel 3. 16 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas	III - 33
Tabel 3. 17 Proyeksi PDRB Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Anambas	III - 35
Tabel 3. 18 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021–2026 Kabupaten Kepulauan Anambas (Rupiah)	III - 38
Tabel 3. 19 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022-2026 (Rupiah).....	III - 42
Tabel 3. 20 Rencana Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	III - 44
Tabel 4. 1 Perumusan Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia	IV - 2
Tabel 4. 2 Perumusan Permasalahan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan	IV - 13
Tabel 4. 3 Perumusan Permasalahan Pembangunan Lingkungan Hidup.....	IV - 19
Tabel 4. 4 Perumusan Permasalahan Pembangunan Ekonomi.....	IV - 26
Tabel 4. 5 Perumusan Permasalahan Pembangunan Infrastruktur	IV - 33

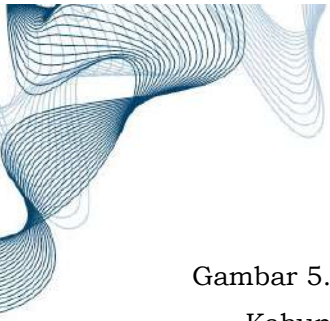
Tabel 5. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026	V - 5
Tabel 6. 1 Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026	VI - 2
Tabel 6. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026	VI- 21
Tabel 6. 3 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Fokus Pembangunan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 – 2026.....	VI - 37
Tabel 6. 4 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 – 2026.....	VI - 40
Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 – 2026	VII - 3
Tabel 7. 2 Program Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan.....	VII - 5
Tabel 7. 3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII - 11
Tabel 7. 4 Total Belanja 2021-2026	VII - 82
Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026	VIII - 2
Tabel 8. 2 Definisi Indikator Kinerja Utama	VIII - 3
Tabel 8. 3 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026	VIII - 10
Tabel 8. 4 Rumus Indikator Kinerja Daerah untuk Aspek Kesejahteraan Masyarakat	VIII - 13
Tabel 8. 5 Indikator Kinerja Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026	VIII - 17
Tabel 8. 6 Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Dasar Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026	VIII - 18
Tabel 8. 7 Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Non Wajib Dasar Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026	VIII - 25
Tabel 8. 8 Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026	VIII - 31
Tabel 8. 9 Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Layanan Penunjang Urusan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.....	VIII - 34
Tabel 8. 10 Indikator Kinerja Daerah Aspek Daya Saing Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.....	VIII - 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan 6 (enam) tahapan	I - 3
Gambar 1. 2 Hubungan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	I - 11
Gambar 1. 3 Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 13
Gambar 1. 4 Telaah RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 15
Gambar 1. 5 Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas	I - 17
Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau	II - 2
Gambar 2. 2 Kerangka Faktor Potensi Pengembangan Kawasan	II - 3
Gambar 2. 3 Peta Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas	II - 7
Gambar 2. 4 Luas Kabupaten Kepulauan Anambas Per Kecamatan (Dalam Persen)	II - 8
Gambar 2. 5 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan	II - 11
Gambar 2. 6 Suhu Rata-rata dan Kelembaban Kabupaten Kepulauan Anambas 2020 (Dalam °C)	II - 16
Gambar 2. 7 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kepulauan Anambas	II - 18
Gambar 2. 8 Diagram Kawasan Budi Daya Kabupaten Kepulauan Anambas	II - 20
Gambar 2. 9 Diagram Kawasan Lindung Kabupaten Kepulauan Anambas	II - 21
Gambar 2. 10 Jumlah Bencana per Kecamatan	II - 22
Gambar 2. 11 Penduduk dan Jenis Kelamin (Dalam Jiwa)	II - 23
Gambar 2. 12 Komposisi Penduduk berdasarkan Kecamatan 2010 dan 2020 (Dalam Persen)	II - 24
Gambar 2. 13 Komposisi Penduduk Dapat Membaca dan Tidak Kabupaten Kepulauan Anambas 2020 (Dalam Orang)	II - 25
Gambar 2. 14 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (Dalam Persen)	II - 26
Gambar 2. 15 Pertumbuhan PDRB dengan Migas dan tanpa Migas Tahun 2011-2020 (Dalam Persen)	II - 27
Gambar 2. 16 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020 (Dalam Persen)	II - 32
Gambar 2. 17 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020 (Dalam Juta Per Jiwa)	II - 33
Gambar 2. 18 Garis Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Rupiah Per Kapita Per Bulan)	II - 35
Gambar 2. 19 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016- 2020 (Dalam Ribu Jiwa)	II - 36
Gambar 2. 20 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Persen)	II - 37

Gambar 2. 21 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020	II - 38
Gambar 2. 22 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020	II - 38
Gambar 2. 23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II - 40
Gambar 2. 24 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Persen)	II - 42
Gambar 2. 25 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015-2020	II - 43
Gambar 2. 26 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015-2020 (dalam tahun)	II - 45
Gambar 2. 27 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015-2020 (dalam tahun)	II - 45
Gambar 2. 28 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Tahun)	II - 46
Gambar 2. 29 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Ribu Rupiah)	II - 47
Gambar 2. 30 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015-2020	II - 48
Gambar 2. 31 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020 (Dalam Persen)	II - 50
Gambar 2. 32 Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Kepulauan Anambas 2016-2020 (Dalam Persen)	II - 51
Gambar 2. 33 Angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Kepulauan Anambas 2015-2019 (Dalam Persen)	II - 52
Gambar 2. 34 Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020 (Dalam Persen)	II - 53
Gambar 2. 35 Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020 (Dalam Persen)	II - 54
Gambar 2. 36 Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Persen)	II - 54
Gambar 2. 37 Komposisi Produksi Ikan Laut Kabupaten Kepulauan Anambas 2020	II - 118
Gambar 2. 38 Produksi Triwulanan Ikan Laut Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020	II - 119
Gambar 2. 39 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Tahun 2016-2020	II - 123
Gambar 2. 40 PDRB Harga Konstan 2010, Kabupaten Kepulauan Anambas 2010, 2015 dan 2020 (Juta Rupiah)	II - 149
Gambar 2. 41 PDRB Harga Konstan 2010 Tanpa Pertambangan dan Penggalian, Kabupaten Kepulauan Anambas 2010, 2015 dan 2020 (Juta Rupiah)	II - 150

Gambar 2. 42 Persentase Perbandingan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau 2010, 2015 dan 2020 (Persen).....	II - 151
Gambar 2. 43 Persentase Perbandingan PDRB Tanpa Pertambahan dan Penggalian Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau 2010, 2015 dan 2020 (Persen).....	II - 152
Gambar 2. 44 LQ Kabupaten Kepulauan Anambas 2011, 2015 dan 2020.....	II - 153
Gambar 2. 45 LQ Kabupaten Kepulauan Anambas tanpa Pertambahan dan Penggalian Tahun 2011, 2015 dan 2020.....	II - 155
Gambar 2. 46 Total <i>Share</i> PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011, 2015 dan 2020	II - 157
Gambar 2. 47 Total <i>Share</i> PDRB Tanpa Migas Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011, 2015 dan 2020.....	II - 157
Gambar 2. 48 Pengelompokan Selisih Pertumbuhan dan <i>share</i> sektor PDRB dengan daerah pembanding.....	II - 163
Gambar 2. 49 Gambaran dan Diagram Tipologi Klassen Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pembanding Provinsi Kepulauan Riau, 2015 dan 2019	II - 164
Gambar 2. 50 Persentase Keberadaan Panjangnya Jalan di antar Kecamatan Kepulauan Anambas 2020.....	II - 168
Gambar 2. 51 PAD dan Persentasenya Terhadap Pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas 2010-2020.....	II - 170
Gambar 3. 1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016–2020 (Rupiah)	III - 9
Gambar 3. 2 Realisasi PAD, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2016–2020 (Rupiah)	III - 10
Gambar 3. 3 Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016–2020 (Rupiah).....	III - 11
Gambar 3. 4 Perkembangan Realisasi Belanja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016–2020 (Rupiah)	III - 18
Gambar 3. 5 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016–2020 (Rupiah)	III - 21
Gambar 3. 6 Perkembangan Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016–2020	III - 24
Gambar 3. 7 Perkembangan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2016–2020	III - 25
Gambar 3. 8 Perkembangan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2016–2020	III - 26
Gambar 3. 9 Proyeksi Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026	III - 34



Gambar 5. 1 Keterkaitan RPJD Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026V - 11

Gambar 5. 2 Keterkaitan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026V - 12

Gambar 5. 3 Keterkaitan RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026V - 13

Gambar 5. 4 Keterkaitan Tujuan RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 dengan Tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026V -14

Gambar 5. 5 Keterkaitan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.....V - 15



BAB I ***Pendahuluan***





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dilaksanakan pada tahun 2020 menetapkan Bapak Abdul Haris, SH sebagai Bupati dan Bapak Wan Zuhendra sebagai Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Anambas. Setelah terpilih dan dilantik, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, periode 2021-2026. Ketentuan penyusunan RPJMD tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini juga disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 2021-2026. Dokumen ini berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024. Di samping itu, penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 dan berbagai kebijakan dan prioritas program pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan pemerintah kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas. Dokumen RPJMD juga berisi hasil penelaahan terhadap RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas, RTRW Provinsi Kepulauan

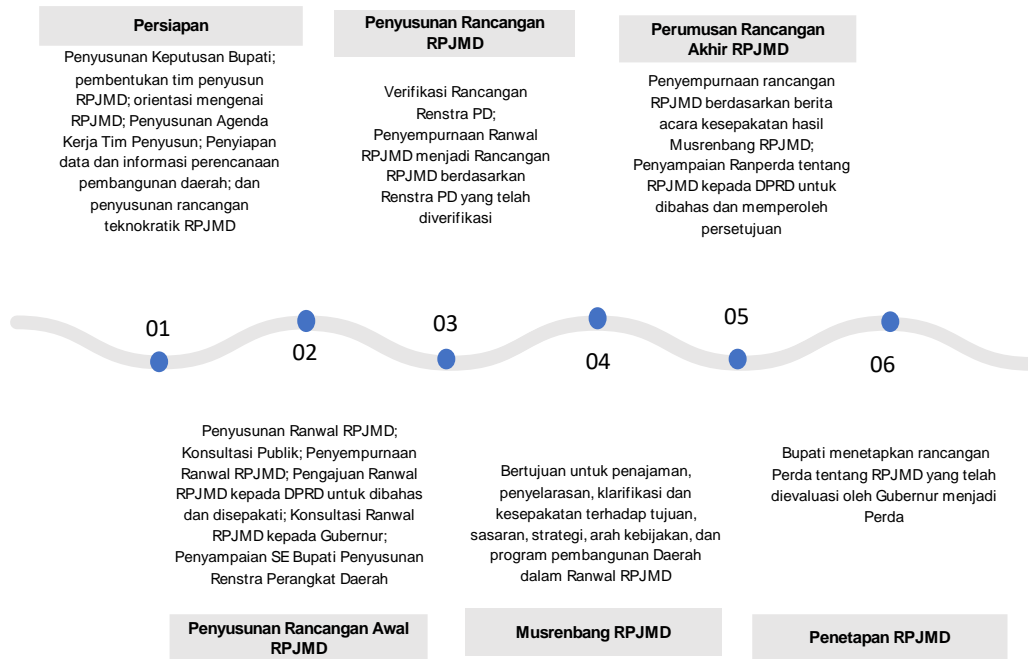


Riau serta RTRW kabupaten/kota lainnya sekitarnya. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga menjadi bagian dari analisis telaah penyusunan RPJMD, mulai dari gambaran umum kondisi daerah, isu strategis sampai ke sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan yang dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program dan kegiatan secara vertikal dan horisontal antar pemerintahan. RPJMD dijabarkan lebih detil dan menjadi pedoman di dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun yang memuat rencana program dan kegiatan tahunan selama periode RPJMD tersebut. Selain itu, RPJMD ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) di Kabupaten Kepulauan Anambas.

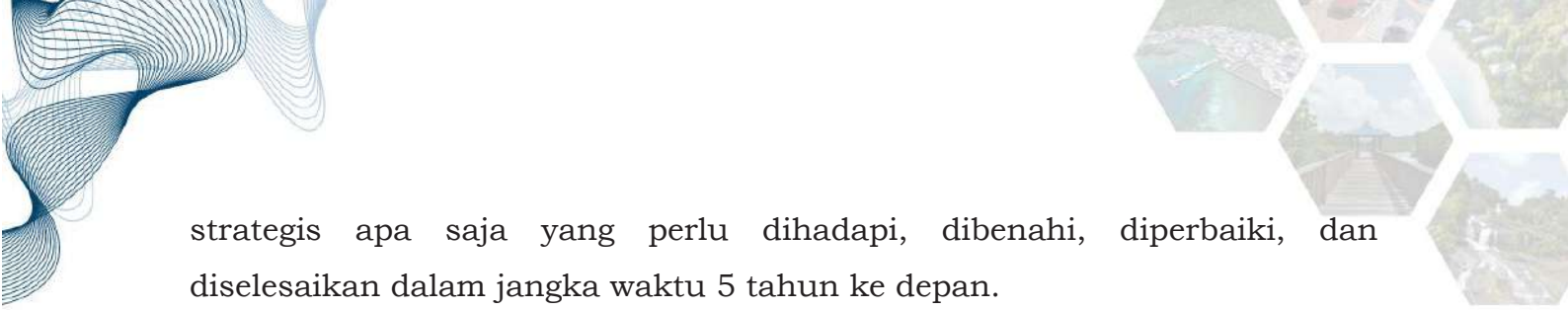
Dalam proses penyusunan RPJMD ini, ada 4 pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan pendekatan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa proses perencanaan dibahas oleh DPRD bersama pemerintah daerah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu (Akademisi). Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, di mana rencana hasil proses atas bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah lima tahunan.

Gambar 1. 1 Penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan 6 (enam) tahapan



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2018, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

RPJMD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar: (1) ke mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang; (2) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai; dan (3) bagaimana mencapainya. Dalam konteks dokumen perencanaan ini, maka sangat penting untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya, agar pijakan data dan informasi lebih akurat dan telah dianalisis secara akademis. Selain evaluasi hasil-hasil pembangunan, juga diperlukan evaluasi capaian kinerja keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah menjadi kunci penting dalam keberhasilan capaian dari target pembangunan yang telah ditetapkan dalam masa periode RPJMD sebelumnya. Selain mengukur evaluasi kinerja keuangan daerah, analisis juga mencakup pengukuran kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Setelah pembiayaan pembangunannya sudah terukur untuk 5 tahun ke depan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan isu

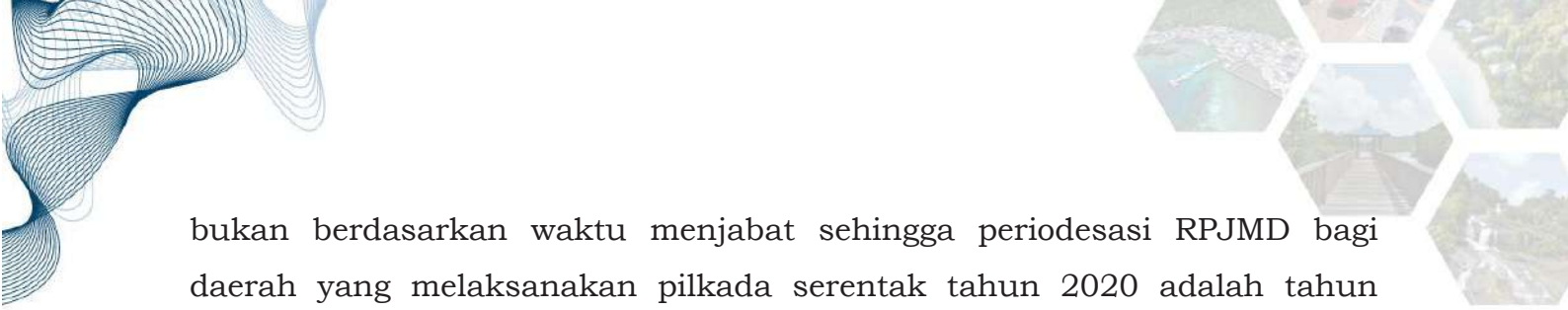


strategis apa saja yang perlu dihadapi, dibenahi, diperbaiki, dan diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Dokumen RPJMD juga memperhatikan kondisi faktual yang terjadi pada saat penyusunan dilakukan. Saat ini dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19, dimana virus ini menyebabkan perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona. Covid-19 membawa dampak negatif tidak hanya pada kesehatan masyarakat tetapi juga ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Karena itu, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, menekankan agar kebijakan pembangunan tetap mempertimbangkan aspek kesehatan seiring dengan kebijakan ekonomi. Perlu strategi baru dalam perencanaan pembangunan ke depan, salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan di setiap aspek pembangunan.

Hal yang perlu diperhatikan juga adalah disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020 yang membawa perubahan terhadap 19 (sembilan belas) bidang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 juncto *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*). Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini juga mengubah 82 (delapan puluh dua) Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada penjelasan nomor 3 menyatakan bahwa periodisasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan



bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga perodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 adalah tahun 2021-2026. Selanjutnya, pada penjelasan nomor 4 menyatakan bahwa penyusunan RPJMD berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih tahun 2020 dengan berpedoman pada RPJPD 2005-2025, RPJMD 2020-2024, RPJMD Teknokratik dan KLHS RPJMD, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

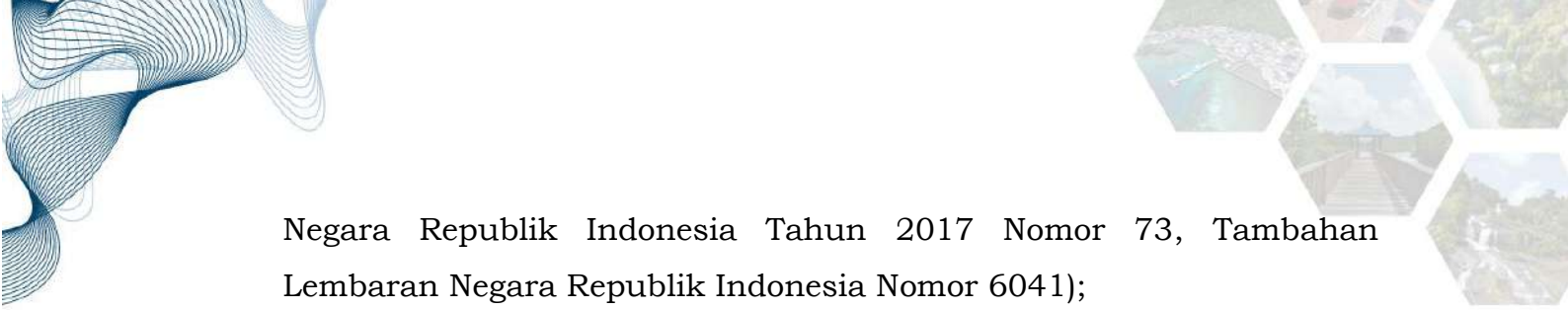
1.2 Dasar Penyusunan RPJMD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2002);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 
- 
- 6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
 - 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 - 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 
- 
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

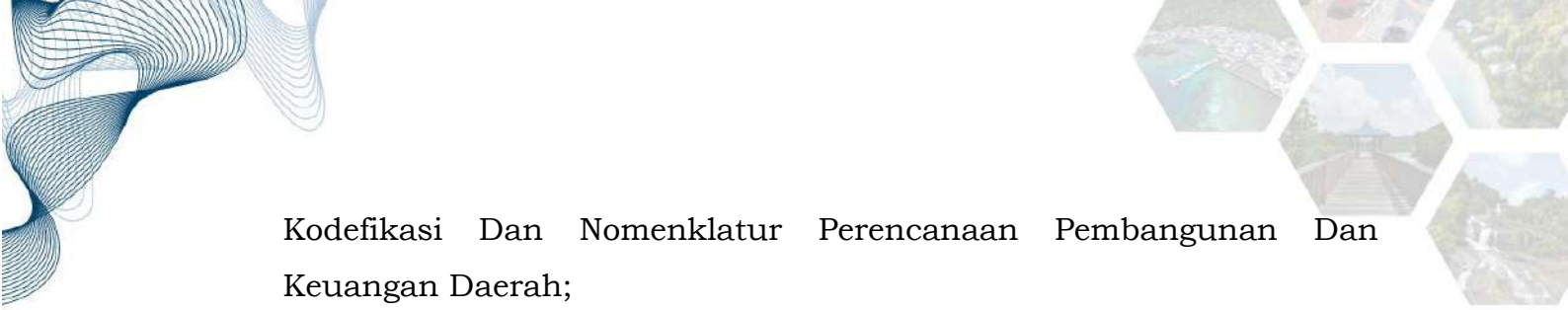
17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

20) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

- 
- 
- 21) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 27) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,



Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

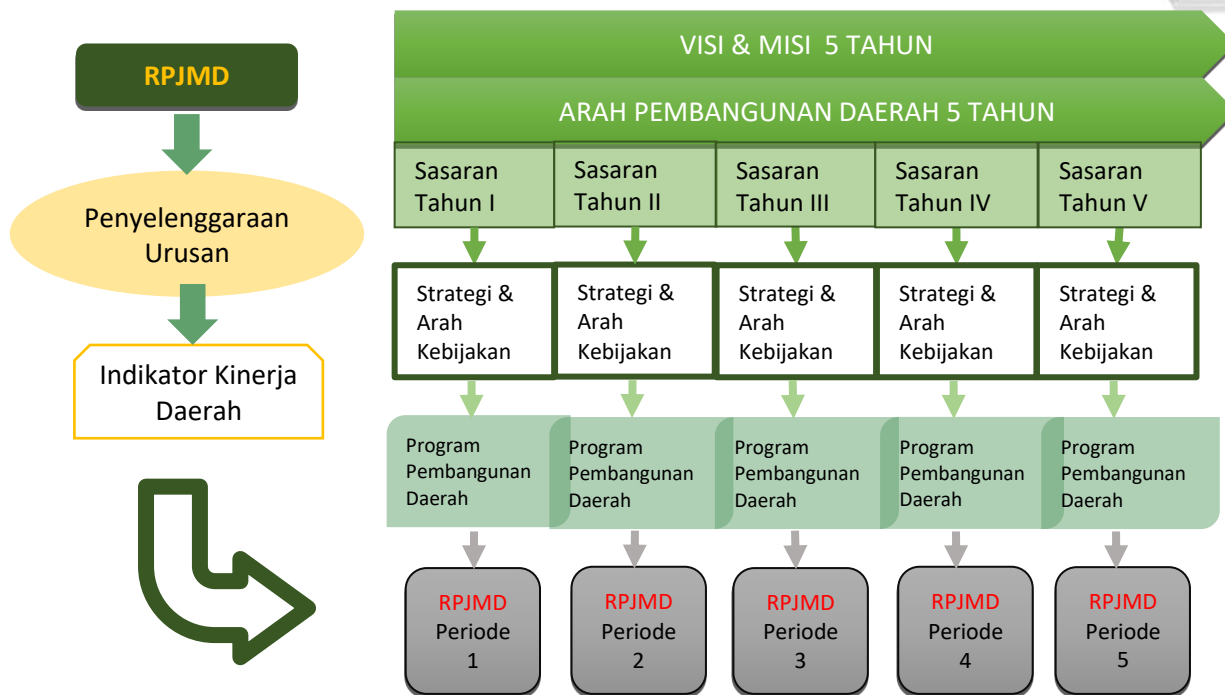
- 28) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011– 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29); dan
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 32).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas harus memperhatikan dokumen perencanaan secara vertikal dan horizontal, yaitu dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu, Dokumen RPJMD dalam perumusannya harus memperhatikan kebijakan rencana tata ruang yang telah disusun sebelumnya sehingga dapat sinergis dan konsisten dalam perencanaan lima tahun ke depan. Selain dokumen RTRW, perlu juga memperhatikan dokumen KLHS Kabupaten Kepulauan Anambas. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam implementasinya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang harus disusun dalam rangka memenuhi target capaian masing-masing Perangkat Daerah sebagai perwujudan kinerja yang berlandaskan kepada *money follow programme*.

Gambar 1. 2 Hubungan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

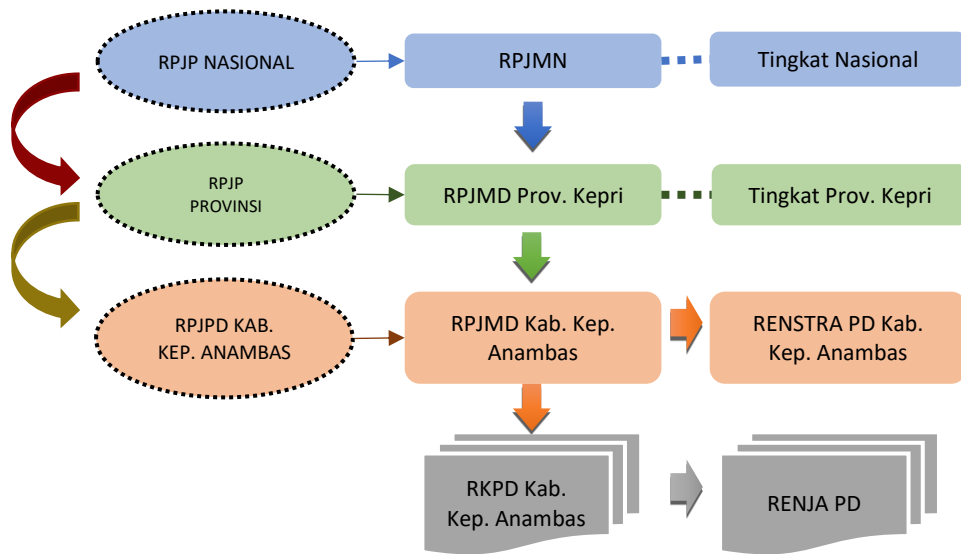




Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun RPJPD untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dan RPJMD untuk lima tahunan yang diarahkan untuk ikut mencapai tujuan nasional. Dalam rangka ikut mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu di analisis keterkaitannya dengan dokumen perencanaan nasional. Keterkaitan tersebut disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 1. 3 Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

1.3.1 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025

RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025. Tahapan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dari mulai tahun 2005 hingga tahun 2025. Periode tahun 2021 sampai dengan 2025 adalah periode tahap pembangunan lima tahun yang keempat, sebagaimana dijelaskan dalam bab 5 dokumen RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2005-2025. Dokumen RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2005 – 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 – 2026, termasuk di dalamnya memperhatikan visi, misi, sasaran pokok RPJPD, serta arah kebijakan pada tahun RPJPD ke-4.

1.3.2 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RPJMN 2020-2024

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 mempedomani visi, misi Nawacita, tujuan, strategi yang ada di dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

1.3.3 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RPJPD Kepulauan Riau Tahun 2005-2025

Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Kepulauan Anambas harus sinkron dengan rencana kewilayahan yang ditetapkan oleh Provinsi Kepulauan Riau dan memperhatikan pembangunan wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 harus mempedomani RTRW Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037 serta RTRW wilayah sekitar, terutama memperhatikan rencana pola ruang dan program pengembangan wilayah.

1.3.4 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJMD Daerah Sekitar

Sinkronisasi pembangunan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas juga memperhatikan rencana pembangunan di wilayah Provinsi Riau dan rencana pembangunan daerah sekitarnya, seperti Kabupaten Bintan (sebelah selatan, Kepulauan Tembelan), Kabupaten Natuna dan Kota Batam.

1.3.5 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Dokumen Perencanaan Sektor

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas turut memperhatikan dokumen perencanaan penting lainnya, seperti RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas, KLHS Kabupaten Kepulauan Anambas, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan juga memperhatikan hasil-hasil kajian yang telah disusun oleh Perangkat Daerah.

Gambar 1. 4 Telaah RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 juga mengintegrasikan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menjamin bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan atau kompensasi program dan kegiatan.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas sudah memperhatikan aspek keruangan (spasial) dengan berpedoman kebijakan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031.

1.4 Maksud dan Tujuan

Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 dimaksudkan memberikan arah dan dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas agar terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberi gambaran tentang kondisi daerah;
2. Mengetahui kinerja pembangunan daerah lima tahun terakhir;
3. Menganalisis permasalahan-permasalahan (*gap analysis*);
4. Menghasilkan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan pada gambaran kinerja pembangunan lima tahun terakhir, kondisi *existing* kebutuhan saat ini, prioritas nasional dan memperhatikan agenda pembangunan internasional kepala daerah terpilih;
5. Memberikan gambaran tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi;
6. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah; dan
7. Memberikan tolak ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Alur keterkaitan penyajian materi antar bab di dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

Gambar 1. 5 Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas



Sumber: Tim Penyusun RPJMD

Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

1. **BAB I PENDAHULUAN**

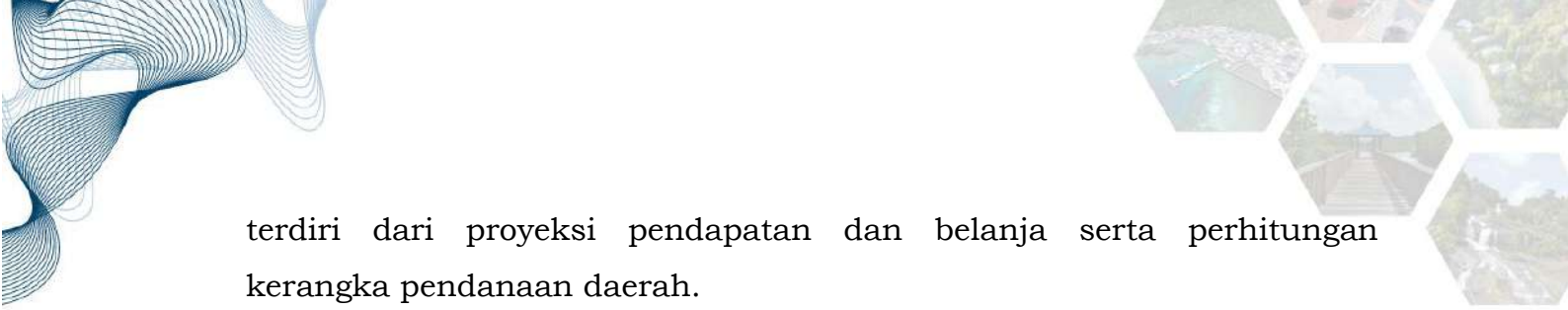
Bagian ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, penjelasan hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan.

2. **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bagian ini berisi penjelasan mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah

3. **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan kinerja keuangan masa lalu yang terdiri dari kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Selain itu juga membahas kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang berisi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan daerah. Bagian terakhir dari bab ini menjelaskan kerangka pendanaan daerah yang



terdiri dari proyeksi pendapatan dan belanja serta perhitungan kerangka pendanaan daerah.

4. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bagian ini membahas permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh daerah beserta isu – isu strategis daerah.

5. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi daerah yang dilengkapi dengan pemaparan Tujuan dan Sasaran daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

6. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan

7. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah

8. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memaparkan berbagai indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan digunakan selama 5 (lima) tahun ke depan beserta target capaiannya.

9. BAB IX PENUTUP

Bagian ini menjadi penutup dari dokumen RPKMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026



BAB II
Gambaran Umum
Kondisi Daerah





BAB II

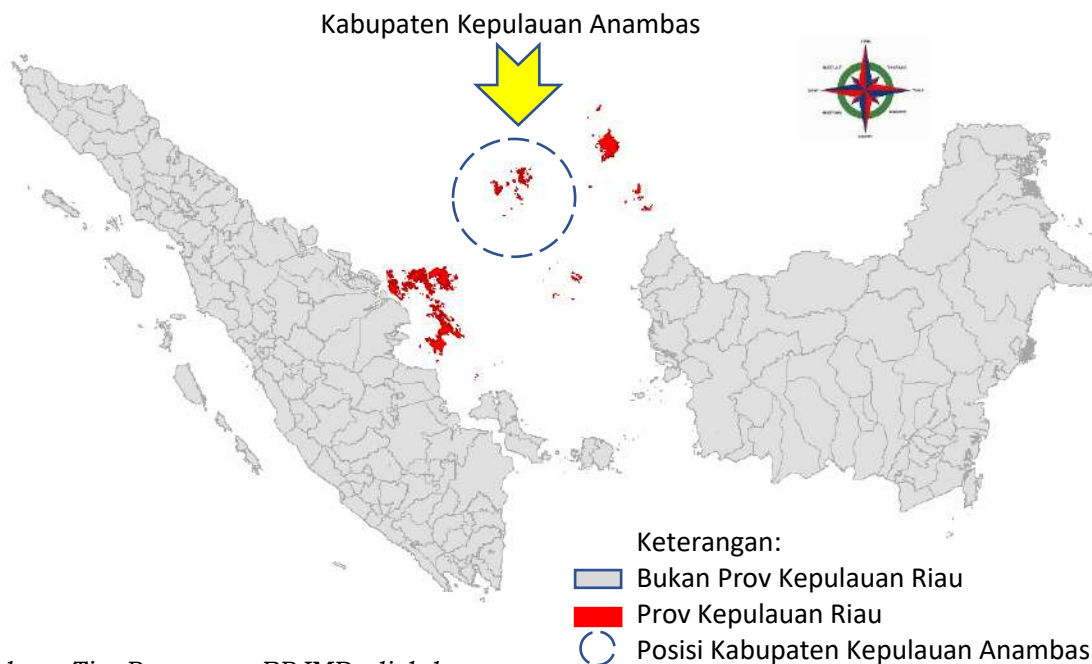
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu dari tujuh kabupaten/kota dari Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten ini termasuk dalam gugusan luar pulau-pulau terluar yang berbatasan laut dengan negara-negara tetangga. Posisinya di arah Barat Laut di antara dua Pulau besar Indonesia, yaitu Sumatera dan Kalimantan. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 255 pulau, relatif besar dan kecil. Pulau-pulau "relatif besar" yang dapat disebutkan antara lain Pulau Siantan, Pulau Matak, Pulau Mubur, dan Pulau Jemaja. Posisi Kabupaten ini terletak di bawah lingkaran putus-putus yang ditunjuk panah kuning Gambar 2.1 di bawah ini.

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak di Kawasan Barat Indonesia. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 24 Juli 2008. Kabupaten Kepulauan Anambas berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah Utara, Sebelah Selatan dengan Kepulauan Tembelan (Kabupaten Bintan), Sebelah Barat dengan Laut Cina Selatan, dan Sebelah Timur dengan Laut Natuna (Kabupaten Natuna).

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : Tim Penyusun RPJMD, diolah

Tabel 2. 1 Batas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, 2019

Batas Border (1)	Batas Wilayah Border of Regency (2)
Utara/North	Laut Cina Selatan
Selatan/South	Kepulauan Tambelan
Timur/East	Laut Natuna
Barat/West	Laut Cina Selatan

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2019

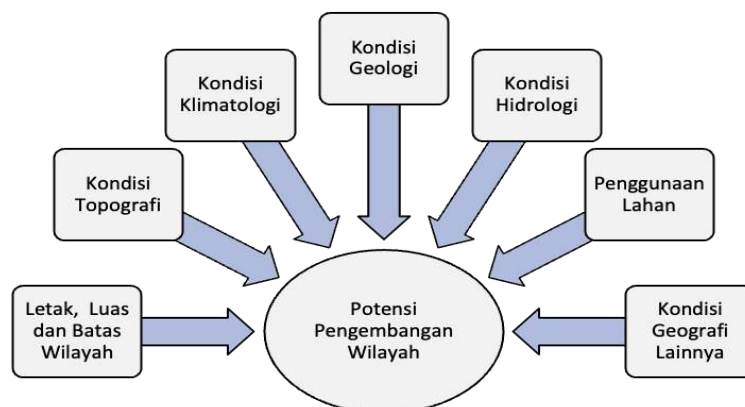
Beberapa faktor dan kondisi yang harus dipahami dan diperhatikan dalam pengembangan wilayah kabupaten ini antara lain: letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas, luasan yang ada dan batasan wilayah yang perlu dijaga bersama. Kemudian terkait kondisi topografi dan klimatologi, sektor pertanian, dan perikanan sangat tergantung dengan kondisi klimatologi ini, misalkan: bulan kapan akan menanam, kapan akan menyemai, kapan panen dan sebagainya. Contoh lainnya untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, bahwa informasi klimatologi sangat diperlukan untuk melaut, kapan sebaiknya ke laut untuk menjala ikan, perlukah menunggu musim hujan reda, terkait gelombang, arus dan pasang, berapa lama di laut,

kapal pulang, juga terkait kekuatan kapal yang harus dimiliki dan digunakan, dan sebagainya.

Terkait dengan perikanan, perekonomian kepulauan Anambas dibatasi oleh aturan pemerintah pusat/provinsi yang membatasi pemanfaatan laut 0 s.d. 12 mil. Nelayan menangkap ikan jauh dari batasan tersebut, daerah yang masih dibolehkan walau untuk tambak, masyarakat masih menggunakan wilayah laut sekitar. Jika aturan itu masih terus diterapkan maka perencanaan lain ke depan lebih cocok berfokus pada sektor pariwisata.

Potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Kepulauan Anambas tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu: 1. Letak, Luas, dan Batas Wilayah; 2. Kondisi Topografi; 3. Kondisi klimatologi; 4. Kondisi geologi; 5. Kondisi Hidrologi; 6. Penggunaan Tanah, dan 7. Kondisi geografi lainnya. Faktor-faktor alam ini saling terkait, di mana sebagiannya bisa dikontrol dan sebagian lagi hanya bisa diterima dan disikapi dengan optimal guna pelaksanaan pengembangan pembangunan wilayah.

Gambar 2. 2 Kerangka Faktor Potensi Pengembangan Kawasan



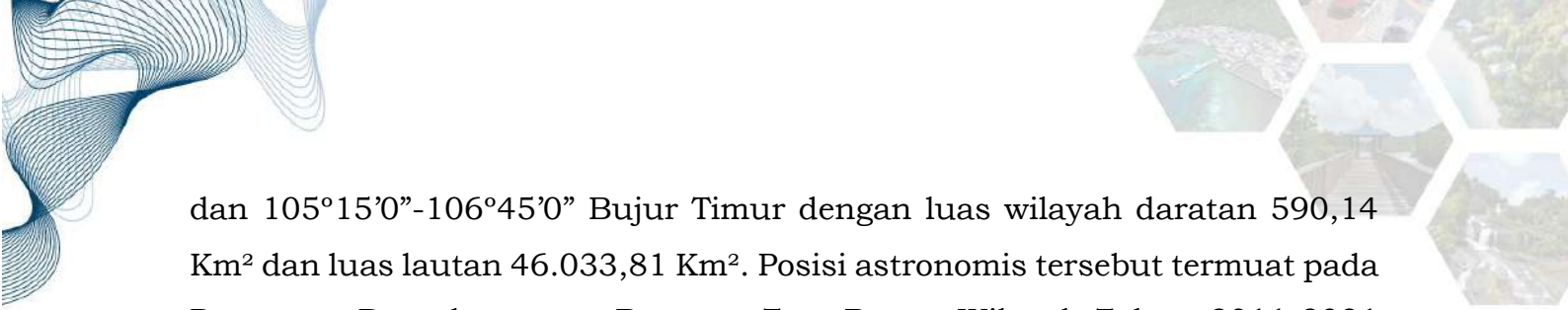
Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

2.1.1 Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

2.1.1.1 Letak Dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah otonom maritim yang ditinjau secara geografis terletak antara 2°10'0"-3°40'0" Lintang Utara



dan 105°15'0"-106°45'0" Bujur Timur dengan luas wilayah daratan 590,14 Km² dan luas lautan 46.033,81 Km². Posisi astronomis tersebut termuat pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 dan rencana perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031. Kabupaten ini termasuk dalam gugusan Kepulauan di laut China Selatan. Perbatasan daerah secara geografis sangat strategis dan perlu perhatian lebih; Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, di Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepulauan Tembelan (Kabupaten Bintan), Sebelah Barat kembali berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Natuna (Kabupaten Natuna).

b. Posisi Geostrategis

Secara geostrategis, Kabupaten Kepulauan Anambas berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan dengan Potensi Perikanan terbesar di Indonesia (WPP 711), berada pada Jalur Pelayaran Internasional dan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI 1). Letak strategis tersebut menjadikan Kabupaten Kepulauan Anambas tempat penyaluran energi gas bagi Singapura, Batam, dan Bintan serta dilalui oleh Jaringan Kabel Fiber Optik Internasional dengan kapasitas yang sangat besar dan kecepatan yang sangat tinggi. Sisi lain menurut CNN, bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas adalah pulau tropis terindah di Asia yang terdiri dari 255 pulau-pulau kecil yang eksotis.

2.1.1.2 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 46.664,14 km² atau 2,47 persen dari luas Indonesia yang memiliki luas 1.890.754 km². Luas wilayah daratan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 590,14 km² atau 1,26 persen dan luas lautan 46.029,27 km² atau 98,74 persen dengan Panjang Garis Pantai adalah 1.128,57 km. Luas wilayah di bagi menurut kecamatan yaitu 24 persen Kecamatan Jemaja Timur, 21 persen Kecamatan Palmatak, 18 persen Kecamatan Siantan

Selatan, 14 persen Kecamatan Siantan Tengah, 12 persen Kecamatan Jemaja, 7 persen Kecamatan Siantan dan 4 persen Kecamatan Siantan Timur.

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah administratifnya dan berbatasan langsung dengan negara lain atau lautan internasional. Perlu untuk diperhatikan kembali terkait jumlah pulau yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas mengingat adanya perbedaan data yang ditunjukkan oleh RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2021 dan Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka tahun 2020. Di Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka tahun 2020 tertulis jumlah pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 238 pulau, sedangkan menurut data yang tertulis dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016–2021 tertulis bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 255 pulau. Hal ini perlu untuk menjadi perhatian dalam menyelaraskan data. Terlepas dari perbedaan data, banyaknya pulau yang menjadi bagian dari Kabupaten Kepulauan Anambas tentunya memerlukan penanganan khusus terkait dengan otoritas batas wilayah daerah.

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 5 (lima) buah pulau terluar yaitu Tokong Berlayar, Tokong Nenas, pulau Mangkai, pulau Damar, dan Tokong Malang Biru. Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Anambas berada di Tarempa, dan secara administratif terdiri dari 10 kecamatan dengan 2 kelurahan dan 52 desa.

Tabel 2. 2 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Kecamatan/ Kabupaten	Ibu kota Kecamatan	Luas Daratan ¹ (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Pulau ²
Jemaja ³	Letung	72,83	12,34	19
Jemaja Barat	Impol	12
Jemaja Timur	Ulu Maras	143,46	24,31	...
Siantan Selatan	Air Bini	107,40	18,20	...
Siantan	Tarempa⁴	42,25	7,16	...
Siantan Timur	Nyamuk	82,75	14,02	...
Siantan Tengah	Air Asuk	20,59	3,49	...
Palmatak ⁵	Tebang	120,86	20,48	25
Siantan Utara	Mubur	13

Kecamatan/ Kabupaten	Ibu kota Kecamatan	Luas Daratan¹ (km²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Pulau²
Kute Siantan	Payalaman	2
Kepulauan Anambas		590,14	100	255

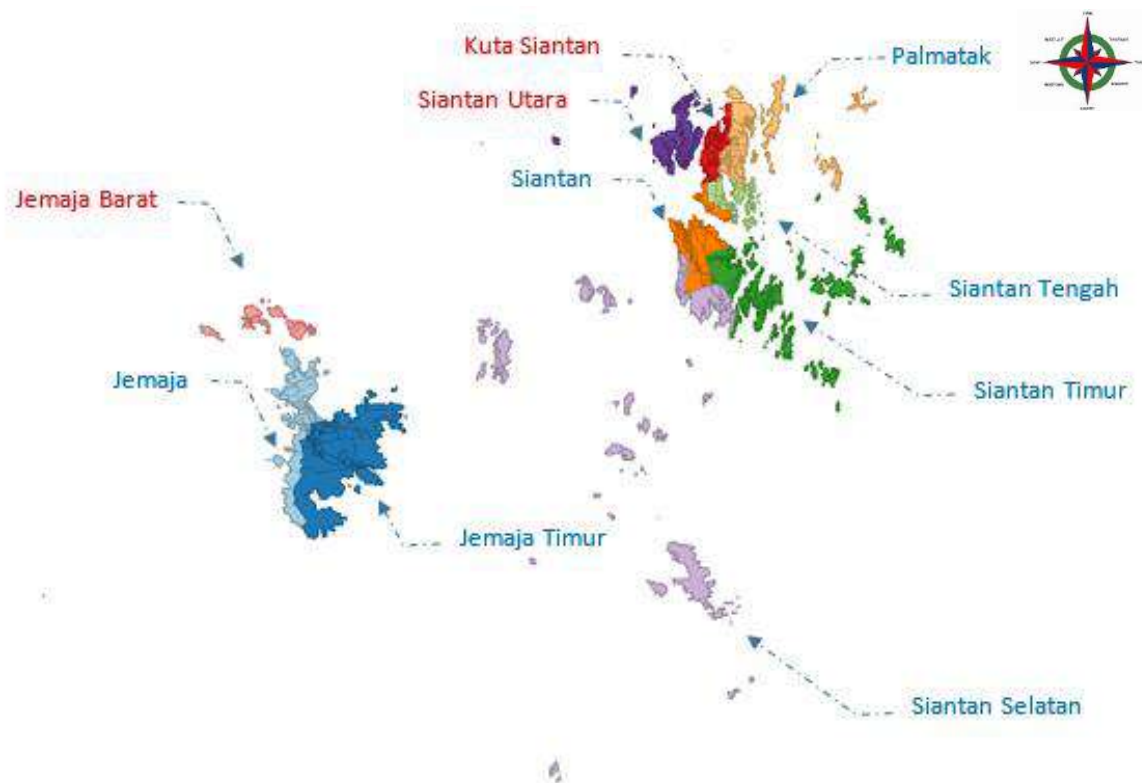
Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017
2. Berdasarkan informasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018
3. Termasuk Kecamatan Jemaja Barat
4. Ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas
5. Termasuk Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siantan

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2021

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kawasan terluar bersama Kabupaten Natuna. Posisi Kabupaten Kepulauan Anambas berada di barat laut dari peta Indonesia. Kabupaten Kepulauan Anambas berbatasan dengan beberapa kota kabupaten dan provinsi lain bahkan negara tetangga dan dengan lautan, yaitu Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Di dalam Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri, terdapat beberapa kecamatan berbatasan di daratan, namun sebagiannya lagi berbatasan laut. Bahkan, kecamatan sendiri juga ada yang terletak di beberapa pulau berbeda. Kecamatan yang sebagian daerahnya berbatasan di daratan meliputi Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur; antara Kecamatan Kute Siantan, Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan Tengah; antara Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Tengah dan Kecamatan Siantan Timur. Sementara Kecamatan Jemaja Barat dan Kecamatan Siantan Utara, Kecamatannya berbatasan di lautan dengan kecamatan-kecamatan lain.

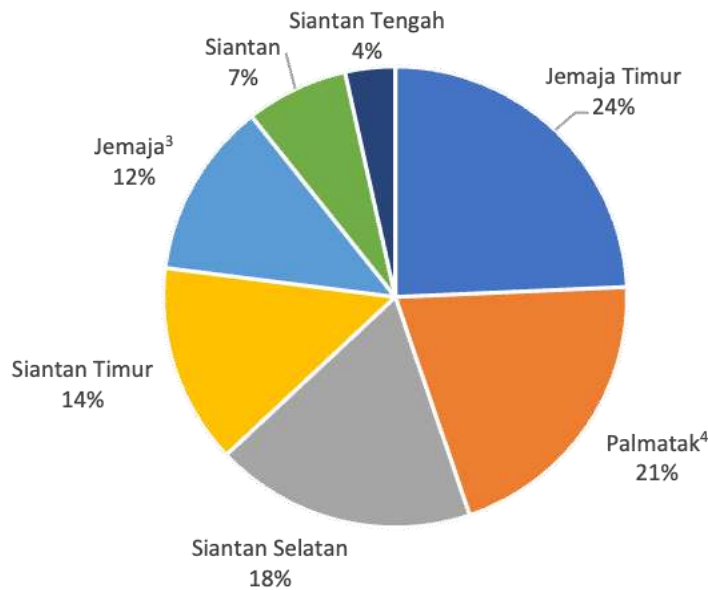
Gambar 2. 3 Peta Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas



Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Data terakhir, Kabupaten sudah memiliki 10 kecamatan sejak 2018, namun data terakhir Kabupaten Dalam Angka 2021, 3 kecamatan yaitu Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siantan belum tersedia data luas wilayah. Dari 10 kecamatan yang terdata, Kecamatan Jemaja Timur adalah kecamatan dengan daratan terluas, merupakan 24 persen dari luas daratan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kecamatan yang luasan daratan terkecil adalah Kecamatan Siantan Tengah dengan luas 20 km². Rata-rata luas daratan per kecamatan sekitar 59 km².

Gambar 2. 4 Luas Kabupaten Kepulauan Anambas Per Kecamatan (Dalam Persen)



Catatan:

1. Luas Kabupaten Kepulauan Anambas 590,14 Km²
3. Termasuk Kecamatan Jemaja Barat
4. Termasuk Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siantan

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Untuk melakukan pergerakan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini umumnya melalui transportasi darat dan laut, sedangkan untuk melakukan perjalanan ke kabupaten lain dapat dilakukan melalui transportasi laut dan udara. Transportasi udara memiliki bandara di Palmatak, yaitu bandara Matak dan di Jemaja, dikenal dengan Bandara Letung. Untuk bandara penggunaan umum tepatnya di bandara Letung, sedangkan di Matak, sementara di masa pandemi, hanya digunakan untuk perusahaan. Walaupun dalam kondisi normal, juga dipakai untuk penerbangan umum.

Tarempa yang menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas terletak di Kecamatan Siantan. Kecamatan terdekat adalah Siantan Tengah dengan jarak 5,61 mil sedangkan yang terjauh adalah Kecamatan Jemaja dengan jarak 38,7 mil dari ibu kota kabupaten. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 3 Jarak wilayah Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi

No	Kecamatan	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten (mil)	Jarak ke Ibu Kota Provinsi (mil)
1	Jemaja	38,70	166,23
2	Jemaja Barat ¹
3	Jemaja Timur	37,37	164,15
4	Siantan Selatan	8,19	196,80
5	Siantan	0	200,34
6	Siantan Timur	10,44	199,93
7	Siantan Tengah	5,61	205,16
8	Palmatak	8,26	208,41
9	Siantan Utara ²
10	Kute Siantan ³

Catatan:

1. Merupakan pemekaran dari Kecamatan Jemaja yang diresmikan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 tahun 2018
2. Kecamatan Siantan Utara merupakan pemekaran dari Kecamatan Pal Matak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 tahun 2018
3. Kecamatan Kute Siantan merupakan pemekaran dari Kecamatan Palmatak Kecamatan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019 pada tanggal 10 Oktober 2019.[1] Kecamatan ini diresmikan pada 26 Desember 2019

Sumber: RPJPD 2005-2025, Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas

Desa/kelurahan terbanyak saat ini terdapat di Kecamatan Siantan, dengan jumlah 8 desa/kelurahan. Posisi ini menggeser kecamatan Jemaja. Kecamatan Jemaja sekarang hanya memiliki 7 desa/kelurahan, hal ini dikarenakan terjadi pemekaran. Sebelum dipecah, Kecamatan Jemaja memiliki 10 unit desa/Kelurahan. Kecamatan lain yang merupakan pengembangan dari Kecamatan Jemaja adalah Kecamatan Jemaja Barat. Palmatak sebelum dipecah terdiri dari 15 desa/kelurahan namun di tahun 2019, pemekaran menjadi Kecamatan Siantan Utara (3 desa/kelurahan) dan Kuta Siantan (5 desa/kelurahan). Sementara kecamatan lain memiliki jumlah desa/kelurahan yang tidak berubah.

Tabel 2. 4 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2020

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
Jemaja	10	10	10	7	7
Jemaja Barat	NA	NA	3	3	3
Jemaja Timur	4	4	4	4	4
Siantan Selatan	7	7	7	7	7

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
Siantan	8	8	8	8	8
Siantan Timur	6	6	6	6	6
Siantan Tengah	6	6	6	6	6
Palmatak	15	15	15	7	7
Siantan Utara	NA	NA	3	3	3
Kute Siantan	NA	NA	NA	5	5
Kepulauan Anambas	54	54	54	54	54

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka, 2021

Sementara, Kecamatan yang memiliki Rukun Tetangga (RT) terbanyak adalah Kecamatan Siantan, dengan 82 Rukun Tetangga. Di tahun 2020, Kecamatan Jemaja Barat menjadi daerah yang memiliki RT paling sedikit yaitu 12 RT. Secara rata-rata terdapat 42 RT per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

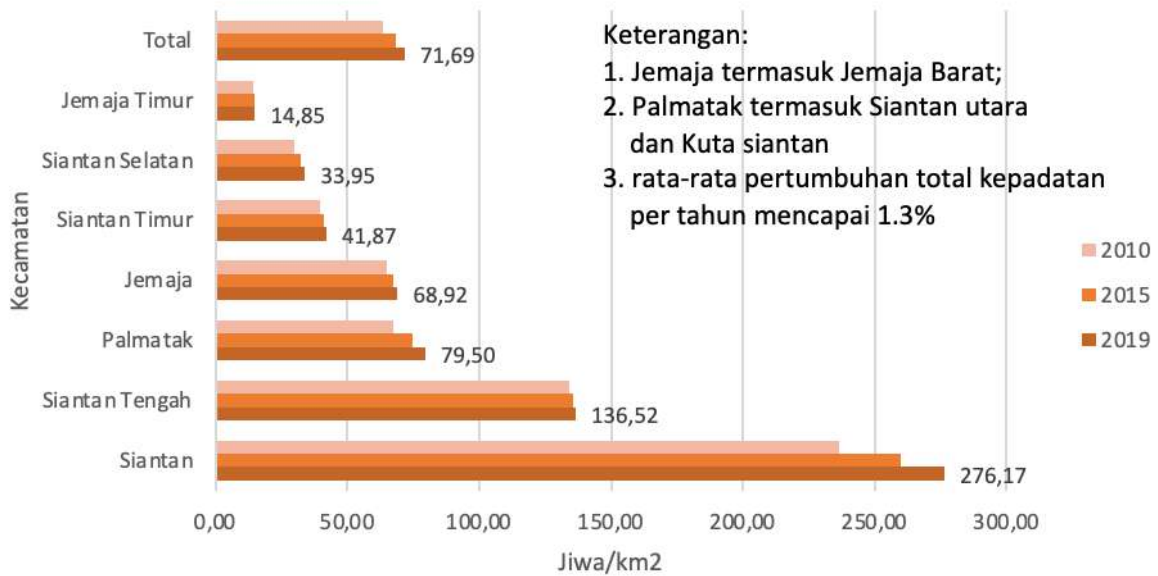
Tabel 2. 5 Jumlah Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2020

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
Siantan	82	82	82	82	82
Palmatak	113	113	113	59	59
Jemaja	69	69	69	57	57
Siantan Selatan	48	48	48	48	48
Siantan Timur	48	48	48	48	48
Siantan Tengah	34	34	34	34	34
Kute Siantan	NA	NA	NA	34	34
Jemaja Timur	26	26	26	26	26
Siantan Utara	NA	NA	20	20	20
Jemaja Barat	NA	NA	12	12	12
Kepulauan Anambas	420	420	452	486	486

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka, 2021

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk yang tinggal per kilometer persegi. Secara total, kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 71,7 jiwa per kilometer persegi untuk tahun 2019. Jika dilihat lebih rinci, kecamatan terpadat adalah kecamatan Siantan 276 jiwa per kilometer, diikuti Kecamatan Palmatak 200 Jiwa per Kilometer dan Kecamatan Siantan Tengah mencapai 140 jiwa per kilometer. Sementara Kecamatan Jemaja Timur adalah Kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah sekitar 20 jiwa per kilometer persegi.

Gambar 2. 5 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan



Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

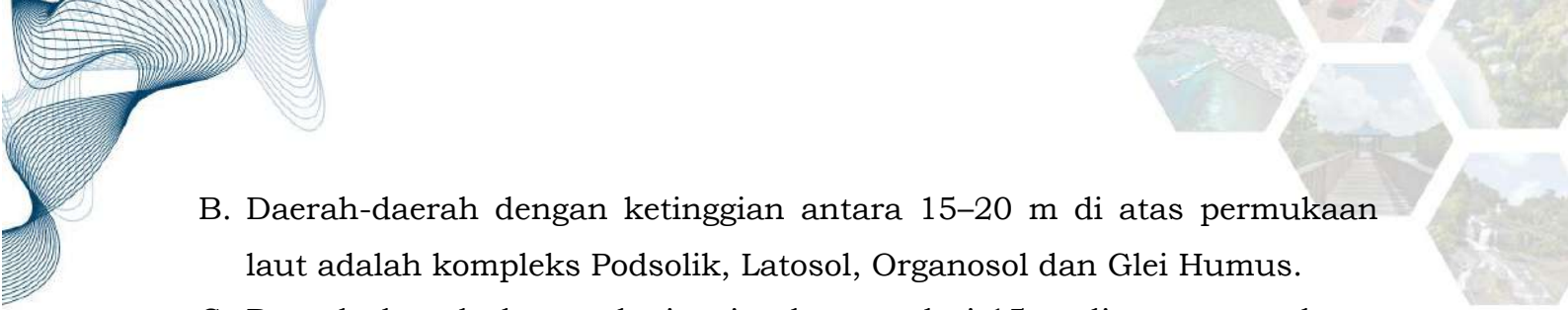
2.1.1.3 Topografi

Secara topografi wilayah daratan setiap Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagian besar berbukit dan pergunungan yang terjal yang disusun oleh batuan metamorf. Umumnya batuan-batuan yang tersingkap merupakan batuan metamorf yang berunsur partier, batuan lainnya antara lain adalah batuan sedimen, endapan alluvial, trias, permokarbon, sekis, granit, diorerm, hiporit dan erupsi kwarter. Ketinggian Wilayah cukup bervariasi yakni berkisar 3-610 meter dari permukaan laut.

Sedangkan struktur tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan tanah mineral, umumnya terdiri dari jenis tanah podsolik, latosol dan alluvial. Tanah tersebut terbentuk dari bahan induk metamorf, batuan beku basa, batuan sedimen dan endapan pantai, rawa, dan sungai.

Tanah-tanah yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kesamaan di tiap kecamatan, ini dapat dibagi menurut letak geografis yaitu:

- A. Daerah-daerah dengan ketinggian di atas 400 m dari permukaan laut adalah kompleks Podsolik dan Latosol.

- 
- B. Daerah-daerah dengan ketinggian antara 15–20 m di atas permukaan laut adalah kompleks Podsolik, Latosol, Organosol dan Glei Humus.
 - C. Daerah-daerah dengan ketinggian kurang dari 15 m di atas permukaan laut adalah kompleks Organosol dan Glei Humus.

Tanah-tanah di Kabupaten Kepulauan Anambas banyak didominasi oleh tanah-tanah ber pH rendah yaitu tanah mineral yang telah mengalami pencucian maupun tanah organik. Kondisi tanah-tanah seperti ini merupakan faktor pembatas bagi usaha pertanian yang mengakibatkan terjadinya penurunan produktivitas tanaman, karena diperlukan perlakuan khusus untuk mengembalikan kondisi tanah menjadi lebih baik agar dapat diusahakan.

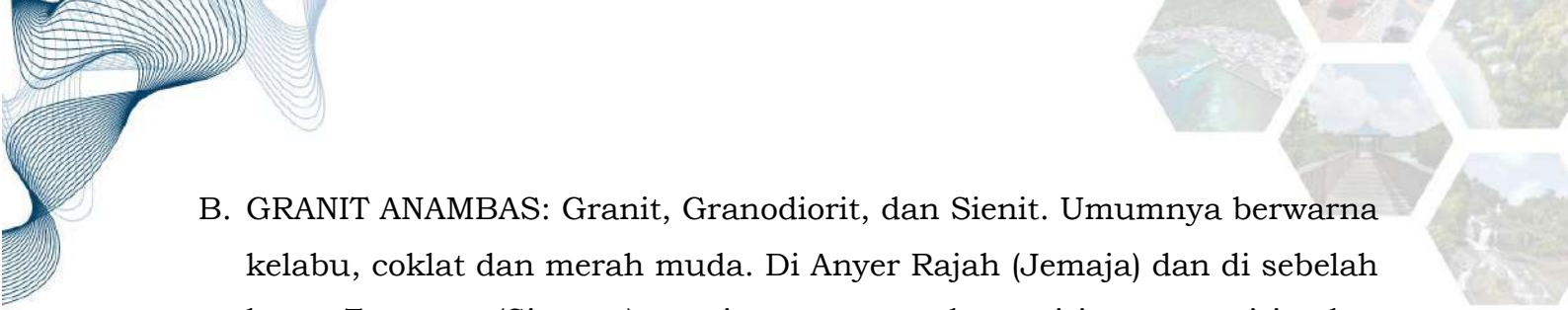
2.1.1.4 Geologi

Sedangkan struktur tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan tanah mineral, umumnya terdiri dari jenis tanah podsolik, latosol dan alluvial. Tanah tersebut terbentuk dari bahan induk metamorf, batuan beku basa, batuan sedimen dan endapan pantai, rawa, sungai (bahan organik).

Secara geologi, di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat beberapa formasi yang berasal dari masa Tersier dan Kuartar. Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau di bawah permukaan. Formasi Geologi ini menunjukkan kelompok-kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang.

Formasi geologi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Anambas terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu:

- A. ALUVIUM: Kerakal, Kerikil, Pasir, dan Lumpur. Merupakan endapan sungai, rawa dan pantai, sebagian tersebar di pulau Siantan dan pulau Jemaja. Namun satuan ini tidak dapat terpetakan pada skala ini.

- 
- B. GRANIT ANAMBAS: Granit, Granodiorit, dan Sienit. Umumnya berwarna kelabu, coklat dan merah muda. Di Anyer Rajah (Jemaja) dan di sebelah barat Tarempa (Siantan) granitnya mengandung pirit, arsenopirit, dan hematit. Di beberapa tempat dijumpai senolit andesit, diorit, dan bahan terkarsikan. Granit di Kabupaten Kepulauan Anambas diduga terdiri dari beberapa tubuh pluton dibandingkan dengan granit sejenis di Kepulauan Tambelan dan Natuna.
- C. FORMASI MATAK: Serpih, Rijang, Batu lempung, Sekis, Filit, Ampibolit, dan Batu tanduk. Batuan sedimen yang berhimpunan dengan batuan malihan ini umumnya terkarsikan dan sedikit berubah. Batuan malih-sentuh dijumpai di sekitar terobosan granit. Satuan yang terlipat cukup kuat dengan sumbu lipatan timur laut-barat daya, tersingkap luas di pulau Matak dan pulau Telaga. Sekis dan amfibolit dijumpai di pulau Jemaja bagian utara. pulau Mentalak di timur pulau Bajau tersusun oleh amfibolit hitam kehijauan dan diterobos granit kelabu coklat. Satuan ini dapat dibandingkan dengan kumpulan batuan Jura akhir-kapur di Kalimantan Barat. Nama pulau Matak di mana runtunan tersingkap baik dipakai untuk memberi nama satuan.
- D. BATUAN MAFIK DAN ULTRA MAFIK: Diorit, Andesit, Gabro, Gabro forfir, Diabas dan Basal; bersisipan Rijang radiola. Andesit berwarna gelap tersingkap di pulau Matak bagian tengah dan selatan, pulau Siantan tengah dan di pulau-pulau kecil di timur Siantan. Diabas tersingkap setempat di ujung selatan pulau Siantan. Basal bersisipan rijang radiola dijumpai di beberapa tempat di pulau Siantan bagian barat dan utara.

2.1.1.5 Hidrologi

Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat beberapa aliran Daerah Aliran Sungai (DAS¹) yang semuanya berada di wilayah kerja BPDAS KEPRI. Sistem

¹ DAS suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.

jaringan sumber daya air merupakan sistem jaringan sumber daya air Kabupaten meliputi:

- a. sumber air; dan
- b. prasarana sumber daya air.

Sedangkan yang termasuk ke dalam DAS di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 8 aliran DAS yaitu; DAS Air Abu, DAS Anambas, DAS Bajau, DAS Jemaja, DAS Matak, DAS Mubur, DAS Siantan, dan DAS Telaga.

2.1.1.6 Klimatologi

Dari hasil pemantauan stasiun Meteorologi Kabupaten Kepulauan Anambas, rata-rata tekanan udara selama 2019 adalah minimum 1.010,3 Mb dan maksimum 1.015,5 Mb. Sementara itu rata-rata kelembaban udara minimum sebesar 58 persen dan kelembaban maksimum sebesar 97 persen. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi di bulan Desember yaitu 454 mm. Sedangkan jumlah hari hujan terbanyak yaitu selama 28 hari terjadi di bulan Oktober. Terlihat juga bahwa ada fluktuasi jumlah curah hujan dari tahun 2016 sebanyak 1.764,4 mm menjadi 2.819,2 mm pada tahun 2020.

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki lautan lepas yang luas. Hal tersebut menyebabkan fenomena arah angin sangat berpotensi mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Tercatat rata-rata kecepatan angin berkisar antara 4,4 sampai 28,0 knot. Hal ini sangat mempengaruhi kelancaran transportasi terutama laut dan udara. Selanjutnya, rata-rata penyinaran matahari terendah tercatat sebesar 6,6 persen dan tertinggi sebesar 76,6 persen di tahun 2020. Kondisi ini juga cukup mempengaruhi kehidupan masyarakat di kabupaten ini yang sebagian besar adalah petani dan nelayan.

Tabel 2. 6 Jumlah Curah Hujan dan Penyinaran Matahari per Bulan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2020

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	60,0	15	50
Februari	80,6	12	40

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Maret	4,2	2	6,6
April	150,5	10	33,3
Mei	249,1	13	43,3
Juni	353,6	21	70
Juli	439,4	22	73,3
Agustus	106,2	9	30
September	354,4	23	76,6
Oktober	177,6	18	60
November	353,8	21	70
Desember	490,3	16	53,3
TOTAL 2020	2.819,2	182	53,3
TOTAL 2019	1.782	139	51
TOTAL 2018	2.412,9	149	52
TOTAL 2017	2.263,2	147	49,66
TOTAL 2016	1.764,4	206	53,91

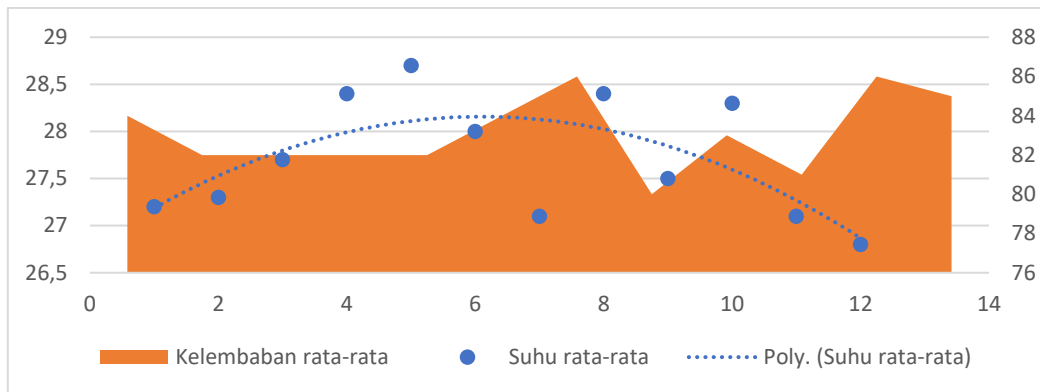
Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka, 2021

a. Suhu

Suhu rata-rata di Kabupaten Kepulauan Anambas di kisaran 27,7°C di tahun 2020. Paling rendah terjadi di bulan Desember dengan tingkat suhu 26,8°C dan tertinggi terjadi di bulan Mei. Namun, suhu terendah terjadi di bulan Agustus dan paling panas terjadi di bulan September, yang mencapai 36,1°C.

Dari pola suhu di tahun 2020 ini, terlihat bahwa kondisi suhu dalam derajat celsius yang tinggi namun di akhir dan awal tahun berkecenderungan rendah. Di pertengahan tahun sekitar bulan Agustus, adalah salah satu bulan terpanas dengan kelembaban terendah. Kemudian akhir-akhir tahun, berkecenderungan adanya musim hujan di mana tingkat kelembaban cenderung tinggi sedangkan di awal tahun sampai dengan pertengahan kelembaban relatif normal sekitar 82 persen.

Gambar 2. 6 Suhu Rata-rata dan Kelembaban Kabupaten Kepulauan Anambas 2020 (Dalam °C)



Sumber : Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Tabel 2. 7 Suhu per Bulan Kabupaten Kepulauan Anambas 2020

Bulan	Suhu (°C)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	24,0	27,2	33,6
Februari	21,2	27,3	31,2
Maret	21,9	27,7	32,6
April	22,9	28,4	35,4
Mei	23,6	28,7	36,1
Juni	22,0	28,0	35,8
Juli	22,8	27,1	33,2
Agustus	21,0	28,4	35,1
September	22,6	27,5	35,1
Oktober	22,6	28,3	35,5
November	23,0	27,1	33,1
Desember	22,4	26,8	30,8
Rata-rata bulanan	21,0	27,7	36,1

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka, 2021

b. Kelembaban

Kelembaban adalah jumlah kandungan uap air yang ada dalam udara. Kandungan uap air di udara Kelembaban adalah jumlah kandungan uap air yang ada dalam udara. Kandungan uap air di udara berubah-ubah bergantung pada suhu, makin tinggi suhu makin banyak kandungan uap airnya. Terdapat dua cara perhitungan kelembaban: (1) Kelembaban Mutlak dan (2) Kelembaban Relatif. Kelembaban mutlak (absolut) yaitu bilangan yang menunjukkan jumlah uap air dalam satuan gram pada satu meter kubik udara. Sedangkan kelembaban relatif (nisbi), yaitu angka dalam persen yang

menunjukkan perbandingan antara banyaknya uap air yang benar-benar dikandung udara pada suhu tertentu dan jumlah uap air maksimum yang dapat dikandung udara. Kelembapan relatif dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$K = \frac{T}{P} \times 100\%$$

Keterangan: K= kelembapan relatif. T= uap air yang dikandung udara pada temperatur tertentu. P= kapasitas kandungan uap air maksimum.

Rata-rata kelembapan relatif Kabupaten Kepulauan Anambas di tahun 2020 sebesar 83 persen. Di bulan Juni, pernah terjadi kelembapan terendah mencapai 45 persen, hal ini menandakan sedang berada di musim panas. Sedangkan kelembapan tertinggi terjadi di tengah tahun. Kelembapan pernah mencapai 100 persenterjadi di bulan Juli. Kondisi ini tentunya menjadi patokan bagi para nelayan untuk melaut, dan juga aktivitas perekonomian yang seperti produksi dan pariwisata di akhir tahun dan atau awal tahun, memberikan tantangan tersendiri.

Tabel 2. 8 Kelembaban per Bulan Kabupaten Kepulauan Anambas 2020

Bulan	Kelembaban (%)			
	Minimum	Rata-rata / Average	Maksimum	Range
Januari	60	84	95	35
Februari	62	82	95	33
Maret	61	82	94	33
April	58	82	98	40
Mei	54	82	98	44
Juni	45	84	98	53
Juli	60	86	100	40
Agustus	54	80	98	44
September	54	83	98	44
Oktober	54	81	97	43
November	58	86	98	40
Desember	65	85	99	34
Tahun 2020	45	83	100	55

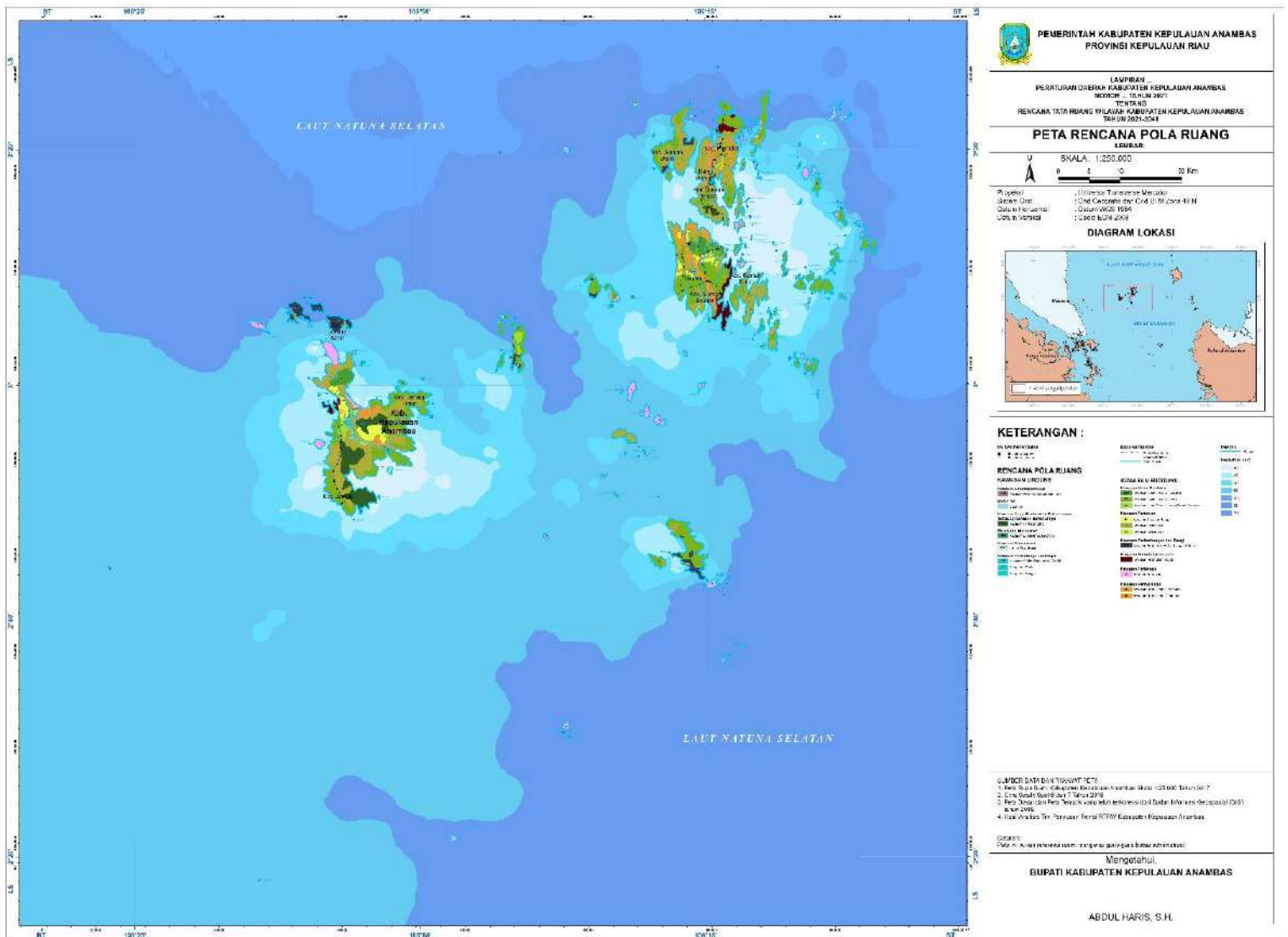
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2021

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari Kawasan Budi daya dan Kawasan Lindung. Kawasan didefinisikan sebagai wilayah yang

mempunyai fungsi utama sebagai budi daya atau lindung. Berikut adalah gambar peta penggunaan lahan atau disebut juga rencana pola ruang sesuai dengan Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

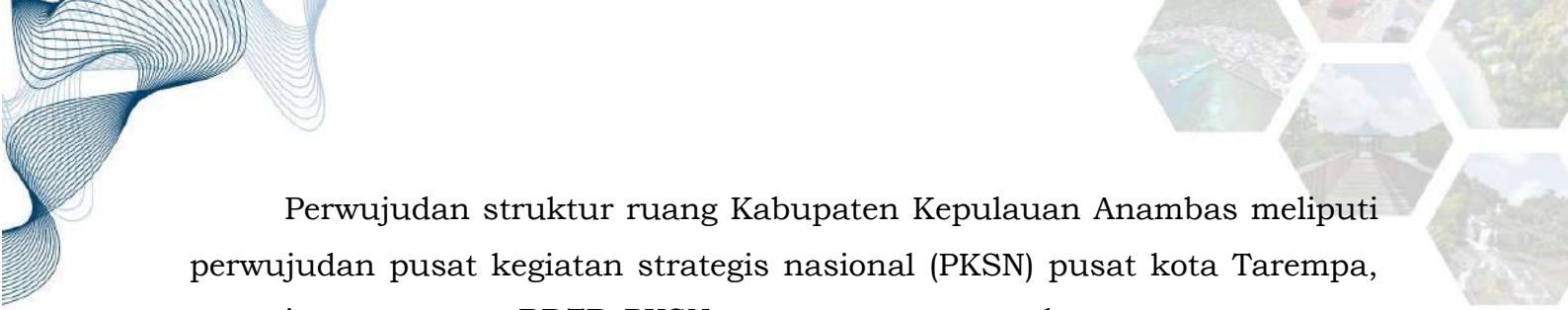
Gambar 2. 7 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kepulauan Anambas



Sumber : Lampiran Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

2.1.1.8 Struktur Ruang Wilayah

Sistem perwujudan struktur ruang meliputi perwujudan pusat permukiman anatara lain:



Perwujudan struktur ruang Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi perwujudan pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) pusat kota Tarempa, seperti penyusunan RDTR PKSN, percepatan pengembangan, pemantapan dan revitalisasi pusat pelayanan utama PKSN, pengembangan, pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pusat pemerintahan serta pengembangan ekonomi kota PKSN secara terintegrasi/ pembangunan, peningkatan dan /atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Pusat kegiatan lokal (PKL) Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi penyusunan RDTR pusat kegiatan lokal (PKL) letung dan tebang ladan seperti penyusunan RDTR pusat kegiatan lokal (PKL), percepatan pembangunan, peningkatan, pemantapan dan revitalisasi fungsi pusat pelayanan pendukung/ pusat kegiatan lokal (PKL), peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pusat kegiatan lokal (PKL) serta pengendalian kota-kota PKL berbasis mitigasi bencana.

Pengembangan pusat kawasan (PPK) Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi penyusunan RDTR pusat pelayanan kawasan (PPK) Payalaman, Nyamuk dan Air Bini, peningkatan fungsi PPK menjadi PKL, percepatan pengembangan, peningkatan revitalisasi kota-kota PPK, peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pusat pelayanan kawasan serta pengendalian kota-kota PPK berbasis mitigasi bencana.

Pusat pengembangan lingkungan (PPL) Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi pengembangan kawasan perdesaan melalui peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas di seluruh kawasan perdesaan, percepatan pengembangan, peningkatan, revitalisasi kota-kota PPL, mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan pulau-pulau kecil dan pengembangan akses bagi pulau-pulau terdepan serta pengendalian PPL berbasis mitigasi bencana.

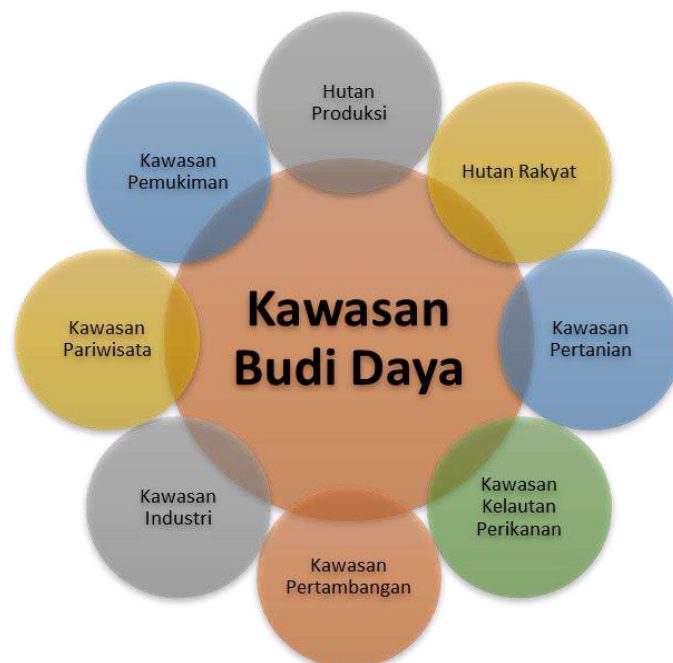
Berikut adalah pemahaman tentang kawasan-kawasan di atas. Salah satu sasaran dalam penataan ruang di Kabupaten Kepulauan Anambas

adalah menciptakan keserasian antara Kawasan Lindung dan Kawasan Budi daya.

A. Kawasan Budi Daya

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Terdapat 8 kawasan budi daya (lihat Gambar di bawah) di mana termasuk di dalamnya hutan rakyat dan hutan produksi.

Gambar 2. 8 Diagram Kawasan Budi Daya Kabupaten Kepulauan Anambas



Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

B. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berikut adalah jenis Kawasan lindung yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas:

Gambar 2. 9 Diagram Kawasan Lindung Kabupaten Kepulauan Anambas



Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Untuk kawasan lindung, Kabupaten Kepulauan Anambas, telah menuangkan kebijakan dan strategi untuk pelestariannya, yaitu :

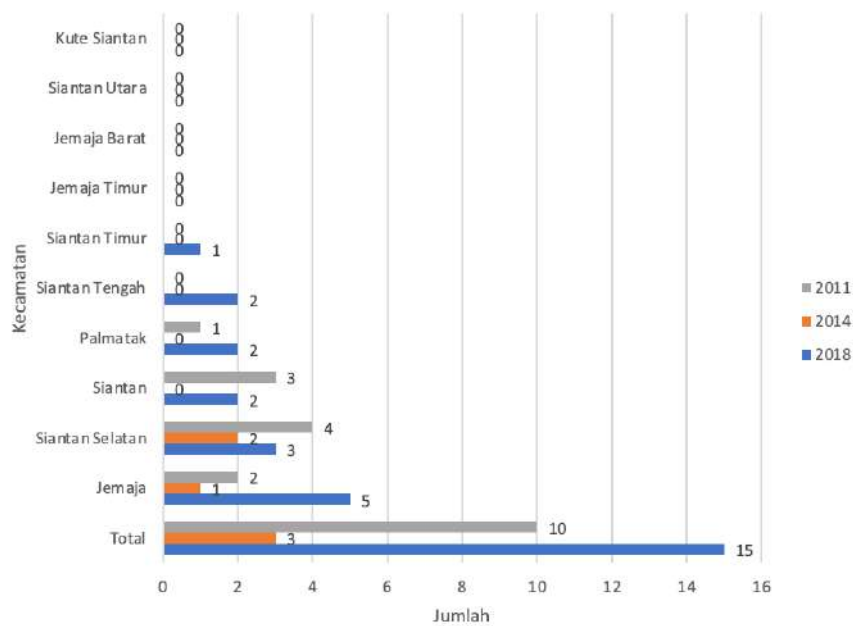
- a. kawasan hutan lindung;
- b. pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya;
- c. pemantapan kawasan perlindungan setempat;
- d. pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
- e. penanganan kawasan rawan bencana alam;
- f. penanganan kawasan lindung geologi;
- g. pemantapan kawasan lindung lainnya.

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami/gelombang pasang, abrasi, longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain. Untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, ada dua bencana alam yang tercatat

yaitu meliputi banjir dan tanah longsor. Dari tiga tahun yang di data, tahun 2011, 2014 dan 2018, terjadi 28 kali bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas. Desa di Jemaja Timur adalah daerah yang paling sering terjadi bencana, terbanyak terjadi di tahun 2011. Sedangkan di desa Siantan Tengah tidak mengalami bencana baik di 2011, 2014, atau 2018. Kecamatan-kecamatan seperti Jemaja Barat, Siantan Utara dan Kute Siantan, Kecamatan ini tergolong baru sehingga tidak ada pencatatan.

Gambar 2. 10 Jumlah Bencana per Kecamatan

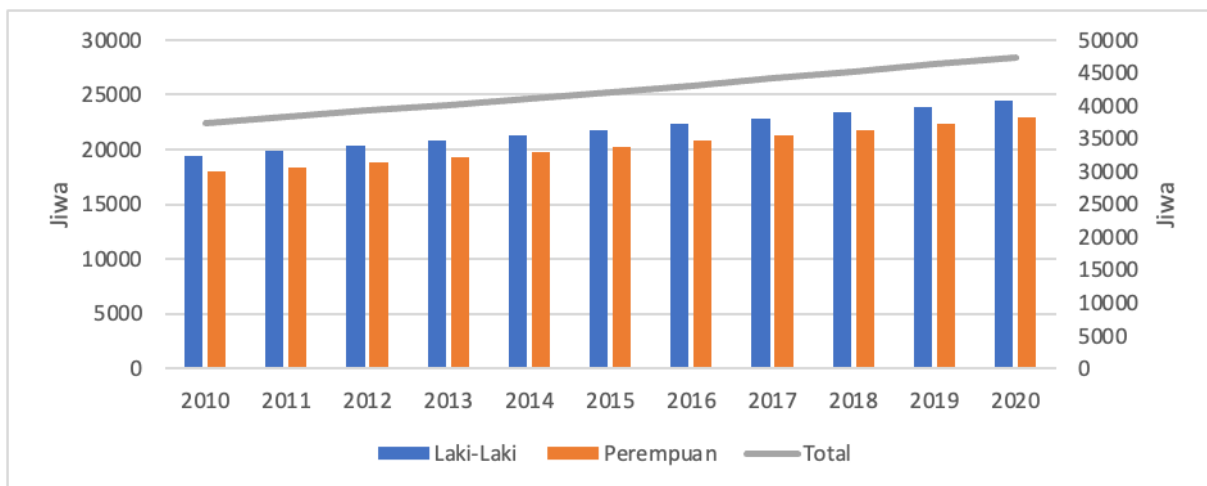


Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

2.1.3 Demografi

Di Kabupaten Kepulauan Anambas ini, laju pertumbuhan rata-rata dari 2010 s.d. 2020 per tahun mencapai 2,4 persen per tahun. Jumlah penduduk laki-laki, secara nominal, masih lebih banyak dibandingkan perempuan dengan perbandingan terakhir data tahun 2020, namun tidak signifikan. Perbandingannya adalah 52 persen : 48 persen pada tahun 2020. Perbandingan di tahun 2010 adalah sama yaitu 52 persen : 48 persen artinya, komposisi penduduk perempuan dan komposisi penduduk laki-laki tidak berubah.

Gambar 2. 11 Penduduk dan Jenis Kelamin (Dalam Jiwa)



Sumber : BPS, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas, paling banyak berdiam/tercatat (tahun 2020) di Kecamatan Siantan (28 persen), diikuti Kecamatan Palmatak (16 persen), dan Jemaja (12 persen). Hanya Kecamatan Siantan yang pertambahan proporsi penduduk dibandingkan kecamatan lain. Semua kecamatan mengalami pertambahan penduduk dari 2010 sampai dengan 2020 kecuali Kecamatan Palmatak yang mengalami penurunan penduduk karena adanya pemekaran Kecamatan Siantan Utara dan Kute Siantan. Sedangkan komposisi penduduk di kecamatan lain cenderung konstan, di mana pertumbuhannya mengikuti pertumbuhan Kabupaten Kepulauan Anambas secara umum.

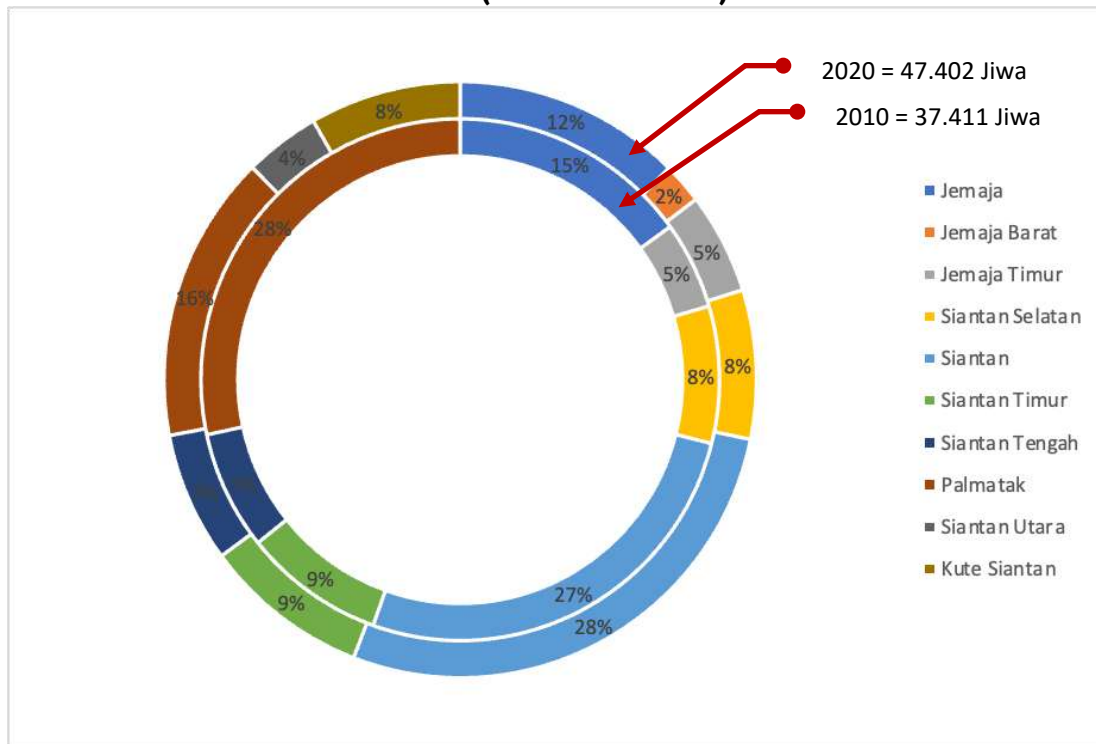
Dari tahun 2016 hingga tahun 2018, rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung stagnan di angka 58 persen. Hal ini berarti, setiap 100 penduduk berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 58 orang yang belum produktif dan orang yang dianggap tidak produktif lagi. Kemudian rasio ketergantungan menurun pada 2019 menjadi 47,4 persen dan meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi 47,6 persen.

Tabel 2. 9 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020

Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
0-14	13.534	13.690	13.855	13.104	12.865
65+	1.500	1.532	1.564	2.173	2.411
15-64	25.887	26.190	26.508	32.196	32.126
Rasio Ketergantungan	0,581	0,581	0,582	0,474	0,476

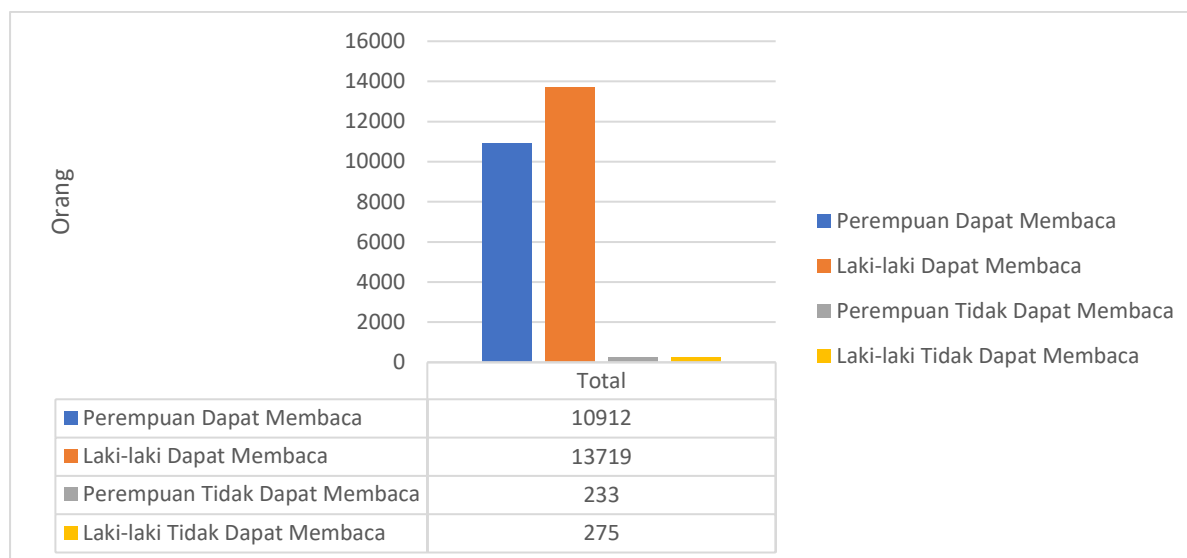
Sumber : BPS dan Tim Penyusun RPJMD, diolah

Gambar 2. 12 Komposisi Penduduk berdasarkan Kecamatan 2010 dan 2020 (Dalam Persen)



Sumber : BPS, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Gambar 2. 13 Komposisi Penduduk Dapat Membaca dan Tidak Kabupaten Kepulauan Anambas 2020 (Dalam Orang)



Sumber : BPS, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

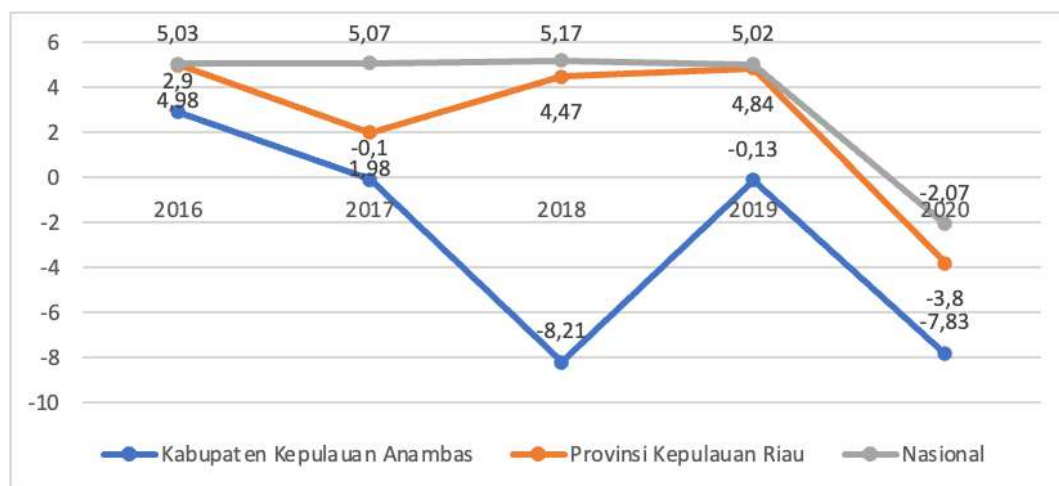
2.2.1.1 Pertumbuhan ekonomi

Salah satu indikator pembangunan adalah laju pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan perbaikan dalam pembangunan sektor-sektor ekonomi suatu daerah. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian ditentukan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil daerah yang bersangkutan. PDRB atas harga berlaku dengan migas di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2020 secara nominal sekitar Rp 14,45 triliun. Pada tahun yang sama, PDRB atas dasar harga konstan (PDRB riil) dengan migas yang senilai Rp 11,1 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas menurut PDRB harga konstan dengan migas terus mengalami perlambatan sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 sebesar 2,90 persen, tahun 2017 sebesar -0,10 persen, tahun 2018 sebesar -8,21 persen, tahun 2019 sebesar -0,13 persen, dan tahun 2020 sebesar -7,83 persen. Pertumbuhan ekonomi

pada tahun 2018 merupakan titik terendah dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mulai berada di level yang lebih tinggi daripada tahun 2018. Hal ini dapat menjadi dorongan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi pada level positif di tahun-tahun berikutnya. Namun, disayangkan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan penurunan kembali perekonomian sebesar -7,83 persen. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional dari tahun 2016-2020.

Gambar 2. 14 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (Dalam Persen)

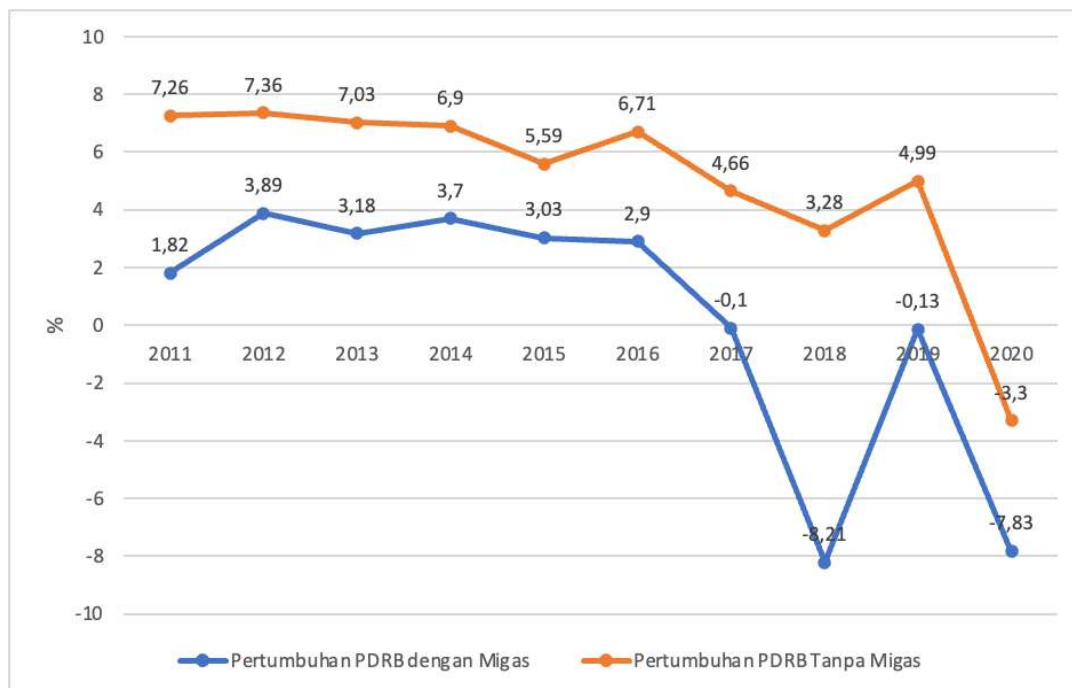


Sumber: BPS Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Kepulauan Anambas, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Besarnya kontribusi dari migas terhadap PDRB membuat sektor-sektor non-migas tampak mengikuti pertumbuhan PDRB secara agregat. Maka perlunya untuk melihat struktur ekonomi tanpa migas. Dapat dilihat pada gambar 2.15 bahwa pertumbuhan PDRB tanpa migas lebih tinggi daripada pertumbuhan PDRB dengan migas. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor non-migas sebenarnya tumbuh pada level yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi dengan migas. Pada tahun 2020 pertumbuhan non-migas sebesar -3,3 persen dan selama lima tahun terakhir pertumbuhan rata-rata sekitar 3,29 persen. Rendahnya angka pertumbuhan PDRB dengan migas disebabkan oleh sensitivitas terhadap penjualan migas yang

tergantung pada permintaan dan harga migas internasional serta produksi migas yang menurun.

Gambar 2. 15 Pertumbuhan PDRB dengan Migas dan tanpa Migas Tahun 2011-2020 (Dalam Persen)



Sumber: BPS, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

2.2.1.2 Kontribusi Ekonomi

PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas mengalami fluktuasi pada tahun 2016-2020. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp.17,43 triliun sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp.14,45 triliun. Pada tahun 2020 sektor pertambangan dan penggalan memiliki nilai terbesar di dalam komponen PDRB sebesar Rp.11,57 triliun kemudian diikuti oleh sektor konstruksi sebesar Rp.888,10 miliar dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp.880,95 miliar.

Secara nominal, Industri Pengolahan menurun dari 1,81 triliun rupiah di tahun 2016 menjadi 23,9 miliar rupiah di tahun 2020. Menurut BPS (2020), penurunan tersebut disebabkan oleh kegiatan sub kategori Industri Batubara dan Pengilangan Migas yang sudah tidak dilakukan di Kabupaten

Kepulauan Anambas, sehingga tidak menghasilkan nilai tambah bruto sejak 2018. Bahkan pertumbuhan Industri Pengolahan terkontraksi hingga -99,09 persen di tahun 2018. Pada tahun 2020, tujuh sub kategori Industri lainnya tumbuh bahkan terdapat empat sub kategori yang tumbuh di atas lima persen. Keempat sub kategori tersebut antara lain: Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik sebesar 8,65 persen; Industri Makanan dan Minuman sebesar 6,27 persen; sebesar 5,91 persen dan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi sebesar 5,48 persen.

Tabel 2. 10 Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Kabupaten Kepulauan Anambas (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Jenis Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
		Miliar Rupiah	Miliar Rupiah	Miliar Rupiah	Miliar Rupiah	Miliar Rupiah
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	793,98	845,8	881,6	884,98	880,95
2	Pertambangan dan Penggalian	12.408,06	12.871,52	14.075,07	14.468,34	11.572,29
3	Industri Pengolahan	1.809,37	1.781	20,25	21,71	23,19
4	Pengadaan Listrik, Gas	8,19	8,92	9,43	9,58	9,59
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,34	0,36	0,38	0,39	0,4
6	Konstruksi	726,06	814,16	858,64	961,01	888,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	326,06	363,17	391,3	428,46	415,36
8	Transportasi dan Pergudangan	27,41	30,18	31,52	32,9	20,87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,36	15,17	16,84	18,79	15,02
10	Informasi dan Komunikasi	51,53	58,48	62,43	71,98	74,97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	17,42	19,25	20,31	21,47	21,72
12	Real Estat	82,21	90,55	93,91	100,64	97,3
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	272,97	290,59	312,73	338,2	351,05
15	Jasa Pendidikan	25,52	28,8	30,92	33,59	35,79
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25,92	30,29	33,36	36,53	36,72
17	Jasa lainnya	9,18	9,84	10,48	11,17	10,23

No.	Jenis Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
		Miliar Rupiah	Miliar Rupiah	Miliar Rupiah	Miliar Rupiah	Miliar Rupiah
	Produk Domestik Regional Bruto	16.597,58	17.258,1	16.849,18	17.439,77	14.453,58

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Perhitungan PDRB pendekatan lapangan atau sektor usaha membagi PDRB secara agregat menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai dengan bidang usaha. Contohnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini mengestimasi nilai tambah yang hanya berkaitan dengan pekerjaan di bidang pertanian/kehutanan/perikanan. Nilai tambah pada sebuah sektor dibagi dengan nilai tambah PDRB secara agregat akan diperoleh distribusi sektor ekonomi. Dari distribusi tersebut dapat menghasilkan informasi seperti sektor yang dominan di suatu wilayah, perkembangan setiap sektor antar waktu, dan perkembangan transformasi struktural.

Perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang nilai kontribusinya sebesar 80,07 persen pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh adanya potensi ladang minyak dan gas bumi (migas) yang berasal dari sumber daya yang dimiliki oleh Kepulauan Anambas. Kontribusi sektor ini semakin meningkat selama lima tahun terakhir. Selain itu, sektor pertanian, konstruksi, perdagangan juga mengalami tren peningkatan.

Sektor konstruksi dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang dominan kedua dan ketiga dengan persentase sebesar 6,14 persen dan 6,15 persen secara berturut-turut. Sedangkan sektor yang berkontribusi terendah yaitu sektor jasa perusahaan (0,0002 persen); sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (0,0022 persen); dan sektor pengadaan listrik dan gas (0,07 persen).

Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami tren penurunan. Bahkan, pada tahun 2018 sektor tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis dari 10,32 persen menjadi 0,12 persen. Penurunan ini sejalan dengan penurunan nilai PDRB dan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan.

Tabel 2. 11 Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Anambas (Dalam Persen)

No.	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
		%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,78	4,90	5,23	5,04	6,15
2	Pertambangan dan Penggalian	74,76	74,59	83,54	82,99	80,07
3	Industri Pengolahan	10,90	10,32	0,12	0,12	0,16
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,05	0,05	0,06	0,05	0,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi	4,37	4,72	5,10	5,51	6,14
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,96	2,10	2,32	2,46	2,87
8	Transportasi dan Pergudangan	0,17	0,17	0,19	0,19	0,14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,08	0,09	0,10	0,11	0,1
10	Informasi dan Komunikasi	0,31	0,34	0,37	0,41	0,52
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,10	0,11	0,12	0,12	0,15
12	Real Estat	0,50	0,52	0,56	0,58	0,67
13	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,64	1,68	1,86	1,94	2,43
15	Jasa Pendidikan	0,15	0,17	0,18	0,19	0,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,16	0,17	0,20	0,21	0,25
17	Jasa lainnya	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

2.2.1.3 Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilihat baik melalui pendekatan sektor maupun pengeluaran. Untuk pendekatan sektor telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian mendominasi kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen yang berkontribusi terbesar yaitu net ekspor barang dan jasa, kontribusinya sekitar 57,81 persen terhadap PDRB total pada tahun 2020. Kemudian disusul Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan konsumsi rumah tangga, masing-masing 19,36 persen dan 12,64 persen. Tingginya kontribusi net ekspor tidak terlepas dari peran Kabupaten Kepulauan Anambas di dalam perdagangan internasional dan regional. Kekayaan alam melimpah berupa

minyak dan gas bumi yang diekspor ke luar negeri memberikan kontribusi besar pada sisi ekspor.

Tabel 2. 12 Produk Domestik Bruto Berdasarkan Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10,07	10,63	11,86	12,64	12,64
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,77	9,17	9,70	9,79	9,79
Pembentukan Modal Tetap Bruto	17,09	17,55	18,50	19,36	19,36
Perubahan Inventori	0,20	0,10	0,13	0,35	0,35
Net Ekspor Barang dan Jasa	63,81	62,49	59,74	57,81	57,81
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

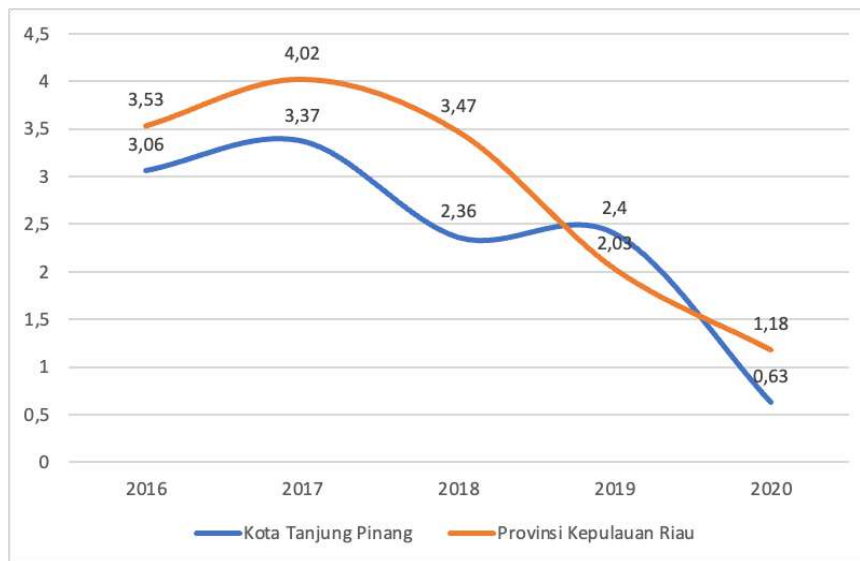
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

2.2.1.4 Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi digunakan untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Indikator yang terdapat pada inflasi tersebut dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro maupun makro, baik fiskal atau moneter.

Laju inflasi tidak pernah diukur untuk daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Oleh karena itu, inflasi berpatokan pada daerah terdekat yaitu Kota Tanjungpinang. Menurut BPS, selama periode 2016-2020, laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 3,37 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan laju inflasi sebesar 0,63 persen. Bila inflasi Kota Tanjungpinang dibandingkan dengan inflasi Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2016-2020 inflasi Kota Tanjungpinang lebih rendah daripada inflasi level provinsi.

Gambar 2. 16 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020 (Dalam Persen)



Sumber: BPS, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

2.2.1.5 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan

PDRB per kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya. PDRB per kapita sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk.

Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, PDRB per kapita secara umum mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2020. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi yang negatif di tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada tahun 2020 PDRB per kapita mengalami titik terendah dalam lima tahun terakhir yaitu sebesar Rp.259,79 juta per jiwa (PDRB dengan migas). Namun, di sisi lain PDRB per kapita tanpa migas

justru mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Artinya, pertumbuhan sektor non-migas tumbuh ke arah yang positif sebelum pandemi Covid-19. Namun setelah adanya pandemi Covid-19, PDRB per kapita tanpa migas hanya sebesar Rp.46,97 juta per jiwa.

Gambar 2. 17 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020 (Dalam Juta Per Jiwa)



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

2.2.1.6 Pemerataan Ekonomi: Indeks Gini

Pendapatan penduduk pada suatu daerah pada umumnya tidaklah merata. Perbedaan pendapatan ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Suatu metode mengukur ketimpangan yaitu Indeks Gini. Indeks Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Adapun kriteria dalam menentukan ketimpangan adalah sebagai berikut:

- $0 < G \leq 0,35$ menunjukkan ketimpangan rendah
- $0,35 < G < 0,50$ menunjukkan ketimpangan sedang

- $G \geq 0,50$ menunjukkan ketimpangan tinggi

Level indeks gini tertinggi dalam periode 2016-2020 yaitu sebesar 0,32 pada tahun 2016. Pada tahun 2016 dan 2017 indeks gini sebesar 0,32 dan 0,29 secara berurutan. Hal ini menunjukkan pemerataan pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas semakin merata. Meskipun masalah ketimpangan dapat diatasi, perlu tetap mewaspadaai terjadinya ketimpangan yang lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya. Dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain dalam Provinsi Kepulauan Riau, indeks Gini Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk paling rendah dan di bawah indeks Gini Provinsi Riau.

Tabel 2. 13 Indeks Gini Kabupaten atau Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Indeks Gini Berdasarkan Kabupaten/Kota				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Bintan	0,33	0,3	0,33	0,30	0,31
Kabupaten Natuna	0,34	0,32	0,33	0,30	0,34
Kabupaten Karimun	0,30	0,34	0,35	0,30	0,32
Kabupaten Lingga	0,29	0,34	0,29	0,28	0,28
Kabupaten Kepulauan Anambas	0,32	0,29	0,29	0,28	0,30
Kota Batam	0,33	0,31	0,31	0,33	0,32
Kota Tanjung Pinang	0,36	0,34	0,32	0,31	0,35
Provinsi Kepulauan Riau	0,35	0,33	0,33	0,34	0,34

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

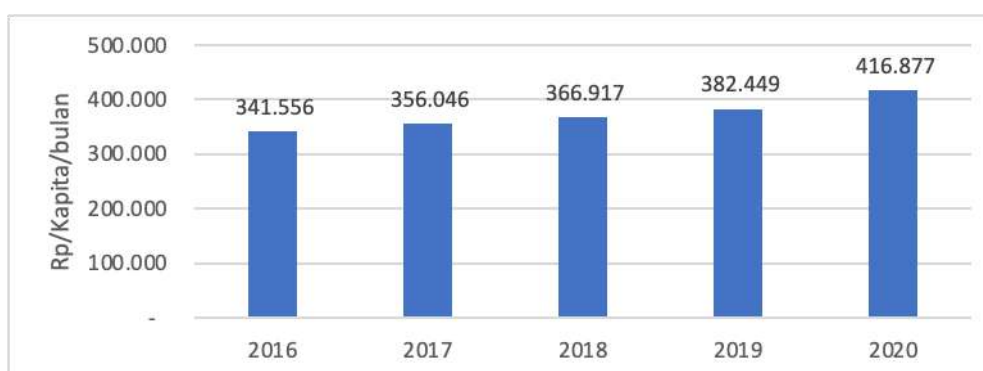
2.2.2.1 Kemiskinan: persentase kemiskinan, rasio kesenjangan P0, P1, dan P2

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan garis

kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Garis kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 garis kemiskinan sebesar Rp. 341.556/kapita/ bulan. Hal ini berarti penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran di bawah Rp. 313,042 per bulan akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Pada tahun 2020, garis kemiskinan ini meningkat menjadi Rp.416.877/kapita/bulan.

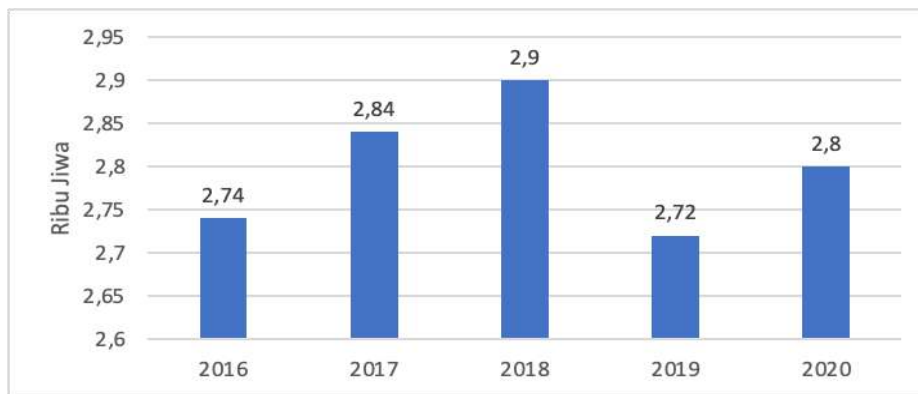
Gambar 2. 18 Garis Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Rupiah Per Kapita Per Bulan)



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas terus mengalami peningkatan selama 3 tahun berturut-turut dari 2016 hingga 2018, namun kembali turun pada 2019 dan naik kembali pada 2020. Secara rata-rata penduduk miskin meningkat sebesar 2,5 persen per tahunnya pada tahun 2015-2018. Sedangkan, pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 2.720 menjadi 2.800 penduduk pada tahun 2020.

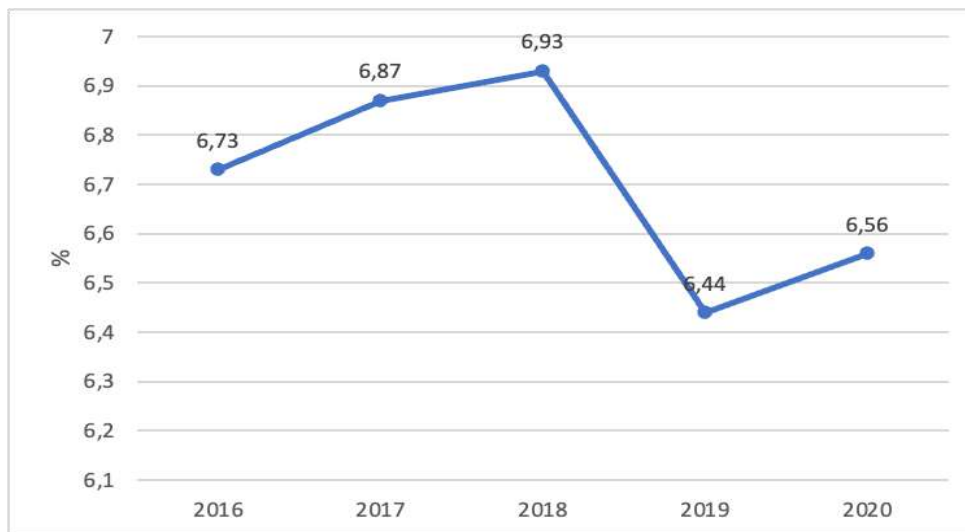
Gambar 2. 19 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Ribuan Jiwa)



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Persentase penduduk miskin (PO) adalah persentase penduduk yang berada di bawah GK. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir. Mulai dari tahun 2016 terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 yang mencapai angka tertinggi sebesar 6,93 persen. Fenomena ini bersamaan dengan tingkat PDRB dan pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun. Hal tersebut yang menjelaskan bahwa perkembangan sektor ekonomi yang lesu dapat menambah angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2016 hingga 2020 mempunyai tren yang sama dengan jumlah penduduk miskin, di mana persentase penduduk miskin terus meningkat selama tiga tahun berturut-turut dari 6,73 persen pada tahun 2016 menjadi 6,93 persen pada tahun 2018. Sedangkan di tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 6,44 persen dan meningkat kembali pada 2020 menjadi 6,56 persen.

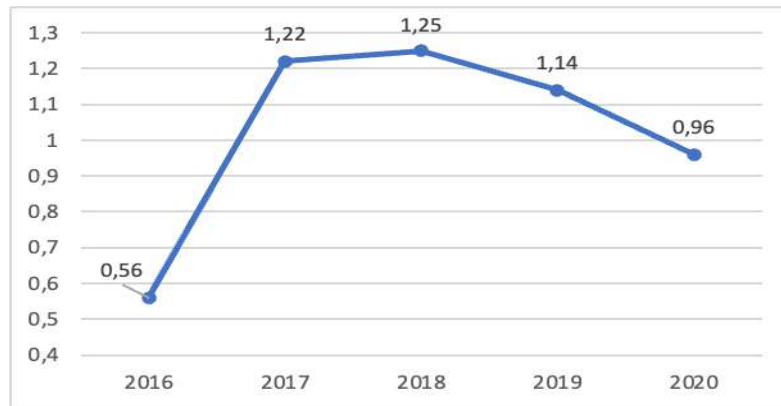
Gambar 2. 20 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berdasarkan tingkat kedalamannya, kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2016-2018 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, pengeluaran penduduk semakin jauh dari garis kemiskinan. Pada tahun 2016 terjadi penurunan 0,99 menjadi 0,56. Akan tetapi, kembali meningkat hingga 1,22 dan 1,25 pada tahun 2017 dan 2018. Meski demikian, di tahun 2019 kedalaman kemiskinan Kabupaten Kepulauan Anambas kembali turun meskipun angkanya masih melebihi 1. Pada tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan kembali turun menjadi di bawah 1.

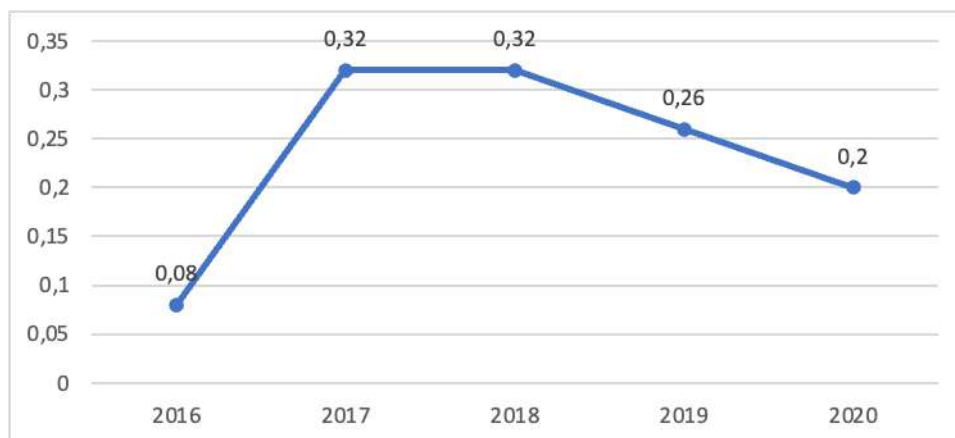
Gambar 2. 21 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020



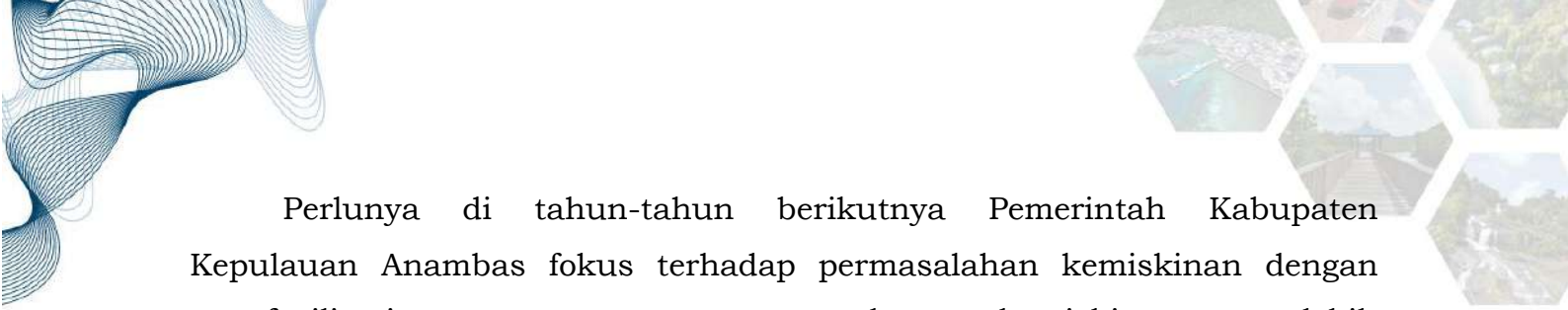
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Keparahannya kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami penurunan dan peningkatan sepanjang tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016, terjadi penurunan tajam tingkat keparahan kemiskinan dari 0,26 menjadi 0,08. Hal ini berarti, ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin di tahun 2016 tidak terlalu tinggi. Akan tetapi, di tahun 2017 indeks keparahan mengalami peningkatan mencapai 0,32 dan kembali turun menjadi 0,26 pada tahun 2019 dan menjadi 0,2 pada tahun 2020.

Gambar 2. 22 Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021



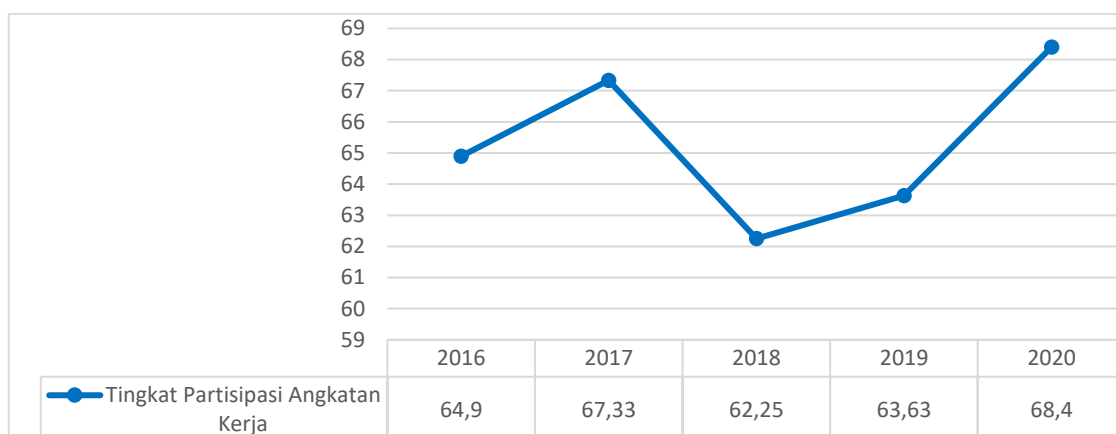
Perlunya di tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas fokus terhadap permasalahan kemiskinan dengan memfasilitasi program-program penanggulangan kemiskinan yang lebih diarahkan pada pembangunan perdesaan, mengembangkan sarana dan prasarana dasar (jalan, jembatan, pelabuhan desa) untuk mempermudah angkutan dan distribusi barang dan jasa dari desa ke pusat-pusat aktivitas perekonomian daerah. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat perdesaan, maka perlu tindak lanjut pemberdayaan perempuan di perdesaan, pengembangan usaha mikro dan kecil termasuk usaha non formal dan mengembangkan akses permodalan masyarakat berbasis pada potensi lokal.

2.2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Angkatan Kerja, dan Upah Tenaga Kerja

Penduduk merupakan faktor penting sebagai daya dukung di dalam sebuah perekonomian. Penduduk yang telah memasuki usia antara 15 sampai 64 tahun adalah penduduk usia produktif untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Penduduk usia produktif yang sudah memiliki pekerjaan dan sedang mencari atau tidak memiliki pekerjaan disebut angkatan kerja. Penduduk bekerja atau tenaga kerja adalah angkatan kerja yang memiliki pekerjaan sedangkan pengangguran adalah penduduk yang sedang mencari atau tidak memiliki pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara angkatan kerja dan jumlah penduduk dikalikan dengan 100.

Pada tahun 2016–2020, TPAK di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan peningkatan dari tahun 2016–2017, yaitu dari angka 64,9 menjadi 67,33. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan kemudian tahun 2019 kembali menunjukkan peningkatan hingga mencapai 68,40 pada tahun 2020. Rinciannya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2. 23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas 2021, diolah

Berdasarkan Pendidikan tertinggi yang ditamatkan, data Angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020 didominasi oleh lulusan sekolah dasar sebanyak 10.266 orang dan kemudian disusul jauh oleh lulusan SMA sebanyak 5.130 orang. Sedangkan untuk persebaran pengangguran terbuka, jumlahnya hampir merata di setiap tingkatan lulusan jenjang Pendidikan dengan total sebanyak 740 orang. Terdapat peningkatan jumlah angkatan kerja dari tahun 2016 sebesar 17.366 orang menjadi 20.759 orang pada tahun 2020 dan juga terdapat penurunan pengangguran terbuka dari 1.184 orang pada tahun 2016 menjadi 740 orang pada tahun 2020. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 14 Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Tahun 2016-2020

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Usia Produktif	Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kegiatan (Jiwa) Tahun 2016-2020		
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
<= Sekolah dasar	10.266	201	10.467
Sekolah menengah pertama	2.176	63	2.239
Sekolah menengah atas	5.130	314	5.444
Perguruan tinggi	3.187	162	3.349
TOTAL 2020	20.759	740	21.499
TOTAL 2019	18.203	546	18.749
TOTAL 2018	19.490	491	19.981
TOTAL 2017	17.962	982	18.944
TOTAL 2016	17.366	1.184	18.550

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas 2021, diolah

Dalam hal jenis pekerja menurut lapangan pekerjaan utama usia produktif di Kabupaten Kepulauan Anambas, jenis pekerja terbagi menjadi pekerja formal dan informal yang terbagi dalam 3 sektor, yaitu pertanian, industri pengolahan, dan jasa. Secara umum, semua pekerja baik formal maupun non formal mengalami peningkatan rata-rata upah sebulan tiap tahunnya. Apabila dibandingkan, rata-rata upah sebulan pekerja formal ternyata lebih tinggi dibandingkan pekerja non formal, kecuali sektor pertanian. Pekerja informal sektor pertanian mengalami peningkatan rata-rata upah per bulan yang signifikan sejak 2016–2020. Di bidang jasa, pekerja informal juga merasakan peningkatan rata-rata upah per bulan yang signifikan sejak tahun 2016–2020. Detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 15 Rata-Rata Upah Bersih Sebulan Pekerja Informal Dan Formal Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2016-2020

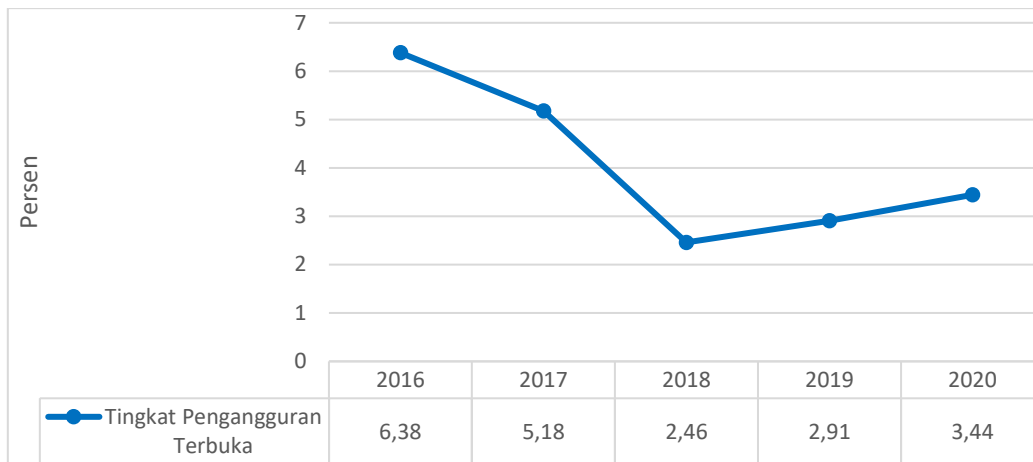
Lapangan Pekerjaan Utama Usia Produktif	Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Rupiah)									
	Informal					Formal				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian	1.127.089	1.249.971	2.377.060	2.481.340	2.361.188	1.215.385	1.660.385	1.565.385	1.157.534	1.799.727
Industri Pengolahan	1.027.862	1.094.121	2.521.983	2.512.105	2.242.721	3.047.767	3.697.750	3.497.767	3.983.885	3.119.985
Jasa	530.008	474.980	1.628.496	2.158.504	2.824.453	3.061.450	3.511.527	3.361.527	3.568.375	3.026.708

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021, diolah

2.2.2.3 Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angka pengangguran merupakan banyaknya angkatan kerja yang sedang mencari atau tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase angka pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka TPT yang rendah menunjukkan angkatan kerja banyak terserap lapangan pekerjaan sedangkan angka TPT yang tinggi berlaku sebaliknya. Dari tahun 2016 hingga 2018 tren TPT mengalami penurunan dengan level terendah sebesar 2,46 persen pada tahun 2018. Persentase yang semakin rendah menunjukkan angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat terserap dengan baik di pasar tenaga kerja. Namun, tahun 2019 terjadi sebaliknya yaitu mengalami kenaikan. TPT tahun 2020 sebesar 3,44 persen naik dari 2,46 persen pada tahun 2018.

Gambar 2. 24 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Persen)



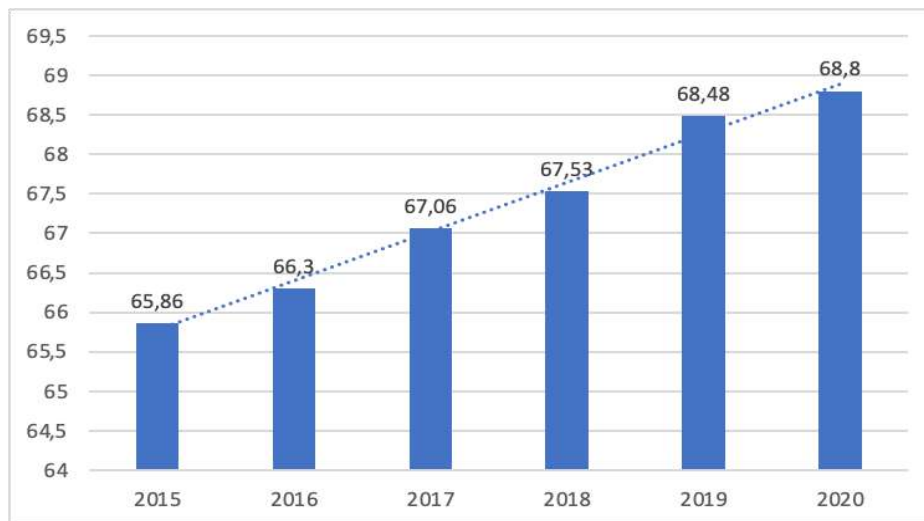
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021, diolah

2.2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks pengukuran yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki IPM sebesar 68,80 pada tahun 2020, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 68,48.

IPM dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu: (1) rendah (IPM di bawah 50), (2) menengah rendah (50-65), (3) menengah tinggi (IPM 65-70), dan (4) tinggi (IPM di atas 70). Berdasarkan kategori tersebut, Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk ke dalam kategori IPM menengah tinggi (IPM antara 65-70).

Gambar 2. 25 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015-2020



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2015-2021

Jika dibandingkan dengan tujuh kota atau kabupaten yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, IPM di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2020 sebesar 68,80 menduduki peringkat keenam. Kota Batam merupakan kota dengan IPM paling tinggi sebesar 81,11. Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka IPM pada tahun 2020 sebesar 75,59. Dengan demikian, kualitas pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas masih jauh di bawah standar kualitas pembangunan manusia provinsi secara umum.

Tabel 2. 16 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten atau Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	69,21	69,84	70,26	70,56	71,10	71,44
Bintan	71,92	72,38	72,91	73,41	73,98	74,13
Natuna	70,87	71,23	71,52	72,10	72,63	72,72
Lingga	61,28	62,44	63,45	64,06	64,98	65,29
Kepulauan Anambas	65,86	66,30	67,06	67,53	68,48	68,8
Kota Batam	79,34	79,79	80,26	80,54	81,09	81,11
Kota Tanjungpinang	77,57	77,77	78,00	78,33	78,73	78,91
Kepulauan Riau	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka, 2016-2021

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Bila mengacu pada data tabel di bawah ini, perkembangan AMH di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan angka yang sangat baik, di mana 96,14 persen penduduknya melek huruf di tahun 2020.

Tabel 2. 17 Angka Melek Huruf Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020 (dalam persen)

	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (dalam persen)	94,5	97,27	98,45	97,86	96,14

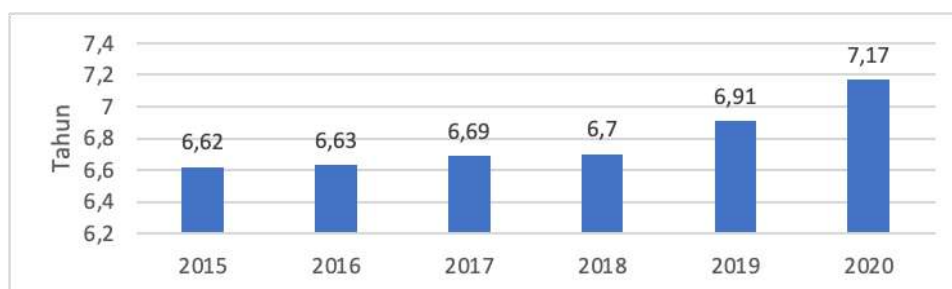
Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Anambas 2021

AMH juga semula digunakan menjadi salah satu indikator untuk menghitung IPM Kabupaten Kepulauan Anambas, namun menurut Laporan IPM 2018, AMH tidak lagi relevan untuk indikator Pendidikan karena tidak menggambarkan kualitas pendidikan. Sebagai pengganti indikator Angka Melek Huruf yaitu indikator Angka Harapan Lama Sekolah. Dengan masuknya angka harapan lama sekolah, berarti indikator ini akan berkombinasi dengan Indikator rata-rata lama sekolah dalam menyusun indeks pengetahuan. Perpaduan ini pun dapat memberikan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan lebih bisa menunjukkan perubahan yang terjadi.

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

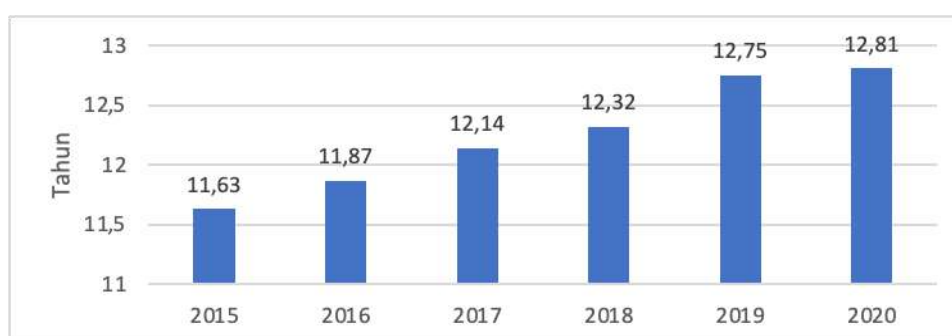
Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal disebut rata-rata lama sekolah (RLS). Dari tahun 2014 hingga 2018 RLS mengalami peningkatan secara terus-menerus. Pada tahun 2018 RLS mencapai 6,76 tahun yang artinya penduduk usia 15 tahun ke atas menjalani pendidikan formal sekitar 6,76 tahun. Angka ini meningkat dari tahun 2017 yang masih sekitar 6,69 tahun.

Gambar 2. 26 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015-2020 (dalam tahun)



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Gambar 2. 27 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015-2020 (dalam tahun)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

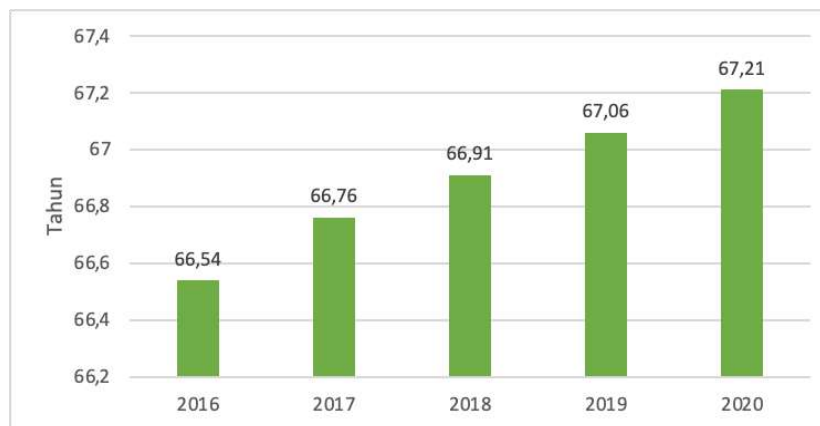
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Pada tahun 2020, angka HLS di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 12,81. Hal ini berarti, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,81 tahun.

3. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH tahun 2014 sebesar 66,23 tahun meningkat menjadi 66,91 tahun pada tahun 2018. Tren selama tahun 2014-2020 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya indikasi peningkatan faktor kesehatan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas. Peningkatan kualitas pelayanan

kesehatan dan kemudahan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan menjadi faktor kunci dalam peningkatan kesehatan penduduk.

Gambar 2. 28 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Tahun)

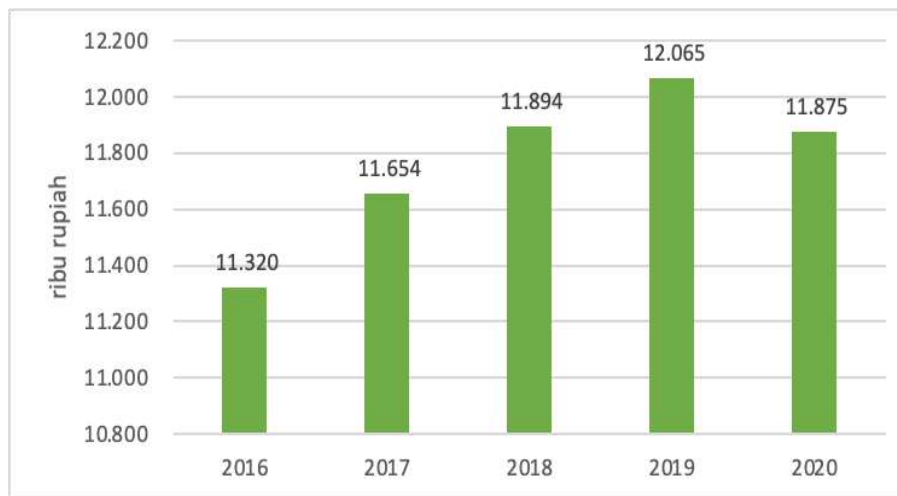


Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

4. Pengeluaran Per Kapita

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson. Pengeluaran Per Kapita tahun 2016 sebesar Rp 11,32 juta meningkat menjadi Rp 11,65 juta pada tahun 2017. Tren selama tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya indikasi peningkatan faktor kemampuan konsumsi penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas. Peningkatan kemampuan konsumsi menjadi faktor kunci dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan Pengeluaran Per Kapita menjadi Rp 11,875 juta yang salah satu penyebabnya adalah pandemi Covid-19.

Gambar 2. 29 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Ribu Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

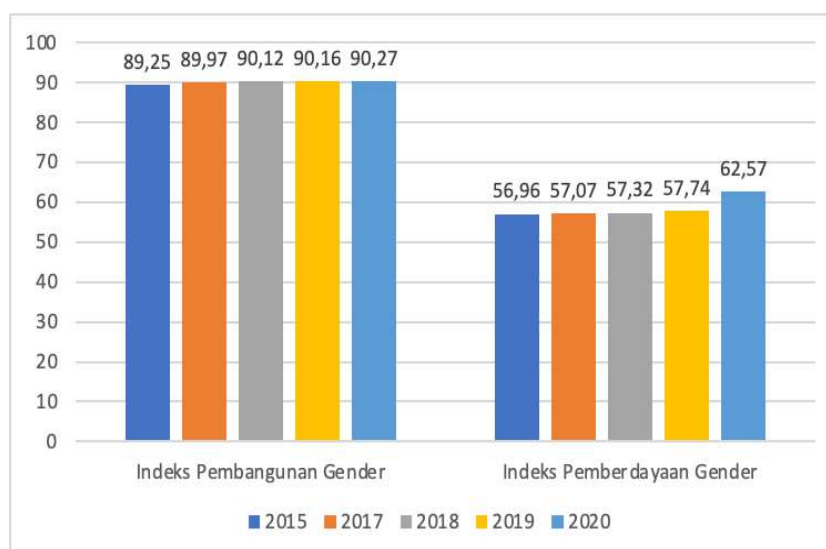
2.2.2.5 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, pemerintah berupaya melakukan kegiatan pembangunan. Upaya tersebut pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, namun demikian pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok yang mengalami ketertinggalan dalam proses pembangunan tersebut, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaat. Salah satu hal yang menyebabkan ketertinggalan dari beberapa kelompok tersebut adalah masih belum terciptanya kondisi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, pembangunan seringkali mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender.

IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan melalui perspektif gender. IPG merupakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan gender ditunjukkan oleh besarnya Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2020 sebesar 90,27. Kesetaraan Gender terjadi apabila nilai IPM

mendekati angka 100. Indeks Pemberdayaan Gender yang selanjutnya disingkat IDG merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. IDG Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2020 sebesar 62,57.

Gambar 2. 30 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015-2020²



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2015-2020

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Untuk sarana prasarana olahraga, terdapat total 171 lokasi. Dari total tersebut didominasi oleh lapangan bola voli sekitar 87 lokasi. Kemudian disusul lapangan sepak bola dan lapangan takraw.

² Pada tahun 2016 IPG dan IDG hanya dihitung pada level provinsi

**Tabel 2. 18 Jumlah Sarana Prasarana Olahraga 2016-2020
(Dalam Unit)**

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Lapangan Sepak Bola	35	35	37	37	37
2	Lapangan Bola Voli	85	85	89	89	87
3	Lapangan Takraw	30	30	33	33	35
4	Lapangan Futsal	6	6	6	6	6
5	Lapangan Silat	1	1	2	2	2
6	Lapangan Tennis	1	1	1	1	1
7	Lapangan Badminton	3	3	3	3	3
TOTAL		161	161	171	171	171

Sumber: Dinas Pendidikan dan Olahraga dan BPS, 2020, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek ini terbagi menjadi 4 (empat) jenis layanan, yaitu layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non-dasar, layanan pilihan, dan layanan penunjang. Selengkapnya adalah sebagai berikut:

2.3.1 Fokus layanan Urusan Pemerintah Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1.1. Pendidikan

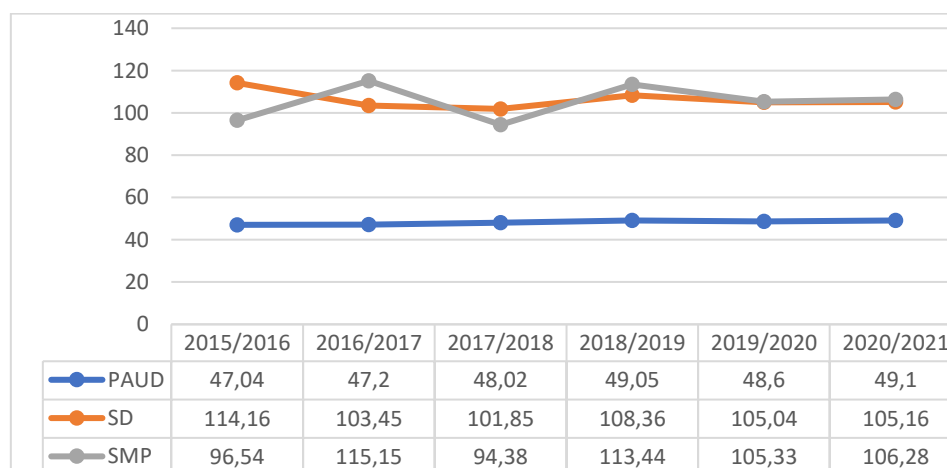
Dalam rangka memenuhi kualitas pendidikan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dibutuhkan berbagai kebijakan dan program yang mengacu pada standar pendidikan nasional, karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Kepulauan Anambas. Urusan wajib ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Untuk menggambarkan urusan pendidikan secara keseluruhan di Kabupaten Kepulauan Anambas capaian pada tingkat pendidikan dasar juga disertakan pada uraian berikut.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar (APK) adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kondisi APK tahun 2016–2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2. 31 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020 (Dalam Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021, diolah

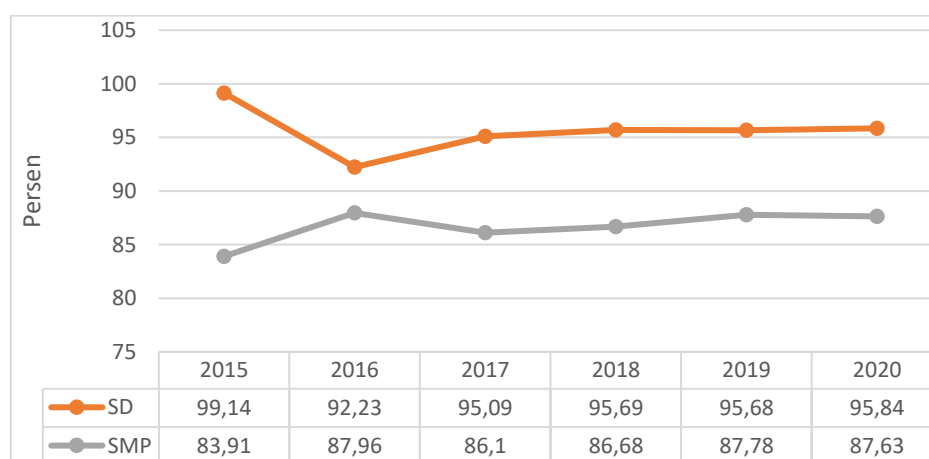
Selama 6 tahun terakhir, dapat dilihat bahwa angka partisipasi kasar Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Sekolah PAUD terjadi penurunan tren terutama untuk 2 tahun terakhir, sedangkan untuk SD/MI/ Paket A selalu melebihi angka 100 persen. Begitu juga dengan angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B menunjukkan angka partisipasi diatas 100 persen.

Kondisi ini dikarenakan proporsi yang digunakan adalah murid pada jenjang tertentu berapa pun umurnya, turut dihitung. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah murid dari jenjang ini selalu melebihi jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama. Dengan demikian, indikasi partisipasi penduduk dalam pendidikan di jenjang ini memberikan gambaran yang baik, karena kondisi ini menunjukkan bahwa semua penduduk dalam usia jenjang Pendidikan ini sedang bersekolah.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non-Formal (Paket A dan Paket B) turut diperhitungkan. Sedikit berbeda dengan APK, perhitungan APM hanya mencakup usia tertentu sesuai dengan jenjangnya. Berikut di bawah ini adalah kondisi APM Kabupaten Kepulauan Anambas selama 5 tahun terakhir.

Gambar 2. 32 Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Kepulauan Anambas 2016-2020 (Dalam Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Dari grafik di atas, nampak bahwa dari semua jenjang, APM untuk jenjang SD/MI/Paket A mendominasi dengan pencapaian lebih dari 90 persen selama 6 tahun terakhir. Hal ini kemudian disusul oleh APM SMP/MTS/Paket B yang menunjukkan tren yang cukup stabil di kisaran 83-87 persen sejak 2016-2020.

c. Angka partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Berikut adalah kondisi APS Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2015-2019.

Gambar 2. 33 Angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Kepulauan Anambas 2015-2019 (Dalam Persen)



Sumber: RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021, BPS, Tim penyusun RPJMD, 2021, diolah

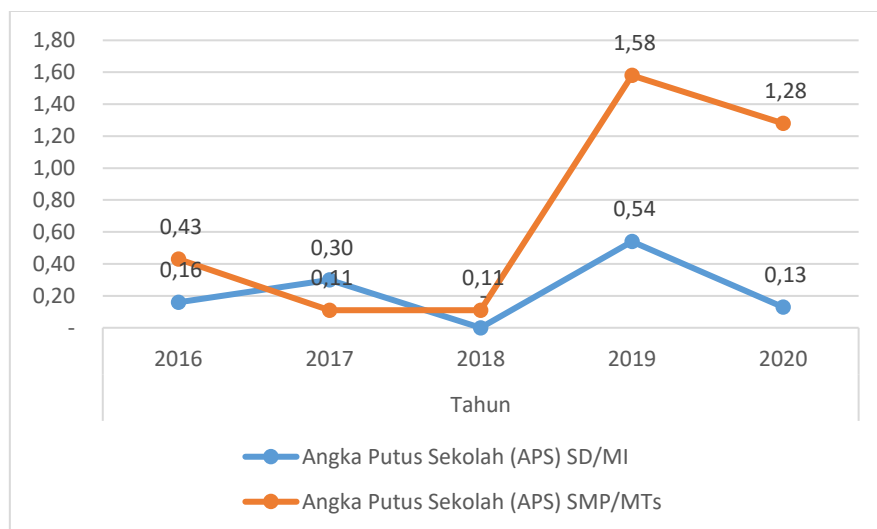
APS Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jenjang SD/MI/Paket A menunjukkan tren yang sangat baik dan secara konsisten selama 5 tahun dari 2015-2019 mencapai hasil di atas 98 persen. Tren APS untuk jenjang SMP/MTS/Paket B juga terus mengalami peningkatan hingga mencapai 96,98 persen di tahun 2019 meskipun sebelumnya di tahun 2016 mengalami penurunan.

d. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Berikut adalah kondisi Angka Putus Sekolah di Kabupaten

Kepulauan Anambas selama tahun 2016-2020 untuk jenjang wajib belajar 9 tahun:

Gambar 2. 34 Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Kepulauan Anambas 2016–2020 (Dalam Persen)



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa angka putus sekolah pada tahun 2016 hingga tahun 2018, Kab. Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami perbaikan dengan menurunnya angka putus sekolah secara perlahan mendekati 0, akan tetapi kondisi pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami lonjakan angka putus sekolah pada tahun 2019 baik di jenjang SD/MI/ sederajat (meningkat 0,54) maupun jenjang SMP/MTS/sederajat (meningkat 1,58). Lonjakan tersebut kemudian berhasil menurun pada tahun 2020 baik untuk di jenjang SD/MI/ sederajat (turun menjadi 0,13) maupun jenjang SMP/MTS/sederajat (turun menjadi 1,28).

e. Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan menunjukkan persentase jumlah siswa tingkat tertinggi dari suatu jenjang pendidikan tertentu yang lulus. Berdasarkan data untuk jenjang Pendidikan wajib belajar 9 tahun, berikut adalah kondisi angka kelulusan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2016-2020:

Gambar 2. 35 Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020 (Dalam Persen)



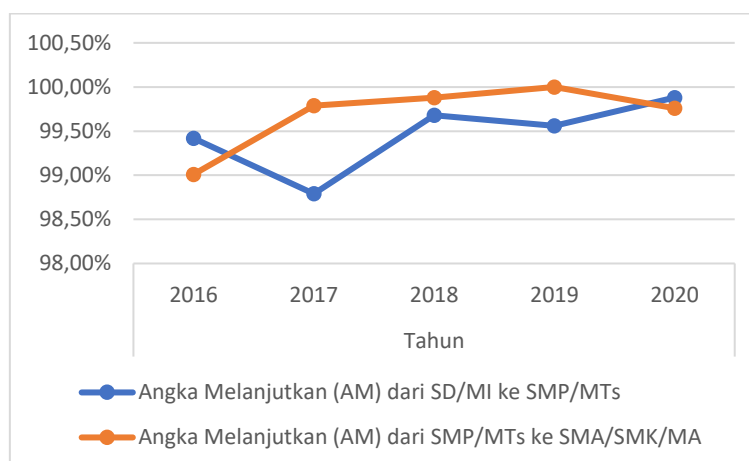
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Secara umum, grafik di atas menunjukkan tren yang positif terhadap angka kelulusan di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jenjang Pendidikan wajib belajar 9 tahun selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Meskipun demikian, perlu diwaspadai adanya penurunan angka kelulusan pada jenjang SMP/MTS pada tahun 2020.

f. Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) adalah persentase jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Berikut adalah angka melanjutkan dari Kabupaten Kepulauan Anambas untuk lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTS dan lulusan SMP/MTS melanjutkan ke SMA/SMK/MA:

Gambar 2. 36 Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Persen)



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa angka yang ditunjukkan nyaris sama dengan angka yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya tentang angka kelulusan (AL) Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode yang sama, yaitu tahun 2016–2020. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode ini, nyaris seluruh lulusan SD/MI melanjutkan ke tingkat SMP/MTS dan lulusan SMP/MTS melanjutkan ke tingkat SMA/SMK/MA yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

g. Rasio Murid-Guru

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid. Angka ini menunjukkan kapasitas masing-masing guru dalam menangani jumlah siswa. Berikut di bawah ini adalah rasio murid-guru Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020.

Tabel 2. 19 Rasio Murid-Guru Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020

Rasio murid-guru	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio murid-guru sekolah dasar (SD/MI)	SD = 11,49:1 MI = 13,27:1	SD = 18:1 MI = 15:1	SD = 9,3:1	SD = 14,95:1 MI = 17,5:1	SD = 14,06:1 MI = 17,5:1
Rasio murid-guru pendidikan menengah (SMP/MTS)	SMP = 8,66:1 MTS = 8,7:1	SMP = 18:1 MTS = 11:1	SMP = 8:1	SMP = 14,6:1 MTS = 8,3:1	SMP = 13,1:1 MTS = 8,3:1
Rasio murid-guru pendidikan menengah SMA/SMK/MA	SMA = 9,85:1 SMK = 4,2:1	SMA = 9 :1	SMA = 14,4:1 SMK = 6,5:1	SMA = 13,1:1 SMK = 6,7:1 MA = 4,6:1	SMA = 11,6:1 SMK = 6,3:1 MA = 4,6:1

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2021

h. Fasilitas Pendidikan

Untuk mendukung semua kategori pendidikan yang telah disebutkan sebelumnya agar lebih baik, Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengupayakan ketersediaan fasilitas pendidikan bagi penduduk. Berikut adalah kondisi fasilitas Pendidikan yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2016–2020:

Tabel 2. 20 Kondisi Fasilitas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

Kondisi Fasilitas Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%)	82,3%	84,7%	87,8%	88,6%	90,2%

Kondisi Fasilitas Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik (%)	86,9%	87,6%	89,9%	91,2%	93,4%
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (%)	98,7%	99%	99,2%	99,2%	99,2%
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah (%)	98,3%	98,9%	99%	99%	99%
Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (unit)	N/A	N/A	N/A	31	31
Jumlah Sekolah TK (unit)	N/A	57	66	67	...

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Dapat dilihat melalui tabel bahwa bangunan sekolah baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA sebagian besar berada dalam kondisi baik di kisaran 86-93 persen. Ketersediaan sekolah saat ini yang ada di Anambas juga memiliki rasio hampir 100 persen terhadap penduduk usia Pendidikan jenjang Pendidikan dasar hingga menengah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas sudah sangat dekat dengan pemenuhan fasilitas sekolah untuk seluruh penduduk yang berada di usia jenjang Pendidikan dasar dan menengah. Dengan demikian, harapannya Kabupaten Kepulauan Anambas akan segera mencapai angka 100 persen baik untuk rasio ketersediaan maupun angka partisipasi sekolah di jenjang Pendidikan dasar dan menengah karena kebutuhan ruangan sekolah sudah terpenuhi. Selain Pendidikan jenjang dasar dan menengah, Kabupaten Kepulauan Anambas juga telah menyediakan sarana Pendidikan usia dini dalam bentuk sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sekolah Taman Kanak-Kanak (TK). Di Kabupaten Kepulauan Anambas tersedia 31 sekolah PAUD dan 67 sekolah TK pada tahun 2019. Harapannya fasilitas ini dapat mengenalkan Pendidikan kepada anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Anambas sekaligus mempersiapkan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar.

i. Indikator Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimum

Berikut ini merupakan capaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun indikator kinerja yang digunakan

dan capaian kinerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 21 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	47,04	47,20	48,02	49,05	48,60
2	Presentase Satuan Pendidikan dengan Sarana dan Prasarana yang Memadai (%)	99,61	98,78	98,84	97,76	78,36
3	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal (orang)	2130	2235	450	496	...
4	Jumlah Tenaga Pendidik yang Tersertifikasi (orang)	193	189	200	217	265
5	Jumlah sekolah yang memenuhi standar nasional pengelolaan pendidikan (Unit)	8	10	12	14	15

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, 2021

Adapun indikator kinerja yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan capaian kinerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 22 Capaian Kinerja SPM Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	N/A	N/A	N/A	N/A	90,23
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	N/A	N/A	N/A	N/A	0,09
3	Jumlah Wara Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	N/A	N/A	N/A	N/A	50,27

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, 2021

2.3.1.2. Kesehatan

Dalam hal layanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, berikut di bawah ini akan dijelaskan mengenai ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan dan data capaian layanan kesehatan dalam kisaran tahun 2016-2020.

Dari sisi tenaga kesehatan yang membantu persalinan, tiga tahun terakhir didominasi oleh bidan sebesar 61,4 persen di tahun 2018, 61,4 persen di tahun 2019, dan 58,2 persen di tahun 2020. Rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 23 Persentase Tenaga Kesehatan Penolong Persalinan (Dalam Persen)

Penolong Persalinan Terakhir	Distribusi Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan melahirkan hidup tahun 2018-2020 menurut penolong persalinan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dokter	30,49	36,19	22,40	28,10	36,4
Bidan	54,32	51,44	68	61,40	58,2
Tenaga Kesehatan Lain	9,4	9,32	7,40	5,20	2,1
Dukun	2,79	0,00	2,20	4	3,3
Lainnya	3	3,05	0	1,30	0
TOTAL	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Menurut data tahun 2016-2020, berikut adalah data layanan dan perawatan ibu hamil di Kabupaten Kepulauan Anambas:

Tabel 2. 24 Data layanan dan perawatan ibu hamil di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Jiwa)

No.	Kecamatan	Jumlah Pelayanan dan Perawatan Ibu Hamil (jiwa)					
		Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Neonatal K1	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Atenatal K4	Ibu yang bersalin di fasilitas Kesehatan	Ibu yang mendapatkan pelayanan nifas	Ibu hamil dengan Lila <23,5 cm	Ibu hamil penderita (KEK)
1	Siantan	242	235	225	227	242	1.208
2	Palmatak	263	202	231	246	263	1.244
3	Siantan Timur	99	99	67	99	99	462
4	Siantan Selatan	59	36	32	57	83	285
5	Jemaja Timur.	66	58	60	63	66	321

No.	Jumlah Pelayanan dan Perawatan Ibu Hamil (jiwa)						
	Kecamatan	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Neonatal K1	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Atenatal K4	Ibu yang bersalin di fasilitas Kesehatan	Ibu yang mendapatkan pelayanan nifas	Ibu hamil dengan Lila <23,5 cm	Ibu hamil penderita (KEK)
6	Jemaja	113	78	119	119	113	608
7	Siantan Tengah	60	57	56	65	60	320
TOTAL 2020		902	732	790	876	926	102
TOTAL 2019		907	777	746	825	351	352
TOTAL 2018		839	782	729	773	201	100
TOTAL 2017		824	761	715	765	253	121
TOTAL 2016		803	754	702	723	287	134

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2020

Selain data perawatan ibu hamil, berikut adalah data pelayanan dan perawatan bayi di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2016-2020:

Tabel 2. 25 Data layanan dan perawatan bayi di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Jiwa)

No.	Jumlah Pelayanan dan Perawatan Bayi (jiwa)						
	Kecamatan	<6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	Pemberian makanan pendamping ASI Usia 6-24 Bulan	Bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini (IMD)	Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	Bayi berat badan lahir rendah
1	Siantan	69	135	154	10	21	10
2	Palmatak	19	73	213	11	6	11
3	Siantan Timur	11	66	43	2	7	2
4	Siantan Selatan	4	6	43	2	89	2
5	Jemaja Timur.	5	5	26	8	11	5
6	Jemaja	18	75	87	4	52	4
7	Siantan Tengah	21	58	43	2	47	2
TOTAL 2020		147	418	609	39	233	36
TOTAL 2019		188	115	688	30	178	22
TOTAL 2018		297	-	816	160	133	18
TOTAL 2017		311	101	843	186	164	30
TOTAL 2016		336	93	862	193	211	27

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2020, diolah

Masih di tahun yang sama, yaitu tahun 2016-2020, berikut adalah data angka kehamilan, kelahiran bayi, kematian ibu dan anak di Kabupaten Kepulauan Anambas:

Tabel 2. 26 Data Angka Kehamilan, Kelahiran Bayi, Kematian Ibu dan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Jiwa)

No.	Jumlah angka kehamilan, kelahiran bayi, kematian ibu dan anak (jiwa)						
	Kecamatan	Ibu Hamil	Kematian Ibu akibat melahirkan	Kelahiran hidup	Bayi yang dilahirkan	Kematian Bayi	Kematian Balita
1	Siantan	242	0	226	229	3	4
2	Palmatyak	263	1	245	250	5	5
3	Siantan Timur	99	0	99	100	1	1
4	Siantan Selatan	59	0	57	57	0	0
5	Jemaja Timur.	66	0	60	60	0	0
6	Jemaja	113	0	119	119	0	0
7	Siantan Tengah	60	0	65	65	0	0
TOTAL 2020		902	1	871	880	9	10
TOTAL 2019		943	2	810	812	2	2
TOTAL 2018		926	2	810	818	9	1
TOTAL 2017		934	2	795	802	7	4
TOTAL 2016		929	1	798	806	8	2

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2020, diolah

Pada tahun 2016-2020, perkembangan sarana kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak banyak berubah. Di tahun 2018, terdapat penambahan 1 rumah sakit, sehingga total terdapat 3 rumah sakit. Di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 8 puskesmas, 40 puskesmas pembantu, 18 puskesmas keliling (10 keliling darat dan 8 keliling laut), dan 3 balai pengobatan umum. Totalnya terdapat 72 sarana kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah. Sayangnya, untuk rumah sakit hanya tersedia di Jemaja, Palmatyak, dan Tarempa.

Tabel 2. 27 Perkembangan Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020 (Dalam Unit)

Sarana Kesehatan (unit)	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Sakit	2	2	3	3	3
Puskesmas	7	7	7	7	8
Puskesmas Pembantu	40	40	48	41	40
Puskesmas Keliling	18	18	18	18	18
Balai Pengobatan Umum	3	3	3	3	3
TOTAL	70	70	79	72	72

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2020, diolah

Selain fasilitas di atas, Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki 68 Posyandu dan 14 Poskesdes. Sedangkan untuk tenaga medis, pada tahun

2020 terdapat 3 orang dokter spesialis, 14 orang dokter umum, 4 orang dokter gigi, 107 orang bidan serta 175 perawat, 7 apoteker, dan 5 sarjana teknis kefarmasian.

Dari segi masalah kesehatan yang dilayani oleh fasilitas kesehatan dan para tenaga medis, berikut adalah data jumlah penderita penyakit menular di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2016-2020:

Tabel 2. 28 Data Kesehatan Masyarakat Jumlah Penderita Penyakit Menular di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Dalam Jiwa)

No.	Jumlah Penderita Penyakit Menular				
	Kecamatan	Demam Berdarah	TB Paru	Malaria	Infeksi Saluran Pernapasan
1	Siantan	5	13	21	612
2	Palmatak	3	16	186	106
3	Siantan Timur	0	11	4	284
4	Siantan Selatan	1	7	20	158
5	Jemaja Timur	1	0	0	413
6	Jemaja	0	2	3	0
7	Siantan Tengah	0	7	31	118
TOTAL 2020		10	56	256	464
TOTAL 2019		39	54	152	3083
TOTAL 2018		7	60	187	563
TOTAL 2017		11	42	181	621
TOTAL 2016		14	44	157	597

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021, diolah

Sedangkan untuk data kesehatan masyarakat terkait gizi buruk dan berat badan bayi lahir pada tahun 2020 dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 2. 29 Data Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (jiwa)

No.	Jumlah Pelayanan dan Perawatan Bayi dan Balita			
	Kecamatan	Jumlah Penderita Gizi Kurang	Jumlah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)	Persentase Balita Stunting (%)
1	Siantan	18	9	12,29
2	Palmatak	64	11	19,03
3	Siantan Timur	16	2	16,77
4	Siantan Selatan	39	2	17,85
5	Jemaja Timur	16	5	9,62
6	Jemaja	18	4	17,75

No.	Jumlah Pelayanan dan Perawatan Bayi dan Balita			
	Kecamatan	Jumlah Penderita Gizi Kurang	Jumlah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)	Persentase Balita Stunting (%)
7	Siantan Tengah	23	2	15,21
TOTAL 2020		194	35	15,64
TOTAL 2019		37	10,86	12,5
TOTAL 2018		N/A	14,8	26,1
TOTAL 2017		N/A	14,7	24,6
TOTAL 2016		N/A	16,2	22

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2020, diolah

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Kepulauan Anambas, tingkat *stunting* di Kabupaten Kepulauan Anambas dipengaruhi oleh empat faktor utama. Pertama, pola asuh orang tua yang belum tepat karena rendahnya kesadaran dan pengetahuan orang tua terkait kesehatan dan gizi keluarga. Kedua, petugas kesehatan tidak bisa memantau anak dengan kasus *stunting* secara terus-menerus, selain karena anak biasanya dirawat di rumah, petugas hanya dapat memantau sesekali saat jadwal kunjungan anak ke layanan kesehatan, atau saat dikunjungi ke rumahnya langsung. Ketiga, kondisi geografis pesisir menyebabkan terbatasnya akses terhadap air bersih atau air minum, ditambah kurangnya kesadaran terkait jamban sehat membuat air mudah tercemar. Keempat, kondisi pandemi menghalangi petugas untuk melakukan kunjungan rutin karena masyarakat takut dikunjungi.

Berikut ini merupakan capaian kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun indikator kinerja yang digunakan dan capaian kerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 30 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan	15%	30%	45%	60%	75%
2	Jumlah penduduk peserta BPJS termasuk JKN (di luar ASN, TNI, POLRI, dan DPRD)	14.543	14.963	27.729	28.494	27.309

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase desa siaga aktif tahun 2016-2021	98%	98%	100%	100%	100%
4	Persentase Cakupan ASI eksklusif	47,47%	36,35%	30%	21,44%	56,03%
5	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	16%	9%	6%	6%	21%
6	Angka <i>annual parasite insident</i>	0,85	2,61	0,56	3,56	5,54
7	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terstandarisasi	0	3	4	2	0
8	Jumlah Puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar	7	7	7	7	7
9	Jumlah rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standarisasi	2	2	3	3	3
10	Jumlah kemitraan yang terjalin dalam pelayanan kesehatan masyarakat	0	1	0	0	0
11	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	63%	74%	64%	67,20%	70,20%
12	Persentase pelayanan kesehatan lansia	57,70%	27,10%	35,70%	69,50%	82%
13	Persentase tempa pengolahan makanan (TPM) memenuhi syarat	52,57%	3,00%	20,18%	37,14%	37,14%
14	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	69,60%	66,13%	82,60%	82,80%	95,60%
15	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan mengenai kesehatan remaja dan lansia	21	0	21	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, 2021

Persentase Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk merupakan balita yang memiliki *Z-score* kurang dari -3,0 standar deviasi. *Z-score* adalah nilai simpangan berat badan (BB) atau tinggi badan (TB) dari nilai BB atau TB normal menurut baku pertumbuhan WHO. Menurut data bulan Agustus 2020 Kementerian Kesehatan melalui platform SIGIZITERPADU merilis data gizi buruk di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Kepulauan Anambas tercatat 60 kasus balita dengan gizi buruk.

Tabel 2. 31 Capaian Kinerja Penanganan Balita Gizi Buruk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

No	Puskesmas	2016		2017		2018		2019		2020	
		Balita Gizi Buruk	Capaian (%)	Balita Gizi Buruk	Capaian (%)	Balita Gizi Buruk	Capaian (%)	Balita Gizi Buruk	Capaian (%)	Balita Gizi Buruk	Capaian (%)
1	Tarempa	13	2,82	2	0,17	9	0,55	5	1,26	15	4,20
2	Letung	1	0,20	0	0,0	3	0,53	4	2,11	7	4,12
3	Palmatyak	0	0,00	2	0,15	8	0,78	6	1,79	38	12,26
4	Siantan Timur	2	0,63	0	0,00	7	2,94	0	0,00	32	5,10
5	Siantan Selatan	10	4,35	0	0,00	5	1,36	9	5,66	39	13,04
6	Jemaja Timur	0	0,00	0	0,00	2	0,47	0	0,00	19	9,09
7	Siantan Tengah	6	2,58	2	0,67	4	0,94	12	15,56	64	8,61
Jumlah		32	1,01	6	0,13	38	0,81	36	2,48	214	7,88

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, 2021

Prevalensi Balita Gizi Kurang

Balita gizi kurang adalah balita yang memiliki Z-score di antara -3,0 standar deviasi sampai kurang dari -2,0 standar deviasi. Balita kategori ini berada satu level di atas balita gizi buruk. Menurut data bulan Agustus, 2020 Kementerian Kesehatan melalui platform SIGIZITERPADU merilis data gizi buruk di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Kepulauan Anambas tercatat 122 kasus balita dengan gizi kurang.

Tabel 2. 32 Capaian Kinerja Penanganan Balita Gizi Kurang di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2020

No	Puskesmas	2016		2017		2018		2019		2020	
		Balita Gizi Kurang	Capaian (%)	Balita Gizi Kurang	Capaian (%)	Balita Gizi Kurang	Capaian (%)	Balita Gizi Kurang	Capaian (%)	Balita Gizi Kurang	Capaian (%)
1	Tarempa	28	6,07	87	7,26	70	4,25	189	25,40	33	9,22
2	Letung	7	1,43	58	11,53	18	3,16	76	21,35	19	11,18
3	Palmatyak	5	0,41	0	0,00	69	6,76	200	31,75	54	17,42
4	Siantan Timur	1	0,31	4	0,72	28	11,76	120	38,71	53	8,41
5	Siantan Selatan	20	8,70	23	7,14	0	0,00	54	18,06	43	14,38
6	Jemaja Timur	0	0,00	3	0,90	3	0,70	14	6,51	23	10,70
7	Siantan Tengah	27	11,59	0	0,00	0	0,00	47	32,41	82	56,55
Jumlah		88	2,78	2,78	3,84	3,84	4,01	700	25,69	307	11,26

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, 2021

Prevalensi Balita *Stunting*

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U sesuai dengan standar WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: 1. Sangat Pendek: Zscore <-3,02. Pendek: Z score \geq -3,0 s/d Zscore <-2,0. Tahun 2020, persentase angka *stunting* di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 15,64 persen.

Cakupan Desa Siaga Aktif

Di dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota terdapat indikator Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Desa dan Kelurahan Siaga aktif adalah bentuk pengembangan dari Desa Siaga yang telah dimulai sejak tahun 2006. Desa atau kelurahan ini memiliki komponen sebagai berikut, (1) pelayanan kesehatan dasar, (2) pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM dan mendorong *surveillance* berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga, (3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Banyaknya desa dan kelurahan siaga aktif ini dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan di bidang kesehatan. Bentuk pemerintahan kabupaten akan terdiri dari desa-desa. Maka dari itu, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki desa siaga aktif.

Tabel 2. 33 Capaian Kinerja Posyandu di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Posyandu	Strata Posyandu				Jumlah Posyandu	(%)
			Pratama	Madya	Purnama	Mandiri		
1	2016	68	22	37	8	1	68	100,00
2	2017	68	16	33	17	1	67	98,53
3	2018	68	4	57	7	0	68	100,00
4	2019	68	1	23	42	2	68	100,00
5	2020	68	1	18	44	5	68	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, 2021

Adapun indikator kinerja yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

adalah aspek urusan kesehatan dan capaian kinerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 34 Capaian Indikator SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	90	62	85	88,8	79,7
2.	Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	70	66	83	91,1	88,4
3.	Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	74	82	86	88,9	82,7
4.	Persentase Pelayanan kesehatan balita	%	63	74	64	71	67,3
5.	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	71	100	100	100	26,9
6.	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	64	65	74	96,6	65,8
7.	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	20	68	12	10,4	64,2
8.	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	57	61	63	63,1	99,1
9.	Persentase Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	54	54	95	95,2	94,1
10.	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100	100	100	100	81,6
11.	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	%	96	92	74	100	94,8
12.	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	%	84	88	100	4,05	34,1

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, 2021

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sangat penting agar fasilitas infrastruktur dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana visi penataan ruang yang dituangkan dalam Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kebijakan terkait tata ruang diarahkan untuk mewujudkan misi penataan ruang, yaitu ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

a. Panjang Jalan dan Kondisi Jalan

Menurut data pada tahun 2016-2020, berikut adalah tabel Panjang jalan dan kondisi jalan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan administrasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas:

Tabel 2. 35 Panjang Jalan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintah tahun 2016-2020 (Dalam KM)

No.	Panjang Jalan	Kondisi				Jumlah	Satuan
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	Panjang Jalan Nasional	13,80	0,00	1,78	15,35	30,93	Km
2	Panjang Jalan Propinsi	19,70	13,45	10,53	7,32	51,00	Km
3	Panjang Jalan Kabupaten/Kota	86,39	8,98	6,35	192,41	294,13	Km
Total 2020		119,89	22,43	18,66	215,08	376,06	Km
2019		91,17	24,49	26,65	233,75	376,06	Km
2018		91,76	21,85	28,69	233,76	376,06	Km
2017		77,78	23,74	31,30	243,25	376,06	Km
2016		69,8	24,32	31,32	250,62	376,06	Km

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2021, diolah

b. Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan

Menurut data pada tahun 2016-2020, berikut adalah tabel Panjang jalan berdasarkan jenis permukaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan administrasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas:

Tabel 2. 36 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan tahun 2016-2020 (Dalam KM)

No.	Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan	Panjang Jalan Nasional	Panjang Jalan Provinsi	Panjang Jalan Kabupaten/Kota	Satuan
1	Di Aspal	13,80	19,70	59,43	km
2	Di Beton	5,13	24,90	41,711	km
3	Kerikil	0	1,26	0	km
4	Tanah	12,00	5,95	192,49	km
5	Tidak Terinci	0	0	0	km
Total 2020		30,93	51,81	293.691	km
2019		30,93	51	294.14	km
2018		30,93	51	294.14	km
2017		30,93	51	294.14	km
2016		30,93	51	294.14	km

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2021 diolah

- c. Jumlah jembatan dan kondisinya berdasarkan data pada tahun 2016-2020, berikut adalah tabel jumlah jembatan dan kondisinya yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 37 Jumlah Jembatan dan Kondisi tahun 2016-2020 (Dalam Unit)

No.	Jumlah Jembatan	Kondisi				Jumlah	Satuan
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	Jembatan Kabupaten/Kota	3	5	5	3	16	Unit
Total 2020		3	5	5	3	16	Unit
2019		3	5	5	3	16	Unit
2018		3	5	5	3	16	Unit
2017		3	5	5	3	16	Unit
2016		3	5	5	3	16	Unit

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diolah

- d. Jaringan Irigasi/Pengairan Kabupaten Kepulauan Anambas
Menurut data pada tahun 2016-2020, berikut adalah tabel daftar jaringan Irigasi/Pengairan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan administrasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas:

Tabel 2. 38 Jaringan Irigasi/Pengairan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2020

No.	Jaringan Irigasi/Pengairan	Jumlah	Jumlah Kondisi Saluran			Satuan
			Non - Teknis	Teknis		
				Premier	Sekunder	
1	Panjang Jaringan Irigasi					Meter
	Saluran Kondisi Baik		475	720	5295	Meter
	Saluran Kondisi Sedang			500	185	Meter
	Total 2020	N/A	N/A	1220	5480	N/A Meter
	2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Jumlah Bangunan Irigasi					Unit
	Total 2020	1	N/A	N/A	N/A	N/A Unit
	2019	1	N/A	N/A	N/A	N/A Unit
	2018	1	N/A	N/A	N/A	N/A Unit
	2017	1	N/A	N/A	N/A	N/A Unit
	2016	1	N/A	N/A	N/A	N/A Unit

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

e. Jumlah tempat peribadatan

Sebagai salah satu sarana fasilitas umum yang esensial bagi penduduk, Kabupaten Kepulauan Anambas menyediakan tempat peribadatan yang layak bagi semua pemeluk agama di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada tahun 2020 tersedia 149 tempat peribadatan yang terdiri dari 91 masjid, 49 mushola, 5 gereja protestan, 5 gereja katolik, dan 2 vihara.

Tabel 2. 39 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020(unit)

Kecamatan	2020					
	Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan					
	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
Jemaja	11	9	0	-	-	-
Jemaja Barat	3	-	-	-	-	-
Jemaja Timur	6	6	0	-	-	-
Siantan Selatan	14	3	1	1	-	-
Siantan	16	14	2	1	-	1
Siantan Timur	13	6	0	-	-	-
Siantan Tengah	6	1	0	-	-	1
Palmatak	10	5	1	-	-	-
Siantan Utara	6	-	-	-	-	-

Kecamatan	2020					
	Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan					
	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
Kute Siantan	6	5	1	-	-	-
Kabupaten Kepulauan Anambas	91	49	5	2	0	2

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Berikut ini merupakan capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun indikator kinerja yang digunakan dan capaian kinerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020

No.	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang kumulatif ruas jalan yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan (PK) di Anambas (dalam KM)	175	183	195	217	217
2	Panjang jalan dalam kondisi baik di Anambas (dalam KM)	8,30	10,30	16,26	33,2	43,23
3	Panjang pipa utk akses air minum melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan (dalam KM)	37,6	46,6	42,9	42,3	41,7
4	Jumlah pembangunan konstruksi gedung kantor (dalam unit)	52	97	50	65	51
5	Jumlah konstruksi bangunan lain (dalam unit)	24	47	62	34	28
6	Jumlah Septic Tank komunal/IPAL (dalam KK)	44	50	240	208	320
7	Jumlah Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. (dalam m ³ /org/thn)	824.075,10	836.799,00	850.442,70	862.290,60	873.240,60
8	Jlh air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (per HA/liter/detik)	463	463	463	463	463
9	Panjang jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (dalam km/jiwa)	9,11	8,97	8,83	8,70	8,59
10	Panjang jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (dalam km)	27,50	22,31	46,20	22,44	51,10
11	Panjang Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (km)	33,99	35,89	36,19	33,71	35,98
12	Panjang Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana (dlm km)	39,03	34,88	66,23	22,43	48,93

No.	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
13	Jumlah Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	37,6	46,58	42,85	42,26	41,73
14	Persentase Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	100	100	100	100	100
15	persentase Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten / kota.	0	0	0	100	100
16	Persentase Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	0	0	92,11	92,59	89,74
17	Persentase Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog	0	0	0	0	100
18	Persentase Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog	0	0	0	0	100
19	Persentase Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	0	100	0	0	100
20	Persentase Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan	23,89	23,85	23,81	23,78	23,74

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Permukiman, 2021

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman akan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Indikator Perumahan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2018 menunjukkan bahwa kepemilikan rumah dengan luas lantai kurang dari 20m² berhasil mengalami penurunan dari 1,48 persen di 2017 menjadi 0,28 persen di tahun 2018, kemudian meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 2,2 persen dan 3 persen pada tahun 2020. Sedangkan luas lantai per kapita <7,2m² mengalami peningkatan persentase dari 3,85 persen di tahun 2017 menjadi 4,05 persen di tahun 2018.

Selain bangunan, akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak secara umum merupakan penunjang kehidupan yang sehat bagi penduduk. Menurut data dari BPS, akses terhadap air minum yang layak di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami penurunan dari 22,92 persen di tahun 2017 menjadi 13,45 persen di tahun 2018, pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 27,53 persen lalu turun lagi pada 2020 menjadi 12,23 persen. Sedangkan akses terhadap sanitasi yang layak mengalami peningkatan yang signifikan dari 17,16 persen di tahun 2017 menjadi 22 persen di tahun 2018, kemudian juga mengalami peningkatan menjadi 25,4 persen di tahun 2019, namun kembali turun menjadi 23,51 persen di 2020. Peningkatan yang terjadi dikarenakan pembangunan tangki septik di beberapa desa oleh pemerintah. Persentase akses terhadap air minum layak juga cukup sedikit, mengingat di Kabupaten Kepulauan Anambas banyak rumah yang sumber air minumnya berasal dari air sumur dan mata air tidak terlindung maupun air kemasan. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur, dan mata air tidak terlindung.

Tabel 2. 41 Indikator Perumahan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Luas Lantai < 20 m ² (%)	1,48	0,28	2,2	3
Luas Lantai per kapita < 7,2 m ² (%)	3,85	4,05	N/A	N/A
Akses air minum layak (%) SDGs	22,92	13,45	27,53	12,23
Akses sanitasi layak (%)	17,16	22,04	25,4	23,51

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018-2021

Selain menimbang angka sanitasi dan akses air minum yang layak secara umum, kondisi akses kedua hal tersebut di tingkat rumah tangga juga perlu diperhatikan. Menurut data dari BPS, persentase rumah tinggal bersanitasi cenderung mengalami tren peningkatan sejak 2015-2019

meskipun sempat ada lonjakan di tahun 2016. Dari semula hanya 17,85 persen di tahun 2015 menjadi 25,4 persen di tahun 2019. Tren yang serupa terjadi pada persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan, dan perdesaan. Pada tahun 2015, pencapaian akses hanya 13,5 persen dan di tahun 2016 terjadi lonjakan hingga mencapai 44,54 persen. Meskipun sempat turun di tahun 2017, tren kemudian meningkat hingga mencapai 33,32 persen di tahun 2019.

Tabel 2. 42 Persentase Rumah tinggal bersanitasi dan Akses Air Minum Layak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	17,85	25,99	17,66	22,04	25,40
Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	13,5	44,54	27,54	19,49	33,32
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%)	7,1	11,3	17,6	17,1	21,4
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan (%)	20,6	20,9	21,6	34,7	41,3
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)	5,6	8,0	12,3	17,4	19,6

Sumber: BPS dan KLHS Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyampaikan data bahwa pada tahun 2018, terdapat 7306 rumah tangga yang terlayani melalui sistem perpipaan yang terbagi di 7 (tujuh) kecamatan dengan detail sebagai berikut:

Tabel 2. 43 Rumah Tangga Memiliki Air Bersih tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Rumah Tangga yang Terlayani Melalui Sistem Perpipaan	Satuan (sambungan rumah)
1	Siantan	3.165	SR
2	Palmatak	1.255	SR
3	Siantan Timur	467	SR
4	Siantan Selatan	266	SR
5	Jemaja Timur	745	SR
6	Jemaja	1.102	SR
7	Siantan Tengah	306	SR
Total 2020		7.306	SR
2019		N/A	N/A
2018		N/A	N/A

No.	Kecamatan	Rumah Tangga yang Terlayani Melalui Sistem Perpipaan	Satuan (sambungan rumah)
2017		N/A	N/A
2016		N/A	N/A

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Untuk memenuhi Kebutuhan Air Baku Rumah Tangga di Kabupaten Kepulauan Anambas, penyedia air bersih sesuai dengan sistem perpipaan pada tabel di atas menggunakan sumber air Baku Embung yang terletak di Gunung Lintang dan Gunung Samak Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai sumbernya. Selain itu, sumber air Baku Embung yang terletak di Gunung Lintang dan Gunung Samak Kabupaten Kepulauan Anambas juga menjadi sumber air dari 510 sumur terlindung yang ada di Siantan Selatan.

Dalam pengelolaan pengairan, tentu tidak dapat dipisahkan dengan urusan drainase sebagai sarana untuk mengalirkan air. Berikut adalah kondisi sistem Drainase yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan data tahun 2016-2020:

Tabel 2. 44 Sistem Drainase di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

No.	Sistem Drainase	Kondisi sistem drainase			Satuan
		Baik	Sedang	Buruk	
1	Panjang Drainase Terbuka	525			Meter
2	Panjang Drainase Tertutup	819			Meter
	Total 2020	1.344	N/A	N/A	Meter
	2019	N/A	N/A	N/A	Meter
	2018	N/A	N/A	N/A	Meter
	2017	N/A	N/A	N/A	Meter
	2016	N/A	N/A	N/A	Meter

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2020

Dalam meningkatkan kondisi kesehatan terkait penyediaan air minum serta pengolahan limbah, tentunya kondisi Sanitasi Lingkungan khususnya sanitasi rumah tangga juga perlu untuk diperhatikan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berikut adalah sanitasi lingkungan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas di tahun 2016-2020:

Tabel 2. 45 Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Sanitasi Lingkungan Rumah Tangga			Satuan
		Memiliki MCK	Tidak Memiliki MCK	Memiliki Cubluk	
1	MCK				
	Siantan	658	N/A	N/A	Rumah Tangga
	Palatak	335	N/A	N/A	Rumah Tangga
	Siantan Timur	199	N/A	N/A	Rumah Tangga
	Siantan Selatan	177	N/A	N/A	Rumah Tangga
	Jemaja Timur	189	N/A	N/A	Rumah Tangga
	Jemaja	261	N/A	N/A	Rumah Tangga
	Siantan Tengah	14	N/A	N/A	Rumah Tangga
2	Cubluk			985	Rumah Tangga
Total 2020		1.833	N/A	N/A	Rumah Tangga
2019		N/A	N/A	N/A	Rumah Tangga
2018		N/A	N/A	985	Rumah Tangga
2017		N/A	N/A	N/A	Rumah Tangga
2016		N/A	N/A	N/A	Rumah Tangga

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Selain sanitasi, Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki sistem pengolahan air limbah domestik yang mencakup 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Detail sistem pengolahan air limbah di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 46 Sistem Pengolahan Air Limbah di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (Unit)				
		Jumlah Rumah	Jumlah KK	Jumlah Pengolahan Air Limbah Individual (Rumah Tangga)	Jumlah Pengolahan Air Limbah Komunal	OPEN DEFICATION (BABS)
1	Siantan	2.744	2.813	675	302	2.228
2	Palatak	3.141	3.446	1.720	163	1.760
3	Siantan Timur	1.046	1.110	213	75	512
4	Siantan Selatan	985	1.034	377	48	479
5	Jemaja Timur	609	615	390	166	222
6	Jemaja	1.772	2.054	683	72	1.462
7	Siantan Tengah	848	951	355	190	552
TOTAL 2020		11.145	12.023	4.413	1.016	6.993
2019		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No.	Kecamatan	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (Unit)				
		Jumlah Rumah	Jumlah KK	Jumlah Pengolahan Air Limbah Individual (Rumah Tangga)	Jumlah Pengolahan Air Limbah Komunal	OPEN DEFICATION (BABS)
	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Selain beberapa kategori di atas, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga mencakup ketersediaan Tempat Pemakaman Umum. Menurut data tahun 2018, berikut adalah data ketersediaan tempat pemakaman umum di Kabupaten Kepulauan Anambas:

Tabel 2. 47 Jumlah dan Luas Tempat Pemakaman Umum Tahun 2018

No.	Pemakaman Umum	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Pemakaman Umum		
	Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	2	Unit
	Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	0	Unit
2	Luas Pemakaman Umum		
	Luas Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	2.564	Ha
	Luas Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	0	Ha

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2021

Sebagai bagian dari urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, ketersediaan ruang terbuka hijau juga perlu menjadi perhatian. Menurut data tahun 2018, berikut adalah data ketersediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Kepulauan Anambas:

Tabel 2. 48 Jumlah dan Luas Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018

No.	Ruang Terbuka Hijau	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Ruang Terbuka Hijau		
	Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	1	Unit
	Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	0	Unit
2	Luas Ruang Terbuka Hijau		
	Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	4,9	Ha
	Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	0	Ha

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2018

Data capaian proporsi RTH di Kabupaten Kepulauan Anambas baru tersedia pada tahun 2018 dengan proporsi yang mencapai 2 persen dan meningkat menjadi 4 persen pada tahun 2019 (sumber: KLHS RPJMD 2021-2026).

Data Standar Pelayanan Umum aspek urusan Pekerjaan Umum dan capaian kerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 49 Capaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	%
2	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perdesaan	%
3	Jumlah Rumah perdesaan yang tersambung instalasi air limbah	SR	138	138	149	149	1492
4	Jumlah Rumah perkotaan yang tersambung instalasi air limbah	SR	458	784	1247	1317	219

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2021

Tabel 2. 50 Capaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	% Rumah layak huni bagi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100
2.	%Rumah layak huni bagi penduduk yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2021

2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Untuk lebih jelasnya, banyaknya kejahatan menurut jenis kejahatan tahun 2015-2020 disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 2. 51 Daftar Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015-2020

Daftar Kriminalitas	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kejahatan yang dilaporkan	19	40	21	13	24	17
Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan:	17	22	9	3	20	10
Pembunuhan
Penganiayaan Berat (Anirat)	6	1
Penganiayaan Ringan (Anira)	5	5
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	1	1
Perkosaan	1	1
Pencabulan	2	4
Penculikan
Pencurian dengan Kekerasan (Curas)
Pencurian Biasa (termasuk ringan)	4	3	2	2
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	1
Pencurian dengan Pemberatan (Curat)	1	3	6	1
Pengrusakan/Penghancuran Barang
Pembakaran dengan sengaja	1	-
Narkoba dan Psicotropika	3	2	7	3
Penipuan/Perbuatan Curang	...	1
Penggelapan	...	3	...	1
Korupsi
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum

Sumber: Survei statistik Politik dan Keamanan tahun 2017, Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Anambas 2018 (diolah), dan BPS 2021

Dengan jumlah kasus yang tampak pada tabel di atas, terdapat kasus yang telah diperkarakan melalui jalur hukum. Menurut data tahun 2020, terdapat 10 perkara pidana yang dapat terselesaikan.

Selain dari pihak kepolisian, menjaga keamanan dan ketertiban umum juga menjadi tugas aparat keamanan petugas pamong praja. Untuk menjalankan fungsinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di

Kabupaten Kepulauan Anambas dengan baik, diperlukan jumlah SDM dan sarana/prasarana yang memadai. Menurut data tahun 2016-2020, berikut adalah daftar ketersediaan sarana/prasarana di Kabupaten Kepulauan Anambas:

Tabel 2. 52 Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2020

Nama Tahun	Jumlah					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1. Jumlah Sarana Keamanan dan Ketertiban Umum	5	5	5	5	6	
1. Jumlah Pos Keamanan Satpol	5	5	5	5	6	Unit
2. Jumlah Pos Kamling	0	0	0	0	0	Unit
2. Jumlah Kendaraan Operasional	21	26	30	32	34	
1. Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2	20	25	28	30	32	Unit
2. Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4	1	1	2	2	2	Unit
3. Jumlah Pertikaian Antar Wilayah Desa	1	0	1	0	0	Kasus
Jumlah Korban Meninggal	0	0	0	0	0	Orang
Jumlah Korban Luka - luka	0	0	2	0	0	Orang
4. Unjuk Rasa Lainnya	0	1	1	3	3	Kasus
Jumlah Korban Meninggal	0	0	0	0	0	Orang
Jumlah Korban Luka - luka	0	2	2	0	0	Orang

Sumber: Satpol PP Damkar Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2020, diolah

Terdapat empat indikator yang dipakai dalam menilai kinerja pengampu urusan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2016-2020. Adapun indikator tersebut beserta capaian kinerja setiap tahunnya adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 53 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	55%	60%	65%	70%	80%
2	Jumlah Petugas Satlinmas	209	-	-	200	242
3	Jumlah Anggota Lapangan Satpol PP dan Damkar	125	150	165	183	187
4	Jumlah Anggota Pemadam Kebakaran yang terlatih	122	30	30	30	32

Sumber: Dinas Satpol PP dan Damkar, 2021, diolah

Berikut ini merupakan capaian kinerja urusan penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas. Capaian urusan untuk penanggulangan bencana hanya ada pada tahun 2020 karena Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Anambas baru terbentuk pada tahun 2019 dan baru mulai aktif tahun 2020. Adapun indikator kinerja yang digunakan dan capaian kerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 54 Capaian Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

No	Uraian	Capaian
		2020
1	Persentase penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan program dan keuangan (%)	80
2	Persentase kejadian bencana yang tertangani (%)	100

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana, 2021

Tabel 2. 55 Capaian SPM Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Serta Penanggulangan Bencana Kebakaran Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	%	N/A	N/A	N/A	100	100
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	N/A	N/A	N/A	100	...
3	Jumlah Warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	N/A	N/A	N/A	100	...
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	N/A	N/A	N/A	100	...
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	%	N/A	N/A	N/A	100	100
6	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		N/A	N/A	N/A	...	100 (di bawah target maksimal 15 menit)

Sumber: Dinas Satpol PP dan Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana, 2021

2.3.1.6. Sosial

Permasalahan dalam bidang sosial dipengaruhi oleh kecenderungan jumlah dan jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS). PPKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalankan kehidupan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar.

Sebagai gambaran, berikut adalah data PPKS Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat dikumpulkan untuk tahun 2016-2018:

Tabel 2. 56 Jumlah dan Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2018

No.	Jenis PPKS	Jumlah (Orang)		
		2016	2017	2018
1	Anak Balita Terlantar
2	Anak Terlantar	6
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	...	4	...
4	Anak jalanan
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	...	23	...
6	Anak korban tindak kekerasan	...	2	8
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	...	1	...
8	Lanjut Usia Terlantar	2	50	50
9	Penyandang Disabilitas	345	192	129
10	Tuna Susila	...	24	...
11	Gelandangan
12	Pengemis	5
13	Pemulung
14	Kelompok Minoritas
15	Bekas warga binaan Lembaga pemasyarakatan
16	Orang dengan HIV
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA
18	Korban <i>Trafficking</i>
19	Korban Tindak kekerasan terhadap perempuan	...	10	...
20	Pekerja Migran bermasalah sosial
21	Korban bencana alam	73	24	...
22	Korban bencana sosial	...	4	...
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24	Fakir Miskin	776	3.213	8.666
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis
26	Komunitas adat terpencil
27	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	41
28	Penderita sakit jiwa	69
	TOTAL	1.237	3.547	8.933

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Selain PPKS, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Kepulauan Anambas juga perlu diperhatikan. Menurut data tahun 2018, Taruna siaga bencana yang berjumlah 88 dan karang taruna yang berjumlah 54 dan tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan potensi tertinggi yang dapat mendukung Kesejahteraan Sosial. Data tersebut dapat dilihat pada tabel - tabel di bawah ini:

Tabel 2. 57 Banyaknya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menurut Jenisnya di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

No.	Lembaga / Organisasi Masyarakat	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Lembaga Kesejahteraan Sosial	1	1	1	1	1
2	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	110	110	110	110	110
3	Lembaga Konsultan Kesejahteraan Keluarga	1	1	1	1	1
4	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	7	7	7	8	9
5	Karang Taruna	54	55	55	55	55
	Total	173	174	174	175	176

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Terkait penanganan bencana, persentasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban pasca bencana pada tahun 2016-2020 secara berturut adalah 1,5 persen, 2 persen, 3 persen, 3,75 persen, dan 4,5 persen. Jumlah fakir miskin dan PPKS yang menerima bantuan dari tahun 2016-2020 adalah sebanyak 2500 orang. Adapun jumlah PPKS yang dibina dalam kurun waktu 2016-2020 adalah 170 orang. Pada tahun 2021, jumlah pemerlu bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah 3.306 orang.

Tabel 2. 58 Capaian Indikator SPM Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PPKS anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	%	N/A	N/A	N/A	80	0
2	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	N/A	N/A	N/A	87	0

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	N/A	N/A	N/A	N/A	0
4	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	N/A	N/A	N/A	100	100
5	Persentase penduduk korban bencana yang mendapat perlindungan sosial	%	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib bukan pelayanan dasar, dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

2.3.2.1 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Di Indonesia dipakai batasan umur 15 tahun ke atas dan masuk sebagai golongan penduduk usia kerja.

Berdasarkan data tahun 2020, terdapat 740 orang yang terdata sebagai pengangguran di Kabupaten Kepulauan Anambas. Jumlah pengangguran tersebut berkisar dari tingkat Pendidikan mulai dari tamatan SD dan sederajat hingga tingkat tamatan S1.

Sampai dengan 2020 Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 131 orang terdaftar sebagai pencari kerja namun tidak ada laporan penempatan kerja pada tahun tersebut. Dari jangka waktu 2016 sampai dengan 2020 pencari kerja sempat ada peningkatan pada tahun 2017 lalu terus mengalami penurunan sampai dengan 2020. Begitu juga untuk penempatan tenaga kerja, tercatat peningkatan tinggi pada tahun 2017 lalu mengalami kenaikan dan penurunan sampai 2020.

Tabel 2. 59 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan Kerja Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Pencari Kerja Terdaftar (orang)	75	780	211	413	131
Penempatan Tenaga Kerja (orang)	9	771	10	31	15
Persentase Pencari Kerja Ditempatkan (%)	12	98,8	4,7	7,5	11,5

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, 2021

Berdasarkan Pendidikan tertinggi yang ditamatkan, data Angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020 didominasi oleh lulusan sekolah dasar sebanyak 10.266 orang dan kemudian disusul jauh oleh lulusan SMA sebanyak 5.130 orang. Sedangkan untuk persebaran pengangguran terbuka, jumlahnya hampir merata di setiap tingkatan lulusan jenjang Pendidikan dengan total sebanyak 740 orang. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 60 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Usia Produktif	Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu (Jiwa) Tahun 2020		
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
<= Sekolah dasar	10.266	201	10.467
Sekolah menengah pertama	2.176	63	2.239
Sekolah menengah atas	5.130	314	5.444
Perguruan tinggi	3.187	162	3.349
TOTAL 2020	20.759	740	21.499
TOTAL 2019	18.203	546	18.749
TOTAL 2018	19.490	491	19.981
TOTAL 2017	17.962	982	18.944
TOTAL 2016	17.366	1.184	18.550

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021, diolah

Dalam hal jenis pekerja menurut lapangan pekerjaan utama usia produktif di Kabupaten Kepulauan Anambas, jenis pekerja terbagi menjadi pekerja formal dan informal yang terbagi dalam 3 sektor, yaitu pertanian, industri pengolahan, dan jasa. Secara umum, semua pekerja baik formal maupun non formal mengalami peningkatan rata-rata upah sebulan tiap tahunnya. Apabila dibandingkan, rata-rata upah sebulan pekerja formal ternyata lebih tinggi dibandingkan pekerja non formal, kecuali sektor pertanian. Pekerja informal sektor pertanian mengalami peningkatan rata-rata upah per bulan yang signifikan sejak 2017-2020. Di bidang jasa, pekerja informal juga merasakan peningkatan rata-rata upah per bulan yang signifikan sejak tahun 2017-2020. Detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 61 Rata-Rata Upah Bersih Sebulan Pekerja Informal Dan Formal Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2018-2020

Lapangan Pekerjaan Utama Usia Produktif	Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Rupiah)						
	Informal				Formal		
	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pertanian	1.249.971	2.377.060	2.481.340	2.361.188	1.565.385	1.157.534	1.799.727
Industri Pengolahan	1.094.121	2.521.983	2.512.105	2.242.721	3.497.767	3.983.885	3.119.985
Jasa	474.980	1.628.496	2.158.504	2.824.453	3.361.527	3.568.375	3.026.708

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Berikut ini merupakan capaian kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun indikator kinerja yang digunakan dan capaian kinerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 62 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih	15	60	27	27	27
2	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	9	771	10	31	15
3	Persentase Kasus Perselisihan Industrial yang berhasil diselesaikan (%)	8	7	6	5	9

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja, 2021

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, menurunnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

DPRD Tingkat II Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini merupakan hasil dari pemilu 2019. Pada pemilu tersebut, telah terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 20 orang terdiri dari 18 laki-laki dan 2 orang perempuan. Proporsi ini sama dengan hasil pemilu tahun 2015. Sedangkan untuk jumlah ASN di Kabupaten Kepulauan Anambas, proporsi partisipasi perempuan yang menjadi ASN mengalami kondisi statis pada tahun 2016-2020 sebanyak 45 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 49 persen.

Tabel 2. 63 Distribusi Pegawai ASN menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 - 2020

Pegawai ASN	2016	2017	2018	2019	2020
Laki - laki	917	926	884	923	934
Perempuan	755	756	737	869	903
Total	1.672	1.682	1.621	1.792	1.837
Persentase ASN Perempuan	45%	45%	45%	48%	49%

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka, 2021

Selain keterlibatan perempuan di Lembaga pemerintahan, KDRT juga menjadi topik utama dalam urusan ini. Sedangkan untuk pemberdayaan perempuan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selalu mempersiapkan program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dan program pembinaan unit usaha penduduk miskin desa tertinggal.

Berikut ini merupakan capaian kinerja terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2016-2020. Capaian kinerja tersebut dilihat dari persentase perangkat daerah yang responsif gender, pendampingan terhadap korban kekerasan, IPG,

dan IDG. Adapun kondisi kinerja indikator tersebut adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 64 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PD yang Responsif Gender (%)	100	100	100	100	100
2	Persentase Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang mendapat Pendampingan (%)	100	100	100	100	100
3	Indeks Pembangunan Gender	-	89,97	90,12	90,16	90,27
4	Indeks Pemberdayaan Gender	-	57,07	57,32	57,74	62,57

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

2.3.2.3 Pangan

Penyediaan pangan pada dasarnya dapat dipenuhi oleh sumber-sumber pangan yang berasal dari pertanian, perikanan (hasil laut), perkebunan, kehutanan, hingga sumber daya peternakan. Untuk mendukung program pertanian berkelanjutan, dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas telah ditetapkan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B). LP2B dengan luas kurang lebih 150 hektar berada di Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur. Kemudian pengembangan LP2B dengan luas kurang lebih 700 hektar juga berada di Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur. Sedangkan, pengembangan LP2B dengan luas kurang lebih 150 hektar berada di Kecamatan Palmatak.

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola pangan harapan (PPH) merupakan susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, skor maksimalnya yaitu 100.

Tabel 2. 65 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020 (dalam persen)

	2016	2017	2018	2019	2020
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	74,5	76,6	80,1	74,8	79

Sumber: Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kab. Kep. Anambas, diolah, 2021

Penguatan cadangan pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah NKRI untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari 4 yaitu, cadangan pangan pemerintah pusat, cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, dan cadangan pangan pemerintah desa. Penguatan Cadangan Pangan merupakan salah satu strategi untuk menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 2. 66 Cadangan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020 (dalam persen)

	2016	2017	2018	2019	2020
Cadangan Pangan	7,88	7,88

Sumber: Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kab. Kep. Anambas, diolah, 2021

Penanganan daerah rawan pangan

Kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan meskipun tidak identik. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori per kapita per hari nilai AKG 2.000 kkl/kap/hr. Jika konsumsi per kapita kurang atau lebih kecil dari 70 persen dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan; sekitar 70 persen-90 persen dari AKG dikategorikan rawan pangan; dan lebih dari 90 persen dari AKG termasuk kategori rawan pangan.

Tabel 2. 67 Kecukupan Konsumsi Kalori per kapita per hari nilai AKG 2.000 kkl/kap/hr Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Kecukupan konsumsi kalori per kapita per hari nilai AKG 2.000 kkl/kap/hr	2.174,37	2.066,03	2.188,18	2.296,68	2.382,58

Sumber: Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kab. Kep. Anambas, diolah, 2021

Berikut adalah penjelasan kondisi penyediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan sumber-sumbernya:

A. Produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan Protein

Sektor perikanan memberikan kontribusi yang signifikan melalui Produksi Perikanan Tangkap. Menurut data dari BPS, total hasil perikanan tangkap Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2020 mencapai 21.110 ton dengan nilai produksi perikanan tangkap hingga Rp470.937.565,-.

Sektor peternakan juga memberikan kontribusinya melalui produksi hewan ternak dan unggas. Untuk hewan ternak, kontribusi pangan berasal dari produksi daging sapi potong yang mencapai 21 ton pada tahun 2018 dan menurun menjadi 11,2 ton pada tahun 2019. Sedangkan untuk unggas, kontribusi pangan berasal dari ayam kampung, ayam pedaging, dan itik. Masing-masing memberikan kontribusi pada tahun 2020 sebanyak 20.733 ekor ayam kampung, 19.800 ekor ayam pedaging, dan 1.598 ekor itik.

Selain daging sebagai hasil produksi peternakan, telur unggas juga memberikan kontribusi terhadap pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada tahun 2018-2020, kontribusi telur unggas terbanyak berasal dari telur ayam kampung yang mencapai 18.604 kg di tahun 2018, meningkat hingga 19.374 kg di tahun 2019, lalu meningkat lagi sebanyak 44.783 kg di tahun 2020. Selain mempertimbangkan produksi pangan, pemerintah juga perlu memperhatikan dari segi produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan Protein untuk mengetahui ketersediaan energi dan protein per kapita dan pertumbuhan rata-rata konsumsi energi dan protein per kapita.

Berikut adalah kapasitas yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2016-2020:

Tabel 2. 68 Produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan Protein di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

No.	Produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan Pangan	Jumlah 2016	Jumlah 2017	Jumlah 2018	Jumlah 2019	Jumlah 2020	Satuan
1	Jumlah Produksi Komoditas Pangan Nabati						
	Beras	139	143,04	91,09	57,95	148,05	Ton
	Jagung	106,1	7,4	7,4	8,9	8,9	Ton
	Kedelai	0	0	0,00	0	0	Ton
	Kacang Tanah	7,5	0	0,00	0	0	Ton
	Ubi Kayu	801,9	232,2	232,30	258,9	284	Ton
	Sayur	1.056,9	1.132	1.248	1.215	1.289	Ton
	Buah-Buahan	535,32	451,5	52,10	152,4	184,5	Ton
	Minyak Goreng	48,90	49,87	50,79	51,2	52,3	Ton
	Gula	0	0	0,00	0	0	Ton
2	Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani						
	Daging Sapi dan Kerbau	14,7	14,7	21,00	11,27	13,9	Ton
	Daging Ayam	9,093	8,57	34,40	18	19,8	Ton
	Telur	38,956	42,8	18,60	18,6	44,78	Ton
	Susu	0	0	0,00	0	0	Ton
	Ikan	28.983	29.739	23.367,93	23.526	21.017	Ton
3	Ketersediaan Energi dan Protein (per kapita)						
	Energi	2.174,37	2.322,86	2.471,00	2.471	2.561	Kkal/Kap/Hari
	Protein	208,05	205,5	203,06	204,3	205,6	Gr/Kap/Hari
4	Perkembangan Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein (per kapita)						
	Energi	2.045,67	2.055,45	2.066,00	2.078	2.091,85	Kkal/Kap/Hari
	Protein	58,07	59,38	63,19	64,56	65,76	Gr/Kap/Hari
5	Pergudangan	0	0	1	1	1	Unit
	Jumlah Gedung milik pemerintah	0	0	1	1	1	Unit

No.	Produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan Pangan	Jumlah 2016	Jumlah 2017	Jumlah 2018	Jumlah 2019	Jumlah 2020	Satuan
	(dalam kondisi baik)						

Sumber: Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

B. Sumber Daya Peternakan

Secara umum, populasi ternak yang tercatat pada tahun 2020 adalah sapi potong dan kambing. Ternak sapi potong ada sebanyak 4.135 ekor sedangkan ternak kambing ada sebanyak 304 ekor. Selain hewan ternak, ada juga yang mengelola unggas yaitu ayam kampung, ayam pedaging, dan itik / itik manila. Populasi ayam kampung tercatat sebanyak 20.733 ekor, populasi ayam pedaging sebanyak 19.800 ekor, dan populasi itik / itik manila sebanyak 1.598 ekor. Produksi telur yang dihasilkan sebanyak pada 2019 18.604 kg.

Tabel 2. 69 Populasi Ternak dan Unggas Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018-2020 (ekor)

Kecamatan	Populasi Ternak dan Unggas Menurut Kecamatan									
	Ternak									
	Sapi Potong					Kambing				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Jemaja	1.923	1.792	1.753	1.757	1.852	70	96	87	89	51
Jemaja Barat	327	62
Jemaja Timur	929	938	990	994	566	73	108	95	99	45
Siantan Selatan	130	125	108	109	96	11	13	11	14	14
Siantan	141	80	78	106	108	11	11	11	12	22
Siantan Timur	99	90	87	91	73	46	51	46	46	26
Siantan Tengah	127	118	117	115	96	4	5	4	3	20
Palmatok	904	876	907	905	754	21	25	21	29	26
Siantan Utara	42	16
Kute Siantan	221	22
TOTAL	4.253	4.019	4.040	4.077	4.135	236	308	275	295	304

Kecamatan	Populasi Ternak dan Unggas Menurut Kecamatan								
	Unggas								
	Ayam Kampung			Ayam Pedaging			Itik/Itik Manila		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Jemaja	2.783	2.788	2.445	4.000	3.800	2.900	354	360	466
Jemaja Barat	2.553	2.500	300
Jemaja Timur	5.338	5.350	4.251	4.000	4.000	3.200	79	450	510
Siantan Selatan	1.907	1.910	2.340	10.000	12.000	11.200	305	319	119
Siantan	3.148	3.155	2.966	49	56	38

Kecamatan	Populasi Ternak dan Unggas Menurut Kecamatan								
	Unggas								
	Ayam Kampung			Ayam Pedaging			Itik/Itik Manila		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Siantan Timur	2.004	2.007	2.346	54	62	15
Siantan Tengah	1.060	1.064	955	102	109	34
Palmatak	2.803	2.809	1.233	160	166	66
Siantan Utara	436	0
Kute Siantan	1.208	50
Total	19.043	19.083	20.733	18.000	19.800	19.800	1.103	1.522	1.598

Sumber: Daerah Dalam Angka Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021, diolah

Ternak sapi yang berkembang di Anambas adalah sapi potong, untuk sapi perah dan kerbau tidak ada. Data terakhir 2020, menunjukkan bahwa sapi potong ini banyak di Siantan, diikuti Jemaja dan kota-kota lainnya. Untuk tahun 2020, semua kecamatan memiliki pertumbuhan ternak sapi positif dari tahun sebelumnya kecuali Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Tengah, dan Palmatak.

Jika diasumsikan bahwa jumlah potong adalah berbanding dengan jumlah sapi yang ada, maka agar terjadi kesinambungan produksi, perlu dicarikan cara peternakan yang menjaga kesinambungan produksi. Jika bisa membuat produksi yang stabil, Kabupaten Kepulauan Anambas, tidak hanya bisa mengonsumsi sendiri hasil peternakannya, namun dapat pula meningkatkan penjualan keluar daerah bahkan ekspor.

Tabel 2. 70 Produksi Daging Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak (kg) di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018-2020

Kecamatan	Sapi Potong				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jemaja	1.680	3.080	2.590	2.520	1.800
Jemaja Barat	600
Jemaja Timur	770	1.050	1.470	840	400
Siantan Selatan	560	840	1.540	560	750
Siantan	7280	7.910	8.680	1.050	4.550
Siantan Timur	140	980	910	1.260	1.800
Siantan Tengah	1190	910	1.050	910	650
Palmatak	3080	4.970	4.760	5.040	1.100
Siantan Utara	750
Kute Siantan	1.500
TOTAL	14.700	19.740	21.000	12.180	13.900

Sumber: Daerah Dalam Angka Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021, diolah

Tabel 2. 71 Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Menurut Kecamatan (kg) di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018-2020

Kecamatan	Ayam Kampung					Ayam Petelur				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Jemaja	5.693	6.262	2.504	2.504	5.281
Jemaja Barat	5.515
Jemaja Timur	10.919	12.011	4.804	4.804	9.182
Siantan Selatan	3.902	4.291	1.716	1.716	5.054
Siantan	6.440	7.083	2.833	2.833	6.407	5.022
Siantan Timur	2.169	4.509	1.803	1.803	5.067
Siantan Tengah	4.100	2.385	954	954	2.063
Palmatak	5.733	6.307	4.760	3.990	2.663
Siantan Utara	942
Kute Siantan	2.609
TOTAL	38.956	42.848	19.374	18.604	44.783	0	0	0	0	5.022

Sumber: Daerah Dalam Angka Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021, diolah

Berikut ini merupakan capaian kinerja urusan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun indikator kinerja yang digunakan dan capaian kinerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 72 Capaian Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Capaian Ketersediaan Cadangan Pangan	0	10%	103%	92%	50%

Sumber: Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan, 2021

2.3.2.4 Pertanahan

Menurut data administrasi dari pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas, berikut adalah data kepemilikan tanah yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas di tahun 2019 beserta luas bidangnya yang berhasil direkam oleh pemerintah daerah:

Tabel 2. 73 Luas Bidang Status Kepemilikan Tanah Dirinci Menurut Hak Milik dan Kecamatan (M²) tahun 2019

Kecamatan	2019					
	Luas Bidang Status Kepemilikan Tanah Dirinci Menurut Hak Milik dan Kecamatan (M ²)					
	Hak Milik	Hak Guna Usaha	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Hak Pengelolaan	Wakaf
Jemaja	6.556.785	-	6.222	258.502	-	2.194

Kecamatan	2019					
	Luas Bidang Status Kepemilikan Tanah Dirinci Menurut Hak Milik dan Kecamatan (M ²)					
	Hak Milik	Hak Guna Usaha	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Hak Pengelolaan	Wakaf
Jemaja Barat	2.514.704	-	-	134.515	-	-
Jemaja Timur	1.146.650	-	-	382.430	-	-
Siantan Selatan	1.650.455	-	869.732	62.299	-	-
Siantan	1.382.170	-	7.488	623.087	-	151.357
Siantan Timur	778.226	-	416	180.375	-	-
Siantan Tengah	26.146	-	100	120.066	-	-
Palmatak	3.057.093	-	149	446.169	-	7.505
Siantan Utara	2.752	-	1.443	115.955	-	-
Kute Siantan	1.519.710	-	16.311	122.773	-	11.902
Kabupaten Kepulauan Anambas	18.634.691	-	901.861	2.446.171	-	172.958

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Selain berdasarkan luas bidang yang dimiliki, berikut di bawah ini adalah jumlah bidang yang tercatat kepemilikannya di administrasi pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas:

Tabel 2. 74 Jumlah Bidang Status Kepemilikan Tanah Dirinci Menurut Hak Milik dan Kecamatan tahun 2019

Kecamatan	2019					
	Jumlah Bidang Status Kepemilikan Tanah Dirinci Menurut Hak Milik dan Kecamatan (unit)					
	Hak Milik	Hak Guna Usaha	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Hak Pengelolaan	Wakaf
Jemaja	1.806	0	2	1.149	0	5
Jemaja Barat	199	0	0	273	0	0
Jemaja Timur	155	0	0	358	0	0
Siantan Selatan	564	0	27	348	0	0
Siantan	1.144	0	17	829	0	4
Siantan Timur	121	0	2	957	0	0
Siantan Tengah	23	0	1	659	0	0
Palmatak	963	0	1	1.666	0	1
Siantan Utara	13	0	2	451	0	0
Kute Siantan	664	0	5	488	0	4
Kabupaten Kepulauan Anambas	5.652	0	57	7.178	0	14

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Selain kepemilikan tanah, berikut adalah produk administrasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di tahun 2018.

Tabel 2. 75 Perizinan Bangunan Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Kecamatan	Perizinan Bangunan		Satuan
		Bangunan Memiliki IMB	Bangunan Tidak Memiliki IMB	
1	Siantan	8		Unit
2	Palmatak	3		Unit
3	Siantan Timur	4		Unit
4	Siantan Selatan	1		Unit
5	Jemaja Timur	3		Unit
6	Jemaja			Unit
7	Siantan Tengah			Unit
	TOTAL	19	0	Unit

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2018

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup salah satunya digambarkan oleh tersedianya tempat penanggulangan sampah, kualitas air sungai dan udara terhadap baku mutu.

Berdasarkan dokumen KLHS, dalam hal menyediakan air bersih, lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas didominasi oleh lahan yang berpotensi sedang dalam menyediakan air bersih yaitu sebesar 64 persen dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan lahan yang memiliki potensi rendah sebesar 29 persen dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun sebaran wilayah yang memiliki potensi rendah yaitu sebagian kecil wilayah di Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Jemaja Barat dan Kecamatan Palmatak.

Dalam hal penanganan terhadap sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan, berikut adalah capaian Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2015-2019 dalam menangani pengelolaan sampah:

Tabel 2. 76 Capaian Penanganan sampah Kabupaten Kepulauan Anambas 2015 - 2019

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase sampah yang tertangani	%	4,80%	5,40%	8,27%	9,13%	9,22%
2	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang	Ton/ Tahun	116 ton	135 ton	155 ton	173 ton	186 ton
3	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Unit/1000 penduduk	n/a	151	156	156	167
4	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor Industri)	Ton/ Tahun	515,6	602,4	578,6	357,6	370,9

Sumber: KLHS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Untuk menjaga lingkungan, ketentuan terkait kelengkapan dokumen usaha terkait lingkungan juga harus dipenuhi, seperti mengurus dokumen Amdal, UKL/UPL, dan SPPL. Pada tahun 2018, Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengeluarkan izin lingkungan seperti Amdal, UKL/UPL, dan SPPL untuk kegiatan di 7 kecamatan dengan detail sebagai berikut:

Tabel 2. 77 Jumlah Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan tahun 2018

No.	Kecamatan	AMDAL	UKL/UPL	SPPL
1	Siantan	1	18	28
2	Palatak	2	5	8
3	Siantan timur	0	1	6
4	Siantan Selatan	1	0	4
5	Jemaja Timur	2	5	2
6	Jemaja	0	3	2
7	Siantan Tengah	0	0	2
	JUMLAH	6	32	52

Sumber data: Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup tahun 2018

Selain ijin kegiatan, Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki agenda kegiatan adipura desa dan adiwiyata yang tersebar di 7 kecamatan. Untuk tahun 2018, berikut adalah jumlah kegiatan adipura desa dan adiwiyata yang diselenggarakan di 7 kecamatan.

Tabel 2. 78 Jumlah Kegiatan Adipura Desa dan Adiwiyata tahun 2018

No.	Kecamatan	Adipura Desa	Adiwiyata
1	Siantan	7	4
2	Palmatak	12	4
3	Siantan timur	5	3
4	Siantan Selatan	7	1
5	Jemaja Timur	4	0
6	Jemaja	6	2
7	Siantan Tengah	4	0
	Total	45	14

Sumber: Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup tahun 2018

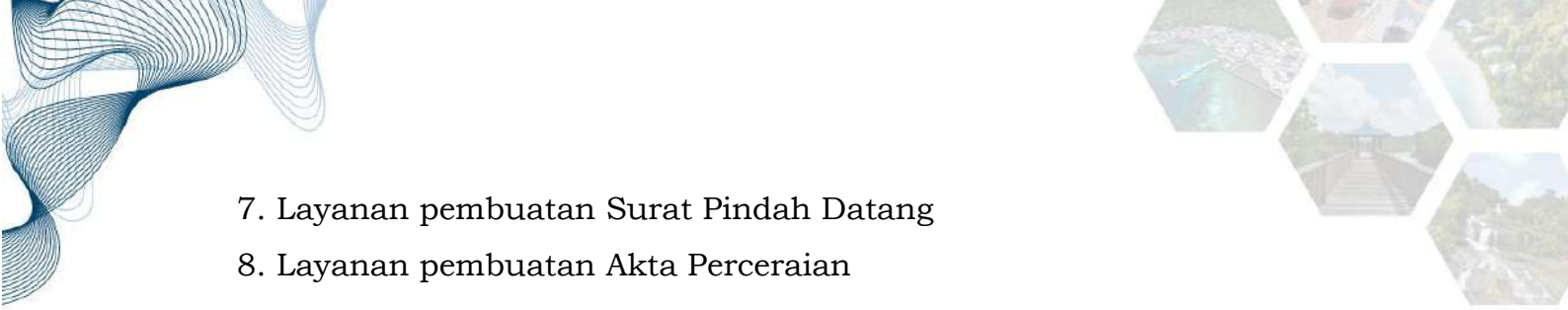
Untuk menambah kesadaran penduduk terkait pentingnya lingkungan hidup, Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki 6 sekolah dengan program adiwiyata sebagai program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai dengan Perda No. 6 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan beberapa pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dalam satu atap. Pelayanan yang dimaksud kemudian dijabarkan ke dalam bentuk bidang kerja di mana di setiap bidang langsung dipimpin oleh Kepala Bidang. Seperti Kepala Bidang Pendaftaran dan Informasi Kependudukan, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, dan Bidang Pengawasan serta Pelaporan.

Berikut beberapa pelayanan yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

1. Layanan pembuatan Akta Kelahiran
2. Layanan pembuatan Kartu Keluarga
3. Layanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk
4. Layanan pembuatan Akta Perkawinan
5. Layanan pembuatan Akta Kematian
6. Layanan pembuatan Akta Pengangkatan Anak



7. Layanan pembuatan Surat Pindah Datang

8. Layanan pembuatan Akta Perceraian

Pada Perubahan Rencana Strategis DISDUKCAPIL Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021, hasil pelayanan administrasi kependudukan yang telah dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut penilaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, yakni:

- a. Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah Penduduk yang wajib ber-KTP.
- b. Kepemilikan Akta Kelahiran.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020, terdapat 32.862 orang yang sudah mendapatkan KTP elektronik dari 32.866 orang penduduk wajib KTP di Kabupaten Kepulauan Anambas. Angka tersebut berhasil menyentuh secara total sebesar 99 persen dari penduduk wajib KTP per 31 Desember 2020. Sementara untuk kepemilikan Akta Kelahiran, sesuai dengan target nasional akta kelahiran difokuskan untuk rentang usia 0-18 tahun. Capaian kepemilikan akta kelahiran baru mencapai 95,63 persen. Capaian ini tentunya banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal lebih dipengaruhi oleh kebiasaan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tidak mengurus Akta Kelahiran anak. Padahal Akta Kelahiran tersebut akan sangat berguna ketika anak masuk ke dunia pendidikan. Juga terdapat pemikiran yang masih menganggap bahwa kepemilikan Akta Kelahiran bagi seorang anak, tidak terlalu penting. Penduduk masih terlalu terpengaruh dengan kebiasaan lingkungan sekitar di mana banyak terdapat keluarga yang belum mengurus Akta Kelahiran. Dan juga adanya kecenderungan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan bila diperlukan (sudah mendesak).

Faktor eksternal lebih dipengaruhi oleh bentang lautan yang ada. Apalagi sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari pulau-pulau, di mana transportasi yang menghubungkan satu pulau dengan

pulau lain masih mengandalkan transportasi laut berupa pompong atau *speedboat*. Kedua transportasi ini memakan biaya yang relatif tinggi bila diukur dari penghasilan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas berbasis kelautan. Mereka lebih memilih untuk mengurungkan niat mengurus Akta Kelahiran setiap anak yang lahir ketika belum diperlukan. Namun ketika Akta Kelahiran anak sudah diperlukan, barulah penduduk bersangkutan akan mengurusnya. Sejauh ini, pelayanan administrasi kependudukan masih berkuat pada penerbitan KK, KTP dan Akta Kelahiran. Dan sangat minim menerima penduduk yang mengurus Akta Kematian ataupun Akta Pengangkatan Anak. Capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil selama periode 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 79 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil Selama Periode 2016-2020

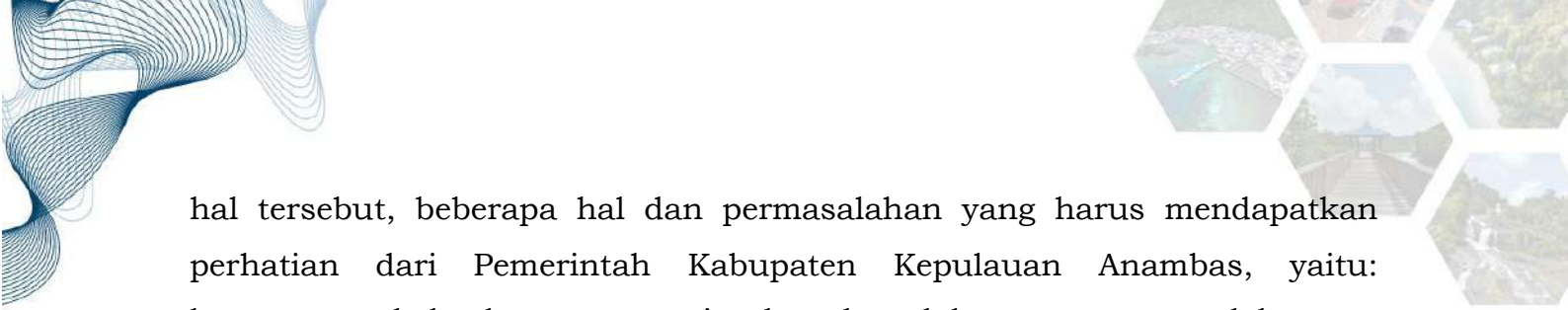
No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase Kepemilikan KTP-el	90%	91%	92%	95,50%	97%
2	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	80%	83%	85%	88,50%	90%
3	Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	N/A	N/A	25%	45%	65%
4	Jumlah Intansi Pengguna Buku Profil Kependudukan Kabupaten	31 Instansi	31 Instansi	31 Instansi	31 Instansi	31 Instansi

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Selain produk administrasi kependudukan yang telah tercantum dalam tabel di atas, Kabupaten Kepulauan Anambas telah berhasil melayani penyediaan akta kematian di 7 kecamatan dengan persentase hingga 100 persen pada tahun 2018 dengan total 1.662 akta kematian. Sedangkan untuk produk administrasi kependudukan berupa kartu keluarga, Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengeluarkan 11.914 dokumen kartu keluarga, atau 88,96 persen dari total jumlah kepala keluarga sebanyak 13.393 kepala keluarga.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehubungan dengan

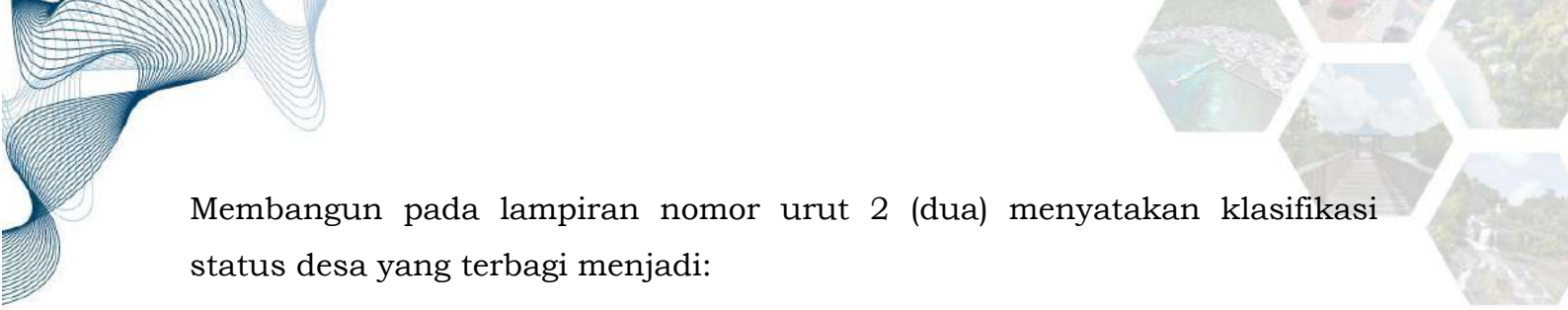


hal tersebut, beberapa hal dan permasalahan yang harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu: kemampuan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa, kapasitas aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, belum dipahaminya proses penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing-masing desa dengan tetap memedomani peraturan perundangan, pendataan lembaga kemasyarakatan, pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat desa dan stabilitas Lembaga Keuangan Mikro dan Pasar Desa.

Beberapa Lembaga masyarakat yang turut berperan aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa adalah LPM dan PKK. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Sedangkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Selain dari sisi masyarakat, terdapat beberapa data sektoral yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di antaranya terkait dengan jumlah BUMDes yang aktif, jumlah posyandu aktif, jumlah siswa sekolah dasar yang terfasilitasi dalam program PMT-AS di daerah tertinggal dan terpencil, jumlah aparatur desa terlatih dan jumlah kawasan perdesaan yang dibangun.

Dalam hal pembangunan desa, berdasarkan sumber data yang disampaikan dan berdasarkan Indeks Desa Membangun yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa



Membangun pada lampiran nomor urut 2 (dua) menyatakan klasifikasi status desa yang terbagi menjadi:

- a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- b. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut:

- a. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($=$) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($=$) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
- d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($=$) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil ($=$) dari 0,4907.

Tabel 2. 80 Status Perkembangan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017

No	Kecamatan	Desa	Status Perkembangan Desa tahun 2017 (desa)		
			Maju	Berkembang	Tertinggal
1	Jemaja	8	0	3	5
2	Jemaja Barat	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Jemaja Timur	4	0	3	1
4	Siantan Selatan	6	0	1	5
5	Siantan	6	0	2	4
6	Siantan Timur	6	0	2	4
7	Siantan Tengah	6	0	3	3
8	Palatak	15	1	8	6
9	Siantan Utara	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Kute Siantan	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: PPID Anambas³, 2019

Berikut ini merupakan capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun indikator

³ diakses melalui https://ppid.anambaskab.go.id/asset/data_file/IDM_DESA_2019.pdf

kinerja yang digunakan dan capaian kerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 81 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pendamping Desa yang di Latih dalam rangka Penyusunan RPJM-Des sesuai Standar	52	52	52	52	52
2	Jumlah BUMDesa yang terbentuk	17	17	20	20	25
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat (%)	20	20	20	20	20
4	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang di Tingkatkan Kapasitasnya	5	5	5	5	5
5	Jumlah Desa Pengelolaan Keuangan Baik	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah dalam mengatasi ledakan jumlah penduduk. Keberhasilan program KB perlu memperoleh perhatian yang serius karena program yang dilaksanakan harus selaras dengan program yang dicanangkan oleh BKKBN. Selain itu, hal ini perlu diperhatikan karena keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh pembangunan keluarga kecil yang berkualitas. Pada tahun 2019, jenis KB yang sering dipakai adalah jenis suntik, disusul pil dan *implant*. Hal ini sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 82 Data Akseptor KB di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2019

Jenis KB	2016	2017	2018	2019	2020
IUD	301	914	...	195	71
MOW	83	965	...	118	12
MOP	17	6	...	1	0
Kondom	541	759	...	76	38
Implant	0	0	...	499	77
Suntikan	0	0	...	2.058	205
Pil	0	0	...	893	52
Akseptor KB	942	2.644	...	3.840	455
Jumlah PUS	7.525	7.650	...	8.549	9.319

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka, 2016-2019, diolah

Selanjutnya adalah jumlah akseptor Keluarga Berencana (KB) tercatat pada tahun 2019 mencapai sebanyak 3.840 akseptor di mana suntikan dipilih sebagai jenis kontrasepsi terbanyak digunakan, yaitu sebanyak 2.058 akseptor. Sedangkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) ada sebanyak 8.549. Untuk melayani kegiatan di atas, berikut beberapa fasilitas yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2020:

Tabel 2. 83 Jumlah Fasilitas Keluarga Berencana Tahun 2016-2020

Jumlah Fasilitas	2016	2017	2018	2019	2020
Klinik Keluarga Berencana (KKB)	11	11	11	11	16
Petugas Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	54	54	54	54	54
Mobil Antar Jemput Akseptor KB	0	1	1	1	1
Gedung Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	7	7	7	7	7

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Berikut ini merupakan capaian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun indikator kinerja yang digunakan dan capaian kinerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 84 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi keluarga berencana	66	72	69	73	69

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, 2021

2.3.2.9 Perhubungan

Untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan serta mencapai kesejahteraan masyarakat dibutuhkan sarana transportasi yang aman dan nyaman. Untuk itu, dibutuhkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Pada tahun 2015, 80 persen sarana dan fasilitas LLAJ telah direhabilitasi dan dipelihara. Selain itu, keterjangkauan desa menuju pusat kegiatan dan pertumbuhan juga

telah mencapai 80 persen. Untuk kasus kecelakaan, pada tahun 2015 hanya terjadi 14 kasus kecelakaan.

Pada tahun 2018, Kabupaten Kepulauan Anambas telah memiliki pelabuhan yang tersebar di 7 kecamatan yang terdiri dari beberapa status pelabuhan. Berikut adalah detail jumlah dan status pelabuhan di 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas:

Tabel 2. 85 Jumlah dan Status Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Kecamatan tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Pelabuhan	Status Pelabuhan					
			Perintis	Penumpang	Lokal	ASDP	Regional	Terminal Khusus
1	Siantan	11	1	1	9	0	0	0
2	Siantan Tengah	13	0	0	12	1	0	0
3	Siantan Timur	25	0	0	25	0	0	0
4	Siantan Selatan	18	0	0	18	0	0	0
5	Jemaja	15	1	0	14	0	0	0
6	Jemaja Timur	3	0	0	2	0	1	0
7	Palmatak	40	0	0	37	1	0	2

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Kep. Anambas, 2018

Dari segi lalu lintas, berikut adalah data jumlah lalu lintas penumpang yang melewati Pelabuhan Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas pada kurun waktu 2016-2019:

Tabel 2. 86 Jumlah lalu lintas penumpang yang melewati Pelabuhan Tarempa Tahun 2016 - 2019

No.	Kegiatan Lalu Lintas	Tahun				Satuan
		2016	2017	2018	2019	
1	Embarkasi	36.753,00	28.375,00	29.253,00	30.501,00	Orang
2	Debarkasi	32.560,00	36.782,00	36.677,00	43.578,00	Orang

Sumber: CEIC 2020, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Selain pelabuhan, Kabupaten Kepulauan Anambas juga telah memiliki 1 bandara komersial, yaitu Bandara Letung di Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai pembuka akses Kabupaten Kepulauan Anambas dengan dunia luar. Bandara ini sudah mulai beroperasi sejak tahun 2016, namun baru selesai dibangun dan telah diresmikan pada Oktober tahun 2019. Sementara untuk dermaga penyeberangan, Kabupaten Kepulauan Anambas telah memiliki 137 dermaga sebagai akses antar pulau.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Pada bidang komunikasi, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 3 kantor pos yang terletak di Kecamatan Jemaja, Siantan, dan Palmatak. Selain itu, saat ini Kabupaten Kepulauan Anambas juga telah dilengkapi dengan Menara *provider* jaringan telepon dan internet seperti Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata yang tersebar di 30 titik, termasuk Menara komunikasi bantuan program BTS Perbatasan BP3TI tahun 2017 sebanyak 7 buah dan menara milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri sejumlah 4 buah. Berikut adalah data layanan telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2018:

Tabel 2. 87 Data Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2018

Nama	Kecamatan							Satuan
	Siantan	Palmatak	Siantan Timur	Siantan Selatan	Jemaja Timur	Jemaja	Siantan Tengah	
1. Layanan Telepon Seluler								
1. Jumlah desa terlayani	6	13	6	7	3	6	4	Desa/Kel
2. Jumlah desa belum terlayani	1	2	0	-	1	3	2	Desa/Kel
3. Jumlah BTS	12	10	5	6	2	6	2	BTS
4. Jumlah Provider	4	3	1	1	2	2	2	Provider
2. Layanan Telepon Kabel								
1. Jumlah Jaringan Telepon Tersedia	0	0	0	0	0	0	0	Desa
2. Jumlah jaringan terpasang	0	0	0	0	0	0	0	SS
3. Layanan Internet								
1. Jumlah desa terlayani	5	13	5	6	4	8	5	Desa
2. Jumlah desa	2	2	1	1	0	1	1	Desa

Nama	Kecamatan							Satuan
	Siantan	Palmatak	Siantan Timur	Siantan Selatan	Jemaja Timur	Jemaja	Siantan Tengah	
belum terlayani								

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Terkait ketersediaan internet, berikut adalah data persentase persebaran titik internet di Kabupaten Kepulauan Anambas:

Tabel 2. 88 Persentase Persebaran Titik Internet di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Titik Internet	Persentase
1	Siantan	16	19%
2	Siantan Selatan	9	11%
3	Siantan Tengah	9	10%
4	Siantan Timur	9	10%
5	Palmatak Jemaja	22	26%
6	Jemaja	15	17%
7	Jemaja Timur	6	7%
	Total 2018	86	100%

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Meskipun Titik internet sudah tersebar di 7 kecamatan, ternyata jangkauan internet yang ada belum dapat mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berikut adalah daftar desa yang belum mendapatkan sinyal internet (berada di luar jangkauan internet) atau hanya mendapatkan sinyal yang lemah.

Tabel 2. 89 Data Desa Yang Belum Terakses Sinyal Telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

No.	Lokasi	Keterangan
1	Desa Tarempa Barat Daya	Tidak dapat sinyal / sinyal lemah
2	Desa Batu Berapat (Jemaja)	Tidak dapat sinyal / sinyal lemah
3	Desa Mampok	Tidak dapat sinyal / sinyal lemah
4	Desa Landak	Tidak dapat sinyal / sinyal lemah
5	Desa Muntau Desa Teluk Siantan	Dapat sinyal dari Desa Asuk
6	Desa Liuk	Tidak dapat sinyal / sinyal lemah
7	Dusun Pala Desa Mubur	Tidak dapat sinyal / sinyal lemah
8	Desa Ulu Maras	Dapat sinyal dari Desa Kuala Maras
9	Desa Teluk bayur	Tidak dapat sinyal / sinyal lemah

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Apabila dilihat dari segi para penyedia layanan telekomunikasi, 3 penyedia telekomunikasi terbesar di Kabupaten Kepulauan Anambas telah tersebar di 7 kecamatan yang terdiri dari: (1) Telkomsel yang mendominasi pasar penyedia layanan telekomunikasi sebesar 73 persen, (2) Indosat sebagai penyedia layanan terbesar kedua dengan persentase 21,6 persen, dan terakhir adalah (3) XL Axiata yang mulai dikenal di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan persentase 5,4 persen.⁴

Berikut ini merupakan capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun indikator kinerja yang digunakan dan capaian kinerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 90 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Layanan Pengelolaan Informasi Publik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
2	Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	0 Orang	9 Orang	0 Orang	18 Orang	1 Orang
3	Jumlah Aplikasi E-Government	1 Aplikasi	3 Aplikasi	4 Aplikasi	2 Aplikasi	6 Aplikasi
4	Jumlah Dokumen dan Perda yang disahkan DPRD	0 Dokumen /Perda	0 Dokumen /Perda	0 Dokumen /Perda	0 Dokumen /Perda	0 Dokumen /Perda
5	Jumlah Desa/Kelurahan yang terjangkau Akses Telekomunikasi	26 titik dan 35 Kel/Desa	26 titik dan 36 Kel/Desa	40 titik dan 47 Kel/Desa	41 titik dan 47 Kel/Desa	41 titik dan 49 Kel/Desa
6	Jumlah bulan penyelenggaraan akses internet di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2021

⁴ Data dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kab. Kep. Anambas, 2018

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka perlu dikembangkan sektor koperasi dan UKM karena pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Menurut data tahun 2018, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 1 unit koperasi aktif dengan jenis Koperasi Serba Usaha yang dibantu Pemerintah dan terletak di Kecamatan Palmatak. Padahal, sebenarnya Kabupaten Kepulauan Anambas masih memiliki 4 unit koperasi yang tidak aktif yang dibantu pemerintah, terdiri dari: (1) 1 unit Koperasi konsumsi yang terletak di Kecamatan Palmatak, (2) 1 unit koperasi simpan pinjam yang terletak di Kecamatan Siantan, dan (3) 1 unit Koperasi Serba Usaha di Kecamatan Jemaja Timur.

Selain koperasi yang dibantu pemerintah, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki koperasi aktif dan tidak aktif dengan kepemilikan sendiri. Menurut data tahun 2016-2020, berikut adalah daftar koperasi mandiri menurut jenisnya:

Tabel 2. 91 Jumlah koperasi dengan kepemilikan mandiri Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2020

No.	Kecamatan	Koperasi Produksi	Koperasi Konsumsi	Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi Serba Usaha	Satuan
Koperasi Mandiri Aktif						
1	Siantan	1	-	3	4	Unit
2	Palmatak	-	1	-	2	Unit
3	Siantan Timur	-	-	3	-	Unit
4	Siantan Selatan	-	-	-	-	Unit
5	Jemaja Timur	-	-	-	4	Unit
6	Jemaja	-	-	1	1	Unit
7	Siantan Tengah	-	-	-	-	Unit
TOTAL 2020		1	1	7	11	Unit
TOTAL 2019		1	1	5	9	Unit
TOTAL 2018		3	2	6	7	Unit
TOTAL 2017		3	2	6	9	Unit

No.	Kecamatan	Koperasi Produksi	Koperasi Konsumsi	Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi Serba Usaha	Satuan
TOTAL 2016		4	6		3	Unit
Koperasi Mandiri Tidak Aktif						
1	Siantan	1	-	5	15	Unit
2	Palmatyak	1	-	-	8	Unit
3	Siantan Timur	-	-	2	1	Unit
4	Siantan Selatan	-	-	-	3	Unit
5	Jemaja Timur	1	-	-	3	Unit
6	Jemaja	3	-	3	4	Unit
7	Siantan Tengah	-	-	-	3	Unit
TOTAL 2020		6	-	10	37	Unit
TOTAL 2019		5	-	11	35	Unit
TOTAL 2018		5	-	9	23	Unit
TOTAL 2017		6	-	8	28	Unit
TOTAL 2016		6	-	8	11	Unit

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Selain Koperasi, di Kabupaten Kepulauan Anambas, terdapat sejumlah UMKM yang sudah aktif berjalan dan tersebar di wilayah kecamatan. Berikut adalah data jumlah UMKM per bidang usaha di Kabupaten Kepulauan Anambas menurut data tahun 2016-2020.

Tabel 2. 92 Jumlah UMKM Berdasarkan Bidang Usahanya Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2020

No.	Bidang Usaha	Jenis Badan Usaha	Lokasi						Jumlah	Satuan	
			Siantan	Palmatyak	Siantan Timur	Siantan Selatan	Jemaja Timur	Jemaja			Siantan Tengah
1	Kuliner (Pengolahan Makanan)	Mikro	136	156	42	31	110	111	37	623	Usaha
		Kecil	22	3	-	1	2	4	-	32	
		Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Perdagangan	Mikro	390	290	62	92	66	137	61	1.098	Usaha
		Kecil	64	23	-	7	6	24	-	124	
		Menengah	3	1	-	-	-	1	-	5	
3	Perikanan Tangkap	Mikro	285	153	73	92	32	64	-	699	Usaha
		Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Perikanan Budidaya	Mikro	4	73	80	96	10	63	196	522	Usaha
		Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pertanian dan Perkebunan	Mikro	72	76	-	34	39	114	-	335	Usaha
		Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Peternakan	Mikro	8	11	-	4	25	64	-	112	Usaha
		Kecil	-	-	-	2	-	-	-	2	
		Menengah	3	1	-	-	-	1	-	5	

No.	Bidang Usaha	Jenis Badan Usaha	Lokasi						Jumlah	Satuan	
			Siantan	Palmatak	Siantan Timur	Siantan Selatan	Jemaja Timur	Jemaja Tengah			
7	Lainnya (Jasa)	Mikro	139	137	1	3	110	111	37	538	Usaha
		Kecil	4	3	-	-	-	-	-	7	
		Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL 2020			1.130	927	258	362	400	694	331	4.102	Usaha
TOTAL 2019			935	873	246	362	389	584	297	3.987	Usaha
TOTAL 2018			875	754	189	358	287	482	259	2.859	Usaha
TOTAL 2017			690	674	144	343	222	408	248	2.744	Usaha
TOTAL 2016			589	645	135	338	210	369	214	2.656	Usaha

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Untuk memasarkan produk, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 9 pasar tradisional yang dikelola pemerintah dan 5 pasar tradisional yang dikelola oleh swasta. Di sisi lain, Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki pasar modern sebanyak 3 unit minimarket dan 11 unit pasar grosir. Apabila dilihat dari jumlah pertokoan, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 366 toko yang tersebar di 7 kecamatan (berdasarkan data tahun 2018).

2.3.2.12 Penanaman Modal

Investasi menjadi salah satu tolok ukur suatu daerah memiliki daya saing dalam menarik investor. Investasi baik asing, domestik maupun pemerintah, memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan wilayah yang potensial bagi investasi karena potensi pariwisatanya yang luar biasa. Pertumbuhan investasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu iklim investasi yang kondusif, kemudahan, dan kejelasan prosedur serta kondisi makro ekonomi daerah tersebut. Pada tahun 2017, Nilai Investasi yang Terealisasi (PMA/PMDN) di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai Rp. 233.545.160.933 dengan jumlah 2 PMA dan 2 PMDN. Adapun indikator kinerja yang digunakan dan capaian kinerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 93 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Investasi yang Terealisasi (PMA/PMDN)	117.903.500.000	233.545.160.933	250.444.981.695	252.311.734.037	108.397.395.471
2	Jumlah PMA/PMDN	2 PMA dan 2 PMDN	2 PMA dan 2 PMDN	2 PMA dan 2 PMDN	2 PMA dan 2 PMDN	2 PMA dan 2 PMDN
3	Jumlah Perizinan non Perizinan yang diterbitkan	367	367	121	437	202

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Transmigrasi, 2021

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda memiliki peran penting sebagai penggerak atau motor kegiatan di berbagai sektor. Peran aktif pemuda juga turut mendukung perkembangan daerah. Di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2017, jumlah Pemuda yang mengikuti Kegiatan Kepemudaan mencapai 1.076 peserta. Dari segi fasilitas, kegiatan olahraga didukung dengan tersedianya 130 lapangan dalam kondisi baik. Berikut adalah capaian indikator Kepemudaan Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2016-2020:

Tabel 2. 94 Realisasi Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2019

Indikator	Realisasi Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pembinaan Olahraga	8 Cabor	4 Cabor	...
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	4 Orang
Cakupan Pembinaan Atlit Muda	...	200 Orang	240 Orang	240 Orang	...
Jumlah Atlit Berprestasi	...	12 Orang	33 Orang	12 Orang	...
Jumlah Prestasi Olahraga	...	1 Cabor	3 Cabor	1 Cabor	...
Jumlah Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Kepemudaan	1.076 Peserta

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berikut ini merupakan capaian kinerja urusan pemuda dan olahraga di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun indikator kinerja yang digunakan dan capaian kerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 95 Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pemuda yang mengikuti Kegiatan Kepemudaan (peserta)	50	150	100	150	0
2	Jumlah Kompetisi Cabang Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas (cabang olahraga)	0	7	8	4	0
3	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga dalam Kondisi Baik (LAPANGAN)	99,09	78,2	99,11	49,05	49,05
4	Jumlah Kasus Penyalahgunaan NAPZA dan Pergaulan Bebas yang melibatkan Pemuda sebagai Pelaku (KASUS)	99,61	98,78	98,84	97,76	78,36
5	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Umum Daerah	2130	2235	450	496	0
6	Jumlah Bulan pelayanan administrasi keuangan	214	223	245	287	0
7	Jumlah Siswa Magang SMK yang berkompeten (orang)	8	10	12	14	15

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, 2021

2.3.2.14 Statistik

Statistik sangat dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid dan akurat. Kewenangan daerah dalam urusan statistik meliputi pengumpulan dan pemanfaatan data statistik daerah. Berikut ini merupakan capaian kinerja urusan Statistik di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun indikator kinerja yang digunakan dan capaian kerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 96 Capaian Kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokumen Pengembangan Data/Informasi yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2021

2.3.2.15 Persandian

Urusan persandian diperlukan untuk menjaga data dan informasi rahasia negara agar tidak bocor ke publik. Rahasia negara dijamin oleh Undang-Undang, dan barang siapa yang membocorkan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pada tahun 2017, terdapat 4 dokumen yang melewati proses persandian.

Berikut ini merupakan capaian kinerja urusan Persandian di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun indikator kinerja yang digunakan dan capaian kinerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 97 Capaian Kinerja Urusan Persandian di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jenis Informasi yang diamankan melalui Persandian	0 Jenis	0 Jenis	2 Jenis	1 Jenis	0 Jenis

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2021

2.3.2.16 Kebudayaan

Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2017 menggelar Festival Semarak Anambas untuk mengembangkan nilai budaya di Anambas. Selain itu, Pemkab juga menyelenggarakan *event* perlombaan sebanyak 29 kegiatan Kebudayaan Anambas. Dari sisi partisipasi, pada tahun yang sama Dinas Pariwisata juga mengikuti 18 kegiatan budaya di tingkat provinsi dan nasional. Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki 39 kelompok pelaku, pegiat, dan komunitas budaya yang aktif mengadakan kegiatan setiap tahunnya.

Menurut data tahun 2018, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 17 sanggar kesenian yang didukung dengan tersedianya sarana Gedung kesenian sebanyak 5 unit. Dari sisi pegiat seni dan budaya, terdapat beberapa golongan pegiat seni yang terdiri dari pegiat seni rupa, seni tari,

seni suara, seni music tradisional, dan seni teater. Dari golongan seni rupa, terdapat 7 kelompok pegiat seni kriya, 9 kelompok pegiat seni dekorasi, dan 1 kelompok seni reklame. Sedangkan untuk seni tari, terdapat 2 kelompok seni tari klasik, 15 kelompok seni kreasi baru, 9 kelompok seni tari tradisional, 2 kelompok tari modern. Sementara itu dari sisi pegiat seni suara/vokal, terdapat 7 kelompok pegiat. Seni musik sebagai pendukung seni suara memiliki 10 kelompok pegiat seni. Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki kelompok pegiat seni teater/drama sebanyak 2 kelompok. Dengan berbagai kelompok di atas, 2 pagelaran berhasil digelar dengan pengunjung kurang lebih mencapai seribu orang.

Dilihat dari intensitas pelestarian budaya daerah yang saat ini telah dilakukan di Kabupaten Kepulauan Anambas, dari tahun 2017 hingga tahun 2019, persentasi intensitas pelestarian budaya daerah adalah 10 persen, dan 9 persen pada tahun 2020. ⁵

Tabel 2. 98 Jumlah Sanggar Kesenian Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020

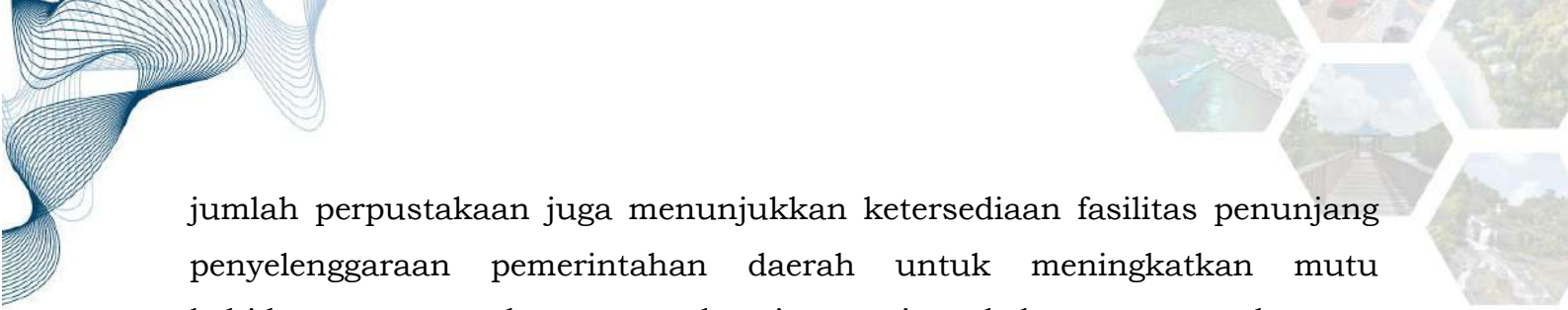
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sanggar Kesenian	2	2	3	4	4

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

2.3.2.17 Perpustakaan

Pelaksanaan urusan perpustakaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Keberadaan perpustakaan sangat penting dalam menunjang pendidikan dan minat baca masyarakat. Banyaknya jumlah perpustakaan akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Besarnya

⁵ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KKA, 2021



jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Berdasarkan data tahun 2017, jumlah kunjungan di perpustakaan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 1.591 orang dalam kurun waktu 1 tahun. Angka ini ternyata menurun di tahun 2018 menjadi 1.137 orang dalam kurun waktu 1 tahun dan jumlah anggota perpustakaan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di tahun 2018 mencapai 697 orang. Dari segi koleksi yang ditawarkan oleh Perpustakaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Perpustakaan Daerah telah memiliki 6.327 koleksi buku yang dapat dipinjam oleh para anggota perpustakaan.

2.3.2.18 Kearsipan

Pelaksanaan urusan kearsipan terkait dengan pengelolaan arsip aktif maupun arsip statis. Selayaknya seluruh SKPD telah melakukan kegiatan kearsipan secara baku. Sehingga semua dokumen kegiatan SKPD dapat dilacak dan tidak tumpang tindih dengan arsip-arsip lainnya. Untuk itu, perlu peningkatan SDM yang memadai dalam melaksanakan tata kelola kearsipan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah terdiri atas:

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi bahari yang tinggi. Hal tersebut menjadikan sektor kelautan dan perikanan mendapat perhatian khusus dalam rancangan kerja pemerintah daerah. Tabel dibawah ini memperlihatkan capaian sektor kelautan dan perikanan. Produksi perikanan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2016 hingga 2018 namun kembali mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Cakupan nelayan binaan mengalami perubahan dari tahun 2016 hingga 2018 di mana

sempat terjadi penurunan jumlah nelayan binaan di tahun 2017 kemudian meningkat kembali hingga pada tahun 2018 terdapat sebanyak 93 nelayan binaan. Produksi perikanan budi daya di Kabupaten Kepulauan Anambas mendominasi produksi perikanan total dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap.

Tabel 2. 99 Capaian Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 - 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi perikanan (ton)	28.788	29.739	23.368	23.526	21.032
Produksi perikanan budi daya (ton)	195,14	245,4	274	294	174,3
Produksi perikanan tangkap (ton)	28.593	29.494	23.094	23.232	20.858
Cakupan bina kelompok nelayan (nelayan budi daya)	138	91	99	95	66

Sumber: LAKIP dan Bid. Pembudayaan Ikan, 2016-2020

Daftar produk perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas tersaji dalam tabel dibawah ini. Produk perikanan unggulan dengan nilai Produksi terbesar adalah ikan kerapu sunu dengan nilai produksi 61 juta rupiah pada tahun 2020. Lima produk perikanan lainnya dengan nilai tertinggi adalah Kerapu Sunu, Kakap Merah, Kurisi, Tongkol Abu-Abu, dan Kwee.

Tabel 2. 100 Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Komoditi Tahun 2020 (Dalam Ribu Rupiah)

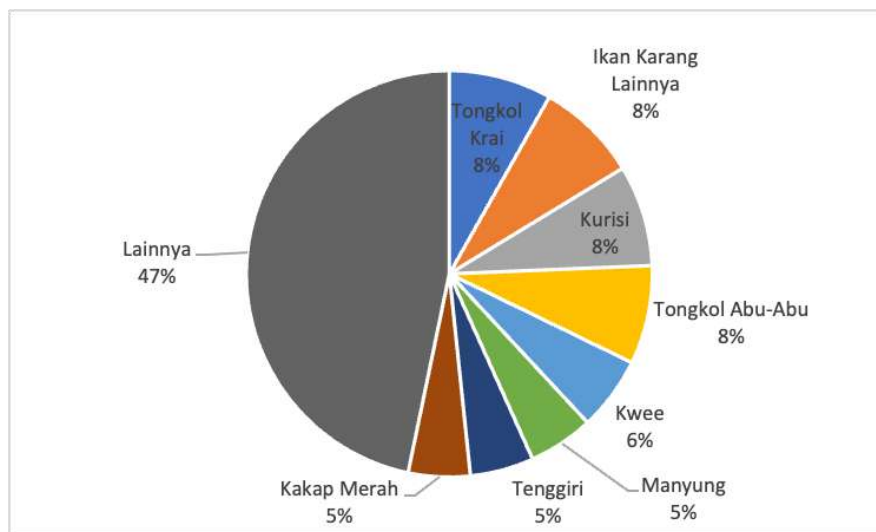
Jenis Komoditi	Nilai Produksi	Jenis Komoditi	Nilai Produksi	Jenis Komoditi	Nilai Produksi
Tenggiri	48.128	Pinjalo	20.278	Lemuru	6.947
Kakap Merah	46.793	Kerapu Sunu	61.681	Ekor Kuning	7.223
Kurisi	33.992	Sotong	19.925	Kembung	6.303
Tongkol Abu-Abu	33.123	Lencam	9.825	Bentong	5.922
Kwee	31.006	Ikan Gaji	9.268	Layar Biru	5.772
Cumi	27.209	Manyung	8.773	Cucut Lanyam	5.614
Tongkol Krai	27.706	Slengseng	7.329	Kapas	5.661
Kerapu Karang	35.559	Baronang	6.900	Jumlah	470.938
TOTAL 2020					941.875
TOTAL 2019					452.012
TOTAL 2018					589.051
TOTAL 2017					589.051
TOTAL 2016					538.829

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Potensi Sumber Daya Perikanan

Dengan kondisi geografis yang merupakan daerah kepulauan, produksi laut tentunya menjadi hal yang signifikan. Begitu beragamnya jenis ikan yang ada membuat dominasi suatu jenis ikan kecil sekali. Menurut data dari BPS tahun 2020, jenis ikan terbanyak yang di hasilkan adalah tongkol Krai, ikan Karang lainnya, kurisi, dan tongkol abu-abu yang masing-masing mencapai 8 persen. Detailnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini meliputi ikan Kurisi, Tongkol abu-abu, Kwee, Manyung, Tenggiri, Kakap Merah dan Lainnya. Hal yang bisa ditingkatkan adalah ketersediaan sarana penangkapan yang lebih baik, termasuk, besarnya kapal, tempat penyimpanan (*storage*), tempat pengolahan (pabrik-pabrik) ikan kaleng, menjaga kelestarian alam, keahlian nelayan, perizinan yang jelas dari pusat dan provinsi dan sebagainya.

Gambar 2. 37 Komposisi Produksi Ikan Laut Kabupaten Kepulauan Anambas 2020

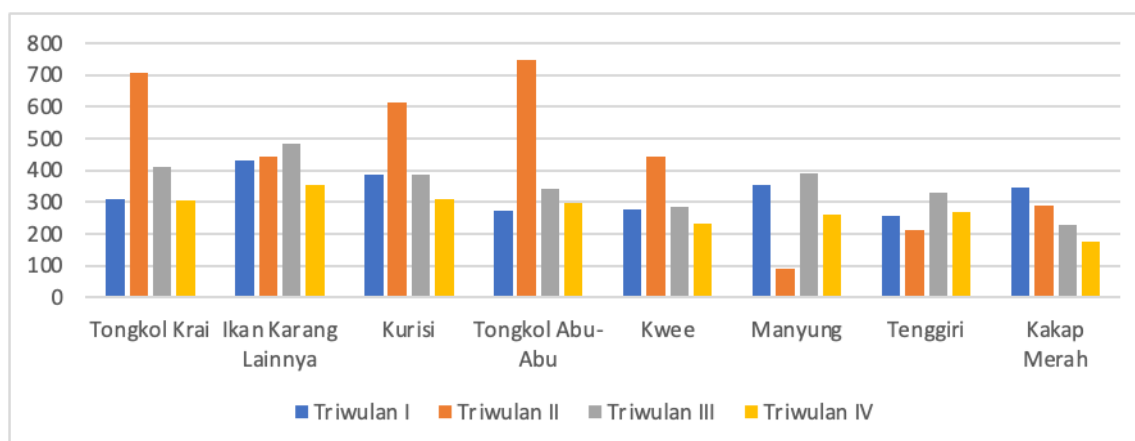


Sumber: Tim Penyusun RPJMD, diolah

Musim sangat berpengaruh juga terhadap jumlah penangkapan jenis ikan. Misal, dari pengalaman tahun 2019 dengan media penangkapan yang ada saat ini, pada triwulan pertama, jenis tangkapan terbanyak adalah ikan karang lainnya. Pada triwulan kedua, jenis tangkapan terbanyak adalah ikan Tongkol Abu-abu. Pada triwulan ketiga dan keempat, jenis tangkapan terbanyak adalah ikan karang lainnya. Dan di antara 4 musim, di musim

kedua, banyak ikan berjenis Tongkol Abu-abu, Tongkol Krei, ikan Kurisi ikan Karang lainnya dan ikan kwee. Distribusi ikan hasil tangkapan per triwulan dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 2. 38 Produksi Triwulanan Ikan Laut Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020



Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Untuk rincian detail, jenis komoditi dan jumlah ton tangkapan, dapat dilihat di tabel produksi perikanan tangkap. Dan hasil ini bisa ditingkatkan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang telah dipaparkan di atas, misal, besarnya kapal, keahlian nelayan, pelestarian alam, aturan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, bantuan pemerintah mencari pasar, proteksi atas untuk stabilisasi harga, promosi lokal, dan sebagainya.

Tabel 2. 101 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Komoditi (Ton), 2020

Jenis Komoditi Ikan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
Tongkol Krai	309	708	409	305	1.732
Ikan Karang Lainnya	431	443	483	352	1.709
Kurisi	387	614	388	311	1.700
Tongkol Abu-Abu	271	747	343	296	1.656
Kwee	278	445	284	233	1.240
Manyung	353	92	390	262	1.097
Tenggiri	256	213	331	270	1.070
Kakap Merah	347	289	227	177	1.040
Lainnya	2.577	2.359	2.691	2.239	9.866
Jumlah	5.209	5.910	5.546	4.445	21.110

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2020, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Jenis komoditi ikan lainnya meliputi Kerapu Karang, Lemuru, Cumi, Lencam, Slengseng, Pinjalo, Kerapu Sunu, Kembung, Layar Biru, Kapas, Baronang, Sotong, Bentong, Cucut Lanyam, Ikan Gaji, Ekor Kuning, dan Lainnya, tidak bisa juga dianggap sebelah mata, karena besarnya mencapai sekitar 47 persen. Jadi dominasi jenis ikan ini pun bisa dikatakan tersebar merata.

Berikut ini merupakan capaian kinerja urusan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun indikator kinerja yang digunakan dan capaian kerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 102 Capaian Kinerja Urusan Perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

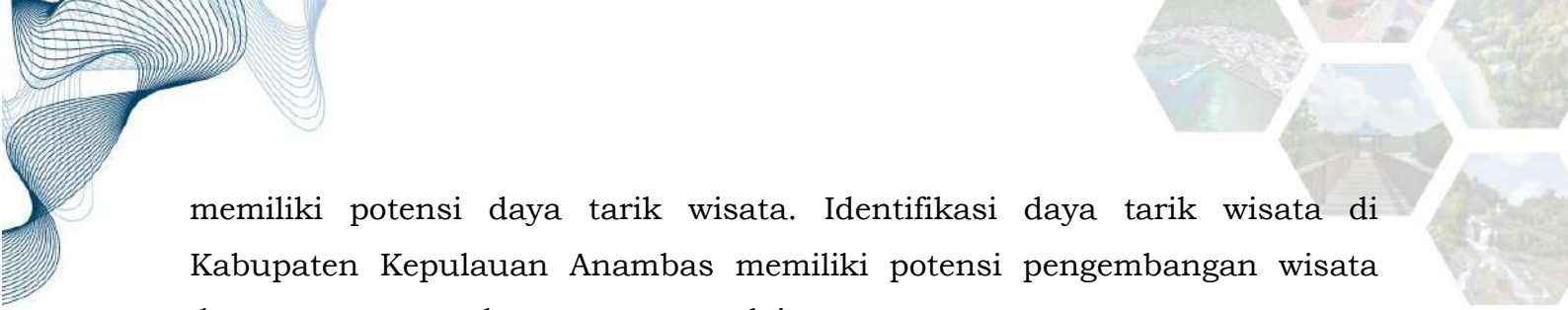
No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya)	28.983	29.739	23.368	23.526	21.017
2	Jumlah Armada Perikanan Tangkap	2.481	2.497	2.501	2.501	3.026

Sumber: Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan, 2021

2.3.3.2 Pariwisata

Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Anambas ditunjang oleh sebagian besar potensi alam, khususnya potensi kelautan atau bahari. Potensi kelautan tersebut menjadi potensi utama dengan diperkaya oleh keanekaragaman serta keindahan pantai, terumbu karang, serta ekosistem laut lainnya. Selain wisata bahari, Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki wisata alam dan budaya. Masih banyak daerah-daerah di Anambas perlu pengelolaan agar memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 7 Kecamatan yaitu: Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur. Dari tujuh kecamatan tersebut, hampir semua



memiliki potensi daya tarik wisata. Identifikasi daya tarik wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi pengembangan wisata dengan tema yang beragam, antara lain:

1. Wisata Alam, merupakan bentuk kegiatan wisata yang bertujuan menikmati kehidupan alam liar atau bentukan alam/lingkungan yang masih asli, termasuk dalam wilayah perencanaan ini adalah wisata pantai, air terjun, serta alam pegunungan. (Air Terjun Temburun di Siantan Timur, Air Terjun Air Bunyi di Siantan Selatan, dan Air Terjun Ulu Maras (Neraja) Jemaja Timur)
2. Wisata Minat Khusus, merupakan bentuk kegiatan wisata bahari dengan aktivitas yang berkaitan dengan kelautan, baik di atas permukaan (*marine*) maupun dilakukan di bawah permukaan laut (*sub marine*), termasuk dalam wilayah perencanaan ini adalah wisata alam bawah laut, yakni jenis pengembangan wisata untuk menikmati panorama ekosistem di bawah laut. Kondisi Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari banyak pulau membuat titik destinasi golongan wisata ini sangat banyak pilihannya di Anambas
3. Wisata Agro, merupakan jenis wisata minat khusus yang berorientasi pada kegiatan yang dikaitkan dengan kegiatan budi daya tanaman pangan, menikmati kegiatan di perkebunan, perikanan, dan peternakan.
4. Wisata Budaya, merupakan bentuk kegiatan pariwisata yang berorientasi pada pembelajaran unsur-unsur budaya setempat, berkaitan dengan tarian tradisional, budaya dan sejarah, kehidupan masyarakat setempat (*traditional way of life*), kerajinan tangan, serta kuliner khas daerah, termasuk dalam hal ini spiritual dan sejarah. (Masjid Jamik Baiturahim, Vihara Gunung Dewa, Makam Keramat Siantan Tengah, Keramat Gunung Kuantang di Palmatak, Pulau Kuku dan Pulau Air Raya di Jemaja)
5. Wisata Kuliner, bentuk kegiatan pariwisata yang ingin menikmati keanekaragaman makanan dan rasa khas daerah setempat.

Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari dalam dan luar negeri. Secara akumulatif, berikut merupakan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2016-2020.

Tabel 2. 103 Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kunjungan Wisata	107.677	108.233	108.785	109.305	14.618

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Rata-rata lama kunjungan wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas selama 5 tahun terakhir tersaji dalam tabel di bawah ini. Nampak terjadi fluktuasi lama kunjungan wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas yang meningkat pada tahun 2017 kemudian turun kembali dan pada tahun 2019 menjadi 1,56 hari.

Tabel 2. 104 Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Kepulauan Anambas 2016 - 2020

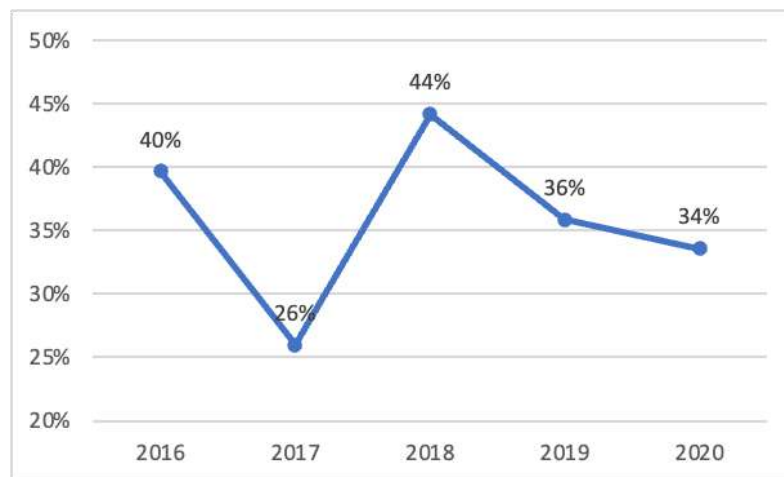
	2016	2017	2018	2019	2020
Lama Kunjungan Wisata (hari)	1,7	1,9	1,57	1,56	2,09

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tidak dihitung secara langsung oleh Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga pendapatan dari pajak yang berhubungan dengan pariwisata seperti pajak hotel dan pajak restoran dapat menjadi acuan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Kontribusi sektor pariwisata pada PAD yang menggunakan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran sebagai acuan kontribusi sektor pariwisata terlihat pada Gambar di bawah ini. Secara umum terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam lima tahun terakhir. Pada 2016 pendapatan dari sektor pariwisata merupakan 40 persen dari total pendapatan asli daerah. Pada tahun 2018 merupakan kontribusi terbesar dengan pariwisata menyumbang sebesar 44 persen dari PAD. Lalu terakhir pada tahun 2020, sektor

pariwisata kembali turun dan hanya memberikan kontribusi sebesar 34 persen dari total PAD.

Gambar 2. 39 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Tahun 2016-2020



Sumber: LRA Kab. Kepulauan Anambas 2016-2020, diolah

Potensi Sumber Daya Pariwisata

Menurut Badan Pusat Statistik, Wisatawan mancanegara (wisman) ialah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari satu tahun (12 bulan). Definisi ini mencakup 2 (dua) kategori wisatawan mancanegara, yaitu :

- a. Wisatawan (tourist) ialah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun di tempat yang dikunjungi, dengan maksud antara lain: berlibur, rekreasi, olah raga, bisnis, menghadiri pertemuan, studi, dan kunjungan dengan alasan kesehatan.
- b. *Excursionist* (pelancong) ialah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi (termasuk "Cruise passengers"). *Cruise Passengers* ialah setiap pengunjung yang tiba di suatu negara di mana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut, misalnya dengan kapal laut.

Rata-rata lama tinggal adalah rata-rata waktu tinggal wisatawan mancanegara di Indonesia untuk satu kali kunjungan. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang dikeliling oleh lautan membuat wilayah ini memiliki banyak potensi pariwisata berupa pantai dan pesona lautannya yang masih asri. Pada tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Anambas telah memiliki 59 unit rumah makan untuk mendukung sektor pariwisata ini.

Tabel 2. 105 Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2020

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
Jemaja	11	11	13	13	13
Jemaja Barat	0	0	0	0	0
Jemaja Timur	2	2	1	1	1
Siantan Selatan	0	0	0	0	0
Siantan	12	12	15	35	38
Siantan Timur	0	0	0	0	0
Siantan Tengah	0	0	0	0	0
Palmatak	15	15	7	7	7
Siantan Utara	0	0	0	0	0
Kute Siantan	NA	NA	NA	NA	0
TOTAL	40	40	36	56	59

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas. 2021

Hotel atau penginapan sangat berkaitan dengan sektor pariwisata. Untuk dapat memperkuat perekonomian dari sektor pariwisata maka dibutuhkan hotel atau penginapan yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan yang datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kabupaten Kepulauan Anambas belum memiliki hotel berbintang, akan tetapi terdapat 21 penginapan yang siap melayani para wisatawan untuk berlibur ke kabupaten ini. Rata-rata lama menginap tamu domestik pada tahun 2018 berjumlah 1,58 orang setiap bulannya. Tingkat penghunian kamar di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 14,12 kamar setiap bulannya.

Tabel 2. 106 Jumlah Penginapan/Losmen Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2015-2020

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jemaja	6	5	5	5	5	6
Jemaja Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Jemaja Timur	0	-	0	1	1	1
Siantan Selatan	0	-	0	0	0	0
Siantan	9	8	8	8	8	8
Siantan Timur	0	-	0	3	1	1
Siantan Tengah	0	-	0	0	0	0
Palmatak	7	3	3	6	5	3
Siantan Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Kute Siantan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2
Kepulauan Anambas	22	16	16	23	20	21

Sumber: Daerah Dalam Angka Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2021

Destinasi pariwisata atau Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) memiliki peranan penting dalam pembangunan kepariwisataan. Terdapat 50 objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas. Jenis objek pariwisata yang terbanyak adalah pariwisata minat khusus atau bahari. Selain itu, terdapat 6 objek wisata sejarah dan spritual, 8 objek wisata budaya, 3 objek wisata alam, 2 objek wisata kuliner, dan 2 objek wisata agro.

Tabel 2. 107 Jumlah Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kabupaten Kepulauan Anambas

Jenis Wisata	Jumlah ODTW
Wisata Sejarah dan Spritual	6
Wisata Minat Khusus (Bahari)	29
Wisata Alam	3
Wisata Kuliner	2
Wisata Agro	2
Wisata Budaya	8
Total	50

Sumber: Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

2.3.3.3 Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Capaian sektor pertanian lima tahun kebelakang tersaji dalam Tabel di bawah ini. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB meningkat perlahan dari tahun 2015 hingga 2018 namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 5,04 persen, lalu. Cakupan bina kelompok tani mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2018 mencapai 91 kelompok petani. Produktivitas padi yang dihasilkan pun mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2018 namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 41,1 ton per hektar.

Tabel 2. 108 Capaian Sektor Pertanian Kabupaten Kepulauan Anambas 2015 - 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	4,52%	4,78%	4,9%	5,23%	5,04%	6,10%
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton)	31,24	38,25	37,78	32,83	41,1	46,3
Cakupan bina kelompok petani (Kelompok)	90	56	76	91	90	96
Nilai Tukar petani	99,5	98,2	97,5	96,5	98,2	99,19

Sumber: BPS 2021, KLHS 2020-2024, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator *proxy* kesejahteraan petani. NTP memuat perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP kurang dari 100 berarti petani mengalami defisit yang artinya kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya sehingga pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. NTP Kabupaten Kepulauan Anambas berada di bawah nilai 100 di mana mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2018 namun kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 98,2 dan kenaikan lagi pada tahun 2020 menjadi 99,19. Sebagian besar rumah tangga pertanian menggarap lahan seluas kurang dari 0,5 hektar yakni sebanyak 3.022 rumah tangga.

Tabel 2. 109 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Golongan Luas Lahan yang Dikuasai

Luas Lahan (Hektar)	Jumlah Rumah Tangga
< 0,5	3.022
0,5 - 0,99	654

Luas Lahan (Hektar)	Jumlah Rumah Tangga
1 - 1,99	855
2 - 2,99	427
3 - 3,99	135
4 - 4,99	80
5 - 9,99	81
> 9,99	18
Jumlah	5.272

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki luas lahan pertanian yang tersebar di 7 kecamatan yang terbagi menjadi lahan sawah dan lahan kering. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tabel luas lahan pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan data tahun 2016-2020:

Tabel 2. 110 Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Luas Lahan Pertanian				Satuan
		Lahan Sawah		Lahan Kering		
		Beririgasi	Tadah Hujan	Tegal/Kebun	Ladang/Huma	
1	Jemaja	-	-	1.010	67	Ha
2	Jemaja Timur	142	281	555	924	Ha
3	Siantan Selatan			10		Ha
4	Siantan			460		Ha
5	Siantan Tengah			3		Ha
6	Siantan Timur			120		Ha
7	Palmatak		3	11		Ha
Total 2020		142	284	2.169	991	Ha
Total 2019		107	214	1.479	790	Ha
Total 2018		107	214	1.479	790	Ha
Total 2017		99	14	3.215	569	Ha
Total 2016		99	14	3.215	569	Ha

Sumber: Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Prioritas pemenuhan dan penyediaan pangan merupakan salah satu aspek penting yang sudah sepatutnya diperhatikan lebih mendalam. Meskipun data dari luas lahan pertanian yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2020 menunjukkan bahwa lahan Sawah mencapai 142 Ha yang hanya terletak di Jemaja Timur, sayangnya pada tahun 2019, data dari BPS menunjukkan bahwa produksi padi di Kabupaten Kepulauan Anambas hanya mencapai 41,10 ton/Ha dan hanya berasal dari 14,1 Ha luas

panen di lahan sawah kecamatan Jemaja Timur. Hal ini seharusnya dapat menjadi potensi pengembangan sektor pertanian, karena luas lahan panen padi yang produktif saat ini baru seluas 14,1 Ha di Kecamatan Jemaja Timur atau 10 persen dari total lahan sawah teririgasi seluas 142 Ha.

Sebagai gambaran umum produksi tanaman pangan selain padi, berikut adalah nilai produksi tanaman pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2016-2020:

Tabel 2. 111 Nilai Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Nilai Produksi Tanaman Pangan				Satuan
		Padi	Jagung	Kedelai	Ubi	
1	Siantan	0	6.000.000	0	16.500.000	Rupiah
2	Palmatak	0	17.900.000	0	15.600.000	Rupiah
3	Siantan Timur	0	10.000.000	0	66.500.000	Rupiah
4	Siantan Selatan	0	0	0	3.400.000	Rupiah
5	Jemaja Timur	1.480.050.000	5.800.000	0	15.000.000	Rupiah
6	Jemaja	0	4.900.000	0	0	Rupiah
7	Siangan Tengah	0	0	0	2.000.000	Rupiah
TOTAL 2020		1.480.050.000	35.730.000	0	117.800.000	Rupiah
TOTAL 2019		579.500.000	32.000.000	0	87.000.000	Rupiah
TOTAL 2018		1.430.400.000	74.000.000	0	958.960.000	Rupiah
TOTAL 2017		2.480.000.000	74.000.000	0	542.365.000	Rupiah
TOTAL 2016		2.776.000.000	86.542.000	0	858.000.000	Rupiah

Sumber: Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Sementara itu, untuk tanaman hortikultura, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki luas lahan hortikultura yang telah dikategorikan sesuai dengan kelompok tanaman hortikultura, seperti tanaman buah, sayur, obat, dan florikultura. Berikut adalah tabel luas lahan hortikultura yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan data tahun 2016-2020:

Tabel 2. 112 Luas Lahan Hortikultura di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2018

No.	Kecamatan	Luas Areal Hortikultura	Satuan
1	Areal Buah-Buahan	16	Ha
2	Areal Sayur-Sayuran	75	Ha
3	Luas Areal Bahan Obat Nabati (Biofarmaka)	153	Ha
4	Luas Areal Florikultura	-	Ha
TOTAL 2020		244	Ha

TOTAL 2019	673	Ha
TOTAL 2018	312,7	Ha
TOTAL 2017	289,17	Ha
TOTAL 2016	325,85	Ha

Sumber: Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Dari keseluruhan luas lahan hortikultura seperti yang disebutkan di atas, berikut adalah luas panen dari masing-masing areal menurut data dari BPS untuk tahun 2017-2019:

Tabel 2. 113 Luas Panen Buah dan Sayur Semusim di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2017-2020

Jenis Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (Hektar)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bawang daun	3	3	-	-	-
Bayam	28	37	34	16	10
Buncis	1	1	-	2	-
Cabai Besar	7	8	11	6	8
Cabai Rawit	18	18	25	16	22
Cabai	23	26	36	22	-
Kacang Panjang	19	4	1	5	-
Kangkung	21	22	18	11	11
Ketimun	6	7	4	6	5
Petsai	34	34	36	25	19
Terung	4	5	-	3	8
Tomat	1	1	-	-	-
Wortel	-	-	-	-	-
Semangka	8	9	7	5	8
Jumlah	173	175	172	117	91

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Tabel 2. 114 Luas Panen Tanaman Biofarma di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016 - 2020

Jenis Tanaman Biofarmaka	Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman (M2)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jahe	1415	1.510	1.760	885	1315
Kencur	98	130	170	171	153
Kunyit	685	740	881	536	265
Laos/lengkuas	355	385	490	455	935
Temulawak	-	-	85	50	-
Jumlah	2.553	2.765	3.386	2.097	2.668

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Potensi Sumber Daya Pertanian

Walau bukan termasuk daerah penghasil beras, namun Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi yang dapat dikembangkan pada sektor ini dengan adanya Kecamatan Jemaja Timur yang memiliki lahan sawah.

Luas panen padi pada tahun 2019 seluas 14,1 Ha, dan produktivitas mencapai 4.11 ton/Ha. Dengan angka tersebut, perlu dipikirkan peningkatan hasil padi Kabupaten Kepulauan Anambas per hektar.

Tabel 2. 115 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2020

Tahun	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (ton)
2020	32	4,63	148,05
2019	14.1	4.11	57.95
2018	33	4,33	143,04
2017	54	4,59	248
2016	56	4,95	277,6

Sumber: BPS, Laporan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan/BPS

Tabel 2. 116 Produksi Padi 1 dan Beras Menurut Kecamatan (ha) Kab. Kepulauan Anambas, 2016-2020

Tahun	Produksi Padi (ton GKG)	Produksi Padi Setara Beras (ton)
2020	57,5	36,06
2019	43	21,67
2018	33	16,67
2017	33	16,67
2016	33	16,67

Catatan: 1 Kualitas produksi gabah kering giling (GKG) padi

Sumber: BPS, Laporan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan

Cabai adalah tumbuhan yang berbuah 3 sd 4.5 bulan setelah ditanam dan bisa menghasilkan panen 30 sd 40 kali dalam rentang hidupnya. Di Kabupaten Kepulauan Anambas produksi ditahun 2019 mencapai 244 kwintal, di mana jumlah ini turun dibandingkan 2018. Kecamatan penghasil produksi cabai terbanyak di tahun 2019 adalah Kecamatan Siantan sedangkan di tahun 2018 adalah Kecamatan Siantan Selatan. Kecuali Siantan, kecamatan lain mengalami penurunan produksi di tahun 2019. Hal yang sama juga diikuti kota dan kabupaten lain di Kepulauan Riau. Berdasarkan data BPS Holtikultura, di antara 2018 dan 2019, di Provinsi Kepulauan Riau, produksi cabai menurun. Walaupun di Indonesia produksi cabai merah secara keseluruhan naik. Berbeda dengan Cabai, tanaman Petai adalah tanaman tahunan, yang baru berbunga untuk menjadi petai di usia 3 s.d. 5 tahun setelah tanam, dan bisa hidup sampai berusia 25 tahun sebelum harus (sebaiknya) diremajakan.

Tabel 2. 117 Produksi Tanaman Cabai dan Petai menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kuintal) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018-2019

Kecamatan	Cabai					Petai				
	2016	2017	2018	2019 ↑	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Siantan	58	65	51	145	68	105	105	122	91	90
Palmatak	78	85	90	42	38,2	-	-	-	150	36
Jemaja Timur	58	62	88	30	14,4	21	18	20	-	-
Siantan Tengah	49	58	70	14	39,8	-	-	-	6	2
Siantan Selatan	152	158	379	9	15,4	35	38	43	89	28
Jemaja	18	25	39	4	29,5	-	-	-	-	-
Jemaja Barat	-	-	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Siantan Utara	-	-	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Kute Siantan	-	-	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Siantan Timur	-	-	-	-	20	45	45	57	17	17
Kepulauan Anambas	413	453	717	244	225,3	206	206	242	353	244

Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS

Wilayah ini juga menghasilkan berbagai jenis sayuran di antaranya adalah Terung, Kangkung, Cabai, Cabai Rawit, Semangka, Bayam, dan beberapa lainnya. Untuk tahun 2018 terjadi kenaikan produksi total dibanding 2017, namun produksi di tahun 2019 mengalami penurunan relatif terhadap 2018. Sebagian besar penurunan 2019 disebabkan turunnya produksi cabai dan cabai rawit. Untuk tahun 2020, secara umum produksi seluruh tanaman sayuran dan buah-buah mengalami penurunan, kecuali untuk cabai rawit, cabai besar, ketimun, dan kacang panjang.

Tabel 2. 118 Produksi Buah dan Sayur Semusim di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

Jenis Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (Kuintal)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Terung	225	238	242	353	214
Kangkung	757	222	183	264	41
Cabai	485	219	717	244	-
Cabai Rawit	167	176	663	179	252
Semangka	485	570	320	168	44
Bayam	581	215	211	165	56
Ketimun	56	62	35	132	237
Kacang Panjang	182	73	39	99	233
Tomat	32	38	-	83	-
Cabai Besar	43	43	54	65	90
Buncis	13	15	-	14	-

Jenis Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (Kuintal)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bawang daun	21	22	-	-	-
Wortel	-	8	-	-	-
Jumlah	3.047	1901	2464	1766	1167

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2017-2020

Untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, tanaman biofarma yang banyak di jumpai adalah jahe, kunyit, lengkuas dan kencur. Untuk Temulawak ada, tapi jumlahnya masih kecil. Produksi tanaman ini meningkat signifikan di tiap tahunnya, kecuali temulawak. Untuk tahun 2020 semua tanaman biofarmaka menurun semua kecuali laos/lengkuas yang meningkat.

Tabel 2. 119 Produksi Tanaman Biofarma di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016 – 2020

Jenis Tanaman Biofarmaka (tanaman obat)	Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman (kg)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jahe	985	1123	1583	1784	1223
Kunyit	825	775	506	1007	497
Laos/lengkuas	567	669	853	904	1198
Kencur	143	123	110	330	201
Temulawak	-	-	55	55	-
Jumlah	2520	2690	3107	4080	3119

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Buah yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas, di antaranya, adalah mangga, durian, jeruk, pisang, dan pepaya. Untuk buah-buahan yang dominan adalah di tahun 2020 adalah pisang. Durian yang terbanyak dihasilkan di Kecamatan Siantan. Buah-buahan mangga didominasi dihasilkan Kecamatan Siantan Selatan. Untuk buah pisang banyak dihasilkan di Siantan Timur. Sedangkan untuk buah pepaya banyak dihasilkan juga di Kecamatan Siantan.

Tabel 2. 120 Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018-2020

Kecamatan	Mangga			Durian			Jeruk		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Jemaja	33	122	103	25	100	N/A	4	N/A	N/A
Jemaja Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jemaja Timur	27	65	N/A	0	100	N/A	0	N/A	N/A

Kecamatan	Mangga			Durian			Jeruk		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Siantan Selatan	40	60	N/A	44	169	30	0	N/A	N/A
Siantan	20	129	30	154	445	24	5	245	480
Siantan Timur	6	20	8	56	100	14	0	N/A	N/A
Siantan Tengah	10	15	6	79	23	16	0	N/A	N/A
Palmatak	23	690	N/A	130	135	30	0	385	244
Siantan Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kute Siantan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kep Anambas	159	1101	147	488	1072	114	9	630	724

Kecamatan	Pisang			Pepaya		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Jemaja	21	133	29	4	11	8
Jemaja Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jemaja Timur	25	258	18	8	3	NA
Siantan Selatan	13	94	56	0	N/A	N/A
Siantan	36	298	124	15	40	26
Siantan Timur	58	23	34	8	10	9
Siantan Tengah	13	23	13	11	14	6
Palmatak	39	131	572	1	34	203
Siantan Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kute Siantan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kep Anambas	205	960	846	47	112	252

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Buah dan sayuran itu termasuk (6 terbanyak) di produksi Anambas adalah Melinjo, Sirsak, Jengkol, Petai, Mangga, dan Durian. Daftar lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sayuran tidak terdapat datanya dalam empat tahun terakhir.

Tabel 2. 121 Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017-2020

Jenis Tanaman Buah-Buahan	2016	2017	2018	2019	2020
Melinjo/ <i>Melinjo</i>	2	2	1	2152	28
Sirsak/ <i>Soursop</i>	54	63	15	1963	9
Jengkol/ <i>Jengkol</i>	85	101	3	1366	60
Petai/ <i>Twisted Cluster Bean</i>	87	112	57	1305	68
Mangga/ <i>Mango</i>	344	542	159	1101	147
Durian/ <i>Durian</i>	46,43	139	488	1072	114
Pisang/ <i>Banana</i>	125,50	746	205	960	846
Jeruk Siam/Kepronk/ <i>Tangerine/ Orange</i>	12,10	39	9	630	724
Nangka/Cempedak/ <i>Jack Fruit</i>	176	181	129	344	194
Sukun/ <i>Bread Fruit</i>	8	12	13	276	18
Sawo/Sapodilla/ <i>Star Apple</i>	7	9	1	271	7
Jeruk Besar/ <i>Pomelo</i>	45	56	7	219	68
Alpukat/ <i>Avocado</i>	7	11	1	151	62

Jenis Tanaman Buah-Buahan	2016	2017	2018	2019	2020
Manggis/ <i>Mangosteen</i>	4	6	3	126	3
Pepaya/ <i>Papaya</i>	76	91	47	112	252
Duku/Langsat/Kokosan/ Duku	-	-	77	108	-
Jambu Air/ <i>Rose Apple</i>	17	19	15	68	28
Belimbing/ <i>Star Fruit</i>	4	5	0	57	8
Nenas/ <i>Pineapple</i>	0,57	39	64	57	58
Rambutan/ Rambutan	5	7	20	43	846
Jambu Biji/ <i>Guava</i>	24	26	10	25	14
Jeruk/ <i>Orange (Tangerine + Pomelo)</i>	85	95	16	0	-
Sayuran/ <i>Vegetables</i>	251,4				
Kepulauan Anambas	1.466	2301	1340	5634	3554

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki luasan kebun kelapa mencapai 9763 ha sementara luas kebun karet mencapai 2706 ha. Kecamatan terluas kebun kelapanya terdapat di Palmatak kemudian di Siantan Timur dan Jemaja. Sedangkan perkebunan karet terluas di Kecamatan Siantan dan Palmatak. Untuk lebih rinci silakan melihat tabel di bawah ini:

Tabel 2. 122 Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

Kecamatan	Kelapa					Karet				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Jemaja	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	244	244	244	244	244
Jemaja Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Jemaja Timur	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	374	374	0	0	374
Siantan Selatan	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	219	219	219	219	219
Siantan	779	779	779	779	779	780	780	780	780	780
Siantan Timur	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	145	127	145	145	145
Siantan Tengah	458	471	471	471	471	167	187	169	169	169
Palmatak	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	775	775	775	775	775
Siantan Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Kute Siantan	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Kabupaten Kepulauan Anambas	9.750	9.763	9.763	9.763	9.763	2.704	2.706	2.332	2.332	2.706

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Kabupaten Kepulauan Anambas adalah produsen kelapa dan karet dengan produksi yang relatif cukup besar. Pada 2020, produksi kelapa di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 565,14 ton, sedangkan karet mencapai 238,17 ton. Kecamatan terbanyak menghasilkan kelapa adalah Palmatak dan Siantan Timur. Sedangkan kecamatan penghasil karet

terbanyak adalah Kecamatan Palmatak diikuti Siantan Timur dan Tengah. Hasil lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 123 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ton) di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

Kecamatan	Kelapa					Karet				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Jemaja	125	125	94	97	54,67	57	57	55	54,65	31,34
Jemaja Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jemaja Timur	54	54	41	45,86	22,15	89,5	89,5	55	55	26,57
Siantan Selatan	255	255	208	210,99	92,53	115	115	75	75	45,32
Siantan	125	125	111	117,03	76,21	322	322	78	77	15
Siantan Timur	439	439	314	319,45	32,24	59	59	85	85	34
Siantan Tengah	204	204	172	178,43	87,34	89	89	82	82	35,21
Palmatak	600	600	521	531,43	200	267	267	140	139	50,73
Siantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kute Siantan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kabupaten Kepulauan Anambas	1.802	1.802	1.461	1.500,19	565,14	998,5	998,5	570	567,65	238,17

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Berikut ini merupakan capaian kinerja urusan pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun indikator kinerja yang digunakan dan capaian kinerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 124 Capaian Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (PDRB ADHB menurut lapangan usaha)	669,1	726,1	793,9	845,8	881,6
2	Produktivitas Padi (ton/ha)	4,59	4,59	4,33	4,33	4,63
3	Cakupan bina kelompok petani	56	76	91	90	96

Sumber: Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan, 2021; Bid. Pertanian dan Bid. Ketahanan Pangan, 2021

2.3.3.4 Perdagangan

Sektor perdagangan menjadi salah satu penyumbang besar dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain di pasar domestik, Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan perdagangan di pasar internasional. Capaian ekspor Kabupaten Kepulauan Anambas tersaji dalam Tabel 2.125 di bawah ini. Dari tahun 2015 hingga 2019 terjadi fluktuasi ringan nilai ekspor bersih dengan kisaran nilai ekspor sebesar 10 triliun rupiah.

Tabel 2. 125 Capaian Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Kepulauan Anambas 2015-2019

Tahun	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta Rupiah)
2015	10.711.261
2016	10.590.783
2017	10.784.295
2018	10.065.803
2019	10.077.877

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Nilai ekspor Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan komoditas tersaji dalam Tabel di bawah ini. Komoditas ekspor dengan nilai tertinggi adalah bahan bakar mineral yang kemudian disusul oleh produk perikanan yakni ikan dan udang.

Tabel 2. 126 Nilai Ekspor Menurut Komoditas Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020 (US\$)

Komoditas Ekspor	Nilai Ekspor Menurut Komoditas (US\$)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bahan bakar mineral	1.327.276.009	1.743.449.902	2.238.974.749	2.194.440.035	1.183.554.968
Benda-benda dari besi dan baja	-	-	-	2.445.099	926.559
Ikan dan Udang	1.977.546	3.314.844	3.372.060	3.322.034	1.936.216
Kapal Laut	-	-	145.000	-	421.605
Perabot, penerangan rumah	-	-	250.000	-	-
Lokomotif dan Peralatan Kereta Api	-	-	65.600	-	278.049
Mesin-mesin/Pesawat mekanik	-	46.950	581.909	1.189.441	12.431.024

Komoditas Ekspor	Nilai Ekspor Menurut Komoditas (US\$)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perangkat Optik	-	-	108.108	-	40.000
Minyak dan lemak hewan/nabati	-	16.891.610	-	-	-
Jumlah	1.329.253.555	1.780.594.915	2.243.497.426	2.201.396.609	1.199.588.421

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Sedangkan daftar delapan komoditas dengan nilai impor tertinggi Kabupaten Kepulauan Anambas tersaji dalam Tabel 2.127 di bawah ini. Komoditas impor dengan nilai tertinggi pada tahun 2020 adalah mesin-mesin/pesawat mekanik dan disusul oleh benda-benda dari besi dan baja. Hal tersebut berubah dari tahun sebelumnya di mana mesin/peralatan listrik dan benda-benda dari besi dan baja menjadi komoditas impor tertinggi.

Tabel 2. 127 Nilai Impor Menurut Komoditas Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020 (US\$)

Komoditas Impor	Nilai Impor Menurut Komoditas (US\$)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kapal laut	766.446	110.000	2.931.026	-	-
Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	117.279	3.306.053	638.872	15.497.086	1.037
Perabot, penerangan rumah	-	-	250.015	278049	-
Kapas gumpalan, tali	-	-	17.528	1958	-
Benda-benda dari besi dan Baja	313.046	1.250.929	5.168	2.524.681	55.848
Mesin/peralatan listrik	-	20.129	4.306	10.515.429	4.502.716
Plastik dan barang dari plastik	1.130.669	1.587	4.184	5.154.809	1.734
Karet dan barang dari karet	3.415	-	229.398	62.042	7.872

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

2.3.3.5 Perindustrian

Pengembangan UMKM menjadi salah satu cara yang efektif dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan melakukan pembinaan terhadap UMKM agar mampu berkembang dan berdaya saing.

Jumlah UMKM di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2018 berjumlah 4.102 unit usaha. Sebagian besar merupakan usaha dengan ukuran mikro. Bidang usaha yang terbanyak jumlah unit usahanya adalah bidang perdagangan dengan total 1.227 unit usaha.

Tabel 2. 128 Jumlah UMKM Per-Bidang Usaha per 31 Desember Tahun 2016-2020

No.	Bidang Usaha	Ukuran Usaha	Jumlah Unit Usaha
1	Kuliner (Pengolahan Makanan)	Mikro	623
		Kecil	32
		Menengah	
2	Perdagangan	Mikro	1.532
		Kecil	124
		Menengah	5
3	Perikanan Tangkap	Mikro	699
		Kecil	
		Menengah	
4	Perikanan Budidaya	Mikro	522
		Kecil	
		Menengah	
5	Pertanian dan Perkebunan	Mikro	335
		Kecil	
		Menengah	
6	Peternakan	Mikro	112
		Kecil	2
		Menengah	5
7	Lainnya (Jasa)	Mikro	538
		Kecil	7
		Menengah	
TOTAL 2020			4.536
TOTAL 2019			3.874
TOTAL 2018			4.102
TOTAL 2017			3,257
TOTAL 2016			2.875

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

2.3.3.6 Transmigrasi

Berikut ini merupakan capaian kinerja urusan transmigrasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun indikator kinerja yang digunakan dan capaian kinerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 129 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja, 2021

Belum ada jumlah kawasan Transmigrasi yang dikembangkan dari tahun 2016-2020 dikarenakan berdasarkan surat keputusan Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi terkait penjelasan status tanah restan di kawasan transmigrasi di Kabupaten Kepulauan Anambas banyak tanah restan yang belum digunakan atau dimanfaatkan karena belum ada pengaturan pemanfaatan restan sehingga perlu diberikan penjelasan tentang status dan kewenangan pemanfaatan tanah restan.

2.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan

Penyelenggaraan layanan penunjang urusan terdiri atas:

2.3.4.1 Penyelenggaraan Pemerintahan

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dari nilai akuntabilitas kinerja pemerintah yang diberikan oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas laporan kinerja yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Komponen nilai akuntabilitas kinerja pemerintah itu sendiri terdiri dari unsur perencanaan, pengukuran pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2018 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menunjukkan bahwa nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat predikat CC atau cukup.

Pada Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas juga telah melaksanakan Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil Evaluasi terhadap 19 Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2. 130 Evaluasi terhadap 19 Perangkat Daerah tahun 2018

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Keterangan
1	Inspektorat	B	Baik
2	Badan Keuangan Daerah	B	Baik
3	Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Daerah	B	Baik
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	B	Baik
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	Baik
6	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	CC	Cukup
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	CC	Cukup
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	CC	Cukup
9	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	CC	Cukup
10	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	CC	Cukup
11	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana Daerah	CC	Cukup
12	Dinas Penanaman Modal, dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	CC	Cukup
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	CC	Cukup
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	CC	Cukup
15	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	CC	Cukup
16	Sekretariat DPRD	C	Kurang
17	Sekretariat Daerah	C	Kurang
18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman	C	Kurang
19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	C	Kurang

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Berikut ini merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2016 - 2020 dilihat dari 4 indikator kinerja. Adapun indikator dan capaian kinerja setiap tahunnya adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 131 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Media bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	-	56%	96%	91%	79%
2	Persentase terlaksananya penyusunan peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	100
3	Penilaian LAKIP Kabupaten	-	C	CC	C	-
4	Hasil penilaian LPPD Kabupaten Kepulauan Anambas	-	2,37	2,67	2,9	-

Sumber: Sekretariat Daerah, 2021

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) disusun sebagai menilai tingkat kepuasan pelayanan publik. IKM akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya

2.3.4.2 Perencanaan Pembangunan

Berikut ini merupakan capaian kinerja perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun indikator kinerja yang digunakan dan capaian kerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 132 Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas 2018-2019

No	Uraian	Capaian	
		2018	2019
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD Ke dalam RKPD (%)	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

2.3.4.3 Keuangan

Berikut ini merupakan capaian kinerja urusan keuangan di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020. Capaian kinerja ini dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Pajak Daerah, dan Pendapatan Retribusi Daerah. Adapapun capaian tahunan dari setiap indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut.

Tabel 2. 133 Capaian Kinerja Urusan Keuangan di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PAD	32.229.756.134,82	43.591.054.696,45	35.017.491.285,23	36.655.800.523,96	31.451.864.609,92
2	Pendapatan Pajak Daerah	19.265.642.940,00	14.412.004.759,00	17.892.503.426,00	16.948.784.838,36	14.148.007.073,69
3	Pendapatan Retribusi Daerah	973.312.573,00	680.754.226,00	2.883.828.952,69	5.079.993.682,00	3.557.990.725,88

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

2.3.4.4 Kepegawaian

Jabatan dalam lingkungan PNS dibagi atas jabatan fungsional dan jabatan struktural. Jabatan fungsional terdiri atas fungsional tertentu dan fungsional umum sedangkan jabatan struktural terdiri atas Eselon I hingga Eselon V. PNS dengan jabatan fungsional mendominasi dengan proporsi 75 persen dari total PNS sedangkan jabatan struktural sebesar 25 persen dari total PNS di Kabupaten Kepulauan Anambas. Komposisi jabatan PNS tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2. 134 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan Tahun 2016-2020

Jabatan	Jumlah				
	2016	2017	2018	2019	2020
Fungsional Tertentu	792	695	673	848	917
Fungsional Umum	817	588	604	487	485
Struktural	317	399	344	457	435
Eselon V	-	-	-	-	-
Eselon IV	183	280	236	330	314
Eselon III	110	95	86	104	100
Eselon II	24	24	22	23	21

Jabatan	Jumlah				
	2016	2017	2018	2019	2020
Eselon I	-	-	-	-	-
Jumlah	2.243	2.081	1.621	1.792	1.837

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Berdasarkan kualifikasi pendidikan yang tersaji dalam tabel di bawah ini, pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas didominasi oleh lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Terjadi pergeseran dimana lulusan Diploma III/Akta III/Sarjana Muda dan lulusan tingkat S1/S2/S3 mengalami peningkatan sedangkan lulusan lainnya mengalami penurunan di tahun 2020.

Tabel 2. 135 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020

Tingkat Pendidikan	Jumlah				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sampai dengan SD	9	9	9	8	7
SMP/Sederajat	11	11	11	10	10
SMA/Sederajat	313	324	315	281	261
Diploma I, II/Akta I, II	111	109	104	86	67
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	302	306	273	342	351
Tingkat S1/S2/S3	912	923	909	1.065	1.141
Jumlah	1.658	1.682	1.621	1.792	1.837

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Berikut ini merupakan capaian kinerja kepegawaian di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun indikator kinerja yang digunakan dan capaian kerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 136 Capaian Kinerja Kepegawaian di Kabupaten Kepulauan Anambas 2017-2020

No	Uraian	Capaian			
		2017	2018	2019	2020
1	Persentase penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan	-	74%	80%	80%
2	Persentase penurunan kasus pelanggaran disiplin aparatur	-	8,69%	11,11%	44,64%
3	Persentase tingkat ketepatan waktu kenaikan pangkat PNS	-	100%	100%	100%
4	Persentase Keakuratan <i>Updating Data</i> Aparatur Sipil Negara	-	98%	98%	99%

No	Uraian	Capaian			
		2017	2018	2019	2020
5	Persentase Pelayanan Kepegawaian Berbasis Aplikasi	-	70%	80%	100%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

2.3.4.5 Pendidikan dan Pelatihan

Berikut ini merupakan capaian kinerja pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun indikator kinerja yang digunakan dan capaian kinerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 137 Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017-2020

No	Uraian	Capaian			
		2017	2018	2019	2020
1	Persentase pegawai yang lulus diklat kompetensi manajerial bernilai memuaskan	-	39,02%	16,41%	37,85%
2	Persentase pegawai yang dinyatakan lulus diklat peningkatan kompetensi teknis bernilai baik	-	91%	100%	92,20%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

2.3.4.6 Pengelolaan Perbatasan

Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas baru terbentuk pada tahun 2021 sehingga belum ada capaian kinerja pada urusan ini.

2.3.4.7 Pengawasan

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dimuat di dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak

Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*), dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).

Tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Anambas memperoleh opini WTP, terakhir kali mendapatkan WDP pada tahun 2016. Pencapaian ini merupakan hasil dari strategi dan program yang disusun oleh pemerintah pada RPJMD Tahun 2016. Opini WTP harus dipertahankan mengingat komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Implikasinya yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 2. 138 Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014-2020

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Pada tahun 2018, jumlah dari tindak lanjut pemeriksaan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas tersaji dalam Tabel di bawah ini. Dari 1.066 rekomendasi jumlah tindak lanjut sebanyak 390.

Tabel 2. 139 Capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

No	Instansi	Rekomendasi					Tindak Lanjut					Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	BPK	30	25	71	63	55	27	23	68	46	46	90,00	92,00	95,77	73,02	83,64
2	BPKP	-	17	4	30	-	-	3	4	27	-	-	17,65	100	90,00	-
3	Inspektorat Provinsi	5	8	-	16	6	1	7	-	12	2	20,00	87,50	-	75,00	33,33
4	Inspektorat Kabupaten	28	113	113	221	153	15	78	65	90	77	53,57	69,03	57,52	40,72	50,33

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas 2020

Terdapat 5 indikator yang dipakai dalam menilai kinerja pelayanan di bidang pengawasan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Indikator tersebut dan pencapaian kerjanya dari tahun 2016-2020 adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 140 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	72%	78%	85%	95,13%	64,05%
2	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai AKIPnya "CC"	N/A	N/A	52,63%	N/A	53,33%
3	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas	Level I	Level II	Level II	Level III	Level III
4	Tingkat Kapabilitas APIP	Level I	Level II	Level II	Level III	Level III
5	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah Pengampu Pengawasan	N/A	N/A	N/A	28,90	24,89
6	Nilai AKIP Perangkat Daerah Pengampu Pengawasan	0	60	70	79	80

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

2.3.4.8 Kecamatan

Terdapat 10 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kinerja seluruh kecamatan dinilai dari empat indikator yaitu nilai akuntabilitas kinerja, indeks kepuasan layanan masyarakat, nilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan partisipasi masyarakat mensukseskan program dan kegiatan pembangunan. Adapun capaian dari setiap indikator kinerja tersebut dari tahun 2016-2020 adalah sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 141 Capaian Kinerja Urusan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

No	Nama Kecamatan	Indikator Kinerja	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jemaja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	71,5	72,00	73,60	75,80
		Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	N/A	B	B	B	B
		Partisipasi Masyarakat Mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	N/A	75%	80%	82%	84%
2	Jemaja Barat	Nilai Akuntabilitas Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	75
		Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	N/A	N/A	N/A	N/A	B
		Partisipasi Masyarakat Mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	85%
3	Palmatak	Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	C	C	CC	C

No	Nama Kecamatan	Indikator Kinerja	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
		Indeks Kepuasan Masyarakat	76.6	76.6	76.6	76.6	76.6
		Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	B	B	B	B	B
		Partisipasi Masyarakat Mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	80%	80%	85%	85%	87%
4	Jemaja Timur	Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	C	C	CC	C
		Indeks Kepuasan Masyarakat	75.25	75.25	75.25	75.25	75.25
		Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	B	B	B	B	B
		Partisipasi Masyarakat Mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	80%	80%	85%	85%	87%
5	Siantan Selatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC	CC	CC	CC	CC
		Indeks Kepuasan Masyarakat	75	76.4	77.7	78.4	79.7
		Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	B	B	B	B	B
		Partisipasi Masyarakat Mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	85%	85%	85%	86%	87%
6	Siantan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC	CC	CC	CC	CC
		Indeks Kepuasan Masyarakat	75	75	75	75	75
		Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	B	B	B	B	B
		Partisipasi Masyarakat Mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	85%	85%	85%	85%	85%
7	Siantan Tengah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	CC
		Indeks Kepuasan Masyarakat	75	75.25	75.25	75.25	75
		Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Partisipasi Masyarakat Mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	85%	85%	85%	85%	85%
8	Kute Siantan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	CC
		Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	75
		Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	N/A	N/A	N/A	N/A	B
		Partisipasi Masyarakat Mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	85%
9	Siantan Utara	Nilai Akuntabilitas Kinerja	N/A	N/A	N/A	CC	CC
		Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	75.25	77.5
		Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	N/A	N/A	N/A	B	B
		Partisipasi Masyarakat Mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	N/A	N/A	N/A	85%	86%

No	Nama Kecamatan	Indikator Kinerja	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
10	Siantan Timur	Nilai Akuntabilitas Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Partisipasi Masyarakat Mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

2.3.4.9 Kesatuan Bangsa dan Politik

Berikut ini merupakan capaian kinerja kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun indikator kinerja yang digunakan dan capaian kerjanya setiap tahun adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 142 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	27,75
2	Nilai AKIP	N/A	N/A	N/A	52,79	52,79
3	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban melalui peran aktif masyarakat (%)	80	85	90	95	102,04
4	Persentase peran aktif masyarakat dalam politik (%)	80	83	85	90	87,86

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021

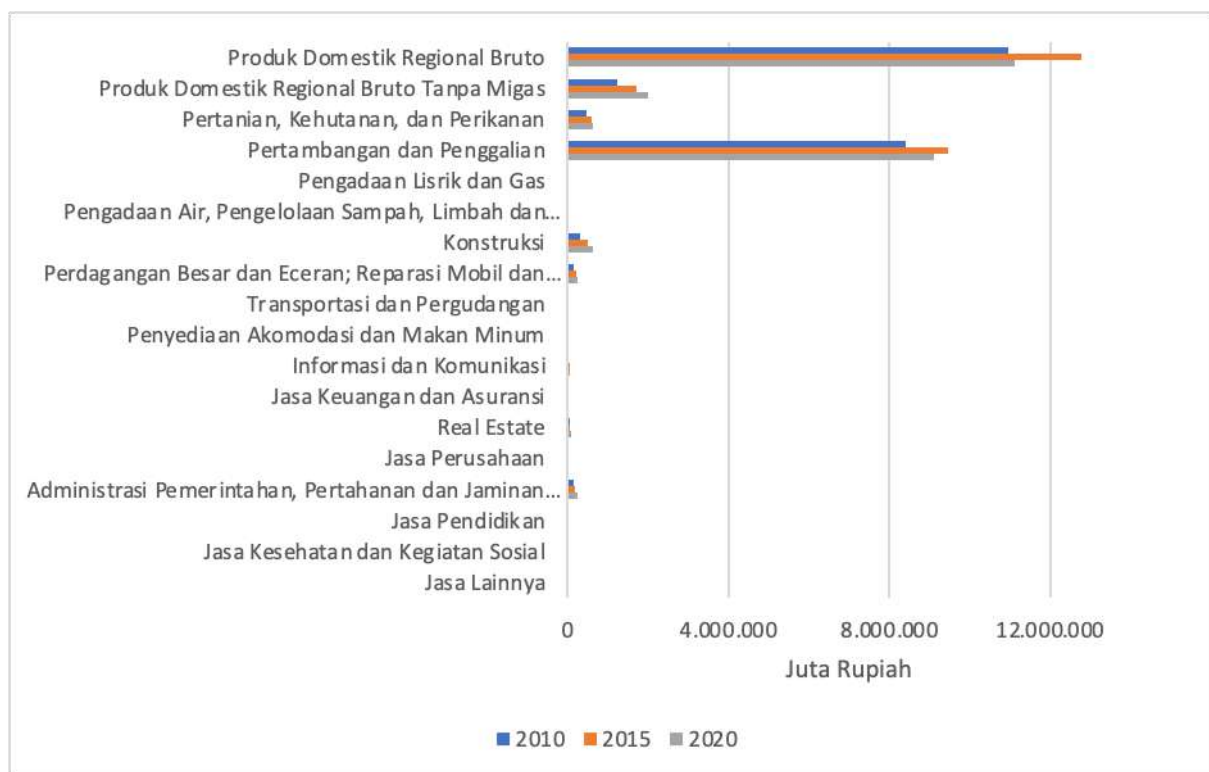
2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik ataupun internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Sektor pertambangan dan penggalian, perannya mencapai 83 persen PDRB di tiap tahun pembangunan dan berkecenderungan meningkat. Namun sebagai sumber daya alam yang akan habis, jika tidak ditemukan yang baru, diperkirakan beberapa tahun ke depan akan habis. Tentunya pembangunan yang berkelanjutan mengisyaratkan penggunaan saat ini untuk keberlanjutan di masa mendatang sehingga ketergantungan akan pertambangan harus mulai diimbangi dengan pengembangan sektor lainnya.

Gambar 2. 40 PDRB Harga Konstan 2010, Kabupaten Kepulauan Anambas 2010, 2015 dan 2020 (Juta Rupiah)

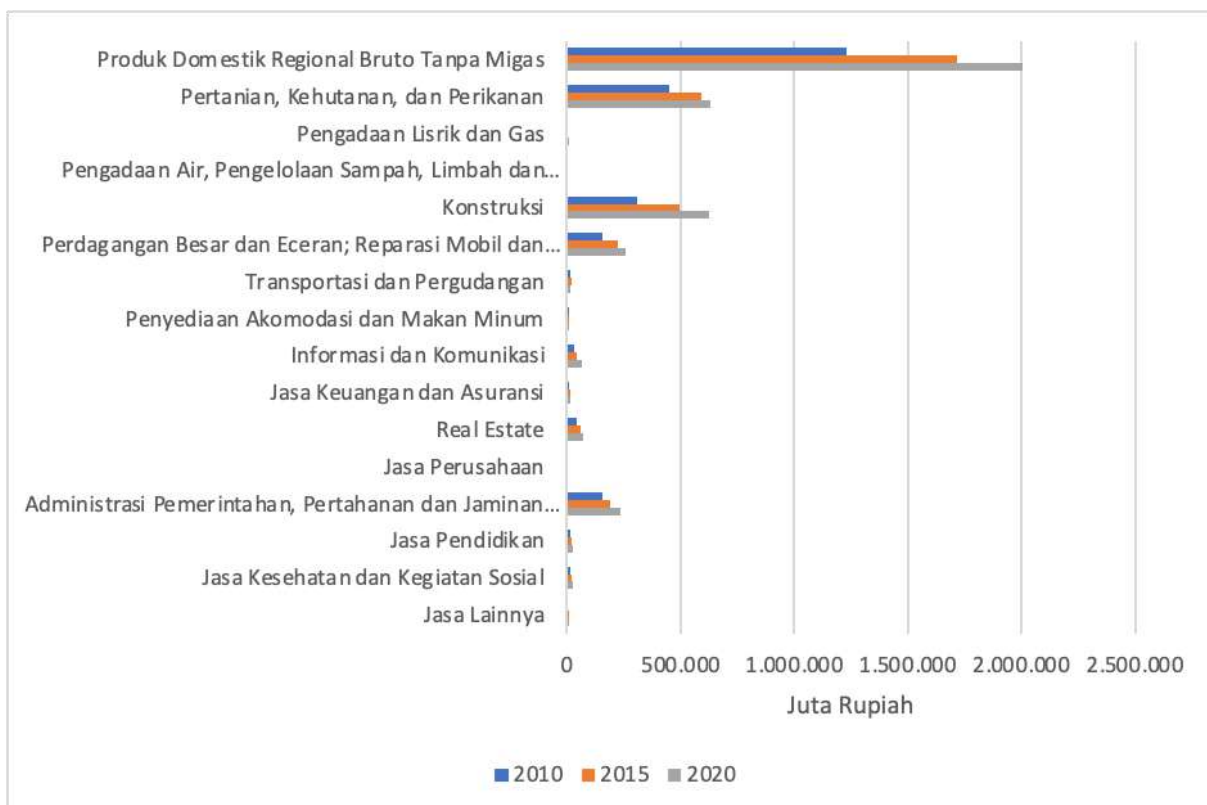


Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Jika dilihat perekonomian tanpa Pertambangan dan Penggalian tahun 2020, Sektor Konstruksi ada di level pertama dan Pertanian (perikanan) berada di level kedua terbesar. Kedua sektor ini menyumbang total sebesar Rp 1,2 triliun, diikuti dengan sektor perdagangan. Sektor konstruksi lebih ke arah internal dan jangka pendek. Namun, peningkatan konstruksi juga menjanjikan peningkatan investasi di masa mendatang yang membantu pembangunan, sedangkan peningkatan perdagangan menunjukkan aktivitas

masyarakat yang lebih dinamis serta menunjukkan keterlibatan pihak eksternal dalam pembangunan. Melihat struktur fisik kawasan Kabupaten Kepulauan Anambas, sektor pariwisata sangat menjanjikan. Perlu pemikiran matang dan cerdas terkait tindakan optimal saat ini untuk jangka menengah dan panjang.

Gambar 2. 41 PDRB Harga Konstan 2010 Tanpa Pertambangan dan Penggalian, Kabupaten Kepulauan Anambas 2010, 2015 dan 2020 (Juta Rupiah)

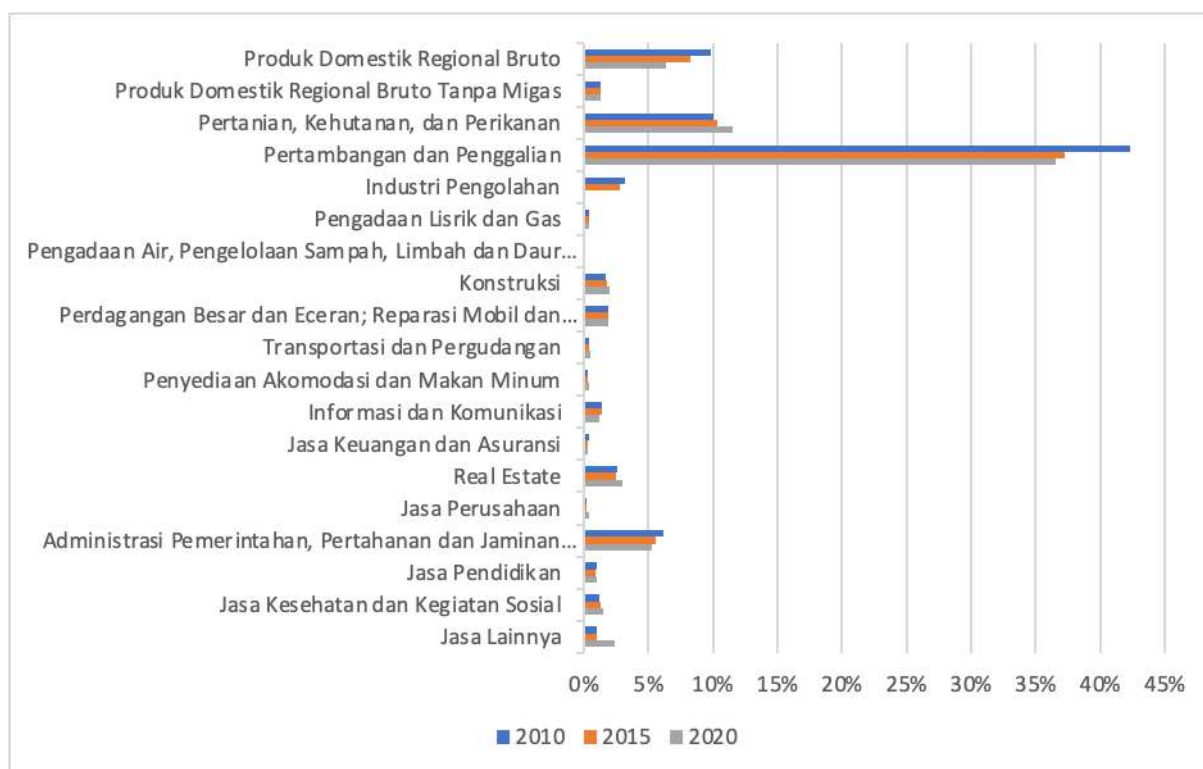


Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Bila dibandingkan pola pembangunan dengan kawasan yang lebih besar, misalnya Provinsi Kepulauan Riau, pola PDRB di keduanya beriringan. Sejauh ini, besarnya PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 6,34 persen dari Provinsi Kepulauan Riau dengan Pertambangan dan Penggalian, dan 1,31 persen tanpa Pertambangan dan Penggalian. Hal ini menunjukkan sekali lagi ketergantungan besar Kabupaten Kepulauan Anambas pada Pertambangan dan Penggalian dan peranan perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas yang relatif kecil di Provinsi Kepulauan Riau. Catatan

penting bahwa masyarakat dan pemerintah hanya mendapat dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dari sektor pertambangan dan penggalian karena semua hasil sektor ini di pegang oleh pusat berdasarkan aturan yang berlaku.

Gambar 2. 42 Persentase Perbandingan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau 2010, 2015 dan 2020 (Persen)



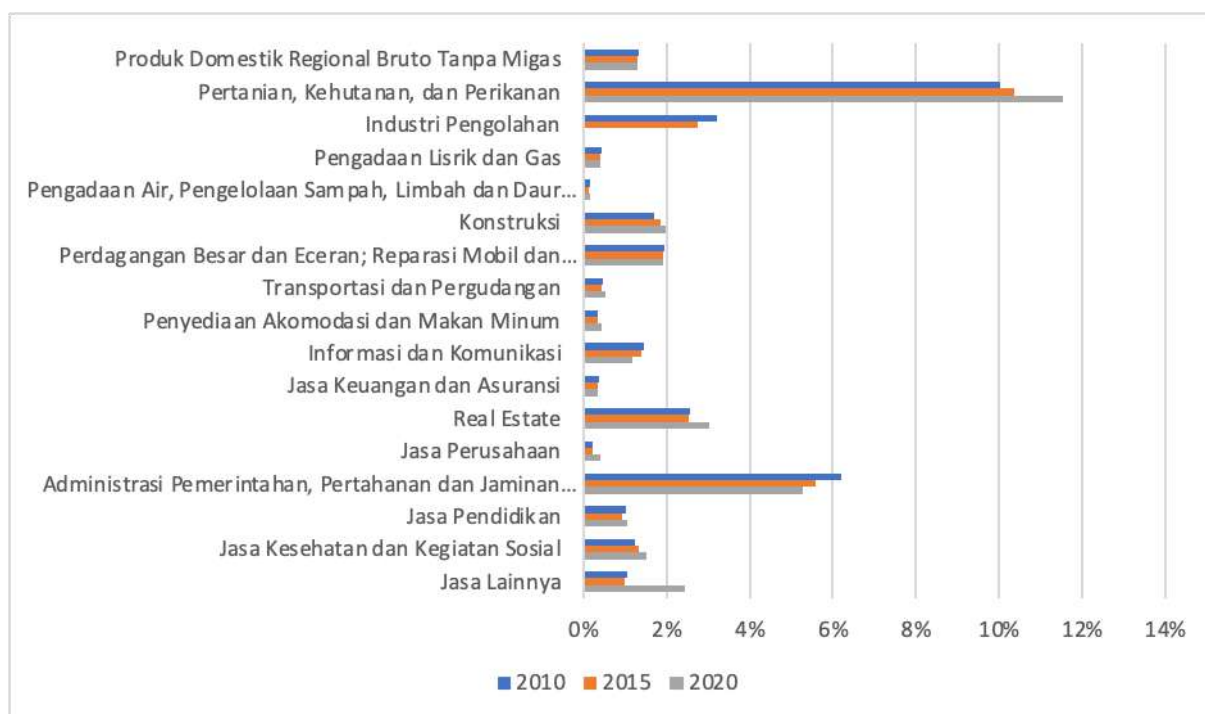
Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Hal lain yang dapat dilihat adalah besarnya peran sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang bisa dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai sekitar 12 persen, dan perbandingannya meningkat 2 persen dalam 10 tahun terakhir. Menurun artinya satu, pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau atau, jika di Provinsi Kepulauan Riau selain Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung konstan, berarti terjadi peningkatan peran dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini yang sistematis.

Jika sektor konstruksi dan perdagangan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang relatif kecil dibandingkan kepulauan Riau, namun cukup berperan di Kabupaten Kepulauan Anambas, berarti bahwa, sektor

konstruksi dan perdagangan di Provinsi juga tumbuh dengan pesat/juga tak kalah besar. Sektor konstruksi lebih ke arah internal dan jangka pendek. Namun, peningkatan konstruksi juga menjanjikan peningkatan investasi dimasa mendatang yang membantu pembangunan, Sedangkan peningkatan perdagangan menunjukkan aktivitas masyarakat yang lebih dinamis serta menunjukkan keterlibatan pihak eksternal dalam pembangunan.

Gambar 2. 43 Persentase Perbandingan PDRB Tanpa Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau 2010, 2015 dan 2020 (Persen)



Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

2.4.1.1 LQ Kabupaten Kepulauan Anambas

Ukuran LQ Digunakan untuk menentukan sektor andalan dalam perekonomian daerah sebagai indikator awal untuk menentukan posisi surplus/defisit suatu daerah dalam konsumsi/produksi tertentu. Bahwa “ekspor” ke luar daerah sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan daerah. Disebut juga analisis sektor basis. Membandingkan nilai tambah sektor yang sama di suatu daerah dengan daerah lain dalam bentuk proporsi GDP pada tahun yang sama.

$$LG_i = \frac{PDRB_{ir}/PDRB_r}{PDRB_{iN}/PDRB_N}$$

Di mana,

$PDRB_{ir}$ = PDRB sektor i di region r

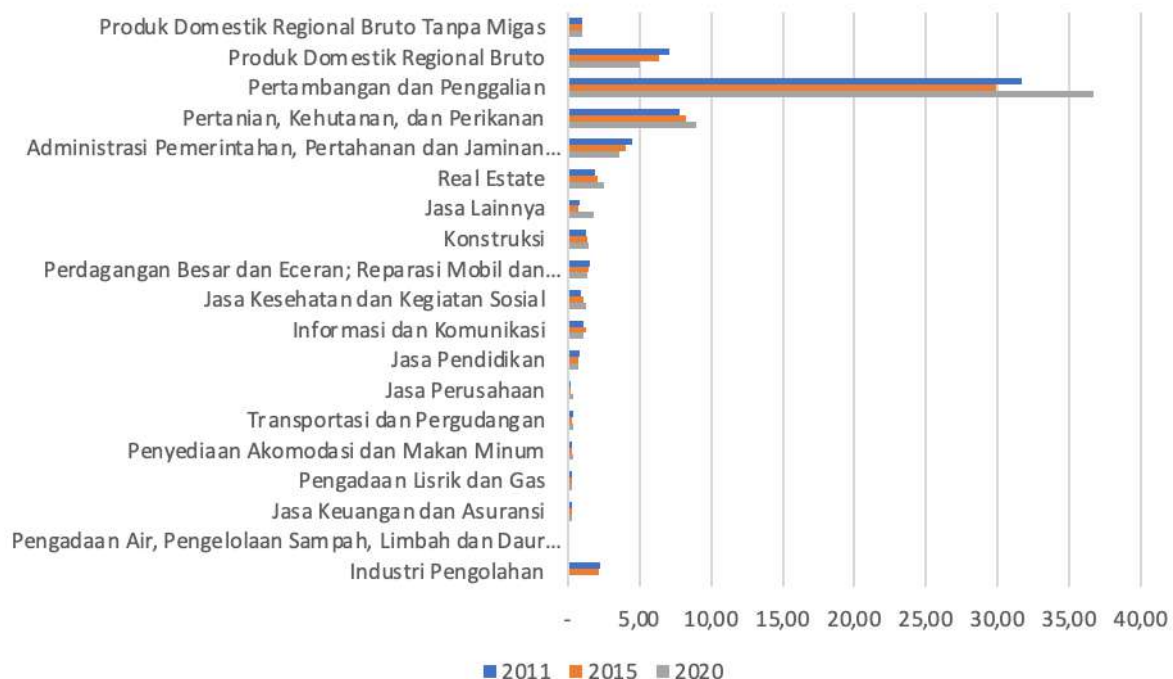
$PDRB_r$ = PDRB Total di region r

$PDRB_{iN}$ = PDRB sektor i di daerah referensi

$PDRB_N$ = PDRB Total di daerah referensi

Jadi, jika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau sebagai acuan terdekat, dengan menggunakan alat analisa LQ didapatkan bahwa peran sektor Pertambangan dan Penggalian dominan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam status kabupaten, untuk sektor migas ini, semua hasil yang didapat dibawa ke pusat dan daerah hanya berharap pada DAU dan DAK serta DBH. Semua langkah ini diharapkan pemerintah untuk di dapatkan hasil yang optimal. Hal ini juga merupakan sumbangsih daerah penghasil ke daerah lain guna pemerataan.

Gambar 2. 44 LQ Kabupaten Kepulauan Anambas 2011, 2015 dan 2020



Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

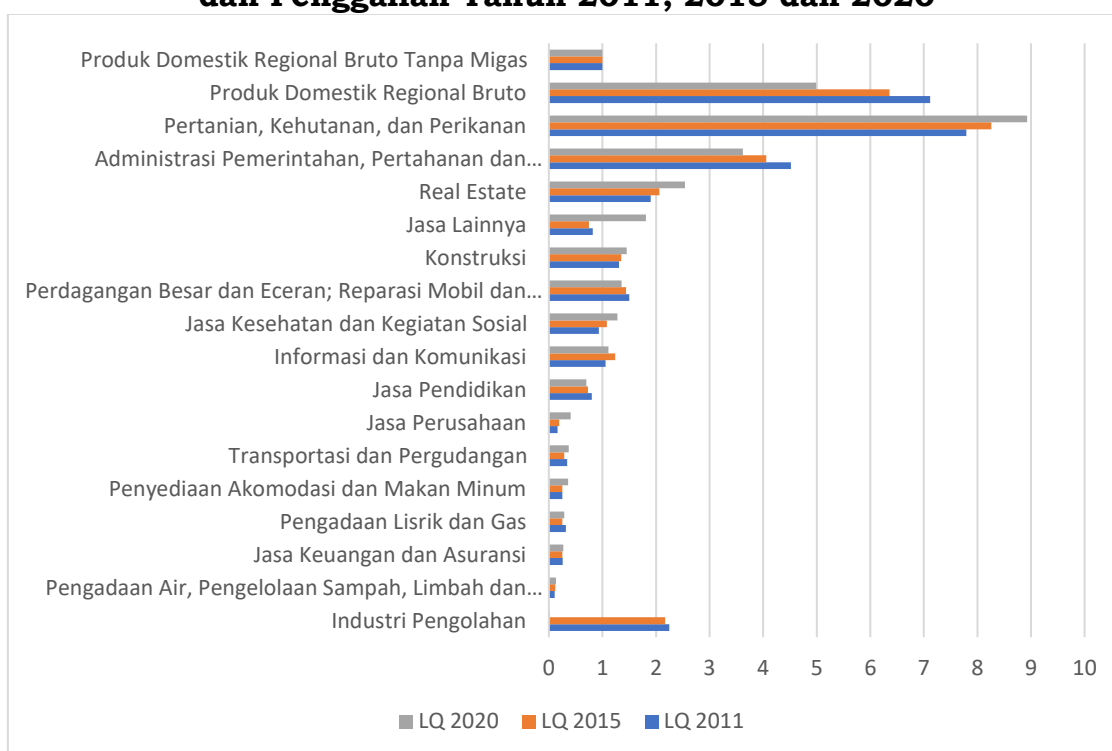
Tabel 2. 143 LQ Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011, 2015 dan 2020

Lapangan Usaha	LQ		
	2011	2015	2020
Industri Pengolahan	2,25	2,17	0,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,12	0,13
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,26	0,25	0,27
Pengadaan Lisrik dan Gas	0,32	0,25	0,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,25	0,25	0,36
Transportasi dan Pergudangan	0,34	0,29	0,37
Jasa Perusahaan	0,16	0,19	0,41
Jasa Pendidikan	0,80	0,73	0,70
Informasi dan Komunikasi	1,06	1,24	1,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	1,08	1,28
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,50	1,44	1,36
Konstruksi	1,31	1,35	1,45
Jasa Lainnya	0,82	0,75	1,81
Real Estate	1,90	2,06	2,54
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,52	4,06	3,62
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,79	8,26	8,93
Pertambangan dan Penggalan	31,66	29,90	36,67
Produk Domestik Regional Bruto	7,12	6,36	4,99
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	1,00	1,00	1,00

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, diolah

Peran Sektor Pertanian dan Perikanan terlihat pada PDRB non migas yang memiliki nilai LQ besar dari satu di tahun terakhir 2020. Artinya, Peran sektor ini relatif lebih besar di perekonomian Anambas dibandingkan Kepri. Di Kepulauan Riau, sektor jasa, terutama jasa perusahaan, perkembangan di Kepri jauh lebih besar dibandingkan di Anambas.

Gambar 2. 45 LQ Kabupaten Kepulauan Anambas tanpa Pertambangan dan Penggalian Tahun 2011, 2015 dan 2020



Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Tabel 2. 144 LQ Kabupaten Kepulauan Anambas tanpa Pertambangan dan Penggalian Tahun 2011, 2015 dan 2020

Lapangan Usaha	LQ		
	2011	2015	2020
Industri Pengolahan	2,25	2,17	0,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,12	0,13
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,26	0,25	0,27
Pengadaan Lisrik dan Gas	0,32	0,25	0,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,25	0,25	0,36
Transportasi dan Pergudangan	0,34	0,29	0,37
Jasa Perusahaan	0,16	0,19	0,41
Jasa Pendidikan	0,80	0,73	0,70
Informasi dan Komunikasi	1,06	1,24	1,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	1,08	1,28
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,50	1,44	1,36
Konstruksi	1,31	1,35	1,45
Jasa Lainnya	0,82	0,75	1,81
Real Estate	1,90	2,06	2,54
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,52	4,06	3,62
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,79	8,26	8,93
Produk Domestik Regional Bruto	7,12	6,36	4,99
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	1,00	1,00	1,00

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

2.4.1.2 Shift Share Kabupaten Kepulauan Anambas

Shift share melihat dan menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkan dengan wilayah yang lebih luas (wilayah referensi). Pertumbuhan perekonomian suatu daerah dapat dibagi menjadi tiga komponen:

$$g_i = G + (G_i - G) + (g_i - G_i)$$

Keterangan: g_i adalah pertumbuhan sektor i di daerah; G adalah pertumbuhan daerah referensi; G_i adalah pertumbuhan sektor i di tingkat daerah referensi.

Ketika

$$TS_i = X_{ir0}g_i$$

Dimana TS_i = total share, yaitu besarnya tambahan PDRB sekarang sektor i dari perkalian PDRB daerah sektor i pada tahun awal dengan tingkat pertumbuhan sektor i di tahun sekarang. Pada analisa shift share, dapat dilihat pembagian pengaruh daerah referensi, pergolakan sektor di tingkat referensi dan perbandingan sektor daerah dan referensi. Sehingga dikenal tiga pembagian dari distribusi persamaan di atas.

$$TS_i = X_{ir0}(G + (G_i - G) + (g_i - G_i))$$

$$TS_i = X_{ir0}G + X_{ir0}(G_i - G) + X_{ir0}(g_i - G_i)$$

$$TS_i = NE + IME + RSS$$

- National effect* ($NE = X_{ir0}G$) adalah ketika pertumbuhan daerah mengikuti pertumbuhan nasional
- Industrial mix-effect* ($IME = X_{ir0}(G_i - G)$): pertumbuhan daerah mengikuti pertumbuhan khas industri nasional => *proportional shift*
- Regional shift-effect* ($RSS = X_{ir0}(g_i - G_i)$) pertumbuhan mengikuti perbedaan pertumbuhan sektor daerah dan nasional => *differential shift*
(catatan: nasional bisa menjadi daerah referensi. Untuk perhitungan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas akan

digunakan Provinsi Kepulauan Riau sebagai referensi perbandingan pembangunan)

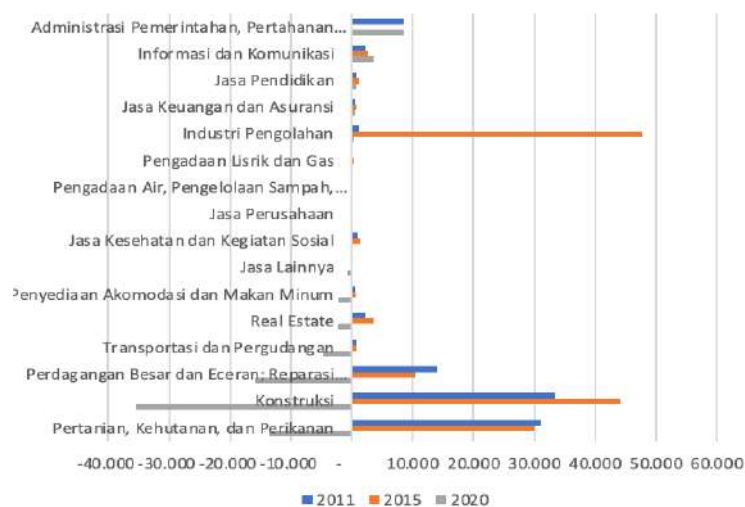
Total *share* di Kabupaten Kepulauan Riau, terbesar itu dari sektor Konstruksi, Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi, kemudian Administrasi Pemerintahan, sektor informasi dan Komunikasi serta sektor real estate. (untuk rincian, dapat dilihat pada Gambar di bawah ini total *share* PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas 2011, 2015 dan 2020).

Gambar 2. 46 Total Share PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun


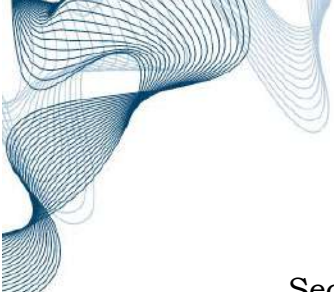


Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Gambar 2. 47 Total Share PDRB Tanpa Migas Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011, 2015 dan 2020



Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah



Secara lebih detail, dalam sektor konstruksi, peran sektor ini sejalan dengan daerah acuannya, yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Totalnya dapat dilihat pada gambar di atas, yaitu mencapai Rp.44,- milyar di tahun 2015 namun di masa pandemi covid-19 ini, terpuruk paling dalam sekitar Rp.35 milyar.

Namun di sektor Pertambangan dan penggalan, baik sektornya sendiri di daerah representatifnya (yaitu Provinsi Kepulauan Riau) memiliki dampak negatif terhadap gabungan sektor lain. Lebih jauh, di Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri termasuk dalam daerah yang lebih parah penurunannya sehingga secara total, dirasakan bahwa sektor ini memiliki dampak negatif terhadap perekonomian.

Benar, bahwa di lima terakhir RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas, harus mencari terobosan, mengurangi ketergantungan dengan pertambangan dan penggalan. Ketika dilihat bahwa sektor konstruksi yang menjanjikan, namun perlu diperdalam, apakah ini konstruksi yang produktif, atau konstruksi pasif masyarakat.

Selain konstruksi, masih ada sektor perdagangan yang patut dikembangkan. Diperlukan daya tarik Kabupaten Kepulauan Anambas, terkait perikanan, *storage* perikanan, industri perikanan, dan kemudian perdagangan.

Tabel 2. 145 Shift Share Kabupaten Kepulauan Anambas 2011, 2015 dan 2020 (juta Rp)

Lapangan Usaha	Total Shift Share			Nasional Share			Industrial shift			Regional Share		
	2011	2015	2020	2011	2015	2020	2011	2015	2020	2011	2015	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31.056	30.134	- 13.516	38.937	214.381	- 18.845	- 20.049	- 26.976	6.400	12.168	- 157.271	- 1.071
Pertambangan dan Pengecilan	110.940	246.591	- 797.632	688.262	3.438.358	- 272.459	- 463.218	- 135.468	- 1.439.567	- 114.105	- 3.056.299	914.393
Industri Pengolahan	1.197	47.743	378	109.395	595.129	- 471	- 3.915	- 54.052	1.282	- 104.282	- 493.333	- 434
Pengadaan Lisrik dan Gas	199	251	146	356	1.995	- 195	98	1.697	- 184	- 254	- 3.440	525
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	8	15	12	19	99	- 10	0	- 33	- 1	- 11	- 51	23
Konstruksi	33.408	44.102	- 35.510	27.225	179.921	- 18.745	752	20.248	- 16.295	5.432	- 156.067	- 470
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	14.107	10.484	- 15.898	13.568	81.588	- 7.661	- 1.625	14.376	- 21.324	2.164	- 85.480	13.087
Transportasi dan Pergudangan	844	809	- 4.809	1.155	6.557	- 400	166	4.063	- 5.356	- 476	- 9.812	947
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	481	648	- 2.117	619	3.615	- 321	56	261	- 4.553	- 195	- 3.228	2.757
Informasi dan Komunikasi	2.224	2.546	3.505	2.861	16.359	- 1.876	615	- 8.658	11.726	- 1.253	- 5.156	- 6.346
Jasa Keuangan dan Asuransi	489	797	445	909	4.920	- 491,14	770	- 373	- 141	- 1.191	- 3.751	1.077
Real Estate	2.293	3.527	- 2.373	3.859	21.633	- 2.119,83	- 378	- 5.249	- 5.199	- 1.187	- 12.857	4.946
Jasa Perusahaan	1	1	- 1	1	6	- 0,63	0	- 3	- 10	- 1	- 2	10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	8.414	- 160	8.465	13.147	68.733	- 6.954,10	2.414	19.897	25.977	- 7.147	- 88.790	- 10.559
Jasa Pendidikan	798	1.093	806	1.350	6.855	- 709,97	- 1.068	- 289	999	517	- 5.473	517
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	920	1.484	- 103	1.128	6.873	- 760,53	- 161	- 737	450	- 47	- 4.652	207
Jasa Lainnya	116	72	- 724	499	2.373	- 207,02	- 590	155	- 4.447	207	- 2.456	3.930

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

2.4.1.3 Indikator Kemampuan Ekonomi Daerah

Capaian kemampuan ekonomi daerah lima tahun kebelakang tersaji dalam tabel di bawah ini. Pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat dari tahun 2015 hingga 2020 namun tidak memiliki perubahan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2017 namun meningkat terus dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dan mencapai 48.75 persen. Nilai Tukar Petani Kabupaten Kepulauan Anambas berada di bawah nilai 100 yang artinya petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Dapat dilihat Nilai Tukar Petani mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2018 namun kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 98,2 dan kenaikan lagi pada tahun 2020 menjadi 99,19.

Tabel 2. 146 Indikator Kemampuan Ekonomi Daerah

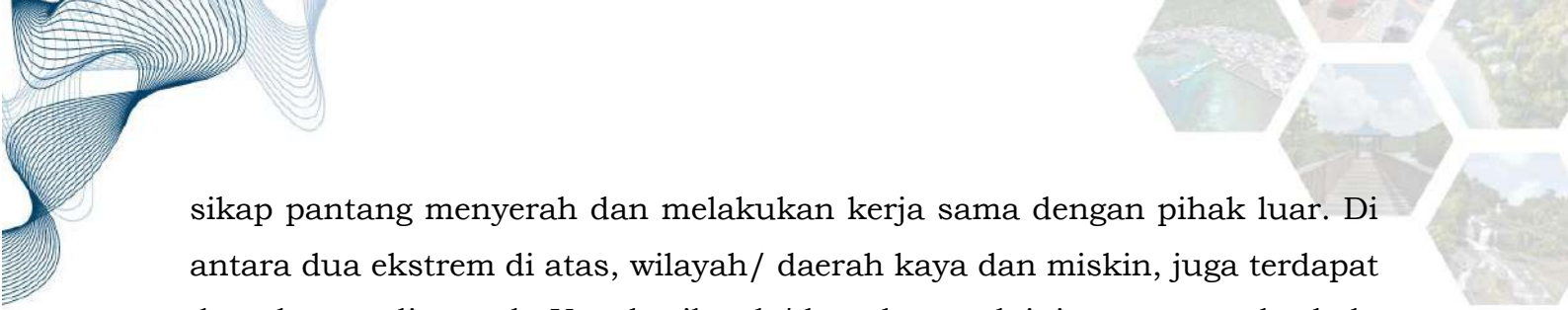
Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rupiah)	1672,13	1834,41	1997,91	2202,82	2202,82
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (Persen)	48,24	46,01	46,88	47,96	48,75
Nilai Tukar Petani	98,2	97,5	96,5	98,2	99,19

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

2.4.2 Tipologi Klassen di Kabupaten Kepulauan Anambas

a. Pengertian

Pembangunan untuk menuju kesejahteraan yang lebih baik, tentunya meliputi semua sektor yang terdapat dalam suatu wilayah/daerah. Namun, pembangunan di segala bidang, membutuhkan sumber daya dan faktor pendukung lainnya dalam jumlah yang besar. Untuk wilayah/daerah kaya, tentunya tidak menjadi permasalahan, hanya tinggal mengatur permasalahan tempatnya di mana. Namun untuk daerah miskin, yang tidak memiliki sumber daya, tentunya permasalahan pembangunan akan berbenturan dengan pemenuhan kebutuhan hidup minimal dari masyarakatnya. Pembangunan tetap bisa dilakukan dengan menanamkan

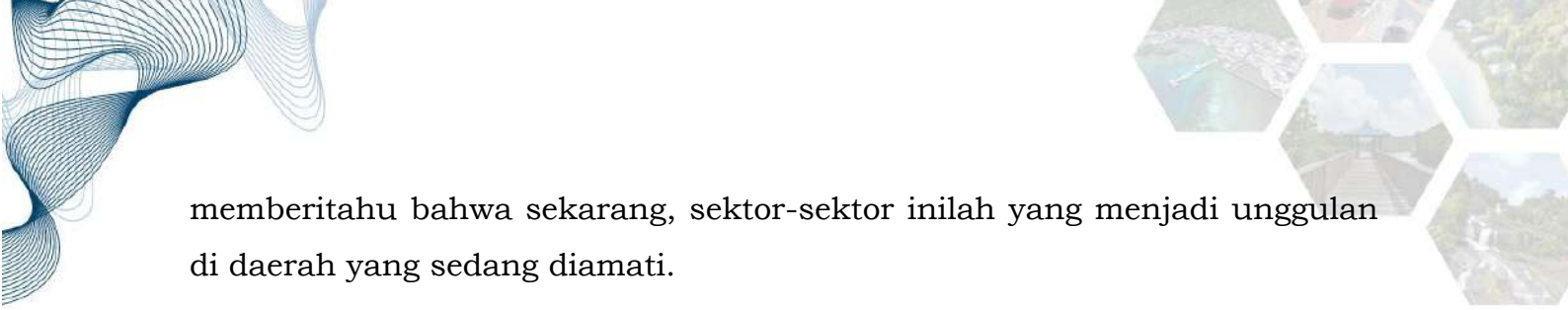


sikap pantang menyerah dan melakukan kerja sama dengan pihak luar. Di antara dua ekstrem di atas, wilayah/ daerah kaya dan miskin, juga terdapat daerah yang di tengah. Untuk wilayah/daerah tengah ini, tentunya ada skala prioritas dalam mendapatkan *output* pembangunan yang optimal, berikutnya kita pakai istilah prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan merupakan cara memilih untuk mendapatkan hasil maksimal, efektif dan efisien suatu pembangunan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Prioritas pembangunan masih berbicara di tataran perencanaan. Pada tahapan “realisasi” hasil, adalah suatu yang berbeda dari “prioritas pembangunan”, di mana masih harus ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi akan melihat sejauh mana pencapaian hasil terhadap perencanaan itu sendiri, dan mengambil langkah-langkah terbaik mengatasi atau mempertahankan hasil untuk kemajuan pembangunan di masa berikutnya.

Dalam menentukan prioritas pembangunan, perlu untuk membuat pemetaan pembangunan saat ini, atau beberapa periode sebelumnya untuk mengetahui posisi awal, hingga bisa di pilih prioritas pembangunan yang di lakukan saat ini dan ke depan. Pemetaan pembangunan yang terdata untuk nasional maupun daerah dapat disusun mengikuti pola sektoral dan sub sektoral yang tersusun dalam perhitungan PDB dan atau PDRB. Pendekatan yang paling sering dilakukan adalah “Tipologi Klassen”.

Tipologi Klassen mendasarkan pengelompokan suatu sektor, subsektor, usaha atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi daerah (daerah acuan atau nasional) yang menjadi acuan dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi (daerah acuan atau nasional). Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi perbedaan pertumbuhan dan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah. Hal ini juga diartikan sebagai sektor-sektor yang pertumbuhan dan *share*-nya lebih tinggi didaerah



memberitahu bahwa sekarang, sektor-sektor inilah yang menjadi unggulan di daerah yang sedang diamati.

Tipologi Klassen dengan pendekatan sektoral (yang dapat diperluas tidak hanya di tingkat sektor tetapi juga subsektor, usaha ataupun komoditi) menghasilkan empat klasifikasi sektor (kuadran) dengan karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai penjelasan singkat, dapat dipahami sebagai berikut.

Kuadran I.

Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran sektor dengan laju pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g) dan memiliki kontribusi terhadap PDRB (s_i) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan g_i lebih besar dari g dan s_i lebih besar dari s . Sektor dalam kuadran I dapat pula diartikan sebagai sektor yang potensial karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar daripada daerah yang menjadi acuan atau secara nasional.

Kuadran II.

Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran II). Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB (s_i) lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan g_i lebih besar dari g dan s_i lebih kecil dari s . Sektor dalam Kuadran III dapat diartikan sebagai sektor yang sedang *booming*. Meskipun pangsa pasar daerahnya relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata nasional.

Kuadran III.

Sektor relatif tertinggal (Kuadran III). Kuadran ini ditempati oleh sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g) dan sekaligus memiliki kontribusi tersebut terhadap PDRB (s_i) yang lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s).

Kuadran IV.

Sektor maju tapi tertekan (Kuadran IV). Sektor yang berada pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah (s_i) yang lebih besar dibandingkan kontribusi nilai sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $g_i < g$ dan $s_i > s$. Sektor dalam kategori ini juga dapat dikatakan sebagai sektor yang telah jenuh.

Gambar 2. 48 Pengelompokan Selisih Pertumbuhan dan *share* sektor PDRB dengan daerah pembanding

<p>Kuadran IV $g_i < g$ $s_i > s$</p>	<p>Kuadran I $g_i > g$ $s_i > s$</p>
<p>Kuadran III $g_i < g$ $s_i < s$</p>	<p>Kuadran II $g_i > g$ $s_i < s$</p>

b. Kondisi

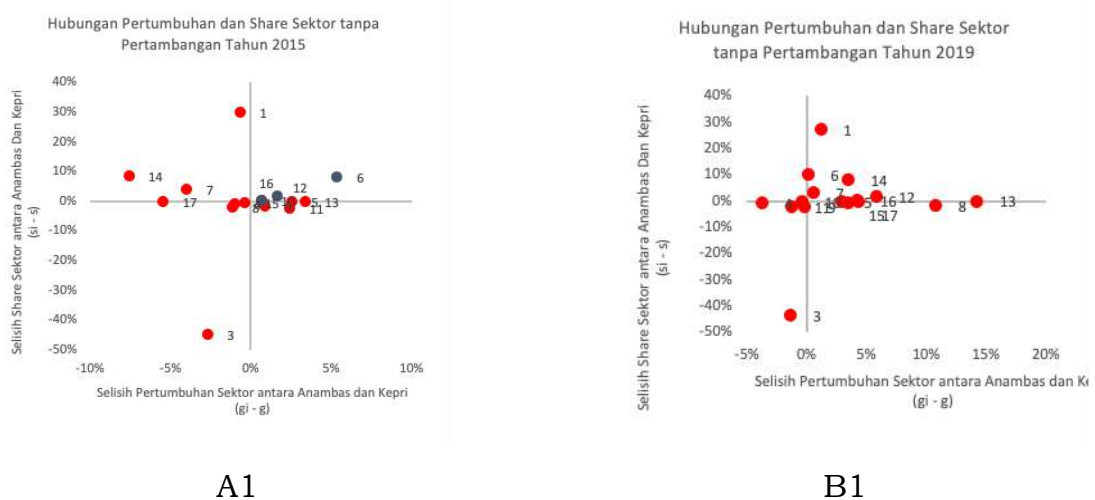
Sebagai catatan, untuk peta perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas, lebih menarik jika dilihat hubungan pertumbuhan dan *share* PDRB tanpa Pertambangan dan Penggalian (peta Tipologi Klassen) untuk periode 2015 dan 2019. Dapat dilihat dari data dan perkembangannya bahwa peran Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten besar. Untuk data terakhir 2019 mencapai di atas 80 persen. Sedangkan peran

Pertambangan dan Penggalian dalam 1 lustrum ke depan (5 tahun ke depan) akan semakin menurun. Jadi potensi pembangunan akan lebih berfokus kepada sektor-sektor non Pertambangan dan Penggalian .

Tentunya dalam perhitungan pertumbuhan, guna menghilangkan efek inflasi harga-harga barang, dipilih PDRB harga konstan 2010. Jadi pertumbuhan antar sektor yang didapatkan adalah pertumbuhan riil, di mana nilainya selalu lebih rendah dibandingkan nilai nominal yang mengikuti kenaikan harga.

Untuk mempertajam analisa suatu daerah, dibutuhkan daerah lain sebagai pembanding. Dalam kerangka teknokratik penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas ini akan menggunakan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah besar langsung yang berada 1 tingkat di atas Kabupaten Kepulauan Anambas yang dijadikan pembanding kemajuan di Anambas.

Gambar 2. 49 Gambaran dan Diagram Tipologi Klassen Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pembanding Provinsi Kepulauan Riau, 2015 dan 2019



2015

	$gi < g$	$gi \geq g$
$si \geq s$	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6. Konstruksi 12. Real Estat 10. Informasi dan Komunikasi 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
$si < s$	17. Jasa lainnya 15. Jasa Pendidikan 4. Pengadaan Listrik, Gas 8. Transportasi dan Pergudangan 3. Industri Pengolahan	13. Jasa Perusahaan 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 11. Jasa Keuangan dan Asuransi

A2

2019

	$gi < g$	$gi \geq g$
$si \geq s$		12. Real Estat 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6. Konstruksi
$si < s$	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Listrik, Gas	13. Jasa Perusahaan 8. Transportasi dan Pergudangan 17. Jasa lainnya 15. Jasa Pendidikan 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

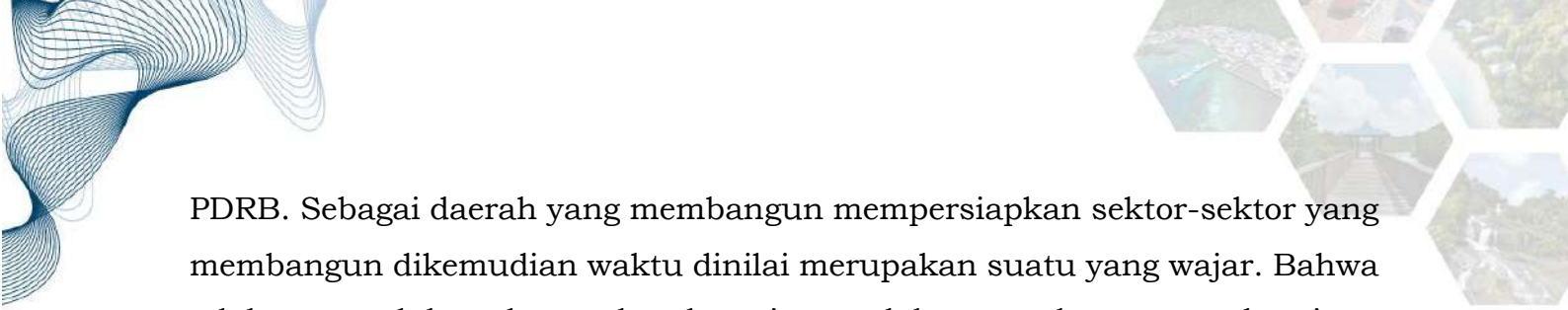
B2

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Dari dua gambaran di atas, kita dapat melihat bahwa, sebagian besar sektor perekonomian yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki pola yang sama dengan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dapat terlihat dari selisih *share* sektor di sekitar nol. Namun variasi dari selisih pertumbuhan masing-masing sektor yang relatif besar, dari -10 persen s.d 20 persen.

Data terakhir di tahun 2019 (dapat dilihat pada gambar di atas), sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan relatif lebih tinggi dari daerah referensi adalah sektor 12. Real Estat; 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan 6. Konstruksi. Di mana, jika dibandingkan dengan data di tahun 2015, ada sektor yang konsisten berada di kuadran I yaitu meliputi sebagian sektor di atas yaitu sektor 6. Konstruksi; 12. Real Estat; dan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor menarik yang menjadi sorotan adalah sektor perikanan serta sektor perdagangan. Kedua sektor ini bisa menjadi pemicu untuk pengembangan sektor-sektor lainnya.

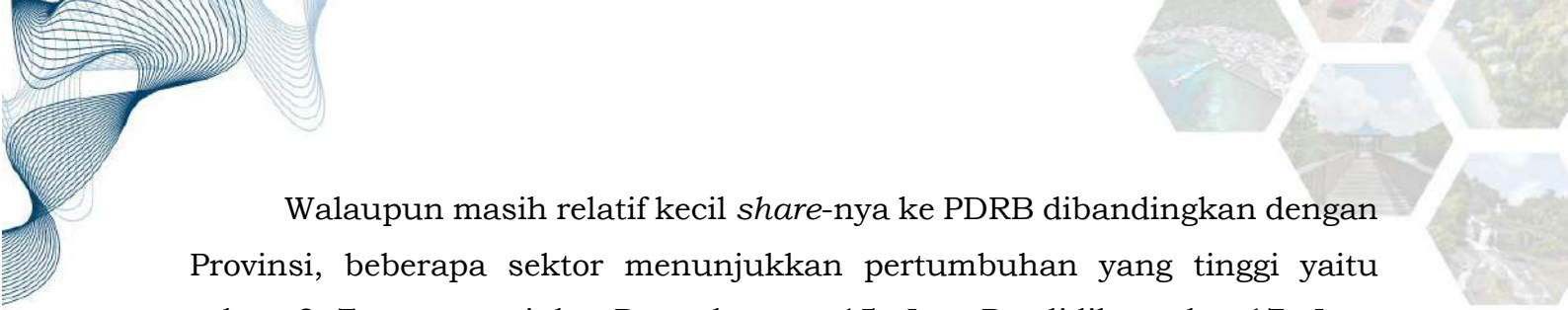
Sektor Administrasi Pemerintahan dan Konstruksi, memiliki pertumbuhan yang tinggi di Anambas dan diikuti *share* yang tinggi terhadap



PDRB. Sebagai daerah yang membangun mempersiapkan sektor-sektor yang membangun dikemudian waktu dinilai merupakan suatu yang wajar. Bahwa telah muncul kesadaran dan keseriusan dalam pembangunan dan juga terjadi investasi yang besar di Kepulauan Anambas.

Untuk Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, memang berada pada kuadran 1 di mana pertumbuhannya tinggi dan *share*-nya terhadap PDRB tinggi, hal ini terkait pembangunan dan penyediaan tiga rumah sakit yang dimulai sebelum 2015 dan benar terealisasi di periode terakhir ini, namun penyediaan ini masih membutuhkan banyak perlengkapan-perengkapan untuk bisa berjalan sepenuhnya suatu rumah sakit. Ketika kondisinya (dukungan pemerintah, terkait penyediaan perlengkapan) masih seperti sekarang dalam lima tahun ke depan maka, sebaiknya dioptimalkan salah satunya saja terkait. Namun jika mau difungsikan ketiganya, maka alokasi ke rumah sakit di lima tahun ke depan harus ditingkatkan. Dukungan pemerintah untuk penyediaan perlengkapan, tidak berarti bahwa seluruh dana di keluarkan oleh pemerintah. Pemerintah dapat memberikan jaminan peminjaman ke pihak ketiga misalnya.

Kabar gembira dari gambaran sektor-sektor di atas adalah untuk sektor 1. Pertanian dan perikanan dst; dan 7. Perdagangan dst, yang memiliki pengaruh besar di Anambas namun memiliki pertumbuhan yang kalah cepat dengan daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2015. Namun, di tahun 2019, dengan tetap mempertahankan dominasi di *share*-nya, kedua sektor memiliki pertumbuhan yang signifikan. Dominasi sektor perikanan masih sangat besar di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selama ini, dengan aturan 0 sd 12 mil merupakan wewenang pusat/provinsi, belum ada hukuman untuk masyarakat yang memanfaatkan. Mungkin untuk ini, Kabupaten Kepulauan Anambas bisa meminta kejelasan pusat/ provinsi, terkait pemakaian yang tidak merusak atau mengeksploitasi daerah batasan tersebut, masih diperbolehkan. Misalnya, 1. pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari; 2. Penggunaan tambak dengan batasan tertentu; 3. Pemanfaatan *storage* laut; 4. Wilayah pariwisata, termasuk juga menjadi kawasan *diving* yang di perbolehkan.



Walaupun masih relatif kecil *share*-nya ke PDRB dibandingkan dengan Provinsi, beberapa sektor menunjukkan pertumbuhan yang tinggi yaitu sektor 8. Transportasi dan Pergudangan; 15. Jasa Pendidikan; dan 17. Jasa Lainnya. Ketika awal tahun 2015 masih tergolong dalam kelompok yang memiliki *share* rendah di Anambas dan pertumbuhan yang lambat, namun di tahun 2019 mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan sektor-sektor yang sama di Kepulauan Riau.

Sektor 10. Informasi dan komunikasi, yang di tahun 2015 memiliki pertumbuhan dan *share* yang besar relatif terhadap daerah lainnya, namun di 2019 mengalami perlambatan baik dari *share* maupun pertumbuhan dibandingkan daerah lain di Kepulauan Riau.

Sedangkan sektor 9. Penyediaan Akomodasi dan makan minum; 11. Jasa keuangan dan asuransi memiliki *share* yang rendah serta memiliki perkembangan yang semula tinggi di tahun 2015 namun melambat dari kota/kab lain yang diwakili data provinsi di tahun 2019.

Sektor-sektor seperti 3. Industri Pengolahan dan 4. Pengadaan listrik relatif konstan ada di bawah di mana masih kalah dibandingkan sektor yang sama di provinsi sejak 2015 dan sampai sekarang.

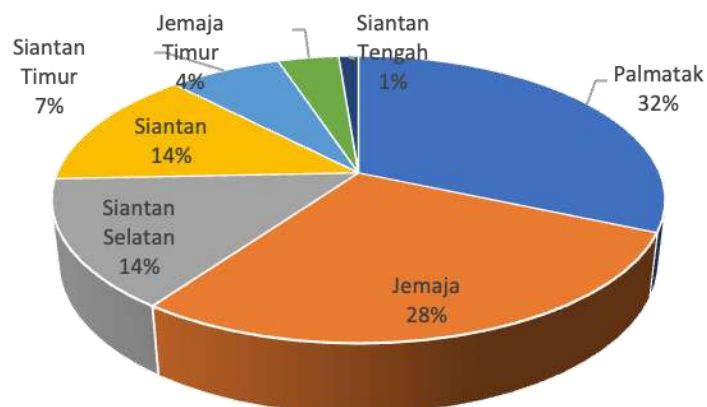
2.4.3 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Semua kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah memiliki fasilitas infrastruktur jalan darat. Selain Jalan darat, juga memiliki 3 pelabuhan bongkar muat meliputi Matak, Tarempa dan Udang Natuna serta 137 dermaga penyebrangan antar pulau. Terkait dengan bandar udara, sudah terdapat dua bandara yaitu di Kecamatan Palmatak (Bandara Matak) dan di Kecamatan Jemaja Timur (Bandara Letung), namun bandara komersial hanya ada di Letung. Sebelum pandemi, bandara Matak dibuka untuk umum, namun ditutup untuk umum selama pandemi ini.

Terkait infrastruktur jalan, total panjang jalan yang ada mencapai 376 km. Di mana terpanjang ada di Kecamatan Palmatak mencapai 32 persen dari panjang jalan yang ada. Kecamatan Siantan Tengah, baru memiliki jalan

darat sepanjang 4,68 km, yang merupakan terkecil dari kecamatan lain yang sudah memiliki infrastruktur ini.

Gambar 2. 50 Persentase Keberadaan Panjangnya Jalan di antar Kecamatan Kepulauan Anambas 2020



Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka, BPS 2020, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Status kewenangan jalan yang ada bisa dikelompokkan menjadi 3, kewenangan nasional, provinsi dan kabupaten. Jalan terpanjang masih merupakan kewenangan kabupaten mencapai 78 persen (294 km). Sementara Provinsi hanya 14 persen (51 km) dan nasional mencapai 8 persen (31 km).

Tabel 2. 147 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2017-2020

Kecamatan	Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
Jemaja	0	31,63	74,73	106,36
Jemaja Barat	N/A	N/A	N/A	N/A
Jemaja Timur	0	0	14,41	14,41
Siantan Selatan	0	6,11	48,39	54,5
Siantan	9,5	0	41,36	50,86
Siantan Timur	0	0	26,6	26,6
Siantan Tengah	0	0	4,68	4,68
Palmatak	21,43	13,26	83,97	118,66
Siantan Utara	N/A	N/A	N/A	N/A
Kute Siantan	N/A	N/A	N/A	N/A
Kab. Kepulauan Anambas	30,93	51	294,14	376,07

Sumber: BPS Kepulauan Kepulauan Anambas, 2020

Sedangkan permukaan jalan terdiri dari jalan beraspal, tidak beraspal dan Lainnya. Kecamatan yang paling banyak diaspal permukaannya adalah Siantan. Perlu diingat bahwa, di Kecamatan Siantan ini terdapat ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu Tarempa.

Sejauh ini, yang terdata, hanya empat kecamatan yang memiliki jalan beraspal yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Jemaja. Total kecamatan beraspal mencapai 18 persen dari total semua kecamatan yang memiliki jalan. Beberapa pecahan kecamatan belum digambarkan terkait kesiapan datanya.

Tabel 2. 148 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan (km)			Jumlah
	Aspal	Tidak diaspal	Lainnya	
Jemaja	7,46	14,67	52,61	74,73
Jemaja Barat	N/A	N/A	N/A	N/A
Jemaja Timur	0	4,42	9,99	14,41
Siantan Selatan	9,94	0,78	37,67	48,39
Siantan	18,70	10,53	12,14	41,36
Siantan Timur	0	5	21,60	26,60
Siantan Tengah	0	4,23	0,45	4,68
Palmatak	17,10	7,98	58,90	83,97
Siantan Utara	N/A	N/A	N/A	N/A
Kute Siantan	N/A	N/A	N/A	N/A
Kab. Kepulauan Anambas	53,19	47,60	193,34	294,13

Sumber: Daerah Dalam Angka, BPS Keb Kepulauan Anambas 2020

Terkait kondisi jalan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, baru mencapai 20 persen kondisinya, walaupun ada 80 persen dalam kondisi rusak dan rusak parah. Jika didaftar maka permukaan berkondisi “Sedang”, mencapai 4 persen, rusak 5 persen dan rusak parah terbanyak di 72 persen.

Kecamatan Palmatak memiliki jalan dengan berbagai permukaan jalan mencapai 39 persen dari total. Permukaan terbanyak adalah yang dalam kondisi “rusak berat”, yang mencapai 74 persen dari total jalan yang ada. Jalan dalam kondisi baik, sudah mencapai 21 persen. Jika kita melihat lebih dalam, bahwa, jalan sebagai nadi perekonomian dalam menarik, terutama misalnya, untuk menarik investasi dalam berbagai bidang.

Tabel 2. 149 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan (km) di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

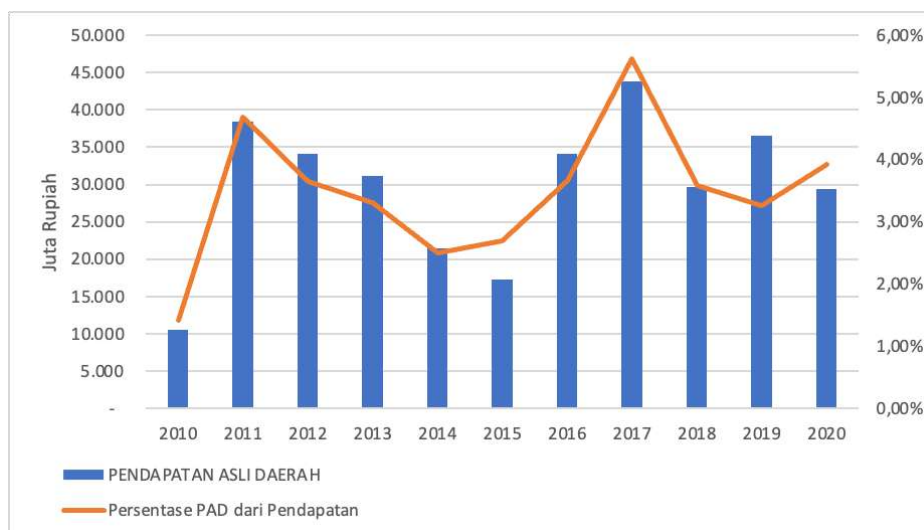
Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan			
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
Jemaja	7,97	2,49	2,74	61,54
Jemaja Barat	N/A	N/A	N/A	N/A
Jemaja Timur	1,24	0,4	1,5	11,27
Siantan Selatan	10,03	0	0,18	38,18
Siantan	20,29	2,36	2,56	16,17
Siantan Timur	0	0	5	21,6
Siantan Tengah	0,3	4	0	0,38
Palmatak	17,86	1,8	2,36	61,96
Siantan Utara	N/A	N/A	N/A	N/A
Kute Siantan	N/A	N/A	N/A	N/A
Kepulauan Anambas	57,67	11,04	14,34	211,09

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka, BPS 2020

2.4.4 Fokus Iklim Berinvestasi

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas di tahun 2020 mencapai Rp. 29 miliar dan mencapai 3,92 persen dari total pendapatan daerah yang sebesar Rp. 751 miliar. PAD mengalami fluktuasi dalam sepuluh tahun terakhir.

Gambar 2. 51 PAD dan Persentasenya Terhadap Pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas 2010-2020



Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan iklim

berinvestasi terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Untuk lebih jelasnya, banyaknya kejahatan menurut jenis kejahatan tahun 2015-2020 disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 2. 150 Daftar Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Anambas 2015-2020

Daftar Kriminalitas	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kejahatan yang dilaporkan	19	40	21	13	24	17
Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan:	17	22	9	3	20	10
Pembunuhan
Penganiayaan Berat (Anirat)	6	1
Penganiayaan Ringan (Anira)	5	5
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	1	1
Perkosaan	1	1
Pencabulan	2	4
Penculikan
Pencurian dengan Kekerasan (Curas)
Pencurian Biasa (termasuk ringan)	4	3	2	2
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	1
Pencurian dengan Pemberatan (Curat)	1	3	6	1
Pengrusakan/Penghancuran Barang
Pembakaran dengan sengaja	1
Narkoba dan Psikotropika	3	2	7	3
Penipuan/Perbuatan Curang	...	1	...	-
Penggelapan	...	3	...	1
Korupsi
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum

Sumber: Survei statistik Politik dan Keamanan tahun 2017, Kepolisian Resor Kepulauan Anambas 2018, BPS 2021, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Dengan jumlah kasus yang tampak pada tabel di atas, terdapat kasus yang telah diperkarakan melalui jalur hukum. Menurut data tahun 2020, terdapat 10 perkara pidana yang dapat terselesaikan.

2.4.5 Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh pada proses pembangunan. Semakin tinggi kualitas SDM, maka akan semakin tinggi pula

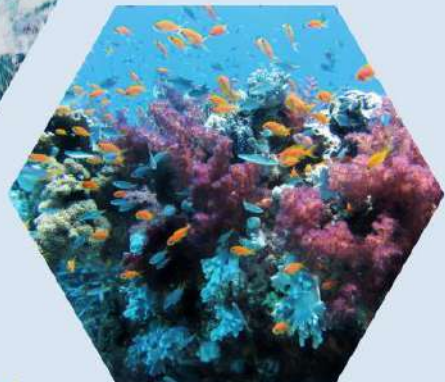
daya saing dan kemandirian. Kualitas SDM yang unggul dan kemudian diserap oleh pasar tenaga kerja merupakan faktor yang menentukan tingkat daya saing suatu daerah.

Dari tahun 2016 hingga tahun 2018, rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung stagnan di angka 58 persen. Hal ini berarti, setiap 100 penduduk berusia kerja (dianggap produktif) di Anambas mempunyai tanggungan sebanyak 58 orang yang belum produktif dan orang yang dianggap tidak produktif lagi. Kemudian rasio ketergantungan menurun pada 2019 menjadi 47,4 persen dan meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi 47,6 persen.

Tabel 2. 151 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2020

Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
0-14	13.534	13.690	13.855	13.104	12.865
65+	1.500	1.532	1.564	2.173	2.411
15-64	25.887	26.190	26.508	32.196	32.126
Rasio Ketergantungan	0,581	0,581	0,582	0,474	0,476
Rasio Ketergantungan (%)	58,1	58,1	58,2	47,4	47,6

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021



BAB III
Gambaran
Keuangan Daerah



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan pembangunan daerah adalah faktor ketersediaan sumber daya keuangan dan bagaimana keuangan daerah itu dikelola. Faktor ketersediaan keuangan membuat daerah lebih leluasa dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan fungsi-fungsi dan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan menganut azas tertib pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta realisasi APBD tersebut. Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah beberapa waktu ke belakang dan potensi keuangan beberapa tahun ke depan. Potensi keuangan masa depan perlu dilakukan dengan menyusun proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat dengan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi yang baik tentu saja dilakukan dengan melihat kinerja keuangan daerah beberapa tahun ke belakang, minimal dalam satu periode RPJM Daerah. Untuk itu akan disajikan kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun ke belakang yaitu tahun 2016 hingga 2020, khususnya terkait dengan kinerja Pendapatan, Belanja serta Neraca Daerah. Realisasi APBD berdasarkan sumber data dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2016–2020**

NO	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	PENDAPATAN	927.954.040.595,00	764.091.635.250,20	826.203.547.586,75	1.211.349.156.455,20	846.945.501.498,60	1,75%
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.662.717.410,00	38.147.948.165,00	35.976.243.566,00	42.966.598.128,00	31.176.585.045,03	3,73%
1	Pendapatan Pajak Daerah	16.029.750.000,00	13.255.000.000,00	16.949.000.000,00	19.151.855.000,00	13.627.077.947,00	-1,32%
2	Pendapatan Retribusi Daerah	421.250.000,00	1.544.414.298,00	971.530.500,00	5.035.952.375,00	3.402.025.000,00	153,86%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.309.850.525,00	1.942.282.607,00	1.934.686.786,00	1.934.686.786,00	1.318.019.763,00	4,00%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.901.866.885,00	21.406.251.260,00	16.121.026.280,00	16.844.103.967,00	12.829.462.335,03	8,95%
B	PENDAPATAN TRANSFER	887.300.483.185,00	725.943.687.085,20	772.504.635.896,75	1.149.582.158.327,20	801.411.843.704,00	1,69%
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	801.173.542.197,00	645.613.069.772,00	692.330.893.002,55	1.060.133.627.531,00	651.472.240.364,00	0,60%
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	70.820.475.408,00	83.364.938.154,00	65.908.029.834,00	61.514.108.532,00	86.597.311.964,00	7,72%
1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	251.910.867.789,00	115.154.466.618,00	152.970.265.168,55	429.128.664.369,00	116.975.588.451,00	21,59%
1.3	Dana Alokasi Umum	350.512.758.000,00	352.853.435.000,00	364.336.885.000,00	385.760.629.000,00	376.722.003.000,00	1,86%
1.4	Dana Alokasi Khusus	127.929.441.000,00	94.240.230.000,00	109.115.713.000,00	183.730.225.630,00	71.177.336.949,00	-0,86%
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	34.095.836.000,00	43.954.705.000,00	43.487.568.000,00	51.179.675.000,00	77.605.970.000,00	24,29%
2.1	Dana Otonomi Khusus	34.095.836.000,00	43.954.705.000,00	43.487.568.000,00	51.179.675.000,00	77.605.970.000,00	24,29%
3	Transfer Pemerintah Provinsi	52.031.104.988,00	36.375.912.313,20	36.686.174.894,20	38.268.855.796,20	51.833.633.340,00	2,63%
3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	52.031.104.988,00	36.375.912.313,20	36.686.174.894,20	38.268.855.796,20	51.833.633.340,00	2,63%
4	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000.000,00	N/A
4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000.000,00	N/A
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	10.990.840.000,00	0,00	17.722.668.124,00	18.800.400.000,00	14.357.072.749,57	N/A
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	7.563.000.000,00	10.800.400.000,00	14.357.072.749,57	N/A
2	Pendapatan Lainnya	10.990.840.000,00	0,00	10.159.668.124,00	8.000.000.000,00	0,00	N/A

Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

Tabel 3. 2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016–2020 (Rupiah)

NO	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	PENDAPATAN	929.053.685.759,49	780.240.497.322,54	824.839.214.795,70	1.121.205.421.730,97	816.788.855.634,18	-0,38%
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34.063.610.954,49	43.788.185.055,54	29.626.234.217,24	36.560.321.314,96	31.634.242.246,18	1,53%
1	Pendapatan Pajak Daerah	19.264.266.940,00	14.412.004.759,00	17.877.624.532,00	16.913.698.911,36	14.148.007.073,69	-5,72%
2	Pendapatan Retribusi Daerah	366.870.973,00	563.087.726,00	311.180.365,40	4.997.895.282,00	3.493.020.817,48	371,19%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.309.850.525,00	1.942.282.607,00	1.934.686.786,00	1.451.789.587,00	1.318.019.763,00	3,43%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.122.622.516,49	26.870.809.963,54	9.502.742.533,84	13.196.937.534,60	12.675.194.592,01	18,76%
B	PENDAPATAN TRANSFER	883.999.234.805,00	736.452.312.267,00	795.041.495.529,00	1.073.857.267.761,00	772.384.225.262,00	-0,43%
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	800.161.450.645,00	657.349.246.866,00	716.579.765.314,00	985.056.008.411,00	635.267.105.531,00	-1,72%
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	90.106.897.581,00	71.968.635.975,00	50.565.592.623,00	44.678.061.732,00	72.785.957.092,00	0,35%
1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	250.719.706.131,00	156.582.407.502,00	198.884.693.009,00	371.235.764.748,00	113.694.995.670,00	1,69%
1.3	Dana Alokasi Umum	350.512.758.000,00	352.853.435.000,00	364.320.074.000,00	388.403.719.000,00	375.518.805.000,00	1,80%
1.4	Dana Alokasi Khusus	108.822.088.933,00	75.944.768.389,00	102.809.405.682,00	180.738.462.931,00	73.267.347.769,00	5,37%
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	34.095.836.000,00	43.954.705.000,00	43.487.568.000,00	51.179.675.000,00	77.605.970.000,00	24,29%
2.1	Dana Otonomi Khusus	34.095.836.000,00	43.954.705.000,00	43.487.568.000,00	51.179.675.000,00	77.605.970.000,00	24,29%
3	Transfer Pemerintah Provinsi	49.741.948.160,00	35.148.360.401,00	34.974.162.215,00	37.621.584.350,00	39.011.149.731,00	-4,64%
3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	49.741.948.160,00	35.148.360.401,00	34.974.162.215,00	37.621.584.350,00	39.011.149.731,00	-4,64%
4	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000.000,00	N/A
4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000.000,00	N/A
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	10.990.840.000,00	0,00	171.485.049,46	10.787.832.655,01	12.770.388.126,00	N/A
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	171.485.049,46	10.787.832.655,01	12.770.388.126,00	N/A
2	Pendapatan Lainnya	10.990.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A

Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

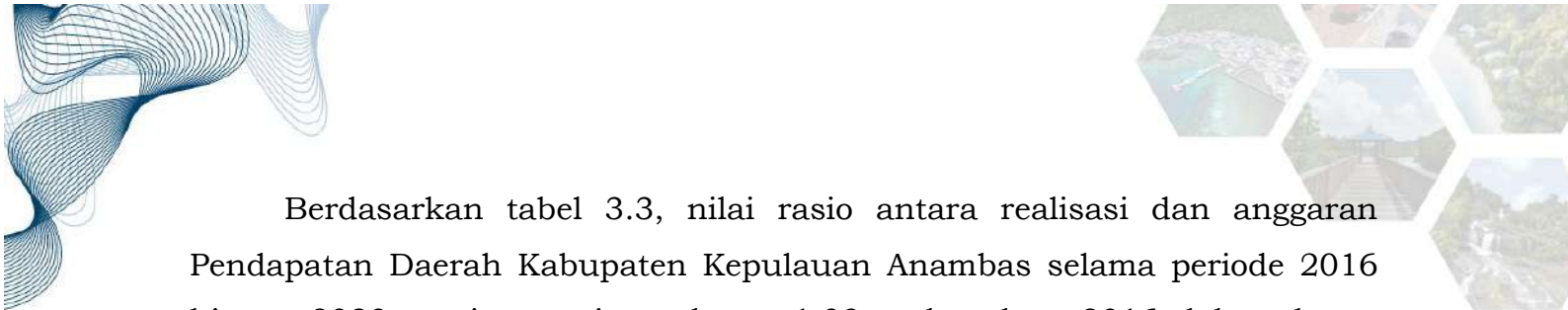
3.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah sekaligus sumber pendanaan pembangunan daerah. Tingkat kemampuan daerah dalam mendanai kebutuhannya tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatannya, baik itu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah. Salah satu indikator keberhasilan keuangan daerah adalah dengan memperhatikan perbandingan antara realisasi dengan anggaran yang dibuat pemerintah. Bila kita perhatikan tabel 3.1 dan 3.2 terlihat bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020 di bawah target anggaran, walaupun PAD di atas target. Pendapatan Transfer juga di bawah target anggaran, begitu juga Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Tabel 3. 3 Rasio Realisasi Terhadap Anggaran Pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Pendapatan	1,00	1,02	1,00	0,93	0,96
A	Pendapatan Asli Daerah	1,15	1,15	0,82	0,85	1,01
1	Pendapatan Pajak Daerah	1,20	1,09	1,05	0,88	1,04
2	Pendapatan Retribusi Daerah	0,87	0,36	0,32	0,99	1,03
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1,10	1,26	0,59	0,78	0,99
B	Pendapatan Transfer	1,00	1,01	1,03	0,93	0,96
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1,00	1,02	1,04	0,93	0,98
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	1,27	0,86	0,77	0,73	0,84
1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1,00	1,36	1,30	0,87	0,97
1.3	Dana Alokasi Umum	1,00	1,00	1,00	1,01	1,00
1.4	Dana Alokasi Khusus	0,85	0,81	0,94	0,98	1,03
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.1	Dana Otonomi Khusus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	0,96	0,97	0,95	0,98	0,75
3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,96	0,97	0,95	0,98	0,75
4	Bantuan Keuangan	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00
4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00
C	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	1,00	0,00	0,01	0,57	0,89
1	Pendapatan Hibah	0,00	N/A	0,02	1,00	0,89
2	Pendapatan Lainnya	1,00	N/A	0,00	0,00	0,00

Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah





Berdasarkan tabel 3.3, nilai rasio antara realisasi dan anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2016 hingga 2020 masing-masing sebesar 1,00 pada tahun 2016, lalu sebesar 1,02 di tahun 2017. Selanjutnya rasio realisasi pendapatan terhadap anggaran di tahun 2018 sebesar 1,01 dan 0,93 di tahun 2019 serta 0,96 pada tahun 2020. Secara umum rata-rata rasio selama periode waktu tersebut adalah sebesar 0,98. Rasio mendekati nilai 1 ini menunjukkan bahwa kinerja dari sisi pendapatan secara total sudah cukup baik.

Sementara itu, bila kita lihat komponen Pendapatan, terlihat bahwa pendapatan transfer dari pemerintah pusat merupakan penyumbang terbesar pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada tahun 2016 nilai realisasi Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp883.999.234.805,00, sedangkan PAD sebesar Rp34.063.610.954,49 serta Pendapatan Lainnya sebesar Rp10.990.840.000,00.

Pada tahun 2017, rasio realisasi dan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Dana Transfer mencapai target yang direncanakan. Bahkan untuk PAD melebihi target anggaran dengan rasio sebesar 1,15. Namun rasio PAD untuk tahun 2018 sebesar 0,82 dan untuk rasio Pendapatan Dana Transfer hanya sebesar 1,03. Sebaliknya untuk tahun 2019 dan 2020 rasio realisasi pendapatan asli daerah terhadap anggaran masing-masing sebesar 0,85 dan 1,01.

Pada komponen PAD, Pajak Daerah merupakan pemberi kontribusi terbesar. Nominal nilai realisasi pajak daerah jauh lebih besar daripada realisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sebagai ilustrasi pada tahun 2018, nilai realisasi Pajak Daerah sebesar Rp17.877.624.532,00 melampaui Retribusi Daerah sebesar Rp3.015.612.992,00, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp1.934.686.786,00 dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp12.350.913.434,00.

Berdasarkan perhitungan rasio realisasi terhadap target anggaran pendapatan, maka Retribusi Daerah merupakan komponen dengan rasio terbesar yakni rata-rata 1,55 disusul Lain-lain Pendapatan Daerah yang



Sah sebesar 1.07, lalu Pajak Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dengan rasio yang sama yaitu 1,00.

Sementara itu, komponen Pendapatan Dana Transfer yang memberikan kontribusi rasio realisasi terhadap anggaran terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Rasio realisasi dan anggaran komponen ini konsisten setiap tahunnya di angka 1, artinya setiap tahunnya realisasi DAU sesuai target yang ditetapkan. Komponen dana transfer lainnya selain DAU selama periode 2016 sampai dengan 2020 pada umumnya kurang dari 1, yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan ini lebih kecil dari target yang ditetapkan. Namun untuk komponen dana transfer, besarnya lebih banyak ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat.

3.1.1.1 Perkembangan Pendapatan Daerah

Bila kita lihat perkembangan dari tahun 2016 hingga tahun 2020, realisasi pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 4 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016–2020 (Rupiah)

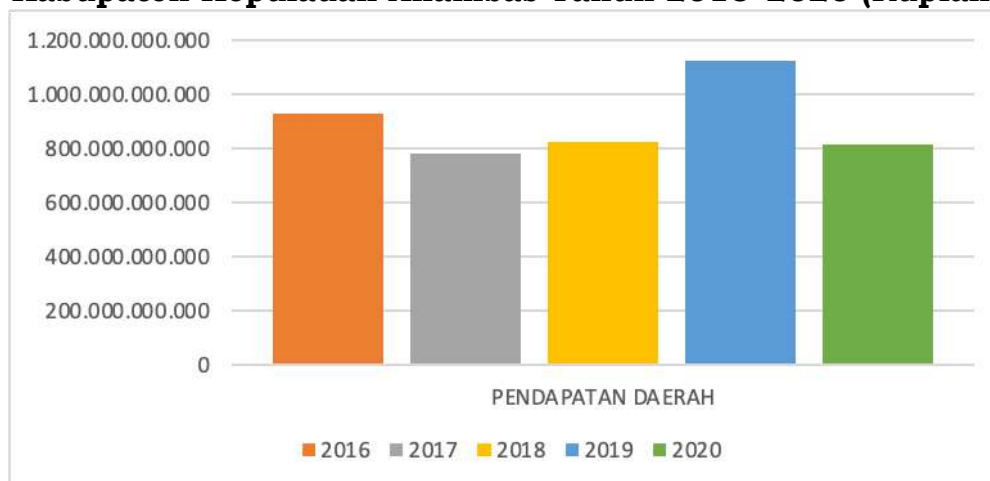
NO	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	PENDAPATAN	929.053.685.759,49	780.240.497.322,54	824.839.214.795,70	1.121.205.421.730,97	816.788.855.634,18	-0,38%
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34.063.610.954,49	43.788.185.055,54	29.626.234.217,24	36.560.321.314,96	31.634.242.246,18	1,53%
1	Pendapatan Pajak Daerah	19.264.266.940,00	14.412.004.759,00	17.877.624.532,00	16.913.698.911,36	14.148.007.073,69	-5,72%
2	Pendapatan Retribusi Daerah	366.870.973,00	563.087.726,00	311.180.365,40	4.997.895.282,00	3.493.020.817,48	371,19%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.309.850.525,00	1.942.282.607,00	1.934.686.786,00	1.451.789.587,00	1.318.019.763,00	3,43%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.122.622.516,49	26.870.809.963,54	9.502.742.533,84	13.196.937.534,60	12.675.194.592,01	18,76%
B	PENDAPATAN TRANSFER	883.999.234.805,00	736.452.312.267,00	795.041.495.529,00	1.073.857.267.761,00	772.384.225.262,00	-0,43%
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	800.161.450.645,00	657.349.246.866,00	716.579.765.314,00	985.056.008.411,00	635.267.105.531,00	-1,72%
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	90.106.897.581,00	71.968.635.975,00	50.565.592.623,00	44.678.061.732,00	72.785.957.092,00	0,35%
1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	250.719.706.131,00	156.582.407.502,00	198.884.693.009,00	371.235.764.748,00	113.694.995.670,00	1,69%
1.3	Dana Alokasi Umum	350.512.758.000,00	352.853.435.000,00	364.320.074.000,00	388.403.719.000,00	375.518.805.000,00	1,80%
1.4	Dana Alokasi Khusus	108.822.088.933,00	75.944.768.389,00	102.809.405.682,00	180.738.462.931,00	73.267.347.769,00	5,37%
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	34.095.836.000,00	43.954.705.000,00	43.487.568.000,00	51.179.675.000,00	77.605.970.000,00	24,29%
2.1	Dana Otonomi Khusus	34.095.836.000,00	43.954.705.000,00	43.487.568.000,00	51.179.675.000,00	77.605.970.000,00	24,29%
3	Transfer	49.741.948.160,00	35.148.360.401,00	34.974.162.215,00	37.621.584.350,00	39.011.149.731,00	-4,64%

NO	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Pemerintah Provinsi						
3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	49.741.948.160,00	35.148.360.401,00	34.974.162.215,00	37.621.584.350,00	39.011.149.731,00	-4,64%
4	Bantuan Keuangan					20.500.000.000,00	N/A
4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya					20.500.000.000,00	N/A
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	10.990.840.000,00	0,00	171.485.049,46	10.787.832.655,01	12.770.388.126,00	N/A
1	Pendapatan Hibah		0,00	171.485.049,46	10.787.832.655,01	12.770.388.126,00	N/A
2	Pendapatan Lainnya	10.990.840.000,00		0,00	0,00	0,00	N/A

Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

Hal ini menunjukkan ada upaya positif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut:

Gambar 3. 1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016–2020 (Rupiah)



Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

Realisasi PAD dan Pendapatan Dana Transfer pada periode 2016 hingga 2020 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PAD rata-rata per tahun sejak tahun 2016 hingga 2020 sebesar 27,72 persen. Besarnya rata-rata pertumbuhan PAD terutama akibat meningkatnya pendapatan retribusi daerah hingga 124 persen terutama pada tahun 2017 dengan kenaikan mencapai 435,5 persen. Sedangkan pertumbuhan Pendapatan Dana Transfer selama 2015 hingga 2019 relatif stabil pada kisaran rata-rata sebesar 18,48 persen. Penurunan justru terjadi pada rata-rata penerimaan bagi hasil pajak selama 2016 hingga 2020 yakni -13,89 persen. Rata-rata pertumbuhan untuk Lain-Lain Pendapatan yang Sah selama kisaran periode tersebut juga mengalami penurunan sebesar -0,98 persen.

3.1.1.2 Komponen Pendapatan Daerah

Dilihat dari kontribusi komponen Pendapatan Daerah, Dana Transfer merupakan penyumbang Pendapatan terbesar. Rata-rata kontribusi Dana Transfer periode 2016-2020 adalah sebesar 85,98 persen dari total

pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 9,30 persen dan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 3,88 persen.

Gambar 3. 2 Realisasi PAD, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2016–2020 (Rupiah)



Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

PAD pada tahun 2016-2020 rata-rata menyumbang 3,88 persen dari total pendapatan. Nilai ini cukup rendah mengingat pada umumnya komposisi PAD Daerah di Indonesia di kisaran angka 15 persen. Dilihat per tahun kontribusi PAD dari tahun 2016 hingga 2020 relatif kurang stabil di mana mengalami peningkatan dan juga penurunan, yakni dari 2,69 persen dari komposisi pendapatan keseluruhan di tahun 2016 kemudian turun 3,68 persen di tahun 2017 dan naik kembali 5,61 persen pada tahun 2018. Selanjutnya kontribusi PAD mengalami penurunan pada 2019 sebesar 4,20 persen dan 3,26 persen pada tahun 2020 dari total kontribusi pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada komponen PAD, pertumbuhan pajak daerah sejak tahun 2016 hingga 2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 61,22 persen. Retribusi daerah tumbuh rata-rata sebesar 124,20 persen. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan rata-rata mengalami penurunan yakni sebesar -5,26 persen dan Lain-lain PAD yang Sah rata-rata tumbuh sebesar 27,68 persen. Komponen PAD yang perlu mendapat perhatian

adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan karena mengalami tren pertumbuhan negatif.

Gambar 3. 3 Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016–2020 (Rupiah)



Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

Komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar adalah Lain-lain PAD yang Sah, disusul oleh Pajak Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Retribusi Daerah. Pada periode 2016-2020, pendapatan Lain-lain PAD yang sah berkontribusi rata-rata sebesar 44,18 persen dari total Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah berkontribusi rata-rata 43,64 persen dari PAD. Sedangkan Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 6,26 persen dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 5,91 persen. Komponen yang memiliki kecenderungan menurun komposisinya adalah Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2016 komponen ini memberikan kontribusi 13,58 persen dan tahun 2019 turun hingga 3,97 persen.

Pada Dana Transfer, komponen Dana Transfer yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Rata-rata kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 44,24 persen. Bahkan selama tahun 2017

dan 2018 mencapai nilai persentase masing-masing sebesar 53,68 persen dan 50,84 persen, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 39,43 persen.

Penyumbang terbesar dari Dana Transfer berikutnya Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) yakni rata-rata 31,15 persen dilanjutkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan kontribusi 14,76 persen dan terakhir Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 9,85 persen.

Tabel 3. 5 Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2016–2020 (Persen)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	PENDAPATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,67	5,61	3,59	3,26	3,87
1	Pendapatan Pajak Daerah	56,55	32,91	60,34	46,26	44,72
2	Pendapatan Retribusi Daerah	1,08	1,29	1,05	13,67	11,04
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,85	4,44	6,53	3,97	4,17
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38,52	61,37	32,08	36,10	40,07
B	PENDAPATAN TRANSFER	95,15	94,39	96,39	95,78	94,56
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	90,52	89,26	90,13	91,73	82,25
1,1	Dana Bagi Hasil Pajak	10,19	9,77	6,36	4,16	9,42
1,2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	28,36	21,26	25,02	34,57	14,72
1,3	Dana Alokasi Umum	39,65	47,91	45,82	36,17	48,62
1,4	Dana Alokasi Khusus	12,31	10,31	12,93	16,83	6,22
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	3,86	5,97	5,47	4,77	10,05
2,1	Dana Otonomi Khusus	3,86	5,97	5,47	4,77	10,05
3	Transfer Pemerintah Provinsi	5,63	4,77	4,40	3,50	5,05
3,1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5,63	4,77	4,40	3,50	5,05
4	Bantuan Keuangan	0	0	0	0	2,65
4,1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	0	0	0	0	2,65
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1,18	0,00	0,02	0,96	1,56
1	Pendapatan Hibah	0	0	100,00	100,00	100,00
2	Pendapatan Lainnya	100,00	0	0	0	0

Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah


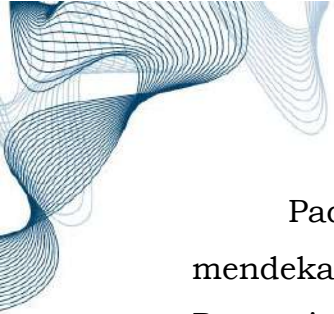
3.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Daerah yang mengurangi ekuitas dan tidak diharapkan kembali lagi. Peranan belanja daerah sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola belanja daerah akan menentukan keefektifan belanja dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Salah satu yang diperhatikan dalam manajemen belanja adalah masalah alokasi belanja daerah. Berikut adalah analisis terhadap belanja daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

3.1.2.1 Perkembangan Belanja Daerah

Selama periode tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan bahwa realisasi belanja di setiap kelompok belanja selalu lebih rendah dibandingkan nilai anggarannya. Hal ini menunjukkan adanya penghematan pembelanjaan atau serapan yang kurang. Nilai realisasi Belanja tahun 2016-2020 berkisar antara 67,7 persen hingga 99,8 persen, dengan rata-rata per tahun sebesar 89,5 persen dibandingkan dengan anggarannya.

Untuk Belanja Operasi sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, tingkat serapan anggaran masing-masing adalah sebesar 79,37 persen, 87,83 persen, 91,37 persen, 96,20 persen, 89,51 persen, dan 95 persen dengan rata-rata serapan 88,50 persen per tahun. Sedangkan untuk realisasi Belanja Modal menyerap anggaran masing-masing sebesar 91,34 persen pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 87,89 persen selama tahun anggaran 2017. Pada tahun 2018 tingkat penyerapan adalah sebesar 13,71 persen dan meningkat menjadi 83,61 persen ditahun berikutnya serta tahun 2020 sebesar 96,79 persen. Rata-rata penyerapan anggaran selama periode 2016 sampai dengan 2020 adalah sebesar 81,56 persen. Serapan kedua belanja ini relatif cukup baik, namun akan lebih baik lagi bila serapan di atas 90 persen, sebab dampak belanja terutama belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat cukup besar.



Pada komponen Belanja Operasi, belanja Hibah yang paling mendekati persentase anggaran yang ditetapkan. Disusul dengan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Bantuan Sosial serta Subsidi. Sejak tahun 2016 hingga 2020, Belanja Hibah terserap rata-rata sebesar 90,29 persen. Belanja Pegawai terserap rata-rata 87,98 persen per tahun. Sedangkan untuk Belanja Barang dan Jasa terserap rata-rata terserap 85,68 persen serta Bantuan Keuangan sebesar 78,22 persen serta Bantuan Sosial sebanyak 69,39 persen.

Tabel 3. 6 Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016–2020 (Rupiah)

Urut	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Belanja	894.268.120.440,00	817.633.102.909,90	876.478.488.458,09	1.217.390.533.695,62	857.474.837.945,00	1,99%
A	Belanja Operasi	596.414.130.691,00	640.896.647.683,90	627.821.524.997,80	782.871.854.222,80	662.074.001.562,12	3,67%
1	Belanja Pegawai	350.740.472.453,67	320.325.549.551,00	355.683.041.978,48	406.455.018.250,58	365.746.279.432,89	1,66%
2	Belanja Barang dan Jasa	184.410.908.006,33	252.512.784.176,90	211.438.576.955,32	280.899.680.612,22	209.500.475.841,23	7,02%
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
4	Belanja Hibah	8.882.789.000,00	8.993.330.000,00	4.549.350.000,00	4.541.892.000,00	26.716.145.718,00	109,97%
5	Belanja Bantuan Sosial	4.281.220.000,00	3.231.075.500,00	130.000.000,00	183.555.000,00	258.445.000,00	-9,63%
6	Belanja Bantuan Keuangan	48.098.741.231,00	55.833.908.456,00	56.020.556.064,00	90.791.708.360,00	59.852.655.570,00	11,10%
B	Belanja Modal	296.853.989.749,00	175.436.455.226,00	248.156.963.460,29	433.929.711.472,82	165.038.702.726,33	3,36%
1	Belanja Modal Tanah	3.489.783.000,00	4.527.025.000,00	4.778.800.000,00	5.523.633.288,00	790.607.000,00	-8,70%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.225.138.880,00	28.086.445.627,00	31.637.211.777,92	66.171.152.439,20	29.063.095.232,00	23,02%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.245.881.413,00	86.825.339.920,00	87.092.059.554,54	194.406.143.172,42	85.116.216.228,00	19,22%
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	191.486.296.456,00	52.885.429.200,00	123.146.683.477,83	165.603.254.728,20	46.858.595.456,33	5,81%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	406.890.000,00	3.112.215.479,00	1.502.208.650,00	2.225.527.845,00	3.210.188.810,00	176,39%
C	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	1.300.000.000,00	500.000.000,00	588.968.000,00	30.362.133.656,55	N/A
1	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	1.300.000.000,00	500.000.000,00	588.968.000,00	30.362.133.656,55	N/A

Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016–2020 (Rupiah)

URUT	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	BELANJA	829.422.034.253,06	783.735.296.631,90	395.036.684.210,59	1.114.711.162.520,99	817.280.938.650,27	25,10%
A	BELANJA OPERASI	557.903.930.966,06	629.525.150.994,90	360.730.289.040,59	751.907.924.520,23	628.458.109.985,35	15,54%
1	Belanja Pegawai	303.379.283.906,00	290.155.330.048,00	153.947.458.462,00	357.208.194.340,00	352.276.430.743,00	19,84%
2	Belanja Barang	162.367.661.440,06	228.813.076.621,90	102.764.233.721,59	256.272.782.230,23	190.441.915.852,35	27,38%
3	Belanja Subsidi						N/A
4	Belanja Hibah	7.623.412.003,00	8.282.321.030,00	4.431.333.000,00	4.278.388.000,00	27.391.102.575,00	124,73%
5	Belanja Bantuan Sosial	2.307.617.000,00	2.536.842.500,00	117.000.000,00	156.555.000,00	183.445.000,00	-8,62%
6	Belanja Bantuan Keuangan	82.225.956.617,00	99.737.580.795,00	99.470.263.857,00	133.992.004.950,00	58.165.215.815,00	-0,21%
B	Belanja Modal	271.139.541.287,00	154.191.110.789,00	34.015.771.170,00	362.803.238.000,76	159.748.471.277,92	197,38%
1	Belanja Tanah	2.493.255.200,00	1.403.190.580,00	492.445.785,00	4.022.083.585,00	790.607.000,00	131,95%
2	Belanja Peralatan dan Mesin	7.700.000.130,00	23.976.218.832,00	12.161.973.724,00	58.640.818.568,76	27.265.764.736,00	122,69%
3	Belanja Bangunan dan Gedung	73.677.910.916,00	78.551.810.888,00	16.859.817.969,00	156.832.046.585,00	83.625.432.770,92	177,90%
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	186.867.235.041,00	48.135.987.839,00	4.354.133.692,00	141.090.121.189,00	45.446.641.371,00	726,85%

URUT	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	401.140.000,00	2.123.902.650,00	147.400.000,00	2.218.168.073,00	2.620.025.400,00	439,85%
C	Belanja Tak Terduga	378.562.000,00	19.034.848,00	290.624.000,00	0,00	29.074.357.387,00	N/A
1	Belanja Tak Terduga	378.562.000,00	19.034.848,00	290.624.000,00	0,00	29.074.357.387,00	N/A

Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

3.1.2.2 Komponen Belanja Daerah

Secara umum dalam kurun waktu 2016 hingga 2020, total nilai Belanja dan Belanja Operasional berfluktuasi. Total Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2016-2020 tumbuh rata-rata sekitar 15,39 persen, sedangkan Belanja Operasi meningkat rata-rata 13,94 persen per tahun.

Demikian pula dengan Belanja Modal yang meningkat rata-rata 20,69 persen. Pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami penurunan sebesar -43,13 persen dan penurunan yang cukup rendah hingga -77,94 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019, Belanja Modal kembali meningkat hingga 966,57 persen dan di tahun 2020 menurun mencapai pertumbuhan -55,96 persen.

Gambar 3. 4 Perkembangan Realisasi Belanja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016–2020 (Rupiah)



Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

Alokasi Belanja Daerah memainkan peranan penting dalam menyejahterakan masyarakat. Pada umumnya alokasi belanja pada Belanja Modal dianggap baik, mengingat belanja ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berikut gambaran data belanja selama lima tahun ke belakang:

Tabel 3. 8 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Urut	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Belanja	829.422.034.253,06	783.735.296.631,90	395.036.684.210,59	1.114.711.162.520,99	817.280.938.650,27	25,10%
A	Belanja Operasi	557.903.930.966,06	629.525.150.994,90	360.730.289.040,59	751.907.924.520,23	628.458.109.985,35	15,54%
1	Belanja Pegawai	303.379.283.906,00	290.155.330.048,00	153.947.458.462,00	357.208.194.340,00	352.276.430.743,00	19,84%
2	Belanja Barang	162.367.661.440,06	228.813.076.621,90	102.764.233.721,59	256.272.782.230,23	190.441.915.852,35	27,38%
3	Belanja Subsidi						N/A
4	Belanja Hibah	7.623.412.003,00	8.282.321.030,00	4.431.333.000,00	4.278.388.000,00	27.391.102.575,00	124,73%
5	Belanja Bantuan Sosial	2.307.617.000,00	2.536.842.500,00	117.000.000,00	156.555.000,00	183.445.000,00	-8,62%
6	Belanja Bantuan Keuangan	82.225.956.617,00	99.737.580.795,00	99.470.263.857,00	133.992.004.950,00	58.165.215.815,00	-0,21%
B	Belanja Modal	271.139.541.287,00	154.191.110.789,00	34.015.771.170,00	362.803.238.000,76	159.748.471.277,92	197,38%
1	Belanja Tanah	2.493.255.200,00	1.403.190.580,00	492.445.785,00	4.022.083.585,00	790.607.000,00	131,95%
2	Belanja Peralatan Dan Mesin	7.700.000.130,00	23.976.218.832,00	12.161.973.724,00	58.640.818.568,76	27.265.764.736,00	122,69%
3	Belanja Bangunan Dan Gedung	73.677.910.916,00	78.551.810.888,00	16.859.817.969,00	156.832.046.585,00	83.625.432.770,92	177,90%
4	Belanja Jalan. Irigasi Dan Jaringan	186.867.235.041,00	48.135.987.839,00	4.354.133.692,00	141.090.121.189,00	45.446.641.371,00	726,85%
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	401.140.000,00	2.123.902.650,00	147.400.000,00	2.218.168.073,00	2.620.025.400,00	439,85%
C	Belanja Tak Terduga	378.562.000,00	19.034.848,00	290.624.000,00	0,00	29.074.357.387,00	N/A
1	Belanja Tak Terduga	378.562.000,00	19.034.848,00	290.624.000,00	0,00	29.074.357.387,00	N/A

Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

Proporsi Belanja Operasi sejak tahun 2016 hingga 2020 relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan 16,78 persen atau dengan komposisi sebesar 66,51 persen dari Total Belanja. Rinciannya berturut-turut dari tahun 2016-2020 adalah sebesar 67,26 persen, 80,32 persen, 91,32 persen, 67,45 persen dan 76,9 persen.

Komponen Belanja Operasi di dominasi oleh dua jenis belanja yaitu Belanja Pegawai yang sejak tahun 2015 hingga 2019 rata-rata proporsinya sebesar 55,85 persen. Besaran proporsi Belanja Pegawai periode 2016-2020 berturut-turut adalah 54,38 persen, 46,09 persen, 42,68 persen, 47,51 persen dan 56,05 persen.

Selanjutnya Belanja Barang dan Jasa dengan komposisi rata-rata selama 5 tahun terakhir adalah 34,01 persen. Proporsi Belanja Barang dan Jasa periode 2016-2020 adalah 29,10 persen pada tahun 2015, 36,35 persen pada tahun 2017, 28,49 persen pada tahun 2018, 34,08 persen pada tahun 2019, dan 30,30 persen pada tahun 2020.

Tabel 3. 9 Proporsi Belanja Daerah Terhadap Total Belanja (%) Tahun 2016–2020

Urut	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Belanja Operasional*	67,26	80,32	91,32	67,45	76,90
1	Belanja Pegawai	54,38	46,09	42,68	47,51	56,05
2	Belanja Barang	29,10	36,35	28,49	34,08	30,30
3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
4	Belanja Hibah	1,37	1,32	1,23	0,57	4,36
5	Belanja Bantuan Sosial	0,41	0,40	0,03	0,02	0,03
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan	14,74	15,84	27,57	17,82	9,26
B	Belanja Modal*	32,69	19,67	8,61	32,55	19,55
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,92	0,91	1,45	1,11	0,49
2	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	2,84	15,55	35,75	16,16	17,07
3	Belanja Modal Bangunan Dan Gedung	27,17	50,94	49,56	43,23	52,35
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	68,92	31,22	12,80	38,89	28,45
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,15	1,38	0,43	0,61	1,64
C	Belanja Tak Terduga*	0,05	0	0,07	0	3,56

Urut	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Belanja Tak Terduga	100	100	100	0	100

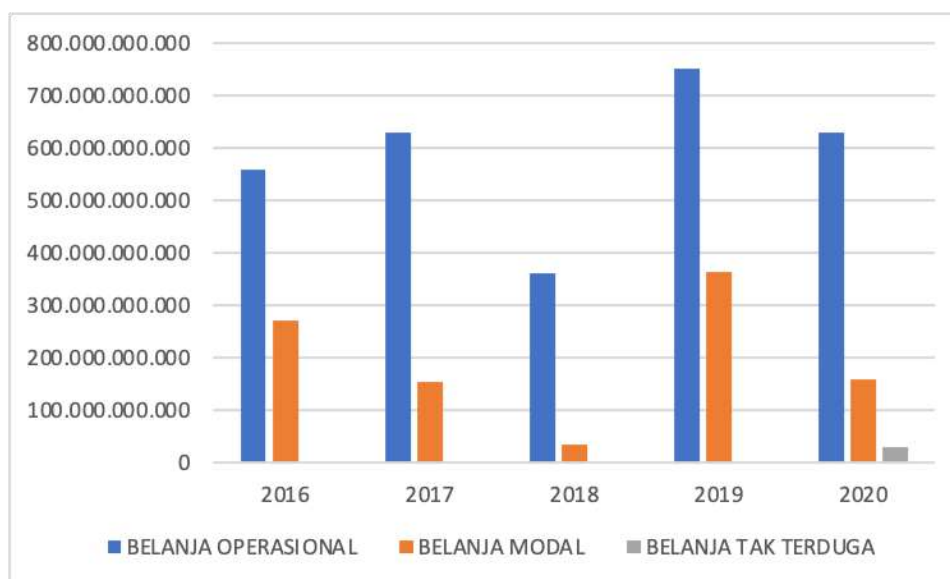
* Belanja Operasional, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga adalah proporsi dari total belanja daerah

Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

Sementara Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan mengambil porsi yang kecil. Untuk Belanja Hibah porsinya semakin mengecil sejak tahun 2016 hingga 2020 dengan rata-rata 1,77 persen. Besaran proporsi Belanja Hibah masing-masing selama periode tersebut adalah 1,37 persen, 1,32 persen, 1,23 persen, 0,57 persen, dan 4,36 persen. Demikian pula Belanja Bantuan Sosial porsinya sangat kecil dan cenderung terus menurun, yaitu mulai 0,41 persen, 0,4 persen, 0,03 persen, 0,02 persen dan 0,03 persen.

Untuk Belanja Modal didominasi oleh Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Rata-rata proporsi dari kedua jenis belanja modal ini masing-masing sebesar 48,43 persen dan 39,63 persen dari total keseluruhan Belanja Modal. Sementara untuk Belanja Peralatan dan Mesin serta Belanja Tanah proporsi rata-rata lima tahun terakhir adalah 10,71 persen dan 0,76 persen sedangkan proporsi Belanja Aset tetap lainnya sebesar 3,44 persen.

Gambar 3. 5 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016–2020 (Rupiah)



Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah



3.1.3 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang berisi tentang aset daerah dan kewajiban daerah serta ekuitas pada waktu atau tanggal tertentu. Nilai komponen Neraca Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini.

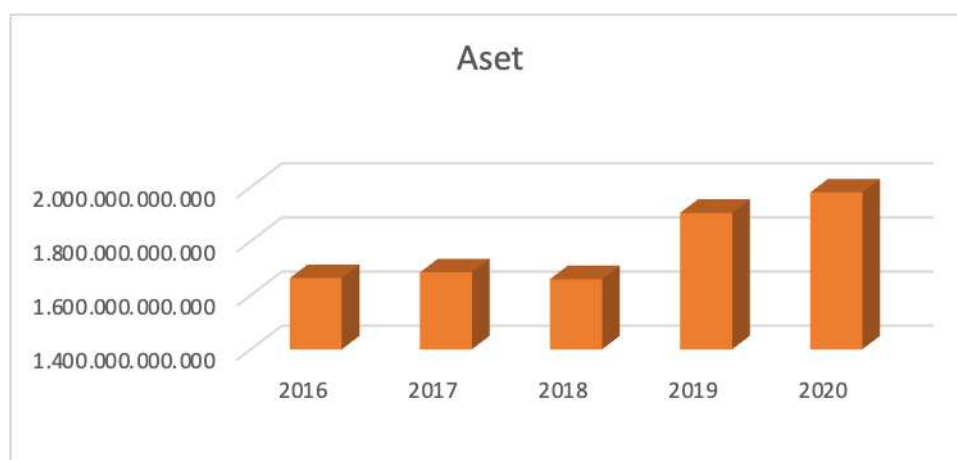
Tabel 3. 10 Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2016–2020 (Rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A. Aset	1.663.369.843.005,41	1.684.665.931.950,97	1.659.742.334.883,99	1.905.003.912.037,80	1.980.524.476.318,22	4,64%
Aset Lancar	117.222.279.584,00	112.608.264.838,66	75.072.031.632,13	126.413.823.567,09	166.527.077.429,58	15,71%
Investasi Jangka Panjang	4.029.350.040,55	4.106.111.273,55	8.603.316.027,50	8.506.546.216,50	9.950.981.696,94	31,82%
Aset Tetap	1.510.198.560.238,04	1.516.405.526.386,04	1.527.265.033.210,12	1.721.529.378.487,21	1.758.946.124.017,43	4,01%
Aset Lainnya	31.919.653.142,82	51.546.029.452,72	48.801.954.014,24	48.554.163.767,00	45.100.293.174,27	12,14%
B. Kewajiban	233.986.734,00	369.567.643,00	9.838.228.895,00	11.410.928.666,00	1.565.123.882,00	637,43%
Kewajiban Jangka Pendek	233.986.734,00	369.567.643,00	9.838.228.895,00	11.410.928.666,00	1.565.123.882,00	637,43%
Kewajiban Jangka Panjang						
C. Ekuitas Dana	1.663.135.856.270,77	1.684.296.364.307,97	1.649.904.219.242,99	1.893.592.983.371,80	1.978.959.352.436,22	4,63%
Jumlah Ekuitas / Ekuitas Dana	1.663.135.856.270,77	1.684.296.364.307,97	1.649.904.219.242,99	1.893.592.983.371,80	1.978.959.352.436,22	4,63%
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana	1.663.369.843.004,77	1.684.665.931.950,97	1.659.742.448.137,99	1.905.003.912.037,80	1.980.524.476.318,22	4,64%

Sumber: Neraca Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

Jumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2016 adalah sebesar Rp1.663.369.843.004,77 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp1.684.665.931.950,97. Selanjutnya tahun 2018 aset yang dimiliki menurun menjadi sebesar Rp1.659.742.334.883,99 dan mengalami sedikit kenaikan relatif besar di tahun 2019 menjadi sebesar Rp1.905.003.912.037,80. Penurunan nilai aset pada tahun 2018 disebabkan turunnya nilai aset lancar sebesar Rp75.072.031.632,13 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp112.608.264.838,66 serta penurunan nilai aset lainnya sebesar Rp48.801.954.014,24 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp51.546.029.452,71. Nilai aset Kabupaten Kepulauan Anambas kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar Rp1.980.524.476.318,22. Perkembangan nilai aset ini dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut:

Gambar 3. 6 Perkembangan Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

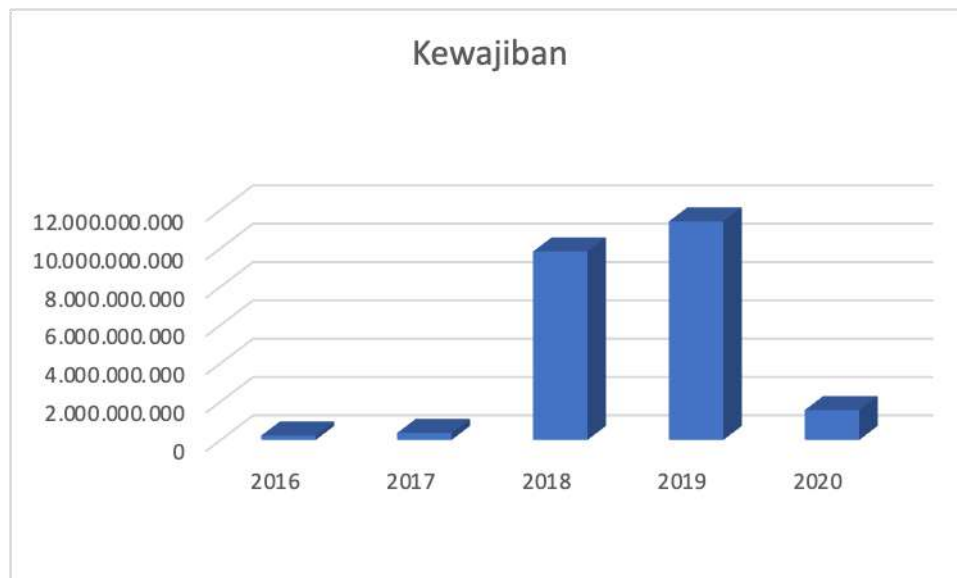


Sumber: Neraca Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

Untuk kewajiban selama rentang tahun 2016 jumlah kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebesar Rp233.986.734,00 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi sejumlah Rp369.567.643,00. Tahun 2018 jumlah kewajiban meningkat tinggi dan mencapai Rp9.838.115.641,00 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar Rp11.410.928.666,00. Nilai kewajiban milik Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami penurunan

pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp1.565.123.882,00. Perkembangan nilai kewajiban ini dapat dilihat pada Gambar 3.7 berikut ini.

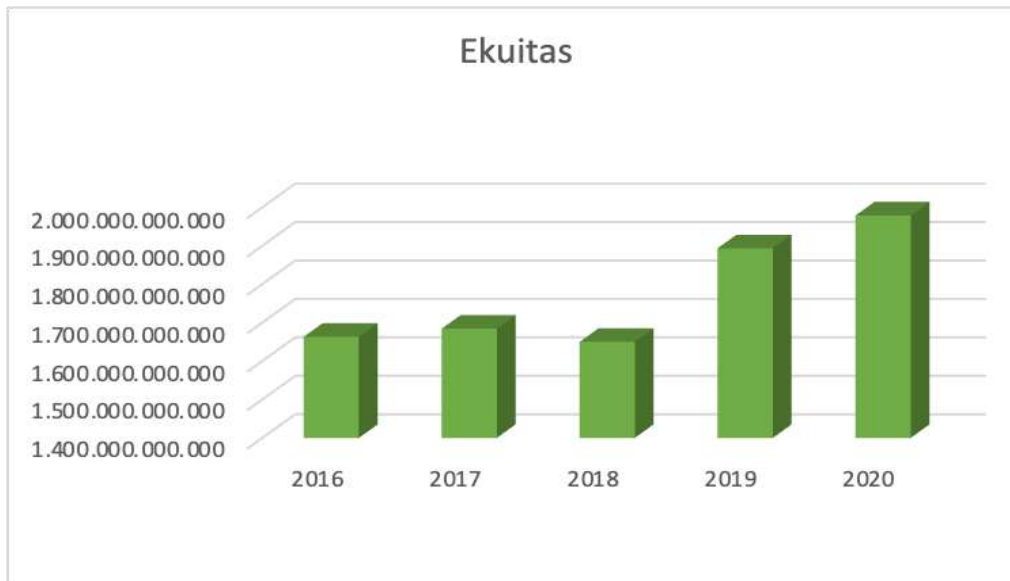
Gambar 3. 7 Perkembangan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2016–2020



Sumber: Neraca Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

Untuk nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2016 adalah sebesar Rp1.663.135.856.270,77 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar Rp1.684.296.364.307,97. Selanjutnya tahun 2018 ekuitas yang dimiliki menurun menjadi sebesar Rp1.649.904.219.242,99 dan mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi sebesar Rp1.893.592.983.371,80. Nilai ekuitas Kabupaten Kepulauan Anambas kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar Rp1.978.959.352.436,22. Perkembangan nilai ekuitas Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 8 Perkembangan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2016–2020



Sumber: Neraca Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

Kondisi kesehatan keuangan daerah juga dapat dilihat dari analisis rasio, yaitu analisis yang menggunakan rasio dari beberapa pos pada laporan keuangan. Terdapat beberapa jenis rasio yang dipergunakan untuk melihat kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui rasio-rasio sebagai berikut:

- Rasio likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio yang digunakan adalah:
 - a. Rasio Lancar (*Current Ratio*), menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya.
 - b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*), menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membandingkan aktiva lancar yang paling likuid dengan kewajiban lancar. Aktiva lancar di sini sifatnya sangat likuid sehingga tidak memperhitungkan nilai persediaan yang sifatnya kurang likuid karena persediaan sulit untuk ditukar dengan kas.

Pada tahun 2016 nilai rasio Kabupaten Kepulauan Anambas yakni sebesar 500,98 untuk rasio lancar dan 452,79 untuk rasio cepat, sehingga

kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar sangat tinggi. Demikian pula selama tahun 2017 dengan rasio lancar sebesar 304,70 dan rasio cepat 271,99. Tahun 2018 dan 2019 jumlah rasio menurun yakni 7,63 dan 11,08 untuk rasio lancar sedangkan untuk rasio cepat sebesar 5,84 dan 8,63. Lalu pada tahun 2020, rasio lancar meningkat tinggi menjadi 106,4 dan rasio cepat juga meningkat tinggi menjadi 88,8. Tabel berikut menggambarkan perkembangan rasio likuiditas keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam kurun waktu 2016–2020:

Tabel 3. 11 Rasio Likuiditas Keuangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016–2020

RASIO LIKUIDITAS	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Current Ratio</i>	500,98	304,70	7,63	11,08	106,4
<i>Quick Ratio</i>	452,79	271,99	5,84	8,63	88,8

Sumber: Neraca Kabupaten Kepulauan Anambas dan Tim Penyusun RPJMD, diolah

- Rasio solvabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memenuhi semua kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang dengan jaminan aktiva maupun ekuitas yang dimiliki pemerintah daerah. Jenis rasio yang digunakan adalah:
 - a. Rasio utang terhadap aset, menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dengan jumlah seluruh aset yang dimilikinya.
 - b. Rasio utang terhadap ekuitas, menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki pemerintah daerah.

Rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 relatif stabil. Tahun 2016 nilai rasio utang terhadap aset maupun rasio utang terhadap ekuitas adalah sebesar 0,0001. Tahun 2017 nilai rasio utang terhadap aset maupun rasio utang terhadap ekuitas adalah sebesar 0,0002. Untuk tahun 2018 dan 2019 dengan rasio utang terhadap aset dan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,01. Tahun

2020 rasio utang terhadap aset dan rasio utang terhadap ekuitas kembali menurun menjadi sebesar 0,001. Tabel berikut menggambarkan perkembangan rasio solvabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam kurun waktu 2016–2020:

Tabel 3. 12 Rasio Solvabilitas Keuangan Kabupaten Kepulauan Anambas 2016–2020

RASIO LIKUIDITAS	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Hutang Terhadap Aset	0,0001	0,0002	0,01	0,01	0,001
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas	0,0001	0,0002	0,01	0,01	0,001

Sumber: Neraca Kabupaten Kepulauan Anambas dan Tim Penyusun RPJMD, diolah

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan dilakukan melalui perhitungan kerangka pendanaan dalam rangka membiayai pembangunan daerah setiap tahunnya. Kerangka pendanaan dalam pengelolaan keuangan dibagi ke dalam tiga prioritas pendanaan, yang kemudian dilakukan penetapan masing-masing persentasenya. Persentase untuk prioritas I adalah sebesar 40 persen, sedangkan untuk prioritas II dan prioritas III masing-masing sebesar 30 persen.

Anggaran 40 persen pada prioritas I digunakan untuk membiayai program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah. Program yang disusun dan dibiayai dengan anggaran prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program prioritas II sebesar 30 persen merupakan program di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Prioritas III sebesar 30 persen untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung¹ seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja yang tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran



Proporsi penggunaan anggaran untuk belanja pegawai dalam kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan meningkat dari sebesar 36,58 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 43,02 persen pada tahun 2020.

Tabel 3. 13 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan pegawai (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	2016	303.379.283.906,00	829.422.034.253,06	36,58%
2	2017	290.155.330.048,00	784.535.296.631,90	36,98%
3	2018	153.947.458.462,00	395.536.684.210,59	38,92%
4	2019	357.208.194.340,00	1.115.211.162.520,99	32,03%
5	2020	352.276.430.743,00	818.780.938.650,27	43,02%

Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

¹ Istilah “belanja tidak langsung” di sini masih digunakan karena mencakup alokasi belanja daerah sebelum dikeluarkannya PP 12 Tahun 2019



3.2.2 Analisis Pembiayaan

Defisit riil anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas selama kurun waktu tahun 2016-2020 hanya terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp 95.861.538.050,00 sedangkan tahun 2017-2020 terjadi surplus anggaran.

Tabel 3. 14 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	929.053.685.759	780.240.497.323	824.839.214.796	1.121.205.421.731	816.788.855.634
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	829.422.034.253	783.735.296.632	395.036.684.211	1.114.711.162.521	817.280.938.650
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	800.000.000	500.000.000	500.000.000	1.500.000.000
	Defisit riil	99.631.651.506	-4.294.799.309	429.302.530.585	5.994.259.210	-1.992.083.016

Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

Sumber penutup defisit riil anggaran terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, dan sebagian kecil dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 15 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	128,62%	99,51%	99,15%	99,85%	99,13%
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-28,62%	0,49%	0,85%	0,15%	0,87%
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016-2020 fluktuatif, dari sebesar Rp 91.769.253.938 pada tahun 2016 menjadi Rp 524.188.506.514 pada tahun 2018 dan Rp 10.096.149.957 pada tahun 2020. Secara rinci Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 16 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Uraian	2016		2017		2018	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	97.769.253.938	100%	94.076.338.671	100%	524.188.506.514	100%
2	Pelampauan penerimaan PAD	34.063.610.954	35%	43.788.185.056	47%	29.626.234.217	6%
3	Pelampauan penerimaan transfer	883.999.234.805	904%	736.452.312.267	783%	795.041.495.529	152%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	10.990.840.000	11%	0	0%	171.485.049	0%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-829.422.034.253	-848%	-783.735.296.632	-833%	-395.036.684.211	-75%
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-1.862.397.569	-2%	97.571.137.981	104%	94.385.975.929	18%
7	Kegiatan lanjutan		0%		0%		0%

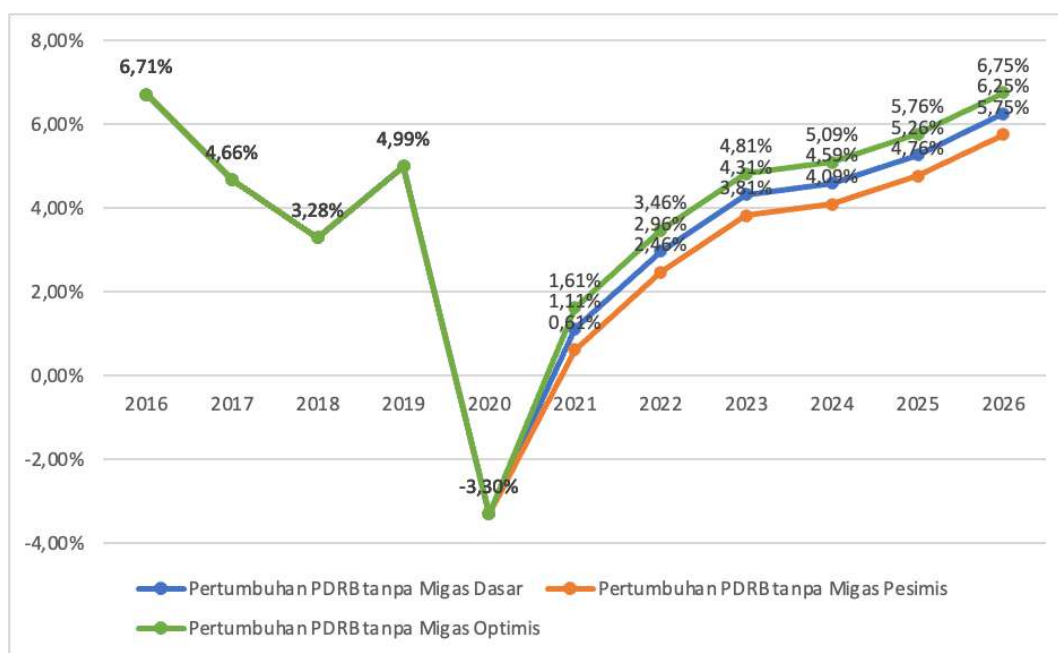
No	Uraian	2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	63.983.386.446	100%	10.096.149.957	100%
2	Pelampauan penerimaan PAD	36.560.321.315	57%	31.634.242.246	313%
3	Pelampauan penerimaan transfer	1.073.857.267.761	1678%	772.384.225.262	7650%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	10.787.832.655	17%	12.770.388.126	126%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	1.114.711.162.521	1742%	869.734.988.650	8615%
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	57.489.127.236	90%	63.042.282.973	624%
7	Kegiatan lanjutan		0%		0%

Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

3.3 Kerangka Pendanaan

Pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ke depan berfungsi untuk melihat potensi aktivitas perekonomian di berbagai sektor. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan total *output* yang dihasilkan. *Output* yang berasal dari faktor tenaga kerja, modal, dan teknologi. Dengan asumsi teknologi yang sama, *output* yang tercermin di dalam PDRB memberikan potensi sumber penerimaan pajak. PDRB yang tinggi menunjukkan adanya indikasi penerimaan pajak yang semakin tinggi pula. Namun, penerimaan pajak juga tergantung sektor apa yang dominan di suatu daerah. Pada tahun 2021 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi (tanpa migas) akan meningkat sebesar 1,11 persen, lalu diproyeksikan akan meningkat terus sebesar 2,96 persen pada tahun 2022, 4,31 persen pada 2023, 4,59 persen pada 2024, 5,26 persen pada 2025, dan 6,25 persen pada 2026. Angka-angka pertumbuhan tersebut merupakan proyeksi dasar untuk pertumbuhan perekonomian tanpa migas, untuk proyeksi yang optimis angka pertumbuhan berada 0,5 persen lebih besar dari pertumbuhan dasar, untuk proyeksi yang pesimis angka pertumbuhan beres 0,5 persen lebih kecil dari pertumbuhan dasar.

Gambar 3. 9 Proyeksi Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026



Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendanai pembangunan lima tahun ke depan. Pendanaan lima tahun ke depan dibuat dengan asumsi sebagai berikut:

3.3.1 Pendapatan

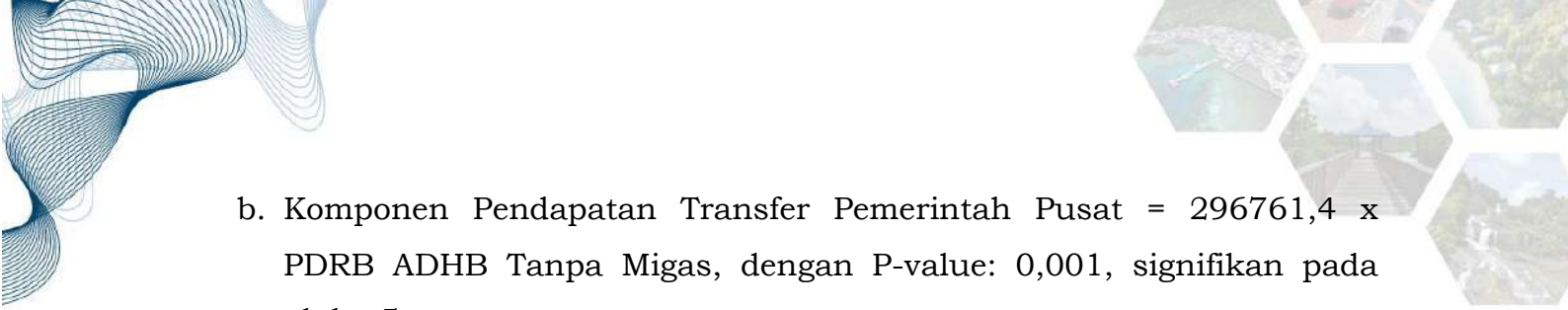
a. Komponen PAD, seperti pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu PDRB ADHB Kepulauan Anambas. Hasil regresi antara variabel-variabel pendapatan asli daerah tersebut dengan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

- Pajak Daerah = $0,00558 \times \text{PDRB ADHB Tanpa Migas}$, dengan P-value: 0,00034, signifikan pada alpha: 5 persen.
- Retribusi Daerah = $0,0007 \times \text{PDRB ADHB Tanpa Migas}$, dengan P-value: 0,054, signifikan pada alpha 10 persen.
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan = $0,00063 \times \text{PDRB ADHB Tanpa Migas}$, dengan P-value: 0,00067, signifikan pada alpha: 5 persen.
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah = $0,00525 \times \text{PDRB ADHB Tanpa Migas}$, P-value: 0,0034, signifikan pada alpha: 5 persen.
- Prediksi PDRB Harga Berlaku Tanpa Migas Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Proyeksi PDRB Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Anambas

Tahun	PDRB HB dengan Migas (Juta Rupiah)
2021	3.033.489,32
2022	3.186.868,61
2023	3.357.671,13
2024	3.548.425,34
2025	3.762.112,05
2026	4.002.260,30

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

- 
- b. Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat = 296761,4 x PDRB ADHB Tanpa Migas, dengan P-value: 0,001, signifikan pada alpha 5 persen.
- c. Komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah = 17257 x PDRB ADHB Tanpa Migas, dengan P-value: 0,001, signifikan pada alpha 5 persen.
- d. Komponen Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan = 3654,3 x PDRB ADHB Tanpa Migas, dengan P-value: 0,001, signifikan pada alpha 5 persen.
- e. Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam meningkatkan Pendapatan adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat lebih banyak ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, upaya peningkatan PAD harus dioptimalkan, dengan jalan:
- Menentukan potensi PAD, baik pajak, retribusi, pendapatan dari BUMD, dan PAD lainnya yang sah. Potensi ini menjadi dasar penentuan target pendapatan.
 - Penguatan Kelembagaan agar pungutan PAD menjadi lebih efisien dan efektif.
 - Upaya intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Upaya ekstensifikasi sumber-sumber PAD dengan tetap merujuk pada UU 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Perbaiki administrasi pendapatan.

3.3.2 Belanja

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan akan lebih meningkatkan belanja modal karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung kebijakan pengembangan pariwisata, perikanan, dan infrastruktur.

Komponen Belanja Operasional:

- a. Belanja Pegawai meningkat per tahun.
- b. Belanja Barang fluktuasi per tahun.
- c. Kebijakan belanja operasi akan terus meningkat setiap tahunnya.



Komponen Belanja Modal:

- a. Belanja Modal akan meningkat setiap tahunnya sampai tahun 2026.
- b. Belanja Tanah dan Infrastruktur Jalan akan meningkat besar untuk mendukung program pariwisata dan infrastruktur.
- c. Belanja modal lainnya akan meningkat dengan peningkatan yang variatif.

Komponen Belanja Tidak Terduga:

- a. Belanja Tidak Terduga terjadi peningkatan dari tahun 2023-2026.
- b. Belanja Tidak Terduga mengalami fluktuatif dari tahun 2023-2026.

Komponen Belanja Transfer:

- a. Belanja Transfer meningkat per tahun.
- b. Belanja Transfer per tahun.
- c. Kebijakan Belanja Transfer akan terus meningkat setiap tahunnya.

3.3.3 Surplus (Defisit)

Surplus (Defisit) diasumsikan: 0, artinya besaran pendapatan sama dengan besaran belanja.

3.3.4 Pembiayaan

Anggaran Pembiayaan bersih (neto) diasumsikan nol, yaitu penerimaan pembiayaan (termasuk Silpa) setiap tahunnya diasumsikan 0, dan pengeluaran pembiayaan juga 0.

Berdasarkan asumsi di atas maka, secara garis besar struktur APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 hingga tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021–2026 Kabupaten Kepulauan Anambas (Rupiah)

URUT	URAIAN	Pertumbuhan Rata-rata (%)	Tahun					
			2021*	2022	2023	2024	2025	2026
			Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran
1	PENDAPATAN	7,55%	1.122.660.844.535	1.191.753.696.345	1.311.018.962.039	1.450.295.313.916	1.529.413.781.886	1.614.041.734.545
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9,55%	38.225.694.968	42.336.035.677	45.911.595.394	50.025.805.491	54.782.584.563	60.310.255.253
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9,41%	17.078.855.000	18.683.390.008	20.289.303.527	22.139.559.274	24.281.732.186	26.774.662.881
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	26,71%	2.183.004.300	4.366.628.147	4.700.997.489	5.082.814.699	5.520.710.921	6.025.233.343
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7,60%	1.982.019.763	2.060.917.139	2.220.925.699	2.403.826.168	2.613.816.304	2.856.032.871
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7,79%	16.981.815.905	17.225.100.382	18.700.368.679	20.399.605.351	22.366.325.153	24.654.326.157
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	7,53%	1.071.100.436.024	1.138.109.469.215	1.252.861.549.733	1.386.946.518.047	1.460.064.889.876	1.537.722.944.388
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7,56%	1.007.710.183.670	1.077.226.614.670	1.186.472.694.627	1.314.186.946.276	1.379.896.293.589	1.448.891.108.269
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7,13%	63.390.252.354	60.882.854.545	66.388.855.106	72.759.571.772	80.168.596.287	88.831.836.119
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4,22%	13.334.713.543	11.308.191.454	12.245.816.912	13.322.990.377	14.566.307.446	16.008.534.905
1.3.1	Pendapatan Hibah	N/A	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	N/A	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4,22%	13.334.713.543	11.308.191.453,56	12.245.816.912,23	13.322.990.376,71	14.566.307.446,28	16.008.534.904,61

URUT	URAIAN	Pertumbuhan Rata-rata (%)	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
			Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran
			2	BELANJA	7,37%	1.132.256.994.494	1.191.753.696.345	1.311.018.962.039
2.1	BELANJA OPERASI	1,49%	739.057.351.962	740.185.515.065	768.965.442.185	771.053.778.102	783.344.560.825	795.388.457.585
2.1.1	Belanja Pegawai	5,00%	313.683.258.742	333.083.481.779	384.482.721.093	385.526.889.051	391.672.280.412	397.694.228.793
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	-1,54%	404.661.563.645	384.526.375.076	361.029.275.106	362.009.748.819	367.780.271.307	373.434.880.836
2.1.3	Belanja Subsidi		-					
2.1.4	Belanja Hibah	3,04%	20.577.814.575	22.205.565.452	23.068.963.266	23.131.613.343	23.500.336.825	23.861.653.728
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	36,40%	134.715.000	370.092.758	384.482.721	385.526.889	391.672.280	397.694.229
2.2	BELANJA MODAL	20,42%	258.136.450.417	309.855.961.050	393.305.688.612	522.106.313.010	581.177.237.117	645.616.693.818
2.2.1	Belanja Tanah	23,32%	230.343.000	309.855.961	393.305.689	522.106.313	581.177.237	645.616.694
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	16,58%	55.001.284.502	55.464.217.028	70.401.718.262	93.457.030.029	104.030.725.444	115.565.388.193
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	31,56%	52.899.740.729	92.956.788.315	117.991.706.584	156.631.893.903	174.353.171.135	193.685.008.145
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	17,42%	147.493.272.637	154.927.980.525	196.652.844.306	261.053.156.505	290.588.618.558	322.808.346.909
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	45,76%	2.511.809.549	6.197.119.221	7.866.113.772	10.442.126.260	11.623.544.742	12.912.333.876
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	20,00%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2.4	BELANJA TRANSFER	5,00%	134.011.638.315	140.712.220.231	147.747.831.242	155.135.222.804	162.891.983.945	171.036.583.142
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL	5,00%	2.250.000.000	2.362.500.000	2.480.625.000	2.604.656.250	2.734.889.063	2.871.633.516
2.4.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5,00%	131.761.638.315	138.349.720.231	145.267.206.242	152.530.566.554	160.157.094.882	168.164.949.626
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5,00%	131.761.638.315	138.349.720.231	145.267.206.242	152.530.566.554	160.157.094.882	168.164.949.626
	SURPLUS (DEFISIT) /	N/A	-9.596.149.959	-	-	-	-	-

URUT	URAIAN	Pertumbuhan Rata-rata (%)	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
			Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran
			3	PEMBIAYAAN	N/A			
3.1	PENERIMAAN DAERAH	N/A	10.596.149.958	-	-	-	-	-
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	N/A	10.096.149.958	-	-	-	-	-
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	N/A	500.000.000	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN DAERAH	N/A	1.000.000.000	-	-	-	-	-
3.2.1	Pemberian Pinjaman Daerah	N/A	1.000.000.000	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	N/A	9.596.149.958	-	-	-	-	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	N/A	-	-	-	-	-	-

*Catatan: Anggaran 2021 sudah merupakan anggaran sementara tahun berjalan 2021

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah





3.3.5 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan diproyeksikan akan terus meningkat dari Rp 309.855.961.050 pada tahun 2022 sampai dengan Rp 645.616.693.818 pada tahun 2026. Perhitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 19 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022-2026 (Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi				
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Pendapatan	1.191.753.696.345	1.311.018.962.039	1.450.295.313.916	1.529.413.781.886	1.614.041.734.545
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran					
	Total Penerimaan	1.191.753.696.345	1.311.018.962.039	1.450.295.313.916	1.529.413.781.886	1.614.041.734.545
	Dikurangi					
4	Belanja Wajib	881.897.735.296	917.713.273.427	928.189.000.906	948.236.544.769	968.425.040.727
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	309.855.961.050	393.305.688.612	522.106.313.010	581.177.237.117	645.616.693.818

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah



Dari perhitungan kapasitas rill, belanja daerah dialokasikan dengan mendasarkan pada prioritas kebutuhan, yang terbagi menjadi Belanja prioritas I dan belanja prioritas II. Di mana prioritas I merupakan belanja prioritas Bupati berdasarkan sektor-sektor unggulan seperti pendidikan, kesehatan, pemulihan ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan SDM yang dimana menjadi program unggulan. Sedangkan Belanja Prioritas II merupakan belanja urusan pemerintahan sesuai di luar Belanja Prioritas I Bupati. Pengalokasian besaran anggaran yang digunakan untuk setiap prioritas yang lebih rinci tersaji dalam tabel 3.20 berikut ini.

Tabel 3. 20 Rencana Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Uraian	Proyeksi				
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	309.855.961.050	393.305.688.612	522.106.313.010	581.177.237.117	645.616.693.818
I	Prioritas I	187.462.856.435	237.949.941.610	315.874.319.371	351.612.228.456	390.598.099.760
1	Pendidikan (20%)	61.971.192.210	78.661.137.722	104.421.262.602	116.235.447.423	129.123.338.764
2	Kesehatan (10%)	30.985.596.105	39.330.568.861	52.210.631.301	58.117.723.712	64.561.669.382
3	Pemulihan Ekonomi (5%)	15.492.798.052	19.665.284.431	26.105.315.650	29.058.861.856	32.280.834.691
4	Infrastruktur (25%)	77.463.990.262	98.326.422.153	130.526.578.252	145.294.309.279	161.404.173.454
5	Peningkatan SDM (0,5%)	1.549.279.805	1.966.528.443	2.610.531.565	2.905.886.186	3.228.083.469
II	Prioritas II dan lainnya	122.393.104.615	155.355.747.002	206.231.993.639	229.565.008.661	255.018.594.058

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah



BAB IV
Permasalahan dan
Isu Strategis Daerah



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD atau RPJPD). Adanya gap ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan, serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Selain itu, dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah, maka dapat ditentukan juga faktor-faktor akar masalah penyebab munculnya “*gap expectation*”. Akar masalah harus dapat diselesaikan agar tidak muncul masalah-masalah baru di kemudian hari. Akar masalah tersebut tentu akan diurutkan dan di pilah mana yang akan diselesaikan dahulu. Karena

itu, nanti akan tercermin dalam prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah.

Untuk merumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka diperlukan tidak hanya data primer dan sekunder yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas, namun juga masukan dari berbagai *stakeholder* yang telah didapatkan melalui FGD. Berikut adalah 5 (lima) kelompok permasalahan pembangunan yang perlu diperhatikan, yakni permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan ekonomi, permasalahan tata kelola pemerintahan, permasalahan infrastruktur, dan lingkungan hidup.

4.1.1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1.1.1. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Analisis atas pengembangan SDM meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, serta pemberdayaan perempuan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Bab II dan FGD yang telah dilakukan, pada aspek SDM teridentifikasi beberapa masalah dalam kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara makro, analisis permasalahan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana disajikan dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 Perumusan Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang belum optimal	Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah	Angka partisipasi sekolah belum optimal
		Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) masih relatif rendah
		Tingkat Kemiskinan relatif tinggi
		Masih minimnya kegiatan pelatihan kerja
	Kinerja kesehatan yang belum optimal	Sarana prasarana kesehatan masih relatif terbatas (termasuk ketersediaan obat – obatan dan kelengkapan alat Kesehatan)

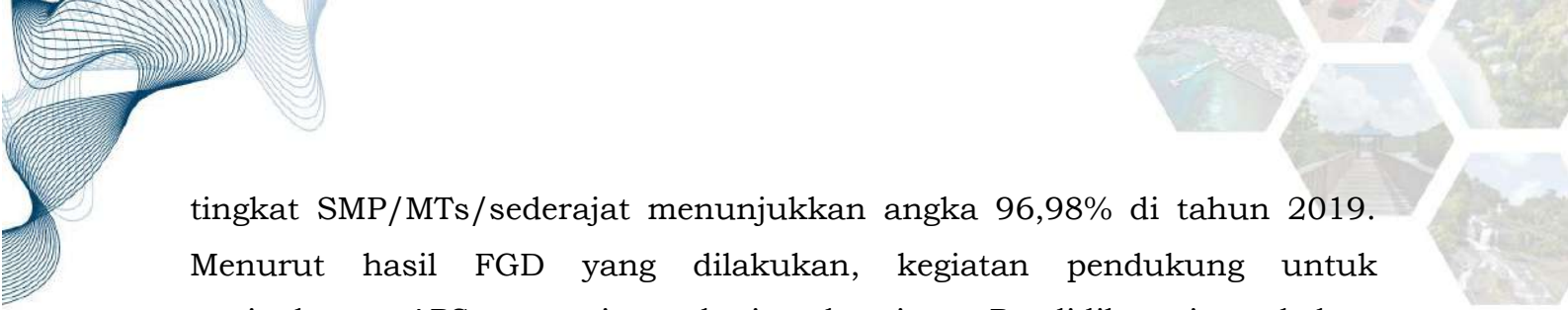
Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		Tenaga kesehatan yang terbatas
		Standar pelayanan minimum kesehatan belum tercapai
		Kurangnya tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana pada saat penanganan pandemi COVID-19
		Masih kurangnya rumah sakit rujukan karena terkendala faktor geografis
		Masih relatif tingginya tingkat penyebaran penyakit menular
		Masih relatif tingginya kasus bayi lahir dengan berat badan rendah
		Masih tingginya angka <i>stunting</i>
		Upaya preventif kesehatan masyarakat masih lemah, karena kesadaran masyarakat yang masih rendah
	Kinerja pendidikan yang relatif rendah	Belum meratanya ketersediaan guru di setiap pulau
		Masih belum optimalnya kompetensi tenaga pendidik dalam penggunaan teknologi
		Masih belum optimalnya sertifikasi kompetensi guru
		Masih relatif kurangnya insentif untuk Tenaga pendidikan yang bersatus PTT
		Besarnya jumlah mutasi guru ASN ke dinas lain maupun wilayah lain
		kurang optimalnya kegiatan belajar mengajar menggunakan metode daring selama pandemi COVID-19 dan peran partisipasi aktif orang tua dalam keberhasilan pendidikan
	Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang belum optimal	Masih belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak
		Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG)
		Perlunya peningkatan alokasi anggaran yang responsif terhadap isu gender

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Pembangunan kebudayaan dan akhlakul karimah yang belum optimal	Belum optimalnya upaya pelestarian budaya lokal dan penanaman nilai – nilai agama
		Masyarakatnya yang majemuk
		Derasnya pengaruh globalisasi yang masuk ke dalam masyarakat lokal
		Muatan lokal untuk materi kebudayaan di sekolah belum diterapkan secara optimal akibat pandemi COVID-19

Sumber: Tim penyusun RPJMD, 2021, diolah

Pokok permasalahan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah belum optimalnya tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun angka menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi IPM di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2019 berada pada angka 68,48 masih di bawah IPM Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukkan angka 75,48 pada tahun 2019 dan tahun 2020 meningkat mencapai 68,80 meskipun masih di bawah angka Kepulauan Riau yang mencapai 75,59 (lihat tabel 2.16). Bahkan Jika dibandingkan dengan IPM di tingkat nasional, maka IPM di Kabupaten Kepulauan Anambas masih lebih rendah karena IPM nasional pada tahun 2020 berada pada angka 71,94 sehingga hal ini hendaknya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah (BPS Nasional).

Beberapa masalah yang perlu diperhatikan dalam hal ini antara lain: Pertama, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat dikatakan relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari Angka partisipasi Sekolah (APS) yang belum optimal, Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) yang masih rendah, dan Tingkat Kemiskinan relatif tinggi. Angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan angka yang belum optimal di semua tingkat pendidikan, baik SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, maupun SMA/MA/ sederajat. Untuk cakupan SD/MI/ sederajat, APS di Kabupaten Kepulauan Anambas memang sudah mencapai 99,31% pada tahun 2019, sedangkan untuk

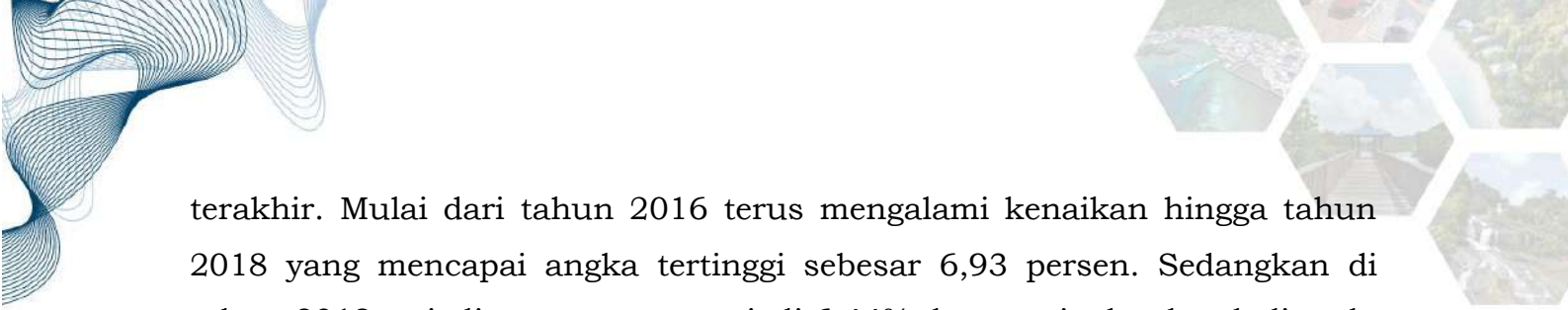


tingkat SMP/MTs/ sederajat menunjukkan angka 96,98% di tahun 2019. Menurut hasil FGD yang dilakukan, kegiatan pendukung untuk peningkatan APS, seperti pemberian beasiswa Pendidikan juga belum maksimal di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sebagian besar beasiswa Pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas masih bersumber dari pemerintah saja, sehingga diperlukan dukungan dari sumber lainnya, misalnya dalam bentuk kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga donor internasional. Selain itu, keberhasilan kualitas Pendidikan dalam kondisi pandemi COVID-19, peran dan partisipasi aktif orang tua turut menentukan hal tersebut.

Selain dari sisi siswa, permasalahan juga muncul dari sisi kompetensi guru sebagai tenaga pendidik. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, hanya terdapat 287 guru yang telah memiliki sertifikasi kompetensi hingga tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tenaga pendidik yang masih lulusan SMA/ sederajat. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengupayakan percepatan peningkatan jumlah guru yang sertifikasi dengan memberikan sertifikasi kepada sebanyak 90 orang guru dari mulai tingkat TK, SD sampai dengan SMP.¹ Meskipun demikian, jumlah ini masih jauh dari cukup untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru secara menyeluruh sebagai tenaga pendidik di tingkat Pendidikan dasar yang ada di Kepulauan Anambas. Oleh karena itu, hal ini masih perlu untuk diperhatikan ke depannya.

Sementara itu, TPAK Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikatakan relatif rendah. Dari tahun 2016, TPAK di Kabupaten Kepulauan Anambas yang semula 64,9 sempat menurun di tahun 2018 menjadi 62,25 dan mengalami sedikit kenaikan di tahun 2019, menjadi 63,63, kemudian meningkat cukup signifikan di tahun 2020 menjadi 68,40 (lihat gambar 2.23). Dengan angka TPAK yang masih belum optimal, maka secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan pada lima tahun

¹ Diakses melalui <http://tanjungpinangpos.id/pemkab-biaya-sertifikasi-guru/> pada tanggal 5 November 2020

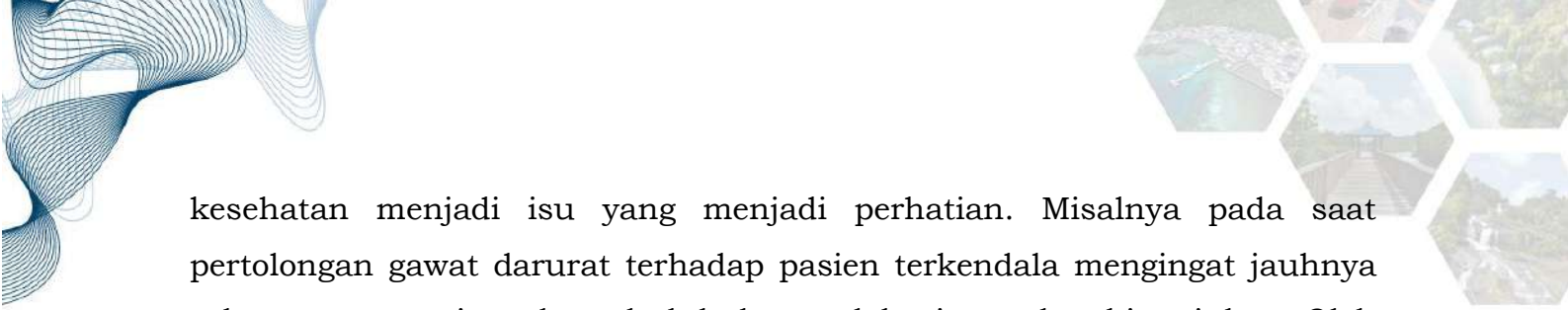


terakhir. Mulai dari tahun 2016 terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 yang mencapai angka tertinggi sebesar 6,93 persen. Sedangkan di tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 6,44% dan meningkat kembali pada 2020 menjadi 6,56% (lihat gambar 2.20). Fenomena ini sejalan dengan nilai PDRB dan pertumbuhan ekonomi Anambas yang memiliki tren menurun.

Hal tersebut yang menjelaskan bahwa perkembangan sektor ekonomi yang lambat turut menyumbang angka kemiskinan. Ditambahkan melalui hasil FGD, masih rendahnya TPAK dikarenakan kegiatan pelatihan kerja yang dapat membekali para calon pencari kerja dirasa masih kurang. Padahal kegiatan tersebut dapat membantu mempersiapkan diri para tenaga kerja untuk mengembangkan kapasitas tenaga kerja yang berdaya saing dan siap masuk ke pasar tenaga kerja.

Kedua, masalah pengembangan sumber daya manusia juga terjadi pada bidang Kesehatan, khususnya masalah kinerja Kesehatan yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti keterbatasan jumlah tenaga Kesehatan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada tahun 2020, terdapat 3 orang dokter spesialis, 14 orang dokter umum, 4 orang dokter gigi, 107 orang bidan serta 175 perawat, 7 apoteker, dan 5 sarjana teknis kefarmasian. Hal ini menyebabkan pelayanan Kesehatan yang dapat diberikan juga memiliki banyak keterbatasan mengingat cakupan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari banyak pulau dan relatif sulit dijangkau. Kedua hal tersebut menyebabkan akses masyarakat terhadap fasilitas Kesehatan yang ada menjadi sangat terbatas dan mutu pelayanan Kesehatan menjadi belum optimal². Keterbatasan tenaga kerja dan cakupan pelayanan Kesehatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas tentunya berpengaruh pada standar pelayanan minimum (SPM) Kesehatan penduduk Anambas yang saat ini masih belum secara optimal tercapai. Kondisi saat ini menunjukkan jumlah rumah sakit yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Anambas hanya ada 3 (tiga) unit yang terletak di Jemaja, Tarempa, dan Palmatak. Dengan kondisi geografis (berbentuk kepulauan), keterjangkauan fasilitas

² Rencana Kerja Dinkes PPKB Kabupaten Kep. Anambas Tahun Anggaran 2019



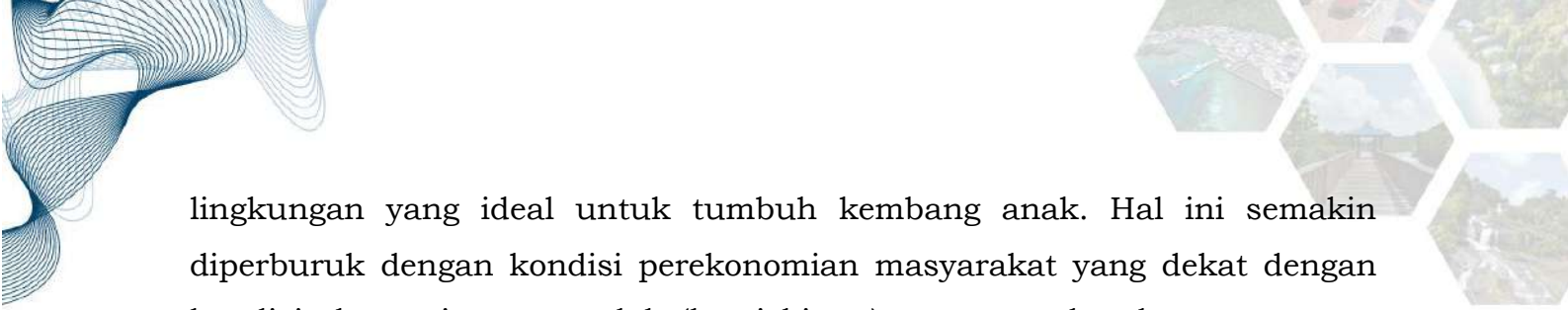
kesehatan menjadi isu yang menjadi perhatian. Misalnya pada saat pertolongan gawat darurat terhadap pasien terkendala mengingat jauhnya sebaran tempat tinggal penduduk dengan lokasi rumah sakit rujukan. Oleh karena itu, pemutakhiran data – data kependudukan juga penting untuk memetakan seberapa banyak fasilitas atau rumah sakit rujukan yang diperlukan di masing – masing wilayah.

Meskipun dengan berbagai keterbatasan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah mulai melakukan inovasi untuk mengatasi hal tersebut dan telah menunjukkan peningkatan capaian kerja yang dapat dilihat dari peningkatan AHH meskipun peningkatannya relatif lambat, namun stabil selama tahun 2016 – 2020. AHH Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2016 mencapai 66,54 dan terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai 67,21 (lihat Gambar 2.28).

Selain itu, lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan juga memberikan peranan terhadap kinerja kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang belum optimal. Hal ini tercermin dengan penyebaran penyakit menular yang masih banyak terjadi³ di Kabupaten Kepulauan Anambas dan tingginya kasus bayi lahir dengan berat badan rendah.⁴ Menurut data tahun 2020, masih terdapat 786 kasus penyakit menular (rincian lihat tabel 2.28) dan 194 kasus balita dengan gizi kurang (rincian lihat tabel 2.29). pada tahun 2020, masih terdapat kasus Berat bayi lahir rendah (BBLR) sebanyak 35 kasus di Anambas (lihat tabel 2.29). Pada tahun yang sama, masih terdapat persentase balita *stunting* sebanyak 15,64% (lihat tabel 2.29). Kasus *stunting* dan berat badan rendah di Kabupaten Kepulauan Anambas disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang telah disebutkan, salah satunya adalah lemahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan. Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan dan kebersihan lingkungan dapat membuat para orang tua memiliki pola asuh anak yang kurang ideal, khususnya terkait kesehatan anak, kebutuhan gizi, dan kebersihan

³ Diakses melalui <https://koranpeduli.co.id/2020/07/17/masyarakat-anambas-perlu-waspada-penyakit-tbc/> , pada tanggal 4 November 2020

⁴ Hasil FGD tim dengan OPD Kabupaten Kepulauan Anambas yang dilaksanakan pada tanggal XX



lingkungan yang ideal untuk tumbuh kembang anak. Hal ini semakin diperburuk dengan kondisi perekonomian masyarakat yang dekat dengan kondisi ekonomi yang rendah (kemiskinan) yang menghambat para orang tua untuk menyediakan kondisi tumbuh kembang anak yang ideal dan mendapatkan akses terhadap fasilitas kesehatan keluarga seperti posyandu, puskesmas, hingga rumah sakit. Selain itu, kondisi perekonomian yang rendah juga menyebabkan banyaknya rumah tangga yang belum memiliki jamban sehat di daerah tinggalnya karena keterbatasan ekonomi. Apalagi, kondisi geografis yang sulit dijangkau ini juga menyebabkan kesulitan dalam hal penyaluran atau akses terhadap air bersih dan sanitasi yang mumpuni. Selain kondisi geografis yang sulit untuk dijangkau, kondisi daerah pesisir menyebabkan air yang dekat dengan masyarakat memiliki kualitas yang kurang baik untuk digunakan sehari – hari.

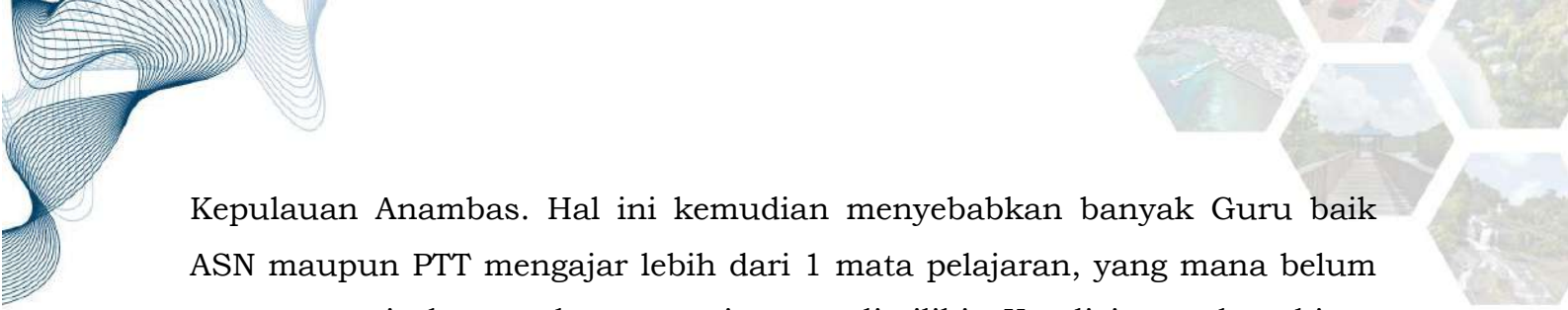
Ketiga, dalam hal pengembangan SDM di bidang Pendidikan, Kabupaten Kepulauan Anambas juga mengalami beberapa permasalahan, seperti: (1) belum meratanya ketersediaan guru di setiap pulau (*unbalanced distribution*).⁵ Asumsi ini diperkuat dengan pernyataan dari OPD yang hadir pada FGD yang dilakukan di Anambas yang menyatakan persebaran guru di Anambas memang belum merata di semua bagian kepulauan; (2) Rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru yang ada terhadap standar Pendidikan yang ada saat ini.⁶ Hal ini terlihat dari banyaknya guru yang belum familiar dengan penggunaan teknologi/aplikasi/internet yang saat ini menjadi salah satu akses utama Pendidikan. Hal ini tentunya menghambat kinerja Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Masih kurangnya jumlah guru di Kabupaten Kepulauan Anambas.⁷ Kekurangan tenaga guru (*shortage*)⁸ mempengaruhi cakupan pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini sebenarnya sudah diupayakan oleh pemerintah melalui Guru PTT, namun penambahan guru PTT masih belum cukup memenuhi kebutuhan guru di Kabupaten

⁵ Diakses melalui <https://koranbatam.com/potret-pendidikan-di-daerah-3-t-kepulauan-riau> pada tanggal 4 Novemebr 2020

⁶ *Ibid.*

⁷ Diakses melalui <https://batamos.co.id/2018/07/31/anambas-kekurangan-tenaga-guru/> pada tanggal 4 November 2020

⁸ *Op.Cit.*, <https://koranbatam.com/potret-pendidikan-di-daerah-3-t-kepulauan-riau> pada tanggal 4 November 2020



Kepulauan Anambas. Hal ini kemudian menyebabkan banyak Guru baik ASN maupun PTT mengajar lebih dari 1 mata pelajaran, yang mana belum tentu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kondisi tersebut biasa disebut dengan *mismatched* yang dapat berdampak pada penurunan kualitas Pendidikan dikarenakan ketidaksesuaian keahlian/kompetensi guru yang seharusnya dalam suatu mata ajar.⁹ Apabila dibiarkan, tentunya hal ini akan terus menjadi hambatan peningkatan kualitas Pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Apalagi, ketiga hal di atas semakin diperparah dengan banyaknya kasus mutasi para ASN guru¹⁰ dari dinas Pendidikan ke OPD lain di Kabupaten Kepulauan Anambas, atau bahkan ke wilayah kabupaten/kota lain. Pada tahun 2016, terdapat 389 orang ASN yang melakukan mutasi dan menyebabkan Anambas kekurangan jumlah ASN, dari yang semula terdapat 1.854 orang ASN menjadi 1.465 orang ASN.¹¹ Hal ini kemudian membuat Anambas harus didukung oleh tenaga PTT agar fungsi pemerintahan dapat tetap berjalan. Keinginan ASN untuk mutasi dari Anambas ternyata masih terlihat hingga tahun 2020. Pada bulan Januari – Agustus, Mendagri melakukan penolakan terhadap 8 pengajuan mutasi dari Kabupaten Kepulauan Anambas.¹²

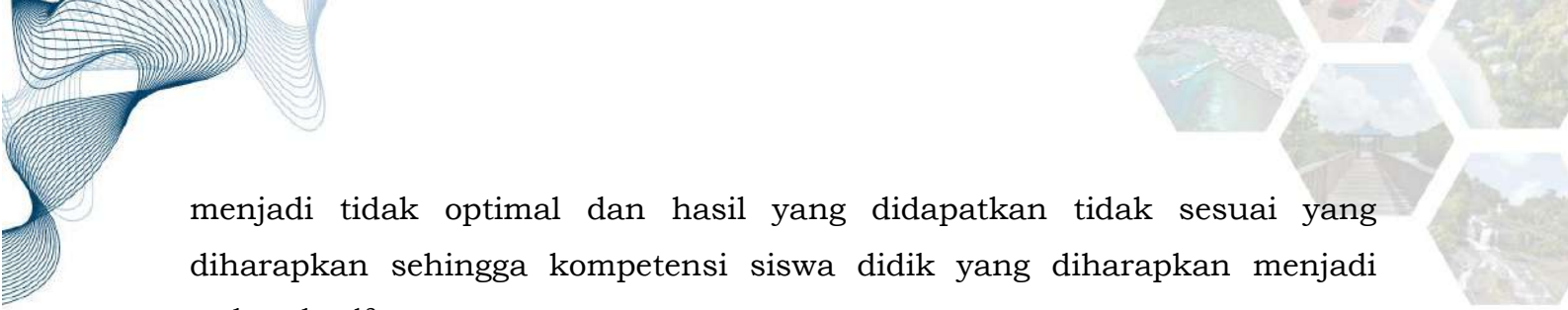
Sementara itu, hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang turut membuat kinerja dan kualitas pendidikan berpotensi menurun. Hal ini dikarenakan untuk menghindari penyebaran COVID-19, Pemerintah Pusat maupun Daerah memutuskan metode belajar mengajar yang semula tatap muka menjadi daring atau *online*. Perubahan metode pembelajaran menjadi daring tersebut menjadi tantangan tersendiri karena munculnya berbagai kendala, antara lain masih kurangnya pemahaman guru dan siswa dalam penggunaan teknologi, dibutuhkan perangkat pendukung (laptop, ponsel dsb. untuk mengakses aplikasi yang digunakan sekolah), serta belum meratanya akses jaringan internet, sehingga terdapat kekhawatiran proses belajar mengajar

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Diakses melalui <https://batam.tribunnews.com/2020/11/15/guru-di-anambas-masih-minim-kadisdikpora-nurman-sudah-jadi-pns-malah-minta-pindah?page=2> pada tanggal 5 November 2020

¹¹ Diakses melalui <http://ppid.anambaskab.go.id/page/content/202/anambas-kekurangan-pegawai> pada tanggal 5 November 2020

¹² Diakses melalui <https://nasional.okezone.com/read/2020/09/11/337/2276212/mendagri-tolak-4-156-usulan-mutasi-pns-periode-januari-agustus-2020> pada tanggal 5 November 2020



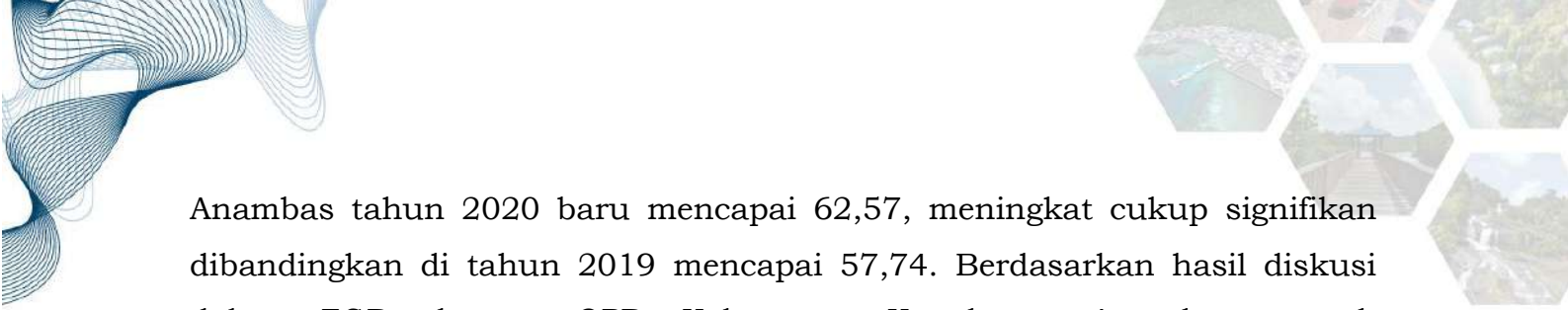
menjadi tidak optimal dan hasil yang didapatkan tidak sesuai yang diharapkan sehingga kompetensi siswa didik yang diharapkan menjadi terhambat¹³.

Keempat, aspek lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam bidang SDM adalah berkaitan dengan pengarusutamaan gender. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, Persentase PD yang Responsif Gender dan Persentase Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang mendapat Pendampingan memang sudah mencapai 100% (lihat tabel. 2.64). Namun demikian, kesetaraan gender/pengarusutamaan gender memang masih menjadi hal yang baru. Hal ini diindikasikan dari masih belum optimalnya implementasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, kesetaraan gender baik dalam masyarakat maupun pemerintahan, serta alokasi anggaran yang belum semuanya responsif terhadap isu gender.

Jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan bahwa jumlah laki – laki lebih memang banyak daripada perempuan, namun hal tersebut sebaiknya tidak menjadi hambatan bagi perempuan untuk aktif di masyarakat. Menurut data tahun 2016-2020, perbedaan jumlah ASN perempuan dan laki – laki perlahan semakin menipis (lihat tabel 2.63). Di tahun 2020, jumlah ASN perempuan sudah mencapai 49% dari jumlah total ASN (lihat tabel 2.63). Selain itu, indeks pembangunan gender (IPG) Kabupaten Kepulauan Anambas terus meningkat secara stabil dari tahun 2016-2020. Di tahun 2016, IPG Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan angka 89,97 dan terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 90,27 (lihat tabel 2.64).

Secara makro, meskipun IPG Kabupaten Kepulauan Anambas sudah cukup tinggi, ternyata belum didukung dengan berbagai kondisi di lapangan seperti yang telah disebutkan di atas yang tentunya berpengaruh pada perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Meskipun secara konsisten meningkat sejak tahun 2016, IDG kabupaten Kepulauan

¹³ Diakses melalui <https://kumparan.com/ulfa-hikmah/tantangan-pembelajaran-daring-ditengah-pandemi-covid-19-1tyWr4BzkCe/full>

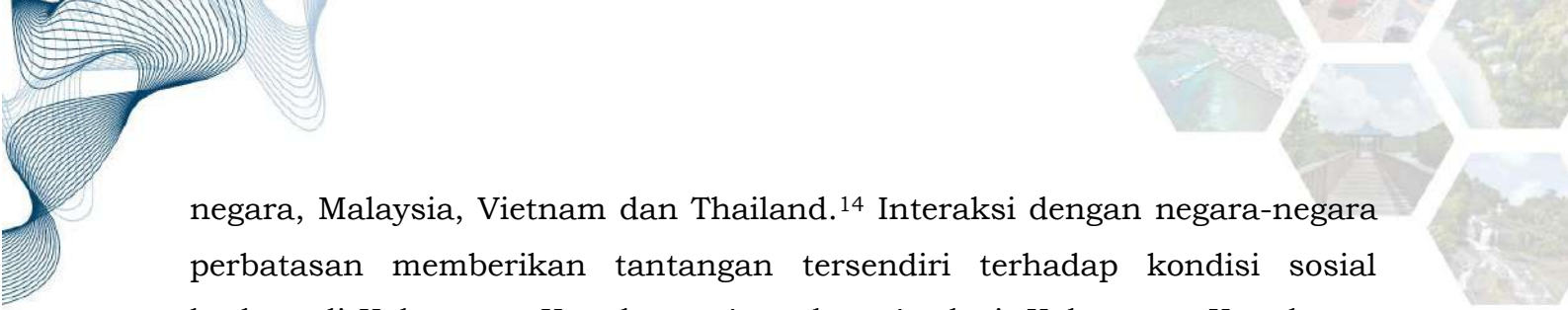


Anambas tahun 2020 baru mencapai 62,57, meningkat cukup signifikan dibandingkan di tahun 2019 mencapai 57,74. Berdasarkan hasil diskusi dalam FGD dengan OPD Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk mendukung peningkatan IDG pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, maka diperlukan meningkatkan alokasi anggaran yang responsif gender. Oleh karena itu, untuk selanjutnya, dapat dipertimbangkan untuk mencantumkan program responsif gender dalam RPJMD agar isu ini dapat tertangani dengan baik.

Sementara IPG dan IDG sudah menunjukkan indikasi pertumbuhan yang konsisten, hal yang cukup berbeda terjadi di ranah politik. Dari segi keterwakilan, hanya terdapat 2 orang anggota DPRD/wakil rakyat berjenis kelamin perempuan dari keseluruhan total 20 orang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas atau secara persentase hanya sekitar 10% dari keseluruhan anggota DPRD di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dari segi perlindungan terhadap anak dan perempuan, Kabupaten Kepulauan Anambas juga perlu melakukan perbaikan dikarenakan masih terdapatnya berbagai kasus kekerasan maupun pelecehan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini diperburuk dengan kondisi pandemi COVID-19 yang ternyata berpengaruh pada peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kelima, adalah berkaitan dengan Pembangunan kebudayaan dan penanaman nilai – nilai agama yang belum optimal. Sebagai daerah 3T, tentu Kabupaten Kepulauan Anambas banyak berinteraksi dengan budaya dari luar Indonesia. Oleh karena itu, perlu upaya yang tepat untuk mempertahankan nilai – nilai sosial, budaya, dan agama di masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas agar tidak mudah terkikis dengan maraknya globalisasi dan akulturasi budaya yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kepulauan Anambas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di tiga perbatasan



negara, Malaysia, Vietnam dan Thailand.¹⁴ Interaksi dengan negara-negara perbatasan memberikan tantangan tersendiri terhadap kondisi sosial budaya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Apalagi, Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri sudah memiliki karakter masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari suku Melayu, China, Padang, dan Suku Jawa yang mendiami daerah transmigrasi.

Dalam upaya pelestarian budaya, beberapa hal telah dilakukan, Kabupaten Kepulauan Anambas seperti menggelar festival, perlombaan budaya, hingga beragam kelompok pegiat seni dan sanggar kesenian (lihat tabel 2.98). Sedangkan dari sisi agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Kepulauan Anambas cukup aktif dan rutin mengadakan pertemuan yang berperan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Kepulauan Anambas. Bahkan, Kabupaten Kepulauan Anambas sudah memiliki Desa Sadar Kerukunan yang menjadi desa percontohan untuk kerukunan umat beragama. Desa tersebut adalah Desa Sri Tanjung yang terletak di Kecamatan Siantan. Harapannya, warga dapat terus menjaga kerukunan dan saling menjaga kerukunan antar umat beragama dan memiliki akhlakul karimah dalam hidup bermasyarakat dan saling berdampingan.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyediakan sarana dan upaya sebagai pelestarian budaya dan penerapan nilai – nilai agama di Kabupaten Kepulauan Anambas, akan tetapi menurut FGD yang dilakukan Bersama para OPD, kondisi di lapangan masih menunjukkan pelaksanaan yang kurang optimal dan terintegrasi dan belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Kegiatan komunitas dan para penggiat yang mencerminkan budaya Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki cakupan yang belum begitu luas dan belum sepenuhnya terimplementasi dalam kehidupan sehari – hari. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berencana untuk memberikan Pendidikan muatan lokal dan memperkuat substansi

¹⁴ Diakses melalui <https://travel.detik.com/travel-news/d-5008909/tak-kenal-maka-tak-sayang-ini-anambas-nirwana-di-laut-china-selatan> pada tanggal 5 November 2020

pembelajaran nilai - nilai agama di sekolah untuk para siswa di Kabupaten Kepulauan Anambas, agar nilai – nilai social, budaya, dan akhlakul karimah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat sampai kepada para siswa dan dapat berperan dalam membangun sumber daya manusia Anambas di masa depan. Secara umum, program muatan lokal dan penerapan nilai – nilai keagamaan bertujuan agar para siswa memiliki kompetensi dalam penguasaan aspek pengetahuan, keterampilan praktis, maupun pemilik sifat positif dalam memelihara dan mengembangkan aspek muatan lokal yang menjadi ciri khas dari daerahnya.¹⁵ Sayangnya, program ini belum dapat dilaksanakan secara optimal salah satunya disebabkan oleh Pandemi COVID – 19 yang menyebabkan perlunya *refocusing* anggaran dan perubahan media pembelajaran menjadi daring.

4.1.1.2. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 4. 2 Perumusan Permasalahan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kinerja tata kelola pemerintah daerah belum optimal	Fungsi evaluasi dan pengawasan yang belum berjalan dengan baik	Belum tertatanya peraturan mengenai evaluasi dan pengawasan pembangunan
		Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat belum berjalan dengan maksimal
	Masih adanya pelanggaran transparansi dan akuntabilitas	Sistem monitoring dana pemerintah yang belum berjalan baik dan
		Penegakan hukum yang belum optimal (Perda)
Kinerja pemerintahan daerah yang belum	Masih adanya organ tata kelola (ortala) yang belum fokus pokok dan fungsinya.	



¹⁵ Diakses melalui <https://baperlitbangkarimun.com/2018/08/30/sosialisasi-kajian-pengembangan-sumber-daya-manusia-berbasis-muatan-lokal-provinsi-kepulauan-riau-tahun-2016/> pada tanggal 5 November 2020

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	efektif dan efisien	
Kinerja aparatur pemerintahan daerah belum optimal	Kapasitas kinerja aparatur pemerintahan yang masih terbatas	Besarnya jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengajukan kepindahan.
		Tingkat pendidikan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang masih terbatas pada tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA)
		Peningkatan kompetensi pegawai belum optimal.
		Belum terintegrasinya data kepegawaian dalam satu <i>database</i> yang lengkap.

Sumber: Tim penyusun RPJMD, 2021, diolah

Secara garis besar, terdapat dua pokok permasalahan yang perlu dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam lingkup pembangunan tata kelola pemerintahan ke depannya. Penentuan pokok permasalahan dilakukan berdasarkan analisis data yang telah disajikan pada Bab II dan hasil FGD. Pokok permasalahan yang pertama adalah kinerja tata kelola Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas yang belum berjalan secara optimal. Pokok permasalahan yang kedua adalah kinerja aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang belum optimal. Setiap pokok permasalahan tersebut kemudian dibagi menjadi masalah dan akar masalah dengan uraian sebagai berikut ini.

Pada pokok permasalahan pertama, terdapat tiga permasalahan. Permasalahan pertama adalah fungsi evaluasi dan pengawasan yang belum berjalan dengan baik. Akar permasalahan dari permasalahan ini adalah belum tertatanya peraturan mengenai evaluasi dan pengawasan pembangunan. Permasalahan ini didasarkan pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas 2005 – 2025 dan kemudian diejawantahkan dalam kebijakan evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan



kedepan.¹⁶ Berdasarkan data yang tersedia, pencapaian tindak lanjut dari hasil pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2020 adalah 83,64% tindak lanjut dari rekomendasi BPK, 50,33% tindak lanjut dari rekomendasi inspektorat kabupaten, dan hanya 33,33% tindak lanjut dari rekomendasi Inspektorat Provinsi, (lihat tabel 2.139). Untuk capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Kabupaten Kepulauan Anambas dari BPKP tercatat ada di tahun 2019 sebesar 90% (lihat tabel 2.139).

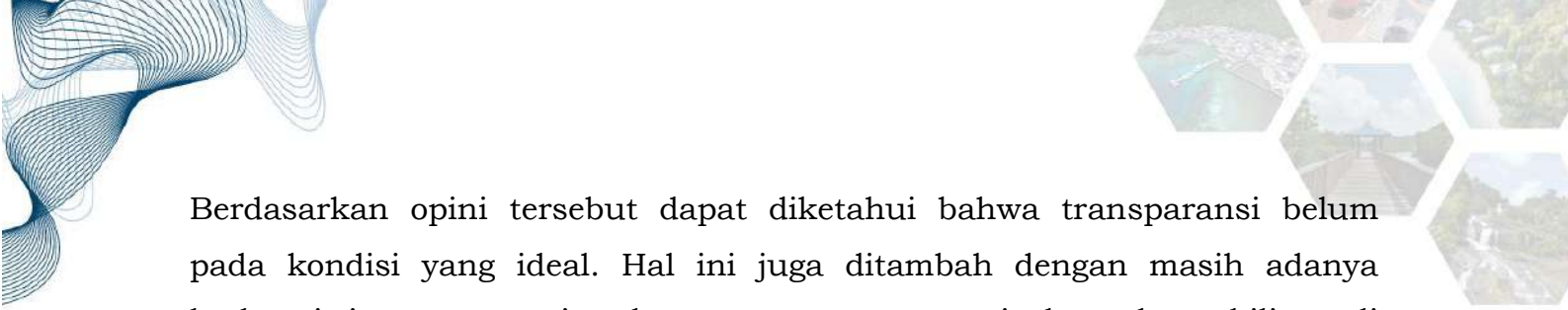
Hal yang menjadi catatan dalam hasil pengawasan ini adalah rendahnya tindak lanjut pada rekomendasi inspektorat kabupaten dan provinsi. Hal ini memberikan indikasi bahwa peraturan mengenai tindak pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas masih perlu dievaluasi sebagaimana juga terkait pengawasan dan hubungan dengan pemerintah provinsi dalam hal ini khususnya melalui Inspektorat. Kondisi ini erat kaitannya dengan akar permasalahan selanjutnya yaitu pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat belum berjalan dengan maksimal.¹⁷ Terdapat beberapa alasan belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat.¹⁸ Pertama, belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Kedua, alokasi anggaran inspektorat yang terbatas. Ketiga, minimnya kualitas kapasitas personil akibat belum optimalnya pendidikan dan pelatihan khusus di bidang pembinaan dan pengawasan. Dan yang keempat, minimnya kuantitas dan kualitas personil yang disebabkan kurangnya ketersediaan pegawai khususnya di bidang audit.

Permasalahan kedua dari pokok permasalahan pertama adalah masih adanya pelanggaran transparansi dan akuntabilitas. Mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam bidang anggaran dapat dilihat dari opini BPK atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Selama 2014-2020, Kabupaten Kepulauan Anambas memperoleh opini WTP dari BPK, kecuali tahun 2016 mendapatkan opini WDP (lihat tabel 2.138).

¹⁶ Rancangan Teknokratik RPJMD KKA 2021-2025. Hal. 13

¹⁷ Hasil FGD

¹⁸ Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021.



Berdasarkan opini tersebut dapat diketahui bahwa transparansi belum pada kondisi yang ideal. Hal ini juga ditambah dengan masih adanya berbagai isu mengenai pelanggaran transparansi dan akuntabilitas di tengah masyarakat seperti misalnya penggunaan dana anggaran publikasi sekretariat Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2017 yang dinilai nihil transparansi.¹⁹

Terdapat dua akar permasalahan dari permasalahan transparansi dan akuntabilitas yaitu sistem monitoring anggaran pemerintahan yang belum berjalan optimal dan penegakan hukum yang belum optimal. Belum optimalnya monitoring anggaran pemerintahan ini terlihat dari banyaknya proyek pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang tidak mempublikasikan papan penggunaan anggaran.²⁰ Adapun masalah penegakan hukum terkait permasalahan transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat masih adanya berbagai dugaan korupsi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas.²¹ Pada tahun 2017 Kabupaten Anambas dan Natuna merupakan dua kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang paling banyak terjerat korupsi.²² Adapun tindakan korupsi yang paling banyak dilakukan adalah korupsi pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan jabatan, dan korupsi perizinan.²³ Dengan begitu, kedepannya pengetatan sistem monitoring anggaran dan penegakan hukum perlu dioptimalkan untuk mempersempit ruang pelanggaran transparansi dan akuntabilitas.

Permasalahan ketiga dari pokok masalah pertama adalah kinerja pemerintah daerah yang belum efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari adanya organ tata laksana pemerintahan yang belum fokus tugas pokok dan fungsinya yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.²⁴ Dampak dari tidak fokusnya pada tugas pokok dan fungsi dalam sebuah satuan organ

¹⁹ Diakses melalui: <https://www.oborkeadilan.com/2017/12/nihil-transparansi-rp-28-m-dana.html> pada 18 maret 2021

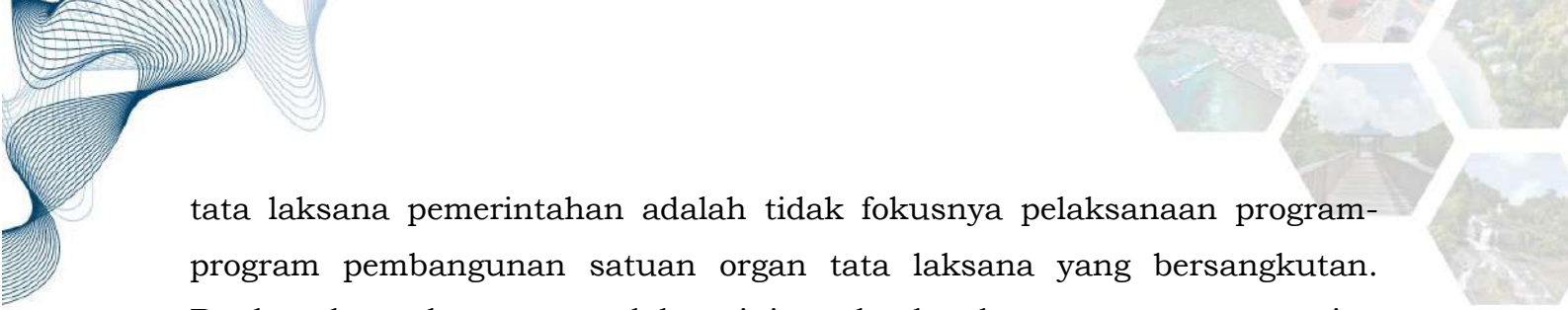
²⁰ Diakses melalui: <https://seputarkepri.co.id/2019/08/25/diduga-banyak-proyek-siluman-pembangunan-di-kabupaten-anambas/> pada 18 maret 2021

²¹ Rancangan Teknokratik RPJMD KKA 2021-2025. Hal. 176

²² Diakses melalui: <https://regional.kompas.com/read/2018/02/06/08550721/anambas-dan-natuna-tertinggi-kasus-korupsi-di-kepri> pada 18 maret 2021

²³ Diakses melalui: <https://batam.tribunnews.com/2020/02/27/bupati-abdul-haris-sebut-anambas-raih-peringkat-2-program-pencegahan-korupsi-ingatkan-lhkpn?page=2> pada 18 maret 2021

²⁴ Hasil FGD



tata laksana pemerintahan adalah tidak fokusnya pelaksanaan program-program pembangunan satuan organ tata laksana yang bersangkutan. Berdasarkan akar permasalahan ini, maka ke depannya sangat penting untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan evaluasi dan penguatan fokus pada tugas pokok dan fungsi organ pelaksana pemerintahan secara khusus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan secara umum organisasi dan tata laksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Anambas.

Pada pokok permasalahan yang kedua dalam lingkup pembangunan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas, permasalahan yang muncul adalah kapasitas kinerja aparatur pemerintahan yang masih terbatas.²⁵ Terkait permasalahan ini terdapat empat akar permasalahan. Akar permasalahan yang pertama adalah terus berkurangnya jumlah pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas.²⁶ Sejak awal tahun 2016, jumlah ASN yang mengajukan kepindahan terdapat sekitar 400 orang.²⁷ Di awal tahun 2016 jumlah ASN di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 1.854 orang. Namun di tahun 2017, sebagai akibat besarnya jumlah pegawai yang pindah, jumlah ASN menjadi 1.465 orang.²⁸ Adapun alasan kepindahan ASN dari Kabupaten Kepulauan Anambas adalah karena jauh dari keluarga yang memiliki tempat kerja terpisah di luar Kepulauan Anambas.²⁹ Sebagai akibat dari besarnya perpindahan ASN, daerah Kepulauan Anambas menjadi kekurangan ASN khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kekurangan jumlah personil pegawai ini kemudian berdampak pada penurunan kinerja pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Anambas.

Akar permasalahan yang kedua adalah tingkat pendidikan Pegawai Tidak Tetap (PTT) masih sebatas Sekolah Menengah Atas.³⁰ Belum adanya penambahan ASN oleh Menpan RB pada tahun 2017 kemudian membuat

²⁵ Hasil FGD

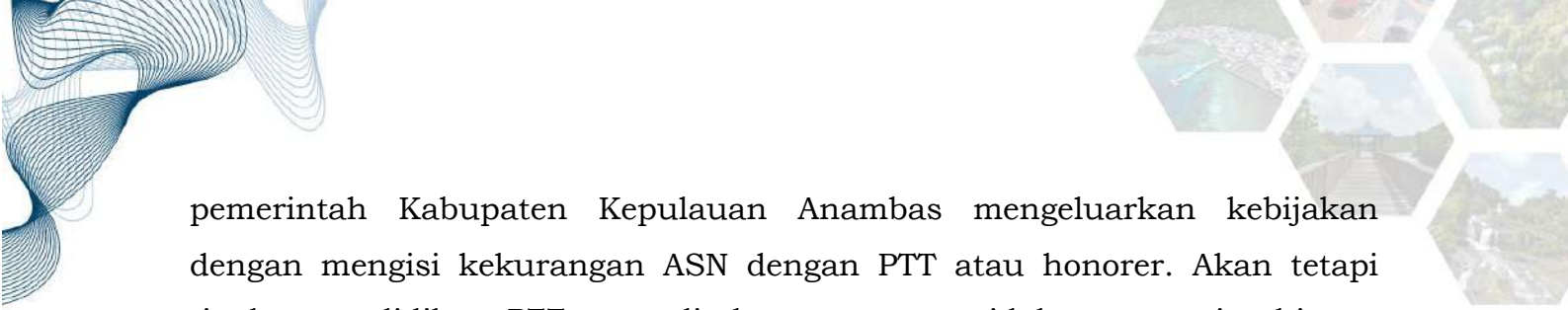
²⁶ Hasil FGD

²⁷ Diakses melalui: <https://batampos.co.id/2017/02/09/pak-gubernur-400-asn-di-anambas-minta-pindah-anambas-kekurangan-pegawai/> pada 19 maret 2021

²⁸ Diakses melalui: <https://www.hariankepri.com/jumlah-asn-anambas-menyusut-400-orang-2/> pada 19 maret 2021

²⁹ Diakses melalui: <https://sijorikepri.com/ratusan-pns-anambas-ajukan-pindah-keluar-daerah/> pada Maret 2021

³⁰ Hasil FGD



pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengeluarkan kebijakan dengan mengisi kekurangan ASN dengan PTT atau honorer. Akan tetapi tingkat pendidikan PTT yang direkrut nyatanya tidak mumpuni sehingga berdampak pada kapasitas kinerja pemerintahan.³¹ Masih rendahnya tingkat pendidikan pegawai PTT dan banyaknya ASN yang pindah menyebabkan terbatasnya jumlah pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas yang professional dalam bidang kebijakan publik dan bidang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini kemudian berdampak pada kinerja kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada 19 perangkat daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2018, terdapat 5 perangkat daerah yang mendapat nilai B atau baik, 10 perangkat daerah yang mendapat nilai CC atau cukup, dan 4 perangkat daerah yang mendapat nilai C atau kurang. (lihat tabel 2.130). Hal yang menjadi catatan penting dari data tersebut adalah bahwa kinerja perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum ideal yaitu nilai A. Selain itu, jumlah perangkat daerah yang mayoritas masih mendapatkan nilai cukup dan kurang perlu mendapatkan perhatian dari pemimpin daerah ke depannya.

Akar permasalahan selanjutnya yang berdampak pada kapasitas kinerja pemerintah Kabupaten Anambas adalah peningkatan kemampuan pegawai yang dilakukan melalui diklat teknis belum berjalan.³² Akar permasalahan terakhir adalah belum terintegrasinya data kepegawaian dalam suatu sistem database dengan lengkap. Adapaun database yang dimaksud adalah Sistem Informasi Kepegawaian berbasis E-Kinerja. Sistem ini memuat riwayat pegawai dalam hal pendidikan, keluarga, gaji, diklat, dan sebagainya. Melalui sistem E-Kinerja dapat dilakukan penghitungan kinerja ASN dan melakukan pembayaran gaji dan tunjangan dengan *single salary system*.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebenarnya sudah memberlakukan sistem database *online*, akan tetapi pelaksanaannya belum

³¹ Hasil FGD

³² Hasil FGD

optimal dan masih pada tahap belajar lebih detail mengenai penggunaan sistem kepegawaian.³³ Adapun sistem informasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah SIMDA *Integrated*. Namun, kebijakan pemerintah mengganti SIMDA menjadi SIPD membuat Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan adaptasi. Dalam proses adaptasi tersebut muncul permasalahan berupa terhambatnya pemberian gaji pegawai akibat belum sempurnanya sistem SIPD.³⁴ Ke depannya pelatihan yang optimal untuk dapat menerapkan sistem kepegawaian yang komprehensif perlu dilakukan. Hal ini untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

4.1.1.3. Permasalahan Lingkungan Hidup

Tabel 4. 3 Perumusan Permasalahan Pembangunan Lingkungan Hidup

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Penanganan permasalahan kerusakan lingkungan yang masih belum optimal.	Persentasi sampah yang dapat ditangani dari keseluruhan sampah yang dihasilkan masih sangat kecil.	Adanya sampah kiriman dari daerah lain dalam jumlah besar.
		Belum tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan mesin untuk mengolah sampah, yang memadai untuk dapat melakukan penanganan permasalahan sampah.
Penanganan permasalahan air bersih belum dilakukan secara optimal.	Masih terjadinya masalah kekurangan air pada masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.	Tangkapan hujan Kabupaten Kepulauan Anambas yang rendah.
Tanggap darurat kebencanaan yang belum terlaksana	Ancaman bencana yang masih relatif tinggi di Kabupaten Kepulauan	Masih tingginya intensitas bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas

³³ Diakses melalui <https://banyuwangikab.go.id/berita-daerah/pemkab-kepulauan-anambas-riau-belajar-e-kinerja-ke-banyuwangi.html> pada 19 maret 2021

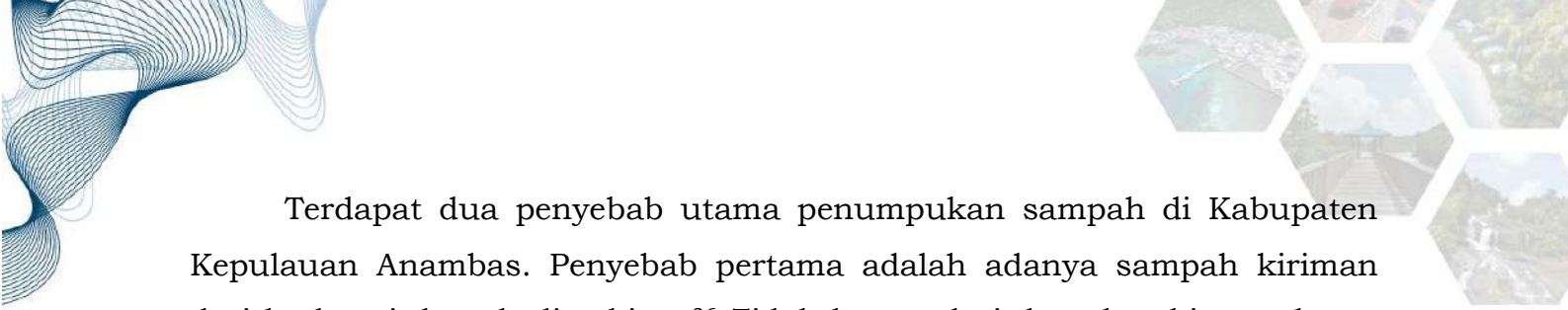
³⁴ Diakses melalui <http://m.batamtoday.com/berita159188-Bayar-Gaji-dan-Tunjangan-Pegawai,-Pemkab-Anambas-Kembali-Gununakan-SIMDA.html> pada 19 maret 2021

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
secara optimal.	Anambas	
		Masih tingginya intensitas bencana tanah longsor di Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber: Tim penyusun RPJMD, 2021, diolah

Secara garis besar, terdapat tiga pokok permasalahan yang perlu dijawab oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam bidang pembangunan lingkungan hidup ke depannya. Penentuan pokok permasalahan ini didasarkan pada analisis data yang sudah disajikan di Bab II dan berdasarkan hasil FGD. Pokok permasalahan yang pertama adalah penanganan permasalahan kerusakan lingkungan yang belum terlaksana secara optimal. Pokok permasalahan yang kedua adalah penanganan permasalahan air bersih yang juga belum dilakukan secara optimal. Pokok permasalahan yang ketiga adalah tanggap darurat kebencanaan yang belum terlaksana secara optimal. Setiap pokok permasalahan tersebut kemudian dibagi menjadi masalah dan akar masalah dengan uraian sebagai berikut ini. Terdapat dua permasalahan pada pokok permasalahan yang pertama. Permasalahan pertama terkait dengan penanganan sampah yang belum berjalan dengan baik. Menurut data capaian penanganan sampah Kabupaten Kepulauan Anambas, dari tahun 2015-2019, peningkatan persentase sampah yang dapat ditangani masih relatif kecil dibanding dengan keseluruhan sampah yang dihasilkan. Jumlah sampah yang dapat ditangani pada tahun 2015 hanya 4,80%, pada tahun 2016 5,40%, pada tahun 2017 meningkat menjadi 8,27%, kemudian pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 9,13%, dan pada tahun 2019 kembali meningkat hingga mencapai 9,22% (lihat tabel 2.76). Meskipun dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang baik secara persentasi, akan tetapi persentasi sampah yang ditangani masih dibawah 10%. Belum optimalnya penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas kemudian berimplikasi pada semakin besarnya jumlah sampah dan berpotensi besar mendegradasi kualitas lingkungan hidup laut maupun darat.³⁵

³⁵ Diakses melalui: <https://anambaskab.go.id/index.php/blog/fakta-sampah-dari-penelitian-noaa> pada 18 Maret 2021



Terdapat dua penyebab utama penumpukan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Penyebab pertama adalah adanya sampah kiriman dari berbagai daerah di sekitar.³⁶ Tidak hanya dari daerah sekitar, adanya sampah kiriman yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas juga dipengaruhi oleh besarnya sampah kiriman yang diterima oleh daerah-daerah di Kepulauan Riau dari luar negeri. Adapun penyebab adanya sampah kiriman ini adalah posisi geografis yang Kabupaten Kepulauan Anambas yang terbuka sehingga sampah kiriman sampai ke pesisir terutama pada saat angin musim utara.³⁷

Penyebab kedua adalah tingginya produksi sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak diimbangi kemampuan mengelola sampah. di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini terkait dengan belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan akan pentingnya aspek-aspek keberlanjutan lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang membuang sampah langsung ke kolong rumah yang merupakan daerah pesisir laut.³⁸ Adapun volume sampah yang dihasilkan oleh Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 6 ton per hari. Dari keseluruhan sampah yang dihasilkan tersebut, jenis sampah yang dominan adalah sampah plastik.³⁹

Mengenai kesadaran masyarakat akan permasalahan sampah erat kaitannya dengan sosialisasi pengendalian sampah yang belum optimal.⁴⁰ Hal dikarenakan adanya keterbatasan ketersediaan aspek-aspek penunjang seperti Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan mesin untuk mengolah sampah. Hingga saat ini, masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas masih membutuhkan tambahan TPS.⁴¹

³⁶ Hasil FGD

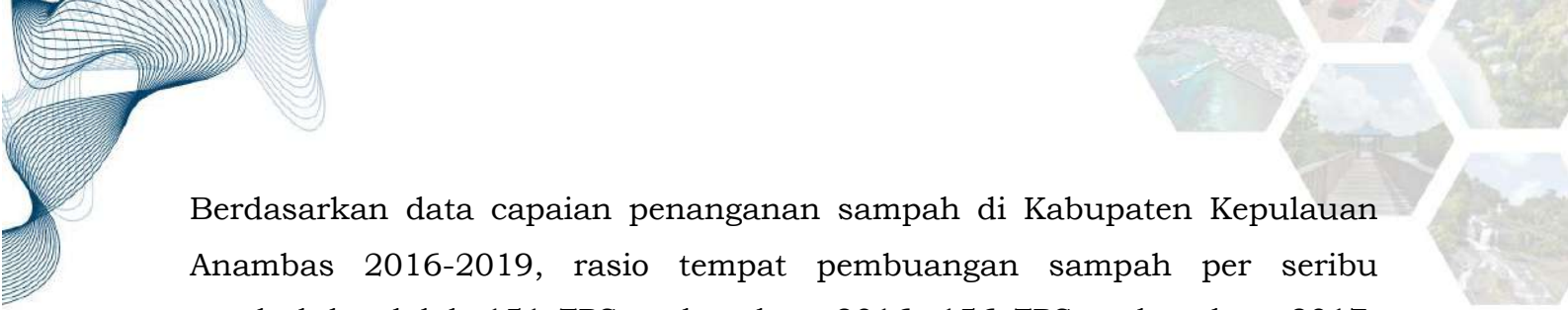
³⁷ Diakses melalui: <https://kumparan.com/kamaruddin-azis/bincang-bupati-anambas-dari-ketipas-hingga-batang-buruk/full> pada 18 maret 2021

³⁸ Diakses melalui: <https://seputarkepri.co.id/2019/02/03/polemik-sampah-yang-kian-merebah-disetiap-sudut-tempat-tinggal-rumah-laut/> pada 18 maret 2021

³⁹ Diakses melalui: <https://batam.tribunnews.com/2021/03/14/anambas-pasang-target-bebas-sampah-2023-ini-langkah-dishub-lh> pada 18 maret 2021

⁴⁰ Diakses melalui: <https://batam.tribunnews.com/2020/01/30/sosialisasi-belum-maksimal-dishub-lh-anambas-belum-terapkan-denda-perda-pengelolaan-sampah> pada 18 maret 2021

⁴¹ Diakses melalui: <https://wartakepri.co.id/2019/08/21/sampah-di-laut-makin-banyak-di-anambas-mestinya-dinas-lingkungan-cepat-mengantisipasinya/> pada 18 maret 2021



Berdasarkan data capaian penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2019, rasio tempat pembuangan sampah per seribu penduduk adalah 151 TPS pada tahun 2016, 156 TPS pada tahun 2017, 156 TPS pada tahun 2018, dan 167 TPS pada tahun 2019 (lihat tabel 2.76). Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah TPS di Kabupaten Kepulauan Anambas belum meningkat signifikan. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga masih terbatas di Kabupaten Kepulauan Anambas. Belum adanya lahan yang tersedia untuk digunakan sebagai TPA menyebabkan digunakannya TPS sebagai TPA mini.⁴² Aspek penunjang lainnya yang juga cukup penting, akan tetapi belum tersedia di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah mesin diesel untuk mengolah sampah khususnya plastik.⁴³

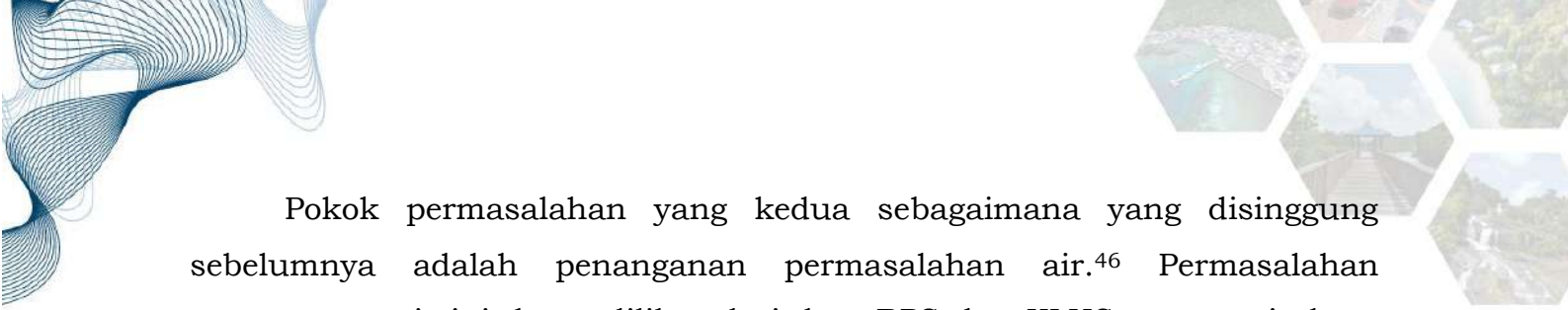
Permasalahan yang kedua yang perlu dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terkait masalah kerusakan lingkungan adalah maraknya aktivitas tambang yang beroperasi tanpa dasar izin atau ilegal.⁴⁴ Penambangan liar yang banyak dilakukan adalah penambangan pasir dan batu karang. Penambangan yang dilakukan secara ilegal ini berpotensi merusak ekosistem lingkungan air dan pesisir. Maraknya penambangan ini pada dasarnya disebabkan oleh belum adanya tindakan yang tegas dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bagi masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan ilegal. Program yang sudah dilakukan guna mengawasi aktivitas tambang liar adalah dengan melakukan patrol rutin. Dalam beberapa kasus, pelaku penambangan ilegal yang ditangkap pada saat patroli rutin masih hanya diberi peringatan dan pembinaan.⁴⁵ Dalam permasalahan ini kedepannya, ketegasan pemerintah sangat dibutuhkan untuk dapat mengurangi degradasi lingkungan hidup sebagai dampak dari penambangan ilegal.

⁴² Diakses melalui: <https://batam.tribunnews.com/2021/01/15/anambas-belum-punya-lahan-tpa-bagaimana-penanganan-sampah-selama-ini-di-anambas?page=3> pada 18 maret 2021

⁴³ Diakses melalui: <https://batam.tribunnews.com/2021/01/15/anambas-belum-punya-lahan-tpa-bagaimana-penanganan-sampah-selama-ini-di-anambas?page=3> pada 18 maret 2021

⁴⁴ Diakses melalui: <https://batam.tribunnews.com/2016/10/11/meski-diancam-denda-rp-3-miliar-baru-satu-perusahaan-di-anambas-urusi-izin-galian-c> pada 18 maret 2021

⁴⁵ Diakses melalui: <https://www.metroindonesia.co.id/marak-tambang-ilegal-polres-kepulauan-anambas-beri-peringatan/> pada 18 maret 2021



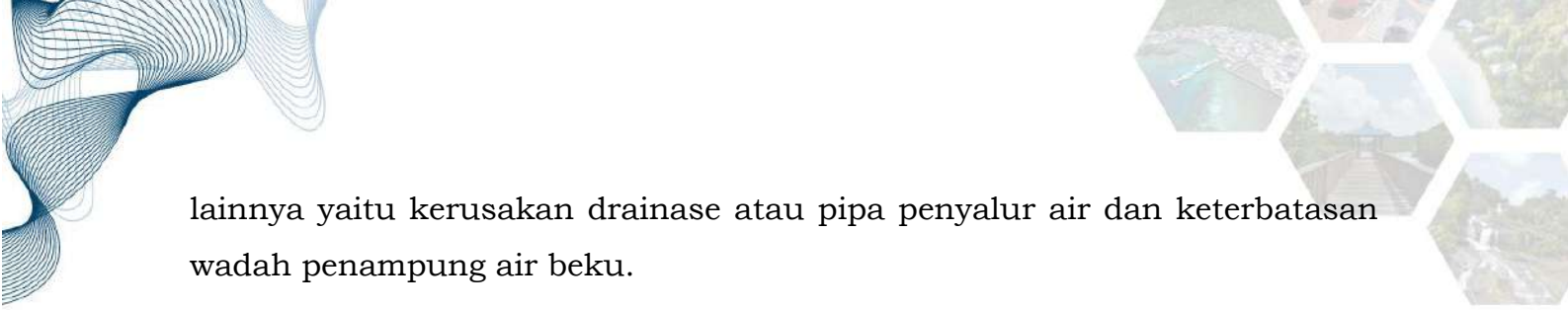
Pokok permasalahan yang kedua sebagaimana yang disinggung sebelumnya adalah penanganan permasalahan air.⁴⁶ Permasalahan penanganan air ini dapat dilihat dari data BPS dan KLHS mengenai akses air minum dan sanitasi layak di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2017-2020 (lihat tabel 2.41). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang layak pada tahun 2017 adalah 17,16%, pada tahun 2018 meningkat menjadi 22,04%, dan pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 25,4%. Sayangnya angka tersebut kembali menurun di tahun 2020 yang hanya mencapai 23,51%. Sementara itu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang layak pada tahun 2017 adalah 22,92%, pada tahun 2018 menurun sangat signifikan menjadi 13,45%, dan pada tahun 2019 berhasil meningkat drastis menjadi 27,53%. Sayangnya, pada tahun 2020 angka tersebut kembali merosot jauh menjadi 12,23%. Dengan demikian dapat dilihat bahwa akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak belum stabil setiap tahunnya dengan kondisi fluktuatif yang ditunjukkan pada tabel 2.41. Hal ini menjadi tantangan yang perlu untuk diperhatikan, apalagi angka tertinggi yang berhasil dicapai selama tahun 2017-2020 masih di bawah 30%. Berarti lebih dari 70% yang belum termasuk dalam cakupan akses air minum dan sanitasi yang layak.

Permasalahan penanganan air di Kabupaten Kepulauan Anambas disebabkan oleh terbatasnya sumber air. Penyebabnya adalah rendahnya kuantitas tangkapan hujan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini dapat dipahami karena Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah yang terdiri dari pulau-pulau kecil sehingga wadah tangkapan hujan tidak cukup luas.⁴⁷ Dengan kondisi tersebut, masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas masih seringkali menghadapi kondisi kekurangan air khususnya pada musim kemarau.⁴⁸ Rendahnya tangkapan hujan di Kabupaten Kepulauan Anambas juga diperparah dengan permasalahan

⁴⁶ Hasil FGD

⁴⁷ Hernaningsih & Yudo. 2015. Kebutuhan Air Bersih Masyarakat di Kepulauan Anambas. JAI. 8 (1).

⁴⁸ Diakses melalui: <https://batamtoday.com/anambas/read/134941/Warga-Berharap-Pemkab-Anambas-Carikan-Solusi-Krisis-Air-Bersih-di-Pulau-Siantan> pada 18 maret 2021



lainnya yaitu kerusakan drainase atau pipa penyalur air dan keterbatasan wadah penampung air beku.

Kerusakan pipa ini disebabkan oleh berbagai hal, pada umumnya adalah kondisi pipa penyalur yang sudah usang, adanya proses pembangunan yang menyebabkan gangguan pada pipa penyalur, dan adanya bencana seperti misalnya terjadinya banjir pada tahun 2018.⁴⁹ Selanjutnya, terbatasnya penampungan air beku turut mempengaruhi permasalahan air di Kabupaten Kepulauan Anambas.⁵⁰ Wadah penampungan yang dimaksud adalah berupa reservoir atau bangunan penampung air hujan. Saat ini, masyarakat menampung air beku menggunakan embung yang terletak di Gunung Lintang dan Gunung Samak.⁵¹

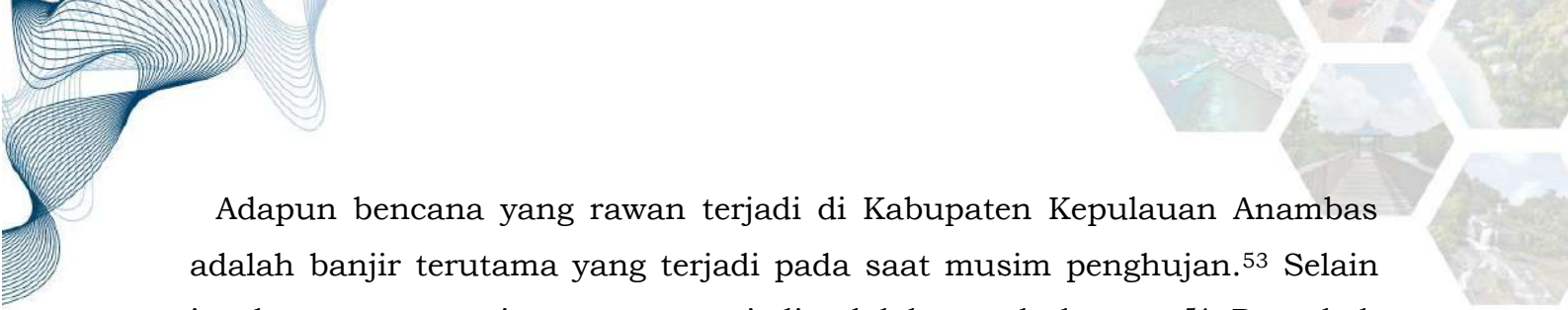
Pokok permasalahan yang ketiga dalam pembangunan bidang lingkungan hidup adalah tanggap darurat kebencanaan. Meskipun capaian penanganan kejadian bencana dan SPM di bidang penanggulangan bencana sudah mencapai 100% di tahun 2019 (lihat tabel 2.54 dan tabel 2.55), namun pada implementasinya masih dibutuhkan banyak perbaikan agar dapat terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari ancaman bencana yang masih relatif tinggi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam tiga tahun yang di data yaitu 2011, 2014, dan 2018, terdapat 28 kali kejadian bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas.⁵² Berdasarkan kejadian bencana tersebut kemudian dipetakan daerah-daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang rawan bencana. Adapun daerah tersebut adalah Kecamatan Jemaja dengan 8 kejadian bencana, Siantan Selatan dengan 9 kejadian bencana, Siantan dengan 5 kejadian bencana, Palmatak dengan 3 kejadian bencana, dan Siantan Timur dengan 1 kejadian bencana (lihat gambar 2.10).

⁴⁹ Diakses pada <https://batampos.co.id/2018/01/24/pipa-air-di-anambas-masih-banyak-rusak/> pada 18 maret 2021

⁵⁰ Hasil FGD

⁵¹ Rancangan teknokratik RPJMD KKA 2021-2025 hal.89

⁵² Rancangan Teknokratik RPJMD KKA 2021-2025 hal.40



Adapun bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah banjir terutama yang terjadi pada saat musim penghujan.⁵³ Selain itu bencana yang juga rawan terjadi adalah tanah longsor.⁵⁴ Penyebab terbesar dari tingginya intensitas banjir dan tanah longsor adalah posisi geografis dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Setiap periode Oktober hingga November di sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas bertiup angin utara dengan temperatur udara lembab. Hal ini kemudian menyebabkan tingginya curah hujan di Anambas dengan rata-rata curah hujan tertinggi adalah 454 mm.⁵⁵ Tingginya curah hujan ini juga erat kaitannya dengan bencana longsor yang juga dipengaruhi oleh kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah dengan kemiringan lereng sedang seluas 29,48% dan dengan kemiringan curam seluar 11,16% dari total luas wilayah. Kondisi topografi ini kemudian berdampak pada relatif minimnya daerah resapan hujan.⁵⁶ Dengan kondisi alam Kabupaten Kepulauan Anambas yang rawan bencana, maka manajemen kebencanaan harus dilakukan dengan lebih optimal dan perlu dilakukan penataan tata ruang yang dapat memitigasi bencana banjir di Kabupaten Kepulauan Anambas.

4.1.1.4. Permasalahan Ekonomi

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam Bab II, permasalahan makro pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah bahwa kondisi perekonomian tersendat akibat dari kurang optimalnya sektor-sektor perekonomian. Analisis Perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi bidang perdagangan, perikanan, pertanian, pariwisata, dan UMKM dan Koperasi. Terdapat berbagai persoalan yang menyebabkan kinerja perekonomian cenderung mengalami tekanan dan menghasilkan ketimpangan. Analisis makro permasalahan pembangunan ekonomi sebagaimana disajikan dalam tabel 4.4 berikut.

⁵³ Diakses melalui: <https://batam.tribunnews.com/2016/12/16/kondisi-geografi-rawan-banjir-pemkab-kaji-jemaja-jadi-pulau-pariwisata-ini-kata-bupati> pada 18 maret 2021

⁵⁴ Diakses melalui: <https://batampos.co.id/2017/11/13/anambas-rawan-bencana-alam/> pada 18 maret 2021

⁵⁵ KLHS KKA 2020

⁵⁶ Hernaningsih & Yudo. 2015. Kebutuhan Air Bersih Masyarakat di Kepulauan Anambas. JAI. 8 (1).

Tabel 4. 4 Perumusan Permasalahan Pembangunan Ekonomi

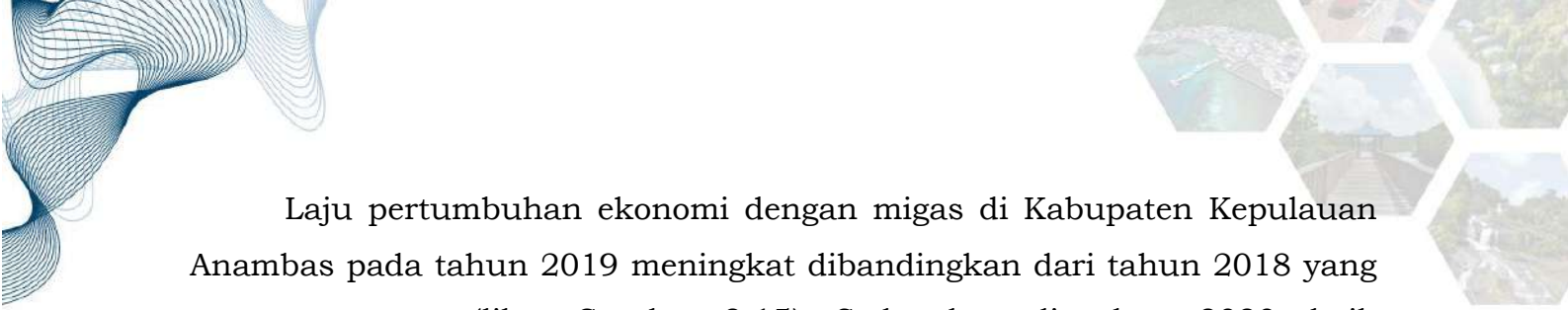
Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Tingkat kesejahteraan masyarakat relatif rendah	Daya beli masyarakat menurun	Pendapatan masyarakat menurun
		Kesempatan berusaha berkurang
		Stabilitas harga yang tidak terjaga
	Biaya logistik yang mahal	Tol laut belum dapat menekan biaya logistik
	Kinerja sektor perikanan belum optimal	Perikanan minim inovasi (alat tangkap nelayan masih berskala kecil dan bersifat tradisional)
		Proses budi daya ikan yang belum optimal
		Maraknya pelanggaran batas wilayah yang mengarah pada kasus <i>illegal fishing</i>
		Masih kurangnya tempat pelelangan ikan dan balai benih
		Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional
	Kinerja Sektor pertanian belum optimal	Masih minimnya pengelolaan lahan yang digunakan untuk pertanian dan belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan pengembangan pertanian secara modern
	Kinerja sektor pariwisata belum optimal	Minimnya inovasi pengembangan pariwisata, khususnya pengembangan wisata bahari yang menjadi unggulan/potensi daerah
		Pengembangan usaha atau industri kreatif penunjang pariwisata belum optimal
		Covid-19 menyebabkan jumlah pengunjung wisata berkurang
Besarnya ketergantungan terhadap sektor migas yang belum optimal	Harga minyak dunia tidak stabil	

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Dukungan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) belum optimal	Kurang optimalnya permodalan yang bersumber dari Lembaga keuangan untuk pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)
		Kurang optimalnya dukungan pelatihan, pemasaran, dan promosi kepada KUKM
	Belum optimalnya penanaman modal	Rendahnya investasi di sektor unggulan

Sumber: Tim penyusun RPJMD, 2021, diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama 5 tahun ke belakang, pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung mengalami tekanan yang berdampak pada ketidakmerataan pendapatan dan ketidakmerataan pembangunan antar wilayah. Tekanan itu bersumber dari perkembangan sektor-sektor ekonomi yang terus mengalami stagnasi dan juga penurunan sejalan dengan perkembangan ekonomi dalam lingkungan Nasional maupun global. Kabupaten Kepulauan Anambas masih sangat bergantung pada sektor migasnya sebagai penggerak utama perekonomian daerah, sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi-potensi besar di sektor lain seperti di sektor perikanan dan pariwisata.

Selama periode 2016-2020 berdasarkan PDRB harga berlaku, struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas didominasi dari sektor pertambangan dan penggalian (lihat tabel 2.11). Bila dilihat dari sumbangan sektoralnya pada tahun 2020, 3 (tiga) sektor penyumbang terbesar adalah dari sektor pertambangan dan penggalian (80,07 persen), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (6,15 persen), dan sektor konstruksi (6,14 persen). Apabila mengeluarkan sektor pertambangan dan penggalian 3 (tiga) sektor penyumbang terbesar adalah dari sektor konstruksi (31 persen), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (31 persen), dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (14 persen). Semua sektor yang disebutkan di atas terus mengalami peningkatan sejak 2016.

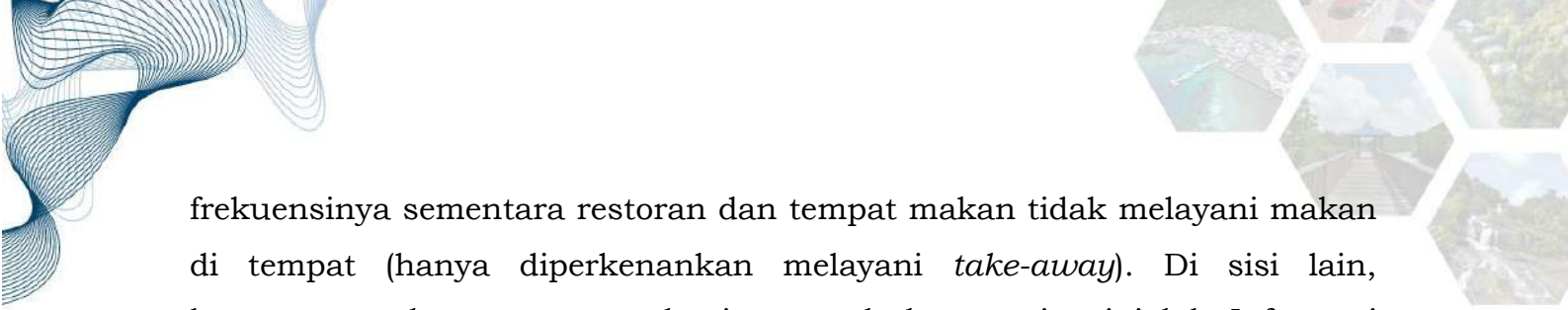


Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2019 meningkat dibandingkan dari tahun 2018 yang sempat merosot (lihat Gambar 2.15). Sedangkan di tahun 2020, baik dengan migas maupun non-migas, adanya pandemi COVID-19 sepertinya juga berpengaruh besar pada laju pertumbuhan ekonomi yang menurun drastis hingga ke -3,3 persen (tanpa migas) dan -7,83 persen (dengan migas). Sebelumnya, Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2019 meningkat sampai -0,13 persen dari -8,21 persen pada tahun 2018, namun tidak meningkat banyak jika dilihat dari laju pada tahun 2017 sebesar -0,1 persen (lihat Gambar 2.15).

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan perubahan pada struktur perekonomian di Kabupaten Kepulauan Anambas. Beberapa sektor terdampak langsung dan menyebabkan menurunnya kontribusi pada pembentukan PDRB tahun 2020. Di antara sektor-sektor yang diperkirakan terdampak dari pandemi adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, sektor perdagangan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, sektor jasa real estate, sektor jasa perusahaan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan sektor jasa lainnya (termasuk kegiatan hiburan). Berdasarkan data BPS pada triwulan ke-3, pertumbuhan ekonomi Indonesia (y-o-y) mencapai -3,49 persen, sedikit lebih baik dari triwulan ke-2 yang mencapai -5,32 persen. Indonesia masuk jurang resesi, sehingga berdampak pada kondisi struktur perekonomian di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sektor yang mengalami kontraksi pertumbuhan terbesar adalah transportasi dan pergudangan (terkontraksi sebesar 35,96 persen) dan sektor penyediaan alokasi makan minum (terkontraksi sebesar 19,71 persen).

Perlambatan yang terjadi hampir di seluruh sektor ini disebabkan oleh pembatasan sosial guna mengantisipasi tersebarnya virus Covid-19.⁵⁷ Sepanjang tahun 2020, transportasi laut dan pesawat dikurangi

⁵⁷ BPS Kab. Kep. Anambas 2021. Sumber: <https://anambaskab.bps.go.id/pressrelease/2021/03/05/143/produk-domestik-regional-bruto-2020-kabupaten-kepulauan-anambas.html>



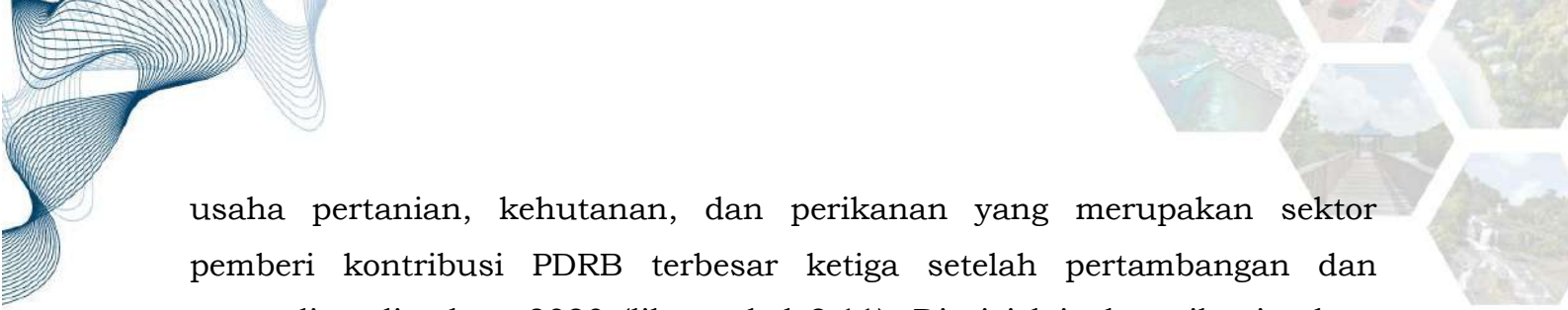
frekuensinya sementara restoran dan tempat makan tidak melayani makan di tempat (hanya diperkenankan melayani *take-away*). Di sisi lain, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi ialah Informasi dan Komunikasi sebesar 5,59 persen dan Administrasi Pemerintahan sebesar 3,64 persen. Hal ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dengan PDRB per kapita harga konstan sebesar 284,75 juta rupiah pada 2019 menurun menjadi 259,79 juta rupiah pada 2020 (lihat gambar 2.17). Penurunan daya beli ini diikuti dengan peningkatan signifikan sebesar 20-40 persen untuk harga barang-barang pokok seperti cabe kering, bawang merah, dan daging sapi dari Desember 2019 sampai dengan Desember 2020.⁵⁸

Tingkat ketimpangan pengeluaran/pendapatan penduduk yang diukur dengan Indeks *Gini Ratio* menunjukkan kecenderungan menurun bila dibandingkan antara tahun 2016 dan tahun 2020. Pada tahun 2016 sebesar 0,32 persen dan pada tahun 2019 sebesar 0,28 persen dan Kembali meningkat tipis di tahun 2020 menjadi 0,30 (lihat tabel 2.13). Kondisi ini berbanding lurus dengan menurunnya PDRB per kapita harga konstan dari 321,48 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 259,79 juta rupiah pada 2020.

Ketimpangan yang dialami oleh Kabupaten Kepulauan Anambas bersumber dari dua aspek, pertama dari tingginya ketergantungan perekonomian pada sektor migas dan kedua dari kurang berkembangnya sektor-sektor berpotensi lainnya. Sektor migas memang menjadi penggerak utama perekonomian di Kabupaten Kepulauan Anambas namun terlihat dengan penurunan drastis PDRB pada tahun 2018 disebabkan oleh harga minyak yang tidak stabil sehingga ketergantungan pada migas tidak akan menyebabkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.

Sektor penuh potensi yang ingin dijadikan prioritas oleh pemerintahan daerah baru adalah sektor perikanan dan sektor pariwisata. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dapat dilihat dari lapangan

⁵⁸ Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok Kab. Kep. Anambas Desember 2019 dan Desember 2020 <https://ppid.anambaskab.go.id/>



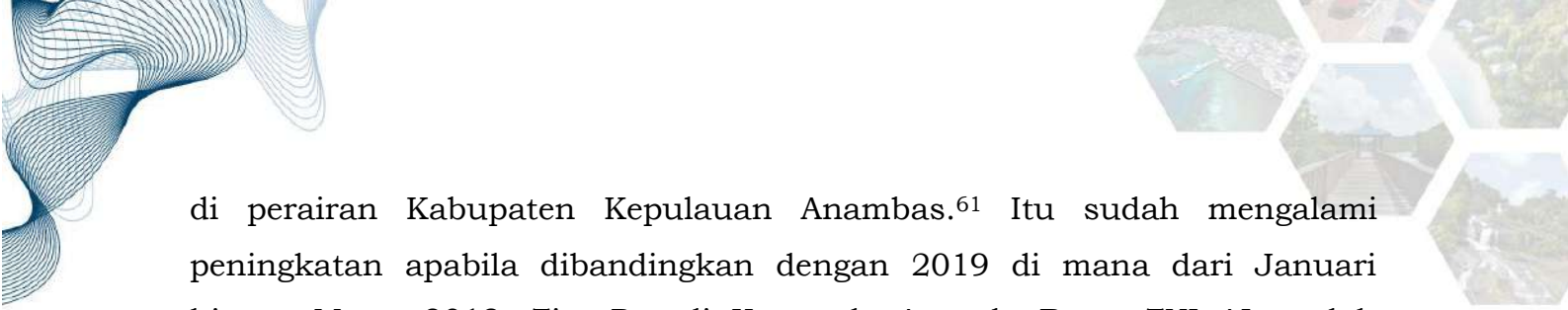
usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan sektor pemberi kontribusi PDRB terbesar ketiga setelah pertambangan dan penggalian di tahun 2020 (lihat tabel 2.11). Di sisi lain kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dapat dilihat dari lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang ternyata masih sangat minim, yaitu baru mencapai 0,1% pada tahun 2020. Padahal, potensi wisata alam yang dimiliki Kepulauan Anambas sangatlah tinggi.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor perikanan terjadi pada seluruh rantai industri perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Permasalahan dimulai dari minimnya inovasi di sektor perikanan. Minimnya inovasi ini digambarkan dengan peralatan penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan masih berskala kecil dan bersifat tradisional, serta belum ramah lingkungan yang berpotensi dapat mengancam kelestarian sumber daya ikan dan habitat perairan laut lainnya.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional masih belum optimal. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi dengan diizinkan ekspor ikan Napoleon⁵⁹, namun terlihat di Bab II bahwa jenis ikan utama yang ditangkap adalah ikan-ikan lain, dan peningkatan PDRB dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 86,97 miliar rupiah dari tahun 2016 ke 2020 juga menunjukkan belum optimalnya pembangunan sektor perikanan. Selanjutnya perusahaan yang dapat mengolah ikan masih kurang dan tempat pelelangan ikan dan balai benih juga masih kurang. Pada tahun 2017 tercatat masih belum ada Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas.⁶⁰ Terdapat juga masalah pada rantai pasok karena perlu melewati Kota Tanjungpinang terlebih dahulu. Permasalahan lainnya adalah maraknya pelanggaran batas wilayah yang mengarah pada kasus *illegal fishing*. Tercatat dari Januari hingga April 2020 Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam telah memproses 23 kapal ikan asing termasuk

⁵⁹ Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/06/08451761/ikan-napoleon-natuna-dan-anambas-mulai-diekspor-via-laut-nilainya-rp-1?page=all> pada 18 Maret 2021

⁶⁰ Diakses melalui <https://ppid.anambaskab.go.id/page/content/179/anambas-belum-memiliki-tpi> pada 18 Maret 2021



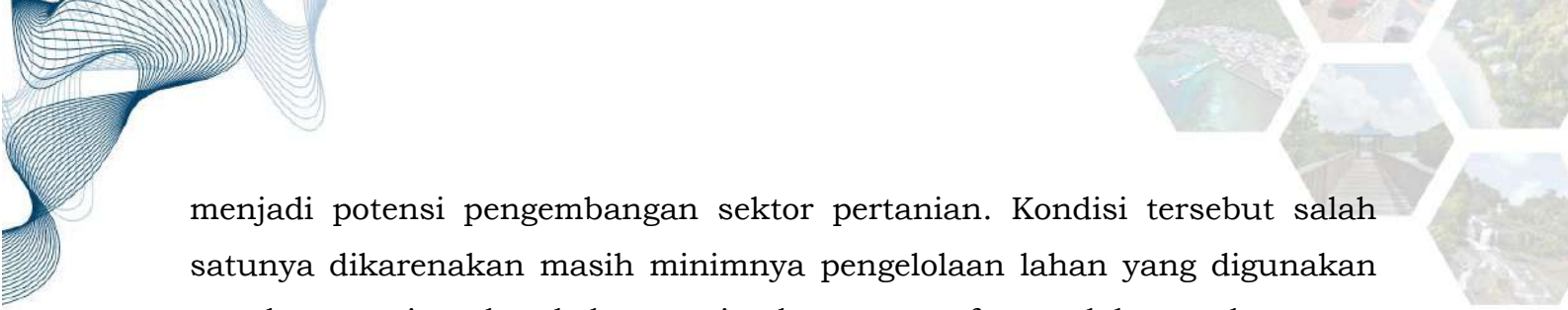
di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas.⁶¹ Itu sudah mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan 2019 di mana dari Januari hingga Maret 2019, Tim Patroli Komando Armada Barat TNI AL sudah meringkus 14 kapal ikan berbendera Vietnam.⁶²

Untuk sektor pariwisata walaupun lokasi-lokasi wisata yang indah tersedia, namun inovasi pengembangan sektor pariwisata masih minim. Pengembangan usaha atau industri kreatif penunjang pariwisata juga belum optimal. Jumlah penginapan di Kabupaten Kepulauan Anambas menurun dari 23 pada tahun 2018 menjadi 21 pada tahun 2020 (lihat Tabel 2.106). Di sisi lain, jumlah kunjungan wisatawan yang secara konsisten sedang meningkat dari tahun 2016-2019, pada tahun 2020 harus menurun drastis sebagai dampak pandemi COVID-19 (lihat tabel 2.103). Lama kunjungan wisata di Anambas juga baru berkisar antara 1-2 hari (lihat tabel 2.104). Salah satu sumber hambatan dari pengembangan sektor perikanan dan pariwisata adalah terbatasnya kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengembangan aspek esensial seperti pengelolaan dan pemanfaatan kelautan dan perijinan pembangunan *resort*. Jumlah penginapan/losmen di Kabupaten Kepulauan Anambas pun berkurang dari yang semula 23 unit pada tahun 2018, menjadi 21 pada tahun 2020 (lihat tabel 2.106).

Sektor pertanian juga menunjukkan adanya potensi yang belum direalisasikan dengan masyarakat yang kurang produktif mengelola lahan pertanian yang tersedia. Ini terlihat dari data luas lahan pertanian yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa lahan pertanian total yang dimiliki mencapai 3.586 Ha yang terdiri dari lahan sawah dan lahan kering (lihat tabel 2.110). Pada tahun 2020, data dari BPS menunjukkan bahwa produksi padi di Kabupaten Kepulauan Anambas hanya mencapai 4,63 ton/Ha yang berasal dari luas panen sebesar 32 Ha (lihat tabel 2.115). Hal ini seharusnya dapat

⁶¹ Diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/illegal-fishing-di-perairan-anambas-2-kapal-vietnam-ditangkap-pdskp-batam.html> pada 18 Maret 2021

⁶² Diakses melalui <https://batamtoday.com/anambas/read/127430/KRI-Kembali-Amankan-KIA-Pelaku-Illegal-Fishing-di-Perairan-Anambas> pada 18 Maret 2021



menjadi potensi pengembangan sektor pertanian. Kondisi tersebut salah satunya dikarenakan masih minimnya pengelolaan lahan yang digunakan untuk pertanian dan belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan pengembangan pertanian secara modern. Sebagai alternatif untuk memperbaiki kondisi tersebut pusat desa dapat digunakan sebagai sumber kedaulatan pangan.

Salah satu sektor perekonomian yang tidak bisa dikesampingkan juga adalah sektor Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM). Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki jumlah koperasi mandiri aktif sebanyak 11 unit yang terdiri dari koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Sayangnya, terdapat 37 koperasi mandiri yang saat ini tidak aktif yang seharusnya dapat lebih diberdayakan (lihat tabel 2.91). selain itu, terdapat lebih dari 4000 jenis UMKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas baik dari level mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di seluruh wilayah (lihat tabel 2.92).

Permasalahan yang dihadapi oleh sektor KUKM adalah kurang optimalnya pembiayaan dari Lembaga keuangan untuk pengembangan KUKM dan kurang optimalnya dukungan pelatihan, pemasaran, dan promosi kepada KUKM. Kendala perkembangan permodalan terjadi karena banyak nelayan meminjam pada rentenir dan permasalahan pemasaran adalah karena pemasaran dikuasai oleh cukong.⁶³ Minimnya pelatihan yang didapatkan oleh KUKM setempat mengakibatkan stagnasi pada sektor ini.

Permasalahan di bidang ekonomi selanjutnya berasal dari sektor penanaman modal. Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum optimal mendapatkan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun asing. Pada tahun 2017, Nilai Investasi yang Terealisasi (PMA/PMDN) di Kabupaten Kep. Anambas mencapai 233.545.160.933 rupiah dengan jumlah 2 PMDA dan 2 PMDN. Hingga tahun 2019, jumlah ini meningkat

⁶³ Diakses melalui <https://seputarkepri.co.id/2019/02/25/kabupaten-anambas-panen-cengkeh/> pada 18 Maret 2021

hingga mencapai 252.311.734.037 rupiah dengan dengan jumlah 2 PMDA dan 2 PMDN. Sayangnya, pandemi covid-19 ternyata cukup berdampak hingga menurunkan nilai investasi yang terealisasi hingga mencapai 108.397.395.471 rupiah dengan dengan jumlah 2 PMDA dan 2 PMDN (lihat tabel 2.93). Dengan pembangunan yang lebih optimal dalam sektor-sektor unggulan, penanaman modal baik dalam negeri maupun asing masih dapat ditingkatkan lagi.

4.1.1.5. Permasalahan Pengembangan Infrastruktur

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada Bab II, masalah pembangunan pada bidang infrastruktur adalah pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana yang masih belum optimal. Bidang ini meliputi infrastruktur untuk kegiatan ekonomi, aksesibilitas dan transportasi wilayah, serta infrastruktur penunjang. Adapun analisis permasalahan pembangunan ekonomi sebagaimana disajikan dalam tabel 4.5 berikut.

Tabel 4. 5 Perumusan Permasalahan Pembangunan Infrastruktur

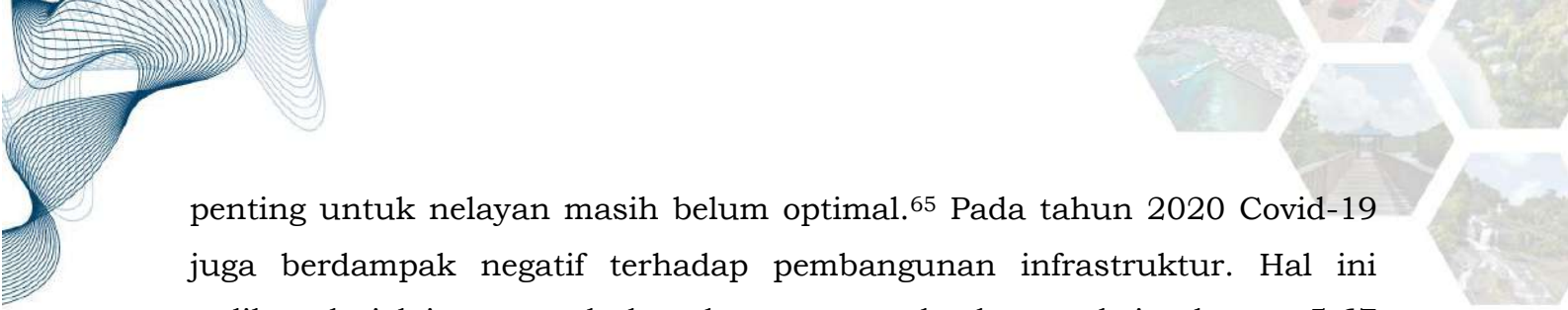
Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang masih belum optimal	Belum optimalnya infrastruktur untuk kegiatan ekonomi	Infrastruktur ke destinasi wisata belum optimal
		Kerja sama dengan pihak swasta, Perseroda, dan BUMD sebagai sumber pendanaan infrastruktur belum terjalin secara maksimal
		Belum optimalnya pemanfaatan dana CSR untuk pembangunan infrastruktur
	Keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) belum dikelola secara optimal	
	Ketimpangan aksesibilitas dan transportasi wilayah	Kurangnya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, bandara, gudang penyimpanan, lahan parkir, perbaikan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	di wilayah 3T	jalan
		Minimnya jalan dari pemukiman dan pusat ekonomi
		Covid-19 menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur
	Belum optimalnya penanganan infrastruktur penunjang	Minimnya infrastruktur penampungan air baku dan air bersih
		Infrastruktur penyaluran air sudah banyak yang tidak layak
		Jaringan listrik belum merata
		Jaringan internet kurang memadai

Sumber: Tim penyusun RPJMD, 2021, diolah

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki wilayah perairan yang cukup luas dengan jaringan jalan yang cukup panjang. Setiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki infrastruktur jalan darat. Tersedia juga 3 pelabuhan bongkar muat dan 137 dermaga penyeberangan. Total panjang jalan darat yang ada mencapai 376 km (lihat tabel 2.147). Sampai dengan 2020 dari 376 km jalan darat yang ada sebanyak 14,34 km termasuk kategori rusak dan 211 km termasuk kategori rusak berat (lihat tabel 2.149). Kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai pasti akan menyusahkan masyarakat yang ingin beraktivitas dan bekerja, serta wisatawan juga akan kesusahan untuk mencapai destinasi wisata. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, bandara, gudang penyimpanan, lahan parkir juga sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, konektivitas antar pulau, dan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodir permintaan yang ada.⁶⁴ Infrastruktur untuk nelayan juga penting diperhatikan mengingat Kabupaten Kepulauan Anambas adalah kabupaten kepulauan yang kaya akan sumber daya ikan, namun pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang

⁶⁴ Diakses melalui <https://sumatra.bisnis.com/read/20180624/533/808866/anambas-rindukan-pelabuhan-baru-gudang-logistik> pada 18 Maret 2021



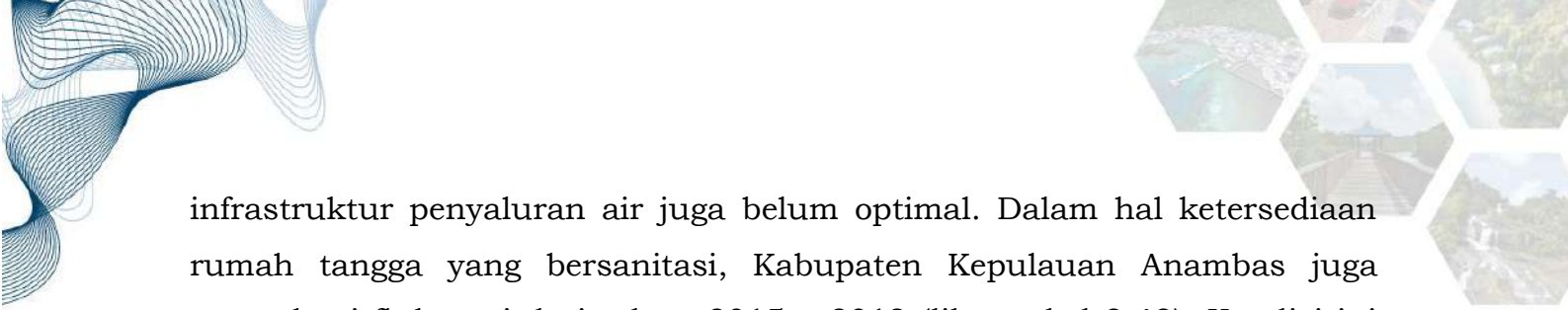
penting untuk nelayan masih belum optimal.⁶⁵ Pada tahun 2020 Covid-19 juga berdampak negatif terhadap pembangunan infrastruktur. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan lapangan usaha konstruksi sebesar -5,67 persen pada tahun 2020.⁶⁶ Melihat kondisi tersebut, hendaknya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mempertimbangkan potensi kerja sama dengan pihak swasta, Perseroda, dan BUMD sebagai sumber pendanaan infrastruktur. Selain itu, pemanfaatan dana CSR perlu untuk dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur.

Jaringan irigasi merupakan sarana penting untuk menyediakan air untuk kebutuhan pertanian. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 475 meter saluran irigasi non-teknis, 720 meter saluran teknis premier, dan 5.295 meter saluran teknis sekunder dalam kondisi baik. Sementara itu terdapat 500 meter saluran irigasi teknis premier dan 185 meter saluran irigasi teknis sekunder dalam kondisi sedang. Jumlah bangunan irigasi yang tercatat pada tahun 2020 juga hanya ada 1. Jumlah saluran irigasi dan kondisi saluran irigasi akan berdampak besar pada aktivitas sektor pertanian dan merupakan aspek yang harus sangat diperhatikan untuk pembangunan sektor tersebut.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas, penanganan rumah tidak layak huni tidak hanya semata-mata memperbaiki rumahnya saja, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan infrastruktur penunjang seperti air bersih, listrik, dan pemenuhan sarana sanitasinya. Dari tahun 2015 hingga 2019 persentase kepemilikan akses terhadap sumber air minum di Kabupaten Kepulauan Anambas sangat fluktuatif dengan tingkat kepemilikan sebesar 13,5 persen pada tahun 2015 dan 33,32 persen pada 2019 (lihat tabel 2.42). Pada tahun 2020 sudah tersedia sebanyak 7.306 rumah tangga yang memiliki air bersih dan 1.344 meter sistem drainase yang baik, namun kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk air masih perlu ditingkatkan karena

⁶⁵ Diakses melalui <https://batam.tribunnews.com/2019/03/27/banyak-nelayan-beli-bbm-bukan-di-spbu-nelayan-ini-yang-akan-dilakukan-pertamina> pada 18 Maret 2021

⁶⁶ Diakses melalui <https://anambaskab.bps.go.id/pressrelease/2021/03/05/143/produk-domestik-regional-bruto-2020-kabupaten-kepulauan-anambas.html> pada 18 Maret 2021



infrastruktur penyaluran air juga belum optimal. Dalam hal ketersediaan rumah tangga yang bersanitasi, Kabupaten Kepulauan Anambas juga mengalami fluktuasi dari tahun 2015 – 2019 (lihat tabel 2.42). Kondisi ini masih jauh dari optimal karena artinya dari setiap 10 rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Anambas, 7 di antaranya masih belum memiliki akses terhadap sanitasi yang layak.

Dari sisi penerangan rumah tangga, pada tahun 2018 sebenarnya penggunaan listrik PLN untuk menerangi rumah sudah mencapai 77,6 persen, namun pada tahun 2019 angka itu menurun menjadi 71,6 persen, sedangkan sumber listrik non-PLN meningkat dari 19,4 persen pada 2018 menjadi 28 persen pada 2019⁶⁷. Sampai dengan 2019 masih ada 0,4 persen rumah tangga yang belum menggunakan listrik sebagai sumber penerangan rumahnya. Hal ini berbanding terbalik dengan peningkatan pelanggan listrik dari 8.075 pelanggan pada 2018 menjadi 10.815 pelanggan pada 2019. Salah satu alasan yang memungkinkan ini terjadi adalah belum optimalnya layanan listrik dari PLN.⁶⁸ Untuk daerah yang sudah memiliki listrik, belum optimalnya jaringan internet yang tersedia di Anambas juga perlu diperhatikan.⁶⁹

4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Selanjutnya berbagai permasalahan yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dalam berbagai kewenangan urusan di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diidentifikasi sebagai berikut berikut ini:

⁶⁷ BPS Kab. Kep. Anambas 2021. Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2020. Sumber: <https://anambaskab.bps.go.id/publication/2020/04/27/8e7ffa264eac63e63aed125a/kabupaten-kepulauan-anambas-dalam-angka-2020.html>

⁶⁸ Diakses melalui <https://seputarkepri.co.id/2019/08/23/masyarakat-pulau-terluar-di-kabupaten-anambas-mengeluh-aliran-listrik/> pada 18 Maret 2021

⁶⁹ Diakses melalui <https://batam.tribunnews.com/2021/02/03/sinyal-internet-di-anambas-tulalit-warga-ramai-keluhkan-di-whatsapp> pada 18 Maret 2021

A. Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Pendidikan

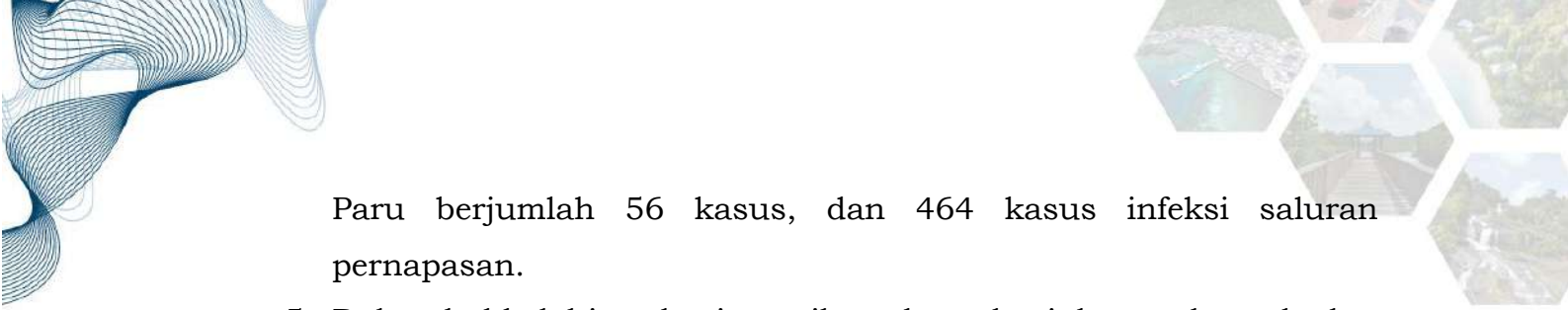
Permasalahan utama pada urusan pendidikan terutama berkaitan dengan perlunya peningkatan kualitas pendidikan, antara lain:

1. Minimnya sarana dan prasarana di bidang pendidikan
Minimnya sarana dan prasarana di bidang pendidikan menyebabkan belum terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan 8 Standar Pendidikan Nasional. Peralatan penunjang pendidikan seperti komputer, laboratorium, perpustakaan, dll., masih minim. Kendala pengembangan sarana dan prasarana pendidikan salah satunya dikarenakan ketiadaan lahan.
2. Perlunya inovasi di bidang pendidikan
3. Minimnya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK)
4. Minimnya peningkatan PTK di antaranya mengakibatkan rendahnya pemahaman dan penerapan Kurikulum.

2. Kesehatan

Permasalahan utama pada urusan kesehatan adalah :

1. Rumah sakit yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah tiga dan terletak di Jemaja, Siantan, dan Palmatak. Kondisi geografis yang dipisahkan dengan perairan membuat biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat ke rumah sakit yang berada di pulau yang berbeda memakan biaya perjalanan yang tinggi. Sebaliknya, dari sisi pihak rumah sakit, jika melaksanakan program kesehatan untuk masyarakat yang berada di luar pulau memerlukan biaya yang besar.
2. Kabupaten Kepulauan Anambas belum memiliki rumah sakit khusus bersalin.
3. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal dan fasilitas apotek juga belum merata.
4. Dalam hal kasus penyakit, di tahun 2020 terdapat kasus demam berdarah sebanyak 10 kasus, kasus malaria berjumlah 256, TB



Paru berjumlah 56 kasus, dan 464 kasus infeksi saluran pernapasan.

5. Dalam hal kelahiran bayi, masih terdapat bayi dengan berat badan rendah, kasus gizi kurang, BBLR, dan *stunting*. Terjadinya kasus ini disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran Kesehatan, gizi, dan kebersihan lingkungan di masyarakat, terutama untuk orang tua dan calon orang tua. Selain itu, masih munculnya kasus – kasus tersebut ternyata juga berkaitan dengan masih banyaknya masyarakat yang dekat dengan kemiskinan dan memiliki keterbatasan akses terhadap air minum serta sanitasi yang mumpuni.
6. Cakupan imunisasi belum optimal
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebutuhan lingkungan sehat

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

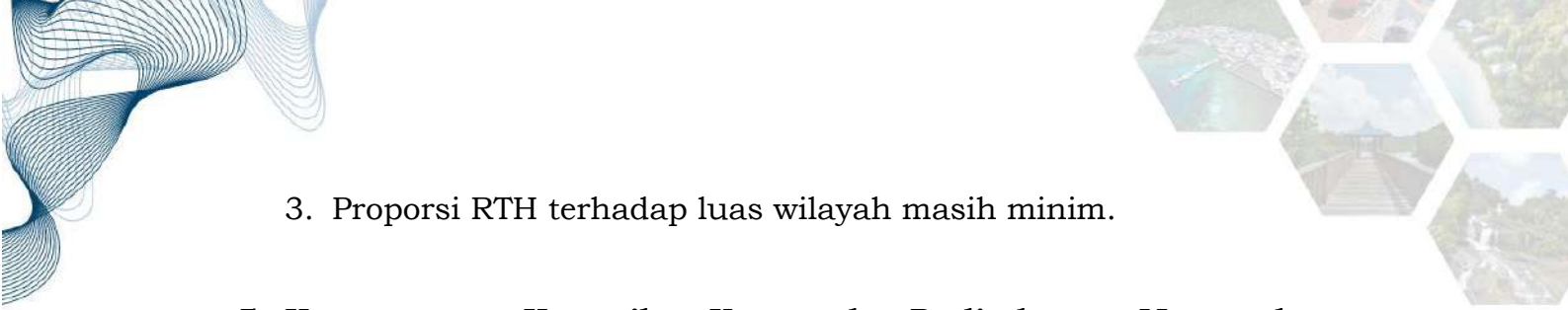
Permasalahan utama pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

1. Pengembangan wilayah dan tata ruang wilayah belum dilaksanakan secara optimal.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana di bidang PUPR masih belum optimal

4. Perumahan Rakyat dan Permukiman

Permasalahan utama pada urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah:

1. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak menunjukkan angka yang sangat rendah. Pada tahun 2019 berkisar pada angka 33%. Hal tersebut dikarenakan jumlah sambungan air pelayanan air bersih ke rumah penduduk belum optimal. Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi masih berada pada kisaran angka 25%.
2. Akses terhadap layanan sanitasi layak masih rendah



3. Proporsi RTH terhadap luas wilayah masih minim.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan utama pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah:

1. Proporsi SDM petugas Pemadam Kebakaran yang terlatih terhadap cakupan wilayah masih minim.
2. Perlunya kajian mengenai potensi bencana, pemetaan wilayah rawan bencana, serta kajian pasca bencana dan daerah rawan konflik.
3. Sarana dan prasarana yang dimiliki petugas belum memadai dalam hal penanggulangan bencana dan pemadaman kebakaran.

6. Sosial

Permasalahan utama pada urusan Sosial adalah:

1. Masih terdapat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Adanya PPKS di antaranya disebabkan oleh belum adanya Lembaga kesejahteraan sosial maupun tempat penampungan sementara untuk PPKS sehingga penanganannya belum optimal. Selain itu, belum ada tenaga pekerja sosial yang tersertifikasi untuk melakukan penanganan PPKS serta belum maksimalnya program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin.
2. Perlunya penanggulangan kemiskinan daerah. Seperti yang dijelaskan pada gambar 2.18 dan gambar 2.19, Kabupaten Kepulauan Anambas masih memiliki 2.800 penduduk miskin dan angka tersebut merupakan 6,56% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas.

B. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Tenaga Kerja

Permasalahan utama pada urusan Tenaga Kerja adalah:

1. Masih rendahnya penempatan tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar.
2. Minimnya pelatihan tenaga kerja dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berdaya saing
3. Perlunya optimalisasi penyelesaian kasus perselisihan industrial yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

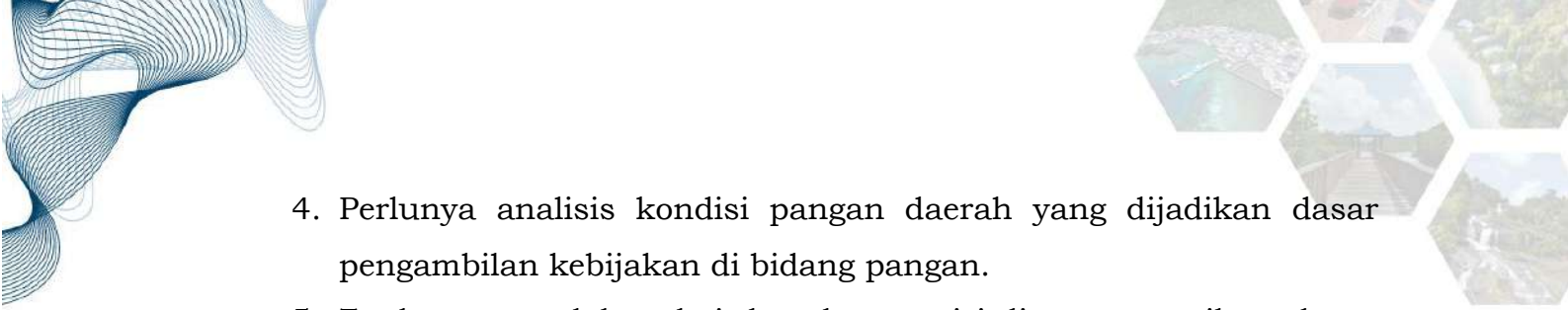
Permasalahan utama pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Perlunya optimalisasi peran lembaga pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan daerah (P2TP2A) untuk penanganan kasus terkait kekerasan perempuan dan anak.
2. Perlunya inovasi dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
3. Perlunya peningkatan peran lembaga perlindungan dan pengawasan anak dalam pemenuhan hak anak.
4. Perlunya upaya peningkatan pemenuhan hak anak dan masih minim pemahaman dan belum optimalnya peran serta dari masyarakat, dunia usaha, media, dan instansi pemerintah dalam rangka menuju Kabupaten Layak Anak (KLA)
5. Proporsi perempuan di bidang politik masih minim

3. Pangan

Permasalahan utama pada urusan Pangan adalah:

1. Perlunya peningkatan ketersediaan cadangan pangan
2. Ketahanan pangan daerah yang belum optimal karena ketersediaan bahan pangan dan harga yang tidak stabil,
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam konsumsi bahan pangan lokal sebagai upaya diversifikasi pangan,

- 
4. Perlunya analisis kondisi pangan daerah yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan di bidang pangan.
 5. Terdapat masalah terkait kecukupan gizi di mana masih terdapat balita yang mengalami *stunting* akibat rendahnya pemahaman kecukupan gizi masyarakat.

4. Pertanahan

Permasalahan utama pada urusan Pertanahan adalah:

1. Minimnya lahan tanah untuk pembangunan dikarenakan rendahnya perencanaan dan pemahaman dari instansi pemerintah terkait dalam bidang pertanahan.
2. Perlunya koordinasi antar pihak terkait terkait urusan pertanahan

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan utama pada urusan Lingkungan Hidup adalah:

1. Sarana dan prasarana pengolahan limbah yang belum mumpuni
2. Penanganan sampah yang belum optimal.
3. Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak

a. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

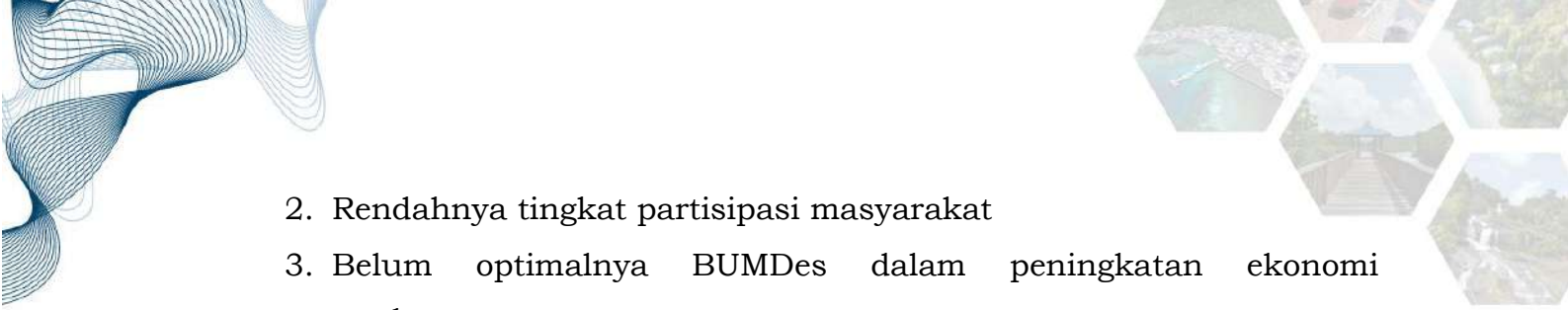
Permasalahan utama pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari sisi pelayanan adalah:

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan,
2. Belum tersedia pelayanan *online* melalui aplikasi dan belum optimalnya penggunaan website
3. Belum optimalnya Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan utama pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

1. Minimnya sarana dan prasarana desa dalam memenuhi Indeks Desa Membangun,

- 
2. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat
 3. Belum optimalnya BUMDes dalam peningkatan ekonomi perdesaan
 4. Serta minimnya SDM berkompeten di bidang kemasyarakatan dan pemberdayaan sosial desa.
 5. Masih terdapat desa dengan status tertinggal

c. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

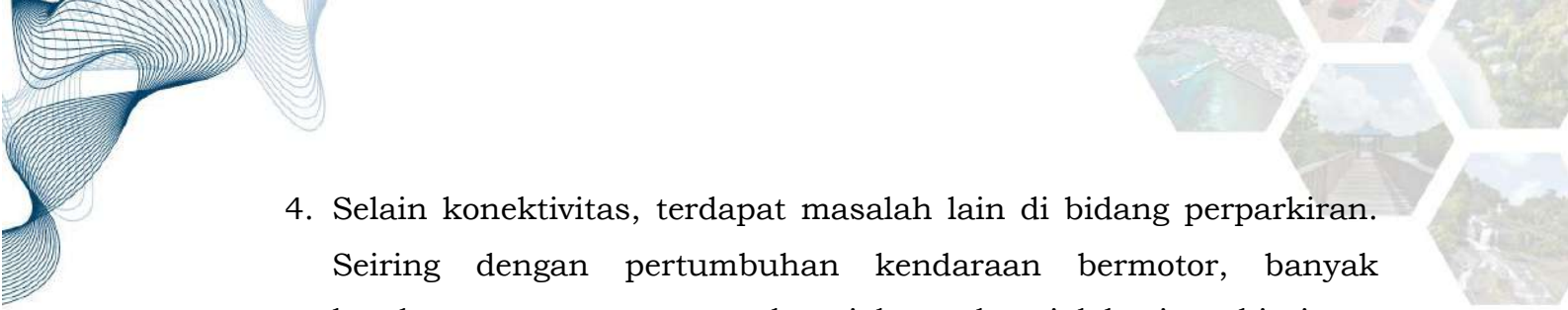
Permasalahan utama pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Masih rendahnya penyuluhan terkait Keluarga Berencana.
2. Jumlah klinik keluarga berencana belum tersebar merata.
3. Capaian Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi keluarga berencana masih berada di kisaran angka 69% dan belum mencakup keseluruhan.
4. Perlunya peningkatan ketersediaan kebutuhan masyarakat akan obat dan alat kontrasepsi

d. Perhubungan

Permasalahan utama pada urusan Perhubungan adalah:

1. Aksesibilitas dan Konektivitas antar pulau dalam kabupaten masih rendah dikarenakan minimnya sarana dan prasarana penyeberangan seperti kurangnya alat penyebrangan kapal serta belum terbangunnya jalan yang menghubungkan pelabuhan Matak.
2. Selain itu, pelabuhan yang sudah terbangun minim dengan sarana prasarana penunjang seperti ruang tunggu, lampu penerangan, dll.
3. Dari sisi ekonomi, Pelabuhan yang ada di setiap kecamatan belum mendukung untuk digunakan sebagai tempat bongkar muat barang. Serta minimnya rambu-rambu lalu lintas di wilayah perairan.

- 
4. Selain konektivitas, terdapat masalah lain di bidang perparkiran. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor, banyak kendaraan yang menggunakan jalan sebagai lokasi parkir inap. Selain itu, penerimaan daerah dari sektor perparkiran juga belum dioptimalkan.

e. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Belum terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
2. Belum adanya sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung digitalisasi, dan
3. Masih terdapat kesenjangan akses internet dan perangkat telekomunikasi di wilayah Anambas dikarenakan persebaran akses internet yang belum merata

f. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

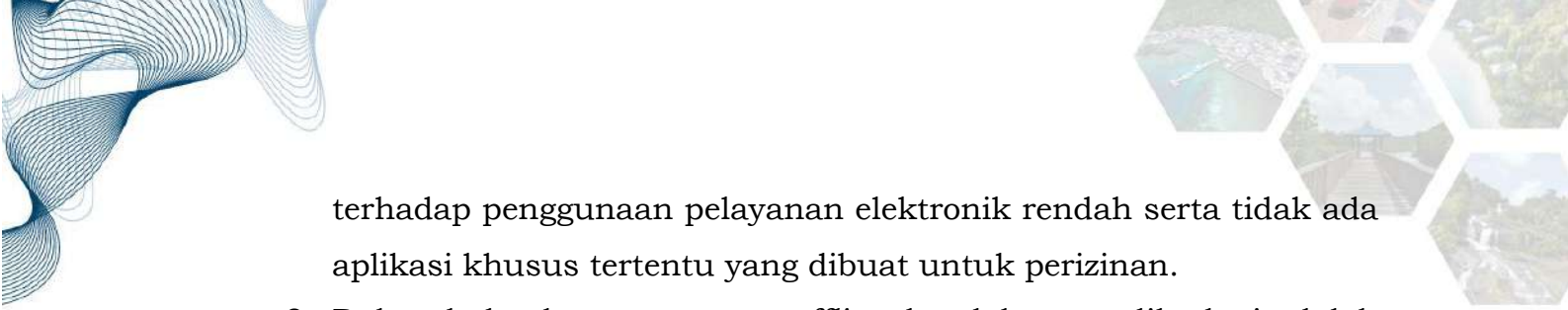
Permasalahan utama pada urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah:

1. Permasalahan yang dihadapi KUKM terkait dengan penguatan kualitas dan kuantitas laporan pertanggungjawaban yang rendah. Hal tersebut dikarenakan:
 - a. Pengelolaan KUKM yang menggunakan sistem manual dan belum mengikuti perkembangan,
 - b. Minimnya tenaga KUKM yang berkompeten dalam hal administrasi dan keuangan serta pengetahuan tentang akses pelayanan keuangan

g. Penanaman Modal

Permasalahan utama pada urusan Penanaman Modal adalah:

1. Masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan adalah belum tersedianya pelayanan dengan sistem elektronik secara menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan respon



terhadap penggunaan pelayanan elektronik rendah serta tidak ada aplikasi khusus tertentu yang dibuat untuk perizinan.

2. Dalam hal pelayanan secara *offline*, kendala yang dihadapi adalah belum terpenuhinya standar pelayanan minimal khususnya pada kelengkapan sarana dan prasarana.
3. Dari aspek sumber daya manusia, perlunya peningkatan Integritas, profesionalitas dan etos kerja pada SDM yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
4. Selain itu dari sisi pemohon, pelaku usaha memiliki pemahaman yang rendah terkait OSS (NIB) sehingga memiliki ketergantungan tinggi pada PTSP dalam penginputan NIB.

h. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama pada urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah:

1. Belum terlaksananya upaya peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor Kepemudaan dan olahraga
2. Kurang maksimalnya upaya dalam pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.
3. Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi belum maksimal.
4. Sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar nasional juga masih minim.

i. Statistik

Permasalahan utama pada urusan Statistik adalah:

1. Dalam rangka mencapai Satu Data Statistik Sektorial Kabupaten Kepulauan Anambas, terdapat beberapa masalah yang dihadapi di antaranya rendahnya kualitas dan kuantitas data sektoral yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan belum terbentuknya forum satu data serta lemahnya koordinasi antara pihak terkait dalam penyediaan data. Selain itu, masalah yang dihadapi adalah kurangnya keamanan data elektronik.



j. Persandian

Permasalahan utama pada urusan Persandian adalah:

1. Masih banyak jenis informasi daerah yang perlu diamankan untuk menghindari *cyber crime*. *Cyber crime* dengan memanfaatkan celah di sistem komunikasi, menjadi ancaman bagi daerah untuk mengamankan informasi dan data yang dimiliki daerah.

k. Kebudayaan

Permasalahan utama pada urusan Kebudayaan adalah:

1. belum optimalnya pemanfaatan, perlindungan, pengembangan dan pembinaan kebudayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah:
 - a. Belum dilakukannya penetapan cagar budaya,
 - b. Belum ada inventarisasi warisan budaya tak benda,
 - c. Belum tersedianya fasilitas untuk penyelenggaraan pendidikan seni yang berkualitas,
 - d. Minimnya sanggar kesenian atau budaya yang sudah terdaftar dan berbadan hukum,
 - e. Serta kurangnya SDM di bidang kesenian khususnya tari melayu.

l. Perpustakaan

Permasalahan utama pada urusan Perpustakaan adalah:

1. Perlunya peningkatan pengelolaan, daya tarik, dan koleksi perpustakaan daerah untuk meningkatkan kunjungan.

m. Kearsipan

Permasalahan utama pada urusan Kearsipan adalah:

1. Perlunya program perbaikan sistem administrasi kearsipan, termasuk arsip statis dan dinamis pemerintah daerah yang dikelola melalui sistem kearsipan dan program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah dengan cara dialihmediakan.

4. Layanan Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

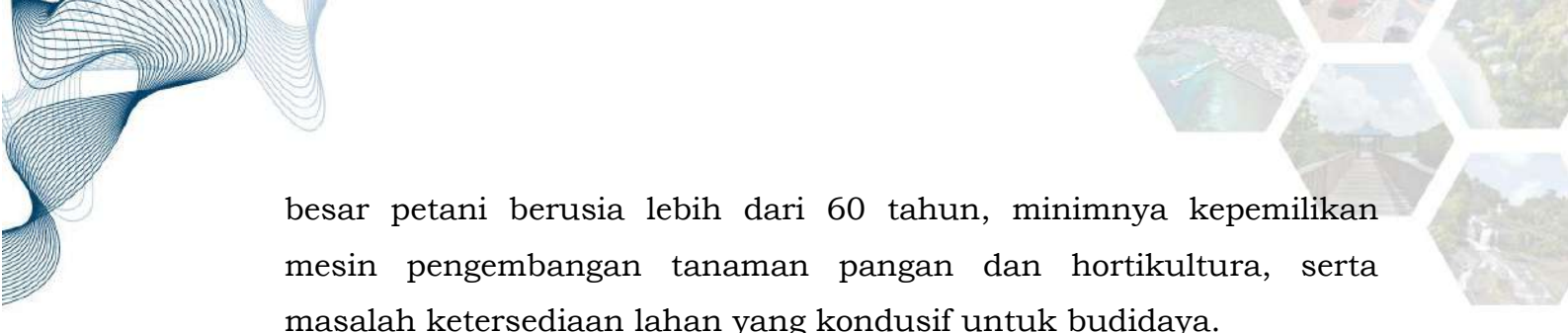
1. Produksi ikan yang relatif kurang stabil
2. Armada dan alat tangkap yang digunakan nelayan masih berskala kecil dan bersifat tradisional, hal tersebut berimplikasi pada volume tangkapan yang berskala kecil pula.
3. Belum ada industri untuk mengelolah hasil perikanan seperti misalnya industri pengolahan tepung ikan. Hal tersebut dikarenakan ketidakstabilan hasil tangkapan sebagai bahan baku produk olahan serta akses permodalan yang tidak memadai.
4. Perlunya mewaspadaai degradasi sumber daya Ikan misalnya penyu, ikan napoleon, ikan-ikan pelagis akibat eksploitasi komoditas yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi

b. Pariwisata

1. Rendahnya kunjungan dan pendeknya lama tinggal wisatawan
2. Kemitraan antara pemerintah, pihak swasta belum optimal dalam mengembangkan sektor pariwisata, misalnya keterbatasan fasilitas pendukung wisata seperti penginapan yang masih minim dan transportasi yang cukup sulit.
3. Masih terbatasnya pengembangan dan pemanfaatan potensi wisata selain daya tarik wisata utama yang menyebabkan Pengembangan usaha atau industri kreatif penunjang pariwisata juga belum optimal.
4. Data kepariwisataan baik mengenai potensi maupun usaha di bidang pariwisata belum terdokumentasi dengan baik sebagai basis pengambilan kebijakan

c. Pertanian

Beberapa masalah yang dihadapi di antaranya terkait diversifikasi tanaman pertanian dan perkebunan (seperti pala, cengkeh, aren, dan kelapa), rendahnya petani dengan usia produktif karena sebagian



besar petani berusia lebih dari 60 tahun, minimnya kepemilikan mesin pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, serta masalah ketersediaan lahan yang kondusif untuk budidaya.

d. Perdagangan

Masalah utama yang dihadapi adalah terkait pengendalian harga dan stok barang yang dikarenakan beberapa hal di antaranya adalah masih panjangnya alur distribusi untuk barang pokok dan beberapa barang penting, ketiadaan Gudang untuk pengendalian stok barang, tingginya disparitas harga, serta adanya dugaan permainan harga sehingga diperlukan adanya operasi pasar berkala. Selain itu, distribusi dan alokasi BBM jenis tertentu juga belum merata. Belum optimalnya pemanfaatan tol laut juga berkontribusi terhadap permasalahan stabilitas harga dan stok barang.

Dalam hal retribusi, pendapatan pemerintah daerah dari retribusi sarana perdagangan masih minim dikarenakan rendahnya transaksi di pasar tradisional, adanya revisi peraturan retribusi daerah yang membutuhkan waktu sosialisasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran retribusi.

e. Kehutanan

Urusan pilihan bidang kehutanan tidak lagi dilaksanakan karena bukan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang 23 tahun 2014.

f. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral tidak lagi dilaksanakan karena bukan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang 23 tahun 2014.

g. Perindustrian

Industri di Anambas masih didominasi oleh industri mikro yang memerlukan dukungan untuk berkembang.

h. Transmigrasi

Masalah utama transmigrasi terkait dengan lahan di mana luas wilayah penetapan transmigrasi tidak mencukupi serta topografi wilayah yang dinilai tidak sesuai untuk lahan transmigrasi.

5. Penunjang Urusan

a. Perencanaan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam bidang perencanaan adalah kurangnya ketersediaan data sebagai basis penyusunan kebijakan, panjangnya proses penyusunan sehingga sering kali mengakibatkan keterlambatan, proses penjaringan aspirasi masyarakat yang belum optimal, analisa usulan program/ kegiatan yang belum optimal sehingga terjadi ketidakselarasan *output* dan *outcome* yang dihasilkan, program/ kegiatan yang disusun juga belum memperhatikan aspek indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, serta adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga mengakibatkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah.

b. Keuangan

Dalam hal pengelolaan keuangan Daerah berbasis elektronik, kendala yang dihadapi adalah terkait kurangnya ketersediaan sumber daya manusia serta minimnya pemahaman sumber daya manusia yang ada terhadap pengelolaan keuangan daerah. Masalah teknis yang dihadapi dalam sistem elektronik adalah jaringan internet yang belum memadai.

c. Kepegawaian

1. Masih terdapat penempatan ASN yang tidak sesuai dengan kompetensi atau analisis jabatan
2. Masih terdapat kasus pelanggaran disiplin aparatur



d. Pendidikan dan Pelatihan

1. Masih minimnya persentase pegawai yang lulus diklat kompetensi manajerial bernilai memuaskan
2. Belum optimalnya pegawai yang dinyatakan lulus diklat peningkatan kompetensi teknis bernilai baik

e. Pengelolaan Perbatasan

1. Perlunya peningkatan capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri
2. Perlunya peningkatan penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara dengan sarana dan prasarana yang memadai

f. Pengawasan

1. Masih rendahnya tindak lanjut yang dilaksanakan berdasarkan hasil rekomendasi BPK dan Inspektorat di tingkat Kabupaten dan Provinsi
2. Perlunya peningkatan kinerja pengawasan

g. Kecamatan

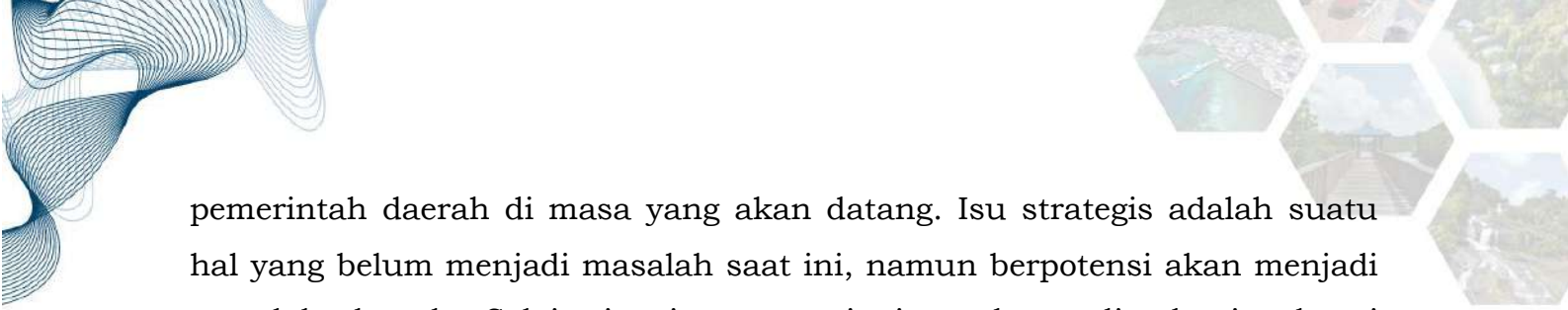
1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja, indeks kepuasan layanan masyarakat, nilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program dan kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan

h. Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban, maupun dalam bidang politik

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan hal yang penting dalam perencanaan pembangunan Daerah, karena memiliki dampak yang signifikan, penting, mendesak dan dapat mempengaruhi capaian tujuan penyelenggaraan



pemerintah daerah di masa yang akan datang. Isu strategis adalah suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

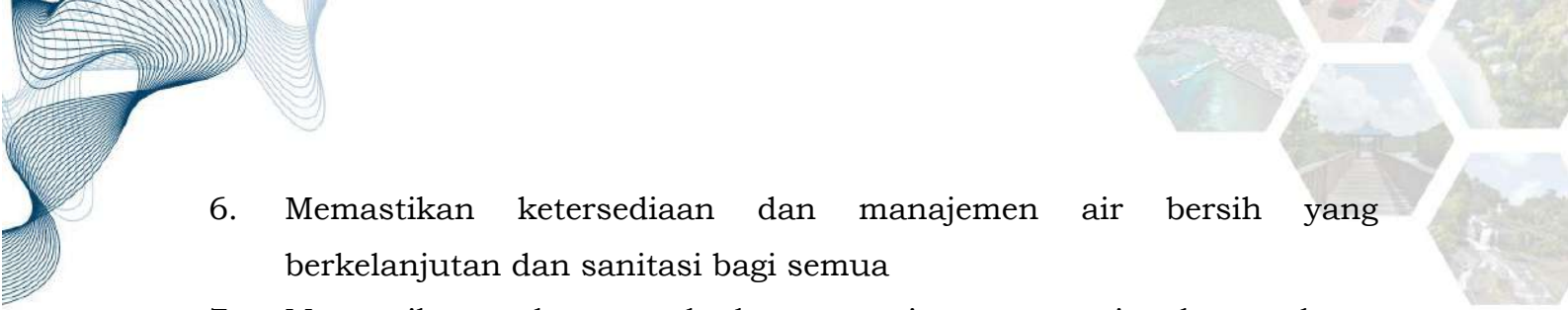
Dalam subbab ini akan dibahas isu-isu strategis yang relevan dengan Kab. Kepulauan Anambas. Pertama, dibahas adalah isu strategis internasional, lalu isu strategis nasional dan isu strategis daerah.

4.2.1 Isu Internasional

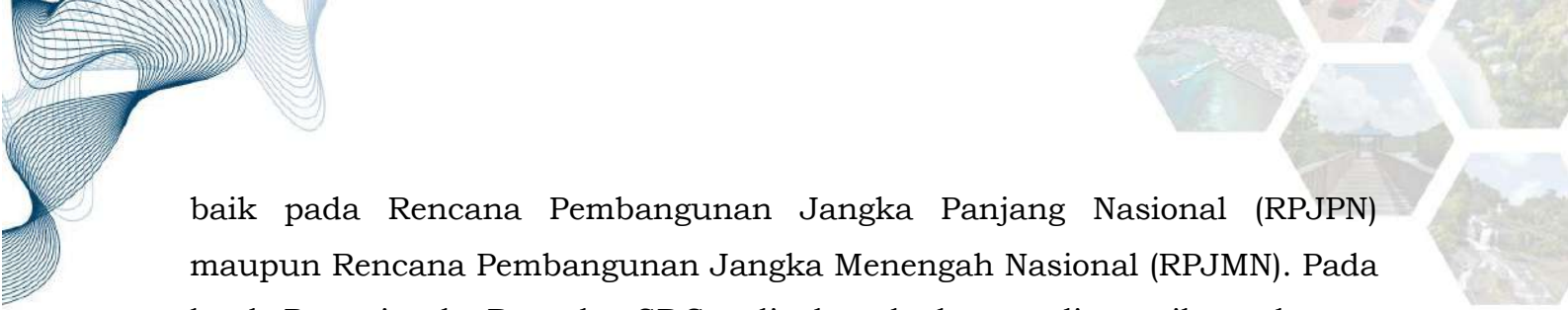
a. *Sustainable Development Goals (SDG'S)*

Pada tahun 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang harus dilaksanakan dalam periode waktu 2016-2030. SDGs adalah agenda pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 target pembangunan. 17 target tersebut adalah:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan

- 
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua
 7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi
 10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara
 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
 14. Mengonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan
 15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati
 16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level
 17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

Sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan SDGs, melalui Perpres 59 Tahun 2017 diamanatkan bahwa perlu adanya penyelarasan SDGs dengan rencana pembangunan nasional

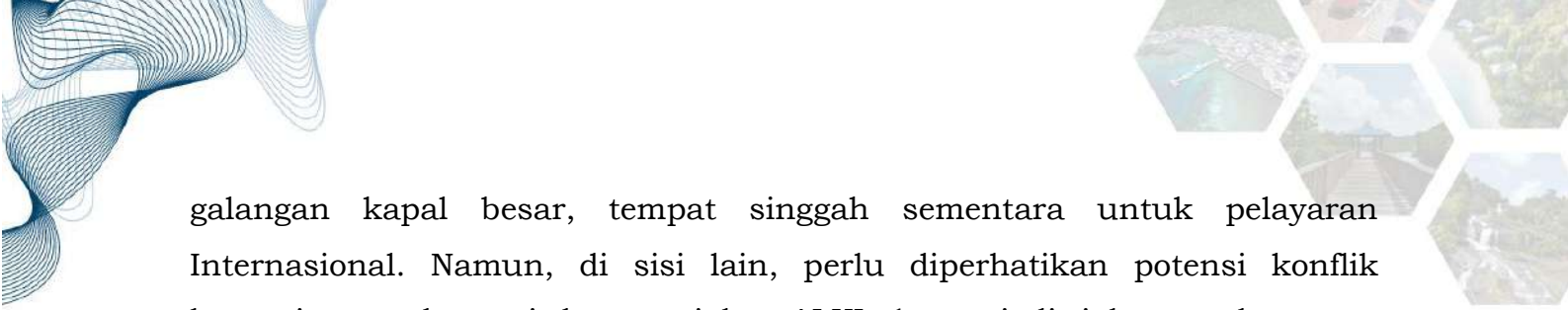


baik pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada level Pemerintah Daerah, SDGs di daerah harus disesuaikan dengan rumusan RPJMD masing-masing daerah dengan mengacu kepada RPJMN. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Daerah TPB. Rencana Aksi Daerah TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas berkewajiban untuk berkontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB dan melaksanakannya sesuai kewenangan daerah otonom.

b. Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI 1)

ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dapat diterjemahkan sebagai alur laut yang dapat dilalui oleh Kapal-kapal dan pesawat udara internasional dengan cara normal, semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan di bagian laut lepas atau ZEE Indonesia lainnya. Penetapan ALKI diperkuat dan diperjelas lagi melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002, Tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia. Peraturan tersebut memuat 3 cabang ALKI. ALKI 1 melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia. Difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke arah Samudera Hindia dan sebaliknya. Untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya - atau disebut sebagai Alur Laut Cabang I A. Dengan demikian, Kabupaten Kepulauan Anambas dilintasi oleh ALKI 1 dan ALKI cabang 1 A.

Jalur ALKI 1 menjadi jalur strategis karena dilalui pelayaran Internasional. Jalur ini dapat dijadikan potensi dalam rangka menangkap peluang ekonomi yang tercipta dari jalur laut ini. Sebagai contoh, untuk membuat

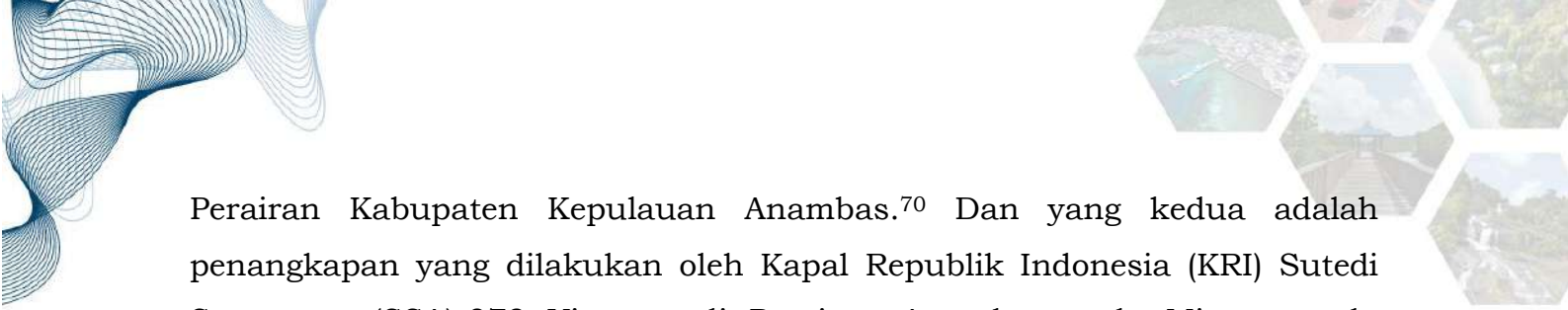


galangan kapal besar, tempat singgah sementara untuk pelayaran Internasional. Namun, di sisi lain, perlu diperhatikan potensi konflik kepentingan ekonomi karena jalur ALKI 1 menjadi jalur perdagangan internasional. Apalagi saat ini sedang terjadi konflik laut China Selatan. Perlu di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam 5 tahun ke depan, peluang dan ancaman adanya ALKI 1 ini.

c. *Illegal fishing* oleh Nelayan asing

Sebagai Kabupaten yang sebagian besar luasnya terdiri dari wilayah laut, potensi kelautan tentu menjadi hal yang sangat menonjol di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sayangnya, potensi kelautan di Kabupaten Kepulauan Anambas belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya disebabkan oleh maraknya pelanggaran batas wilayah yang mengarah pada kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh pihak – pihak yang berasal dari luar Anambas, seperti negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kep. Anambas. Keadaan tersebut menimbulkan ancaman bagi para nelayan lokal yang pendapatannya berkurang karena kalah bersaing dengan pelaku *illegal fishing*, dari segi sarana dan prasarana peralatan tangkap. Selain itu, hal tersebut juga dapat menjadi ancaman bagi ekosistem laut yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas karena penggunaan peralatan yang tidak ramah lingkungan. Terjadinya peningkatan kasus pencurian ikan dari tahun ke tahun di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal fishing*. Jika *praktek illegal fishing* tidak ditangani secara menyeluruh dan kompleks, maka dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas terutama masyarakat nelayan pesisir.

Setiap tahunnya, tercatat adanya penangkapan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Anambas. Pada semester kedua di tahun 2020 saja, sudah tercatat 2 penangkapan kapal asing Vietnam yang sedang menangkap ikan secara ilegal. Penangkapan yang pertama terjadi pada tanggal 20 Agustus 2020 oleh PSDKP Batam di



Perairan Kabupaten Kepulauan Anambas.⁷⁰ Dan yang kedua adalah penangkapan yang dilakukan oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) Sutedi Senoputra (SSA)-378 Vietnam di Perairan Anambas pada Minggu pada tanggal 23 September 2020 yang bermuatan 5 ton ikan campuran.⁷¹ Pada tahun 2018, Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengamankan 3 kapal ikan milik Vietnam karena diketahui melakukan *illegal fishing* di perairan sebelah barat Pulau Jemaja, Kabupaten Anambas,⁷²

Perlu disadari bahwa persoalan *illegal fishing* ini merupakan persoalan *multi-actors* dalam konteks melibatkan banyak pihak (masyarakat nelayan, pemerintah dan pelaku perikanan), *multi-level* karena melibatkan juga aktor global (asing) khususnya yang terkait dengan konflik *fishing ground* kerja sama multilateral di level sub-regional maupun regional, dan multi-mode khususnya yang terkait dengan regulasi peraturan, *law enforcement*, hingga penyediaan fasilitas, dan prasarana pengawasan.⁷³ Dengan mempertimbangkan efek ganda yang ditimbulkan dari persoalan *illegal fishing* seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pemerintah perlu menyusun strategi khusus dalam menanggulangi kondisi ini.

D. Harga Komoditas Migas Internasional



Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi migas yang luar biasa hingga menjadi salah satu sumber Migas di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan SKK Migas sebagai pengelola dan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia dan perusahaan Migas internasional seperti Medco E&P, Premier Oil Indonesia, & Star Energy yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor migas, yaitu sebesar 80% pada tahun 2020, terhadap perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas mengakibatkan pergerakan pertumbuhan ekonomi bergantung pada arah pertumbuhan sektor ini sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sensitif terhadap nilai produksi migas setiap tahunnya. Hal ini menguntungkan

⁷⁰ <https://www.merdeka.com/peristiwa/illegal-fishing-di-perairan-anambas-2-kapal-vietnam-ditangkap-pdskp-batam.html>

⁷¹ <https://news.detik.com/berita/d-4227580/illegal-fishing-kapal-vietnam-ditangkap-di-perairan-anambas>

⁷² <https://news.okezone.com/read/2018/11/28/340/1984071/curi-ikan-di-laut-kepri-3-kapal-asal-vietnam-diamankan>

⁷³ T. Muhammad Almuzamil. 2017. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Illegal Fishing Pada Tahun 2014-2015. Unri: Pekanbaru. Hlm. 9



apabila produksi migas dapat dipastikan meningkat setiap tahunnya, tetapi pada kenyataannya harga minyak dunia tidak menentu sehingga sulit mencapai kestabilan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan sektor migas yang bernilai negatif tentu berdampak pada penurunan penerimaan daerah dan membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas.⁷⁴ Seperti yang terjadi pada tahun 2017 – 2019, harga minyak dunia yang cenderung meningkat pada tahun 2017 – 2018 triwulan II menyebabkan perekonomian Anambas juga membaik jika dilihat dari PDRB total (dengan migas), akan tetapi saat harga minyak dunia turun pada tahun 2018 triwulan III, maka terjadi penurunan PDRB yang cukup drastis di Kabupaten Kepulauan Anambas hingga mencapai angka – 8,21 di akhir tahun 2018.

Ketergantungan migas dalam perencanaan 5 tahun ke depan perlu di cermati dan sudah saatnya dirumuskan *exit strategy* agar pembangunan tidak mengandalkan dari migas. Perlu ada dorongan kepada sektor-sektor non migas yang punya potensi untuk dikembangkan.

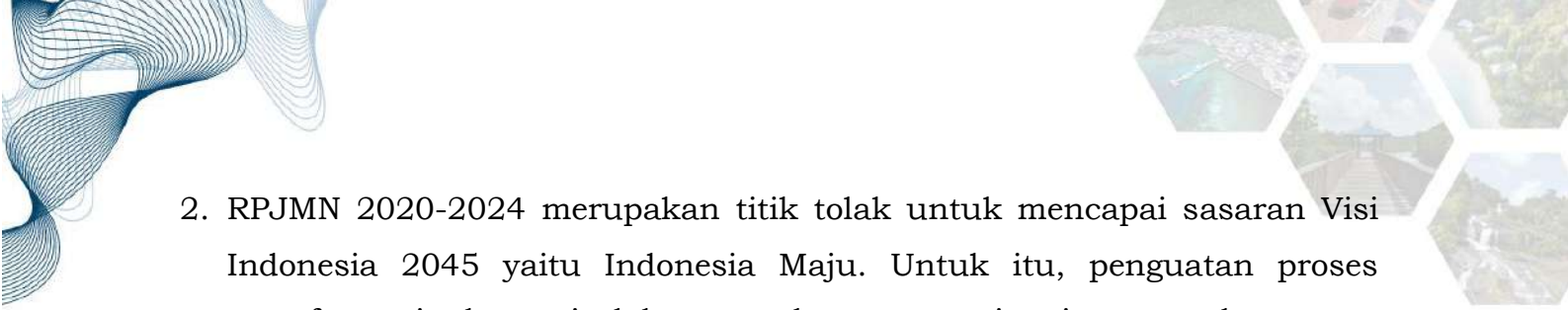
4.2.2 Isu Nasional

a. RPJMN 2020 -2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2025 harus memperhatikan dokumen RPJM Nasional tahun 2020-2024. Di dalam Lampiran 1 Narasi RPJMN 2020-2024, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2025 :

1. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

⁷⁴ Ruth Yuliani Hutabarat, *Penentuan Sektor Unggulan di Kabupaten Kepulauan Anambas*, Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1, 2020

- 
2. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
 3. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup, Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima prioritas presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024. Agenda tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.



4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

7. Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Berdasarkan arah pembangunan wilayah di RPJMN 2020-2024, wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah bagian dari koridor wilayah Pulau Sumatera. Di mana, prioritas pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Pembangunan wilayah Sumatera akan dilakukan dengan fokus pada aspek pertumbuhan dan pemerataan. Dan khususnya bagi Kepulauan Anambas, pembangunan wilayahnya diarahkan untuk pemerataan.

b. Kebijakan Ekonomi Nasional Menghadapi Pandemi Covid-19

Adanya Pandemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020 berpengaruh tidak hanya pada perekonomian nasional melainkan perekonomian daerah. Hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami perlambatan ekonomi. Sebanyak 1,7 juta pekerja tervalidasi mengalami PHK dan dirumahkan pada 2020. Selain itu, adanya pandemi meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah di Indonesia (Kementerian Keuangan, 2020).

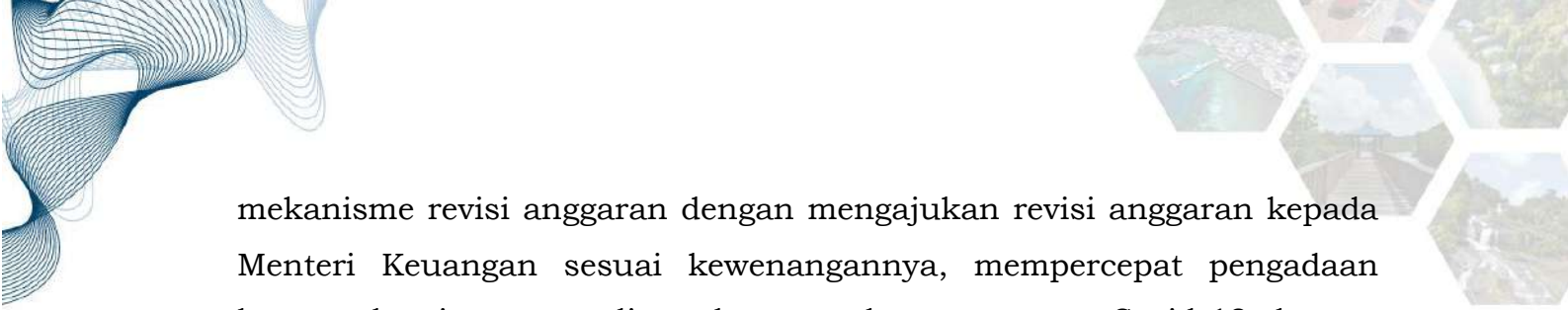
Guna mengatasi dampak dari COVID-19, pemerintah menyiapkan berbagai regulasi untuk penanganan dan pemulihan ekonomi nasional di antaranya:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dukungan APBN Untuk Pemulihan Ekonomi Di Daerah di antaranya:

- Penyiapan tambahan dukungan berupa Dana Insentif Daerah (DID) untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian di daerah
- Penyediaan fasilitas pinjaman kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah
- Penggunaan cadangan DAK fisik untuk program pembangunan fisik.

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Inpres ini adalah instruksi dari Presiden untuk melakukan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 kepada beberapa pejabat termasuk pejabat daerah seperti para Gubernur seluruh Indonesia dan para Bupati/Walikota seluruh Indonesia, untuk mengutamakan alokasi anggaran dan *refocussing* untuk kegiatan penanganan Covid-19 melalui



mekanisme revisi anggaran dengan mengajukan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai kewenangannya, mempercepat pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk penanganan Covid-19 dengan melibatkan LKPP dan BPKP, di mana khusus alat Kesehatan dan kedokteran memperhatikan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

3. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang

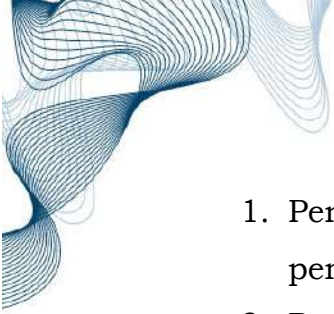

Undang-undang ini menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai UU yang mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemik Covid-19 yang diperkirakan juga akan mengancam membahayakan ekonomi nasional, termasuk ekonomi daerah tentunya dan/atau stabilitas keuangan. UU ini diundangkan pada tanggal 16 Mei 2020 dan berlaku saat diundangkan sedangkan Perpunya sendiri diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020 dan berlaku saat diundangkan. Pada lampiran Undang-undang tersebut yang merupakan Salinan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dijelaskan kebijakan yang akan mempengaruhi keuangan daerah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) huruf i dan j sebagai berikut:

- i. Melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocussing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;

Dalam penjelasannya dijelaskan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa" antara lain berupa:

- 
- 
1. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;
 2. Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
 3. Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang DAK Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak; dan/atau
 4. Penyesuaian pagu anggaran Dana Desa. Yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan Dana Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

j. Memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah

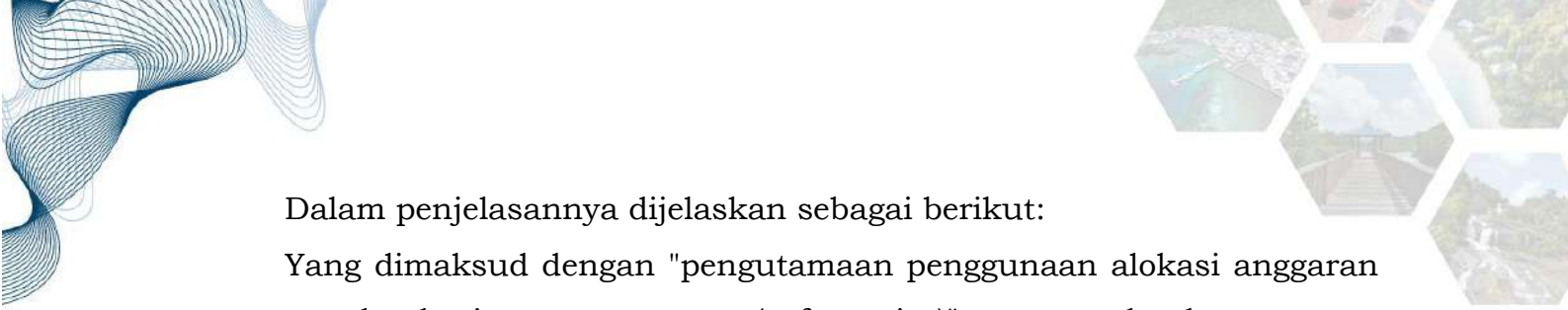
Dalam penjelasannya dijelaskan sebagai berikut:

Hibah kepada pemerintah daerah diberikan dalam rangka penanganan bencana alam, bencana non alam, bencana kemanusiaan dan/atau kebijakan stimulus fiskal dalam rangka mengurangi dampak ekonomi atas bencana tersebut.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 3 menjelaskan secara khusus kebijakan di Bidang Keuangan Daerah sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocussing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Dalam penjelasannya dijelaskan sebagai berikut:

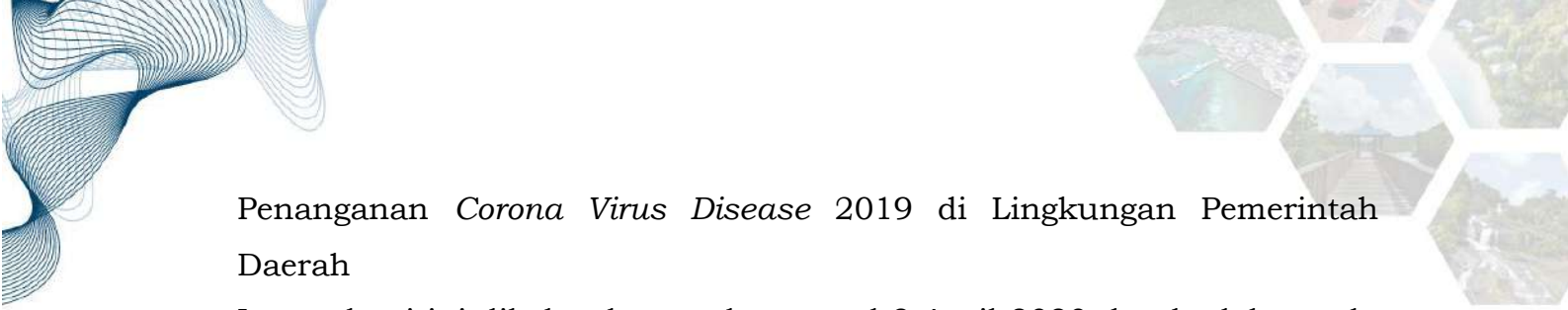
Yang dimaksud dengan "pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocussing*)" termasuk kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan alokasi antar program.

- (2) Ketentuan mengenai pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocussing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 27 menjelaskan ketentuan penutup sebagai berikut

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
- (2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan



Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Inmendagri ini dikeluarkan pada tanggal 2 April 2020 dan berlaku pada tanggal dikeluarkan. Inmendagri ini ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk:

KESATU

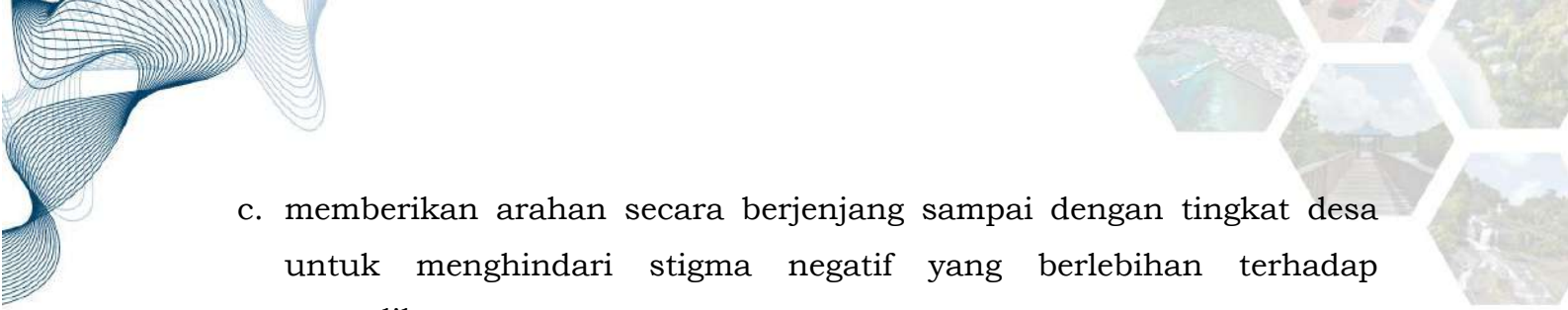
Melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:

- a. penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

KEDUA

Melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/agama untuk:

- a. mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID-19;
- b. dalam hal masyarakat terlanjur mudik, maka kepada masyarakat pemudik yang tiba di daerah tujuan mudik untuk:
 - 1) melakukan isolasi mandiri sebagai orang dalam pemantauan (ODP) sesuai dengan protokol kesehatan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan; dan
 - 2) mempersiapkan tempat karantina kesehatan dan pemberian bantuan kedaruratan kepada masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan.

- 
- c. memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat desa untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik;

KETIGA

Memastikan dan mengawasi:

- a. kecukupan sembako di wilayah masing-masing baik dalam ketersediaan supply dan kelancaran distribusi; dan
- b. aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha terutama yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19 tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan (jaga jarak, hand sanitizer, dll).

KEEMPAT

Pelaksanaan Instruksi Menteri ini khususnya terkait percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri ini dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah dalam kesempatan yang pertama

KELIMA

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (*refocussing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan Instruksi Menteri ini akan dilakukan rasionalisasi dana transfer.

KEENAM

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini.

KETUJUH

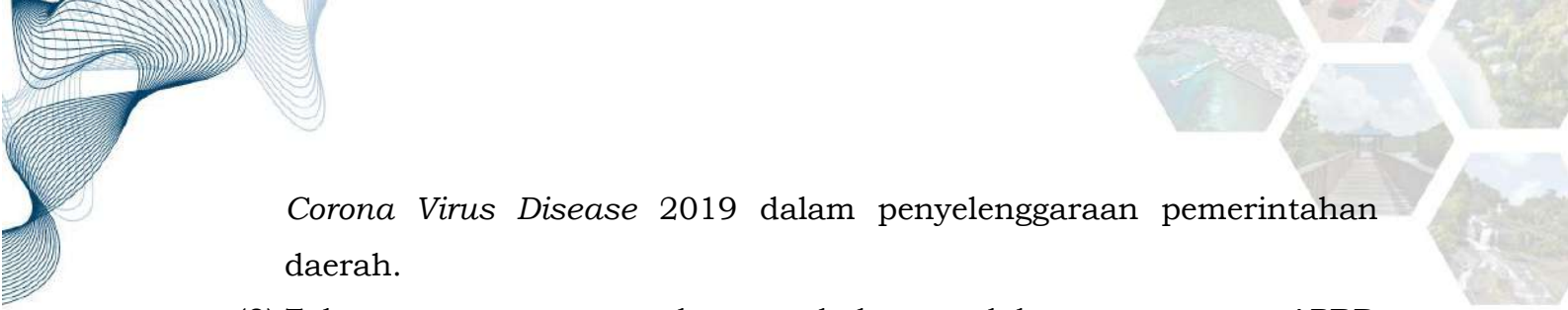
Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Inmendagri ini menegaskan dan mengingatkan para kepala daerah agar mempercepat penanganan Covid-19 di daerah dengan menggunakan APBD-nya masing-masing di mana penganggarannya dipantau langsung oleh Kementerian Dalam Negeri beserta sanksi jika rasionalisasi dana transfer jika tidak melakukan percepatan sesuai batas waktu yang ditentukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Permendagri ini ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020 dan berlaku pada tanggal ditetapkan. Permendagri ini sebenarnya tidak mengatur secara khusus penanganan Covid-19 seperti peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Permendagri ini mengatur secara umum pedoman penyusunan APBD pmda seluruh Indonesia untuk tahun anggaran 2021. Namun demikian terdapat pasal yang mengatur pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 untuk penanganan Covid-19 yaitu Pasal 5 yang menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dengan prioritas sebagai berikut:
 - a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 - c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*.
- (2) Dalam hal pandemi *Corona Virus Disease 2019* suatu daerah telah dapat dikendalikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman

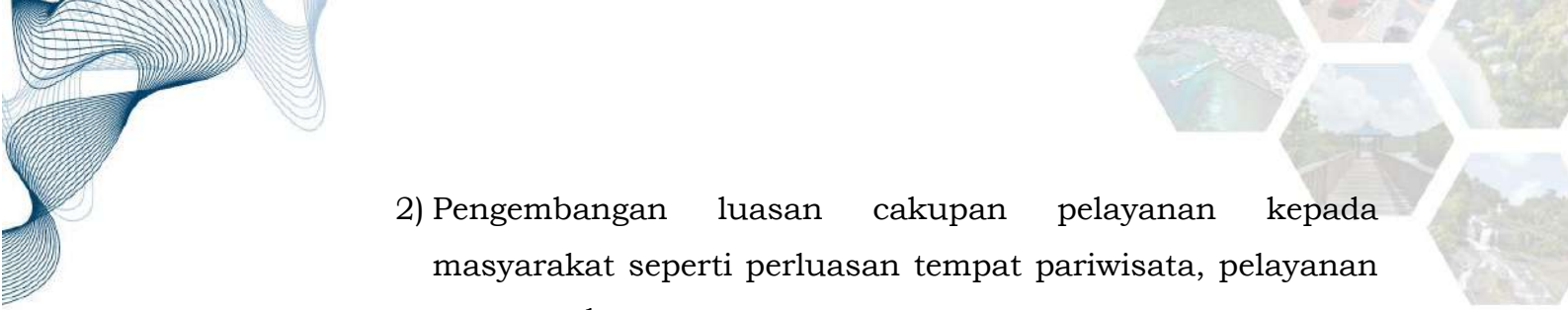


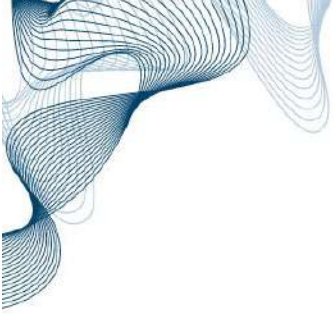
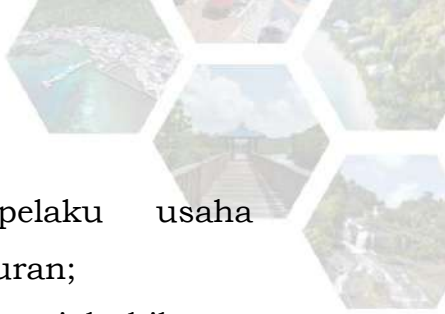
Corona Virus Disease 2019 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (3) Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019*.
- (4) Penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pada penerapan status daerah oleh satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada lampiran beberapa pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 terkait penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut:

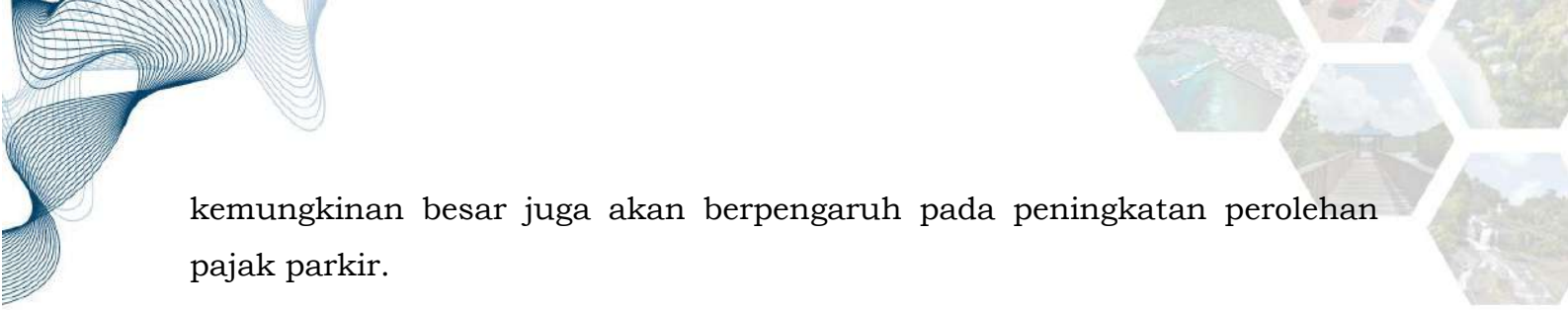
- Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi tersebut di daerah.
- Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan skenario *the new normal* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan protokol COVID19.
 - b. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi antara lain sebagai berikut:
 - 1) pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak dan retribusi;

- 
- 2) Pengembangan luasan cakupan pelayanan kepada masyarakat seperti perluasan tempat pariwisata, pelayanan persampahan;
 - 3) Pembangunan infrastruktur yang menyangkut pelayanan dasar.
 - 4) Pemulihan ekonomi, antara lain sebagai berikut:
 - a) Penguatan alokasi dana subsidi dan/atau penyertaan modal;
 - b) Menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;
 - c) Penyediaan bantuan bagi UMKM melalui pembukaan akses terhadap lembaga keuangan;
 - d) Promosi investasi domestik maupun internasional;
 - e) Peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak covid-19, melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, forum group discussion, seminar, dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis, dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan covid-19.
 - f) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau retribusi termasuk sanksi, antara lain sebagai berikut:
 - (1) Pajak kendaraan bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk sektor perindustrian dan penjualan kendaraan bermotor;
 - (2) Pajak kendaraan bermotor untuk sektor angkutan umum;
 - (3) Pajak bumi bangunan untuk sektor pendidikan, pelaku usaha perhotelan, restoran, dan hiburan, serta balai konservasi;

- 
- 
- (4) Pajak reklame untuk pelaku usaha perhotelan, restoran, dan hiburan;
 - (5) Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan untuk sektor industri perhotelan, restoran, dan hiburan;
 - (6) Retribusi pelayanan pasar untuk para pedagang;
 - (7) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk penduduk kurang mampu;
 - (8) Perpanjangan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah

Permendagri ini memiliki arahan agak berbeda dengan regulasi sebelumnya yang lebih fokus pada penanganan Kesehatan dan dampak ekonomi karena pandemi Covid-19. Permendagri ini mulai mengarahkan semua pemerintah daerah agar mulai menyusun anggaran pemulihan ekonomi untuk melaksanakan penerapan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) yang produktif dan aman dari Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan pemulihan ekonomi tersebut dilakukan antara lain dengan memanfaatkan sistem informasi, memulihkan pariwisata dengan diijinkannya hotel untuk beroperasi seiring dengan perbaikan penanganan sampahnya, menggiatkan pembangunan infrastruktur dasar, dan adanya bantuan terhadap UMKM. Dengan adanya arahan ini diharapkan ekonomi membaik dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Selain pemulihan ekonomi, dilakukan juga beberapa arahan terkait pajak daerah termasuk untuk Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan untuk sektor industri perhotelan, restoran, dan hiburan agar dilakukan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok pajak termasuk sanksi. Pajak parkir tidak disebut dalam arahan Permendagri ini, namun apabila sektor-sektor tersebut di atas dapat pulih kembali maka



kemungkinan besar juga akan berpengaruh pada peningkatan perolehan pajak parkir.

c. Arah Kebijakan Nasional Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 akan mencakup:

1. Penguatan Sektor Kesehatan

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas *health security* terutama *surveillants*, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/ produksi dengan normal.

2. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi *exclusion* dan *inclusion error*, terutama kelompok miskin dan rentan baru pasca pandemi COVID-19. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan Industri (KI) dan pariwisata.

4. Pembangunan SDM

Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

5. Akselerasi Investasi

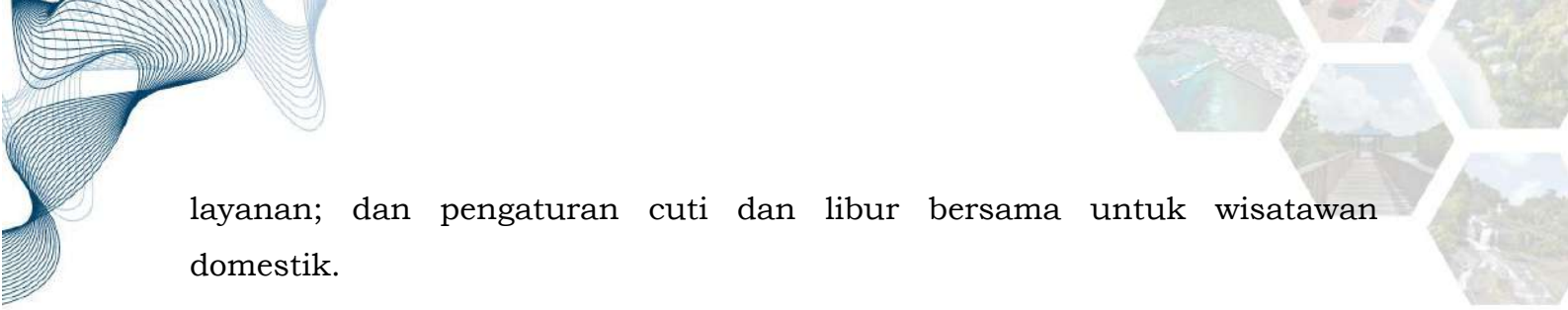
Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui percepatan integrasi *Online Single Submission* (OSS), meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, melakukan *aftercare service* untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan *positive-list* investasi.

6. Pemulihan Industri dan Perdagangan

Optimalisasi *competitive advantage* sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi *Preferential Trade Agreement (PTA)* *Free Trade Agreement (FTA)* *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.

7. Pembangunan Pariwisata

Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata dalam negeri dan secara bertahap ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olahraga, seni budaya, dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)*; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar



layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

8. Pendalaman Sektor Keuangan

Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.

d. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal dibentuk untuk menjamin terpenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara yang harus disediakan oleh pemerintah. Merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM didefinisikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM adalah salah satu alat pengendali supaya pelayanan dasar menjadi prioritas oleh pemerintah daerah. Di dalam UU Pemerintahan Daerah yang baru tersebut, terjadi beberapa perubahan terkait pembagian urusan di dalamnya dan hal tersebut berdampak pada SPM. Pada UU tersebut mengamanatkan 6 (enam) urusan wajib terkait pelayanan dasar, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum & Tata Ruang; (4) Perumahan Rakyat; (5) Sosial; dan (6) Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat. Pada tahun 2018, keluar peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

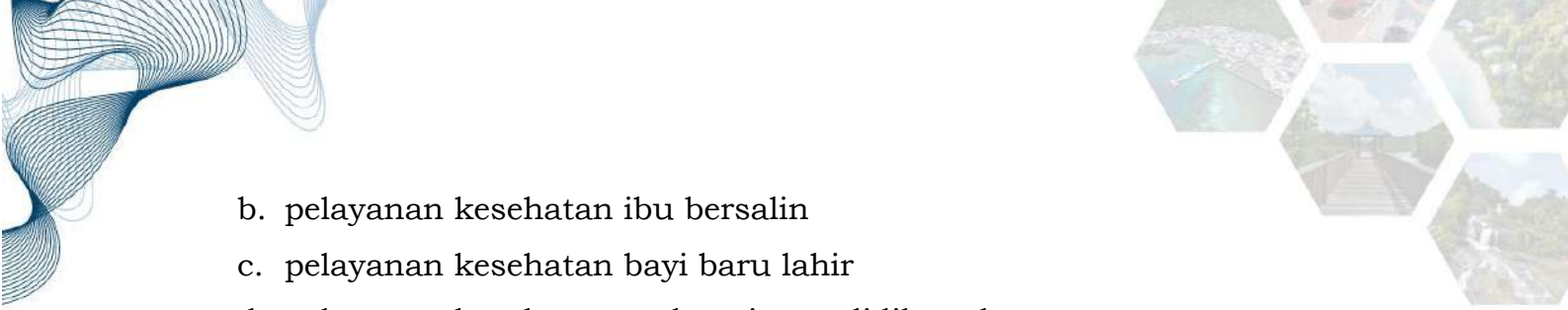
Berikut adalah lingkup SPM di pemerintahan kabupaten :

1. SPM Pendidikan :

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

2. SPM Kesehatan :

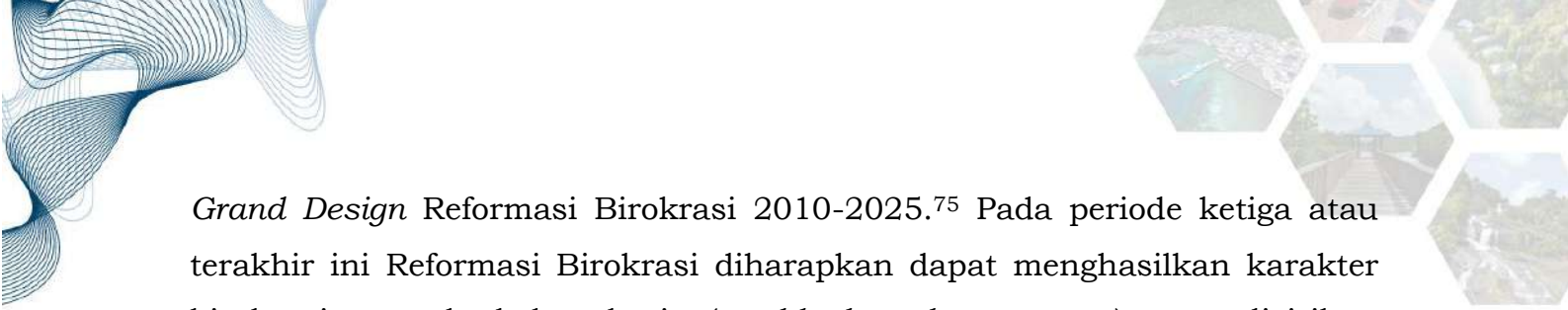
- a. pelayanan kesehatan ibu hamil

- 
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 - d. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
 - e. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
 - b. pelayanan informasi rawan bencana
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
5. SPM Sosial
- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

SPM ini harus diintegrasikan dalam RPJMD Kabupaten Kep. Anambas. Dengan terintegrasinya SPM dengan RPJMD, SPM dapat dianggarkan dalam APBD sehingga daerah berkomitmen dalam memberikan pelayanan dasar minimal tersebut kepada masyarakat.

e. Reformasi Birokrasi

Saat ini sudah berlaku Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 yang ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2020 sebagai pengganti *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang sudah tidak berlaku lagi. Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang



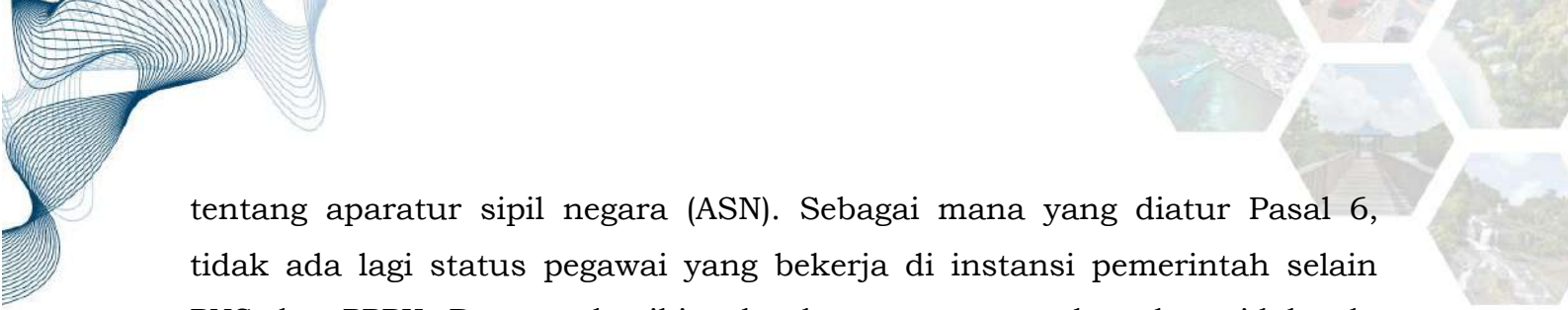
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.⁷⁵ Pada periode ketiga atau terakhir ini Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas, dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Dalam *Road Map* ini asas yang akan diutamakan adalah fokus dan prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti bahwa setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, Kabupaten Kepulauan Anambas perlu untuk menyesuaikan pengelolaan pemerintahan berdasarkan *road map* yang berlaku.

Salah satu yang menjadi tantangan dalam pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah masalah sumber daya manusia (SDM). Kondisi sumber daya manusia di Anambas, khususnya untuk ASN saat ini dirasa masih belum mencukupi kebutuhan fungsi aparatur pemerintah secara keseluruhan, baik dari sisi pengelolaan pemerintahan hingga pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, saat ini jumlah pegawai tidak tetap yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas masih cukup tinggi. Para pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebar di berbagai sektor pelayanan masyarakat, mulai dari Pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan. Pada tahun 2020, terdapat 3.588 PTT di Kabupaten Kepulauan Anambas. Jumlah ini jauh melampaui jumlah ASN yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas yang hanya berjumlah 1.773 orang.⁷⁶

Dengan tingginya angka PTT, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kekhawatiran terhadap isu kebijakan penghapusan PTT yang dimulai pada tahun 2021 oleh Kemenpan-RB sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Penghapusan status PTT merupakan kesepakatan antara Komisi II DPR dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk menjalankan mandat UU Nomor 5 Tahun 2014

⁷⁵ <https://ortala.dkn.go.id/agenda/detail/menteri-panrb-terbitkan-peraturan-tentang-road-map-rb-2020-2024>

⁷⁶ <https://batampos.co.id/2020/05/19/3-558-pegawai-tidak-tetap-tak-dapat-thr-ini-kata-sekda-anambas/>

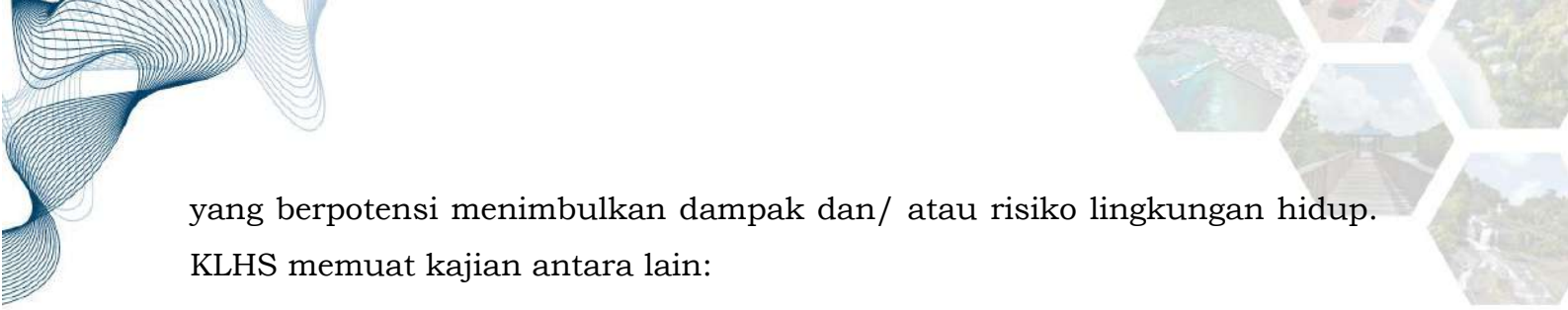


tentang aparatur sipil negara (ASN). Sebagai mana yang diatur Pasal 6, tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK. Dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas patut waspada terhadap hal ini mengingat PTT saat ini masih mendominasi jumlah karyawan di kantor pemerintahan Anambas. Oleh karena itu, ketimpangan PTT dan ASN harus segera diatasi agar pemerintahan dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan adanya kebijakan penghapusan status PTT tersebut.

f. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pembangunan berkelanjutan itu sendiri merupakan sebuah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah serta kebijakan, rencana, dan/ atau program



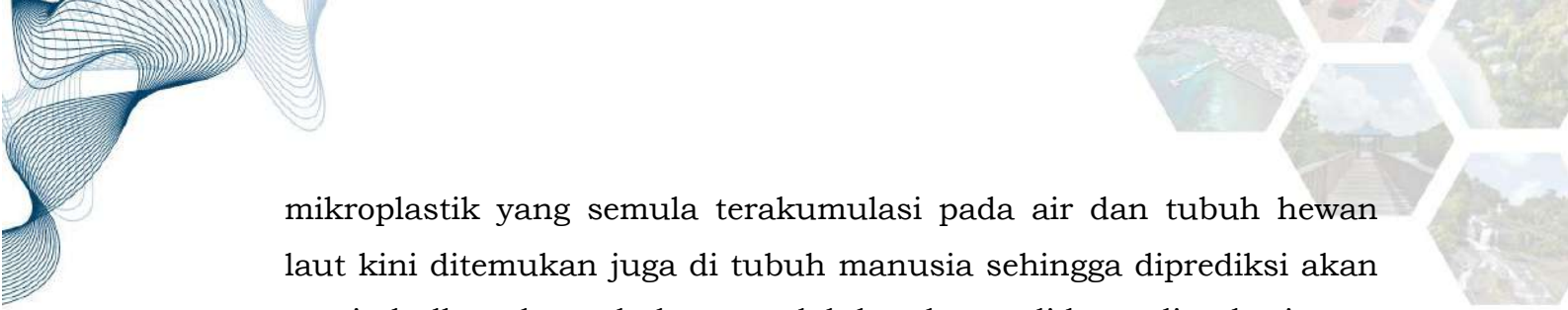
yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko lingkungan hidup. KLHS memuat kajian antara lain:

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Beberapa indikator lingkungan hidup yang harus dicantumkan dalam dokumen perencanaan daerah RPJPD dan RPJMD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 di antaranya adalah kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan, aksi perubahan iklim, limbah B3, persampahan, dll.

Isu nasional lingkungan hidup berdasarkan RPJMN 2020-2024 yang turut menjadi isu strategis di Kabupaten Kepulauan Anambas di antaranya:

1. Degradasi kualitas lingkungan hidup akibat adanya masalah sampah baik yang mencemari daratan maupun lautan. Pada tahun 2018, tingkat keberhasilan penanganan sampah nasional baru mencapai 68,8 persen dari total timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 65,8 juta ton, sementara tingkat pengurangan sampah hanya mencapai 2,8 persen. Sebagai dampaknya, terdapat timbulan sampah yang tidak tertangani sebesar 28,4 persen atau sekitar 18,7 juta ton yang dibuang langsung ke lingkungan (*leakage*) dan menimbulkan pencemaran. Dari timbunan sampah yang tidak tertangani tersebut, sekitar 0,7 juta ton/tahun terbawa hingga ke laut, yang mana sebagian besar di antaranya merupakan sampah plastik. Selain menimbulkan pencemaran lingkungan, pencemaran sampah plastik juga mengakibatkan gangguan serius bagi kehidupan biota laut. Semakin banyak kejadian penyu, burung laut, hingga mamalia laut mati akibat menelan sampah plastik. Selain itu, kandungan

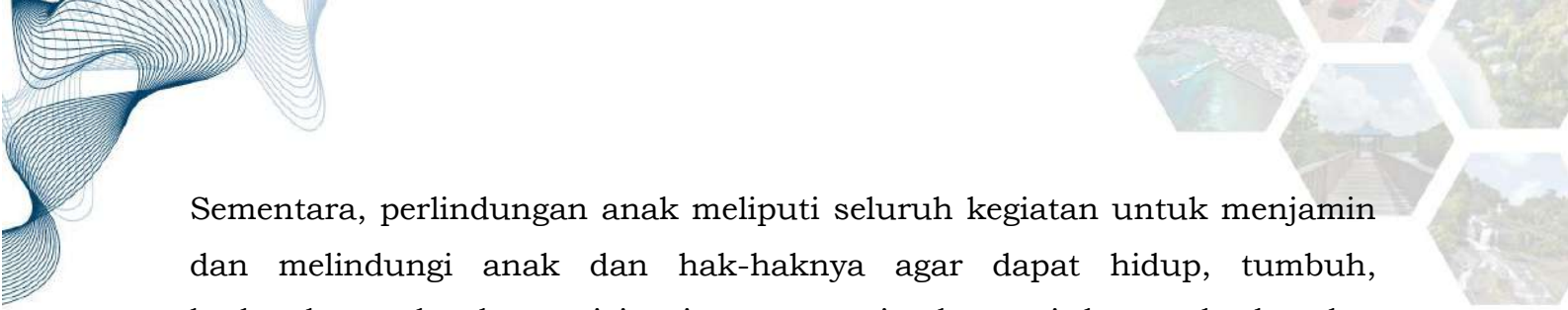


mikroplastik yang semula terakumulasi pada air dan tubuh hewan laut kini ditemukan juga di tubuh manusia sehingga diprediksi akan menimbulkan dampak dan masalah kesehatan di kemudian hari.

2. Peningkatan potensi dampak dan risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Tren bencana hidrometeorologi semakin meningkat di Indonesia dipengaruhi oleh variabilitas iklim ekstrem jangka pendek dan pengaruh perubahan iklim. Dalam jangka pendek, dapat dirasakan bahwa peristiwa iklim ekstrem semakin sering terjadi, sementara dalam jangka panjang temperatur permukaan bumi akan mengalami peningkatan yang signifikan dari kondisi saat ini. Selain kenaikan temperatur, perubahan iklim juga mempengaruhi curah hujan di Indonesia. Besarnya pengaruh perubahan iklim terhadap curah hujan di Indonesia ditunjukkan dengan semakin tingginya curah hujan pada bulan-bulan basah dan semakin rendah curah hujan pada bulan-bulan kering dengan rentang nilai perbedaan curah hujan berkisar -2,5 hingga 2,5 mm/hari.

g. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dan Pemenuhan Hak Anak

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yakni dalam meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.



Sementara, perlindungan anak meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Tantangan yang akan dihadapi adalah meningkatkan berbagai upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya dengan mengedepankan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban secara efektif.

4.2.3. Isu Daerah Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Kepulauan Riau

1. Kota Batam

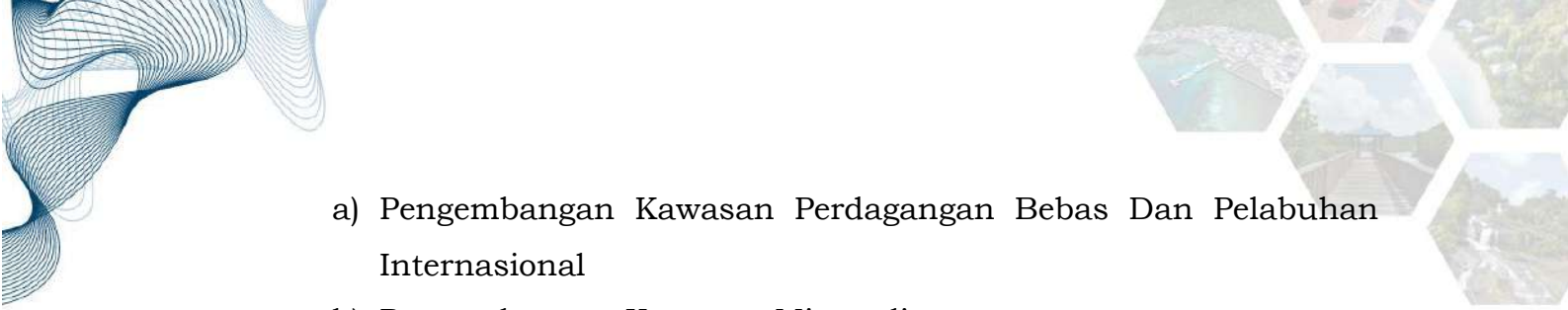
Isu-isu strategis berdasarkan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 meliputi :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2. Peningkatan kualitas, pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat yang Berdaya Saing
4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja
6. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
7. Peningkatan Kualitas Produk Kepariwisata (Jasa dan Perdagangan sebagai Unggulan Kota Batam)

2. Kabupaten Bintan

Isu-isu strategis berdasarkan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 meliputi:

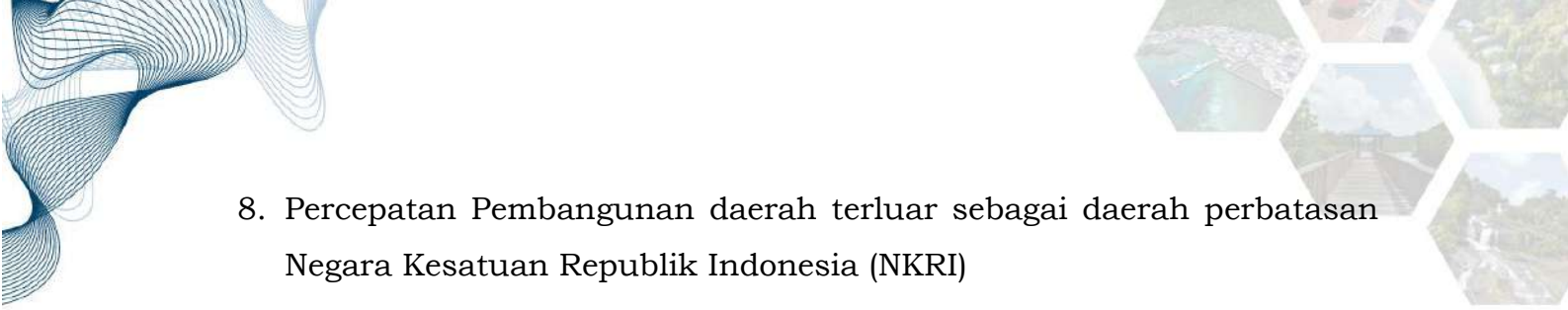
1. Isu Ekonomi

- 
- a) Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Internasional
 - b) Pengembangan Kawasan Minapolitan
 - c) Pengembangan Pariwisata
 - d) Peningkatan Aksesibilitas Ke Pulau-Pulau Kecil
 - e) Pengembangan infrastruktur jalan, terminal, pelabuhan dan lapangan udara
2. Isu Sosial – Masyarakat
 - a) Pemerataan Penduduk dan Peningkatan Pelayanan Dasar
 - b) Sinkronisasi Kebijakan/Aturan
 3. Isu Lingkungan
 - a) Kecenderungan Kawasan Lindung untuk Budidaya
 - b) Peningkatan Kualitas Lingkungan
 - c) Pengolahan Sampah
 - d) Peningkatan Kualitas Air Baku

3. Kabupaten Natuna

Isu-isu strategis berdasarkan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 meliputi:

1. Pembangunan berkeadilan Gender
2. Kualitas Pembangunan Manusia
3. Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis Kabupaten Natuna yang terintegrasi secara sektor dan parsial serta berwawasan lingkungan
4. Pembangunan Infrastruktur Informatika E-Government Pemerintah Kabupaten Natuna
5. Reformasi tata kelola Birokrasi dan Profesionalisme aparatur Pemerintah daerah yang berkompetensi.
6. Pengembangan dan penguatan Ekonomi berbasis potensi sumber daya unggulan daerah
7. Pengembangan dan Penguatan Investasi

- 
8. Percepatan Pembangunan daerah terluar sebagai daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

4. Kabupaten Lingga

Isu strategis Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021 meliputi:

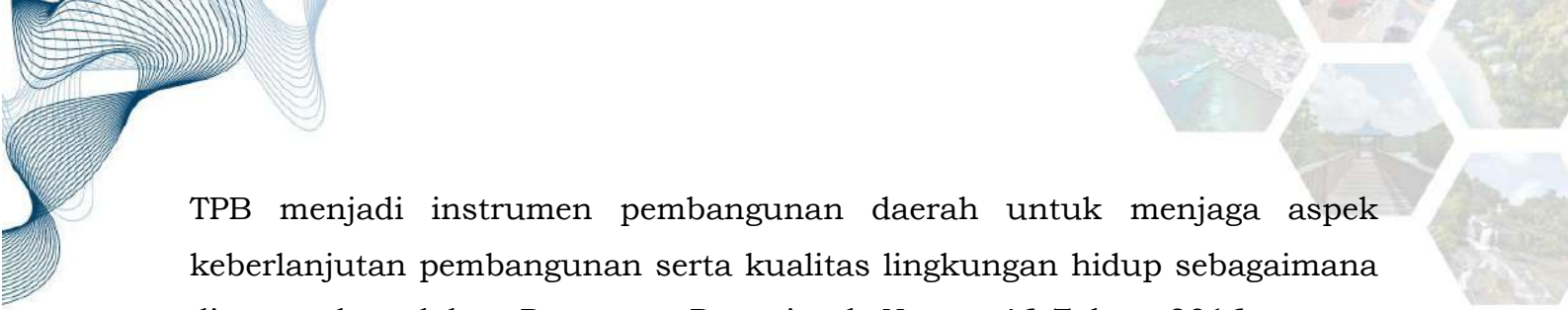
1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas;
3. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
4. Pembangunan infrastruktur yang memadai baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan
5. Berwawasan lingkungan;
6. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi dan telekomunikasi;
7. Penguatan ekonomi dalam bidang kelautan, pertanian dan pariwisata;
8. Peningkatan kesejahteraan bagi pelaku usaha pertanian dan kelautan;
9. Peningkatan iklim investasi di berbagai bidang potensial;
10. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; dan
11. Pelestarian budaya Melayu dan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat.

4.2.4. Isu strategis Daerah

Isu strategis daerah yang perlu diperhatikan di antaranya adalah rekomendasi dari KLHS. Berikut adalah hasil penelaahan dokumen tersebut:

1. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Proses penyusunan RPJMD telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.



TPB menjadi instrumen pembangunan daerah untuk menjaga aspek keberlanjutan pembangunan serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan KLHS.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (KLHS RPJMD), diterbitkan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya menyejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumber daya dan kelestarian lingkungan hidup. KLHS-RPJMD sendiri dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

KLHS Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2025 merekomendasikan isu strategis yang dapat diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026. Berikut 14 rekomendasinya:

1. Penanggulangan kemiskinan daerah;
2. Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi layak;
3. Pemenuhan hak-hak anak;
4. Peningkatan ketahanan pangan daerah;
5. Peningkatan kualitas pendidikan;
6. Penguatan UMKM;
7. Peningkatan aksesibilitas daerah;
8. Peningkatan kinerja sektor industri pengolahan;
9. Pemerataan pembangunan;
10. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
11. Peningkatan proporsi RTH;
12. Penguatan kapasitas kelompok tani dan nelayan;
13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
14. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

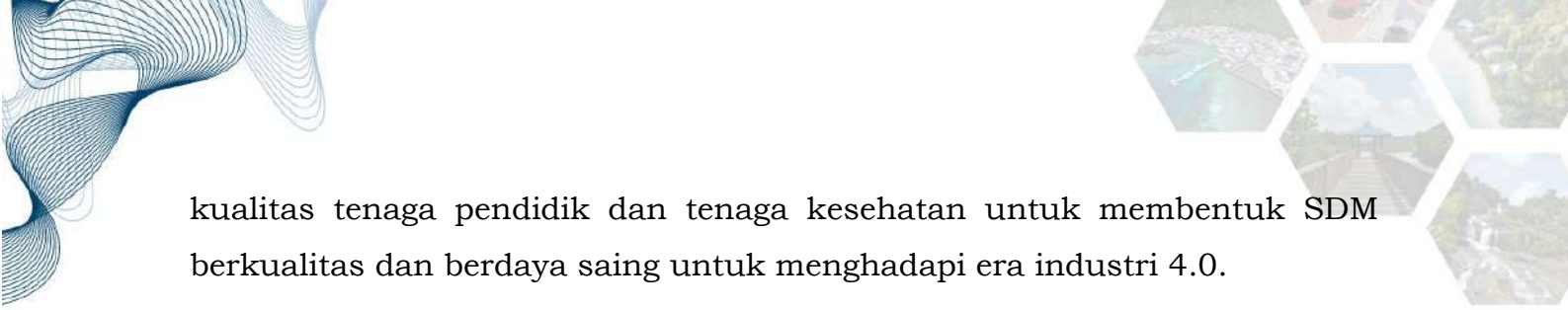
4.2.5. Isu strategis Kabupaten Kepulauan Anambas

Dengan melihat hasil identifikasi variabel penyebab yang mempengaruhi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang muncul di berbagai bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan dengan mengacu pada hasil evaluasi RPJMD periode lalu yang diperkirakan berdampak signifikan bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas di masa 5 (lima) tahun mendatang, serta hasil penelaahan isu strategis internasional, nasional, daerah sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas dan dokumen daerah KLHS Kabupaten Kepulauan Anambas, maka selanjutnya dapat diidentifikasi isu-isu strategis Kabupaten Kepulauan Anambas.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa **Isu Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026** adalah:

1. Penguatan di sektor-sektor Unggulan

Seperti dalam pembahasan bab 2, bahwa sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan diusung adalah dari sektor perikanan, pertanian dan pariwisata. 3 Pilar sektor pendukung pertumbuhan ekonomi tersebut membutuhkan prakondisi yang menjadi syarat agar 3 sektor itu terus tumbuh. Jika prakondisi ini diabaikan dan tidak dianggap sebagai bagian strategi peningkatan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka dikawatirkan akan merugikan perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas dalam 5 tahun ke depan. Syarat pertama adalah peningkatan kualitas dan kuantitas SDM. Penyediaan SDM yang berkualitas akan mengakselerasi peningkatan produktivitas di 3 sektor tersebut. SDM yang berkualitas juga diarahkan pada kemampuan mengadaptasi perkembangan teknologi saat ini. Hal ini perlu jadi perhatian, karena era industri 4.0 tidak dapat dihindari dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Ketersediaan SDM dikuatkan dengan keselarasan dunia pendidikan dan dunia usaha yang diarahkan kepada 3 sektor tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat baik dari segi sarana, prasarana, hingga



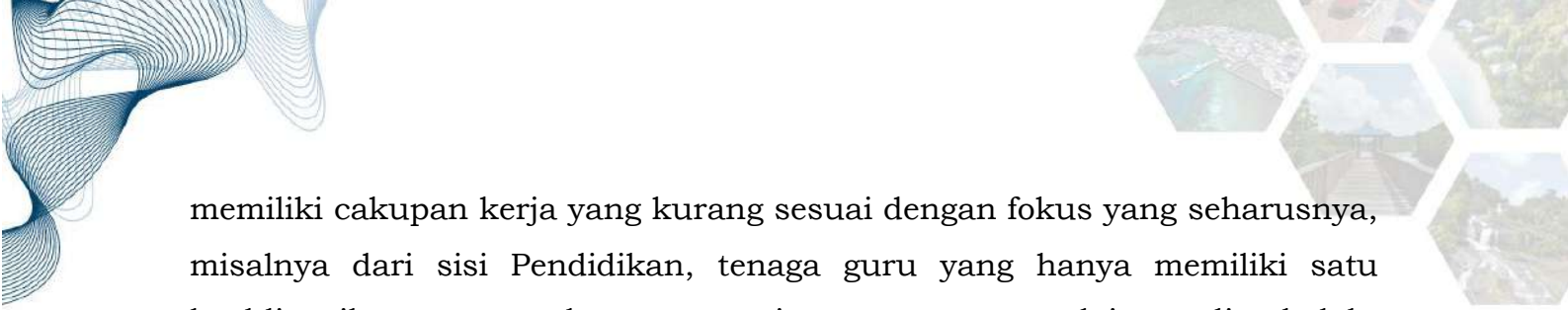
kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan untuk membentuk SDM berkualitas dan berdaya saing untuk menghadapi era industri 4.0.

Selain peningkatan kualitas di SDM, perlu diperhatikan juga adalah penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang. Kebutuhan infrastruktur seperti akses jalan, akses air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan transportasi laut, dan lainnya menjadi hal yang penting untuk mendorong sektor-sektor unggulan bergerak lebih cepat untuk menangkap peluang pasar. Selain itu, kebutuhan infrastruktur dasar dan penunjang juga dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu, searah dengan kebijakan nasional, pembangunan infrastruktur menjadi hal yang perlu dilakukan. Dengan catatan, infrastruktur yang dibangun mempunyai keterkaitan erat atau *multiplier effect* yang besar dengan pengembangan sektor unggulan. Jika pembangunan infrastruktur hanya dipandang sebagai ego sektoral, maka hasilnya tidak akan maksimal.

Dari tiga sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Anambas, dua diantaranya berkaitan dengan konsumsi pangan, yaitu perikanan dan pertanian. Dengan memiliki potensi tersebut, sayangnya Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum dapat memenuhi kondisi ketahanan pangan daerah yang stabil. Oleh karena itu, Kedua potensi unggulan tersebut perlu untuk segera dikembangkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah. Hal tersebut dapat juga dilaksanakan dengan peningkatan penguatan kapasitas kelompok tani dan nelayan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Penguatan Kapasitas Pengelolaan ASN

Sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Anambas masih tergolong kurang dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, diperlukan penguatan aparatur pemerintahan sesuai dengan kompetensinya agar aparatur dapat menjalankan fungsinya dengan efektif. Kondisi yang terjadi saat ini, masih banyak penempatan atau alokasi ASN yang kurang berpatok pada kompetensi ASN, sehingga banyak ASN



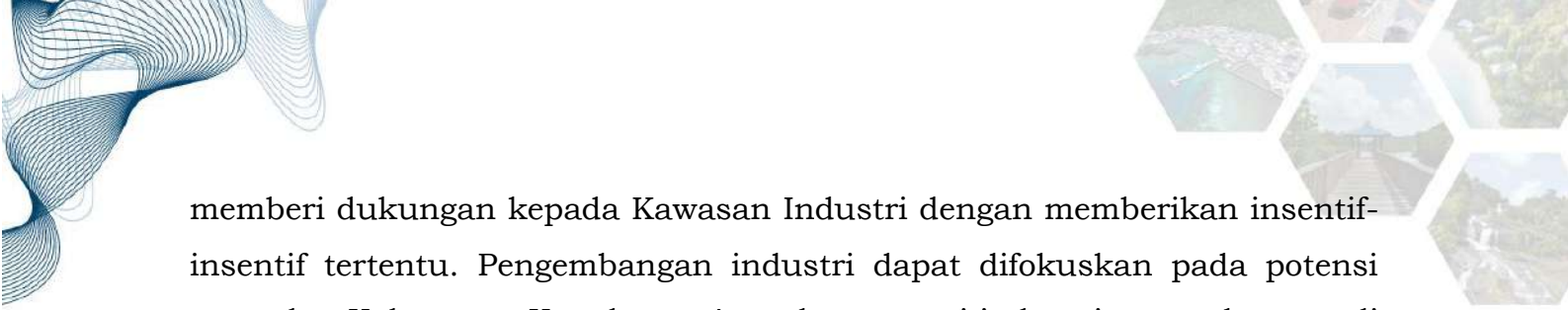
memiliki cakupan kerja yang kurang sesuai dengan fokus yang seharusnya, misalnya dari sisi Pendidikan, tenaga guru yang hanya memiliki satu keahlian ilmu tertentu harus mengajar semua mata pelajaran di sekolah. Atau dari sisi pemerintahan, ASN dapat ditugaskan ke bagian yang kurang berkaitan dengan kompetensinya. Kondisi seperti ini membuat kinerja ASN kurang efektif dan memperlambat laju pemerintahan.

Banyaknya mutasi ASN ke luar Kabupaten Kepulauan Anambas juga menjadi isu strategis semakin lemahnya kondisi SDM ASN di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemberian insentif dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif pencegahan pengajuan mutasi ASN (secara mandiri) ke luar wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain dari sisi jumlah, penguatan kapasitas pengelolaan ASN juga perlu dilakukan dari sisi kualitasnya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memberikan Bimtek kepada para ASN sesuai dengan tupoksi dan kompetensi yang dimiliki.

Selain ASN, kualitas PTT di Kabupaten Kepulauan Anambas juga perlu untuk diperhatikan, karena seperti yang diketahui, jumlah PTT di Kabupaten Kepulauan Anambas jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah ASN. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung bergantung pada ketersediaan PTT di berbagai sektor pemerintahan untuk membantu jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, kualitas PTT juga menentukan kapasitas pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama bagi PTT yang bertugas di ranah pelayanan masyarakat seperti sektor kesehatan dan pendidikan.

3. Pengembangan Kawasan Industri dan Pengembangan Wilayah Tematik

Guna menciptakan suatu ekosistem yang sesuai dan saling mendukung antar pelaku usaha, perlu adanya pembangunan kawasan khusus untuk pengembangan industri unggulan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk dapat menarik pelaku usaha, pemerintah daerah dapat

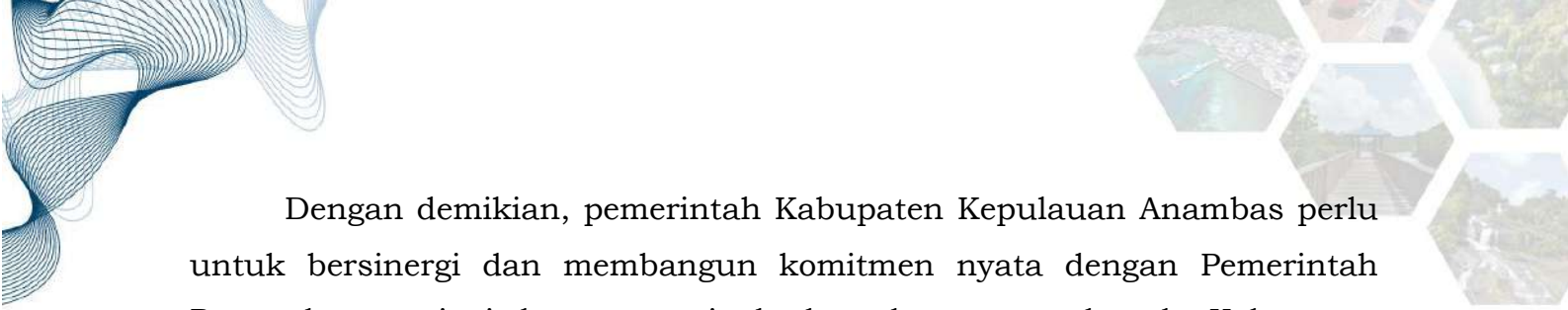


memberi dukungan kepada Kawasan Industri dengan memberikan insentif-insentif tertentu. Pengembangan industri dapat difokuskan pada potensi unggulan Kabupaten Kepulauan Anambas seperti industri pertambangan di pulau Matak, pariwisata di pulau Jemaja, Siantan Timur dan pulau matak. Pengembangan industri perikanan budidaya di pulau Matak dan pulau Bajau, untuk industri pertanian di pulau Jemaja dan pulau Matak. Adanya Kawasan Industri di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan insentif yang diberikan dapat menjadi sinyal positif bagi investor di luar Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kejelasan peta pembangunan industri sehingga berpotensi menarik investasi masuk ke dalam Kabupaten Kepulauan Anambas .

Selain itu, pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang terpecah di pulau yang berbeda dapat mengusung pembangunan tematik sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Konektivitas antar wilayah harus dipertegas guna memperkuat rantai ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Konektivitas dapat ditingkatkan dengan cara pembangunan infrastruktur perhubungan, baik lewat transportasi darat maupun laut sehingga dapat menekan biaya logistik.

4. Sinergi dan komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah

Lokasi Kabupaten Kepulauan Anambas yang masih termasuk dalam daerah terluar atau perbatasan Indonesia dengan negara lainnya harus menjadi perhatian tidak hanya bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, tetapi juga pemerintah Provinsi Kep. Riau dan tentunya Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan gerbang masuk wilayah perairan Indonesia yang kaya akan sumber daya namun rentan terhadap pelanggaran batas wilayah dan pengaruh dari pihak luar Anambas. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta pembangunan daerah yang belum responsif gender menjadi salah satu penyebab utamanya.

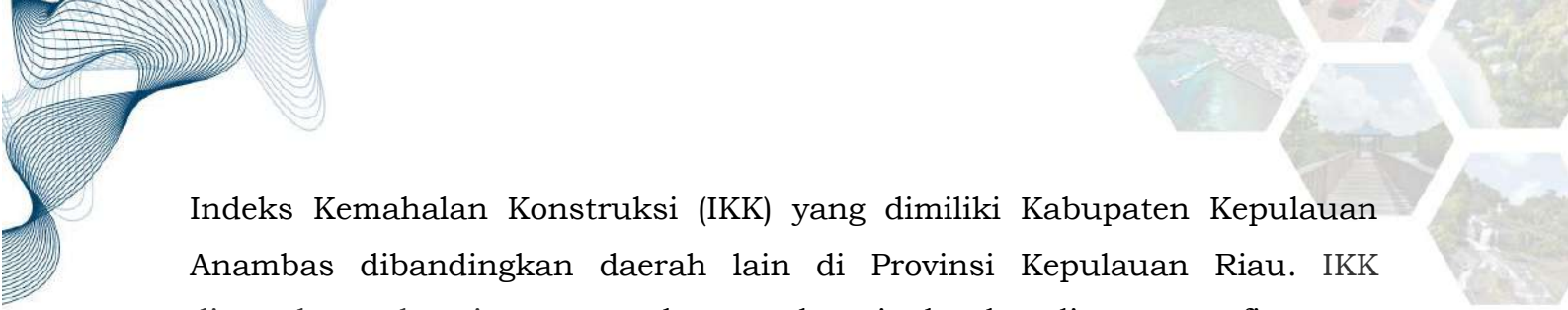


Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu untuk bersinergi dan membangun komitmen nyata dengan Pemerintah Pusat dan provinsi dengan meningkatkan daya tawar daerah. Kabupaten Kepulauan Anambas memerlukan komitmen dan sinergi dari pemerintah daerah dan pusat untuk membangun wilayah Anambas karena kondisi letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada di perbatasan membuat tanggung jawab daerah bertumpu tidak hanya pada daerah itu sendiri, tetapi juga pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat wajib untuk ikut menjaga daerah ini. Sebagai daerah terluar, masih banyak pula kewenangan – kewenangan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang justru berada di tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hal ini ternyata menjadi kendala pembangunan daerah karena kurangnya sinergi dan komitmen Pemerintah Pusat dan provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu, Anambas adalah salah satu daerah penyumbang migas yang signifikan di wilayah Kepulauan Riau. Oleh karena itu, pembangunan menjadi penting untuk mendorong perekonomian wilayah agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi dan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat berkembang baik dari segi sarana dan prasarana maupun sumber daya manusianya. Hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Salah satu sinergi dan komitmen yang dapat dilakukan secara konkret untuk pembangunan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dimulai dengan komitmen pengembangan kawasan Jemaja antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. Integrasi Infrastruktur Perdagangan Dan Logistik

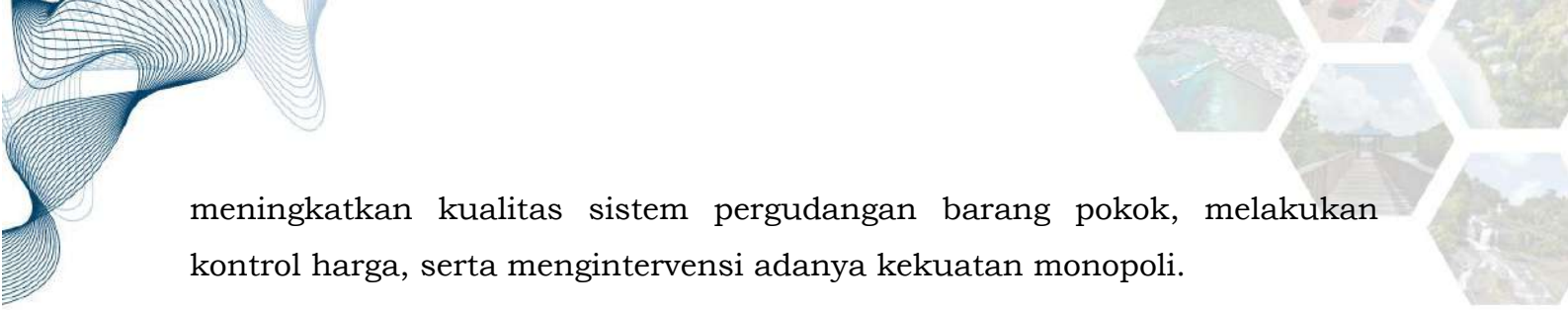
Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berupa kepulauan menyebabkan kesulitan akses yang berakibat pada tingginya biaya logistik dari dan menuju Kabupaten Kepulauan Anambas. Tingkat kesulitan akses Kabupaten Kepulauan Anambas tergambar pada tingginya



Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas dibandingkan daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau. IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Kesulitan akses dan tingginya IKK menyebabkan kegiatan pembangunan dan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas berbiaya tinggi (*high cost economy*). Pada tahun 2020, nilai IKK Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 138,78. Hal ini dapat diartikan bahwa perbandingan tingkat kemahalan barang-barang konstruksi secara umum di Kabupaten Kepulauan Anambas lebih tinggi 38,78 persen dibandingkan kota acuan, yaitu Kota Semarang. Angka tersebut menurun pada tahun 2021 menjadi 133,26. Namun demikian, Kabupaten Kepulauan Anambas masih menjadi daerah dengan IKK tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau setidaknya selama tahun 2019-2021.

Diperlukan adanya peningkatan infrastruktur sektor perhubungan guna menurunkan biaya logistik di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pembangunan infrastruktur perhubungan di antaranya pembangunan pelabuhan baik peningkatan kapasitas maupun pembangunan pelabuhan baru. Pembangunan pelabuhan harus diikuti dengan penambahan trayek atau jumlah armada angkut. Selain itu, perlu adanya pemisahan antara pelabuhan barang dan orang guna optimalisasi efektivitas pelabuhan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini utamanya untuk memperkuat peran pelabuhan logistik perdagangan.

Tingginya biaya logistik akibat sulitnya akses tercermin pada tingginya harga bahan pokok di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu, kesulitan akses juga menyebabkan pasokan kebutuhan pokok tidak stabil yang menyebabkan adanya kekurangan bahan pokok di waktu-waktu tertentu. Stabilitas pasokan juga berdampak terhadap stabilitas harga. Untuk mengatasi ketidakstabilan dan tingginya harga di Kabupaten Kepulauan Anambas, selain peningkatan infrastruktur logistik, beberapa hal yang perlu dilakukan di antaranya adalah memperkuat rantai pasok,



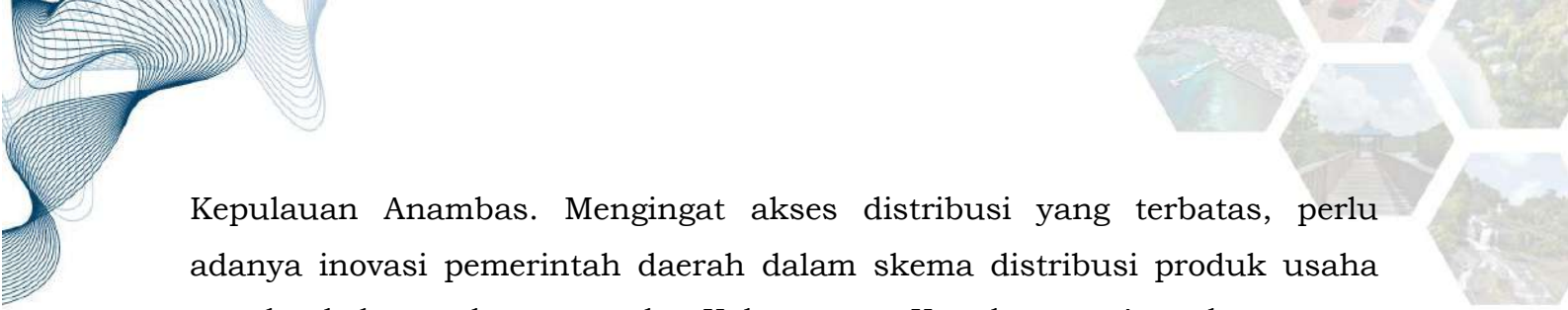
meningkatkan kualitas sistem pergudangan barang pokok, melakukan kontrol harga, serta mengintervensi adanya kekuatan monopoli.

6. Peningkatan Kewirausahaan Lokal

Rendahnya penciptaan kegiatan ekonomi baru di Kabupaten Kepulauan Anambas berdampak pada rendahnya penciptaan lapangan kerja baru. Sebagian besar masyarakat bergantung pada pekerjaan di sektor pemerintahan sebagai pekerja tidak tetap dengan upah dan kompetensi yang rendah. Guna mengatasi tingkat pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat, dan membantu mengentaskan kemiskinan daerah, perlu dikembangkan sektor kewirausahaan yang berbasis UMKM dan inovatif. Penciptaan produk wirausaha yang inovatif dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Kegiatan wirausaha dapat difokuskan pada penciptaan nilai tambah produk pada sektor-sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata.

Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat dalam memulai usaha adalah akses permodalan. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mendorong perluasan akses permodalan bagi kegiatan wirausaha dengan menyediakan bantuan permodalan dengan skema inovatif yang dapat dijangkau oleh pelaku usaha. Selain dalam hal permodalan, peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sangat diperlukan dalam mengembangkan iklim kewirausahaan seperti kemudahan izin usaha, dll., pelatihan dan pembinaan, serta sebagai inkubator untuk wirausaha baru.

Untuk memastikan keberlanjutan kegiatan wirausaha di Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu adanya kesinambungan antara penawaran dan permintaan produk wirausaha. Jangan sampai wirausaha yang sudah berjalan tidak memiliki pangsa pasar dan menghentikan kegiatan usaha. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga diperlukan dalam proses distribusi dan promosi produk usaha baik di dalam Kabupaten Kepulauan Anambas maupun di luar Kabupaten



Kepulauan Anambas. Mengingat akses distribusi yang terbatas, perlu adanya inovasi pemerintah daerah dalam skema distribusi produk usaha untuk keluar dan masuk Kabupaten Kepulauan Anambas guna menurunkan biaya kirim.

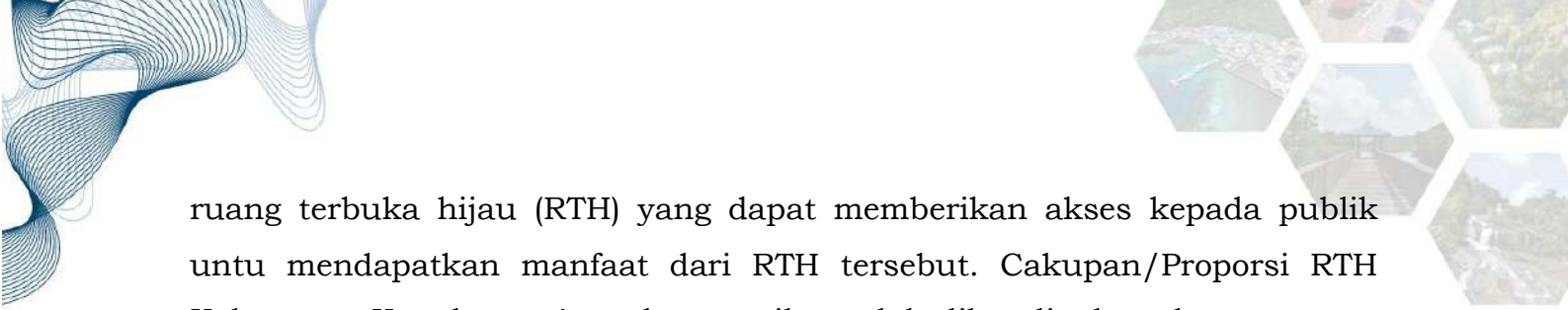
7. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup

Isu lingkungan yang menjadi fokus di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah pengelolaan sampah baik sampah di daratan maupun di lautan. Pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas masih tergolong rendah. Minimnya kualitas pengolahan sampah salah satunya dikarenakan minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki seperti ketiadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah yang tidak optimal menimbulkan penurunan kualitas lingkungan di daratan.

Selain sampah di daratan, terdapat pula permasalahan sampah di lautan. Sampah yang ada di sepanjang pantai Kabupaten Kepulauan Anambas menyebabkan pencemaran lingkungan pantai dan merusak ekosistem pantai. Selain itu, adanya sampah di pantai berpengaruh terhadap daya jual pantai sebagai objek wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas. Diperlukan fokus pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai guna meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam sektor lingkungan hidup, limbah di Kabupaten Kepulauan Anambas juga menjadi isu tersendiri, khususnya tentang pengelolaan limbah yang belum optimal di Anambas dikarenakan keterbatasan infrastruktur pendukung dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya limbah.

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Anambas juga belum dapat dikatakan ideal, selain dari infrastruktur pengolahan limbah dan sampah yang optimal, juga belum didukung dengan infrastruktur



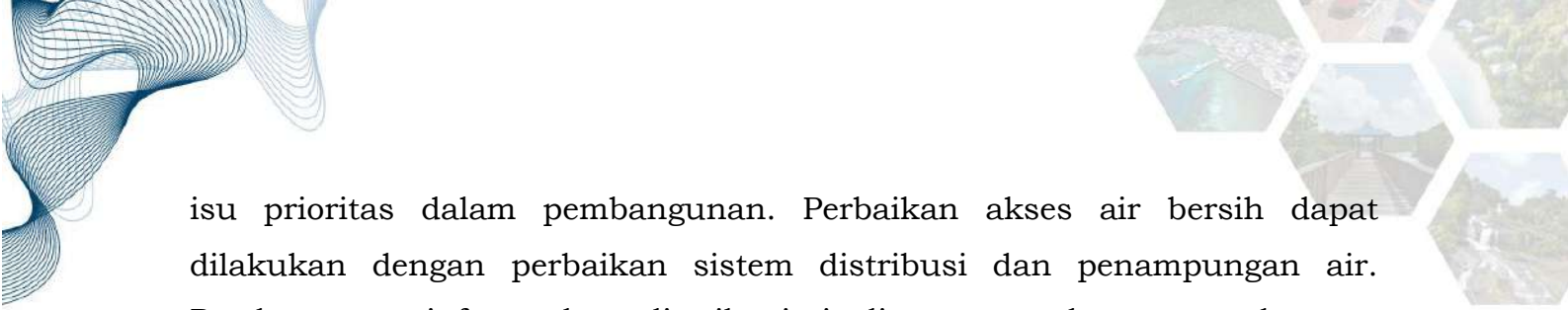
ruang terbuka hijau (RTH) yang dapat memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan manfaat dari RTH tersebut. Cakupan/Proporsi RTH Kabupaten Kepulauan Anambas masih rendah dibandingkan dengan target proporsi yang ditentukan.

8. Peningkatan Akses dan Kualitas Air Bersih

Akses air bersih yang sulit dan tidak merata di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi salah satu masalah utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Minimnya akses diakibatkan kurangnya pembangunan sarana dan prasarana pelayanan air bersih. Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang dipisahkan oleh perairan membuat akses air bersih tidak merata terutama pada pulau-pulau terpencil di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Isu penyediaan air bersih menjadi salah satu isu strategis yang diangkat baik di dunia internasional melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) maupun dalam level nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Dalam SDG's, isu air bersih menjadi tujuan ketujuh dalam pembangunan berkelanjutan yakni “Memastikan Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih Yang Berkelanjutan dan Sanitasi Bagi Semua” dengan target pada tahun 2030 tercapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua. Dalam RPJMN 2020-2024 dipertegas air bersih menjadi bagian penting dalam beberapa isu strategis nasional diantaranya pada isu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing”, pemenuhan akses air bersih dilakukan untuk tujuan percepatan perbaikan gizi masyarakat. Selain pada isu kesehatan, pelayanan air bersih masuk dalam isu strategis nasional “Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar” dengan memperkuat infrastruktur pengelolaan air bersih.

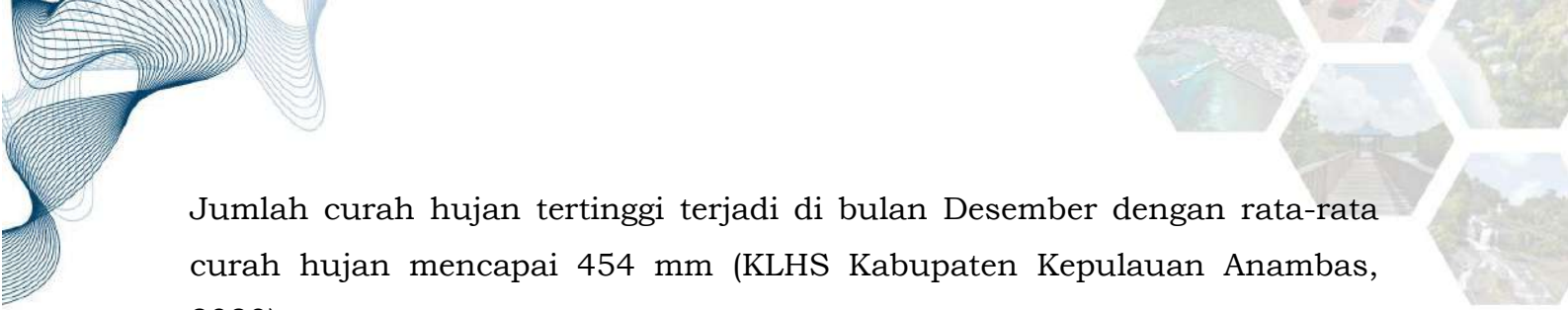
Mengingat pentingnya peran dari ketersediaan akses air bersih yang menyeluruh bagi masyarakat, perlu adanya fokus Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengangkat isu penyediaan air bersih sebagai



isu prioritas dalam pembangunan. Perbaikan akses air bersih dapat dilakukan dengan perbaikan sistem distribusi dan penampungan air. Pembangunan infrastruktur distribusi air diantaranya dengan membangun jaringan pipa air dari sumber mata air yang ada menuju rumah-rumah warga dan infrastruktur penampungan air dengan membangun waduk atau embung. Upaya yang didorong selain pembangunan fisik juga mendorong pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta mengupayakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Selain itu, Mengantisipasi kebutuhan air yang terus meningkat, perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi seluruh sumberdaya air yang ada, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi di bidang pemurnian air (daur ulang, desalinasi air laut). Dari segi pendanaan, Pemerintah Pusat mendukung adanya pembangunan infrastruktur air bersih yang menyeluruh melalui arah kebijakan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dapat diprioritaskan untuk perbaikan akses air bersih.

9. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri atas 1,3% daratan dan 98,7% lautan. Secara topografi wilayah daratan, setiap Kecamatan di Kabupaten Anambas sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dan pegunungan yang terjal yang disusun oleh batuan metamorf. Kisaran ketinggian wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas antara -13 meter hingga 544 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan karakteristik kemiringan lahannya, sebagian besar Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada kelas kemiringan lereng 25-40%, dengan luas 17.928,37 hektar atau 29,48% dari luas wilayahnya. Sementara kemiringan paling curam menempati luas 6.790,31 hektar atau 11,16% dari luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Wilayah datar hingga landai menempati luas 19.326 hektar atau 31,78% dari luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan kondisi klimatologi, Periode Oktober – Desember merupakan periode bertiup angin barat/utara dengan temperatur udara sedikit lebih dingin (lebih kurang 28.9°C) dan lembab pada malam hari.



Jumlah curah hujan tertinggi terjadi di bulan Desember dengan rata-rata curah hujan mencapai 454 mm (KLHS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020).

Kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas menyebabkan adanya beberapa potensi bencana alam yang terjadi. Berdasarkan Peta Kajian Resiko Bencana Provinsi Kepri, potensi terjadinya tanah longsor, banjir bandang, serta kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas masuk kategori tinggi, sedangkan potensi bencana gelombang tinggi dan abrasi masuk dalam kategori sedang. Kawasan rawan bencana banjir yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas berada di Kota Tarempa yang dipicu oleh luapan Sungai Sugi pada saat curah hujan tinggi di wilayah hulu sungai ditambah dengan kondisi pasang air laut. Kawasan rawan bencana gelombang pasang yang terjadi pada musim utara, yaitu pada akhir tahun hingga awal tahun berikutnya, berada pada wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Anambas (RPI2JM Kabupaten Kepulauan Anambas, 2014). Oleh karena daerah itu, perlu ada upaya pencegahan bencana tanah longsor, banjir bandang dan kebakaran hutan.



Selain itu, perlu juga adanya penguatan dalam perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana. Kondisi saat ini, berdasarkan data KLHS 2020, kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagian besar memiliki fungsi pengaturan tata air dan pengendali banjir kategori tinggi (55%) dan sangat tinggi (25%). Sedangkan kecamatan dengan fungsi pencegahan dan perlindungan dari bencana kategori tinggi sebesar 46% dan sangat tinggi sebesar 1%. Penguatan dalam mitigasi bencana diantaranya dengan peningkatan program pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana. Sementara penguatan perencanaan dalam menanggulangi dampak bencana dapat dilakukan dengan manajemen pendanaan bencana seperti penguatan manajemen belanja tidak terduga untuk manajemen kebencanaan, dll.

10. Sinergi Perencanaan

Sinergi perencanaan perlu dilakukan oleh Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi, tentunya terkait dengan pembangunan daerah dan pembagian kewenangan daerah yang saat ini masih terbagi – bagi. Dengan adanya porsi – porsi kewenangan provinsi maupun pusat di Kabupaten Kepulauan Anambas, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak dapat menjalankan pemerintahan seorang diri karena keputusan – keputusan terhadap kewenangan – kewenangan tertentu hanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Misalnya untuk pemanfaatan laut, Kewenangan pemanfaatan wilayah laut berada di wilayah kewenangan pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat⁷⁷, padahal sebagian besar wilayah Anambas adalah perairan laut, dan sebagian besar penduduknya bergantung pada hasil laut. Kabupaten Kepulauan Anambas hanya mendapatkan bagi hasilnya saja. Begitu pula dengan pengelolaan migas yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kondisi ini membuat pemerintah daerah terbatas dalam mengatur kebijakan jika tidak melakukan sinergi dengan pemerintah provinsi. Tentunya hal tersebut akan menjadi hambatan dalam pembangunan wilayah. Selain itu terkait dengan pengembangan pariwisata, kondisi serupa juga terjadi karena meskipun Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki alam yang indah sebagai potensi pariwisata, ijin pembukaan *resort* masih berada di wilayah kewenangan pusat. Jika Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah tidak bersinergi dengan baik, maka akan menjadi hambatan pembangunan pariwisata dan muncul potensi keengganan para investor untuk mulai berinvestasi pada pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas karena prosesnya yang panjang dan rumit.

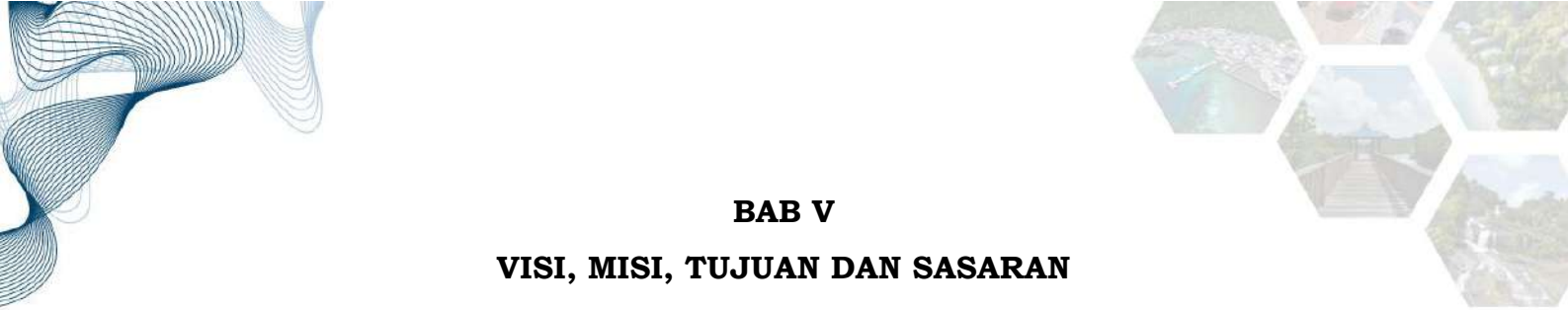
⁷⁷ Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pada ayat (6) selanjutnya diatur penentuan Daerah Kabupaten/Kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan



Dengan demikian, sinergi perencanaan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pemerintah provinsi menjadi penting dilakukan untuk menyelaraskan kondisi khusus Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah dengan bentuk kepulauan dan terletak di bagian terluar Indonesia dengan kebijakan di tingkat provinsi dan nasional. Kondisi ini membuat Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi kasus khusus yang tentunya pengelolaan wilayahnya tidak mudah untuk disamakan dengan wilayah daratan pada umumnya. Perlunya evaluasi dan komitmen bersama untuk mencari jalan tengah agar kebijakan pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat tidak menghambat pembangunan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan segala kondisi geografis yang dimilikinya. Sinergi dan komunikasi perencanaan yang baik perlu dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat secara berkelanjutan baik dalam perencanaan jangka pendek, menengah, maupun panjang.



BAB V
Visi, Misi, Tujuan,
dan Sasaran



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI RPJMD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2021-2026

Visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021-2026) yaitu:

“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”

- ANAMBAS BERMADAH 2 -

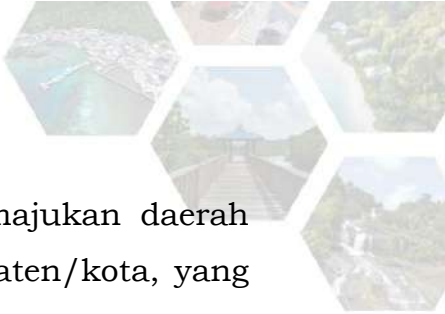

Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa:

1. KABUPATEN MARITIM TERDEPAN

Makna Kabupaten Maritim Terdepan berarti kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

2. BERDAYA SAING

Makna Berdaya Saing menunjukkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari, penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing



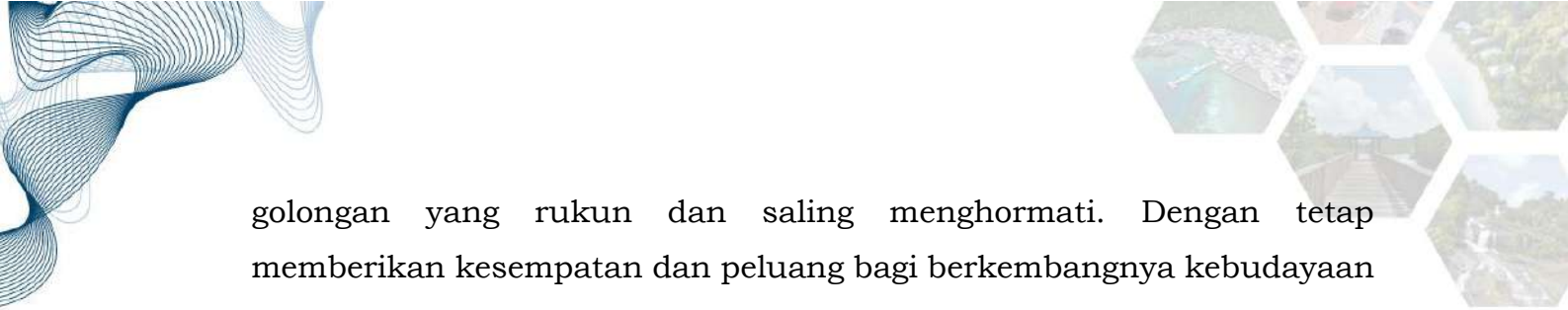
juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

3. MAJU

Maju bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Maju juga dimaknai memiliki sistem kesehatan yang tangguh yaitu siap menghadapi wabah atau pandemi dimasa-masa mendatang. Selain itu maju juga mencakupi sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah daerah.

4. BERAKHLAKUL KARIMAH

Berakhlakul Karimah bermakna sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar



golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

5.2. MISI RPJMD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2021-2026



Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 tersebut akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi; dan
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

Adapun penjelasan dari setiap misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah

Melalui Misi 1 ini akan menyediakan pelatihan ketenagakerjaan serta menciptakan lapangan kerja baru; mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong, kesehatan, beasiswa pendidikan, serta insentif khusus bagi petugas pendidikan dan



kesehatan yang berprestasi dan dedikatif; memberikan jaminan sistem kesehatan yang tangguh dan menyediakan minimum 1 (satu) unit RSUD sebagai fasilitas kesehatan rujukan, melaksanakan pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip akhlakul karimah melalui penyediaan Ustad/Ustadzah Keliling di seluruh kecamatan dengan insentif atau umroh gratis bagi para penggiat agama yang berprestasi dan dedikatif, dan memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada anak-anak yatim piatu dan lansia terlantar.

Misi 2 : Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata

Melalui misi 2 ini akan didorong kemudahan aksesibilitas dan peningkatan infrastruktur khususnya bidang perikanan dan pariwisata terutama di daerah-daerah yang jauh dari fasilitas umum; melakukan penataan kelembagaan dengan cara mempermudah atau menyederhanakan perizinan yang dibutuhkan bagi para pelaku ekonomi rakyat dengan cara diberikan dengan tepat, mudah dan murah meskipun kebijakan ini masih menjadikan investor luar negeri sebagai prioritas; selain itu memberdayakan pelaku usaha ekonomi rakyat dengan melakukan usaha untuk mendatangkan investor dari luar untuk berinvestasi terutama di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata dan industri kreatif sehingga sektor tersebut menjadi lebih produktif; menyalurkan kredit lunak bagi pelaku usaha pemula, dan UMKM, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan makro, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kecamatan dan desa; memperkecil serta mengatasi hambatan ekonomi kerakyatan dari praktek bisnis besar yang bersifat “ilegal” seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal trading*, yang bertujuan mendapatkan bahan baku yang murah; kemudian untuk menjaga kelestarian lingkungan melakukan pengelolaan sampah organik dan non organik sebagai jaminan ramah lingkungan.

Misi 3 : Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi



Melalui Misi 3 ini akan diselenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); melaksanakan pengangkatan jabatan berdasarkan *merit system*, serta beasiswa khusus bagi pegawai, dan aparat desa yang berprestasi; memperkuat penyelenggaraan otonomi desa dan sinergitas pembangunan antar desa dengan insentif Rp 5 Milyar bagi Desa Berprestasi, dan Membangun gedung pertemuan yang representatif di Pulau Jemaja.

Misi 4 : Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah

Melalui Misi 4 ini akan meningkatkan ketersediaan air bersih dan pengelolaan air limbah serta membenahi pengelolaan sampah dan mewujudkan laut bebas sampah plastik (Anambas Bebas Sampah Plastik 2023); menyediakan/merehabilitasi 1.000 unit rumah bagi para tenaga pendidik, kesehatan, ASN/P3K, dan masyarakat tidak mampu; meningkatkan ketersediaan dan jangkauan listrik (Anambas Terang 2024); meningkatkan aksesibilitas antar pulau dan antar wilayah terutama Siantan–Matak, Air Asuk-Kampung Baru, Air Bini-Bajau, Matak-Jemaja, Jemaja-Jemaja Barat (Anambas Terhubung 2025); dan meningkatkan jangkauan jaringan telekomunikasi (Anambas Merdeka Sinyal 2023).

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan misi, dijelaskan dengan tujuan yaitu berisi pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis, disertakan pula indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan empat (4)



misi yang telah ditetapkan, maka diurai masing masing misi dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan *cascading down* yaitu menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026


Visi: “Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi operasional	Kondisi Awal RPJMD	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia			$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	68,80	70,21	71,57	72,91	74,21	75,49	76,75	76,75
				Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \times 100$	59,4	62,6	65,8	69,0	72,2	75,4	78,6	78,6
				Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ AHH : Angka Harapan Hidup	72,63	72,94	73,23	73,54	73,83	74,14	74,45	74,45
				Meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat	Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$	75,39	75,71	76,02	76,34	76,65	76,95	77,26	77,26
2	Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan	Pertumbuhan Ekonomi			$Laju\ Pertumbuhan\ PDRB = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$	-3,30	3,61-4,61	3,73-4,73	3,85-4,85	3,97-4,97	4,09-5,09	4,22-5,22	4,22-5,22
				Meningkatnya PDRB sektor unggulan (Perikanan dan Pariwisata) yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB sektor unggulan	$\frac{PDRB\ Sektor\ Unggulan\ Tahun\ (n) - PDRB\ Sektor\ Unggulan\ Tahun\ (n-1)}{PDRB\ Sektor\ Unggulan\ Tahun\ (n-1)} \times 100\%$	-1,17	0,45	0,87	1,07	4,46	5,42	6,60	6,60
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks KLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKL : Indeks Kualitas Lahan	70,45	73,02	73,29	73,55	73,81	74,08	74,34	74,34
				Bertambahnya nilai investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	$\frac{[Nilai\ Investasi\ Tahun\ (n) - Nilai\ Investasi\ Tahun\ (n-1)]}{Nilai\ Investasi\ Tahun\ (n-1)} \times 100\%$	9,45	9,45	9,45	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90
3	Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi	1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks RB			Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN-RB	CC (51,76)	B (60,1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	BB (75,00)	BB (75,00)
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN-RB	CC (51,76)	B (60,1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	BB (75,00)	BB (75,00)
					Nilai Predikat SAKIP	Hasil evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB	CC (53,38)	B (64,01)	B (68,00)	BB (71,00)	BB (74,00)	BB (78)	A (81)	A (81)
					Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan daerah	Hasil opini BPK atas laporan keuangan yang telah diaudit	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi operasional	Kondisi Awal RPJMD	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Hasil nilai EKPPD oleh Kemendagri	Tinggi (3,60)	Tinggi (3,70)	Tinggi (3,80)	Tinggi (3,90)	Tinggi (4,10)	Sangat Tinggi (4,25)	Sangat Tinggi (4,30)	Sangat Tinggi (4,30)	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai kuantitatif dan kualitatif dari pendapat masyarakat akan pelayanan pemerintah	B (81,29)	B (82,00)	B (84,00)	B (86,00)	B (88,00)	A (89,00)	A (89,87)	A (89,87)	
					Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Skor inovasi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri	Kurang Inovatif (31)	Inovatif (36)	Inovatif (43)	Inovatif (45)	Inovatif (47)	Inovatif (51)	Inovatif (56)	Inovatif (56)
					Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi atau indikator dikalikan skor atau nilai masing-masing jawaban dimensi atau indikator (kualifikasi kompetensi kinerja dan disiplin)	45	47	49	52	54	57	60	60
					2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkat desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	$IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$ IKS : Indeks Ketahanan Sosial IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan	Berkembang (65,17)	Berkembang (67,34)	Berkembang (69,51)	Maju (71,68)	Maju (73,85)	Maju (76,02)	Maju (78,19)	Maju (78,19)
			Meningkatnya status kemandirian desa	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri)	$\frac{\text{Jumlah Desa Berkembang yang dibangun}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}} \times 100\%$	86,54	86,54	88,46	94,23	94,23	94,23	94,23	94,23		
4	Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang	Persentase Infrastruktur dalam kondisi Baik			$\frac{\text{Infrastruktur dalam kondisi Baik}}{\text{Infrastruktur seluruhnya}} \times 100\%$	24,6%	25,78%	35,21%	44,68%	54,41%	63,81%	73,48%	73,48%	
				Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	$\frac{\text{Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	7907 sambungan rumah (2020), 54,64%	56,02%	57,64%	59,55%	61,49%	63,57%	65,93%	65,93%	
					Persentase rumah tinggal bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi}}{\text{Jumlah RUMah Tinggal}} \times 100\%$	44,70%	46,20%	47,80%	49,50%	52,30%	53,20%	55,15%	55,15%	
					Persentase ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni yang dibangun/direhab}}{\text{Target penanganan}} \times 100\%$ Target 1000 rumah	0	0	20%	40%	60%	80%	100%	100%	
					Persentase Permukiman yang Tertata	$\frac{\text{Luas Area Permukiman Tertata}}{\text{Luas Area Permukiman Keseluruhan}} \times 100\%$ Total Luas Area 5362,91 Ha	0	0	20%	40%	60%	80%	100%	100%	
					Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang jalan Kabupaten}} \times 100\%$	23,66%, panjang jalan kondisi baik = 69,6 km, total panjang jalan =	27,06%	30,63%	34,37%	38,28%	42,26%	46,34%	46,34%	

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi operasional	Kondisi Awal RPJMD	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							294,13 km							
			Rasio Konektivitas kabupaten			Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) IK1 = Angkutan Jalan IK2 = Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan	0,30	0,30	0,42	0,51	0,59	0,7	0,7	0,7
				Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	Jumlah konektivitas yang melayani antar pulau Jumlah konektivitas secara keseluruhan (dari target 31 titik sasaran)	0,45	0,45	0,61	0,74	0,84	1	1	1
					Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	Jumlah konektivitas yang melayani penyeberangan Jumlah konektivitas penyeberangan secara keseluruhan (dari target 6 jalur penyeberangan)	0,33	0,33	0,50	0,67	0,83	1	1	1
			Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi		Persentase Titik Lokasi / Desa terlayani telpon seluler dan atau internet yang memadai	Jumlah desa terlayani layanan <u>telepon seluler dan atau layanan internet</u> x 100% Jumlah Total Desa	85%	91%	96%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah



5.4. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas, RPJPD Provinsi Kepulauan Riau, dan RPJMN

5.4.1. Keselarasan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025

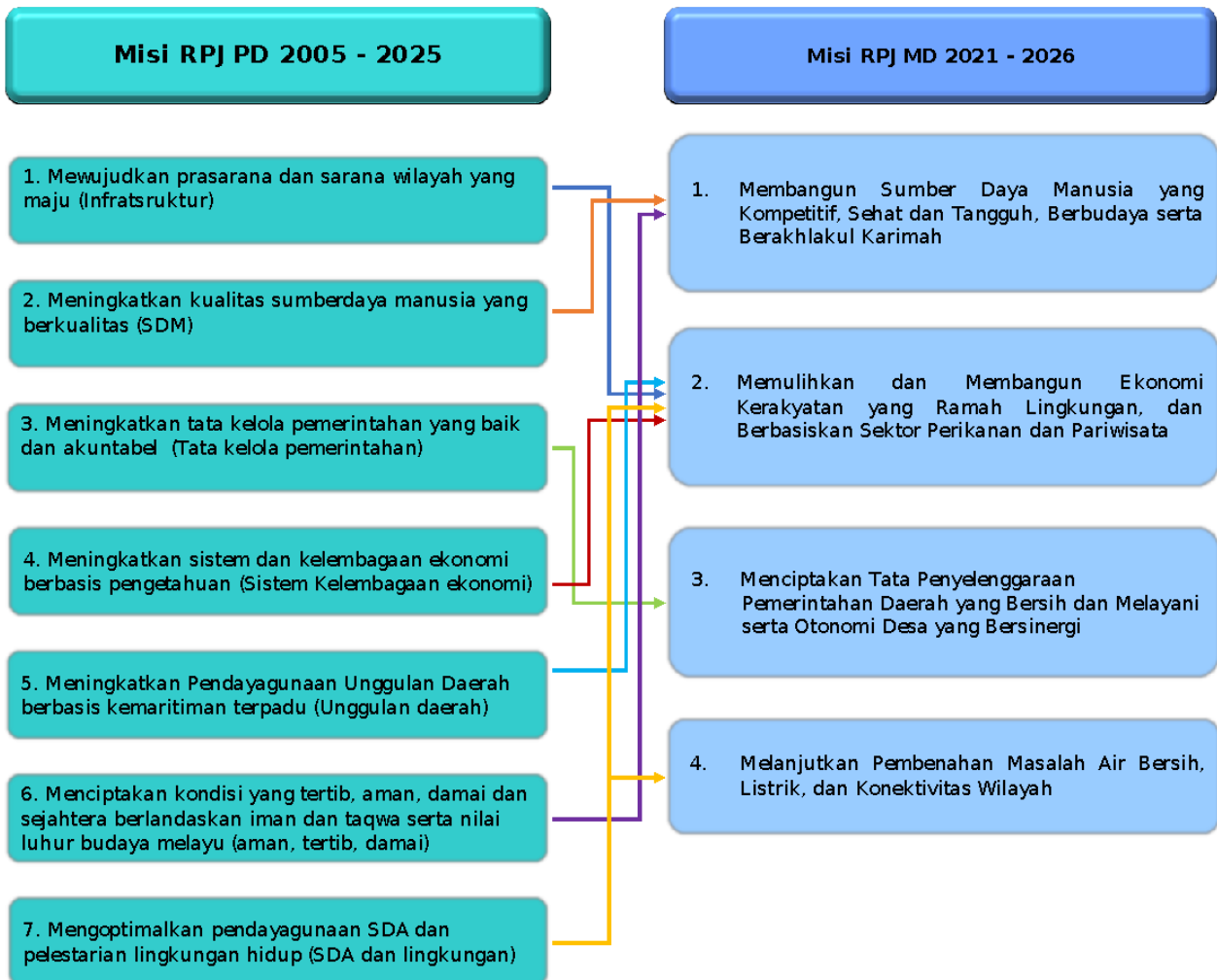
Visi merupakan suatu rumusan tentang keadaan yang diinginkan di masa depan dalam hal ini adalah keadaan Kabupaten Kepulauan Anambas di akhir Rencana Pembangunan jangka Panjang yaitu pada tahun 2025. Visi untuk Kabupaten Kepulauan Anambas dirumuskan dengan memperhatikan berbagai hal mencakup tantangan dan peluang di masa depan. Dengan mempertimbangkan kondisi objektif seluruh sumber daya dan komitmen untuk meraih masa depan yang lebih baik, maka ditetapkan Visi RPJPD sebagai berikut:

“Terwujudnya Kepulauan Anambas sebagai daerah otonom maritim yang berdaya saing dalam bidang perikanan-kelautan, pariwisata dan pertambangan berlandaskan iman dan taqwa”

- ANAMBAS BERKANTATA TAQWA 2025 -

Korelasi antara Visi dan Misi RPJPD dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat digambarkan sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 5. 1 Keterkaitan RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026



Sumber: RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Dapat dilihat dari gambar di atas, bahwa seluruh misi RPJPD tahun 2005–2025 telah tercermin dalam misi RPJMD tahun 2021-2026. Misi 1 RPJMD selaras dengan misi 2 dan 6 RPJPD, sedangkan misi 2 RPJMD selaras dengan empat misi RPJPD sekaligus yaitu misi 1, misi 4, misi 5 dan misi 7. Untuk misi 3 RPJMD selaras dengan misi 3 RPJPD dan terakhir misi 4 RPJMD selaras dengan misi 7 RPJPD.

5.4.2. Keselarasan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025

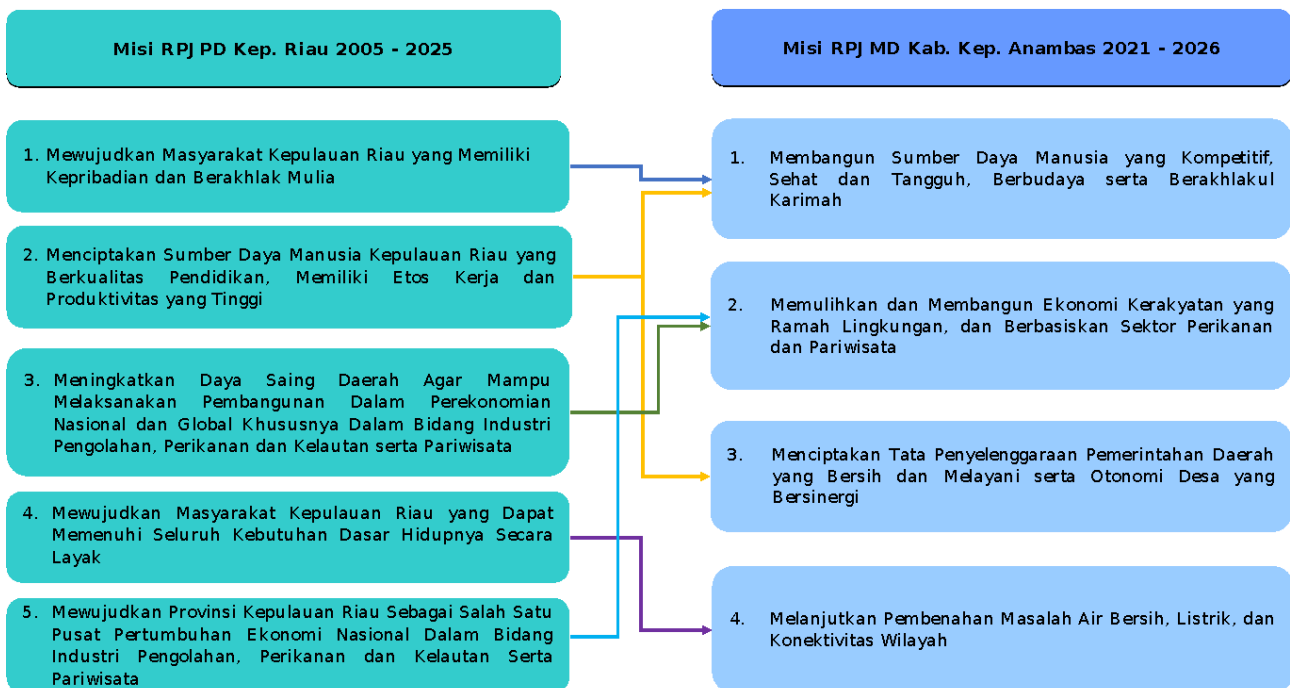
Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021–2026 juga mempertimbangkan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2005–2025, serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan harapan luhur masyarakat Provinsi

Kepulauan Riau. Berikut Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025:

“Kepulauan Riau Berbudaya, Maju Dan Sejahtera”

Korelasi antara Visi dan Misi RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat digambarkan sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 5. 2 Keterkaitan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 - 2026



Sumber: RPJPD Kepulauan Riau 2005-2025, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa seluruh misi RPJPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005–2025 telah tercermin dalam 4 misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021–2026. Misi 1 RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas mencerminkan 2 misi RPJPD Provinsi Kepulauan Riau, yaitu misi 1 dan misi 2. Demikian juga dengan misi 2 RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas yang mencerminkan 2 misi RPJPD Kepulauan Riau, yaitu misi 3 dan 5. Misi 3 RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas mencerminkan misi 2 RPJPD Provinsi Kepulauan Riau, dan Misi 4 RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas mencerminkan misi 4 dari RPJPD Kepulauan Riau.

5.4.3. Keselarasan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021–2026 juga mempertimbangkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026, dengan visi sebagai berikut:

”Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.

Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

Korelasi antara Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 dengan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 dapat digambarkan sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 5. 3 Keterkaitan RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026

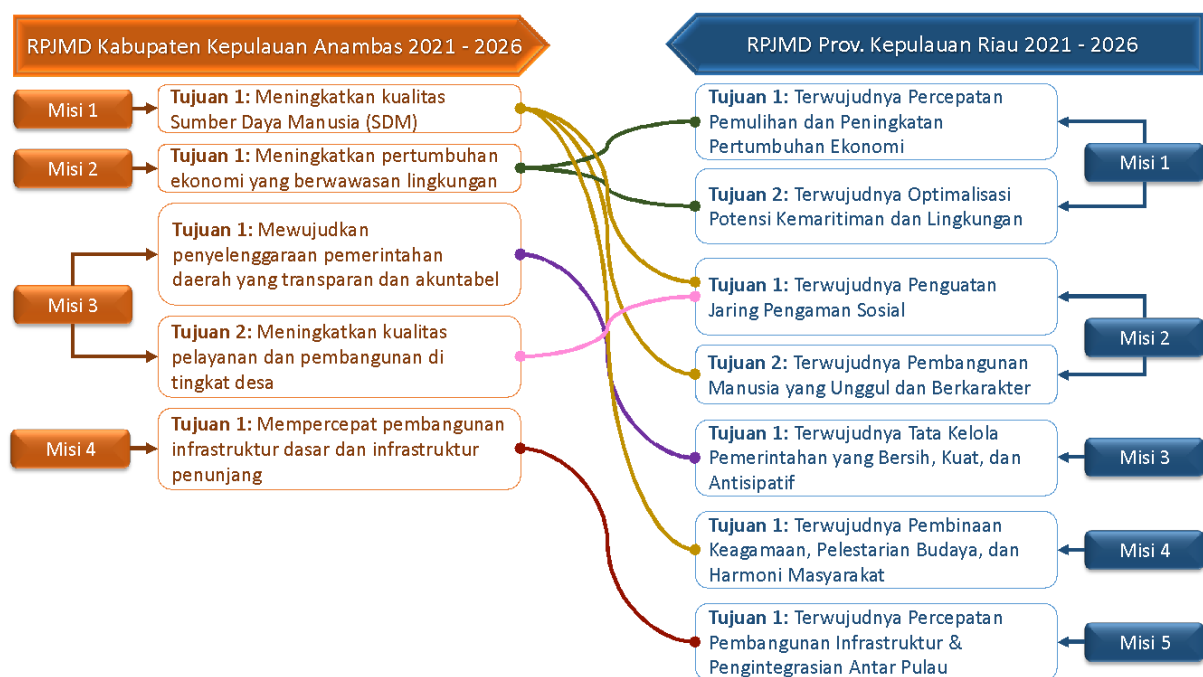


Sumber: RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa seluruh misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021–2026 telah tercermin dalam 4 misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021–2026. Misi 1 RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas mencerminkan 2 misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021–2026, yaitu misi 2 dan misi 4. Sedangkan misi 2 RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas yang mencerminkan misi 1 RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021–2026. Sementara itu misi 3 RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas mencerminkan misi 3 dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021–2026 dan misi 4 RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas mencerminkan misi 5 dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021–2026.

Selain dari keterkaitan misi, lebih dalam dipertimbangkan pula keselarasan tujuan antara RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021–2026 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 sebagai berikut:

Gambar 5. 4 Keterkaitan Tujuan RPJMD Kepulauan Riau 2021-2061 dengan Tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026



Sumber: RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Dapat diketahui dari gambar di atas, bahwa keselarasan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021–2026 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 dapat terlihat hingga di tingkat tujuan.

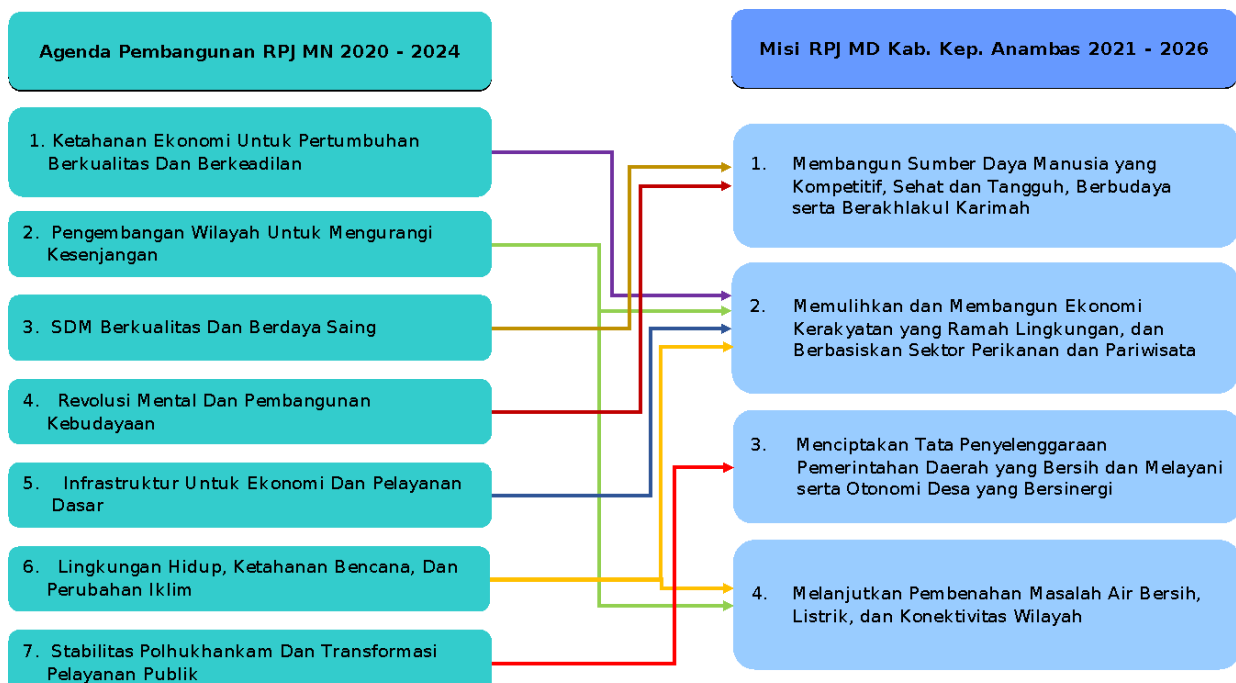
5.4.4. Keselarasan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021–2026 juga mempertimbangkan RPJMN 2020–2024, dengan **Visi Presiden** 2020-2024 sebagai berikut:

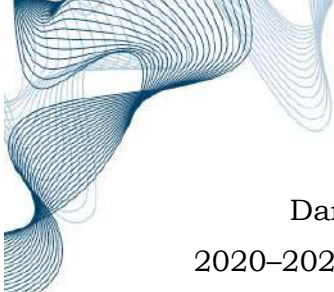
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut merupakan landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024. Dalam mewujudkan RPJMN 2020 – 2024, terdapat 7 agenda pembangunan yang juga menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026. Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 lihat Gambar di bawah ini.

Gambar 5. 5 Keterkaitan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026



Sumber: RPJMN 2020-2024, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah



Dari gambar di atas terlihat bahwa seluruh agenda pembangunan RPJMN 2020–2024 dapat tercermin dalam misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026. Misi 1 RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mencerminkan agenda pembangunan RPJMN nomor 3 dan 4. Sedangkan misi 2 RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mencerminkan agenda pembangunan RPJMN nomor 1, 2, 5, dan 6. Sementara itu misi 3 RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mencerminkan agenda pembangunan RPJMN nomor 7 dan terakhir misi 4 RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mencerminkan agenda pembangunan RPJMN nomor 2 dan 6.



BAB VI
Strategi, Arah
Kebijakan, dan
Program
Pembangunan
Daerah



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021. Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. 1 Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

Visi : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah				
No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
1	Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah	1. 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. 1.1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	<p>1.1.1.1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dengan sebaran guru dan tenaga pendidik yang berkualitas untuk mendorong tingkat pendidikan anak yang bermutu</p> <p>1.1.1.2. Meningkatkan jumlah sekolah yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya daerah</p> <p>1.1.1.3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender</p> <p>1.1.1.4. Menetapkan kebijakan terkait pengarusutamaan gender</p> <p>1.1.1.5. Meningkatkan peran pemerintah di dalam mendorong kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak</p> <p>1.1.1.6. Meningkatkan peran serta anak dalam pembangunan daerah</p> <p>1.1.1.7. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah dan memfasilitasi kegiatan kepemudaan</p> <p>1.1.1.8. Meningkatkan sarana prasarana peribadatan dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berbasiskan akhlakul karimah</p> <p>1.1.1.9. Memberdayakan seniman dan organisasi kesenian/budaya</p>

Visi : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah

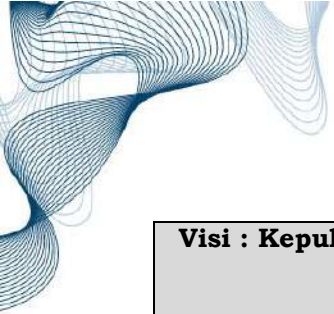
No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
			<p>1.1.2. Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan</p>	<p>1.1.2.1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan cara mengoptimalkan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan, serta sarana dan prasarana kesehatan yang tangguh</p> <p>1.1.2.2. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan administrasi Kesehatan, memastikan akses dan jangkauan kesehatan kepada seluruh masyarakat di seluruh pulau, khususnya keluarga tidak mampu, serta membangun sistem pelayanan kesehatan yang partisipatif</p> <p>1.1.2.3. Menurunkan angka stunting melalui peningkatan akses pelayanan gizi dan kesehatan</p> <p>1.1.2.4. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan pelayanan Ante Natal Care (ANC)</p> <p>1.1.2.5. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu nifas melalui kunjungan pasca ibu melahirkan, promosi dan konseling menyusui, dan pemberian makanan tambahan</p> <p>1.1.2.6. Peningkatan pelayanan kesehatan balita usia 0-23 bulan dengan promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), tata laksana gizi buruk akut, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut dan pemantauan pertumbuhan</p>

Visi : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
				1.1.2.7. Peningkatan pelayanan kesehatan remaja dan wanita usia subur dengan memberikan suplementasi tablet fe
				1.1.2.8. Peningkatan pelayanan kesehatan anak 24-59 bulan dengan cara meningkatkan tata laksana gizi buruk akut, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut dan pemantauan pertumbuhan
			1.1.3. Meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat	1.1.3.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dengan mengoptimalkan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi masyarakat, mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan potensi daerah
				1.1.3.2. Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta untuk optimalisasi kebutuhan tenaga kerja daerah, baik dengan kegiatan magang, kerjasama pelatihan, dan kegiatan pengembangan ketenagakerjaan lainnya
				1.1.3.3. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan bantuan permodalan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin dengan mengoptimalkan database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga mencapai pemberdayaan ekonomi yang mandiri

Visi : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
				1.1.3.4. Meningkatkan kesempatan masyarakat dalam memperoleh penghasilan yang layak
				1.1.3.5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan
				1.1.3.6. Meningkatkan pendampingan, pembinaan bagi UMKM serta mempermudah akses pemodal melalui pembentukan BUMD/BLUD Dana Bergulir yang handal dan profesional dengan penyaluran modal yang berkesinambungan serta jangkauan penerima manfaat yang luas, tepat sasaran, tepat guna, dan serta mencapai tingkat pengembalian modal yang optimal
				1.1.3.7. Menginisiasi penciptaan iklim yang kondusif bagi ekonomi kreatif melalui penciptaan ruang kreatif, pembinaan SDM kreatif, dan kemitraan sebagai sarana transfer pengetahuan dan praktikal
				1.1.3.8. Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial seperti berupa asuransi kesejahteraan sosial
				1.1.3.9. Meningkatkan fungsi layanan perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan dalam melayani masyarakat miskin dan rentan miskin serta PPKS
				1.1.3.10. Pembangunan kemampuan produksi pangan di pulau-pulau kecil yang berpenghuni agar dapat menjamin ketersediaan pangan masyarakat lokal guna mengantisipasi



Visi : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah				
No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
				kerawanan pangan akibat cuaca dan musim buruk
				1.1.3.11. Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi di Kabupaten Kepulauan Anambas
				1.1.3.12. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistic dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan
2	Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata	2.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan	2.1.1 Meningkatnya PDRB sektor unggulan (Perikanan dan Pariwisata) yang berkelanjutan	<p>2.1.1.1 Meningkatkan produktifitas dan kesinambungan perekonomian masyarakat dan dunia usaha terutama sektor potensial daerah non-migas</p> <p>2.1.1.2. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur serta sarana-prasarana penunjang di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi pengolahan guna meningkatkan kesejahteraan</p> <p>2.1.1.3. Memperkecil serta mengatasi hambatan pembangunan ekonomi kerakyatan dari praktek bisnis besar yang illegal seperti illegal fishing, illegal logging, serta illegal trading, sehingga membuat pelaku usaha besar mendapatkan bahan baku murah. Perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan terkait</p> <p>2.1.1.4. Mengembangkan dan mengoptimalkan industri pariwisata melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan SDM yang professional, pembukaan akses pendanaan yang</p>

Visi : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
				luas dengan mendatangkan investor, serta pemasaran yang efektif dalam meningkatkan lama kunjungan wisatawan
				2.1.1.5. Membangun jaringan dan sistem distribusi logistik yang handal dan efisien dengan melibatkan pelaksanaan supervisi secara rutin
			2.1.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2.1.2.1. Mewujudkan pengelolaan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dengan menekankan pada perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat serta memperkuat kerja sama lintas sektor (pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat) termasuk penegakan peraturan
				2.1.2.2. Meningkatkan pengelolaan sampah/limbah organik dan non organik sebagai salah satu implementasi pengelolaan ekonomi yang ramah lingkungan
			2.1.3. Bertambahnya nilai investasi	2.1.3.1. Meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan di bidang investasi dan perizinan melalui penataan kelembagaan yang terintegrasi dalam sistem pelayanan satu pintu, sehingga terbentuk ekosistem pelayanan yang representatif, mudah, murah, serta mendorong perkembangan ekonomi rakyat dan UMKM
				2.1.3.2. Memberikan akses pemodal, mendatangkan investor, serta melakukan pendampingan dan

Visi : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
				pemasaran bagi pelaku usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan
3	Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi	3.1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	3.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	<p>3.1.1.1. Meningkatkan kualitas kinerja dan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah</p> <p>3.1.1.2. Meningkatkan penegakan dan kepatuhan pada pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>3.1.1.3. Meningkatkan penerapan konsep good governance dalam pengelolaan pemerintahan untuk mendukung perwujudan transparansi, akuntabilitas, <i>fairness</i>, responsibility, serta penguatan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pemerintahan</p> <p>3.1.1.4. Mengoptimalkan sistem dan SDM pengelolaan keuangan daerah</p> <p>3.1.1.5. Melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, serta menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai</p> <p>3.1.1.6. Mengoptimalkan sarana, prasarana penunjang dan sistem pelayanan publik sesuai SOP, serta mengedepankan fungsi pelayanan publik yang bersifat rutin kepada masyarakat, seperti pelayanan fasilitas</p>

Visi : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
				Kesehatan, pelayanan perizinan, pembuatan dokumen kependudukan, serta kebutuhan fasilitas umum
				3.1.1.7. Meningkatkan kapasitas pengendalian dan pengawasan sosial dan kesiapsiagaan bencana
				3.1.1.8. Meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap lansia, penyandang disabilitas (khususnya penderita disabilitas fisik seperti stroke dan lumpuh), anak yatim dan atau piatu terlantar
				3.1.1.9. Meningkatkan penegakan hukum dan pencegahan konflik sosial
			3.1.2. Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	3.1.2.1. Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM serta penerapan kebijakan dalam menunjang inovasi daerah
				3.1.2.2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan untuk dapat menunjang pembangunan daerah yang inovatif
			3.1.3. Meningkatnya profesionalitas ASN	3.1.3.1. Meningkatkan kompetensi ASN, dan optimalisasi penerapan sistem rekrutmen serta pemerataan distribusi pegawai sesuai kebutuhan
		3.2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkat desa	3.2.1. Meningkatnya status kemandirian desa	3.2.1.1. Mengembangkan otonomi desa melalui program kerjasama yang saling menguntungkan antar desa dengan melibatkan dan menghimpun partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan

Visi : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
				<p>3.2.1.2. Meningkatkan kompetensi aparaturnya desa dan optimalisasi pengelolaan keuangan desa, serta penyediaan sarana penunjang infrastruktur desa</p> <p>3.2.1.3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan program desa sinergi dengan penegakan regulasi yang ada sehingga dapat tercipta hubungan timbal balik dan saling menunjang antara pemerintahan di tingkat kabupaten dan kecamatan dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa</p>
4	Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah	4.1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang	4.1.1. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar	<p>4.1.1.1. Membentuk lembaga PDAM/ institusi swasta lainnya yang memiliki fungsi pengelolaan air bersih dan air minum</p> <p>4.1.1.2. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan air, serta meningkatkan ketersediaan air bersih dan sanitasi melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur</p> <p>4.1.1.3. Melakukan penggalian sumber-sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari</p> <p>4.1.1.4. Memperluas akses sanitasi layak bagi permukiman di ibukota kabupaten, kecamatan dan desa-desa wisata (dalam upaya mendukung menurunkan angka stunting dan mewujudkan kabupaten sehat)</p>

Visi : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
				4.1.1.5. Meningkatkan distribusi pengguna listrik rumah tangga sampai ke desa dan dusun di luar ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan
				4.1.1.6. Melaksanakan program penyambungan listrik dan instalasi gratis bagi masyarakat yang tidak mampu pada daerah tertinggal dan daerah perbatasan
				4.1.1.7. Merehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu melalui kerjasama dengan pemerintah desa, dan / pemerintah provinsi/ pemerintah pusat
				4.1.1.8. Merehabilitasi rumah dinas Pemda baik yang ditempati ASN maupun tenaga pendidik/ tenaga Kesehatan
				4.1.1.9. Menyediakan rumah (rusun/ rusus) bagi ASN, maupun masyarakat kerjasama dengan pemerintah maupun developer
				4.1.1.10. Meningkatkan sistem pengelolaan dan pelayanan persampahan dan limbah cair
				4.1.1.11. Menyediakan tempat pembuangan sampah sesuai standar
			4.1.2. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	4.1.2.1. Meningkatkan konektivitas yang menghubungkan antar desa dalam 1 kecamatan, antar kecamatan, dan kecamatan dengan ibukota kabupaten baik melalui penyediaan jalan, pelabuhan dan kapal penyebrangan

Visi : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
				4.1.2.2. Meningkatkan fasilitas dan kualitas pengelolaan kepelabuhanan di pusat-pusat perekonomian dan ibukota kecamatan
				4.1.2.3. Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam mengoptimalkan pembangunan sistem konektivitas dan infrastruktur transportasi
				4.1.2.4. Meningkatkan pembenahan infrastruktur pelabuhan dan bandara sebagai garda terdepan konektivitas antar pulau serta sebagai citra kualitas konektivitas
				4.1.2.5. Meningkatkan ketersediaan jalan dalam kondisi baik yang menghubungkan pusat pemerintahan, pelayanan publik, pusat perekonomian, dengan permukiman masyarakat
			4.1.3. Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi	4.1.3.1. Meningkatkan luasan jangkauan jaringan telepon seluler ke seluruh kecamatan dan desa
				4.1.3.2. Meningkatkan luasan jangkauan dan kualitas layanan internet ke seluruh kecamatan dan desa

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

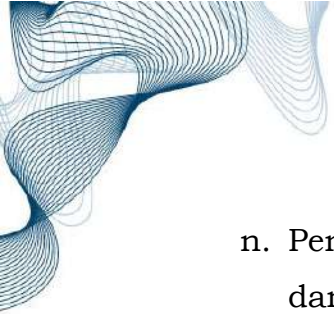

6.2. Arah Kebijakan Tahunan

1. Arah Kebijakan Tahun 2021

Pembangunan tahun 2021 diarahkan pada: **Pemulihan kondisi ekonomi akibat terjadinya pandemi covid-19 dan memperkuat sektor kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.**

Prioritas pembangunan tahun 2021 diarahkan pada:

- a. Peningkatan pembangunan sumberdaya manusia dalam mewujudkan tatanan masyarakat reformasi dan birokrasi tanpa memihak pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang adil.
- b. Percepatan pendataan tenaga kerja lokal berpengalaman dan bersertifikasi keahlian.
- c. Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan desa untuk pelatihan ketenagakerjaan.
- d. Pembangunan gedung sekolah dari tingkat PAUD sampai dengan SMP.
- e. Memperkuat akses pelayanan kesehatan.
- f. Mempercepat proses terbentuknya RSUD Rujukan.
- g. Meningkatkan kendali penerapan pelaksanaan protokol kesehatan bagi ASN, pelaku ekonomi dan masyarakat agar pandemi Covid-19 dapat berkurang.
- h. Perumusan regulasi dan mekanisme yang berbasis pengarusutamaan gender.
- i. Perumusan regulasi, mekanisme, dan SPM perlindungan terhadap anak.
- j. Peningkatan fasilitas organisasi kepemudaan.
- k. Peningkatan dukungan kegiatan keagamaan di masyarakat.
- l. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal.
- m. Perumusan regulasi dan mekanisme pelayanan penanganan PPKS yang inovatif.

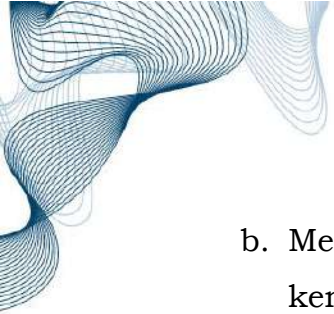

- 
- 
- n. Peningkatan kualitas layanan keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan toleransi di masyarakat.
 - o. Percepatan pengentasan kemiskinan.
 - p. Bantuan kepada pelaku UMKM yang terkena dampak Covid-19.
 - q. Peningkatan iklim investasi dan berusaha yang kondusif dengan mempermudah pelayanan dan kecepatan pelayanan.
 - r. Penyusunan peraturan daerah, pelaksanaan koordinasi serta sinkronisasi pelayanan, serta pembangunan sistem yang efektif dan efisien serta transparan.
 - s. Mengoptimalkan kualitas pelayanan di desa dengan melakukan penyusunan mekanisme koordinasi dan penguatan sinkronisasi pelayanan antara pemerintah daerah kabupaten dan desa.
 - t. Membangun sistem pengelolaan persampahan.
 - u. Melakukan koordinasi dan mengusulkan perencanaan kebutuhan dan pemenuhan energi listrik di waktu mendatang kepada Pemerintah Provinsi.
 - v. Membangun prasarana air bersih, membangun embung, membentuk PDAM.

2. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada: **Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata dan perikanan yang didukung Sumber Daya Manusia yang profesional dan terampil di Kabupaten Kepulauan Anambas.**

Prioritas pembangunan tahun 2022 diarahkan pada:

- a. Pembangunan sumberdaya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama, jujur dan bertaqwa, serta meningkatkan aktivitas kehidupan beragama, sosial kemasyarakatan dan toleransi antar agama.

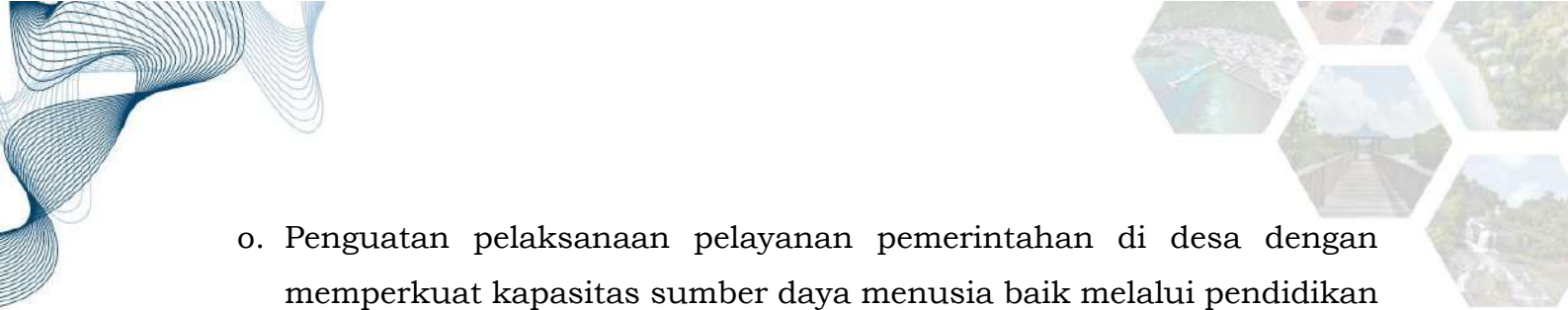
- 
- 
- b. Menyesuaikan pelatihan kerja di BLK dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
 - c. Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan desa untuk pelatihan ketenagakerjaan.
 - d. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.
 - e. Tetap melaksanakan protokol kesehatan di semua bidang perekonomian.
 - f. Peningkatan Pemahaman pengarusutamaan gender.
 - g. Peningkatan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak.
 - h. Peningkatan fasilitas organisasi kepemudaan.
 - i. Peningkatan dukungan kegiatan keagamaan di masyarakat.
 - j. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal.
 - k. Peningkatan kualitas pelayanan penanganan PPKS.
 - l. Peningkatan kualitas layanan keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan toleransi di masyarakat.
 - m. Peningkatan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat dengan mendorong sektor-sektor yang potensial bernilai tambah tinggi.
 - n. Peningkatan perekonomian desa dengan mendorong masyarakat desa untuk lebih aktif dalam melakukan perubahan sosial ekonomi dengan potensi yang ada.
 - o. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
 - p. Pembangunan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang pelayanan dan dalam bidang pengelolaan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan.
 - q. Pelaksanaan pembangunan gedung pelayanan yang representatif serta sarana dan prasarana untuk memperkuat pelayanan pemerintahan di tingkat desa.
 - r. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan.
 - s. Penyusunan Peraturan Bupati untuk mempercepat pembangunan infrastruktur baru.

3. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada: **Pembangunan ekonomi sektor unggulan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur yang terkoneksi di Kabupaten Kepulauan Anambas.**

Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada:

- a. Membuat kesepakatan dengan BLK Swasta dan berkoordinasi dan bersinergi dengan desa.
- b. Pembangunan sumber daya manusia dalam mewujudkan desa wirausaha yang Tangguh, berinovasi dan kreasi.
- c. Percepatan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dari desa dengan fasilitas memadai.
- d. Pemanfaatan gedung sekolah baru PAUD sampai dengan SMP.
- e. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
- f. Pemantapan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- g. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang layak anak.
- h. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana organisasi kepemudaan.
- i. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan keagamaan di masyarakat.
- j. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelestarian budaya.
- k. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan penanganan PPKS.
- l. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan toleransi di masyarakat.
- m. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
- n. Peningkatan kepuasan pelayanan masyarakat dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik yang mendukung pelayanan publik.

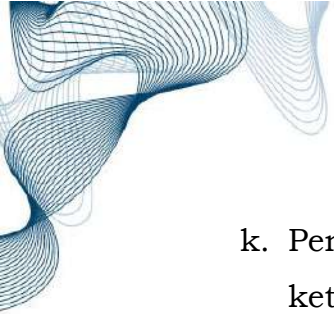

- 
- o. Penguatan pelaksanaan pelayanan pemerintahan di desa dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan maupun pelatihan.
 - p. Mengoptimalkan kualitas sistem pengelolaan persampahan.
 - q. Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas.

4. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan tahun 2024 diarahkan pada: **Penguatan Sumber Daya Manusia, Penguatan ketahanan Ekonomi, serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.**

Prioritas pembangunan tahun 2024 diarahkan pada:

- a. Pemanfaatan BLK secara optimal dan pelaksanaan kerja sama dengan BLK swasta.
- b. Percepatan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dari desa dengan fasilitas memadai.
- c. Pemanfaatan gedung sekolah baru PAUD sampai dengan SMP.
- d. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- e. Pemantapan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- f. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang layak anak.
- g. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana organisasi kepemudaan.
- h. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan keagamaan di masyarakat.
- i. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelestarian budaya.
- j. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan penanganan PPKS.

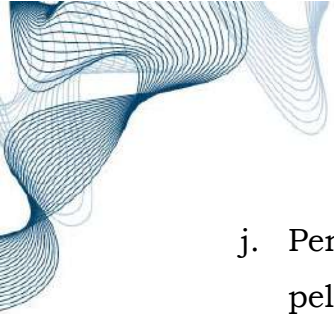

- 
- 
- k. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan toleransi di masyarakat.
 - l. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah.
 - m. Peningkatan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan masyarakat.
 - n. Penguatan inovasi daerah untuk mengakselerasi kemajuan dalam pelayanan pemerintah.
 - o. Pelaksanaan secara berkala monitoring dan evaluasi kinerja apartur desa dan progress kemajuan desa untuk memastikan jalannya pembangunan tingkat desa.
 - p. Mengoptimalkan kualitas sistem pengelolaan persampahan.
 - q. Peningkatan Infrastruktur dalam mendukung perekonomian daerah.

5. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 diarahkan pada: **Pemantapan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Manusia, serta pemantapan reformasi birokrasi.**

Prioritas pembangunan tahun 2025 diarahkan pada:

- a. Pemanfaatan BLK secara optimal dan pelaksanaan kerja sama dengan BLK swasta.
- b. Pemantapan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dari desa dengan fasilitas memadai.
- c. Pemanfaatan gedung sekolah baru PAUD sampai dengan SMP.
- d. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- e. Peningkatan kualitas pembangunan yang responsif gender.
- f. Pemantapan sarana dan prasarana umum yang layak anak.
- g. Pemantapan kualitas sarana dan prasarana organisasi kepemudaan.
- h. Pemantapan kualitas kegiatan keagamaan di masyarakat.
- i. Pemantapan kualitas layanan dan sarana pendukung pelestarian budaya lokal.

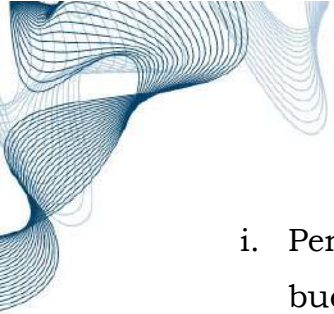

- 
- 
- j. Pemantapan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan penanganan PPKS
 - k. Pemantapan layanan keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan toleransi di masyarakat yang berkualitas dan memadai.
 - l. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
 - m. Penguatan kualitas sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas .
 - n. Penerapan sistem apresiasi berupa insentif bagi desa yang berprestasi dalam bidang pembangunan desa serta kepada aparatur desa yang berprestasi dan berkontribusi besar dalam pembangunan desa.
 - o. Mengoptimalkan kualitas sistem pengelolaan persampahan.
 - p. Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas.

6. Arah Kebijakan Tahun 2026 (Masa Peralihan)

Pembangunan tahun 2026 diarahkan pada: **Penguatan dan perwujudan Kepulauan Anambas sebagai daerah otonom maritim yang berdaya saing dalam bidang perikanan-kelautan, pariwisata, dan pertambangan berlandaskan iman dan taqwa.**

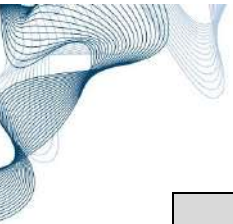
Prioritas pembangunan tahun 2026 diarahkan pada:

- a. Pemanfaatan BLK secara optimal dan pelaksanaan kerja sama dengan BLK swasta.
- b. Pemantapan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dari desa dengan fasilitas memadai.
- c. Pemanfaatan gedung sekolah baru PAUD sampai dengan SMP.
- d. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, berdaya saing dan berkarakter, dan berakhlakul karimah.
- e. Peningkatan kualitas pemerintahan yang responsif gender.
- f. Pemantapan sarana dan prasarana umum yang layak anak.
- g. Pemantapan kualitas sarana dan prasarana organisasi kepemudaan.
- h. Pemantapan kualitas kegiatan keagamaan di masyarakat.

- 
- 
- i. Pemantapan kualitas layanan dan sarana pendukung pelestarian budaya lokal.
 - j. Pemantapan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan penanganan PPKS.
 - k. Pemantapan layanan keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan toleransi di masyarakat yang berkualitas dan memadai.
 - l. Pemantapan keunggulan dan daya saing ekonomi berbasis potensi sumberdaya lokal.
 - m. Penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
 - n. Penguatan pengelolaan desa yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian dan otonomi desa.
 - o. Penguatan sistem pengelolaan persampahan.
 - p. Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas.

Tabel 6. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 - 2026

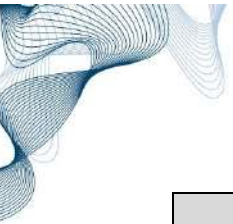
Arah Kebijakan Kabupaten Kepulauan Anambas					
Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
Pemulihan kondisi ekonomi akibat terjadinya pandemi covid-19 dan memperkuat sektor kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata dan perikanan yang didukung Sumber Daya Manusia yang profesional dan terampil di Kabupaten Kepulauan Anambas	Pembangunan ekonomi sektor unggulan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur yang terkoneksi di Kabupaten Kepulauan Anambas	Penguatan Sumber Daya Manusia, Penguatan ketahanan Ekonomi, serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan	Pemantapan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Manusia, serta pemantapan reformasi birokrasi	Penguatan dan perwujudan Kepulauan Anambas sebagai daerah otonom maritim yang berdaya saing dalam bidang perikanan-kelautan, pariwisata, dan pertambangan berlandaskan iman dan taqwa
a. Peningkatan pembangunan sumberdaya manusia dalam mewujudkan tatanan masyarakat reformasi dan birokrasi tanpa memihak pemangku	a. Pembangunan sumberdaya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama, jujur dan bertaqwa, serta	a. Membuat kesepakatan dengan BLK Swasta dan berkoordinasi dan bersinergi dengan desa. b. Pembangunan sumber daya manusia dalam mewujudkan desa	a. Pemanfaatan BLK secara optimal dan pelaksanaan kerja sama dengan BLK swasta. b. Percepatan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dari desa dengan fasilitas memadai.	a. Pemanfaatan BLK secara optimal dan pelaksanaan kerja sama dengan BLK swasta. b. Pemantapan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dari desa	a. Pemanfaatan BLK secara optimal dan pelaksanaan kerja sama dengan BLK swasta. b. Pemantapan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dari desa dengan fasilitas memadai.



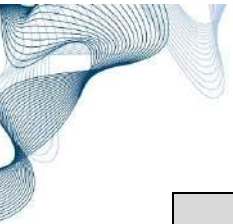
Arah Kebijakan Kabupaten Kepulauan Anambas					
Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
<p>kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang adil.</p> <p>b. Percepatan pendataan tenaga kerja lokal berpengalaman dan bersertifikasi keahlian.</p> <p>c. Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan desa untuk pelatihan ketenagakerjaan.</p> <p>d. Pembangunan gedung sekolah dari tingkat PAUD sampai dengan SMP.</p>	<p>meningkatkan aktivitas kehidupan beragama, sosial kemasyarakatan dan toleransi antar agama.</p> <p>b. Menyesuaikan pelatihan kerja di BLK dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.</p> <p>c. Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan desa untuk pelatihan ketenagakerjaan.</p> <p>d. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.</p>	<p>wirausaha yang Tangguh, berinovasi dan kreasi.</p> <p>c. Percepatan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dari desa dengan fasilitas memadai.</p> <p>d. Pemanfaatan gedung sekolah baru PAUD sampai dengan SMP.</p> <p>e. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.</p> <p>f. Pemantapan pelaksanaan</p>	<p>c. Pemanfaatan gedung sekolah baru PAUD sampai dengan SMP.</p> <p>d. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.</p> <p>e. Pemantapan pelaksanaan pengarusutamaan gender.</p> <p>f. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang layak anak.</p> <p>g. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana</p>	<p>dengan fasilitas memadai.</p> <p>c. Pemanfaatan gedung sekolah baru PAUD sampai dengan SMP.</p> <p>d. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.</p> <p>e. Peningkatan kualitas pembangunan yang responsif gender.</p> <p>f. Pemantapan sarana dan prasarana umum yang layak anak.</p>	<p>c. Pemanfaatan gedung sekolah baru PAUD sampai dengan SMP.</p> <p>d. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, berdaya saing dan berakhlakul karimah.</p> <p>e. Peningkatan kualitas pemerintahan yang responsif gender.</p> <p>f. Pemantapan sarana dan prasarana umum yang layak anak.</p>

Arah Kebijakan Kabupaten Kepulauan Anambas

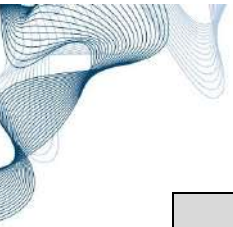
Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
<p>e. Memperkuat akses pelayanan kesehatan.</p> <p>f. Mempercepat proses terbentuknya RSUD Rujukan.</p> <p>g. Meningkatkan kendali penerapan pelaksanaan protokol kesehatan bagi ASN, pelaku ekonomi dan masyarakat agar pandemi Covid-19 dapat berkurang.</p> <p>h. Perumusan regulasi dan mekanisme yang berbasis pengarusutamaan gender.</p> <p>i. Perumusan regulasi,</p>	<p>e. Tetap melaksanakan protokol kesehatan di semua bidang perekonomian.</p> <p>f. Peningkatan Pemahaman pengarusutamaan gender.</p> <p>g. Peningkatan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>h. Peningkatan fasilitas organisasi kepemudaan.</p> <p>i. Peningkatan dukungan kegiatan</p>	<p>pengarusutamaan gender.</p> <p>g. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang layak anak.</p> <p>h. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana organisasi kepemudaan.</p> <p>i. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan keagamaan di masyarakat.</p> <p>j. Penyediaan pemenuhan</p>	<p>organisasi kepemudaan.</p> <p>h. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan keagamaan di masyarakat.</p> <p>i. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelestarian budaya.</p> <p>j. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung</p>	<p>g. Pemantapan kualitas sarana dan prasarana organisasi kepemudaan.</p> <p>h. Pemantapan kualitas kegiatan keagamaan di masyarakat.</p> <p>i. Pemantapan kualitas layanan dan sarana pendukung pelestarian budaya lokal.</p> <p>j. Pemantapan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan penanganan PPKS.</p>	<p>g. Pemantapan kualitas sarana dan prasarana organisasi kepemudaan.</p> <p>h. Pemantapan kualitas kegiatan keagamaan di masyarakat.</p> <p>i. Pemantapan kualitas layanan dan sarana pendukung pelestarian budaya lokal.</p> <p>j. Pemantapan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan penanganan PPKS.</p>



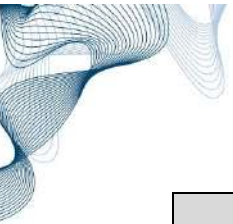
Arah Kebijakan Kabupaten Kepulauan Anambas					
Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
<p>mekanisme, dan SPM perlindungan terhadap anak.</p> <p>j. Peningkatan fasilitas organisasi kepemudaan.</p> <p>k. Peningkatan dukungan kegiatan keagamaan di masyarakat.</p> <p>l. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal.</p> <p>m. Perumusan regulasi dan mekanisme pelayanan penanganan PPKS yang inovatif.</p> <p>n. Peningkatan kualitas layanan keamanan,</p>	<p>keagamaan di masyarakat.</p> <p>j. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal.</p> <p>k. Peningkatan kualitas pelayanan penanganan PPKS.</p> <p>l. Peningkatan kualitas layanan keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan toleransi di masyarakat.</p> <p>m. Peningkatan kualitas kehidupan ekonomi</p>	<p>sarana dan prasarana yang mendukung pelestarian budaya.</p> <p>k. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan penanganan PPKS.</p> <p>l. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan toleransi di masyarakat.</p>	<p>pelayanan penanganan PPKS.</p> <p>k. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan toleransi di masyarakat.</p> <p>l. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah.</p> <p>m. Peningkatan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>k. Pemantapan layanan keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan toleransi di masyarakat yang berkualitas dan memadai.</p> <p>l. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.</p> <p>m. Penguatan kualitas sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintah di</p>	<p>k. Pemantapan layanan keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan toleransi di masyarakat yang berkualitas dan memadai.</p> <p>l. Pemantapan keunggulan dan daya saing ekonomi berbasis potensi sumberdaya lokal.</p> <p>m. Penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.</p> <p>n. Penguatan pengelolaan desa</p>



Arah Kebijakan Kabupaten Kepulauan Anambas					
Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
<p>ketenteraman, ketertiban, dan toleransi di masyarakat.</p> <p>o. Percepatan pengentasan kemiskinan.</p> <p>p. Bantuan kepada pelaku UMKM yang terkena dampak Covid-19.</p> <p>q. Peningkatan iklim investasi dan berusaha yang kondusif dengan mempermudah pelayanan dan kecepatan pelayanan.</p> <p>r. Penyusunan peraturan daerah, pelaksanaan koordinasi serta</p>	<p>masyarakat dengan mendorong sektor-sektor yang potensial bernilai tambah tinggi.</p> <p>n. Peningkatan perekonomian desa dengan mendorong masyarakat desa untuk lebih aktif dalam melakukan perubahan sosial ekonomi dengan potensi yang ada.</p> <p>o. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran.</p> <p>p. Pembangunan sumber daya</p>	<p>m. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.</p> <p>n. Peningkatan kepuasan pelayanan masyarakat dengan melakukan pembangunan sarana dan prasaran pelayanan publik yang mendukung pelayanan publik.</p> <p>o. Penguatan pelaksanaan pelayanan pemerintahan di desa dengan memperkuat kapasitas sumber</p>	<p>n. Penguatan inovasi daerah untuk mengakselerasi kemajuan dalam pelayanan pemerintah.</p> <p>o. Pelaksanaan secara berkala monitoring dan evaluasi kinerja apartur desa dan progres kemajuan desa untuk memastikan jalannya pembangunan tingkat desa.</p> <p>p. Mengoptimalkan kualitas sistem pengelolaan persampahan.</p> <p>q. Peningkatan Infrastruktur</p>	<p>lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas.</p> <p>n. Penerapan sistem apresiasi berupa insentif bagi desa yang berprestasi dalam bidang pembangunan desa serta kepada aparatur desa yang berprestasi dan berkontribusi besar dalam pembangunan desa.</p> <p>o. Mengoptimalkan kualitas sistem</p>	<p>yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian dan otonomi desa.</p> <p>o. Penguatan sistem pengelolaan persampahan.</p> <p>p. Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas.</p>



Arah Kebijakan Kabupaten Kepulauan Anambas					
Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
<p>sinkronisasi pelayanan, serta pembangunan sistem yang efektif dan efisien dan transparan.</p> <p>s. Mengoptimalkan kualitas pelayanan di desa dengan melakukan penyusunan mekanisme koordinasi dan penguatan sinkronisasi pelayanan antara pemerintah daerah kabupaten dan desa.</p> <p>t. Membangun sistem pengelolaan persampahan.</p>	<p>manusia yang profesional dalam bidang pelayanan dan dalam bidang pengelolaan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>q. Pelaksanaan pembangunan gedung pelayanan yang representatif serta sarana dan prasaran untuk memperkuat pelayanan pemerintahan di tingkat desa.</p> <p>r. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan.</p>	<p>daya manusia baik melalui pendidikan maupun pelatihan.</p> <p>p. Mengoptimalkan kualitas sistem pengelolaan persampahan.</p> <p>q. Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas.</p>	<p>dalam mendukung perekonomian daerah.</p>	<p>pengelolaan persampahan.</p> <p>p. Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas.</p>	



Arah Kebijakan Kabupaten Kepulauan Anambas					
Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
u. Melakukan koordinasi dan mengusulkan perencanaan kebutuhan dan pemenuhan energi listrik di waktu mendatang kepada pemerintah provinsi.	s. Penyusunan Peraturan Bupati untuk mempercepat pembangunan infrastruktur baru.				
v. Membangun prasarana air bersih, membangun embung, membentuk PDAM.					

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

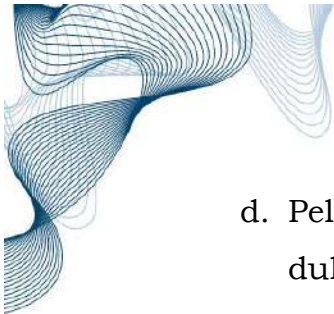
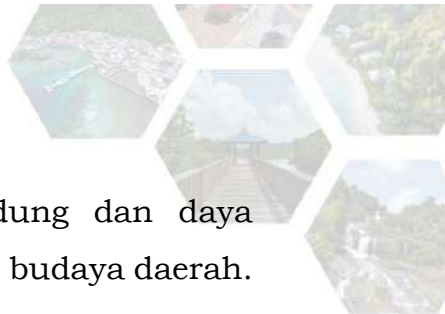
6.3. Arah Pengembangan Wilayah

6.3.1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang

Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ruang lingkup wilayah perencanaan RTRW di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Wilayah Kabupaten mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada antara 2° 10' 0" - 3° 40' 0" Lintang Utara dan 105° 15' 0" - 106° 45' 0" Bujur Timur dengan luas daratan kurang lebih 63.223 (enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga) hectare. Lingkup wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Siantan Utara, dan Kecamatan Kute Siantan.

Tujuan penataan ruang adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Kepulauan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Dalam rangka mewujudkan tujuan Penataan Ruang, diperlukan kebijakan Penataan Ruang kabupaten sebagai berikut.

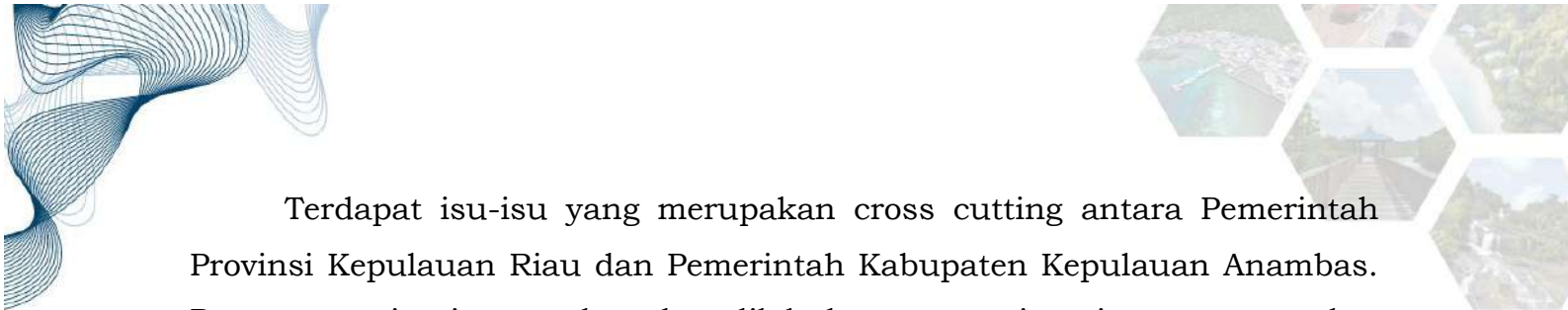
- a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan merata di seluruh wilayah dengan hierarki dan skala pelayanannya.
- b. Pengembangan terintegrasi sistem jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air dan fasilitas dan utilitas permukiman.
- c. Pemanfaatan kawasan yang efisien, serasi, dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah kepulauan.

- 
- 
- d. Pelestarian dan peningkatan fungsi Kawasan Lindung dan daya dukung Lingkungan Hidup serta melestarikan warisan budaya daerah.
 - e. Pengembangan sektor ekonomi bertumpu pada sektor minyak dan gas, sumber daya bahari, pertanian, industri dan pariwisata dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan.
 - f. Pengembangan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan.

Di samping itu, terdapat juga Kebijakan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdapat dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

- a. Pengembangan sentra perikanan rakyat.
- b. Peningkatan penguasaan teknologi perikanan dan kelautan.
- c. Bantuan peralatan dan teknologi perikanan dan kelautan (bantuan kapal, alat tangkap).
- d. Pemberian modal dan pemasaran produk perikanan dan kelautan.
- e. Pengembangan wisata bahari dan eko wisata berstandar internasional.
- f. Pembangunan jalan, jembatan, air bersih, listrik dan Pelabuhan.
- g. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut dan udara.
- h. Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau ada signal).
- i. Pembangunan Kepri terang (listrik masuk pulau).
- j. Jaminan ketersediaan dan penyaluran BBM.
- k. Fasilitasi dan pengembangan UMKM.

Adapun tujuan dan sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdapat dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ditujukan untuk dikembangkan sebagai sentra perikanan dan wisata.

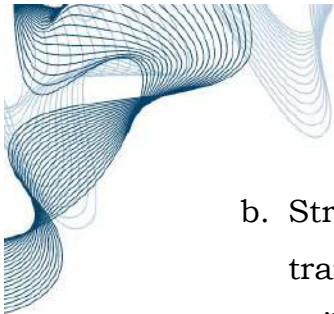




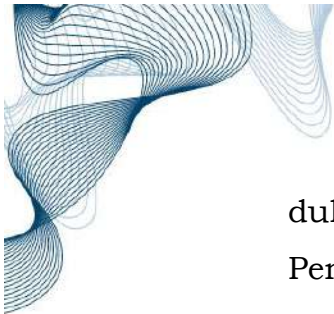
Terdapat isu-isu yang merupakan cross cutting antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Penanganan isu-isu tersebut akan dilakukan secara sinergis antar perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten di setiap sektor. Permasalahan pembangunan yang termasuk dalam kategori cross cutting meliputi 7 isu sebagai berikut.

- a. Penanggulangan kemiskinan
- b. Penanggulangan Stunting
- c. Pembangunan infrastruktur
- d. Kluster daerah pertanian
- e. Tourism linkage networking
- f. Industri perikanan dan kelautan
- g. *Link and match* pendidikan dan *industry*

Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang wilayah disusun strategi Penataan Ruang wilayah sebagai berikut.



- a. Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan merata di seluruh wilayah dengan hierarki dan skala pelayanannya, meliputi sebagai berikut. Pertama, menetapkan Kawasan Perkotaan sebagai pusat pelayanan kawasan sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan wilayah. Kedua, mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan Tarempa sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional. Ketiga, mendorong pengembangan Kawasan Air Bini menjadi Pusat Kegiatan Lokal. Keempat, peningkatan dan pengembangan pusat pelayanan berdasarkan hierarki, aspek perekonomian pulau-pulau kecil, konservasi alam, dan kependudukan. Kelima, meningkatkan prasarana, sarana penunjang dan pendukung Kawasan Perkotaan.

- 
- 
- b. Strategi pengembangan terintegrasi sistem jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, fasilitas dan utilitas permukiman, meliputi sebagai berikut. Pertama, mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menghubungkan antarpusat kawasan melalui sistem jaringan transportasi antarmoda yang terintegrasi. Kedua, mengembangkan sarana dan prasarana energi serta menciptakan energi alternatif terbarukan yang efisien dan ramah lingkungan. Ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi yang terjangkau seluruh wilayah. Keempat, meningkatkan dan memperluas layanan jaringan telekomunikasi. Kelima, meningkatkan dan memperluas layanan jaringan sumber daya air secara terpadu. Keenam, mengembangkan sarana dan prasarana air baku dan air bersih untuk mewujudkan ketersediaan air bersih. Ketujuh, meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur pemanfaatan sumber daya air dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, serta meningkatkan cakupan pelayanan serta mewujudkan keterpaduan SPAM dengan sistem perpipaan dan bukan perpipaan. Kedelapan, mengembangkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah, penyediaan sistem pengolahan air limbah yang komprehensif, dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah beracun dan berbahaya. Kesembilan, mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di perkotaan dan pulau-pulau kecil berpenghuni dalam rangka kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kesepuluh, mengembangkan sarana dan prasarana jaringan evakuasi bencana dan pengetahuan mitigasi bencana dalam rangka kelestarian fungsi lingkungan hidup. Terakhir, meningkatkan pelayanan sistem jaringan persampahan wilayah melalui pengembangan dan pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dan TPA dalam rangka kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c. Strategi pemanfaatan kawasan yang efisien, serasi, dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya



dukung wilayah kepulauan, meliputi meliputi sebagai berikut. Pertama, optimalisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukannya. Kedua, mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Ketiga, pengawasan dan pengendalian kegiatan budi daya pada masing-masing Kawasan. Keempat, membatasi dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan sekitarnya yang mempunyai kecenderungan mengurangi fungsi lindung kawasan agar tidak melampaui daya dukung Lingkungan Hidup. Kelima, pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

- d. Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup serta melestarikan warisan budaya daerah, meliputi sebagai berikut. Pertama, optimalisasi mengembalikan kondisi Kawasan Lindung yang telah mengalami penurunan fungsi. Kedua, melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan hutan lindung, resapan air, konservasi, ruang sempadan, dan daerah rawan bencana. Ketiga, pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Keempat, mewujudkan ruang terbuka hijau (RTH) Kawasan Perkotaan dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat. Kelima, melestarikan situs warisan peninggalan budaya dan Kawasan Lindung geologi.
- e. Strategi pengembangan sektor ekonomi bertumbuh pada sektor migas, sumber daya bahari, pertanian, industri dan pariwisata, meliputi sebagai berikut. Pertama, memanfaatkan kawasan hutan produksi untuk perkebunan masyarakat. Kedua, mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas kawasan pertanian, perkebunan, pertambangan dan industri sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Budi Daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat. Keempat, mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan




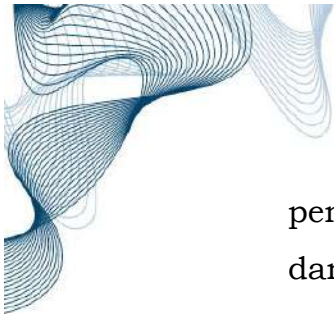
sektor perikanan. Kelima, mengembangkan industri pariwisata dan minyak dan gas yang mendorong peningkatan investasi kawasan, usaha kecil menengah, dan penciptaan lapangan kerja. Keenam, mengembangkan destinasi atau daya tarik pariwisata yang diikuti dengan peningkatan iklim usaha serta pemasaran pariwisata.

- f. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan, meliputi sebagai berikut. Pertama, Mengembangkan dan mensinergikan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dengan Kawasan Budi Daya di sekitarnya secara selektif. Kedua, Melestarikan dan menjaga garis pantai pulau-pulau terluar.
- g. Strategi percepatan perwujudan kawasan strategis sudut pandang ekonomi, sosial budaya, dan Lingkungan Hidup meliputi, meliputi sebagai berikut. Pertama, memanfaatkan sumber daya alam minyak dan gas dan bahari sebagai sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan. Kedua, mengembangkan kawasan peruntukan industri dalam mendukung industri minyak dan gas maupun industri lainnya. Ketiga, mengembangkan kawasan agrominawisata untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas sosial budaya masyarakat.

6.3.2. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang terdiri dari sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Sistem pusat permukiman terdiri dari Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat-pusat lain. PKSN berada di Perkotaan Tarempa. PKL meliputi Letung yang berada di Kecamatan Jemaja, dan Tebangladan yang berada di Kecamatan Palmatak. Adapun pusat-pusat lain terdiri dari Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pengembangan fungsi sistem pusat permukiman adalah sebagai berikut.

- a. PKSN Tarempa dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten dan kecamatan, transportasi laut, pendidikan umum,





perdagangan dan jasa, pusat produksi perikanan, industri pengolahan, dan kegiatan olah raga.

- b. PKL meliputi PKL Letung dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan pintu gerbang, pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan skala lokal, kawasan pertanian dan perkebunan, Kawasan Pariwisata, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi dan kawasan penunjang agromanirawisata. PKL Tebangladan dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan skala lokal, kawasan perkebunan, Kawasan Pariwisata, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi dan Kawasan Minapolitan.
- c. PPK dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman perkotaan, kawasan penunjang agromarinawisata.
- d. PPL dengan fungsi pelayanan permukiman perdesaan dan kawasan penunjang minapolitan.

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana terdiri dari sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Masing-masing penjelasan mengenai rencana sistem jaringan prasarana di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut.

- a. Rencana sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan jalan, sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan, sistem jaringan transportasi laut, dan bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- b. Rencana sistem jaringan energi terdiri dari jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- c. Rencana sistem jaringan telekomunikasi terdiri dari jaringan tetap, dan jaringan bergerak. Jaringan tetap berupa jaringan kabel serat optic bawah laut yang berada di perairan Kabupaten. Jaringan bergerak berupa jaringan bergerak satelit yang berfungsi sebagai pusat



pelayanan Kawasan perbatasan negara dan wilayah pulau kecil atau Kawasan terisolasi.

- d. Rencana sistem jaringan sumber daya air terdiri dari sistem jaringan irigasi, dan bangunan sumber daya air.
- e. Rencana sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (SPAL), sistem pengelolaan limbah B3, sistem jaringan persampahan, dan sistem jaringan evakuasi bencana.

6.3.3. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budi daya. Kawasan lindung meliputi badan air dengan luas kurang lebih 39 ha, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya dengan luas kurang lebih 3.733 ha, kawasan perlindungan setempat dengan luas 73 ha, kawasan konservasi yang terdiri dari taman pulau kecil dan Kawasan konservasi perairan, kawasan lindung geologi yang memiliki keunikan batuan dan fosil dengan luas kurang lebih 4 ha, kawasan cagar budaya, dan Kawasan ekosistem mangrove dengan luas kurang lebih 123 ha.

Kawasan budi daya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan keamanan. Masing-masing penjelasan mengenai komponen kawasan budi daya adalah sebagai berikut.

- a. Kawasan hutan produksi meliputi Kawasan hutan produksi terbatas, Kawasan hutan produksi tetap, dan Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- b. Kawasan pertanian meliputi Kawasan tanaman pangan, Kawasan hortikultura, dan Kawasan perkebunan.

- c. Kawasan perikanan yang berada di wilayah pesisir dan wilayah kelautan meliputi Kawasan perikanan tangkap dan Kawasan perikanan budidaya.
- d. Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 1.781 Ha.
- e. Kawasan pariwisata dengan luas kurang lebih 4.630 ha.
- f. Kawasan permukiman meliputi Kawasan permukiman perkotaan dan Kawasan permukiman pedesaan.
- g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi kantor TNI, Kantor Kepolisian RI, dan Pos Angkatan Laut termasuk pos pengamatan.

6.4. Program Pembangunan Daerah

6.4.1. Keterkaitan Fokus Pembangunan Kepala Daerah dan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Fokus Pembangunan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan 19 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas masa jabatan 2021-2026. Setiap program unggulan tersebut dipetakan berdasarkan misi tujuan dan sasaran. Di dalam sub-bab ini juga ditampilkan urusan dan program bersasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020, yang mendukung Fokus Pembangunan Kepala Daerah.

Tabel 6. 3 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Fokus Pembangunan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 – 2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Fokus Pembangunan Kepala Daerah
1	Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh,	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	
	Berbudaya serta Berahlakul Karimah			yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	
				Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, beasiswa pendidikan, serta insentif khusus bagi petugas pendidikan dan kesehatan yang berprestasi dan dedikatif.	
				Melaksanakan pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip akhlakul karimah melalui penyediaan Ustad/ Ustadzah Keliling di seluruh kecamatan dengan insentif atau umroh gratis bagi para penggiat agama yang berprestasi dan dedikatif.	
				Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Memberikan jaminan sistem kesehatan yang tangguh dan menyediakan minimum 1 (satu) unit RSUD sebagai fasilitas kesehatan rujukan.
				Meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat	Menyediakan pelatihan ketenagakerjaan serta menciptakan lapangan kerja baru.
					Memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada anak-anak yatim piatu dan lansia terantar.
					Menurunkan angka kemiskinan makro hingga di bawah 6 persen.
Menyalurkan Rp.10 Milyar kredit lunak bagi pelaku usaha pemula, dan UMKM.					
2	Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya PDRB sektor unggulan (Perikanan dan Pariwisata) yang berkelanjutan	Mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kecamatan dan desa.	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Fokus Pembangunan Kepala Daerah
	Berbasisikan Sektor Perikanan dan Pariwisata		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan produktivitas perikanan, pertanian, perkebunan, dan industri kreatif. Membangun gedung pertemuan yang representatif di Pulau Jemaja
			Bertambahnya nilai investasi	Sasaran ketiga RPJMD dapat diperhitungkan sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas
3	Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi	1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
			Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Melaksanakan pengangkatan jabatan berdasarkan merit sistem, serta beasiswa khusus bagi pegawai, dan aparat desa yang berprestasi.
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkat desa	Meningkatnya status kemandirian desa	Memperkuat penyelenggaraan otonomi desa dan sinergitas pembangunan antar desa dengan insentif Rp.5 Milyar bagi Desa Berprestasi.
4	Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar	Meningkatkan ketersediaan air bersih dan pengelolaan air limbah serta membenahi pengelolaan sampah dan mewujudkan laut bebas sampah plastik (Anambas Bebas Sampah Plastik 2023)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Fokus Pembangunan Kepala Daerah
				Menyediakan/ merehabilitasi 1000 Unit rumah bagi para tenaga pendidik, kesehatan, ASN/ P3K, dan masyarakat tidak mampu.
			Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan listrik (Anambas Terang 2024). Meningkatkan aksesibilitas antar pulau dan antar wilayah terutama Siantan-Matak, Air Asuk-Kampung Baru, Air Bini-Bajau, Matak-Jemaja, Jemaja-Jemaja Barat (Anambas Terhubung 2025).
			Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi	Meningkatkan jangkauan jaringan telekomunikasi (Anambas Merdeka Sinyal 2023).

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Tabel 6. 4 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 – 2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berahlakul Karimah																			
1.1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)																			
1.1.1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan																			
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase pengelolaan pendidikan yang terpenuhi	Jumlah pengelolaan (Rehabilitasi/Renovasi) yang dilakukan/ pengelolaan yang ditargetkan (600) * 100%	47%	52%	63%	75%	82%	90%	92%	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA						
				Angka Partisipasi Sekolah SD/Mi/Paket A	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun	99,38	100	63.518.624.033	100	79.577.754.601	100	61.230.388.150	100	61.357.802.848	100	107.871.251.079	100	132.117.816.690	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun	94,86	97		98		99	100	100		100		100	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
				Persentase jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%		100%		100%	100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
				Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam kesetaraan yang		100%		100%		100%	100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	
		pendidikan kesetaraan	ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100															
		Persentase jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		49,1		49,6		50,1		50,6		51,1		51,6			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Jumlah sekolah yang menerapkan muatan lokal /jumlah sekolah *100%	0	-	69%	1.043.543.941	-	100%	312.888.312	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan	((Jumlah dokumen formasi yang disusun tepat waktu/Jumlah dokumen formasi yang harus disusun x 100 %) + (Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan/Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yg Seharusnya ada x 100 %) + (Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi diklat /Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yg ada x 100 %)/3	31%	-	45%	10.435.439.408	52%	9.000.000.000	59%	9.386.649.366	67%	17.234.769.573	74%	22.219.667.128	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan (PAUD-Pendidikan dasar non formal) yang memiliki izin	Jumlah Lembaga Pendidikan (PAUD-Pendidikan dasar non formal) yang diberikan izin / total Lembaga pendidikan yang mengajukan perizinan pendidikan*100 %	60%	-	-	-	77%	440.000.000	83%	479.762.079	89%	919.187.711	94%	1.234.425.952	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pembinaan kapasitas kepemudaan	Jumlah pembinaan Pemuda/Total keseluruhan Pemuda *100%	10,50%	19,50%	492.991.500	39,50%	2.235.594.500	45,50%	2.135.594.500	65,50%	2.135.594.500	76,50%	2.135.594.500	85,50 %	2.135.594.500	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan prestasi keolahragaan	Jumlah atlet berprestasi ditingkat provinsi atau nasional/Total peserta atlet yang mengikuti perlombaan*100 %	37%	38%	5.449.918.776	40%	14.000.000.000	48%	13.500.000.000	49%	14.500.000.000	51%	13.800.000.000	53%	13.800.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pemenuhan pengembangan kapasitas kepramukaan	Jumlah pembinaan Kepramukaan/ keseluruhan Kegiatan Kepramukaan yang ditargetkan*100 %	0	19%	583.725.600	39%	1.900.000.000	58%	2.700.000.000	77%	2.000.000.000	81%	2.200.000.000	100%	2.310.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
2	08	02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah memiliki focal poin aktif	Jumlah perangkat daerah yang memiliki focal point aktif/total OPD*100	13,33%	16%	52.030.000	32%	450.000.000	48%	450.000.000	65%	450.000.000	81%	450.000.000	90%	450.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Perbandingan atau rasio (capaian) antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki	90,27	90,38	90,42	90,47	90,52	90,57	90,62	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan pada parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	62,57	63,52	64,01	64,50	64,99	65,47	65,75	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
			Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ----- x 100% Jumlah seluruh belanja langsung APBD	6,45%	6,95%	7,45%	7,95%	8,45%	8,95%	9,45%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pendampingan khusus kekerasan terhadap perempuan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani/jumlah total kasus*100%	53%	-	-	-	58%	379.259.500	63%	389.259.500	73%	399.259.500	87%	409.259.500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase tersedia data terpilah	Jumlah data gender dan anak yang tersedia /jumlah data gender dan anak yang ditargetkan *100%	78%	-	-	-	-	80%	250.000.000	81%	250.000.000	83%	250.000.000	85%	250.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kecamatan layak anak	Jumlah kecamatan yang ditetapkan sebagai kecamatan layak anak/jumlah seluruh kecamatan*100 %	0	20%	40%	60%	80%	90%	100%	301.000.000					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
				Peringkat Kabupaten Layak Anak	Nilai diperoleh dari hasil evaluasi oleh KPPA	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya						DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
						844.987.500							486.000.000						
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase perlindungan khusus kekerasan terhadap anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani/jumlah total kasus*100%	38%	-	-	-	-	42%	541.259.500	47,50%	503.259.500	75%	415.250.500	87,50 %	427.259.500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
4	01		SEKRETARIAT DAERAH																

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase tercapainya kegiatan kesejahteraan rakyat dalam membentuk akhlakul karimah	Jumlah Kegiatan pembinaan akhlakul karimah / total kegiatan pembinaan akhlakul karimah yang targetkan * 100%	100%	100%	10.956.251.250	100%	9.940.000.000	100%	32.578.099.943	100%	34.207.004.940	100%	35.917.355.187	100%	37.713.222.946	SEKRETARIAT DAERAH
1.2.2. Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan																			
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi	Jumlah penduduk peserta BPJS termasuk JKN yang terlayani / jumlah penduduk anambas*100%	71,58%	72,43%		73,28%		74,27%		75,26%		76,25%		77,24%	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
				Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	Jumlah desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan kabupaten sehat/ jumlah total desa dan kelurahan*100%	37,04%	46,30%	85.463.331.142	55,56%	88.397.305.073	64,81%	76.237.876.961	74,07%	79.513.135.494	83,33%	145.993.582.460	100%	188.220.027.625	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta / Jumlah semua ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)
			Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta / Jumlah semua ibu bersalin dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar / Jumlah semua bayi baru lahir dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)
			Persentase jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)
		Persentase jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah kematian Ibu pada satu tahun / jumlah kelahiran hidup dikali 100	225/100.000 KH	215/100.000 KH		205/100.000 KH		195/100.000 KH		185/100.000 KH		183/100.000 KH		183/100.000 KH		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu / Jumlah anak balita pada waktu yang sama dikali 100	15,64	15,14		14,64		14,14		13,14		12,14		12,14		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan	Jumlah SDM yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan / Jumlah SDM x 100%	30%	30%	-	60%	838.302.038	80%	759.139.500	85%	831.340.569	90%	1.602.740.309	90%	2.169.624.248	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan farmasi alat kesehatan dan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya alat farmasi, alat Kesehatan, dan makanan/jumlah alat farmasi, alat Kesehatan, dan makanan yang dibutuhkan*100%	66%	67%	485.334.000	68%	255.088.519	78%	37.788.182.455	82%	41.382.182.204	86%	79.780.650.606	92%	107.998.802.471	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pembinaan kesehatan masyarakat di desa	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan Kesehatan/jumlah desa-kelurahan (54 desa-kelurahan) * 100%	61%	64,81%	342.734.610	68,52%	293.351.797	72,22%	265.650.000	75,93%	290.915.730	79,63%	560.856.026	83,73%	759.228.944	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indeks advokasi dan pengendalian penduduk	(Dokumen Data Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang tersusun /Jumlah Total Dokumen Data Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang harus dimiliki x 40%) + (Jumlah Sekolah SLTP yang mendapatkan Pendidikan kependudukan /jumlah SLTPx 30 %) + ((100-(jumlah PUS dengan usia istri di bawah 21 tahun/jumlah PUS) x30)	60,15	-	60,24	-	62,07	350.000.000	63,91	367.500.000	65,74	385.875.000	405.168.750	65,75	425.427.188	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Laju pertumbuhan penduduk	Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu.	2,37	-	2,14		2,09		2,05		2,01		2,00		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
				Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.	2,88	-	2,82		2,81		2,79		2,78		2,77		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Indeks pembinaan keluarga berencana	((Partisipasi KB aktif/ Jumlah PUS X40 %) + (Jumlah PIK Remaja Jalur Sekolah/ Jumlah Sekolah Menengah Atas Sederajat x 10%) + (Jumlah PIK remaja Jalur masyarakat/ Jumlah Desa dan Kelurahan x 10%) + (Jumlah keluarga yang masuk ke BKB/ Jumlah keluarga sasaran BKB x 10 %) + (Jumlah keluarga yang masuk ke BKR/ Jumlah keluarga sasaran BKR x 10 % (Jumlah keluarga yang masuk ke BKL/ Jumlah keluarga sasaran BKL x 10 %) + (Jumlah kelompok UPPKS / Jumlah Keluarga x 10 %)	63,11	63,37	63,4		63,87		64,44		65,53		65,53		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Contraceptive Privalence Rate (CPR) Modern					59,07		59,16		59,25		59,34		59,4	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Unmet Need					8,58		8,09		7,72		7,42		7,35	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						3.511.139.363		399.840.000		419.832.000		440.823.600		462.864.780		486.008.019		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	
			Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase pengguna MKJP	14,84	16,18	17,5		18,87		20,22		21,56		22,2		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Angka Fertilitas menurut umur/Age Specific Fertility Rates (ASFR)	13,51	-	13,51		13,51		13,51		13,51		13,51		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
				Rata-rata usia kawin pertama wanita	21	-	21	258.220.000	21	271.131.000	21	284.687.550	22	298.921.928	22	313.868.024	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.3.3. Meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat																		
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi aktif yang melakukan izin usaha simpan pinjam	0	-	-	-	33,33%	20.000.000	71,43%	20.859.221	95,24%	38.299.488	100,00%	74.065.557	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	7 Koperasi (53,85%)	61,54%	93.809.000	69,23%	150.734.125	76,92%	100.000.000	84,62%	114.725.714	92,31%	229.796.928	100,00%	320.950.747	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase tingkat Kesehatan koperasi aktif	0	-	-	14,29%	57.975.823	42,86%	88.363.315	71,43%	96.208.135	85,71%	184.427.596	100,00%	248.269.762	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
			melaksanakan RAT*100%																
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mendapatkan pelatihan	Jumlah koperasi yang mendapatkan pelatihan (target dari 21 Koperasi) * 100%	0	-	19,05%	57.975.823	38,10%	50.000.000	57,14%	52.148.052	85,71%	95.748.720	100,00%	148.131.114	DINAS KOOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Penerima Dana Bergulir dari Total UMKM (300) * 100%	210 Penerima DB	10,00%	189.393.000	25,00%	666.708.629	43,33%	200.000.000	63,33%	208.592.208	83,33%	382.994.879	100,00%	617.212.976	DINAS KOOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil dibagi target 62 UMKM*100%	0	9,68%	793.175.400	25,81%	672.506.095	50,00%	536.688.389	79,03%	584.335.133	95,16%	1.120.149.802	100,00%	1.507.905.163	DINAS KOOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang direncanakan setiap tahun	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja yang tersusun/ jumlah target penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja *100%	0	-	-	0	25%	200.000.000	50%	208.592.208	75%	382.994.879	100%	493.770.381	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah Tenaga Kerja yang dilatih berdasarkan Kompetensi dibagi target per tahun	Jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan kompetensi/ jumlah pencari kerja terdaftar * 100%	0	75%	1.312.277.000	77%	1.968.819.568	80%	1.590.334.000	83%	1.658.656.404	87%	3.045.448.893	90%	3.926.299.123	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
			Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Jumlah pengangguran/jumlah angkatan kerja*100%	3,4%	3,5%	3,46%		3,13%		2,78%		2,42%		2,03%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan Koordinasi dan Pengembangan Bursa Kerja	Jumlah Koordinasi dan Pengembangan Bursa Kerja / target Koordinasi dan Pengembangan Bursa Kerja yang ditetapkan x 100%	0	-	75%	120.763.543	80%	504.152.000	85%	525.810.895	95%	965.438.172	100%	1.244.676.625	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase besaran kasus yang diselesaikan	Jumlah yang diselesaikan/jumlah kasus * 100%	9 kasus terselesaikan	12,63%	1.164.707.500	24,77%	1.868.842.493	43,58%	2.498.034.300	62,38%	2.605.352.453	81,19%	4.783.671.727	100%	6.167.276.736	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menerima pengembangan kompetensi	Jumlah SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menerima pengembangan kompetensi / target SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menerima pengembangan kompetensi*100%	0	15%	861.637.500	-	25%	400.000.000	50%	417.184.416	75%	765.989.759	100%	987.540.761	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap tahun n-1 /Jumlah Produksi Perikanan Tangkap tahun n-1 *100%	20.858 Ton	1%	11.634.184.382	2%	6.214.883.914	3%	7.980.000.000	4%	7.259.008.843	5%	12.351.584.861	6%	15.479.701.433	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya/ Target Produksi Perikanan Budidaya*100%	174 Ton	10%	1.791.074.790	15%	2.800.417.007	25%	2.420.000.000	40%	2.169.358.965	65%	3.619.301.610	75%	4.567.376.021	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi Pengolahan perikanan	Jumlah produksi Pengolahan perikanan / target produksi yang ditetapkan*100 %	84 Ton	50%	40.000.200	56,70%	434.809.975	66,60%	200.000.000	73,30%	297.243.897	83,30%	708.540.527	100%	1.172.704.654	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan sarana pertanian	Jumlah Penyediaan sarana pertanian/ target penyediaan sarana*100%	3 Paket	20,00%	965.665.000	33%	1.520.385.024	47%	1.103.000.000	60%	959.524.157	80%	1.953.273.885	100%	1.118.389.912	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/ jumlah total PPKS*100%	65%	67%		69%		71%		73%		75%		75%		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
				Persentase jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%	307.100.000	100%	620,328,898	100%	650.000.000	100%	693.569.092	100%	1.311.757.462	100%	1.728.196.332	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	
																		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
																		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
																		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pendampingan bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga	Jumlah pendampingan bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga/total bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga yang ditargetkan (47000) * 100%	67%	68,06%	69,15%	70,21%	71,28%	72,34%	73,40%						DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
							557.383.600	831.801.454	807.383.600		894.217.692	1.641.867.642	2.221.966.713					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
																		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	63%	67%	71%	75%	78%	82,69%	86,54 %	283.034.600	521,771,970	470.000.000	511.050.910	976.636.942	1.283.802.990	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
				Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata																			
2.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan																			
2.1.1. Meningkatnya PDRB sektor unggulan (Perikanan dan Pariwisata) yang berkelanjutan																			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	Jumlah perizinan yang diterbitkan dibagi target 138 Izin*100%	224	9%	80.321.500	19,57%	66.001.000	39,13%	131.273.837	58,70%	137.004.802	73%	143.076.766	100%	149.394.624	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola dengan baik	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola/ revitalisasi/ rehabilitasi/ bangun baru dibagi jumlah target yang ditetapkan (5 objek) * 100%	11 objek	20%	416.182.362	20%	4.790.001.000	40%	532.031.768	60%	535.000.000	80%	3.572.296.009	100%	538.296.009	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kestabilan harga barang	Persentase rata-rata fluktuasi harga bahan pokok tahun n/ harga bahan pokok tahun n-1 *100%	0,71%	0,71%	428.363.500	0,71%	400.001.000	0,71%	494.963.000	0,71%	494.963.000	0,71%	494.963.000	0,71%	687.781.946	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha Yang mengikuti Pembinaan Promosi Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha Yang mengikuti Pembinaan Promosi Dagang Lokal dari yang ditargetkan*100% (60 orang)	0	-	-	-	25%	150.000.000	67%	150.000.000	92%	150.000.000	100%	150.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peralatan yang terstandardisasi	Jumlah Peralatan yang terstandardisasi dibagi target 1250*100%	271	8,00%	5.658.000	32%	90.000.000	60%	195.000.000	84%	195.000.000	96%	195.000.000	100%	195.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri	Jumlah Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri / target pertumbuhan pelaku usaha industri) * 100%	1618	5%	12.030.054.080	15%	1.600.001.000	0,33	1.800.000.000	0,62	1.900.000.000	0,88	2.000.000.000	1	1.400.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
			(target 100 usaha industri)																
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Industri yang diterbitkan dibagi 250 Fasilitas Pemenuhan Komitmen*100%	0	-	-	-	15%	68.095.620	60%	68.095.620	90%	68.095.620	100%	68.095.620	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Industri	Jumlah Pendataan SIINas dibagi yang ditargetkan (250)	0	-	-	-	14%	53.045.000	56%	54.636.350	80%	56.275.441	100%	57.963.704	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang dilakukan peningkatan	Jumlah Objek destinasi Wisata yang di tingkatkan/target peningkatan daya tarik wisata*100%	15%	20%	4.635.143.858	25%	4.243.745.359	40%	3.050.000.000	55%	3.525.208.317	80%	7.085.405.269	100%	9.134.752.042	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase objek destinasi dan event pariwisata yang dipasarkan	jumlah objek destinasi dan event wisata yang dipasarkan/jumlah objek destinasi dan event wisata yang ditargetkan*100%	10 promosi	17%	1.086.677.000	33%	4.348.099.754	50%	7.300.000.000	67%	8.917.316.898	83%	18.766.749.090	100%	24.194.748.651	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya	Jumlah pelaku seni yang mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya/ jumlah pelaku seni yang mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya yang ditargetkan	10%	15%	333.036.500	35%	2.533.447.907	47%	3.900.000.000	71%	4.100.000.000	88%	4.100.000.000	100%	4.100.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase pertunjukan kesenian tradisional di Kecamatan	Jumlah pertunjukan kesenian tradisional di Kecamatan / jumlah pertunjukan kesenian tradisional yang ditargetkan	10%	20%	1.447.399.180	30%	500.000.000	50%	4.000.000.000	70%	4.000.000.000	90%	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan sejarah	Jumlah keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan sejarah/ target keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan sejarah	0	-	-	-	60%	400.000.000	80%	430.000.000	90%	460.000.000	100%	460.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola/ jumlah cagar budaya yang ditetapkan	0	-	-	-	25%	1.100.000.000	50%	1.150.000.000	75%	1.170.000.000	100%	1.170.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan museum yang terpenuhi	Jumlah layanan museum berdasarkan jumlah kunjungan/ target jumlah kunjungan museum*100%	0	-	-	-	35%	350.000.000	80%	400.000.000	90%	450.000.000	100%	450.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan prasarana pertanian	Jumlah kelompok tani yang menerima prasarana pertanian/ Jumlah kelompok tani yang	10	17,60%	1.467.002.436	35,30%	1.680.263.436	52%	1.500.000.000	70,60%	1.251.553.249	88,20%	1.914.974.397	100%	1.234.425.952	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
			ditargetkan (50 kelompok) *100%																
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kesehatan hewan ternak dan kesmavet	Jumlah hewan ternak dan veteriner sehat / jumlah populasi hewan ternak dan veteriner * 100%	2154 ekor	67%	355.048.200	73%	313.063,182	78%	600.000.000	82%	677.924.676	86%	1.340.482.078	90%	1.851.638.927	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kinerja pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah pengendalian bencana pertanian yang tertangani/jumlah kasus bencana pertanian yang dihadapi*100%	0	-	-	-	40%	450.000.000	60%	469.332.468	75%	861.738.479	80%	617.212.976	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27	06	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok tani	Jumlah Kelompok Tani yang menerima penyuluhan dibagi jumlah kelompok tani yang terdaftar * 100%	85 Kelompok	20%	8.770.900	40%	508.833.533	60%	640.000.000	80%	719.643.118	95%	1.321.332.334	100%	1.283.802.990	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan konsumsi pangan	Jumlah produksi pangan (padi, jagung, singkong, ubi) yang tersedia / Jumlah produksi pangan yang ditargetkan*100 %	225 Ton (45%)	50%	483.432.300	54%	530.587.304	62%	270.000.000	72%	270.000.000	84%	270.000.000	100%	270.000.000	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan	Jumlah desa-kelurahan yang mendapatkan intervensi penanganan kerawanan pangan/ Jumlah desa-kelurahan *100%	0	13%	137.590.000	-	-	-	-	25,90%	60.000.000	55,6%	60.000.000	83,3%	120.000.000	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase rekomendasi pengawasan keamanan pangan yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi pengawasan keamanan pangan yang diterbitkan/ jumlah	0	-	-	20%	109.978.200	40%	130.000.000	60%	130.000.000	80%	130.000.000	100%	270.000.000	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
			rekomendasi yang ditargetkan																
4	01		SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam pengendalian perekonomian dan pembangunan	Jumlah Kebijakan yang diterbitkan/Jumlah keseluruhan kebijakan yang ditargetkan * 100%	0	17%	1.692.770.500	33%	3.700.000.000	50%	3.552.267.679	67%	3.729.881.063	83%	3.916.375.116	100%	4.112.193.872	SEKRETARIAT DAERAH
			2.1.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup																
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah pelaksanaan sosialisasi RPPLH/total jumlah kecamatan*100 %	0	10%	601.223.000	100%	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IP_j = \sqrt{\frac{(CI/LI)^2_m + (CI/LI)^2_d}{2}}$	60	56,6	180.068.000	56,7	156.283.000,00	56,8	431.283.000,00	56,9	431.283.000,00	57	431.283.000,00	57,1	431.283.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pelaksanaan Penghijauan Sumber Air Baku	Jumlah pelaksanaan penghijauan sumber air baku/jumlah target sumber air baku (20 lokasi) * 100%	0	5,00%	211.402.000	30,00%	543.757.000,00	55,00%	293.757.000,00	80,00%	293.757.000,00	95,00%	293.757.000,00	100,00%	293.757.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah aksi pengendalian B3 dan Limbah B3	Jumlah aksi pengendalian B3/jumlah rencana aksi yang ditargetkan*100%	0	-	-	100,00%	15.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan/per setujuan lingkungan hidup yang diterbitkan*100%	0	20,00%	185.050.000	62,00%	571.921.000,00	70,00%	616.921.000,00	80,00%	566.921.000,00	96,00%	566.921.000,00	100,00%	566.921.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peran Serta Sekolah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan/jumlah total sekolah*100%	0	30,00%	358.792.000	45,00%	125.000.000,00	55,00%	227.096.000,00	65,00%	227.096.000,00	80,00%	227.096.000,00	100,00%	227.096.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peran Serta Desa dan Kelurahan dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah desa dan kelurahan yang dinilai/jumlah total desa dan kelurahan*100%	0	44,40%	328.382.000	57,00%	70.000.000,00	65,00%	100.000.000,00	74,00%	100.000.000,00	89,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan yang tertangani/jumlah pengaduan yang diterima	0	-	-	100,00%	5.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah	Jumlah total volume sampah yang dikelola/jumlah volume timbunan sampah	0	12,40%	984.209.000	13,70%	1.122.500.000,00	14,90%	875.000.000,00	16,20%	725.000.000,00	17,50%	725.000.000,00	17,50%	725.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
				Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota yang meliputi:	Total Vol sampah yang dapat ditangani dibagi Total vol timbunan sampah kabupaten/kota x 100%														DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
				a. Persentase jumlah pengurangan timbunan sampah		3,23%	3,5%		4%		4,5%		5%		6%		6%		DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
				b. Persentase jumlah penanganan timbunan sampah		11,13%	11,13%		13,7%		14,97%		16,24%		17,52%		18,78%		DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			2.1.3. Bertambahnya nilai investasi																
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Ratio peningkatan investasi PMA dan PMDN	Jumlah investasi PMA dan PMDN yang terealisasi/jumlah investasi PMA dan PMDN tahun dasar	1	-	-	1.035	700.000.000	1.053	680.000.000	1.071	1.130.000.000	1.090	680.000.000	1.108	680.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi di daerah	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi di daerah/Jumlah total investor yang ditargetkan *100%	0	100%	78.591.000	100%	275.000.000	100%	398.000.000	100%	398.000.000	100%	398.000.000	100%	398.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tingkat penyelesaian Pelayanan Perizinan (PMA dan PMDN)	Jumlah izin yang diterbitkan	0	15 PMDN dan 2 PMA	288.399.000	15 PMDN dan 2 PMA	740.896.000	18 PMDN dan 2 PMA	990.823.000	20 PMDN dan 2 PMA	1.020.823.000	22 PMDN dan 3 PMA	1.040.823.000	24 PMDN dan 3 PMA	1.040.823.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM/jumlah perusahaan yang wajib menyampaikan LKPM*100%	0	66%	486.820.000	71%	100.000.000	75%	385.838.000	80%	385.838.000	85%	385.838.000	90%	385.838.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data berbasis sistem informasi	Jumlah ketersediaan data berbasis sistem informasi/kebutuhan ketersediaan data penanaman modal	0	-	-	51%	150.000.000	63%	125.000.000	74%	150.000.000	85%	175.000.000	96%	175.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi																			
3.1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel																			
3.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel																			
0	0	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	472.634.005.057	100%	522.493.457.718	100%	489.559.124.410	100%	561.539.766.423	100%	560.342.303.452	100%	567.861.650.674	SELURUH OPD
5	01		PERENCANAAN																
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan/jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan*100%	98,67%	100%	1.188.151.028	100%	884.407.997	100%	883.068.670	100%	1.184.743.857	100%	1.002.718.855,7	100%	1.102.990.737,37	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah perangkat daerah yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas/jumlah perangkat daerah *100%	32%	42%	589.987.000	55%	1.202.549.000	68%	1.318.403.900	81%	1.450.244.290	94%	1.595.268.719	100%	1.754.796.014	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH
5	02		KEUANGAN																
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase silpa terhadap APBD	Total Silpa/total APBD *100%	1,25%	7,25%	139.133.200.15	7,00%	104.857.676.741	6,50%	105.035.576.741	6,00%	105.035.576.741	5,50%	105.035.576.741	5,00%	105.035.576.741	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan pengelolaan asset daerah	Jumlah OPD tertib administrasi asset tetap dan tak berwujud/jumlah OPD x 100%	61%	66,67%	1.361.362.000	73,30%	2.133.379.000	80%	2.600.000.000	86,60%	2.630.000.000	93,30%	2.645.000.000	100%	2.670.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tingkat pertumbuhan PAD	Jumlah PAD tahun n- PAD tahun n-1 /PAD tahun n-1	3,87%	3,92%	586.263.900	3,98%	1.685.928.250	4,02%	1.685.928.250	4,13%	1.685.928.250	4,47%	1.685.928.250	4,62%	1.685.928.250	BADAN KEUANGAN DAERAH
6	01		INSPEKTORAT DAERAH																
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah OPD yang diawasi dibagi jumlah keseluruhan OPD*100%	0	19,30% 6 OPD	753.240.500	35,49% 11 OPD	1.400.000.000	51,62% 16 OPD	1.400.000.000	67,75% 21 OPD	1.400.000.000	83,87% 26 OPD	1.400.000.000	100% 31 OPD	1.400.000.000	INSPEKTORAT
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase (%) Perangkat Daerah yang Sudah di Nilai SPIP	Jumlah PD yang sudah dinilai/total perangkat daerah *100%	0	9,68% (3 OPD)	859.568.000	25,81% (8 OPD)	1250000000	41,94% (13 OPD)	1.260.000.000	61,29% (19 OPD)	1270000000	80,65% (25 OPD)	1280000000	100% (31 OPD)	1290000000	INSPEKTORAT
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti / Jumlah keseluruhan Pengaduan masyarakat * 100%	84%	85%	86%	88%	90%	92%	95%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
				Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		952.694.000	100%	100%	100%	100%	100%				10.245.735.398	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penanggulangan bencana	(Jumlah desa tangguh bencana/Jumlah desa rawan bencana x 100%) + (Jumlah tanggap darurat yang dilakukan/Jumlah sasaran dampak bencana yang harus dilakukan tanggap daruratx100%) + (Jumlah kejadian bencana yang direkomendasikan Rehabilitasi dan rekonstruksi/ Jumlah kejadian bencana yang harus dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi x 100%)/3	0	17%	1.759.233.020	33%	3,119,036,890	50%	2.109.585.000	67%	2.385.340.552	87%	4.669.052.275	100%	6.374.032.466	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
			Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 10		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Respons Time Kejadian Kebakaran	Jumlah Kasus Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang Tertangani Dalam Waktu Paling Lama 15 menit/Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMK *100%	80%	100%	1.617.961.640	100%	3.217.593.818	100%	2.965.000.000	100%	3.274.897.668	100%	5.936.420.631	100%	7.850.949.052	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
			Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%		100%		100%		100%		100%		100%		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP el (%)	Jumlah penduduk yang memiliki e-ktp dibanding jumlah penduduk wajib KTP x 100%	99,99%	99,99%	18.890.000	100%	838.816.869	100%	838.816.869	100%	838.816.869	100%	838.816.869	100%	838.816.869	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen akte kelahiran 0-18 Tahun (%)	Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran dibanding jumlah penduduk 0-18 tahun x 100%	95,63%	-	-	100%	540.331.000	98,04%	623.806.000	99,0%	540.331.000	100%	623.806.000	100%	623.806.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi database kependudukan yang disampaikan	Jumlah Dokumen Data Konsolidasi yang dipenuhi/jumlah dokumen konsolidasi yang ditargetkan	20%	-	-	40%	364.766.000	60%	861.536.000	80%	861.536.000	100%	806.536.000	100%	806.536.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase publikasi Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang dipublikasi pada tahun rencana dibagi jumlah profil kependudukan yang ditargetkan x 100%	20%	-	-	40%	71.538.000	60%	71.538.000	80%	71.538.000	100%	71.538.000	100%	71.538.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	tingkat partisipasi pemilih pemilu/pilkada/pilkades (votes turnout)	tingkat partisipasi pemilihan pada pileg + tingkat partisipasi pemilihan pada pilkada / 2 * 100%	83,47	83,47%	478.634.218	83,47%	857.127.718	83,47%	857.127.718	84%	857.127.718	84%	857.127.718	84%	857.127.718	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
8	01	04	ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks kepuasan masyarakat bidang organisasi masyarakat	hasil survei kepuasan masyarakat bidang organisasi masyarakat	76,69	76,69	52.405.000	77	260.000.000	77,50	260.000.000	78	260.000.000	78,50	260.000.000	79	295.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	IKM bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	hasil survei kepuasan masyarakat bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	76,69	76,69	335.462.000	76,72	930.000.000	76,75	980.000.000	76,85	980.000.000	77	980.000.000	77,50	980.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pencegahan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan aparaturnya dalam rangka pemahaman akan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di daerah	jumlah isu kewaspadaan atau konflik sosial yang berhasil dihadapi/jumlah isu kewaspadaan atau konflik sosial yang diidentifikasi*100%	80%	80%	584.026.200	80%	1.201.587.860	80%	1.408.454.475	85%	1.458.776.000	85%	1.515.000.000	85%	1.515.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	01		KECAMATAN																

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan/jumlah pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang ditargetkan*100%	100%	100%	989.564.400	100%	535.805.700	100%	1.215.733.500	100%	884.323.100	100%	994.435.800	100%	1.256.818.500	SELURUH KECAMATAN
3.1.2. Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah																			
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan/jumlah dokumen penelitian dan pengembangan*100%	0	9%	342.964.000	36%	1.279.817.000	55%	1.000.000.000	64%	700.000.000	82%	900.000.000	100%	900.000.000	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH
3.1.3. Meningkatnya profesionalitas ASN																			
5	03		KEPEGAWAIAN																
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jumlah pemenuhan ASN berdasarkan Anjab dan ABK	Jumlah ASN/jumlah formasi*100%	46%	46%	1.565.933.000	61%	4.303.829.250	67%	4.519.020.713	74%	4.744.971.748	80%	4.982.220.336	86%	4.982.220.336	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase cakupan pengembangan aparatur	((Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan/jumlah jabatan struktural*100%) + (jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis dan fungsional/jumlah ASN*100%) + jumlah CASN yang mengikuti latsar CPNS/jumlah CASN*100%))/3	52%	52,00%	739.257.000	53,00%	3.183.880.886	57,00%	3.343.074.930	61,00%	3.510.228.676	65,00%	3.685.740.110	68,00%	3.685.740.110	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkat desa																			
3.2.1. Meningkatnya status kemandirian desa																			
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa	Jumlah Penataan Desa yang dilakukan/Total Desa yang akan dilakukan penataan*100%	50%	50%		55%		61,54%		70,38%		80,77%		90,38%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
				Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	100	100	5.964.352.213	67	324.380.000	17	840.000.000	0	860.000.000	0	880.000.000	0	900.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
				Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks	(kondisi awal desa maju dan desa mandiri berjumlah 10 desa)	1,9		3,8		3,8		5,8		7,7		13,5	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
			Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (perawal tahun n)																
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	Jumlah kerjasama yang difasilitasi/jumlah kerjasama desa yang ditargetkan*100%	0	8%	-	8%	-	15%	250.000.000	19%	100.000.000	25%	110.000.000	25%	100.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan pemerintahan desa	Jumlah Pembinaan Desa yang dilakukan/Total jumlah Desa *100%	56%	58%	1.301.956.984	62,00%	2.187.071.984	65,00%	2.185.000.000	69,00%	2.120.000.000	73,00%	1.810.000.000	77%	1.920.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif/jumlah lembaga kemasyarakatan yang terdaftar*100%	25%	30%	191.536.000	35%	1.291.536.000	38%	1.712.944.000	40%	1.948.944.000	42%	2.118.944.000	42%	2.278.944.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
7	01		KECAMATAN																
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa/jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang ditargetkan*100%	100%	100%	8.435.417.568	100%	411.072.380	100%	576.247.490	100%	580.460.411	100%	569.252.384	100%	436.202.180	SELURUH KECAMATAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan /jumlah pembinaan dan pengawasan yang ditargetkan*100 %	100%	100%	271.927.550	100%	411.072.380	100%	576.247.490	100%	580.460.411	100%	569.252.384	100%	436.202.180	SELURUH KECAMATAN
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah																			
4.1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang																			
4.1.1. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar																			
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air (SDA)	Jumlah sarana prasarana SDA yang dibangun atau direhabilitasi/jumlah sarana dan prasarana yang ditargetkan (9; 4 embung, 3 DI, 2 Sea Wall) * 100%	3 Unit	11,1% (1 Unit)	8.309.039.923	0	-	33,3% (3 unit)	36.616.092.862	77,7% (6 unit)	87,191,543,001	88,8% (7 unit)	50,810,461,864	100% (8 unit)	4,937,703,806	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan	Jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut x 100 %	7.907 SR	56% (200 SR)	8.819.970.281	56,2% (235 SR)	17.798.221.658	56,54 (276 SR)	10.000.000.000	56,6% (281 SR)	9.629.702.050	56,7% (301 SR)	9.574.871.985	56,9% (341 SR)	12.344.259.516	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	Jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap sampah terkelola di dalam sebuah kabupaten/kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut x 100 %	-	12,44%	1.016.229.650	13,70%	3.478.479.803	14,97%	5.000.000.000,00	16,24%	5.214.805.203	17,52%	9.574.871.985	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	Jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD di dalam sebuah kabupaten/kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut x 100 %	47,29	52,82%	1.366.663.707	54,20%	1.159.493.268	55,59%	2.500.000.000,00	56,97%	2.607.402.602	58,35%	4.787.435.992	59,73 %	6.172.129.758	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Penambahan panjang saluran Drainase yang dibangun	Jumlah panjang saluran Drainase yang dibangun pada tahun eksisting/target saluran drainase(3km) * 100%	7 km	5% (100m)	793.321.101	20% (600m)	1.663.397.911	40% (1200m)	1.434.590.400,00	60% (1800m)	1.496.221.897	80% (2400m)	2.747.203.886	100% (3000 m)	3.541.791.239	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

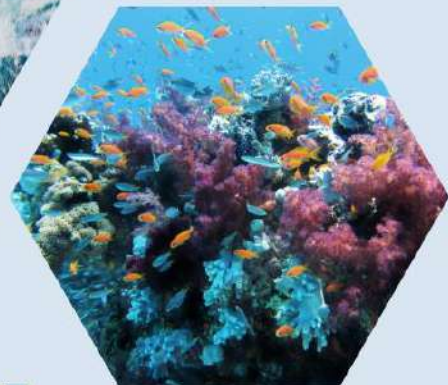
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Penambahan panjang Jalan Lingkungan yang dibangun	Jumlah panjang Jalan Lingkungan yang dibangun pada tahun eksisting/total jalan lingkungan yang ditargetkan (5km) *100%	4,5 km	10% (500m)	19.600.136.312	20% (1000m)	4.369.719.482	40% (2000m)	5.000.000.000,00	60% (3000m)	10.429.610.407	80% (4000m)	9.574.871.985	100% (5000m)	12.344.259.516	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase peningkatan bangunan gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana	Jumlah bangunan gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana dibagi dengan total target *100%	-	5%	28.995.076.088	25%	5.797.466.338	50%	10.000.000.000,00	75%	10.429.610.407	100%	19.149.743.970	100%	24.688.519.031	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah IMB yang berlaku x 100 %	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase kawasan yang ditangani penataannya dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana	Jumlah bangunan gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana dibagi dengan total target*100%	-	5%	265.438.651	20%	3.339.340.611	60%	10.000.000.000,00	80%	7.937.001.312	100%	13.404.820.779	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan rumah bagi rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi	Jumlah rumah Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi yang ditangani/jumlah rumah yang mengalami relokasi*100%	-	-	-	-	-	40%	300.000.000,00	60%	312.888.312	80%	574.492.319	100%	740.655.571	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
			Persentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100 %		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Persentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni dibagi Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100 %		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani/jumlah rumah tidak layak huni yang ditargetkan (900 rumah) * 100%	-	1%	459.577.420	20%	11.594.932.676	40%	10.000.000.000,00	60%	10.429.610.407	80%	19.149.743.970	100%	17.281.963.322	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penanganan rumah MBR yang mendapat bantuan PSU	Jumlah rumah tidak layak huni yang mendapat bantuan PSU yang ditangani/jumlah rumah tidak layak huni yang ditargetkan(900) *100%	-	-	-	-	40%	300.000.000,00	60%	312.888.312	80%	574.492.319	100%	740.655.571	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase penanganan PSU pada Perumahan komersil	Jumlah perumahan yang mendapat bantuan PSU yang ditangani/jumlah perumahan yang ditargetkan(100 rumah)*100%	-	-	-	-	-	40%	1.000.000.000,00	60%	1.042.961.041	80%	1.914.974.397	100%	2.468.851.903	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.1.2. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir																			
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Ratio kejadian kecelakaan	Jumlah kecelakaan lalu lintas per tahun/jumlah kecelakaan tahun sebelumnya	10 kecelakaan	0,90	6.185.505.734	0,89	5.558.314.301,00	0,88	2.866.609.000,00	0,86	2.866.609.000,00	0,83	2.812.072.343,00	0,80	2.812.072.343,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana transportasi Laut	Jumlah pulau-pulau pusat perekonomian yang dapat dijangkau melalui transportasi laut/jumlah pulau-pulau pusat perekonomian(18)*100%	0	35,30%	17.234.500,045	35,30%	35.314.537.603,00	47,10%	28.483.537.603,00	52,90%	28.483.537.603,00	58,80%	28.483.537.603,00	58,80%	28.483.537.603,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	03	010	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pembangunan Jalan dan Jembatan (Km))	Jumlah panjang jalan dan jembatan terbangun yang di atur, dibina, dan dilebarkan/target pertahun*100%	217 km	13,3% (4km)	116.812.352,760	36,6%(11 km)	113.250.896.304	60% (18km)	182.576.878,279,00	80% (24 km)	177.905.038,486	90% (27 km)	60.276.340.850	100% (30 km)	68.155.249,038	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.1.3. Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi																			
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase keterbukaan informasi publik	Jumlah informasi yang dapat diakses oleh publik dibagi keseluruhan jumlah informasi publik dikali 100	100%	100%	4.784.023.800	100%	5.488.844.700,00	100%	5.132.843.700,00	100%	5.066.923.700,00	100%	5.145.274.500,00	100%	5.151.614.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan SPBE Pemerintah yang diterapkan oleh perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan layanan SPBE Pemerintah dibagi jumlah seluruh perangkat daerah dikali 100	64%	71,43%	5.790.564.210	78,57%	6.950.762.500,00	85,71%	11.999.011.799,00	92,86%	13.198.912.980,00	100%	11.999.011.799	100%	13.198.912.980,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah



BAB VII
Kerangka
Pendanaan
Pembangunan dan
Program Perangkat
daerah



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan kerangka pendanaan pembangunan yang memuat Kapasitas Riil Keuangan Daerah dalam rangka mendanai program pembangunan daerah. Kapasitas riil keuangan yang disajikan adalah perkiraan ketersediaan pendanaan di luar belanja operasi seperti belanja gaji, belanja hibah, belanja bantuan sosial, serta belanja transfer dan belanja tidak terduga. Selain itu, bab ini menguraikan berbagai program, indikator kinerja dan target kinerja *outcome* seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan arah kebijakan setiap tahun yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran.

7.1. Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah pada tahun 2022-2026 diperkirakan adalah sebesar Rp7.096.523.488.731,-. Sedangkan, penerimaan pembiayaan selama periode 2022-2026 adalah sebesar Rp 0,-. Sehingga total penerimaan daerah sama dengan pendapatan daerah pada periode 2022-2026. Penerimaan daerah tersebut dipakai untuk membiayai belanja wajib. Komponen belanja wajib itu adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja transfer dan belanja tidak terduga. Untuk pengeluaran pembiayaan selama 2022-2026 tidak ada atau sama dengan Rp 0, -. Sehingga kapasitas riil selama 2022-2026 adalah Rp2.452.061.893.606,-. Tabel di bawah ini adalah kerangka pendanaan pembangunan daerah selama kurun waktu periode RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026.

**Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 – 2026**

URUT	URAIAN	Penetapan*	Proyeksi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KAPASITAS RIIIL KEUANGAN	258.136.450.417	309.855.961.050	393.305.688.612	522.106.313.010	581.177.237.117	645.616.693.818
2	BELANJA	1.132.256.994.494	1.191.753.696.345	1.311.018.962.039	1.450.295.313.916	1.529.413.781.886	1.614.041.734.545
2.1	BELANJA OPERASI	739.057.351.962	740.185.515.065	768.965.442.185	771.053.778.102	783.344.560.825	795.388.457.585
2.1.1	Belanja Pegawai	313.683.258.742	333.083.481.779	384.482.721.093	385.526.889.051	391.672.280.412	397.694.228.793
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	404.661.563.645	384.526.375.076	361.029.275.106	362.009.748.819	367.780.271.307	373.434.880.836
2.1.3	Belanja Subsidi	-					
2.1.4	Belanja Hibah	20.577.814.575	22.205.565.452	23.068.963.266	23.131.613.343	23.500.336.825	23.861.653.728
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	134.715.000	370.092.758	384.482.721	385.526.889	391.672.280	397.694.229
2.2	BELANJA MODAL	258.136.450.417	309.855.961.050	393.305.688.612	522.106.313.010	581.177.237.117	645.616.693.818
2.2.1	Belanja Tanah	230.343.000	309.855.961	393.305.689	522.106.313	581.177.237	645.616.694
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	55.001.284.502	55.464.217.028	70.401.718.262	93.457.030.029	104.030.725.444	115.565.388.193
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	52.899.740.729	92.956.788.315	117.991.706.584	156.631.893.903	174.353.171.135	193.685.008.145
2.2.4	Belanja Jalan,	147.493.272.637	154.927.980.525	196.652.844.306	261.053.156.505	290.588.618.558	322.808.346.909

URUT	URAIAN	Penetapan*	Proyeksi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Irigasi dan Jaringan						
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.511.809.549	6.197.119.221	7.866.113.772	10.442.126.260	11.623.544.742	12.912.333.876
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2.4	BELANJA TRANSFER	134.011.638.315	140.712.220.231	147.747.831.242	155.135.222.804	162.891.983.945	171.036.583.142
2.4.1	Transfer Bagi Hasil	2.250.000.000	2.362.500.000	2.480.625.000	2.604.656.250	2.734.889.063	2.871.633.516
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	131.761.638.315	138.349.720.231	145.267.206.242	152.530.566.554	160.157.094.882	168.164.949.626

*Catatan: Anggaran 2021 sudah merupakan anggaran sementara tahun berjalan 2021

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

7.2. Program Perangkat Daerah

Pada sub-bab ini dijelaskan mengenai program perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Program perangkat daerah yang tercantum dalam sub-bab ini adalah program yang telah dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah dan merupakan bagian dari program-program dalam mencapai Visi dan Misi Daerah. Setiap program yang tercantum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada saat dokumen RPJMD ini dilaksanakan. Program-program tersebut menjelaskan juga indikator kinerja program, target dan pagu indikatif selama lima tahun perencanaan. Program-program perangkat daerah tersebut dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut.

Tabel 7. 2 Program Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan

No.	Kode Rekening	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota
	1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
	1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan
2	1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum
3	1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
4	1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
	1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
5	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6	1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
7	1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
8	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
9	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
10	1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
11	1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
12	1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
13	1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
14	1.03.07	Program Pengembangan Permukiman
15	1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung
16	1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
17	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan

No.	Kode Rekening	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota
18	1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
19	1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
20	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan
21	1.04.03	Program Kawasan Permukiman
22	1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
23	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
	1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
24	1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
25	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana
26	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
27	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial
28	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial
29	1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
30	1.06.06	Program Penanganan Bencana
	2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
	2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
31	2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja
32	2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
33	2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja
34	2.07.05	Program Hubungan Industrial
	2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
35	2.08.02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
36	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan
37	2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
38	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
39	2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak
	2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
40	2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
41	2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan
42	2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
43	2.10.02	Program Pengelolaan Izin Lokasi
44	2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
45	2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
46	2.10.06	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
47	2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong

No.	Kode Rekening	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota
48	2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
49	2.10.10	Program Penatagunaan Tanah
	2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
50	2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
51	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
52	2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
53	2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
54	2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
55	2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
56	2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
57	2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
58	2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan
	2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
59	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk
60	2.12.03	Program Pencatatan Sipil
61	2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
62	2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
63	2.13.02	Program Penataan Desa
64	2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa
65	2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa
66	2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
67	2.14.02	Program Pengendalian Penduduk
68	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
69	2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
	2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
70	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
71	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran
	2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
72	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
73	2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
74	2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
75	2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
76	2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
77	2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

No.	Kode Rekening	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota
78	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
79	2.17.08	Program Pengembangan Umkm
	2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
80	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
81	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal
82	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal
83	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
84	2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
85	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
86	2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
87	2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
88	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
	2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
89	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
90	2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan
91	2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
92	2.22.04	Program Pembinaan Sejarah
93	2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
94	2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman
	2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
95	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan
	2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
96	2.24.02	Program Pengelolaan Arsip
	3	Urusan Pemerintahan Pilihan
	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
97	3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
98	3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
99	3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
100	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
101	3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata
102	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
103	3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
104	3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
105	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
106	3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
107	3.27.06	Program Penyuluhan Pertanian
	3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

No.	Kode Rekening	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota
108	3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
109	3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
110	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
111	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor
112	3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
	3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
113	3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
114	3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
115	3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
116	3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
	4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
	4.01	Sekretariat Daerah
117	4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
118	4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan
	4.02	Sekretariat DPRD
119	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
	5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
	5.01	Perencanaan
120	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
121	5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.02	Keuangan
122	5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
123	5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
124	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	5.03	Kepegawaian
125	5.03.02	Program Kepegawaian Daerah
	5.04	Pendidikan Dan Pelatihan
126	5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.05	Penelitian Dan Pengembangan
127	5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	5.06	Pengelolaan Perbatasan
128	5.06.02	Program Pengelolaan Perbatasan
	6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
	6.01	Inspektorat Daerah
129	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan
130	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
	7	Unsur Kewilayahan
	7.01	Kecamatan
131	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
132	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
133	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

No.	Kode Rekening	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota
134	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
135	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	8	Unsur Pemerintahan Umum
	8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik
136	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
137	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
138	8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
139	8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
140	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
141	0.00.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020

Penyajian urusan dan program berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pengampu urusan di setiap Perangkat Daerah. 141 program tersebut di atas disajikan secara detail dalam tabel 7.3.

Tabel 7. 3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
0	0	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	155.867.290.134	100%	147.218.035.820	100%	163.418.035.820	100%	163.418.035.820	100%	163.418.035.820	100%	163.418.035.820	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	15.925.514.475	100%	17.476.088.000	100%	18.041.629.684	100%	19.041.629.684	100%	20.041.629.684	100%	21.041.629.684	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	89.244.645.715	100%	89.024.140.665	100%	89.024.140.665	100%	89.024.140.665	100%	89.024.140.665	100%	89.024.140.665	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	19.415.093.461	100%	15.800.420.923	100%	11.463.204.755	100%	21.237.285.194	100%	18.015.452.775	100%	18.624.978.801	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	9.383.501.096	100%	9.730.883.412	100%	9.595.290.146	100%	9.595.290.146	100%	9.595.290.146	100%	9.595.290.146	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	5.894.845.187	100%	6.526.709.508	100%	4.621.068.012	100%	6.500.215.508	100%	6.500.215.508	100%	6.500.215.508	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	35.805.672.858	100%	46.271.687.696	100%	32.553.454.578	100%	46.271.687.696	100%	46.271.687.696	100%	46.271.687.696	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	182.947.000	100%	5.119.986.500	100%	5.077.895.375	100%	5.216.674.919	100%	5.360.763.219	100%	5.510.453.165	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	5.948.671.740	100%	8.142.862.414	100%	8.391.475.869	100%	8.637.622.118	100%	8.894.639.105	100%	9.163.387.665	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	5.631.440.167	100%	7.802.624.998	100%	5.489.369.658	100%	7.802.624.998	100%	7.802.624.998	100%	7.802.624.998	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	80%	100%	8.818.144.980	100%	11.493.478.484	100%	9.995.907.147	100%	13.039.418.498	100%	13.849.423.361	100%	15.730.899.729	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	12.719.090.866	100%	17.926.112.950	100%	12.871.196.013	100%	18.870.580.000	100%	19.070.480.000	100%	19.187.700.000	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah	100%	100%	3.785.428.736	100%	4.597.696.205	100%	4.477.696.205	100%	4.552.696.205	100%	4.477.696.205	100%	4.787.696.205	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			total kegiatan															
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	-	100%	8.741.130.200	100%	7.676.000.000	100%	8.286.000.000	100%	9.125.000.000	100%	9.739.000.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	6.009.853.327	8.213.217.740	100%	8.004.810.525	100%	13.429.688.669	100%	11.344.088.669	100%	11.344.088.669		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	12.168.970.178	16.941.191.372	100%	16.941.191.372	100%	16.941.191.372	100%	16.941.191.372	100%	16.941.191.372		BADAN KEUANGAN DAERAH	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	8.550.672.638	13.709.500.000	100%	10.679.563.792	100%	15.372.000.000	100%	15.560.000.000	100%	15.565.500.000		INSPEKTORAT	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	18.829.739.204	21.586.355.530	100%	16.179.884.169	100%	22507509207	100%	23321948833	100%	23.321.948.833		SEKRETARIAT DPRD	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	5.950.148.277	7.091.905.246	100%	8.962.931.095	100%	9709842020	100%	10456752944	100%	11.203.663.869		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	14.545.244.052	15.376.186.246	100%	10.622.375.044	100%	15.172.429.450	100%	15.137.429.450	100%	15.137.429.450		DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	5.590.258.802	100%	7.174.012.697	100%	7.174.012.697	100%	7.174.012.697	100%	7.174.012.697	100%	7.174.012.697	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	1.618.341.608	100%	4.607.367.793	100%	3.433.471.278	100%	5.120.241.347	100%	5.378.571.779	100%	5.657.056.662	KECAMATAN SIANTAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	2.718.307.507	100%	2.930.827.560	100%	2.697.187.142	100%	3.670.013.594	100%	3.986.316.984	100%	3.986.316.984	KECAMATAN SIANTAN UTARA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	3.793.201.101	100%	3.357.178.043	100%	2.384.987.014	100%	3.320.202.543	100%	3.315.573.093	100%	3.510.412.183	KECAMATAN SIANTAN TENGAH
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	3.122.799.211	100%	3.276.942.094	100%	2.342.715.753	100%	3.418.936.094	100%	3.418.936.094	100%	3.418.936.094	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	2.986.456.781	100%	2.998.048.463	100%	2.109.212.768	100%	2.998.048.463	100%	2.998.048.463	100%	2.998.048.463	KECAMATAN SIANTAN TIMUR
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	4.372.892.822	100%	4.589.993.372	100%	3.636.953.430	100%	5.169.588.772	100%	4.843.110.722	100%	5.169.588.772	KECAMATAN PALMATAK
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	3.242.495.520	100%	3.255.080.994	100%	2.822.609.613	100%	4.012.075.284	100%	3.255.080.994	100%	4.012.075.284	KECAMATAN KUTE SIANTAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	2.860.943.079	100%	3.225.033.455	100%	2.495.793.516	100%	2.945.644.355	100%	2.945.744.255	100%	2.945.644.355	KECAMATAN JEMAJA BARAT
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	4.260.639.438	100%	5.264.489.053	100%	3.989.735.063	100%	5.687.479.033	100%	5.427.900.049	100%	5.687.479.033	KECAMATAN JEMAJA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/jumlah total kegiatan	100%	100%	3.390.755.097	100%	3.024.270.285	100%	2.385.326.212	100%	3.396.962.072	100%	3.390.517.872	100%	3.390.517.872	KECAMATAN JEMAJA TIMUR
		TOTAL PENUNJANG URUSAN					472.634.005.057		522.493.457.718		489.559.124.410		561.539.766.423		560.342.303.452		567.861.650.674	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase pengelolaan pendidikan yang terpenuhi	Jumlah pengelolaan (Rehabilitasi/Renovasi) yang dilakukan/pengelolaan yang ditargetkan (600) * 100%	47%	52%		63%		75%	82%	90%	92%				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Angka Partisipasi Sekolah SD/Mi/Paket A	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun	99,38	100	63.518.624.033	100	79.577.754.601	100	61.230.388.150	100	61.357.802.848	100	107.871.251.079	132.117.816.690	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun	94,86	97	98		99		100		100		100		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Persentase jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	-	100%	100%		100%		100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	-	100%	100%		100%		100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	-	49,1		49,6		50,1		50,6		51,1		51,6		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Jumlah sekolah yang menerapkan muatan lokal /jumlah sekolah *100%	0	-	69%	1.043.543.941	-	-	100%	312.888.312	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan	((Jumlah dokumen formasi yang disusun tepat waktu / Jumlah dokumen formasi yang harus disusun x 100 %) + (Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi diklat	31%	-	45%	10.435.439.408	52%	9.000.000.000	59%	9.386.649.366	67%	17.234.769.573	74%	22.219.667.128	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			/Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yg ada x 100 %)/3															
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan (PAUD-Pendidikan dasar non formal) yang diberikan izin/total Lembaga pendidikan yang mengajukan perizinan pendidikan*100%	60%	-	-	-	77%	440.000.000	83%	479.762.079	89%	919.187.711	94%	1.234.425.952	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi	71,58%	72,43%	73,28%	74,27%	75,26%	76,25%	77,24%	78,23%	79,22%	80,21%	81,20%	82,19%	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	Jumlah desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan kabupaten sehat/ jumlah total desa dan kelurahan*100%	37,04%	46,30%	55,56%	64,81%	74,07%	83,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
					85.463.331.142	88.397.305.073	88.397.305.073	76.237.876.961	79.513.135.494	145.993.582.460	145.993.582.460	188.220.027.625	188.220.027.625	188.220.027.625	188.220.027.625	188.220.027.625		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta / Jumlah semua ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	-	100%	100%		100%		100%		100%		100%			DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta / Jumlah semua ibu bersalin dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	-	100%	100%		100%		100%		100%		100%			DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar / Jumlah semua bayi baru lahir dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%	-	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	-	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	-	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Persentase jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	-	100%												DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	-	100%												DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	-	100%												DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang	-	100%												DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100																
		Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah kematian Ibu pada satu tahun / jumlah kelahiran hidup dikali 100	225/10 0.000 KH	215/10 0.000 KH		205/10 0.000 KH		195/10 0.000 KH		185/10 0.000 KH		183/10 0.000 KH		183/10 0.000 KH			DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu / Jumlah anak balita pada waktu yang sama dikali 100	15,64	15,14		14,64		14,14		13,14		12,14		12,14			DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan	Jumlah SDM yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan / Jumlah SDM x 100%	30%	30%	-	60%	838.302.038	80%	759.139.500	85%	831.340.569	90%	1.602.740.309	90%	2.169.624.248	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan farmasi alat kesehatan dan makanan dan minuman	Jumlah tersedia ya alat farmasi, alat Kesehatan, dan makanan /jumlah alat farmasi, alat Kesehatan, dan makanan yang dibutuhkan*100%	66%	67%	485.334.000	68%	255.088.519	78%	37.788.182.455	82%	41.382.182.204	86%	79.780.650.606	92%	107.998.802.471	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pembinaan kesehatan masyarakat di desa	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan Kesehatan/jumlah desa-kelurahan (54 desa-kelurahan) * 100%	61%	64,81%	342.734.610	68,52%	293.351.797	72,22%	265.650.000	75,93%	290.915.730	79,63%	560.856.026	83,73%	759.228.944	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air (SDA)	Jumlah sarana prasarana SDA yang dibangun atau direhabilitasi/jumlah sarana dan prasarana yang ditargetkan (9; 4 embung, 3 DI, 2 Sea Wall) * 100%	3 Unit	11,1% (1 Unit)	8.309.039.923	0	-	33,3% (3 unit)	36.616.092.862	77,7% (6 unit)	87.191.543.001	88,8% (7 unit)	50.810.461.864	100% (8 unit)	4.937.703.806	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan	Jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap	7.907 SR	56% (200 SR)	8.819.970.281	56,2% (235 SR)	17.798.221.658	56,54 (276 SR)	10.000.000.000	56,6% (281 SR)	9.629.702.050	56,7% (301 SR)	9.574.871.985	56,9% (341 SR)	12.344.259.516	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut x 100 %															PERMUKIMAN	
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	Jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap sampah dikelola di dalam sebuah kabupaten/kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut x 100 %	-	12,44%	1.016.229.650	13,70%	3.478.479.803	14,97%	5.000.000.000,00	16,24%	5.214.805.203	17,52%	9.574.871.985	-	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya	47,29	52,82%	1.366.663.707	54,20%	1.159.493.268	55,59%	2.500.000.000,00	56,97%	2.607.402.602	58,35%	4.787.435.992	59,73%	6.172.129.758	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD di dalam sebuah kabupaten/kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut x 100 %																
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Penambahan panjang saluran Drainase yang dibangun	Jumlah panjang saluran Drainase yang dibangun pada tahun eksisting /target saluran drainase(3km) * 100%	7 km	5% (100m)	793.321.101	20% (600m)	1.663.397.911	40% (1200m)	1.434.590.400,00	60% (1800m)	1.496.221.897	80% (2400m)	2.747.203.886	100% (3000m)	3.541.791.239	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Penambahan panjang Jalan Lingkungan yang dibangun	Jumlah panjang Jalan Lingkungan yang dibangun pada tahun eksisting /total jalan lingkungan yang ditargetkan (5km) *100%	4,5 km	10% (500m)	19.600.136.312	20% (1000m)	4.369.719.482	40% (2000m)	5.000.000.000,00	60% (3000m)	10.429.610.407	80% (4000m)	9.574.871.985	100% (5000m)	12.344.259.516	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase peningkatan bangunan gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana	Jumlah bangunan gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana dibagi dengan total target *100%	-	5%	28.995.076.088	25%	5.797.466.338	50%	10.000.000.000,00	75%	10.429.610.407	100%	19.149.743.970	100%	24.688.519.031	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah IMB yang berlaku x 100 %	100%	100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase kawasan yang ditangani penataannya dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana	Jumlah bangunan gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana dibagi dengan total target*100%	-	5%	265.438.651	20%	3.339.340.611	60%	10.000.000.000,00	80%	7.937.001.312	100%	13.404.820.779	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	010	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pembangunan Jalan dan Jembatan (Km)	Jumlah panjang jalan dan jembatan terbangun yang di atur, dibina, dan dilebarkan/target pertahun *100%	217 km	13,3% (4km)	116.812.352.760	36,6%(11km)	113.250.896.304	60% (18km)	182.576.878.279,00	80 % (24 km)	177.905.038.486	90% (27 km)	60.276.340.850	100% (30 km)	68.155.249.038	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	03	01	1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase penambahan tenaga kerja konstruksi yang terampil	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang dibangun menjadi terampil/ jumlah tenaga kerja konstruksi yang ditargetkan*100%	-	10%	200.377.000	20%	695.695.961	40%	170.000.000,00	60%	177.303.377	80%	325.545.647	100%	419.704.824	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen penataan ruang	Jumlah dokumen yang tersedia/ target dokumen penataan ruang*100%	-	20% (1 dokumen)	1.043.309.700	40% (2 dokumen)	1.159.493.268	60% (3 dokumen)	500.000.000,00	80% (4 dokumen)	521.480.520	90% (5 dokumen)	957.487.198	100% (5 dokumen)	1.234.425.952	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penangan rumah bagi rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi	Jumlah rumah Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi yang ditangani /jumlah rumah yang mengalami relokasi*100%	-	-	-	-	-	-	40%	-	60%	-	80%	-	100%	-	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Persentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani		100%					100%	300.000.000,00	100%	312.888.312	100%	574.492.319	100%	740.655.571	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			pada tahun n x 100 %																
		Persentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni dibagi Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100 %		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani / jumlah rumah tidak layak huni	-	1%	459.577.420	20%	11.594.932.676	40%	10.000.000.000,00	60%	10.429.610.407	80%	19.149.743.970	100%	17.281.963.322	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			layak huni yang ditargetkan (900 rumah) * 100%															PERMUKIMAN	
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penanganan rumah MBR yang mendapat bantuan PSU	Jumlah rumah tidak layak huni yang mendapat bantuan PSU yang ditangani /jumlah rumah tidak layak huni yang ditargetkan(900)*100%	-	-	-	-	-	40%	300.000.000,00	60%	312.888.312	80%	574.492.319	100%	740.655.571	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase penanganan PSU pada Perumahan komersil	Jumlah perumahan yang mendapat bantuan PSU yang ditangani /jumlah perumahan yang ditargetkan(100 rumah)*100%	-	-	-	-	-	40%	1.000.000.000,00	60%	1.042.961.041	80%	1.914.974.397	100%	2.468.851.903	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti / Jumlah keseluruhan Pengaduan masyarakat * 100%	84%	85%	952.694.000	86%	3.859.251.594	88%	3.926.707.800	90%	5.809.292.997	92%	7.504.784.662	95%	10.245.735.398	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Jumlah Warga Negara yang memperol eh layanan akibat dari penegaka n hukum Perda dan perkada yang ditangani / jumlah yang ditargetk an dikali 100		100%		100%		100%		100%		100%		100%		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
1	05	03	PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA	Cakupan penanggulan gan bencana	(Jumlah desa tangguh bencana/ Jumlah desa rawan bencana x 100 %) + (Jumlah tanggap darurat yang dilakuka n/Jumla h sasaran dampak bencana yang harus dilakuka n tanggap daruratx 100%) + (Jumlah kejadian bencana yang direkome ndasikan Rehabilit asi dan rekonstru ksi/Juml ah kejadian bencana yang harus dilakuka n	0	17%	1.759.233.020	33%	3.119.036.890	50%	2.109.585.000	67%	2.385.340.552	87%	4.669.052.275	100%	6.374.032.466	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Rehabilitasi dan Rekonstruksi x 100%/3														
		Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 10		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Respons Time Kejadian Kebakaran	Jumlah Kasus Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang Tertangani Dalam Waktu Paling Lama 15 menit/ Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMK *100%	80%	100%	1.617.961.640	100%	3.217.593.818	100%	2.965.000.000	100%	3.274.897.668	100%	5.936.420.631	100%	7.850.949.052	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%		100%		100%		100%		100%		100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	Jumlah PSKS yang ditangani / jumlah total PSKS (52 desa) * 100%	52%	-	-	63,46%	440.607.442	69,23%	580.000.000	75%	469.332.468	80,77%	900.037.967	86,54%	1.209.737.433	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / jumlah	65%	67%	307.100.000	69%	620.328.898	71%	650.000.000	73%	693.569.092	75%	1.311.757.462	75%	1.728.196.332	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			total PPKS*100%														DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
		Persentase jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
		Persentase jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
		Persentase jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Persentase jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pendampingan bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga	Jumlah pendampingan bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga /total bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga yang ditargetkan (47000) * 100%	67%	68,06%		69,15%		70,21%		71,28%		72,34%		73,40%		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial dalam masa tanggap darurat/jumlah	63%	67%	283.034.600	71%	521.771.970	75%	470.000.000	78%	511.050.910	82,69%	976.636.942	86,54%	1.283.802.990	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		bencana daerah kabupaten/kota	korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun																
		Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang direncanakan setiap tahun	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja yang tersusun / jumlah target penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja *100%	0	-	-	-	0	25%	200.000.000	50%	208.592.208	75%	382.994.879	100%	493.770.381	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah Tenaga Kerja yang dilatih berdasarkan Kompetensi dibagi target per tahun	Jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan kompetensi/jumlah pencari kerja terdaftar * 100%	0	75%	1.312.277.000	77%	1.968.819.568	80%	1.590.334.000	83%	1.658.656.404	87%	3.045.448.893	90%	3.926.299.123	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
				Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Jumlah pengangguran/jumlah angkatan kerja*100%	3,4%	3,5%		3,46%		3,13%	2,78%	2,42%		2,03%			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan Koordinasi dan Pengembangan Bursa Kerja	Jumlah Koordinasi dan Pengembangan Bursa Kerja / target Koordinasi dan Pengembangan Bursa Kerja yang ditetapkan x 100%	0	-	-	75%	120.763.543	80%	504.152.000	85%	525.810.895	95%	965.438.172	100%	1.244.676.625	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase besaran kasus yang diselesaikan	Jumlah yang diselesaikan/jumlah kasus * 100%	9 kasus terselesaikan	12,63%	1.164.707.500	24,77%	1.868.842.493	43,58%	2.498.034.300	62,38%	2.605.352.453	81,19%	4.783.671.727	100%	6.167.276.736	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
2	08	02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah memiliki focal poin aktif	Jumlah perangkat daerah yang memiliki focal point aktif/total OPD*100	13,33%	16%	52.030.000	32%	450.000.000	48%	450.000.000	65%	450.000.000	81%	450.000.000	90%	450.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Perbandingan atau rasio (capaian) antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki	90,27	90,38			90,42			90,47			90,52			90,57			90,62			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan pada parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	62,57	63,52			64,01			64,50			64,99			65,47			65,75			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ----- x 100% Jumlah seluruh belanja langsung APBD	6,45%	6,95%			7,45%			7,95%			8,45%			8,95%			9,45%			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pendampingan khusus kekerasan terhadap perempuan	53%	-	-	-	-	58%	379.259.500	63%	389.259.500	73%	399.259.500	87%	409.259.500							DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																		MASYARAKAT DESA
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase tersedia data terpilah	Jumlah data gender dan anak yang tersedia /jumlah data gender dan anak yang ditargetkan *100%	78%	-	-	-	80%	250.000.000	81%	250.000.000	83%	250.000.000	85%	250.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kecamatan layak anak	Jumlah kecamatan yang ditetapkan sebagai kecamatan layak anak/jumlah seluruh kecamatan*100%	0	20%	40%	60%	80%	90%	100%	301.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
				Peringkat Kabupaten Layak Anak	Nilai diperoleh dari hasil evaluasi oleh KPPA	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase perlindungan khusus kekerasan terhadap anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani /jumlah total kasus*100%	38%	-	-	-	42%	541.259.500	47,50%	503.259.500	75%	415.250.500	87,50%	427.259.500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan konsumsi pangan	Jumlah produksi pangan (padi, jagung, singkong, ubi) yang tersedia /Jumlah produksi pangan yang ditargetkan*100%	225 Ton (45%)	50%	483.432.300	54%	530.587.304	62%	270.000.000	72%	270.000.000	84%	270.000.000	100%	270.000.000	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan	Jumlah desa-kelurahan yang mendapatkan intervensi penanganan kerawanan pangan/ Jumlah desa-kelurahan *100%	0	13%	137.590.000	-	-	-	-	25,90%	60.000.000	55,6%	60.000.000	83,3%	120.000.000	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase rekomendasi pengawasan keamanan pangan yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi pengawasan keamanan pangan yang diterbitkan/ jumlah rekomendasi yang ditargetkan	0	-	-	20%	109.978.200	40%	130.000.000	60%	130.000.000	80%	130.000.000	100%	270.000.000	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
2	10	02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten	dihitung berdasarkan jumlah permohonan yang ditangani dengan jumlah permohonan yang masuk	0	10% (1 pemohon)	-	20% (2 pemohon)	200.000.000,00	40% (4 pemohon)	100.000.000,00	60% (6 pemohon)	100.000.000,00	80% (8 pemohon)	100.000.000,00	100% (10 pemohon)	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Mediasi dan fasilitasi potensi sengketa, konflik tanah dan ruang	dihitung berdasarkan jumlah permohonan Mediasi dan fasilitasi potensi sengketa yang ditangani dengan jumlah permohonan yang masuk	0	10% (1 pemohon)	-	-	-	30% (3 pemohon)	100.000.000,00	60% (6 pemohon)	100.000.000,00	80% (8 pemohon)	100.000.000,00	100% (10 pemohon)	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Mediasi dan fasilitasi Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk pembangunan	dihitung berdasarkan jumlah permohonan Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk pembangunan yang ditangani dengan jumlah permohonan yang masuk	0	10% (1 pemohon)	-	20% (2 pemohon)	200.000.000,00	40% (4 pemohon)	100.000.000,00	60% (6 pemohon)	100.000.000,00	80% (8 pemohon)	100.000.000,00	100% (10 pemohon)	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Terlaksananya Redistribusi Tanah Bidang Tanah	dihitung berdasarkan jumlah permohonan Redistribusi Tanah Bidang Tanah yang ditangani dengan jumlah permohonan yang masuk	0	-	-	-	-	40% (4 pemohon)	100.000.000,00	60% (6 pemohon)	100.000.000,00	80% (8 pemohon)	100.000.000,00	100% (10 pemohon)	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penguasaan dan Pemafaatan Tanah Kosong	dihitung berdasarkan jumlah penanganan Tanah dengan jumlah permohonan	0	-	-	-	-	40% (4 pemohon)	100.000.000,00	60% (6 pemohon)	100.000.000,00	80% (8 pemohon)	100.000.000,00	100% (10 pemohon)	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				nan yang masuk														PERMUKIMAN	
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Penetapan Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara	dihitung berdasarkan jumlah penanganan Tanah dengan jumlah permohonan yang masuk	0	10% (1 pemohon)	-	20% (2 pemohon)	250.000.000,00	40% (4 pemohon)	100.000.000,00	60% (6 pemohon)	100.000.000,00	80% (8 pemohon)	100.000.000,00	100% (10 pemohon)	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAN TANAH	Persentase Pencapaian Penataan ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	dihitung berdasarkan jumlah tanah yang di Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah	0	10% (1 pemohon)	133.371.000	20% (2 pemohon)	400.000.000,00	40% (4 pemohon)	100.000.000,00	60% (6 pemohon)	100.000.000,00	80% (8 pemohon)	100.000.000,00	100% (10 pemohon)	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah pelaksanaan sosialisasi RPPLH/total jumlah kecamatan*100%	0	10%	601.223.000	100%	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai komposit dari: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fuktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi.	60	56,6	180.068.000	56,7	156.283.000,00	56,8	431.283.000,00	56,9	431.283.000,00	57	431.283.000,00	57,1	431.283.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pelaksanaan Penghijauan Sumber Air Baku	Jumlah pelaksanaan penghijauan sumber air baku/jumlah target sumber air baku (20 lokasi) * 100%	0	5,00%	211.402.000	30,00%	543.757.000,00	55,00%	293.757.000,00	80,00%	293.757.000,00	95,00%	293.757.000,00	100,00 %	293.757.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah aksi pengendalian B3/jumlah rencana aksi yang ditargetkan*100%	0	-	100,00%	15.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan/persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan*100%	0	20,00%	185.050.000	62,00%	571.921.000,00	70,00%	616.921.000,00	80,00%	566.921.000,00	96,00%	566.921.000,00	100,00%	566.921.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan/jumlah total sekolah*100%	0	30,00%	358.792.000	45,00%	125.000.000,00	55,00%	227.096.000,00	65,00%	227.096.000,00	80,00%	227.096.000,00	100,00%	227.096.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peran Serta Desa dan Kelurahan dalam Pengelolaan Persampahan	0	44,40%	328.382.000	57,00%	70.000.000,00	65,00%	100.000.000,00	74,00%	100.000.000,00	89,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pengaduan yang tertangani/jumlah pengaduan yang diterima	0	-	100,00%	5.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah	Jumlah total volume sampah yang terkelola/ jumlah volume timbulan sampah	0	12,40%	13,70%	14,90%	16,20%	17,50%	17,50%	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						
				Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota yang meliputi:	Total Vol sampah yang dapat ditangani dibagi Total vol timbunan sampah kabupaten/kota x 100%		984.209.000	1.122.500.000,00	875.000.000,00	725.000.000,00	725.000.000,00	725.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						
				a. Persentase jumlah pengurangan timbulan sampah		3,23%	3,5%	4%	4,5%	5%	6%	6%	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						
				b. Persentase jumlah penanganan timbulan sampah		11,13%	11,13%	13,7%	14,97%	16,24%	17,52%	18,78%	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP el (%)	Jumlah penduduk yang memiliki e-ktip dibanding jumlah penduduk wajib KTP x 100%	99,99%	99,99%	18.890.000	100%	838.816.869	100%	838.816.869	100%	838.816.869	100%	838.816.869	100%	838.816.869	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen akte kelahiran 0-18 Tahun (%)	Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran dibanding jumlah penduduk 0-18 tahun x 100%	95,63%	-	-	100%	540.331.000	98,04%	623.806.000	99,0%	540.331.000	100%	623.806.000	100%	623.806.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi database kependudukan yang disampaikan	Jumlah Dokumen Data Konsolidasi yang dipenuhi /jumlah dokumen konsolidasi yang ditargetkan	20%	-	-	40%	364.766.000	60%	861.536.000	80%	861.536.000	100%	806.536.000	100%	806.536.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase publikasi Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang dipublikasi pada tahun rencana dibagi jumlah profil kependudukan yang ditargetkan x 100%	20%	-	-	40%	71.538.000	60%	71.538.000	80%	71.538.000	100%	71.538.000	100%	71.538.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa	Jumlah Penataan Desa yang dilakukan /Total Desa yang akan dilakukan penataan *100%	50%	50%	55%	61,54%		70,38%	80,77%	90,38%						DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
				Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	100	100	67	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
										5.964.352.213		324.380.000		840.000.000		860.000.000		880.000.000	900.000.000



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)																
		Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (perawal tahun n)	(kondisi awal desa maju dan desa mandiri berjumlah 10 desa)	1,9		3,8		3,8		5,8		7,7		13,5				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	Jumlah kerjasama yang difasilitasi/jumlah kerjasama desa yang ditargetkan*100%	0	8%	-	8%	-	15%	250.000.000	19%	100.000.000	25%	110.000.000	25%	100.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan pemerintahan desa	Jumlah Pembinaan Desa yang dilakukan/Total jumlah Desa *100%	56%	58%	1.301.956.984	62,00%	2.187.071.984	65,00%	2.185.000.000	69,00%	2.120.000.000	73,00%	1.810.000.000	77%	1.920.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif/jumlah lembaga kemasyarakatan yang terdaftar* 100%	25%	30%	191.536.000	35%	1.291.536.000	38%	1.712.944.000	40%	1.948.944.000	42%	2.118.944.000	42%	2.278.944.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indeks advokasi dan pengendalian penduduk	(Dokumen Data Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang tersusun /Jumlah Total Dokumen Data Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang harus dimiliki x 40%) + (Jumlah Sekolah SLTP yang mendapatkan Pendidikan kependudukan /jumlah SLTPx 30%) + ((100-(jumlah PUS dengan usia istri di bawah 21 tahun/jumlah PUS) x30)	60,15	-	-	60,24	350.000.000	62,07	367.500.000	63,91	385.875.000	65,74	405.168.750	65,75	425.427.188	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Laju pertumbuhan penduduk	Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu.	2,37	-	2,14		2,09		2,05		2,01		2,00		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
		Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.	2,88	-	2,82		2,81		2,79		2,78		2,77		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Indeks pembinaan keluarga berencana	((Partisipasi KB aktif/ Jumlah PUS X40 %) + (Jumlah PIK Remaja Jalur Sekolah/ Jumlah Sekolah Menengah Atas Sederajat x 10%) + (Jumlah PIK remaja Jalur masyarakat/ Jumlah Desa dan Kelurahan x 10%) + (Jumlah keluarga yang masuk kel BKB/ Jumlah keluarga sasaran BKB x 10%) + (Jumlah keluarga	63,11	63,37	3.511.139.363	63,4	399.840.000	63,87	419.832.000	64,44	440.823.600	65,53	462.864.780	65,53	486.008.019	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			yang masuk ke BKR/Jumlah keluarga sasaran BKR x10 % (Jumlah keluarga yang masuk ke BKL/Jumlah keluarga sasaran BKL x10 %) + (Jumlah kelompok UPPKS / Jumlah Keluarga x 10 %)														
		Contraceptive Privalence Rate (CPR) Modern	Perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan alat kontrasepsi modern) dengan jumlah PUS	58,88	58,98	59,07		59,16		59,25		59,34		59,4			DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Unmet Need	Persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi	10,27	9,24	8,58		8,09		7,72		7,42		7,35			DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase pengguna MKJP	14,84	16,18		17,5		18,87		20,22		21,56		22,2		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Angka Fertilitas menurut umur/Age Specific Fertility Rates (ASFR)	13,51	-		13,51		13,51		13,51		13,51		13,51		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
				Banyaknya kelahiran tiap 1000 perempuan pada kelompok umur tertentu.															
				Rata-rata usia kawin pertama wanita	21	-		21		21		21		22		22		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Ratio kejadian kecelakaan	10 kecelakaan	0,90	6.185.505.734	0,89	5.558.314.301,00	0,88	2.866.609.000,00	0,86	2.866.609.000,00	0,83	2.812.072.343,00	0,80	2.812.072.343,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana transportasi Laut	Jumlah pulau-pulau pusat perekonomian yang dapat dijangkau melalui transportasi laut/jumlah pulau-pulau pusat perekonomian(18)* 100%	0	35,30%	17.234.500.045	35,30%	35.314.537.603,00	47,10%	28.483.537.603,00	52,90%	28.483.537.603,00	58,80%	28.483.537.603,00	58,80%	28.483.537.603,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase keterbukaan informasi publik	Jumlah informasi yang dapat diakses oleh publik dibagi keseluruhan jumlah informasi publik dikali 100	100%	100%	4.784.023.800	100%	5.488.844.700,00	100%	5.132.843.700,00	100%	5.066.923.700,00	100%	5.145.274.500,00	100%	5.151.614.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan SPBE Pemerintah yang diterapkan oleh perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan layanan SPBE Pemerintah dibagi jumlah seluruh perangkat daerah dikali 100	64%	71,43%	5.790.564.210	78,57%	6.950.762.500,00	85,71%	11.999.011.799,00	92,86%	13.198.912.980,00	100%	11.999.011.799	100%	13.198.912.980	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi aktif yang melakukan izin usaha simpan pinjam	Jumlah koperasi aktif simpan pinjam/ 21 target koperasi aktif simpan pinjam*100%	0	-	-	-	-	33,33%	20.000.000	71,43%	20.859.221	95,24%	38.299.488	100,00%	74.065.557	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah koperasi aktif yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan dibagi target/ target 13 koperasi aktif yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	7 Koperasi (53,85%)	61,54%	93.809.000	69,23%	150.734.125	76,92%	100.000.000	84,62%	114.725.714	92,31%	229.796.928	100,00%	320.950.747	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			undangan*100%																
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase tingkat Kesehatan koperasi aktif	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya dibagi target penilaian sebanyak 7 koperasi aktif yang melaksanakan akan RAT*100%	0	-	14,29%	57.975.823	42,86%	88.363.315	71,43%	96.208.135	85,71%	184.427.596	100,00%	248.269.762	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mendapatkan pelatihan	Jumlah koperasi yang mendapatkan pelatihan (target dari 21 Koperasi) * 100%	0	-	19,05%	57.975.823	38,10%	50.000.000	57,14%	52.148.052	85,71%	95.748.720	100,00%	148.131.114	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Penerima Dana Bergulir dari Total UMKM (300) * 100%	210 Penerima DB	10,00%	189.393.000	25,00%	666.708.629	43,33%	200.000.000	63,33%	208.592.208	83,33%	382.994.879	100,00%	617.212.976	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil dibagi target 62 UMKM*100%	0	9,68%	793.175.400	25,81%	672.506.095	50,00%	536.688.389	79,03%	584.335.133	95,16%	1.120.149.802	100,00%	1.507.905.163	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Ratio peningkatan investasi PMA dan PMDN	Jumlah investasi PMA dan PMDN yang terealisasi/jumlah investasi PMA dan PMDN tahun dasar	1	-	-	1.035	700.000.000	1.053	680.000.000	1.071	1.130.000.000	1.090	680.000.000	1.108	680.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi di daerah	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi di daerah/Jumlah total investor yang ditargetkan *100%	0	100%	78.591.000	100%	275.000.000	100%	398.000.000	100%	398.000.000	100%	398.000.000	100%	398.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tingkat penyelesaian Pelayanan Perizinan (PMA dan PMDN)	Jumlah izin yang diterbitkan	0	15 PMDN dan 2 PMA	288.399.000	15 PMDN dan 2 PMA	740.896.000	18 PMDN dan 2 PMA	990.823.000	20 PMDN dan 2 PMA	1.020.823.000	22 PMDN dan 3 PMA	1.040.823.000	24 PMDN dan 3 PMA	1.040.823.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM/jumlah perusahaan yang wajib menyampaikan LKPM*100%	0	66%	486.820.000	71%	100.000.000	75%	385.838.000	80%	385.838.000	85%	385.838.000	90%	385.838.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data berbasis sistem informasi	Jumlah ketersediaan data berbasis sistem informasi/kebutuhan ketersediaan data penanaman modal	0	-	-	51%	150.000.000	63%	125.000.000	74%	150.000.000	85%	175.000.000	96%	175.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pembinaan kapasitas kepemudaan	Jumlah pembinaan Pemuda/ Total keseluruhan Pemuda *100%	10,50%	19,50%	492.991.500	39,50%	2.235.594.500	45,50%	2.135.594.500	65,50%	2.135.594.500	76,50%	2.135.594.500	85,50%	2.135.594.500	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Cakupan prestasi keolahragaan	Jumlah atlet berprestasi ditingkat provinsi atau nasional/ Total peserta atlet yang mengikuti perlombaan*100%	37%	38%	5.449.918.776	40%	14.000.000.000	48%	13.500.000.000	49%	14.500.000.000	51%	13.800.000.000	53%	13.800.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pemenuhan pengembangan kapasitas kepramukaan	Jumlah pembinaan Kepramukaan/ keseluruhan Kegiatan Kepramukaan yang ditargetkan*100%	0	19%	583.725.600	39%	1.900.000.000	58%	2.700.000.000	77%	2.000.000.000	81%	2.200.000.000	100%	2.310.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral	jumlah ketersediaan data sektoral yang dipublikasikan/ jumlah data yang ditargetkan*100%	100%	100%	254.196.000	100%	647.992.336,00	100%	1.100.000.000,00	100%	1.200.000.000,00	100%	1.100.000.000	100%	1.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah	jumlah Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah/ jumlah OPD	0	3,23%	408.090.400	9,68%	335.000.000,00	16,1%	375.000.000,00	19,3%	420.000.000,00	22,5%	375.000.000	29,03%	420.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya	Jumlah pelaku seni yang mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya/ jumlah pelaku seni yang mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya yang ditargetkan	10%	15%	333.036.500	35%	2.533.447.907	47%	3.900.000.000	71%	4.100.000.000	88%	4.100.000.000	100%	4.100.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase pertunjukan kesenian tradisional di Kecamatan	Jumlah pertunjukan kesenian tradisional di Kecamatan / jumlah pertunjukan kesenian tradisional yang ditargetkan	10%	20%	1.447.399.180	30%	500.000.000	50%	4.000.000.000	70%	4.000.000.000	90%	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan sejarah	Jumlah keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan sejarah/ target keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan sejarah	0	-	-	-	-	60%	400.000.000	80%	430.000.000	90%	460.000.000	100%	460.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola/ jumlah cagar budaya yang ditetapkan	0	-	-	-	-	25%	1.100.000.000	50%	1.150.000.000	75%	1.170.000.000	100%	1.170.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan museum yang terpenuhi	Jumlah layanan museum berdasarkan jumlah kunjungan/target jumlah kunjungan museum* 100%	0	-	-	-	35%	350.000.000	80%	400.000.000	90%	450.000.000	100%	450.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase cakupan layanan perpustakaan	((Jumlah kunjungan perpustakaan / Jumlah populasi yang harus dilayani) x 50%) + ((Jumlah buku / Jumlah target buku) x 50%)	12%	16,67%	671.130.482	33,33%	766.070.304	50%	2.337.675.913	66,67%	2.454.559.708	83,33%	2.577.287.694	100%	2.706.152.079	SEKRETARIAT DAERAH
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase tersusunnya arsip yang sesuai standar	Jumlah PD yang sudah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai standar/ Jumlah total PD*100%	0	10%	61.140.000	19%	62.242.000	32%	137.243.610	42%	144.105.791	48%	151.311.080	55%	158.876.634	SEKRETARIAT DAERAH
3			URUSAN PILIHAN																
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap tahun n-1 / Jumlah Produksi Perikanan Tangkap tahun n-1 *100%	20.858 Ton	1%	11.634.184.382	2%	6.214.883.914	3%	7.980.000.000	4%	7.259.008.843	5%	12.351.584.861	6%	15.479.701.433	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya / Target Produksi Perikanan Budidaya *100%	174 Ton	10%	1.791.074.790	15%	2.800.417.007	25%	2.420.000.000	40%	2.169.358.965	65%	3.619.301.610	75%	4.567.376.021	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi Pengolahan perikanan	Jumlah produksi Pengolahan perikanan / target produksi yang ditetapkan *100%	84 Ton	50%	40.000.200	56,70%	434.809.975	66,60%	200.000.000	73,30%	297.243.897	83,30%	708.540.527	100%	1.172.704.654	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang dilakukan peningkatan	Jumlah Objek destinasi Wisata yang di tingkatkan/ target peningkatan daya tarik wisata*100%	15%	20%	4.635.143.858	25%	4.243.745.359	40%	3.050.000.000	55%	3.525.208.317	80%	7.085.405.269	100%	9.134.752.042	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase objek destinasi dan event pariwisata yang dipasarkan	jumlah objek destinasi dan event wisata yang dipasarkan/jumlah objek destinasi dan event	10 promosi	17%	1.086.677.000	33%	4.348.099.754	50%	7.300.000.000	67%	8.917.316.898	83%	18.766.749.090	100%	24.194.748.651	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			wisata yang ditargetkan*100%																
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menerima pengembangan kompetensi	Jumlah SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menerima pengembangan kompetensi / target SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menerima pengembangan kompetensi*100%	0	15%	861.637.500	-	-	25%	400.000.000	50%	417.184.416	75%	765.989.759	100%	987.540.761	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan sarana pertanian	Jumlah Penyediaan sarana pertanian / target penyediaan sarana*100%	3 Paket	20,00%	965.665.000	33%	1.520.385.024	47%	1.103.000.000	60%	959.524.157	80%	1.953.273.885	100%	1.118.389.912	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan prasarana pertanian	Jumlah kelompok tani yang menerima prasarana pertanian /Jumlah kelompok tani yang ditargetkan (50 kelompok) *100%	10	17,60%	1.467.002.436	35,30%	1.680.263.436	52%	1.500.000.000	70,60%	1.251.553.249	88,20%	1.914.974.397	100%	1.234.425.952	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kesehatan hewan ternak dan kesmavet	Jumlah hewan ternak dan veteriner sehat / jumlah populasi hewan ternak dan veteriner * 100%	2154 ekor	67%	355.048.200	73%	313.063.182	78%	600.000.000	82%	677.924.676	86%	1.340.482.078	90%	1.851.638.927	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kinerja pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah pengendalian bencana pertanian yang tertangani/jumlah kasus bencana pertanian yang dihadapi* 100%	0	-	-	-	40%	450.000.000	60%	469.332.468	75%	861.738.479	80%	617.212.976	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27	06	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok tani	Jumlah Kelompok Tani yang menerima penyuluhan dibagi jumlah kelompok tani yang terdaftar * 100%	85 Kelompok	20%	8.770.900	40%	508.833.533	60%	640.000.000	80%	719.643.118	95%	1.321.332.334	100%	1.283.802.990	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	Jumlah perizinan yang diterbitkan dibagi target 138 Izin*100%	224	9%	80.321.500	19,57%	66.001.000	39,13%	131.273.837	58,70%	137.004.802	73%	143.076.766	100%	149.394.624	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola dengan baik	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola/revitalisasi/rehabilitasi/bangun	11 objek	20%	416.182.362	20%	4.790.001.000	40%	532.031.768	60%	535.000.000	80%	3.572.296.009	100%	538.296.009	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			baru dibagi jumlah target yang ditetapkan (5 objek) * 100%																
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kestabilan harga barang	Persentase rata-rata fluktuasi harga bahan pokok tahun n/ harga bahan pokok tahun n-1 *100%	0,71%	0,71%	428.363.500	0,71%	400.001.000	0,71%	494.963.000	0,71%	494.963.000	0,71%	494.963.000	0,71%	687.781.946	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha Yang mengikuti Pembinaan Promosi Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha Yang mengikuti Pembinaan Promosi Dagang Lokal dari yang ditargetkan*100% (60 orang)	0	-	-	-	25%	150.000.000	67%	150.000.000	92%	150.000.000	100%	150.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peralatan yang terstandarisasi	Jumlah Peralatan yang terstandarisasi dibagi target 1250*100%	271	8,00%	5.658.000	32%	90.000.000	60%	195.000.000	84%	195.000.000	96%	195.000.000	100%	195.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri	Jumlah Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri / target pertumbuhan pelaku usaha industri) * 100% (target 100	1618	5%	12.030.054.080	15%	1.600.001.000	0,33	1.800.000.000	0,62	1.900.000.000	0,88	2.000.000.000	1	1.400.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			usaha industri)																
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Industri yang diterbitkan dibagi 250 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen*100%	0	-	-	-	-	15%	68.095.620	60%	68.095.620	90%	68.095.620	100%	68.095.620	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Industri	Jumlah Pendataan SIINas dibagi yang ditargetkan (250)	0	-	-	-	-	14%	53.045.000	56%	54.636.350	80%	56.275.441	100%	57.963.704	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yang dibina	Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun/target kawasan transmigrasi yang dibangun	0	12,5%	-	0%	-	22%	490.000.000	48%	570.000.000	79%	665.000.000	95%	665.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01		SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase tercapainya kegiatan kesejahteraan dalam membentuk akhlakul karimah	Jumlah Kegiatan pembinaan akhlakul karimah / total kegiatan pembinaan akhlakul karimah yang targetkan * 100%	100%	100%	10.956.251.250	100%	9.940.000.000	100%	32.578.099.943	100%	34.207.004.940	100%	35.917.355.187	100%	37.713.222.946	SEKRETARIAT DAERAH



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam pengendalian perekonomian dan pembangunan	Jumlah Kebijakan yang diterbitkan/Jumlah keseluruhan kebijakan yang ditargetkan * 100%	0	17%	1.692.770.500	33%	3.700.000.000	50%	3.552.267.679	67%	3.729.881.063	83%	3.916.375.116	100%	4.112.193.872	SEKRETARIAT DAERAH
4	02		SEKRETARIAT DPRD																
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Capaian penetapan perda	jumlah perda yang ditetapkan/ jumlah propempera *100%	100%	100%	14.418.837.960	100%	14.278.772.558	100%	16.207.622.850	100%	16.207.622.850	100%	16.207.622.850	100%	16.207.622.850	SEKRETARIAT DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	01		PERENCANAAN																
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPd	Jumlah program RKPd tahun berkenaan/ jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan *100%	98,67%	100%	1.188.151.028	100%	884.407.997	100%	883.068.670	100%	1.184.743.857	100%	1.002.718.855,7	100%	1.102.990.737,37	BADAN PENELITIAN, PENGEMBA NGAN DAN PERENCANA AN DAERAH
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah perangkat daerah yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas/jumlah perangkat daerah *100%	32%	42%	589.987.000	55%	1.202.549.000	68%	1.318.403.900	81%	1.450.244.290	94%	1.595.268.719	100%	1.754.796.014	BADAN PENELITIAN, PENGEMBA NGAN DAN PERENCANA AN DAERAH
5	02		KEUANGAN																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase silpa terhadap APBD	Total Silpa/total APBD *100%	1,25%	7,25%	139.133.200.115	7,00%	104.857.676.741	6,50%	105.035.576.741	6,00%	105.035.576.741	5,50%	105.035.576.741	5,00%	105.035.576.741	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan pengelolaan asset daerah	Jumlah OPD tertib administrasi asset tetap dan tak berwujud / jumlah OPD x 100%	61%	66,67%	1.361.362.000	73,30%	2.133.379.000	80%	2.600.000.000	86,60%	2.630.000.000	93,30%	2.645.000.000	100%	2.670.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tingkat pertumbuhan PAD	Jumlah PAD tahun n-PAD tahun n-1 / PAD tahun n-1	3,87%	3,92%	586.263.900	3,98%	1.685.928.250	4,02%	1.685.928.250	4,13%	1.685.928.250	4,47%	1.685.928.250	4,62%	1.685.928.250	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	03		KEPEGAWAIAN																
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jumlah pemenuhan ASN berdasarkan Anjab dan ABK	Jumlah ASN/jumlah formasi*100%	46%	46%	1.565.933.000	61%	4.303.829.250	67%	4.519.020.713	74%	4.744.971.748	80%	4.982.220.336	86%	4.982.220.336	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase cakupan pengembangan aparatur	((Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan/jumlah jabatan struktural*100%) + (jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis dan fungsional/jumlah ASN*100%) + jumlah CASN yang	52%	52,00%	739.257.000	53,00%	3.183.880.886	57,00%	3.343.074.930	61,00%	3.510.228.676	65,00%	3.685.740.110	68,00%	3.685.740.110	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			mengikuti latsar CPNS/jumlah CASN*100%)/3																
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan /jumlah dokumen jumlah penelitian dan pengembangan*100%	0	9%	342.964.000	36%	1.279.817.000	55%	1.000.000.000	64%	700.000.000	82%	900.000.000	100%	900.000.000	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH
5	06		PENGELOLAAN PERBATASAN																
5	06	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan lokpri	Jumlah penyusunan perencanaan terealisasi/total rencana pembangunan berdasarkan lokpri*100%	26,65%	-	-	29,32%	670.000.000	32,25%	703.500.000	35,47%	738.675.000	39%	775.608.750	43%	775.608.750	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6	01		INSPEKTORAT DAERAH																
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah OPD yang diawasi dibagi jumlah keseluruhan OPD*100%	0	19,30% 6 OPD	753.240.500	35,49% 11 OPD	1.400.000.000	51,62% 16 OPD	1.400.000.000	67,75% 21 OPD	1.400.000.000	83,87% 26 OPD	1.400.000.000	100% 31 OPD	1.400.000.000	INSPEKTORAT



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase (%) Perangkat Daerah yang Sudah di Nilai SPIP	Jumlah PD yang sudah dinilai/total perangkat daerah *100%	0	9,68% (3 OPD)	859.568.000	25,81% (8 OPD)	1250000000	41,94% (13 OPD)	1.260.000.000	61,29% (19 OPD)	1270000000	80,65% (25 OPD)	1280000000	100% (31 OPD)	1290000000	INSPEKTORAT
7			UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01		KECAMATAN																
			KECAMATAN SIANTAN UTARA																
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan/jumlah pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang ditargetkan*100%	100%	100%	430.042.383	100%	265.113.000	100%	241.247.700	100%	-	100%	241.247.700	100%	241.247.700	KECAMATAN SIANTAN UTARA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa/jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang ditargetkan*100%	100%	100%	258.025.430	-	-	100%	482.122.600	100%	385.343.400	100%	482.122.600	100%	482.122.600	KECAMATAN SIANTAN UTARA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan pengenda- lian keamana- n dan kenyama- nan lingkung- an /target jumlah kegiatan pengenda- lian keamana- n dan kenyama- nan lingkung- an*100%	100%	100%	86.008.476	-	-	100%	239.996.200	-	-	100%	239.996.200	100%	239.996.200	KECAMATAN SIANTAN UTARA
7	01	05	PROGRAM PENYELENGG- ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Persentase Penyelenggar- aan Urusan Pemerintah- an Umum	Jumlah kegiatan yang dilakuka- n terkait urusan pemerint- ahan umum/ju- mlah kegiatan terkait urusan pemerint- ahan umum yang ditargetk- an*100%	100%	100%	43.004.238	100%	152.335.000	100%	140.440.000	100%	122.363.000	100%	140.440.000	100%	140.440.000	KECAMATAN SIANTAN UTARA
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah- an Desa	Jumlah pembinaa- n dan pengawas- an yang dilakuka- n /jumlah pembinaa- n dan pengawas- an yang ditargetk- an*100%	100%	100%	43.004.238	100%	19.586.000	100%	86.946.450	100%	64.307.000	100%	86.946.450	100%	86.946.450	KECAMATAN SIANTAN UTARA
KECAMATAN SIANTAN																			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangu n di wilayah kecamatan	Jumlah partisipa si masyarak at dalam kegiatan pemberd ayaan masyarak at di desa/jum lah partisipa si masyarak at dalam kegiatan pemberd ayaan masyarak at di desa yang ditargetk an*100%	100%	100%	47.4640.550	100%	1.072.146.000	100%	1.279.360.600	100%	1.407.296.660	100%	1.548.026.326	100%	1.702.828.959	KECAMATAN SIANTAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintah an Umum	Jumlah kegiatan yang dilakuka n terkait urusan pemerint ahan umum/ju mlah kegiatan terkait urusan pemerint ahan umum yang ditargetk an*100%	100%	100%	12.662.588	100%	28.603.000	100%	28.603.000	100%	28.603.000	100%	28.603.000	100%	28.603.000	KECAMATAN SIANTAN
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Jumlah pembinaa n dan pengawas an yang dilakuka n /jumlah pembinaa n dan pengawas an yang ditargetk an*100%	100%	100%	24.747.451	100%	55.901.000	100%	61.491.100	100%	67.640.210	100%	74.404.231	100%	81.844.654	KECAMATAN SIANTAN
KECAMATAN SIANTAN TENGAH																			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggar aan pemerintah an dan pelayanan publik	Jumlah pelayana n pemerint ahan dan pelayana n publik yang dilaksana kan/juml ah pelayana n pemerint ahan dan pelayana n publik yang ditargetk an*100%	100%	100%	600.092.976	100%	270.692.700	100%	250.742.700	100%	280.692.700	100%	270.692.700	100%	170.692.700	KECAMATAN SIANTAN TENGAH
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembanguna n di wilayah kecamatan	Jumlah partisipa si masyarak at dalam kegiatan pemberd ayaan masyarak at di desa/jum lah partisipa si masyarak at dalam kegiatan pemberd ayaan masyarak at di desa yang ditargetk an*100%	100%	100%	360.055.785	100%	240.796.000	100%	240.796.000	100%	280.796.000	100%	280.796.000	100%	240.796.000	KECAMATAN SIANTAN TENGAH
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan pengenda lian keamana n dan kenyama nan lingkung an /target jumlah kegiatan pengenda lian keamana n dan kenyama nan lingkung an*100%	100%	100%	120.018.595	100%	29.350.000	100%	29.350.000	100%	29.350.000	100%	45.350.000	100%	29.350.000	KECAMATAN SIANTAN TENGAH



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan yang dilakukan terkait urusan pemerintahan umum/jumlah kegiatan terkait urusan pemerintahan umum yang ditargetkan*100%	100%	100%	60.009.297	100%	124.837.000	100%	124.837.000	100%	124.837.000	100%	124.837.000	100%	124.837.000	KECAMATAN SIANTAN TENGAH
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan /jumlah pembinaan dan pengawasan yang ditargetkan*100%	100%	100%	60.009.297	100%	47.917.000	100%	47.917.000	100%	47.917.000	100%	47.917.000	100%	47.917.000	KECAMATAN SIANTAN TENGAH
KECAMATAN KUTE SIANTAN																			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan/jumlah pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang ditargetkan*100%	100%	100%	512.970.110	-	0	100%	241.247.700	100%	241.247.700	-	-	100%	241.247.700	KECAMATAN KUTE SIANTAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di	100%	100%	307.782.066	100%	385.343.400	100%	482.122.600	100%	482.122.600	100%	385.343.400	100%	482.122.600	KECAMATAN KUTE SIANTAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			desa/jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang ditargetkan*100%																
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan /target jumlah kegiatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan*100%	100%	100%	102.594.022	-	-	100%	239.996.200	100%	239996200	-	-	100%	239.996.200	KECAMATAN KUTE SIANTAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan yang dilakukan terkait urusan pemerintahan umum/jumlah kegiatan terkait urusan pemerintahan umum yang ditargetkan*100%	100%	100%	51.297.011	100%	122.363.000	100%	140.440.000	100%	140.440.000	100%	122.363.000	100%	140.440.000	KECAMATAN KUTE SIANTAN
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan /jumlah pembinaan dan pengawasan yang	100%	100%	51.297.011	100%	64.307.000	100%	86.946.450	100%	86.946.450	100%	64.307.000	100%	86.946.450	KECAMATAN KUTE SIANTAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			ditargetkan*100%																
KECAMATAN SIANTAN SELATAN																			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa/jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang ditargetkan*100%	100%	100%	691.647.437	100%	485.497.000	100%	495.497.000	100%	520.497.000	100%	547.497.500	100%	547.497.500	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan yang dilakukan terkait urusan pemerintahan umum/jumlah kegiatan terkait urusan pemerintahan umum yang ditargetkan*100%	100%	100%	197.613.553	100%	170.820.000	100%	185.820.000	100%	185.820.000	100%	197.850.500	100%	197.850.500	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan /jumlah pembinaan dan	100%	100%	98.806.776	100%	51.845.000	100%	67.845.000	100%	69.854.000	100%	73.845.000	100%	73.845.000	KECAMATAN SIANTAN SELATAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			pengawasan yang ditargetkan*100%																
KECAMATAN SIANTAN TIMUR																			
7	01	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa/jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang ditargetkan*100%	100%	100%	661.449.885	100%	327.346.063	100%	327.346.063	100%	327.346.063	100%	327.346.063	100%	327.346.063	KECAMATAN SIANTAN TIMUR
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan yang dilakukan terkait urusan pemerintahan umum/jumlah kegiatan terkait urusan pemerintahan umum yang ditargetkan*100%	100%	100%	188.985.681	100%	190.647.000	100%	190.647.000	100%	190.647.000	100%	190.647.000	100%	190.647.000	KECAMATAN SIANTAN TIMUR
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan /jumlah pembinaan dan	100%	100%	94.492.840	100%	50.109.280	100%	50.109.280	100%	50.109.280	100%	50.109.280	100%	50.109.280	KECAMATAN SIANTAN TIMUR



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			an yang ditargetkan*100%																
KECAMATAN JEMAJA BARAT																			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa/jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang ditargetkan*100%	100%	100%	633.650.714	100%	552.511.000	100%	607.762.100	100%	552.511.000	100%	552.511.000	100%	552.511.000	KECAMATAN JEMAJA BARAT
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan yang dilakukan terkait urusan pemerintahan umum/jumlah kegiatan terkait urusan pemerintahan umum yang ditargetkan*100%	100%	100%	181.043.061	100%	18.603.000	100%	20.463.300	100%	18.603.000	100%	18.603.000	100%	18.603.000	KECAMATAN JEMAJA BARAT
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan /jumlah pembinaan dan pengawasan yang ditargetkan*100%	100%	100%	90.521.530	100%	45.601.000	100%	50.161.100	100%	45.601.000	100%	45.601.000	100%	45.601.000	KECAMATAN JEMAJA BARAT
KECAMATAN JEMAJA																			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan/jumlah pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang ditargetkan*100%	100%	100%	674.042.776	-	-	-	100%	121.135.000	-	-	100%	121.135.000	KECAMATAN JEMAJA	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa/jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang ditargetkan*100%	100%	100%	404.425.665	100%	1.122.429.000	100%	972.429.000	100%	1.084.359.900	100%	972.429.000	100%	972.429.000	KECAMATAN JEMAJA
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan /target jumlah kegiatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan*100%	100%	100%	134.808.555	-	-	-	100%	239.996.200	-	-	-	-	KECAMATAN JEMAJA	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan yang dilakukan terkait urusan pemerintahan umum/jumlah kegiatan terkait urusan pemerintahan umum yang ditargetkan*100%	100%	100%	67.404.277	100%	112.965.000	100%	140.440.000	100%	122.363.000	100%	122.363.000	100%	140.440.000	KECAMATAN JEMAJA
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan /jumlah pembinaan dan pengawasan yang ditargetkan*100%	100%	100%	67.404.277	100%	24.890.000	100%	64.307.000	100%	86.946.450	100%	64.307.000	100%	64.307.000	KECAMATAN JEMAJA
KECAMATAN JEMAJA TIMUR																			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan/jumlah pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang ditargetkan*100%	100%	100%	536.425.110	-	-	100%	241.247.700	-	-	100%	241.247.700	100%	241.247.700	KECAMATAN JEMAJA TIMUR



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangu n di wilayah kecamatan	Jumlah partisipa si masyarak at dalam kegiatan pemberd ayaan masyarak at di desa/jum lah partisipa si masyarak at dalam kegiatan pemberd ayaan masyarak at di desa yang ditargetk an*100%	100%	100%	321.855.066	100%	204.085.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	KECAMATAN JEMAJA TIMUR
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendali an keamana n dan kenyama nan lingkung an /target jumlah kegiatan pengenda lian keamana n dan kenyama nan lingkung an*100%	Jumlah kegiatan pengenda lian keamana n dan kenyama nan lingkung an /target jumlah kegiatan pengenda lian keamana n dan kenyama nan lingkung an*100%	100%	100%	107.285.022	100%	239.996.200	100%	239.996.200	-	-	100%	239.996.200	100%	239.996.200	KECAMATAN JEMAJA TIMUR
7	01	05	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintah an Umum	Jumlah kegiatan yang dilakuka n terkait urusan pemerint ahan umum/ju mlah kegiatan terkait urusan pemerint ahan umum yang ditargetk an*100%	100%	100%	53.642.511	100%	139.877.000	100%	178.077.000	100%	160.000.000	100%	178.077.000	100%	178.077.000	KECAMATAN JEMAJA TIMUR



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan /jumlah pembinaan dan pengawasan yang ditargetkan*100%	100%	100%	53.642.511	100%	20.951.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	KECAMATAN JEMAJA TIMUR
KECAMATAN PALMATAK																			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan/jumlah pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang ditargetkan*100%	100%	100%	691.801.515	-	-	100%	241.247.700	100%	241.247.700	100%	241.247.700	100%	241.247.700	KECAMATAN PALMATAK
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa/jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang ditargetkan*100%	100%	100%	415.080.909	100%	249.995.000	100%	482.122.600	100%	482.122.600	100%	482.122.600	100%	482.122.600	KECAMATAN PALMATAK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase pengendalian keamanan dan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan	100%	100%	138.360.303	-	-	100%	239.996.200	100%	239.996.200	-	-	100%	239.996.200	KECAMATAN PALMATAK


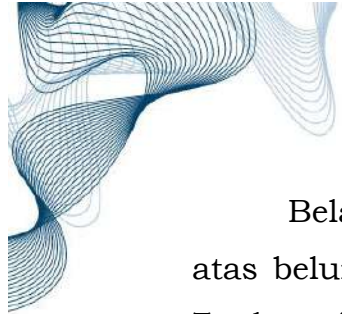


Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		KETERTIBAN UMUM	kenyamanan lingkungan	n dan kenyamanan lingkungan /target jumlah kegiatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan*100%															
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan yang dilakukan terkait urusan pemerintahan umum/jumlah kegiatan terkait urusan pemerintahan umum yang ditargetkan*100%	100%	100%	69.180.151	100%	132.417.000	100%	140.440.000	100%	140.440.000	100%	140.440.000	100%	140.440.000	KECAMATAN PALMATAK
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan /jumlah pembinaan dan pengawasan yang ditargetkan*100%	100%	100%	69.180.151	100%	24.375.000	100%	24.375.000	100%	24.375.000	100%	24.375.000	100%	24.375.000	KECAMATAN PALMATAK
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks kepuasan masyarakat bidang ideologi dan wawasan kebangsaan	Hasil survei kepuasan masyarakat bidang ideologi dan wawasan kebangsaan	76,69	76,69	68.472.000	76,72	1.730.000.000	76,75	1.730.000.000	76,85	1.730.000.000	76,9	1.730.000.000	77	1.730.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus/Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	tingkat partisipasi pemilih pemilu/pilkada/pilkades (votes turnout)	tingkat partisipasi pemilihan pada pileg + tingkat partisipasi pemilihan pada pilkada / 2 * 100%	83,47	83,47%	478.634.218	83,47%	857.127.718	83,47%	857.127.718	84%	857.127.718	84%	857.127.718	84%	857.127.718	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks kepuasan masyarakat bidang organisasi masyarakat	hasil survei kepuasan masyarakat bidang organisasi masyarakat	76,69	76,69	52.405.000	77	260.000.000	77,50	260.000.000	78	260.000.000	78,50	260.000.000	79	295.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	IKM bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	hasil survei kepuasan masyarakat bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	76,69	76,69	335.462.000	76,72	930.000.000	76,75	980.000.000	76,85	980.000.000	77	980.000.000	77,50	980.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pencegahan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan aparaturnya dan masyarakat dalam rangka pemahaman akan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di daerah	jumlah isu kewaspadaan atau konflik sosial yang berhasil dihadapi / jumlah isu kewaspadaan atau konflik sosial yang diidentifikasi*100%	80%	80%	584.026.200	80%	1.201.587.860	80%	1.408.454.475	85%	1.458.776.000	85%	1.515.000.000	85%	1.515.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			TOTAL PROGRAM URUSAN					628.314.309.904		645.684.580.417		797.006.391.642		863.238.407.261		943.179.469.329		1.019.920.735.914	
			TOTAL KESELURUHAN					1.100.948.314.961		1.168.178.038.135		1.286.565.516.052		1.424.778.173.684		1.503.521.772.781		1.587.782.386.588	

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah



Belanja penunjang urusan dan program urusan yang dijabarkan di atas belum termasuk Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga (BTT) dan Pembiayaan. Sehingga apabila belanja urusan tersebut digabungkan dengan komponen tersebut secara total adalah sebagai berikut.

Tabel 7. 4 Total Belanja 2021-2026

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja Hibah	20.577.814.575	22.205.565.452	23.068.963.266	23.131.613.343	23.500.336.825	23.861.653.728
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	134.715.000	370.092.758	384.482.721	385.526.889	391.672.280	397.694.229
PEMBIAYAAN	9.596.149.958	-	-	-	-	-
BELANJA URUSAN	1.100.948.314.961	1.168.178.038.135	1.286.565.516.052	1.424.778.173.684	1.503.521.772.781	1.587.782.386.588
BELANJA TOTAL	1.132.256.994.494	1.191.753.696.345	1.311.018.962.039	1.450.295.313.916	1.529.413.781.886	1.614.041.734.545

Sumber: Proyeksi Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah



BAB VIII
Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat penting untuk diketahui dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten / kota. Ada beberapa indikator pembangunan yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan. Indikator-indikator ini dapat digunakan untuk kepentingan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri atau juga pihak eksternal luar, misalnya investor, serta keterbukaan ke masyarakat. Selain itu, proyeksi beberapa tahun kedepan, sebagai patokan kinerja yang ingin dicapai. Hal ini juga terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang digunakan sebagai patokan dalam arahan pengolahan data dan informasi yang ada.

Dalam pengukuran kinerja dimulai dari inventaris data, pengumpulan, dan pengolahan data. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing, dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah selain dari Indikator Makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

8.1. Penetapan Indikator Makro dan Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator makro dan IKU bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas dari sisi penyelenggaraan

pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator tersebut secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (*impact*) daerah sebagaimana termuat pada Bab V RPJMD. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Penetapan proyeksi indikator kinerja makro Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tertuang pada Tabel 8.1 di bawah ini.

Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,80	70,21	71,57	72,91	74,21	75,49	76,75	76,75
2	Persentase Penduduk Miskin	%	6,56	6,29	6,15	6,00	5,85	5,70	5,56	5,56
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,4	3,5	3,46	3,13	2,78	2,42	2,03	2,03
4	Pertumbuhan PDRB ADHK Non migas * ¹	%	-3,30	3,61-4,61	3,73-4,73	3,85-4,85	3,97-4,97	4,09-5,09	4,22-5,22	4,22-5,22
5	PDRB ADHK 2010 tanpa Migas per kapita	Juta Rupiah /penduduk	46,97	49,14	51,46	53,95	56,63	59,52	62,62	62,62
6	Indeks Gini	Indeks	30	28	28	27	26	25	24	24

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Berikut tabel definisi operasional untuk perhitungan Indikator Kinerja Utama untuk Kabupaten Kepulauan Anambas.

¹ Kisaran angka proyeksi pesimis-moderat

Tabel 8. 2 Definisi Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Definisi
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p> <p>Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (<i>a process of enlarging the choice of people</i>). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak.</p> <p>Indeks Pembangunan Manusia (Metode 2014)</p> <p>Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.</p> <p>Dimensi Kesehatan</p> $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>Dimensi Pendidikan</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Dimensi Pengeluaran</p> $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ <p>Kegunaan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.</p> <p>Keterangan Tambahan Selain dari Susenas, variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh dari beberapa sumber data yaitu Proyeksi Penduduk dan Indeks Harga Konsumen.</p> <p>Interpretasi Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.</p> <p>Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM</p>


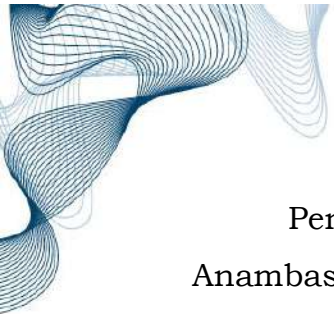
No	Indikator	Definisi			
		Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	20	85
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
		Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352
		<p>Sehingga rumus IPM adalah sebagai berikut</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$			
2	Indeks Pendidikan	<p>Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \times 100$ <p>HLS : Harapan Lama Sekolah RLS : Rata-rata Lama Sekolah</p>			
3	Indeks Kesehatan	<p>Indeks kesehatan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang kesehatan</p> $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>AHH : Angka Harapan Hidup</p>			
4	Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$			
5	Pertumbuhan Ekonomi	<p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) Non Migas</p> $Laju\ Pertumbuhan\ PDRB = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$			
6	Pertumbuhan PDRB sektor unggulan	<p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB menggunakan dua jenis harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini, sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan sampai saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010. Terkait di dalam pemilihan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Non Migas sebagai pengukuran pertumbuhan Ekonomi dikarenakan Migas bukan merupakan kewenangan kabupaten dan perhitungan pendapatannya jg menjadi kewenangan pusat sehingga lebih relevan dalam pengukuran PDRB ni tanpa adanya Migas sebagai</p>			

No	Indikator	Definisi
		<p>pengukurannya. Untuk data capaian pertahun PDRB ADHK dan juga PDRB Sektor Unggulan diambil berdasarkan rilis data oleh BPS Anambas per tahun.</p> $\frac{\text{PDRB Sektor Unggulan Tahun (n)} - \text{PDRB Sektor Unggulan Tahun (n-1)}}{\text{PDRB Sektor Unggulan Tahun (n-1)}} \times 100\%$
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>Indeks KLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)</p> <p>IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKL : Indeks Kualitas Lahan</p>
8	Pertumbuhan Nilai Investasi	<p>Nilai Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal dan daerah juga mendapatkan keuntungan dari usaha investasi yang dilakukan. Sehingga pertumbuhan Nilai investasi dilakukan pengukurannya sebagai pengendalian terhadap keberhasilan suatu investasi di daerah. Dengan cara perhitungan pertumbuhan nilai investasi sebagai berikut :</p> $\frac{\text{Nilai Investasi Tahun (n)} - \text{Nilai Investasi Tahun (n-1)}}{\text{Nilai Investasi Tahun (n-1)}} \times 100\%$
9	Indeks Reformasi Birokrasi	<p>Indeks RB dan Prediket Nilai SAKIP merupakan suatu pengukuran yang digunakan sebagai keberhasilan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, dan dengan tujuan sebagaimana berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, dicapai dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan di dukung dengan tingginya tingkat persepsi masyarakat terhadap program Reformasi Birokrasi. Pemerintahan yang efisien juga harus dapat diwujudkan dalam struktur kelembagaan dan tata laksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Kualitas ketatalaksanaan pemerintahan perlu ditingkatkan dengan diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi, yang akan mengefisienkan operasionalisasi pemerintahan. 2. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif, tercapai dengan diwujudkan sasaran SDM Aparatur yang kompeten ditandai dengan telah diterapkannya pengisian jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan, serta diterapkannya pengembangan kompetensi bagi ASN minimal 12 hari kerja dalam 1 tahun. Demikian pula dalam hal kompetisi, dimana setiap lembaga pemerintah harus dapat menciptakan SDM Aparatur yang mampu menunjukkan kinerjanya melalui penerapan sistem penilaian kinerja yang baik dan mampu bersaing dalam mengisi posisi JPT yang lowong secara terbuka. 3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, dicapai antara lain dengan tercapainya sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan indikator kinerja membaiknya nilai akuntabilitas kinerja instansi rata-rata secara nasional, dan meningkatnya penerapan sistem integritas oleh seluruh

No	Indikator	Definisi
		<p>instansi pemerintah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya skor integritas secara nasional, besarnya persentase IP yang penerapan sistem integritasnya sudah Baik, serta besarnya persentase IP yang satu atau lebih unit kerja telah memperoleh predikat WBK/WBBM.</p> <p>4. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dicapai antara lain dengan tercapainya sasaran peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencapaian sasaran Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik ditandai dengan indikator semakin banyaknya IP yang inovasinya mendapatkan pengakuan secara internasional. Sedangkan sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator nilai indeks pelayanan publik secara nasional.</p> <p>5. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Pencapaian sasaran yang efektif dan efisien diukur dengan indikator Nilai RB Baik, tingkat efektivitas organisasi, dan besarnya persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Sasaran Terwujudnya Kementerian PANRB yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi diukur dengan indikator diperolehnya predikat WTP dari opini BPK, dan nilai akuntabilitas kinerja kementerian yang Baik. Terhadap sasaran yang ketiga, Terwujudnya pelayanan publik Kementerian PANRB yang berkualitas, diukur dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.</p>
10	Nilai Predikat SAKIP	Hasil evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB
11	Opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah	Hasil evaluasi penilaian BPK atas laporan pengelolaan keuangan daerah
12	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	<p>LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Hasil nilai EKPPD oleh Kemendagri</p>
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik
14	Indeks Inovasi Daerah	Skor Nilai inovasi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri. indeks inovasi daerah adalah himpunan Inovasi Daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. INOVASI DAERAH yang diinput oleh pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam suatu aplikasi (Indeks Inovasi Daerah) yang dijadikan pusat data Inovasi Daerah yang dapat

No	Indikator	Definisi
		dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pengkajian dan pengembangan Inovasi daerah
15	Indeks profesionalitas ASN	<p>Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi atau indikator dikalikan skor atau nilai masing-masing jawaban dimensi atau indikator (kualifikasi kompetensi kinerja dan disiplin). Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria Pengukuran Indeks Profesionalitas. kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi kualifikasi. 2. Dimensi kompetensi. 3. Dimensi kinerja. 4. Dimensi disiplin. <p>Pengukuran ini dimaksudkan sebagai acuan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan tujuan agar Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dapat melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara benar. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya</p>
16	Indeks Desa Membangun (IDM)	<p>Indeks desa dalam membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi atau lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam indeks desa membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.</p> $IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$ <p>IKS : Indeks Ketahanan Sosial IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan</p>
17	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	<p>Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri digunakan sebagai alat ukur perkembangan pembinaan desa yang dilakukan sebagai upaya peningkatan nilai desa, dapat diukur dengan menggunakan rumus yaitu:</p> <p>Jumlah Desa Berkembang yg dibina x 100%</p>
18	Persentase Infrastruktur dalam kondisi Baik	$\frac{\text{Infrastruktur dalam Kondisi Baik}}{\text{Infrastruktur seluruhnya}} \times 100\%$ <p>Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro seharusnya memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi. Sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada, untuk menyerap makin besarnya aliran barang dan orang yang beredar atau bersirkulasi di seluruh perekonomian.</p>

No	Indikator	Definisi
		Selanjutnya, Infrastruktur juga ditandai sebagai ukuran keberhasilan suatu daerah bagi pemerintah. Dan pada perhitungan pengukuran tujuan Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang dengan indikator yang telah ditetapkan sebagai pengendalian dalam capaian tingkat keberhasilan pemerintah dalam membangun daerah. Defenisi operasional untuk setiap indikator sasaran sudah terukur dengan jelas perhitungannya
19	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	$\frac{\text{Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yg terlindungi dan berkelanjutan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
20	Persentase rumah tinggal bersanitasi	$\frac{\text{Jmlh Rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jmlh Rumah tinggal}} \times 100\%$
21	Persentase ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Jmlh Rumah layak huni yg dibangun/direhab}}{\text{Target penanganan}} \times 100\%$
22	Persentase Permukiman yang Tertata	$\frac{\text{Luas Area Permukiman Tertata}}{\text{Luas Area Permukiman Keseluruhan}} \times 100\%$ Total Luas Area 5362,91 Ha
23	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik [dibagi] dengan total panjang jalan Kabupaten [dikali] 100%
24	Rasio Konektifitas Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten atau kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyemberangan) IK 1 : Angkutan jalan IK 2 : Angkutan sungai, danau dan penyemberangan
25	Rasio Konektifitas Angkutan Laut	$\frac{\text{Jmlh konektifitas yg melayani antar pulau}}{\text{Jmlh konektifitas secara keseluruhan}} \times 100\%$
26	Rasio Konektifitas Angkutan Penyeberangan	$\frac{\text{Jmlh konektifitas yg melayani penyeberangan}}{\text{Jmlh konektifitas secara keseluruhan}} \times 100\%$ (dari target 6 Jalur penyeberangan)
27	Persentase Titik Lokasi/ Desa terlayani telpon seluler dan atau internet yang memadai	$\frac{\text{Jmlh desa terlayani layanan telepon Seluler dan atau layanan internet}}{\text{Jmlh total desa}} \times 100\%$



Penetapan proyeksi indikator kinerja utama Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tertuang pada Tabel 8.3 di bawah ini.

Tabel 8. 3 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,80	70,21	71,57	72,91	74,21	75,49	76,75	76,75
2	Indeks Pendidikan	Indeks	59,4	62,6	65,8	69,0	72,2	75,4	78,6	78,6
3	Indeks Kesehatan	Indeks	72,6	72,9	73,2	73,5	73,8	74,1	74,4	74,4
4	Indeks <i>Purchasing Power Parity</i> (PPP)	Indeks	75,3	75,7	76,0	76,3	76,6	76,9	77,2	77,2
5	Pertumbuhan PDRB ADHK Non migas ^{*2}	%	-3,30	3,61-4,61	3,73-4,73	3,85-4,85	3,97-4,97	4,09-5,09	4,22-5,22	4,22-5,22
6	Pertumbuhan PDRB sektor unggulan	Persen	-1,17	0,45	0,87	1,07	4,46	5,42	6,60	6,60
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,45	73,02	73,29	73,55	73,81	74,08	74,34	74,34
8	Pertumbuhan Nilai Investasi	Persen	9,45	9,45	9,45	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	CC (51,76)	B (60,10)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	BB (75,00)	BB (75,00)
10	Nilai Predikat SAKIP	Poin	CC (53,38)	B (64,01)	B (68,00)	BB (71,00)	BB (74,00)	BB (78)	A (81)	A (81)
11	Opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	Tinggi (3,60)	Tinggi (3,70)	Tinggi (3,80)	Tinggi (3,90)	Tinggi (4,10)	Sangat Tinggi (4,25)	Sangat Tinggi (4,30)	Sangat Tinggi (4,30)
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	B (81,29)	B (82,00)	B (84,00)	B (86,00)	B (88,00)	A (89,00)	A (89,87)	A (89,87)
14	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Kurang Inovatif (31)	Inovatif (36)	Inovatif (43)	Inovatif (45)	Inovatif (47)	Inovatif (51)	Inovatif (56)	Inovatif (56)

² Kisaran angka proyeksi pesimis-moderat

NO	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
15	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	45	47	49	52	54	57	60	60
16	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	Berkembang (65,17)	Berkembang (67,34)	Berkembang (69,51)	Maju (71,68)	Maju (73,85)	Maju (76,02)	Maju (78,19)	Maju (78,19)
17	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	%	86,54	86,54	88,46	94,23	94,23	94,23	94,23	94,23
18	Persentase Infrastruktur dalam kondisi Baik	%	24,6	25,78	35,21	44,68	54,41	63,81	73,48	73,48
19	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	%	7907 sambungan rumah (2020), 54,64	56,02	57,64	59,55	61,49	63,57	65,93	65,93
20	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	44,70	46,20	47,80	49,50	52,30	53,20	55,15	55,15
21	Persentase ketersediaan rumah layak huni	%	0	0	20	40	60	80	100	100
22	Persentase Permukiman yang Tertata	%	0	0	20	40	60	80	100	100
23	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	23,66, panjang jalan kondisi baik = 69,6 km, total panjang jalan = 294,13 km	27,06	30,63	34,37	38,28	42,26	46,34	46,34
24	Rasio Konektifitas Kabupaten	Rasio	0,30	0,30	0,42	0,51	0,59	0,70	0,7	0,7

NO	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
25	Rasio Konektifitas Angkutan Laut	Rasio	0,45	0,45	0,61	0,74	0,84	1	1	1
26	Rasio Konektifitas Angkutan Penyeberangan	Rasio	0,33	0,33	0,50	0,67	0,83	1	1	1
27	Persentase Titik Lokasi/ Desa terlayani telpon seluler dan atau internet yang memadai	%	85	91	96	100	100	100	100	100

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

8.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi indikator kinerja ekonomi, kependudukan, dan beberapa indikator lainnya. Dalam penentuan Kinerja ini, terdapat tiga cara dalam memprediksi ke depan: 1. Dengan mengasumsikan; 2. Dengan menghitung; 3. Dengan memprediksikan.

Berikut beberapa bidang urusan/Indikator yang dapat di prediksi ke depan. Misalnya inflasi, PDRB dengan dan tanpa migas ketika harga yang dipakai adalah harga berlaku dan harga konstan dan lainnya.

Tabel 8. 4 Rumus Indikator Kinerja Daerah untuk Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Indikator	Definisi
1	Laju Inflasi	<p>Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.</p> $IHK_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{0i}}{\sum_{i=1}^k P_{0i} Q_{0i}} \times 100$ $NK_n = RH_n \times NK_n$ $Inflasi_n = \frac{IHK_n - IHK_{(n-1)}}{IHK_{(n-1)}} \times 100$ <p>dengan:</p> <p>$Inflasi_n$ = Inflasi pada periode ke-n IHK_n = Indeks harga Konsumen (IHK) pada periode ke-n IHK_{n-1} = Indeks harga Konsumen (IHK) pada periode ke-n-1 RH_n = Relatif Harga (RH) pada periode ke-n NK_n = Nilai Konsumsi (NK) pada periode ke-n-1</p>
2	Pertumbuhan Ekonomi	<p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) Non Migas</p> $Laju\ Pertumbuhan\ PDRB = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$
3	Indeks Gini	<p>Indeks Gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform</p>

No	Indikator	Definisi
		<p>(seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk.</p> $GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi}x(Fc_i + Fc_{i-1})$ <p>Dimana:</p> <p>GR = Indeks Gini</p> <p>f_{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i</p> <p>F_{ci} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i</p> <p>F_{ci-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)</p>
4	Persentase penduduk miskin	<p>Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Headcount Index secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin.</p> $P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$ <p>Dimana:</p> <p>P₀ = Persentase penduduk miskin</p> <p>z = Garis kemiskinan</p> <p>y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan : y_i<z</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan</p> <p>n = Jumlah penduduk</p>
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p> <p>Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu</p>

No	Indikator	Definisi																				
		<p>daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standard hidup layak.</p> <p>Indeks Pembangunan Manusia (Metode 2014)</p> <p>Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.</p> <p>Dimensi Kesehatan</p> $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>Dimensi Pendidikan</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Dimensi Pengeluaran</p> $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ <p>Kegunaan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.</p> <p>Keterangan Tambahan, Selain dari Susenas, variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh dari beberapa sumber data yaitu Proyeksi Penduduk dan Indeks Harga Konsumen.</p> <p>Interpretasi Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.</p> <p>Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen IPM</th> <th>Satuan</th> <th>Minimum</th> <th>Maksimum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Angka Harapan Hidup (AHH)</td> <td>Tahun</td> <td>20</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>Rata-rata Lama Sekolah (RLS)</td> <td>Tahun</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Harapan Lama Sekolah (HLS)</td> <td>Tahun</td> <td>0</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Pengeluaran per Kapita</td> <td>Rupiah</td> <td>1.007.436</td> <td>26.572.352</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	20	85	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18	Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352
Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum																			
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	20	85																			
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15																			
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18																			
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352																			

No	Indikator	Definisi
		<p>Sehingga rumus IPM adalah sebagai berikut</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.</p> <p>Rumusan: $IPG = IPM \text{ perempuan} / IPM \text{ laki-laki} \times 100$</p>
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<p>Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.</p>
8	Prevalensi Stunting	<p>Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: 1. Sangat pendek : Zscore < -3,0 2. Pendek : Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0</p> $PAB(5)SPstunting = \frac{JAB(5)SPstunting}{JAB(5)} \times 100\%$ <p>Keterangan: PAB(5)SPstunting : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting) JAB(5)SPstunting : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p>
9	Opini BPK	<p>Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p>

Sumber: Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017

Tabel 8. 5 Indikator Kinerja Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju inflasi	%	0,63	0,70	0,90	1,10	1,40	1,60	2,00
2	Pertumbuhan PDRB ADHK Non migas *3	%	-3,30	0,61-1,61	2,46-3,46	3,81-4,81	4,09-5,09	4,76-5,76	5,75-6,75
3	Indeks Gini	Indeks	30	28	28	27	26	25	24
4	Persentase Penduduk Miskin	%	6,56	6,29	6,15	6,00	5,85	5,70	5,56
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,80	70,21	71,57	72,91	74,21	75,49	76,75
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,27	90,38	90,42	90,47	90,52	90,57	90,62
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,57	63,52	64,01	64,50	64,99	65,47	65,75
8	Prevalensi Stunting	%	15,64	15,14	14,64	14,14	13,14	12,14	12,14
9	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

8.3. Aspek Pelayanan Umum

Untuk pelayanan umum, terdapat empat layanan urusan yaitu layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non-dasar, layanan urusan pilihan, dan layanan penunjang urusan.

8.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

Untuk indikator kinerja daerah terkait pelayanan umum wajib dasar terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

³ Kisaran angka proyeksi pesimis-moderat

**Tabel 8. 6 Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Dasar
Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026**

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
ASPEK PELAYANAN UMUM									
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR									
1	Pendidikan								
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jiwa	1.750	1.860	1.880	1.900	1.930	1.950	1.980
1.2	Angka Partisipasi Kasar								
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar SD/Paket A	%	105,16	105-108	103-105	100	100	100	100
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	106,28	106	103	100	100	100	100
1.3.	Angka Partisipasi Murni								
1.3.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	jiwa	95,84	96	98	100	100	100	100
1.3.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	jiwa	87,63	88-89	92-93	100	100	100	100
1.4.	Angka partisipasi sekolah								
1.4.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,38	100	100	100	100	100	100
1.4.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	94,86	97	98	99	100	100	100
1.5.	Angka Putus Sekolah:								
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,13	0,11	0,09	0,07	0,05	0,02	0,01
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1,28	1,26	1,05	0,84	0,63	0,42	0,21
1.6.	Angka Kelulusan:								
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL)	%	99,88	99,02	99,18	99,32	99,46	99,6	99,74

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	SD/MI								
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,16	99,28	99,40	99,52	99,64	99,76	100
1.7.	Angka Melanjutkan (AM):	%	99,18	99,32	99,46	99,60	99,74	99,88	99,56
1.7.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,16	99,28	99,40	99,52	99,64	99,76	100
1.8.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP)	Rasio	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2
1.9.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP)	Rasio	605	755	855	845	835	885	870
1.10.	Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	12,81	12,87	12,93	12,99	13,05	13,48	13,66
1.11.	Persentase angka tuntas wajib belajar	%	80	82	87	90	95	100	100
1.12.	Persentase jumlah dan kualitas sarana dan prasarana	%	75	78	84	89	90	95	100
1.14.	Persentase sekolah yang menerapkan ekstrakurikuler kebudayaan atau muatan lokal	%	34,45	34,45	44,45	60	70	80	100
1.15.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	79,41	79,41	82	85	90	95	100
2	Kesehatan								
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Kelahiran Hidup (KH)	10,3	10,2	10,1	10,1	10	10	10
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	Kelahiran Hidup	989,7	989,8	989,9	989,9	990	990	990

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		(KH)							
2.3.	Umur Harapan Hidup	Usia	67,21	67,41	67,6	67,8	67,99	68,19	68,39
2.4.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kelahiran Hidup (KH)	225/100.000 KH	215/100.000 KH	205/100.000 KH	195/100.000 KH	185/100.000 KH	183/100.000 KH	183/100.000 KH
2.5.	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Kelahiran Hidup (KH)	10,3/1000 KH	10,2/1000 KH	10,1/1000 KH	10,1/1000 KH	10/1000 KH	10/1000 KH	10/1000 KH
2.6.	Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
2.7.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
2.8.	Prevalensi Balita Stunting	%	15,64	15,14	14,64	14,14	13,14	12,14	12,14
2.9.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	%	80,29	90	90	90	90	90	90
2.10.	Persentase masyarakat yang telah mendapatkan jaminan kesehatan	%	95,56	95,56	96,51	97,47	98,44	98,44	98,44
2.11.	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	%	69,23	69,23	69,23	100	100	100	100
2.12.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM	%	25	30	55	73	82	100	100
2.13.	Persentase Posyandu Aktif	%	65	71	74	78	84	88	88
2.14.	Persentase Desa Siaga	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Aktif								
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air (SDA)	%	3 Unit	11,1% (1 Unit)	0	33,3% (3 unit)	77,7% (6 unit)	88,8% (7 unit)	100% (8 unit)
3.2.	Persentase rumah tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan	%	7.907 SR	56% (200 SR)	56,2% (235 SR)	56,54 (276 SR)	56,6% (281 SR)	56,7% (301 SR)	56,9% (341 SR)
3.3.	Persentase <i>progress</i> pembangunan TPA	%	-	5%	10%	30%	50% (1 TPA)	70%	-
3.4.	Persentase rumah tangga dengan akses system air limbah	%	47,29%	52,82%	54,20%	55,59%	56,97%	58,35%	59,73%
3.5.	Persentase Penambahan panjang saluran Drainase yang dibangun	%	7 km	5% (100m)	20% (600m)	40% (1200 m)	60% (1800 m)	80% (2400 m)	100% (3000m)
3.6.	Persentase penambahan panjang jalan lingkungan yang dibangun	%	4,5 km	10% (500m)	20% (1000m)	40% (2000 m)	60% (3000 m)	80% (4000 m)	100% (5000 m)
3.7.	Persentase peningkatan bangunan gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana	%	-	5%	25%	50%	75%	100%	100%
3.8.	Persentase kawasan yang ditangani penataannya dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana	%	-	5%	20%	60%	80%	100%	-
3.9.	Persentase Pembangunan Jalan dan Jembatan (Km)	%	217 km	13,3% (4km)	36,6% (11 km)	60% (18km)	80 % (24 km)	90% (27 km)	100% (30 km)

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.10.	Persentase penambahan tenaga kerja konstruksi yang terampil	%	-	10%	20%	40%	60%	80%	100%
3.11.	Persentase ketersediaan dokumen penataan ruang	%	-	20% (1 dokumen)	40% (2 dokumen)	60% (3dokumen)	80% (4 dokumen)	90% (5 dokumen)	100% (5 dokumen)
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
4.1.	Persentase penanganan rumah bagi rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi	%	-	-	-	40%	60%	80%	100%
4.2.	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	-	1%	20%	40%	60%	80%	100%
4.3.	Persentase penanganan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang mendapat bantuan PSU	%	-	-	-	40%	60%	80%	100%
4.4.	Persentase penanganan PSU pada Perumahan komersil	%	-	-	-	40%	60%	80%	100%
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
5.1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	85	85	86	88	90	92	95
5.2.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	90	90	92	93	94	95	100
5.3.	Persentase Penegakan PERDA	%	85	85	86	88	90	92	95
5.4.	Persentase informasi /	%	-	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti								
5.5.	Persentase Desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	%	31	55	60	70	80	90	100
6	Sosial								
6.1.	Persentase PPKS yang tertangani	%	28,83	48	60	70	85	95	100
6.2.	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	%	0	57,69	63,46	69,23	75	80,77	86,54
6.3.	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	-	50	55	60	65	69	72
6.4.	Persentase pendampingan bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga	%	-	68,06	69,15	70,21	71,28	72,34	73,4

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Keterangan:

- Angka 0 menunjukkan pencapaian awal belum ada
- Tanda (-) menunjukkan indikator tidak ditargetkan pada tahun tersebut



8.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Untuk indikator kinerja daerah terkait pelayanan umum wajib non dasar terdiri dari Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.

**Tabel 8. 7 Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Non Wajib Dasar
Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
1	Tenaga Kerja								
1.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,40	66,69	67,36	68,03	68,70	69,37	70,05
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1.	Peringkat Kabupaten Layak Anak	Peringkat	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
2.2.	Persentase perangkat daerah memiliki <i>focal point</i> aktif	%	0	16	32	48	65	81	90
2.3.	Persentase perlindungan khusus kekerasan terhadap anak	%	0	22,5	47,5	75	87,5	95	97,5
3	Pangan								
3.1.	Jumlah Cadangan Pangan yang tersedia (beras)	Kg	7.880	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
3.2.	Intensitas pengecekan terkait keamanan pangan segar	Intensitas	0	5	24	24	24	24	24
3.3.	Score Pola Pangan Harapan	Indeks	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82
3.4.	Persentase ketersediaan pangan	%	0	100	100	100	100	100	100
3.5.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	0	-	-	-	70,1	80	80
3.6.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	%	100	100	100	100	100	100	100
3.7.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100
3.8.	Persentase desa berstatus swasembada	%	0	0	1	0	1	0	2

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	terhadap total desa								
4	Pertanahan								
4.1.	Persentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten	%	0	10% (1 pemohon)	20% (2 pemohon)	40% (4 pemohon)	60% (6 pemohon)	80% (8 pemohon)	100% (10 pemohon)
4.2.	Mediasi dan fasilitasi potensi sengketa, konflik tanah dan ruang	% (jumlah pemohon)	0	10% (1 pemohon)	-	30% (3 pemohon)	60% (6 pemohon)	80% (8 pemohon)	100% (10 pemohon)
4.3.	Mediasi dan fasilitasi Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk pembangunan	% (jumlah pemohon)	0	10% (1 pemohon)	20% (2 pemohon)	40% (4 pemohon)	60% (6 pemohon)	80% (8 pemohon)	100% (10 pemohon)
4.4.	Terlaksananya Redistribusi Tanah Bidang Tanah	% (jumlah pemohon)	0	-	-	40% (4 pemohon)	60% (6 pemohon)	80% (8 pemohon)	100% (10 pemohon)
4.5.	Inventarisasi Pemilikan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Kosong	% (jumlah pemohon)	0	-	-	40% (4 pemohon)	60% (6 pemohon)	80% (8 pemohon)	100% (10 pemohon)
4.6.	Penetapan Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara	% (jumlah pemohon)	0	10% (1 pemohon)	20% (2 pemohon)	40% (4 pemohon)	60% (6 pemohon)	80% (8 pemohon)	100% (10 pemohon)
4.7.	Persentase Pencapaian Penataan ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	% (jumlah pemohon)	0	10% (1 pemohon)	20% (2 pemohon)	40% (4 pemohon)	60% (6 pemohon)	80% (8 pemohon)	100% (10 pemohon)
4.8.	Persentase Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah	%	0	10% (1 pemohon)	20% (2 pemohon)	40% (4 pemohon)	60% (6 pemohon)	80% (8 pemohon)	100% (10 pemohon)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kabupaten								
5	Lingkungan Hidup								
5.1.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Poin	60	56,6	56,7	56,8	56,9	57	57,1
5.2.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Poin	85,25	85,35	85,45	85,55	85,65	85,75	85,85
5.3.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	Poin	61	78,43	79,27	80,11	80,96	81,81	82,66
5.4.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	%	23	25	46	69	81	100	100
5.5.	Timbulan sampah yang ditangani	Ton/Tahun	523,27	592,14	660,07	729,98	801,66	864,84	930,83
5.6.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	3,23	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00	6,00
5.7.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	11,13	12,44	13,70	14,97	16,24	17,52	18,78
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
6.1.	Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	%	-	20	40	60	80	100	100
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
7.1.	Persentase Penataan Desa	%	-	50	55	61,54	73,08	80,77	90,38
7.2.	Persentase Desa Tertib Administrasi	%	-	57,69	61,54	65,38	69,23	73,08	100
7.3.	Persentase Desa yang	%	-	8	15	19	25	25	25

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Melakukan Kerjasama								
7.4.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	25	30	35	38	40	42	42
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
8.1.	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	%	55,73	57,22	58,73	60,22	61,73	63,22	64,73
8.2.	Persentase pembinaan keluarga berencana yang dilaksanakan	%	76	77	77	78	78	79	79
8.3.	Persentase Kampung Kb yang dibina	%	25	25	50	70	85	100	100
9	Perhubungan								
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	62.843	72.843	82.843	97.843	102.843	115.843	115.843
9.2.	Jumlah Pelabuhan Laut / Udara/Terminal Bis	Lokasi	158	162	164	165	166	168	169
9.3.	Persentase layanan angkutan darat	%	0	0	0	0	5	6	11
9.4.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	0	0	0	0	2	3	5
9.5.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/Unit	2,5	2,3	2,2	2,1	1,9	1,8	1,6
10.	Komunikasi dan Informatika								
10.1.	Persentase kelurahan dan desa yang terjangkau akses jaringan telekomunikasi	%	87,04%	92,59%	94,44%	96,30%	98,15%	100%	100%
10.2.	Meningkatnya kualitas layanan jaringan internet di bidang pendidikan dan kesehatan	Mbps	-	2 Titik / 10 Mbps	2 Titik / 10 Mbps	2 Titik / 10 Mbps	2 Titik / 10 Mbps	2 Titik / 10 Mbps	2 Titik / 10 Mbps
10.3.	Tersedianya pembangunan jaringan	KM	-	-	8 KM	8 KM	-	-	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	fiber optik (FO)								
10.4.	Tersedianya pembangunan tower SST/trianggel telekomunikasi	Titik	-	2 Titik	2 Titik	2 Titik	2 Titik	2 Titik	1 Titik
10.5.	Laju pemanfaatan data sektoral	Kunjungan	-	0 Kunjungan	800 Kunjungan	1600 Kunjungan	2400 Kunjungan	3200 Kunjungan	4000 Kunjungan
10.6.	Persentase pelaksanaan keamanan digital perangkat daerah	Jumlah OPD	0 OPD	0 OPD	3 OPD	5 OPD	6 OPD	7 OPD	9 OPD
11.	Koperasi, usaha kecil, dan menengah								
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	20	21	22	22	23	23	24
11.2.	Persentase BPR/LKM aktif	%	27	27	27	27	27	27	27
11.3.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	59	60	61	62	63	64	65
12.	Penanaman Modal								
12.1.	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Rp	112.418.113.533	161.164.093.505,96	176.394.393.181,58	209.733.574.519,19	249.373.982.285,91	296.506.571.175,83	352.547.390.648,18
13.	Kepemudaan dan Olah Raga								
13.2.	Jumlah prestasi yang diraih atas kepemudaan, olahraga dan kepramukaan	Jumlah prestasi	0	12	16	19	20	20	20
13.3.	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	0	550	720	950	1.000	1.500	1.500
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah prestasi	3	0	6	5	6	5	10
14.	Statistik								
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15.	Persandian								
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	%	0	0	10	16,67	20	23,34	30

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Perangkat Daerah								
16.	Kebudayaan								
16.1.	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	% Cagar Budaya	0	20	20	20	20	20	20
16.2.	Persentase peningkatan seni budaya yang dilestarikan	%	0	20	20	20	20	20	20
17.	Perpustakaan								
17.1.	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Rasio	0,76	0,09	0,21	0,58	0,72	0,80	0,87
17.2.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,0035	0,0035	0,0035	0,0036	0,0036	0,0037	0,0037
18.	Kearsipan								
18.1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban.	%	-	100	100	100	100	100	100

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

8.3.3 Layanan Urusan Pilihan

Untuk indikator kinerja daerah terkait pelayanan umum pilihan terdiri dari Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi, dan Kelautan dan Perikanan.

Tabel 8. 8 Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
LAYANAN URUSAN PILIHAN									
1. Pariwisata									
1.1	Jumlah kunjungan wisata	Jumlah	14.618	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
1.2	Lama kunjungan wisata	hari	1,62	1,62	1,7	1,8	1,9	2,0	2,0
2. Pertanian									
2.1	Persentase cakupan bina kelompok petani	%	0	6	7	8	9	10	10
2.2	Kontribusi sektor Pertanian/ 'Perkebunan' terhadap PDRB	%	27,43	27,63	27,97	28,23	28,77	29,01	29,01
2.3	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perkebunan (padi dan cengkeh)	%	0	1	1,5	2	2	2	2
2.4	Persentase peningkatan produksi peternakan (sapi dan unggas)	%	0	1,5	2	2,5	3	4	4
2.5	Produktivitas Padi	Ton/ha	4,63	4,64	4,65	4,66	4,67	4,68	4,69
2.6	Produksi Cengkeh	Ton	200	300	330	350	360	370	380
2.7	Produksi Daging	Ton	26,06	27	27,4	27,8	28,2	28,6	29
2.8	Produksi Telur	Ton	11,23	11,5	12	12,5	12,5	12,75	13
2.9	Jumlah Kelompok Tani yang Tertib	kelompok	10	15	15	15	15	15	15

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Administrasi								
2.10	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
2.11	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	%	20,28	20,5	21	21,5	22	22,5	22,5
2.12	Kontribusi sektor pertanian palawija/ tanaman hortikultura terhadap PDRB	%	1,35	1,35	1,36	1,37	1,38	1,39	1,4
2.13	Produksi sektor pertanian	Ton	148,05	150	160	170	180	190	200
2.14	Produksi sektor perkebunan	Ton	2.567	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
3.	Perdagangan								
3.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	-	9	19,57	39,13	58,70	73	100
4.	Perindustrian								
4.1	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	-	100	100	100	100	100	100
4.2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	-	5	15	33	62	88	100
5.	Transmigrasi								
5.1	Persentase Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	%	-	100	100	100	100	100	100
6.	Kelautan dan Perikanan								
6.1	Persentase cakupan bina kelompok	%	0	6	7	8	9	10	10

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	nelayan								
6.2	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	71,66	71,7	71,8	71,9	72	72,1	72,1
6.3	Persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	%	0	1	2	3	4	5	5
6.4	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	%	0	1	1	1	1	1	1
6.5	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	20.858	20.100	20.301	20.707	21.328	22.181	23.290
6.6	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	174	174	174	194	215	235	250
6.7	Unit Usaha Pengolahan Perikanan yang Tersertifikasi	Unit	N/A	5	10	15	20	25	30
6.8	Jumlah Produksi Pengolahan Ikan	Ton	N/A	750	850	1.000	1.100	1.250	1.500

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

8.3.4 Layanan Penunjang Urusan

Untuk indikator kinerja daerah terkait pelayanan umum pilihan terdiri dari Perencanaan Pembangunan, Keuangan, Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, dan sekretariat dewan.

Tabel 8. 9 Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Layanan Penunjang Urusan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
LAYANAN PENUNJANG URUSAN									
1. Perencanaan Pembangunan									
1.1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100
2. Keuangan									
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan									
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Bulan	3	3	3	3	3	3	3
4. Penelitian dan pengembangan									
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	80	80	80	80	80	80	80
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	80	82	85	87	89	91	91
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	16,13	29,03	45,16	58,06	67,74	77,42	77,42
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	12,5	29,17	50	75	83,33	100	100
5. Pengawasan									
5.1	Peningkatan Predikat Akuntabilitas	Predikat	CC	CC	B	B	B	BB	BB

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah								
5.2	Persentase Penyelesaian TLHP dari APIP	%	57,30%	58%	60%	62%	64%	66%	66%
5.3	Persentase Penyelesaian TLHP dari BPK-RI	%	85.80%	86%	87%	88%	89%	90%	90%
5.4	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
5.5	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
6	Sekretariat Dewan								
6.1	Persentase Fasilitasi Pembahasan Pembentukan Peraturan Daerah	%	77	77	80	85	90	95	95

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

8.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah, menunjukkan keunggulan komparatif daerah yang digunakan oleh banyak pihak internal untuk terus maju dan juga pihak internal yang lebih memandang sebagai wilayah yang menjanjikan dalam berinvestasi ke depan.

Tabel 8. 10 Indikator Kinerja Daerah Aspek Daya Saing Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Nilai tukar petani	Nilai tukar	102,77	100	101	101,5	102	102,5	102,5
2	Nilai tukar nelayan	Nilai tukar	103,7	108	108,5	109	109,5	110	110

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah



BAB IX
Penutup



BAB IX

PENUTUP

Pembangunan daerah 5 tahunan dijabarkan dalam dokumen RPJMD. Pembangunan daerah merupakan upaya untuk merubah keadaan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

9.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 (tahun transisi), tahun 2022 (tahun kesatu) hingga tahun 2026 (tahun kelima). Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2027 sebelum tersusunnya RPJMD tahun berikutnya.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

- a. Bupati Kepulauan Anambas berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;

- b. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berkewajiban melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 hingga tahun 2026;
- d. Pengaturan rinci target pendapatan dan rencana belanja diatur dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan;
- e. Pengaturan target fokus Pembangunan Daerah dituangkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah; dan
- f. Pengaturan kebijakan kerjasama pembiayaan Pembangunan Daerah dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan.

Semoga rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga visi jangka menengah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu: “**Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah**” dapat terwujud.

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

